BANK BNP

A member of MUFG, a global financial group

Dari Parahyangan untuk Nusantara

From Parahyangan to Nusantara

Laporan Tahunan 2017 Annual Report

Daftar Isi

Table of Contents

01 Kilas Kinerja
Performance Review

8 Tonggak Sejarah dan Jejak Langkah
Our Milestones
10 Peristiwa Penting
Event Highlights
13 Penghargaan, Peringkat & Sertifikasi
Awards, Ratings & Certifications
14 Ikhtisar Keuangan
Financial Highlights
15 Ikhtisar Data Keuangan
Key Financial Figures
16 Rasio Keuangan
Financial Ratios
17 Ikhtisar Saham dan Obligasi
Stocks and Bonds Highlights
18 Grafik Ikhtisar Saham
Chart of Shares Highlights
18 Aksi Korporasi
Corporate Action

02 Laporan kepada Pemangku Kepentingan
Management Report

20 Sambutan Presiden Komisaris
Message from the President Commissioner
24 Laporan Dewan Komisaris
Report of the Board of Commissioners
30 Laporan Komite Audit
Report of the Audit Committee
34 Laporan Direksi
Report from the Board of Directors
49 Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2017 PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk.
Statement of Members of Board of Directors and Board of Commissioners on the Responsibility for the 2017 Annual Report of PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk.

03 Profil Bank Nusantara Parahyangan
Profile Bank Nusantara Parahyangan

52 Informasi Perusahaan
Company's Information
53 Sekilas Perusahaan
Company in Brief
57 Visi dan Misi
Vision and Mission
58 Bidang Usaha
Line of Business
62 Struktur Organisasi
Organizational Structure
64 Struktur Korporat
Corporate Structure
64 Entitas Anak dan Asosiasi
Subsidiaries and Associates
65 Profil Dewan Komisaris
The Board of Commissioners Profile
69 Profil Direksi
The Board of Directors Profile
75 Profil Anggota Komite
Profiles of Committee Member
77 Daftar Nama Kepala Divisi dan Kepala Cabang
List of Head of Divisions and Branch Offices
79 Komposisi Pemegang Saham
Shareholder Composition
82 Kronologi Pencatatan Saham dan Efek
Chronology of Shares and Securities Listing
84 Lembaga Profesi Penunjang Pasar Modal
Capital Market Supporting Professional Institution
85 Nama dan Alamat Jaringan Kantor
Name and Address of Office Branch Offices
88 Peta Operasional
Operational Map

04 Unit Pendukung Bisnis
Supporting Business Unit

90 Sumber Daya Manusia
Human Resources
96 Teknologi Informasi
Information Technology
100 Bank Koresponden
Correspondent Banks

05 Analisis dan Pembahasan Manajemen
Management Discussion and Analysis

102 Analisis Makroekonomi
Macroeconomic Analysis
102 Perekonomian Global
Global Economy
103 Perekonomian Indonesia
Indonesian Economy
103 Tinjauan Industri Perbankan
Overview of the Banking Industry
104 Tentang Analisis dan Pembahasan Manajemen
Disclaimer on the Management Discussion and Analysis
107 Tinjauan Bisnis
Business Review
108 Tinjauan Operasional per Segmen Usaha
Operational Review by Business Segment
108 Penyaluran Pinjaman
Lending
108 Pinjaman Komersil
Commercial Loans
109 Pembiayaan Konsumen
Consumer Loans
109 Bisnis Kredit Tanpa Agunan (KTA)
Unsecured Loans Business
111 Pembiayaan Berdasarkan Lapangan Usaha
Lending by Business Segment
112 Pembiayaan Berdasarkan Jenis Penggunaan
Lending by Type of Use
112 Pembiayaan Berdasarkan Provinsi
Lending by Province
113 Pembiayaan Berdasarkan UMKM
Lending by SME
113 Pembiayaan UMKM Berdasarkan Lapangan Usaha
SME Lending by Business Segment
114 Pembiayaan UMKM Berdasarkan Jenis Penggunaan
SME Lending by Type of Use
115 Pembiayaan UMKM Berdasarkan Provinsi
SME Lending by Province

115 Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)
Legal Lending Limit (LLL)
116 Kegiatan Penghimpunan Dana
Funding
118 Tresuri & Financial Institution
Treasury & Foreign Exchange Transactions
119 Pengembangan Bisnis
Business Development
120 Kebijakan Suku Bunga
Interest Rate Policy
121 Operasional Bank BNP di Bandung
Bank BNP's Bandung Operations
121 Operasional Bank BNP di Jakarta
Bank BNP's Jakarta Operations
122 Segmen Operasional Wilayah Lainnya
Bank BNP's Operations in Other Regions
122 Profitabilitas
Profitability
122 Tinjauan Keuangan
Financial Review
122 Analisis Pendapatan Komprehensif
Analysis of Comprehensive Income
123 Pendapatan & Beban Bunga
Interest Income & Expenses
123 Pendapatan Bunga Bersih
Net Interest Income
123 Pendapatan Operasional lainnya
Other Operating Income
124 Beban Operasional lainnya
Other Operating Expenses
124 Pendapatan & Beban Non-Operasional
Non-Operating Income & Expenses
124 Laba Tahun Berjalan
Income for the Year
124 Analisis Posisi Keuangan
Analysis of Financial Position
124 Aset Keuangan
Financial Assets
127 Analisis Arus Kas
Analysis of Cash Flows
128 Rasio Keuangan Penting
Key Financial Ratios
129 Kemampuan Membayar Utang dan Tingkat Kolektibilitas Piutang
Solvability and Receivables Collectibility
131 Perbandingan Target dan Realisasi 2017 dan Proyeksi 2018
Comparison of 2017 Targets and Actual Achievements, and 2018 Projections
132 Kenaikan/Penurunan Material dari Pendapatan Usaha/Bersih
Material Increase/Decline in Operating/Net Income
132 Struktur Permodalan dan Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal
Capital Structure and Management's Policy on Capital Structure
134 Kebijakan Manajemen Atas Struktur Modal
Management's Policy on Capital Structure
134 Ikatan Material Terkait Investasi Barang Modal
Material Commitments Related to Investments In Capital Goods
134 Investasi Barang Modal
Investments in Capital Goods
134 Komitmen dan Kontinjensi
Commitments and Contingencies
135 Kebijakan Dividen
Dividend Policy
136 Realisasi Dana Hasil Penawaran Umum
Actual Use of Public Offering Proceeds
136 Derivatif dan Fasilitas Lindung Nilai
Derivatives and Hedging
137 Program Pemilikan Saham oleh Manajemen dan Karyawan
Management and Employee Share Option Program
137 Informasi Keuangan Luar Biasa dan Jarang Terjadi
Rare and Extraordinary Financial Events
137 Informasi Material Mengenai Investasi, Divestasi, Restrukturisasi Utang/Modal
Material Information Regarding Investments, Divestments, and Debt/Capital Restructuring
137 Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi
Material Transactions with Conflict of Interest or Transactions with Related Parties
138 Informasi dan Fakta Material Setelah Tanggal Laporan Akuntan
Subsequent Facts and Information
138 Perubahan Kebijakan Akuntansi yang Berdampak Terhadap Kinerja Keuangan
Changes in Accounting Principles Bearing Significant Impact on Financial Performance
138 Aspek Pemasaran
Marketing Aspect
140 Prospek Usaha
Business Prospect
141 Arah Kebijakan Bank
Policy Direction of the Bank
142 Tantangan Indonesia di Tahun 2018
Challenges for Indonesia in 2018
143 Langkah Strategis
Strategic Measures
143 Hal-Hal yang Berpotensi Berpengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha
Issues with Significant Potential to Affect Business Continuity
146 Perubahan Undang Undang yang Berdampak Terhadap Kinerja Keuangan
Changes in Regulations Bearing Significant Impact on Financial Performance

06 Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance

148 Penerapan Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance Implementation
149 *Roadmap* Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance Roadmap
150 Penilaian Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance Assessment
155 Struktur & Mekanisme Tata Kelola Perusahaan
GCG Structure & Mechanism
155 Rapat Umum Pemegang Saham
General Meeting of Shareholders
155 RUPS Tahunan
Annual General Meeting of Shareholders (AGMS)
158 Pemegang Saham Utama dan Pengendali
Principal and Controlling Shareholders
160 Dewan Komisaris
Board of Commissioners

167 Direksi
Board of Directors
180 Kebijakan Remunerasi
Remuneration Policy
182 Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris & Direksi
Board of Commissioners & Board of Directors Competence Enhancement
183 Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris & Direksi
Affiliations of the Board of Commissioners & the Board of Directors
184 Komite Audit
Audit Committee
191 Komite Lain di Bawah Dewan Komisaris
Other Committees Under the Board of Commissioners
202 Komite-Komite di bawah Direksi
Committees Under the Board of Directors
208 Sekretaris Perusahaan & Hubungan Investor
Corporate Secretary & Investor Relations
210 Satuan Kerja Audit Internal
Internal Audit Unit
216 Sistem Pengendalian Internal
Internal Control System
218 Akuntan Perusahaan & Auditor Eksternal
External Auditor & Accountant
222 Laporan Manajemen Risiko
Risk Management Report
239 Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Tahun 2017
Compliance Function Implementation in 2017
245 Kode Etik & Budaya Perusahaan
Code of Conduct & Corporate Culture
247 Kasus Hukum & Sanksi Administratif
Litigations & Administrative Sanctions
249 Komitmen Bank terhadap Perlindungan Konsumen
Bank's Commitment to Consumer Protection
252 Sistem Pelaporan Pelanggaran
Whistleblowing System
255 Akses Informasi & Data Perusahaan
Access to Company Information & Data
255 Kepatuhan Perpajakan
Tax Compliance
256 Kebijakan Strategi Anti-Fraud
Policy on Anti-Fraud Strategy
258 Pakta Integritas
Integrity Pact
259 Transparansi Kondisi Keuangan dan Non-Keuangan Bank
Disclosure of the Bank's Financial and Non-Financial Conditions
262 Pernyataan Kesesuaian Penerapan GCG Bank dengan Roadmap GCG OJK
Statement of Conformity of the Bank's GCG Implementation with OJK GCG Roadmap

07 Tanggung Jawab Sosial
Corporate Social Responsibility

268 Filosofi & Dasar Kebijakan CSR
CSR Philosophy & Policy
268 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Pelestarian Lingkungan
Corporate Social Responsibility towards Environmental Conservation
269 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Pengembangan Sosial & Kemasyarakatan
Corporate Social Responsibility towards Social & Community Empowerment
270 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Praktik Ketenagakerjaan, Kesehatan & Keselamatan Kerja
Corporate Social Responsibility in Employment Practices and Occupational Health & Safety
270 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kepada Nasabah
Our Responsibility towards Customers
271 Edukasi Masyarakat di Bidang Perbankan
Banking Education for the Public

Laporan Keuangan
Financial Report

Lampiran Laporan Tertentu
Attachment of Other Reports

BANK BNP

A member of MUFG, a global financial group

Tabungan Japan

Jangan sampai
nabung bikin kamu
ga bisa shopping!
Dengan Tabungan Japan, Anda tetap bisa shopping sekaligus menabung untuk masa depan Anda. Dengan menabung dengan jumlah dan waktu tertentu Anda berhak mendapatkan hadiah voucher belanja atau beragam hadiah lainnya.
Segera buka Tabungan Japan untuk dan wujudkan keinginan Anda, sekarang dan masa depan! Untuk informasi lebih lengkap kunjungi www.bankbnp.com
Dapatkan
juga Manfaat
Asuransi Jiwa s.d
Rp 1 M
per CIF

Kesinambungan Tema

Continuity of the Theme

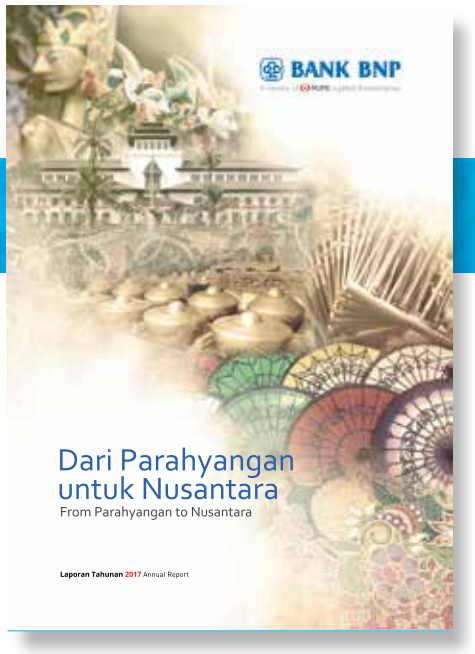

2017

Dari Parahyangan untuk Nusantara

From Parahyangan to Nusantara

Sebagai bank yang telah lama berkecimpung di industri perbankan nasional, melayani konsumen dari berbagai kalangan, terutama para pelaku usaha kecil dan menengah yang merupakan salah satu daya dorong pertumbuhan ekonomi bangsa yang utama, Bank BNP telah tumbuh menjadi salah satu bank dengan cakupan wilayah operasional yang luas dan dengan ragam produk dan layanan perbankan yang lengkap. Bank BNP telah mengandalkan keberadaannya yang berpusat di tatar Parahyangan, Jawa Barat, untuk mendukung pergerakan sektor-sektor bisnis dan industri yang menjadi urat nadi ekonomi kawasan tersebut. Namun, terlebih dari itu, Bank BNP juga terus memperluas jangkauannya ke kawasan-kawasan lain di seluruh Indonesia, dengan membidik jenis-jenis usaha yang relevan dengan kondisi ekonomi, sosial, dan geografis di masing-masing wilayah. Berpusat di bumi Parahyangan hampir selama setengah abad, kami melayani nasabah dari generasi ke generasi dan kami menciptakan sebuah hubungan yang tak tergantikan. Melalui perluasan bisnis dan pematangan kapabilitas internal dalam bentuk penerapan sistem-sistem tercanggih dan pengembangan sumber daya manusia yang berkelanjutan, Bank BNP berharap dapat terus berinteraksi, melayani, dan bertumbuh bersama masyarakat di seluruh Indonesia—diawali dari Parahyangan, hingga ke seantero Nusantara. Dengan demikian nama Bank BNP akan semakin dikenal: Bank Nusantara Parahyangan.

As a bank with a long-standing experience in the national banking industry, serving customers from all walks of life, and in particular small and medium businesses that are one of the key drivers of the nation's economic progress, Bank BNP has grown from its humble beginnings into a bank with an extensive operational coverage and with a comprehensive range of banking products and services. Bank BNP has been relying on its primary presence in the land of Parahyangan, West Java, to boost the various businesses and industries that are the lifeblood of the region's economy. But more than that, Bank BNP is also extending its coverage to other regions across Indonesia, by targeting businesses that are relevant to each region's economic, social, and geographic conditions. Having based its business in Parahyangan for more than half a century, we the Bank has served generation after generation of customers, weaving irreplaceable relationships through its dealings with them. By expanding its business and cultivating its internal capabilities, through the implementation of the most advanced systems and the relentless development of its human capital, Bank BNP hopes to continue to interact with, serve, and grow together with the Indonesian people across the nation—starting from Parahyangan, to all the corners of this vast Nusantara. This is how Bank BNP will be known more and more widely in the future: as Bank Nusantara Parahyangan.

2016

Fine-Tuning Our Strengths

Menata Kembali Kekuatan Seluruh Lini Usaha

Berlandaskan pada berbagai perbaikan terhadap kebijakan, sistem, dan prosedur operasi yang telah dijalankan di tahun sebelumnya, Bank BNP mengarungi kerasnya situasi bisnis sepanjang 2016 dengan terus menyempurnakan baik tata kelola internalnya maupun kinerja pengumpulan dana pihak ketiga dan penyaluran kreditnya. Strategi ini memampukan Bank BNP untuk bersiap membukukan kinerja bisnis yang lebih baik di tahun-tahun mendatang.

Grounded on the various improvements in policies, systems, and operating procedures carried out in the previous year, in 2016 Bank BNP navigated through the tough business situation by continuously fine-tuning both its internal governance as well as its funding and lending performance. This strategy will enable Bank BNP to perform excellently in the coming years.

2015

Reinforcing the Business Fundamentals

Memperkuat Landasan Bisnis

Menghadapi iklim perekonomian yang terus menghadirkan tantangan dan menuntut kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan, Bank BNP terus berupaya memperkokoh fundamental bisnisnya agar semakin siap dalam menghadirkan produk dan layanan perbankan yang tepat sasaran dan memuaskan bagi setiap nasabahnya. Ini dilakukan seiring Bank BNP mulai menyeimbangkan fokusnya ke segmen-segmen yang diyakini akan menghadirkan tingkat pertumbuhan yang baik bagi Bank, dengan terus mempertimbangkan setiap aspek risiko dan menjalankan praktik tata kelola yang baik secara disiplin.

Facing the current economic climate that brings forth challenge upon challenge and calls for the ability to adeptly adapt to change, Bank BNP continues to strengthen its business fundamentals so as to be more prepared to offer effective products and services to satisfy its customers' needs. This measure is in line with Bank BNP's shifting of focus towards segments that are believed to boost the Bank's growth rate, as the Bank carefully considers every aspect of risk in its conduct guided by the disciplined implementation of good corporate governance practices.

Sanggahan dan Batasan Tanggung Jawab

Disclaimer

Laporan Tahunan 2017 PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk ('Bank BNP' atau 'Bank') memuat pernyataan kondisi keuangan, hasil operasi, kebijakan, proyeksi, rencana, strategi, serta tujuan Bank yang digolongkan sebagai pernyataan ke depan dalam pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku, kecuali hal-hal yang bersifat historis. Pernyataan-pernyataan tersebut memiliki prospek risiko, ketidakpastian, serta dapat mengakibatkan perkembangan aktual secara material berbeda dari yang dilaporkan.

Pernyataan-pernyataan prospektif dalam laporan tahunan ini dibuat berdasarkan berbagai asumsi mengenai kondisi terkini dan kondisi mendatang Bank serta lingkungan bisnis di mana Bank menjalankan kegiatan usaha. Bank tidak menjamin bahwa dokumen-dokumen yang telah dipastikan keabsahannya akan membawa hasil-hasil tertentu sesuai harapan. Pihak-pihak yang mengandalkan isi dari Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan ini sepenuhnya menanggung risiko mereka sendiri.

Bank BNP telah melakukan segala upaya untuk memastikan akurasi informasi dalam Laporan Tahunan 2017 ini. Namun, Bank tidak menjamin kesesuaian, ketepatan, ataupun kegunaan dari informasi ini.

The 2017 Annual Report of PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk ('Bank BNP' or 'Bank') contains financial condition, operation results, projections, plans, strategies, policy, as well as objectives of the Bank's, which are categorized as forward-looking statements by the prevailing laws and regulations, excluding matters of historical quality. Such forward-looking statements are subject to known and unknown risks, uncertainties, and other factors that could cause actual results to differ materially from what is reported.

Prospective statements in this annual report are prepared based on various assumptions related to current conditions and future events of the Bank and the business environment in which the Bank conducts its business. The Bank shall have no obligation to guarantee the validity of documents presented to bring certain results as per expectations. Parties relying on this Annual Report and the accompanying Financial Statements are hereby informed that they do so at their own risk.

Bank BNP has strived to ensure the accuracy of information presented in this 2017 Annual Report. However, the Bank does not guarantee the suitability, verifiability, nor usability of such information herein presented.

Kilas Kinerja
Performance Review

8 Tonggak Sejarah dan Jejak Langkah
Our Milestones

10 Peristiwa Penting
Event Highlights

13 Penghargaan, Peringkat & Sertifikasi
Awards, Ratings & Certifications

14 Ikhtisar Keuangan
Financial Highlights

15 Ikhtisar Data Keuangan
Key Financial Figures

16 Rasio Keuangan
Financial Ratios

17 Ikhtisar Saham dan Obligasi
Stocks and Bonds Highlights

18 Grafik Ikhtisar Saham
Chart of Shares Highlights

18 Aksi Korporasi
Corporate Action

Tonggak Sejarah dan Jejak Langkah

Our Milestones

1972

Didirikan dengan nama PT Bank Pasar Karya Parahyangan pada 18 Januari.

Established under the name of PT Bank Pasar Karya Parahyangan on 18 January.

1989

Perubahan status menjadi bank umum dan berganti nama menjadi PT Bank Nusantara Parahyangan di bulan Juli.

Changedits status into a commercial bank, with its name changed to PT Bank Nusantara Parahyangan in July.

1994

Memperoleh izin operasional sebagai bank devisa di bulan Agustus.

Obtained permit to operate as a foreign exchange bank in August.

2000

Menjadi perusahaan publik dengan melakukan Penawaran Umum Saham Perdana sebanyak 50.000.000 lembar saham, dan mengubah status menjadi PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk. di bulan Desember.

Went public through the Initial Public Offering of 50,000,000 of its shares, and changed its status to PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk. in December.

2001

Mencatatkan saham hasil penawaran umum perdana di Bursa Efek Indonesia di bulan Januari.

Listed its shares from the Initial Public Offering on the Indonesia Stock Exchange in January.

2004

Exercise waran terhadap saham sebanyak 8.275.000 lembar saham.

Exercised warrants on the 8,275,000 shares.

2006

Menerbitkan saham baru melalui Penawaran Umum Terbatas (PUT) I di bulan Juli sebanyak 158.275.000 lembar saham.

Issued 158,275,000 new shares through the Rights Issue I in July.

2007

ACOM Co Ltd dan The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd mengakuisisi saham Bank pada 17 Desember.

ACOM Co Ltd and The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd acquired the Bank's shares on 17 December.

2008

Penawaran tender atas kepemilikan saham Bank oleh ACOM Co Ltd berkaitan dengan praktik akuisisinya di bulan Januari hingga Maret.

Tender offering of the ownership of the Bank's shares by ACOM Co Ltd, related to its acquisition, from January to March.

2010

Melaksanakan PUT II di bulan Oktober, dengan menerbitkan saham baru sebanyak 99.963.158 lembar.

Conducted Rights Issue II in October, whereby 99,963,158 new shares were issued.

2013

Menerbitkan saham baru melalui PUT III di bulan Mei.

Issued new shares through the Rights Issue III in May.

Peristiwa Penting
Event Highlights

Januari / January

Pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2017 bertempat di Kavaleri Kuda Parongpong, Cimahi, Bandung, Bank BNP merayakan acara ulang tahun yang ke-45 dengan tema REBORN. Acara diisi dengan kegiatan *outbound* dan *team building*, yang dihadiri oleh karyawan Bank BNP dari area Bandung, Jakarta, Bogor, Bekasi, Cikarang, Karawang, Sukabumi, Cikampek, Cirebon dan Tasikmalaya.

On Saturday, 21 January 2017, at the Parongpong Cavalry Stables, Cimahi, Bandung, Bank BNP celebrated its 45th anniversary, with REBORN as the celebration's theme. In the event, the participants from Bank BNP branches in Bandung, Jakarta, Bogor, Bekasi, Cikarang, Karawang, Sukabumi, Cikampek, Cirebon, and Tasikmalaya, took part in outbound and team building activities.

Februari / February

Bank BNP merelokasi 1 kantor cabang pembantu, yaitu KCP Pasteur ke Pasirkaliki, pada 6 Februari 2017, dan membuka 2 kantor kas yaitu KK Pandaan dan Pasuruan pada tanggal 9 Februari 2017.

Bank BNP relocated its sub-branch office in Pasteur to Pasirkaliki on 6 February 2017, and opened two new cash offices in Pandaan and Pasuruan on 9 February 2017.

Maret / March

Bank BNP membuka beberapa kantor kas antara lain KK Cibinong Bogor, KK Jatiwangi Majalengka, KK Kosambi Karawang dan KK Gresik.

Bank BNP opened new cash offices, among others, in Cibinong, Bogor, in Jatiwangi, Majalengka, in Kosambi, Karawang, and in Gresik.

Mei / May

Pada 15 Mei 2017, Bank BNP membuka 2 kantor kas, yaitu KK Rungkut Surabaya dan KK Ungaran Semarang. Sedangkan KCP MTC Bandung direlokasi ke KCP A. H. Nasution Bandung pada tanggal 22 Mei 2017.

On 15 May 2017, Bank BNP opened 2 cash offices, namely Rungkut, Surabaya and Ungaran, Semarang. Its sub-branch office in MTC Bandung was then relocated to KCP A. H. Nasution Bandung, on 22 May 2017.

Juni / June

Bank BNP menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Paparan Publik pada tanggal 2 Juni 2017 bertempat di Hotel Hilton Bandung. Salah satu agenda RUPST 2017 yaitu pengangkatan Sdr. Hideki Nakamura sebagai Presiden Direktur menggantikan Sdr. Takeru Agawa.

Bank BNP held the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) and Public Expose on 2 June 2017 at Hilton Hotel, Bandung. One of the agendas in the 2017 AGMS was the appointment of Mr. Hideki Nakamura as President Director, replacing Mr. Takeru Agawa.

Pada tanggal 2 Juni 2017, Bank BNP meresmikan pembukaan Kantor Cabang Pembantu Asia Afrika Bandung yang terletak di Jalan Asia Afrika No. 141 – 149 Bandung.

On 2 June 2017, Bank BNP inaugurated its sub-branch office in Asia Afrika Bandung, located on Jalan Asia Afrika No. 141 – 149 Bandung.

September / September

Sesuai dengan arahan Presiden Direktur Hideki Nakamura, Bank BNP membentuk komunitas pengusaha Bank BNP bernama *BNP Business Club*. Komunitas ini dibentuk sebagai wujud nyata komitmen Bank BNP sebagai mitra dunia usaha nasabah. Pertemuan pertama BNP Business Club tersebut diadakan pada tanggal 20 September 2017 bertempat di KCP Asia Afrika Bandung.

Under the guidance of the President Director, Hideki Nakamura, Bank BNP established the BNP Business Club. This community was established to manifest Bank BNP's strong commitment to becoming its customers' business partner. The first meeting of the BNP Business Club was held on 20 September 2017 at its Asia Afrika Bandung sub-branch office.

Oktober / October

Untuk meningkatkan *brand awareness*, Bank BNP menambahkan *endorsement line* MUFG pada logo Bank BNP. Peresmian endorsement line ini dilakukan pada tanggal 22 Oktober 2017 di Kantor Pusat Bank BNP.

To improve brand awareness, Bank BNP added the MUFG endorsement line on its logo. The inauguration of this endorsement line was held on 22 October 2017 at the head office.

Oktober / October

Pada tanggal 22 Oktober 2017, Bank BNP melakukan kegiatan Edukasi dan Kampanye Program Inklusi Keuangan bertema "Bugar Bersama Bank BNP", untuk mendukung "Bulan Inklusi Keuangan" yang diinisiasi oleh OJK.

On 22 October 2017, Bank BNP conducted the Financial Inclusion and Education Program and Campaign themed "Get Fit with Bank BNP" to support the "Financial Inclusion Month" movement initiated by the OJK.

Pada tanggal 25 Oktober 2017 di The Papandayan Hotel Bandung, Bank BNP mengadakan acara *talkshow* akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan pada event *BNP Business Club*.

On 25 October 2017, at The Papandayan Hotel Bandung, Bank BNP held a talkshow on access to financial information for taxation purposes, during the event of BNP Business Club.

November / November

Bertempat di Hotel Holiday Inn Jakarta, Bank BNP pada tanggal 22 November 2017 telah mengadakan acara *gathering* bersama nasabah yang berdomisili di wilayah Jakarta yang dikemas dalam kegiatan *talkshow* yang mengambil tema "Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan (Perppu No. 1 Tahun 2017)". Kegiatan ini terselenggara atas kerja sama Bank BNP dengan kantor Direktorat Jenderal Pajak Jakarta.

At Holiday Inn Hotel in Jakarta, Bank BNP on 22 November 2017 conducted a customer gathering involving customers from Jakarta, which featured a talkshow themed "Access to Financial Information for Taxation Purposes (Perppu No. 1/2017)", held in partnership between the Directorate General of Tax in Jakarta.

Desember / December

Bank BNP menggelar *customer gathering* di Kantor Cabang Pembantu Asia Afrika Bandung pada tanggal 6 Desember 2017. Acara yang dikemas dalam bentuk diskusi ini membahas tentang pengaruh kebijakan pemerintah terhadap perpajakan dan perizinan perusahaan serta prospek bisnis tekstil di tahun 2018 yang akan datang. Acara tersebut turut dihadiri oleh Presiden Direktur Bank BNP Hideki Nakamura dan Direktur Bisnis Kevin Cahyadi Tatang.

Bank BNP held a customer gathering in Asia Afrika Bandung sub-branch office on 6 December 2017. The event featured a discussion on the effects of the government's policy on taxes and business licenses as well as the textile business' prospect in 2018. The event was also attended by the President Director of Bank BNP, Hideki Nakamura, and Business Director, Kevin Cahyadi Tatang.

Penghargaan, Peringkat & Sertifikasi

Awards, Ratings & Certifications

PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk meraih prestasi untuk tingkat keberhasilan proses transaksi secara "*Straight Through Process* (*STP*)" sepanjang tahun 2016 sebesar lebih dari 99% untuk seluruh transaksi *remittance* yang dilakukan via SWIFT melalui bank koresponden Standard Chartered Bank New York. Prestasi ini mengulang sukses pada tahun 2014.

PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk recorded an achievement of "Straight Through Process (STP)" for more than 99% of its remittance transactions throughout 2016 conducted via SWIFT network through its correspondent bank, Standard Chartered Bank New York. This was a repeat of the 2014's success.

PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk meraih penghargaan dari Bank Indonesia untuk ketiga kalinya selama 3 tahun berturut-turut atas keberhasilan dalam ketepatan penyampaian laporan Setoran Bayaran, Kualitas Uang Setoran, dan Optimalisasi Pelaksanaan TUKAB.

PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk received an award from Bank Indonesia for the third year in a row for its timeliness of reporting, related to submission of Payments, Quality of Payments, and TUKAB Implementation Optimization.

Ikhtisar Keuangan

Financial Highlights

Dinyatakan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain

Expressed in thousand of rupiah, unless otherwise stated

Keterangan	Berdasarkan Laporan Akuntan Publik/ Based on Public Accountant's Report			Description
	2017	2016	2015	
Neraca				Balance Sheets
Total Aset	7.581.032	7.705.782	8.613.114	Total Assets
Kredit yang Diberikan	5.844.252	5.313.629	6.477.703	Total Loans
Surat Berharga	665.846	1.012.183	568.715	Marketable Securities
Aset Produktif	7.013.569	7.111.379	7.871.879	Earning Assets
Dana Pihak Ketiga	6.218.180	6.312.303	7.183.830	Third Party Fund
Giro	367.304	553.893	674.911	Current Accounts
Tabungan	1.073.119	931.836	977.426	Saving Accounts
Deposito	4.777.757	4.826.574	5.531.493	Time Deposits
Simpanan dari Bank Lain	93.038	53.358	69.615	Deposits from Other Banks
Total Liabilitas	6.443.183	6.508.273	7.417.621	Total Liabilities
Pinjaman Subordinasi	80.510	79.946	81.800	Subordinated Loans
Ekuitas	1.137.848	1.197.510	1.195.493	Equity
Laba Rugi				Profit and Loss
Pendapatan Bunga	824.900	905.311	1.006.417	Interest Income
Beban Bunga	(367.812)	(419.598)	558.732	Interest Expense
Pendapatan Bunga Bersih	457.088	485.713	447.685	Net Interest Income
Pendapatan Operasional Lainnya	43.793	41.146	38.964	Other Operating Income
Beban Operasional Lainnya	(567.329)	(510.375)	399.640	Other Operating Expenses
Laba Operasional Bersih	(66.448)	16.485	87.009	Net Operating Income
Laba Sebelum Pajak	(69.132)	12.073	90.315	Income Before Tax
Laba Bersih	(59.661)	8.109	66.867	Net Income
Laba Bersih per Saham Dasar (dalam Rupiah penuh)	(88)	12	99	Earning Per Share (in full Rupiah)
Jumlah Saham (dalam lembar)	676.833.882	676.833.882	676.833.882	Total Number of Shares

Ikhtisar Data Keuangan

Key Financial Figures

KREDIT YANG DIBERIKAN
Loans

LABA SEBELUM PAJAK
Profit Before Tax

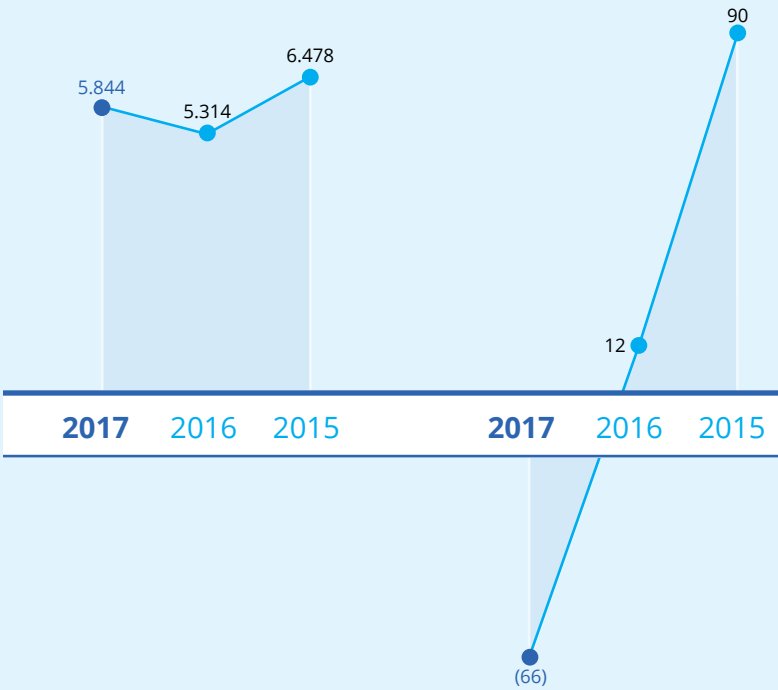

DANA PIHAK KETIGA
Third Party Funds

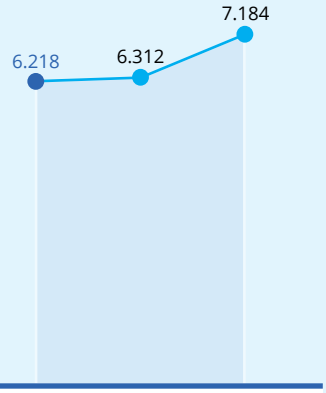

TOTAL ASET
Total Assets

TINGKAT KECUKUPAN MODAL
Capital Adequacy Ratio

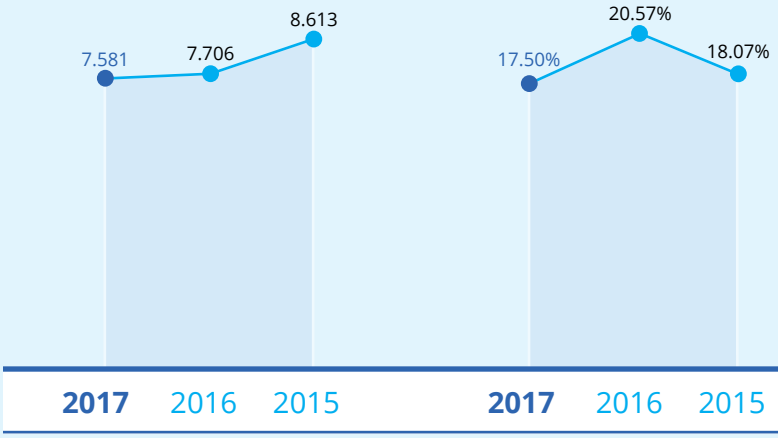

PENDAPATAN BUNGA
Interest Income

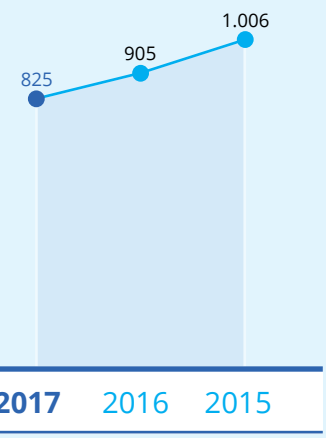

Rasio Keuangan
Financial Ratios

Keterangan	Berdasarkan Laporan Akuntan Publik/ Based on Public Accountant's Report			*Description*
	2017	2016	2015	
Rasio Keuangan				**Financial Ratios**
Imbal Hasil Terhadap Aset	-0,90%	0,15%	0,99%	Return on Asset
Imbal Hasil Terhadap Ekuitas	-5,27%	0,70%	5,71%	Return on Equity
Marjin Bunga Bersih	6,12%	6,13%	5,18%	Net Interest Margin
Kredit yang Diberikan Terhadap Dana Masyarakat (LDR)	93,99%	84,18%	90,17%	Loan to Deposit Ratio
Rasio Kredit Bermasalah Bersih	4,50%	4,07%	3,98%	Net Non-Performing Loan
Tingkat Kecukupan Modal	17,50%	20,57%	18,07%	Capital Adequacy Ratio
Biaya Operasional terhadap Pencapaian Operasional (BOPO)	108,42%	98,52%	91,91%	Operating Expense to Operationg Income
Kepatuhan				**Compliance**
Persentase Pelanggaran BMPK				Percentage of Legal Lending Limit Violation
Pihak Terkait	0,00%	0,00%	0,00%	Related Parties
Pihak Tidak Terkait	0,00%	0,00%	0,00%	Third Parties
Persentase Pelampauan BMPK				Percentage of Excess of Legal Lending Limit
Pihak Terkait	0,00%	0,00%	0,00%	Related Parties
Pihak Tidak Terkait	0,00%	0,00%	0,00%	Third Parties
Giro Wajib Minimum				**Minimum Reserve Requirement**
GWM Utama Rupiah	7,10%	6,68%	7,63%	Minimum Primary Reserve Requirement in Rupiah
GWM Sekunder	8,48%	15,16%	7,16%	Minimum Secondary Reserve Requirement
GWM Valuta Asing	8,37%	8,10%	8,21%	Minimum Reserve Requirment in Foreign Exchange
Posisi Devisa Netto Secara Keseluruhan	0,73%	0,25%	0,74%	Overall Net Open Position
Lainnya				**Others**
Jumlah Karyawan	1.566	1.667	1.511	Total Employees
Jumlah Kantor	63	62	68	Total Offices
Jumlah Anjungan Tunai Mandiri	54	64	72	Total ATM

Komposisi Pendanaan Desember 2017
Funding Composition as at December 2017

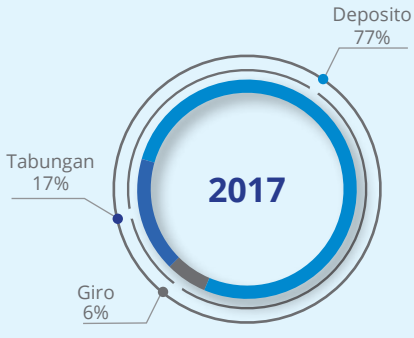

Komposisi Kredit Desember 2017
Loan Composition as at December 2017

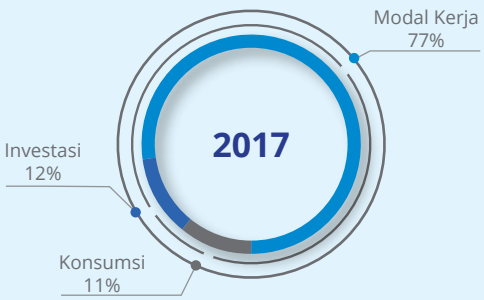

Ikhtisar Saham dan Obligasi

Stocks and Bonds Highlights

Saham

Bank BNP telah mengeluarkan sejumlah saham hingga akhir tahun 2017 seluruhnya adalah 676.833.882 lembar saham, terdiri dari saham biasa bersifat ekuitas yang ditatakelolakan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dengan harga nominal per lembar saham sebesar Rp500 (lima ratus rupiah).

Jumlah saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dan dapat diperjualbelikan adalah 99% dari total saham yang diterbitkan Bank BNP.

Berikut adalah kronologis pencatatan saham dan perubahan jumlah saham:

Shares

Bank BNP has issued 676,833,882 shares by end of 2017, consisting of equity-based common share managed by the Indonesia Central Securities Depository (KSEI) with a nominal price of Rp500 (five hundred rupiah) per share.

The total number of shares listed on the Indonesia Stock Exchange available for trading amounted to 99% of the total shares issued by Bank BNP.

The chronology of share listing and changes to the number of shares is as follows:

Informasi Harga Saham per Triwulan 2016

Share Price Information by Quarter 2016

Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain

Expressed in rupiah, unless otherwise stated

Periode	Harga Saham Tertinggi/ *Highest* (Rp)	Harga Saham Terendah/ *Lowest* (Rp)	Harga Penutupan/ *Closing Price* (Rp)	Volume Perdagangan/ *Trade Volume*	Kapitalisasi Pasar/ *Market Capitalization* (Rp)	Period
Q1 – 2016	1.860	1.860	1.860	0	1.246.321.909.980	Q1 – 2016
Q2 – 2016	1.860	1.860	1.860	0	1.246.321.909.980	Q2 – 2016
Q3 – 2016	1.910	1.910	1.910	200	1.279.825.187.130	Q3 – 2016
Q4 – 2016	1.910	1.910	1.910	0	1.279.825.187.130	Q4 – 2016

Informasi Harga Saham per Triwulan 2017

Share Price Information by Quarter 2017

Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain

Expressed in rupiah, unless otherwise stated

Periode	Harga Saham Tertinggi/ *Highest* (Rp)	Harga Saham Terendah/ *Lowest* (Rp)	Harga Penutupan/ *Closing Price* (Rp)	Volume Perdagangan/ *Trade Volume*	Kapitalisasi Pasar/ *Market Capitalization* (Rp)	Period
Q1 – 2017	1.910	1.910	1.910	1.300	1.279.825.187.130	Q1 – 2017
Q2 – 2017	1.910	1.450	1.450	200	971.595.037.350	Q2 – 2017
Q3 – 2017	1.450	1.450	1.450	0	971.595.037.350	Q3 – 2017
Q4 – 2017	1.450	1.450	1.450	0	971.595.037.350	Q4 - 2017

Obligasi

Hingga akhir tahun 2017 Bank BNP tidak menerbitkan obligasi.

Bonds

Up to the end of 2017 Bank BNP had not issued any bonds.

Grafik Ikhtisar Saham

Chart of Shares Highlights

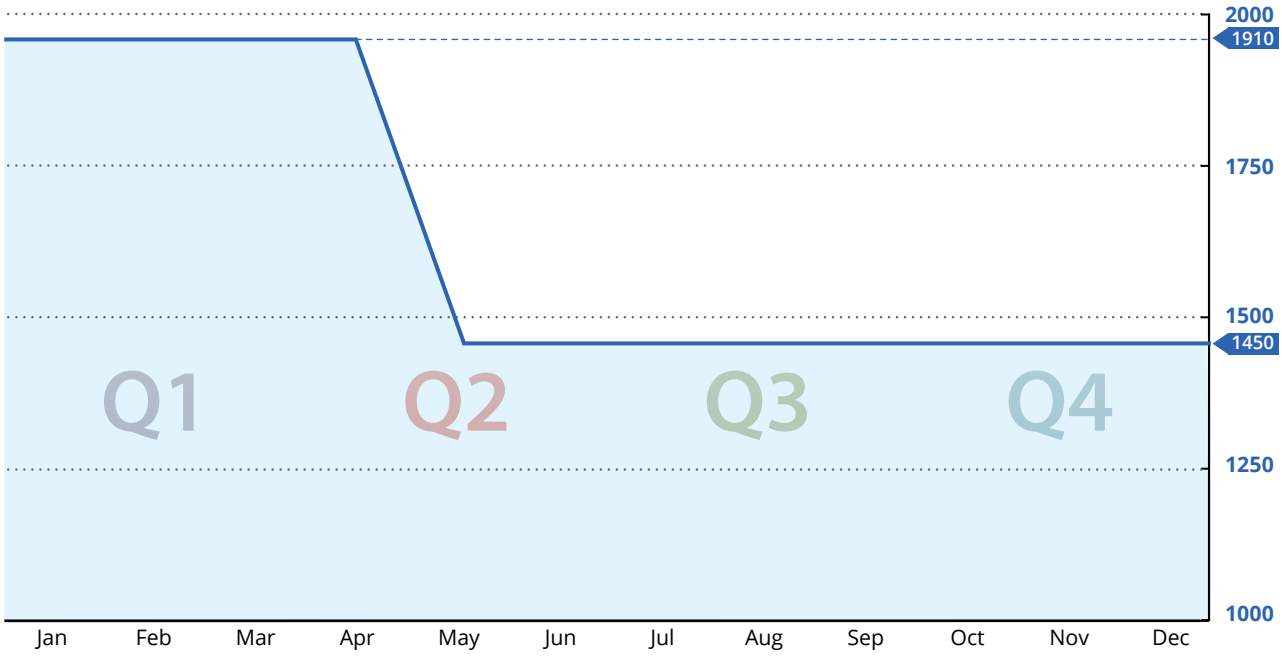

Aksi Korporasi

Corporate Actions

Bank BNP pada tahun 2017 menyelenggarakan aksi korporasi sebagai berikut:

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) sebanyak 1 (satu) kali
- Paparan Publik sebanyak 1 (satu) kali

In 2017 Bank BNP conducted the following corporate actions:

- 1 (one) Annual General Meeting of Shareholders (AGMS)
- 1 (one) Public Expose

Laporan kepada Pemangku Kepentingan

Management Report

20 Sambutan Presiden Komisaris
Message from the President Commissioner

24 Laporan Dewan Komisaris
Report of the Board of Commissioners

30 Laporan Komite Audit
Report of the Audit Committee

34 Laporan Direksi
Report from the Board of Directors

49 Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2017 PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk.
Statement of Members of Board of Directors and Board of Commissioners on the Responsibility for the 2017 Annual Report of PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk.

Sambutan Presiden Komisaris

Message from the President Commissioner

... Dewan Komisaris akan dengan serius mendampingi Direksi dalam hal memperbaiki kinerja keuangan Bank di masa yang akan datang ...

... the Board of Commissioners will work together with the Board of Directors to improve the Bank's financial performance in the future ...

Michio Atsuda

Presiden Komisaris
President Commissioner

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang terhormat,

Kondisi perekonomian nasional di 2017 masih belum menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, namun secara umum terjadi tren pergerakan positif yang tercermin dari pergerakan pertumbuhan ekonomi Indonesia dari semula 4,88% pada tahun 2015, meningkat menjadi 5,02% di 2016 dan 5,1% di 2017. Dalam tren pergerakan pertumbuhan ekonomi nasional seperti ini, sektor riil dan sektor perbankan nasional mengalami masa pemulihan yang cukup berat. Pertumbuhan perekonomian Indonesia juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global maupun regional seperti perlambatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Tiongkok, Inggris, Jepang, dan Singapura.

Kondisi perbankan nasional mengalami proses pertumbuhan kredit yang melambat di 2017, yaitu sebesar 7–9%, yang disebabkan oleh adanya konsolidasi yang dilakukan perbankan nasional sehubungan dengan risiko kredit. Salah satu faktor pendorongnya adalah penghapusan buku terhadap kredit bermasalah, terutama untuk segmen kredit berbasis komoditas beserta turunannya. Kredit bermasalah perbankan yang naik beberapa waktu lalu mulai direstrukturisasi, di mana penghapusannya cukup besar, terutama untuk segmen komersial.

Bank BNP telah berupaya secara optimal dalam mengatasi tantangan di sepanjang 2017 dengan memaksimalkan segala sumber daya organisasi yang ada, di antaranya pemberdayaan unit-unit kerja dan penyempurnaan dalam sistem proses persetujuan kredit agar dapat menopang capaian kinerja dengan kualitas baik, serta senantiasa berusaha sebaik-baiknya untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Esteemed Shareholders and Stakeholders,

The national economic condition in 2017 was yet to demonstrate a full-scale growth. However, in general there were some positive signs, as reflected by the improvement in Indonesia's economic growth rate, from 4.88% in 2015, to 5.02% in 2016, and then becoming 5.1% in 2017. In such an economic trend, the country's real sector and banking sector received certain pressures even as they were slowly recovering. Indonesia's economic growth was also affected by the global and regional economic developments, among others the slowing down of growth in China, the United Kingdom, Japan, and Singapore.

The national banking industry experienced a slowing down of credit lending in 2017, growing only at a pace of 7 to 9%, owing to the consolidation taking place in many banks to reinforce themselves in the face of rising credit risk. One of the driving factors for this was the write-off of non-performing loans, especially in the commodity-based lending segment and its derivatives. Non-performing loans in banking, which had been rising in the past, had begun to be restructured and this involved large write-offs, especially in the commercial segment.

Bank BNP has strived to the best of its ability to overcome the challenges throughout 2017 by maximizing the use of all of its resources in the organization, among others by empowering work units and by improving lending approval processes and system so as to achieve a better performance from better lending quality, while taking pains making every best effort to ensure compliance with the prevailing regulations.

Secara umum manajemen belum berhasil merealisasikan rencana bisnisnya di 2017 sesuai dengan yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh dampak yang ditimbulkan sebagai akibat dari menurunnya kualitas aktiva produktif, khususnya perkreditan Bank, sehingga rasio *Non-Performing Loans* (NPL) neto meningkat dari semula 4,07% di 2016, menjadi 4,50% pada akhir 2017. Kondisi ini mendorong Bank BNP untuk membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang lebih besar, sehingga dapat mempengaruhi capaian laba Bank BNP secara keseluruhan.

In general, the management was not able to accomplish its business plans in 2017 as formulated at the beginning of the year. This was owing to the effects from the declining earning assets' quality, in particular in the Bank's lending which led to an increase in Non-Performing Loans (NPL) net from 4.07% in 2016 to 4.50% by end of 2017. This required Bank BNP to make a larger provision for Allowance for Impairment Losses (CKPN), and thus it affected Bank BNP's profitability on the whole.

Deviasi atas pencapaian beberapa target pada Rencana Bisnis Bank (RBB) Bank BNP tahun 2017 terjadi antara lain pada total aset sebesar Rp7,58 triliun atau 96,82% dari target, penghimpunan dana pihak ketiga sebesar Rp6,22 triliun atau 97,31% dari target dan penyaluran kredit sebesar Rp5,62 triliun atau sama dengan tercapai sebesar 103,93% dari target. Sementara itu, perolehan laba bersih setelah pajak menurun sebesar Rp59,66 miliar atau minus 757,99% dari target yang disebabkan oleh adanya kenaikan biaya terhadap pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas kredit bermasalah dan adanya kekurangan bayar pajak tahun 2013 dan 2014 yang menjadi beban pajak tahun 2017.

Deviations from the targets stated in the Bank's Business Plans (RBB) for 2017 were seen, among others, in total assets, amounting to Rp7.58 trillion or 96.82% of the target, third party funds by Rp6.22 trillion or 97.31% of the target, while total lending of Rp5.62 trillion, was above target, achieving 103.93%. Net income after tax was down by Rp59.66 billion or negative 757,99% off the target, owing to the rise in expenses related to the provision for CKPN on non-performing loans and the tax underpayment for the tax years of 2013 and 2014, which had to be recorded in the 2017 financial statements.

Dalam hal rasio keuangan, beberapa indikator rasio keuangan tertentu mengalami penurunan antara lain adalah ROA menurun 0,90%, ROE menurun 5,27%, sedangkan *Net Interest Margin* (NIM) masih membukukan margin positif 6,12%, NPL kotor dan bersih sebesar masing-masing 6,57% dan 4,50%. Hal tersebut mencerminkan kinerja keuangan secara menyeluruh sekalipun terdapat perolehan rasio NIM yang masih positif.

In terms of financial ratios, certain indicators were down, among others ROA that dropped by 0.90% and ROE which ended the year 5.27% lower, while Net Interest Margin (NIM) remained in positive territory at 6.12%, and NPL gross and net each at 6.57% and 4.50%. This reflected the general financial achievement of Bank BNP that was lower than the targets, despite the positive NIM.

Dewan Komisaris senantiasa memberikan masukan dan arahan kepada Direksi untuk mengantisipasi dan mengatasi kondisi tersebut. Kami percaya bahwa Direksi telah melakukan upaya terbaik untuk menjaga dan meningkatkan kinerjanya meskipun tengah menghadapi tantangan-tantangan yang tidak mudah. Kami berharap Bank BNP akan mampu memanfaatkan momentum pemulihan ekonomi dalam beberapa waktu ke depan yang mulai nampak pada pertumbuhan yang dicapai khususnya pada triwulan keempat tahun 2017 di mana terdapat indikasi-indikasi perbaikan pada perolehan beberapa pos keuangan.

The Board of Commissioners has given its support and direction to the Board of Directors at all time to assist in anticipating and overcoming such predicaments. We believe that the Board of Directors have done their best to maintain and even improve their performance, even amidst these onslaught of great challenges. We hope that Bank BNP will be able to seize the economic recovery momentum that will come in the near future, as we have all seen in the growth that picked up in the fourth quarter of 2017, along with improvements seen in a number of components in the Bank's balance sheet.

Dewan Komisaris, melalui Direksi Bank BNP, senantiasa berupaya untuk memperbarui dan meningkatkan kualitas proses pemberian keputusan yang bersifat strategis, khususnya dalam kebijakan keputusan pemberian kredit, dan memastikan bahwa seluruh karyawan mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku. Dewan Komisaris mengapresiasi upaya yang konsisten dari sisi organisasi dalam mencermati tata kelola perusahaan serta standar praktik terbaik terkait kebijakan dan proses operasional.

The Board of Commissioners, through the Board of Directors of Bank BNP, strives to improve the quality of strategic decisionmaking processes, in particular those related to lending approval, and has ensured that all employees are compliant with the prevailing regulations. The Board of Commissioners appreciates the consistent endeavor of the organization in paying attention to corporate governance and the best practices in terms of operational processes and policies.

Dewan Komisaris, berikut kelengkapan tugasnya seperti Komite-Komite di bawahnya, selama tahun 2017 telah terlibat aktif dalam mengawasi jalannya Bank, termasuk setiap perkembangan yang terjadi, baik melalui surat-surat rekomendasi maupun pertemuan langsung dengan Direksi dan Manajemen Bank atau melalui komite-komite yang berada di bawah Dewan Komisaris. Struktur tata kelola yang ada di Bank BNP memungkinkan Direksi untuk dapat langsung berkomunikasi secara efektif dengan Dewan Komisaris mengenai seluruh peristiwa penting dan beberapa hal signifikan yang terjadi di Bank sehingga Dewan Komisaris dapat dengan segera menanggapinya secara cepat atas hal-hal yang sifatnya mendesak.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa pekerjaan rumah yang perlu menjadi fokus Direksi ke depannya, yaitu memperbaiki kualitas kredit/NPL, menekan rasio BOPO yang saat ini masih di atas 100%, serta mengembalikan rasio keuangan yang masih minus seperti ROA dan ROE. Oleh karenanya, Dewan Komisaris berkomitmen untuk dengan serius mendampingi Direksi dalam hal memperbaiki kinerja keuangannya di masa yang akan datang.

Pada kesempatan ini, izinkan saya, atas nama Dewan Komisaris, menyampaikan terima kasih kepada seluruh Komite di bawah Dewan Komisaris atas dedikasi, profesionalisme, serta kerja kerasnya. Demikian pula kepada Direksi yang telah berupaya secara optimal menjalankan roda bisnis Bank BNP dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, serta komitmen manajemen atas transparansi dan akuntabilitas terhadap para pemangku kepentingan.

Kami menyampaikan apresiasi bagi pemangku kepentingan Bank BNP atas dukungannya dalam mempertahankan stabilitas ekonomi di Indonesia, kepada para pemegang saham dan nasabah kami yang kami banggakan. Kami juga menyampaikan terima kasih sedalam-dalamnya atas dukungan dan kepercayaan segenap karyawan Bank BNP yang telah diberikan selama ini. Semoga Bank BNP dapat terus maju dan meningkatkan pelayanannya sehingga dapat terus dicintai dan dipercaya oleh seluruh pemangku kepentingannya.

Atas nama Dewan Komisaris,

The Board of Commissioners, along with the committees under it, were actively involved in the supervision of the Bank's business throughout 2017, and were aware of all the developments that have taken place. We have been informed via the recommendation letters as well as at the joint meetings held with the Board of Directors and the management of the Bank, and also with the committees under the Board of Commissioners. Bank BNP's governance structure has allowed the Board of Directors to communicate effectively with the Board of Commissioners to discuss any issue that is deemed material and significant, so that the Board of Commissioners can directly and quickly respond to matters, for the resolution of which time is of the essence.

Despite all that, the Board of Directors does have a long list of things that it must focus on resolving in the years to come. These include improving lending quality and NPL ratio, suppressing the operating expense to operating income ratio (which currently stood at above 100%), and improve ROA and ROE. The Board of Commissioners is committed to always standing by the Board of Directors while all the efforts to improve the Bank's financial performance in the future are taking place.

In this occasion, allow me on behalf of the Board of Commissioners to extend my gratitude to all committees under the Board of Commissioners for their dedication, professionalism, and hard work. We also thank the Directors that have done their best to optimize Bank BNP's business and implement the principles of good corporate governance, and also for the management's steadfast commitment to transparency and accountability to all stakeholders.

We appreciate our stakeholders at Bank BNP for their staunch support towards maintaining economic stability in Indonesia, and to our shareholders and customers, whom we serve with pride. We also are thankful for the continued support and trust of all employees of Bank BNP. May Bank BNP progress onwards by improving its service, and receive loyalty, trust, and praise from its stakeholders in doing so.

On behalf of the Board of Commissioners,

PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk.

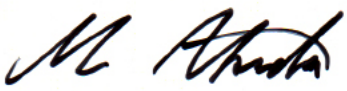

MICHIO ATSUDA

Presiden Komisaris / President Commissioner

Laporan Dewan Komisaris

Report of the Board of Commissioners

KOMPOSISI, KRITERIA DAN INDEPENDENSI DEWAN KOMISARIS

Susunan Dewan Komisaris PT BANK NUSANTARA PARAHYANGAN Tbk adalah sebagai berikut:

Presiden Komisaris	:	Michio Atsuda
Komisaris	:	Tatang Hermawan
Komisaris Independen	:	Karel Tanok
Komisaris Independen	:	Bachtiar Alam

Komposisi Dewan Komisaris telah sesuai dengan ketentuan tenaga kerja asing Peraturan Bank Indonesia yang menetapkan bahwa 50% atau lebih anggota Dewan Komisaris wajib memiliki kewarganegaraan Indonesia.

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau dengan pemegang saham mayoritas atau hubungan lainnya dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuan dalam bertindak independen. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk telah memiliki 2 (dua) orang anggota Komisaris Independen. Setiap Komisaris Independen mengetuai Komite-komite di bawah Dewan Komisaris.

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris melakukan penilaian terhadap kinerja Direksi yang mana dalam kenyataannya Direksi telah mampu menghadapi pengaruh kondisi perekomian dengan baik, Direksi telah melakukan perbaikan kinerja operasional dan keuangan dan mampu menghadapi pengaruh negatif dari perubahan faktor internal maupun eksternal.

Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk melaksanakan fungsi pengawasan kepada Direksi, dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap ketentuan perbankan dan perundang-undangan. Dengan tugas utama Dewan Komisaris adalah untuk memastikan tercapainya maksud dan tujuan Bank dan untuk menjaga bahwa Bank telah dikelola dengan baik demi kepentingan Pemegang Saham dan *stakeholder* lainnya.

BOARD OF COMMISSIONERS COMPOSITION, CRITERIA, AND INDEPENDENCE

The composition of the Board of Commissioners of PT BANK NUSANTARA PARAHYANGAN Tbk is as follows:

President Commissioner	:	Michio Atsuda
Commissioner	:	Tatang Hermawan
Independent Commissioner	:	Karel Tanok
Independent Commissioner	:	Bachtiar Alam

The composition of the Board of Commissioners has been in accordance with the Bank Indonesia regulation on foreign employees, which determines that at least 50% of the total members of the Board of Commissioners must be of Indonesian citizenship.

Independent Commissioners are members of the Board of Commissioners that do not have any financial, managerial, share ownership, and/or family relationship whatsoever with the other members of the Board of Commissioners and/or the majority shareholder or other relationships with the Company, which may affect their ability to act independently. In keeping with the regulations of the OJK, PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk has two Independent Commissioners, each of whom serves as a chairman of a committee under the Board of Commissioners.

EXECUTION OF DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners has evaluated the Board of Directors' performance and concluded that the Board of Directors had adequately managed to deal with the economic conditions by instigating certain operational and financial improvement measures and by being able to overcome the negative effects arising from internal and external factors' changes.

Members of the Board of Commissioners are appointed by the General Meeting of Shareholders (GMS) to conduct supervision on the Board of Directors by upholding the principle of banking prudence and compliance with the prevailing regulations. The main task of the Board of Commissioners is to ensure the achievement of the Bank's purpose and intent, and ensure that the Bank has been properly managed for the interest of the shareholders and other stakeholders.

Selama tahun 2017, Dewan Komisaris telah melakukan rapat sebanyak 17 (tujuh belas) kali rapat, termasuk di dalamnya adalah Rapat Dewan Komisaris, Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi serta Rapat dengan unit kerja lainnya. Hal-hal yang menjadi fokus pengawasan dari Dewan Komisaris adalah mengenai realisasi rencana bisnis Bank, pembahasan hal-hal yang menyebabkan belum tercapainya beberapa aspek penting rencana bisnis Bank, penyaluran kredit, penghimpunan dana pihak ketiga serta produktivitas dan efisiensi Bank. Pemantauan pengembangan kualitas sumber daya manusia, memastikan terselenggaranya prinsip *Good Corporate Governance,* memastikan terselenggaranya sistem pengendalian internal dan manajemen risiko, serta melakukan pengawasan dan pembahasan dengan Direksi dalam upaya-upaya memperbaiki dan mempertahankan tingkat kesehatan Bank, hal-hal tersebut juga menjadi fokus perhatian penting Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan Bank.

In 2017 the Board of Commissioners conducted 17 (seventeen) meetings, covering Board of Commissioners meetings and joint meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors and other work units. Issues that fell under the Board of Commissioners' focus of supervision included the realization of the Bank's annual business plan, circumstances that hindered the achievement of the Bank's most important business plans, lending, funding, as well as the Bank's productivity and efficiency. The monitoring of human resources quality enhancement, ensuring the implementation of the GCG principles, internal control system, and risk management, as well as supervising and discussing with the Board of Directors to improve and maintain the Bank's soundness level were also part of the Board of Commissioners' focus in supervising the Bank's business.

KOMITE-KOMITE YANG BERADA DI BAWAH PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit tanggal 23 Desember 2015 serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum tanggal 7 Desember 2016, maka Perseroan telah memiliki Komite Audit sejak tanggal 26 Desember 2001, Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk tanggal 17 Maret 2008, serta Komite Pemantau Risiko dibentuk tanggal 30 Januari 2009. Dengan demikian Perseroan telah memiliki komite-komite sebagai organ yang bertugas membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Direksi.

COMMITTEES UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS

Referring to OJK Regulation No. 55/POJK.04/2015 on Establishment and Work Guideline for Audit Committee dated 23 December 2015 and OJK Regulation No 55/POJK.03/2016 on Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks dated 7 December 2016, the Company has an Audit Committee since 26 December 2001, a Nomination & Remuneration Committee since 17 March 2008, and Risk Monitoring Committee since 30 January 2009. Thus the Company has all the necessary committees that serve as organs that assist the Board of Commissioners in conducting supervision of the Board of Directors' duties.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan setiap komite beranggotakan pihak-pihak independen dan diketuai oleh seorang Komisaris Independen, kecuali pada Komite Remunerasi dan Nominasi beranggotakan 1 pejabat eksekutif yang membawahi fungsi SDM. Ketiga komite tersebut telah melaksanakan tugasnya dengan baik dengan melakukan pertemuan/rapat dengan unit-unit kerja terkait di Bank BNP. Informasi/ hasil dari pertemuan tersebut kemudian direkomendasikan kepada Dewan Komisaris untuk digunakan sebagai bahan masukan bagi Direksi.

In keeping with the regulations of the OJK, each committee consists of independent parties and is led by an Independent Commissioner, with the exception of the Nomination and Remuneration Committee that has one executive officer supervising the HR function. All three committees have duly performed their duties by conducting meetings with the relevant work units at Bank BNP. Information and results of the meetings are subsequently submitted as recommendations to the Board of Commissioners to be then used as input by the Board of Directors.

KOMITE AUDIT

Diketuai oleh seorang Komisaris Independen dengan 2 (dua) orang anggota Komite dari pihak independen. Susunan keanggotaan Komite Audit per Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Ketua Komite Audit	:	Bachtiar Alam
Anggota	:	Inge Barlian
Anggota	:	Damajanti Tanumihardja

KOMITE PEMANTAU RISIKO

Diketuai oleh seorang Komisaris Independen dengan 2 (dua) orang anggota komite dari pihak independen. Susunan keanggotaan Komite Pemantau Risiko per Desember 2017 sebagai berikut:

Ketua Komite Audit	:	Bachtiar Alam
Anggota	:	Inge Barlian
Anggota	:	Damajanti Tanumihardja

KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Diketuai oleh seorang Komisaris Independen dengan anggota seluruh anggota Dewan Komisaris dan Kepala Divisi Sumber Daya Manusia. Susunan keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi per Desember 2017 adalah:

Ketua Komite	:	Karel Tanok
Anggota Komite	:	Michio Atsuda
Anggota Komite	:	Tatang Hermawan
Anggota Komite	:	Bachtiar Alam
Anggota Komite	:	Agung Subagiyo (Kepala Divisi HC & CS)

Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko tidak berasal dari Direksi pada bank yang sama maupun bank lain, tidak merangkap jabatan pada bank yang sama, bank dan/atau perusahaan lain, tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan bank.

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE-KOMITE

Komite Audit

Tugas utama Komite Audit adalah memberikan pendapat secara profesional dan independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris dan membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya meliputi:

AUDIT COMMITTEE

Chaired by an Independent Commissioner with 2 (two) members from independent parties. The membership of the Audit Committee as at December 2017 was as follows:

Audit Committee Chairman	:	Bachtiar Alam
Member	:	Inge Barlian
Member	:	Damajanti Tanumihardja

RISK MONITORING COMMITTEE

Chaired by an Independent Commissioner with 2 (two) members from independent parties. The membership of the Risk Monitoring Committee as at December 2017 was as follows:

Audit Committee Chairman	:	Bachtiar Alam
Member	:	Inge Barlian
Member	:	Damajanti Tanumihardja

NOMINATION & REMUNERATION COMMITTEE

Chaired by an Independent Commissioner with members being all Board of Commissioners members and the Human Resources Division Head. The membership of the Nomination & Remuneration Committee as at December 2017 was as follows:

Audit Committee Chairman	:	Karel Tanok
Member	:	Michio Atsuda
Member	:	Tatang Hermawan
Member	:	Bachtiar Alam
Member	:	Agung Subagiyo (Head of HC & CS)

Members of the Audit Committee and the Risk Monitoring Committee do not concurrently hold any position as Directors in the Bank or in other banks, nor other positions in the Bank, other banks and/or other companies, do not have any financial, managerial, share ownership, and family relationship with the members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and/or the Controlling Shareholders or related to the Bank.

IMPLEMENTATION OF COMMITTEES' DUTIES AND RESPONSIBILITIES

Audit Committee

The main duty of the Audit Committee is to provide professional and independent opinion to the Board of Commissioners regarding reports or issues reported by the Board of Directors to the Board of Commissioners and to assist the Board of Commissioners in conducting:

1. Melakukan kajian atas rencana kerja Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), memantau pelaksanaannya dan melakukan evaluasi atas hasil kerjanya;
2. Melakukan pemantauan kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku;
3. Memantau kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi yang berlaku;
4. Memastikan terlaksananya tindak lanjut hasil temuan SKAI, Akuntan Publik dan hasil pemeriksaan OJK oleh Direksi secara tepat waktu guna mendapatkan informasi yang digunakan sebagai rekomendasi kepada Dewan komisaris;

Komite Pemantau Risiko

Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko meliputi:

1. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan, prosedur dan penetapan limit manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut;
2. Pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
3. Memastikan ketersediaan informasi dan implementasi dari standar, kontrol, batasan, pedoman dan kebijakan sehubungan dengan pengukuran dan pengelolaan risiko terhadap risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko reputasi, risiko strategis, risiko hukum dan risiko kepatuhan.

Komite Remunerasi dan Nominasi

Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi meliputi:

1. Terkait dengan kebijakan Remunerasi:
   1.1 melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi; dan
   1.2 memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.
2. Terkait dengan kebijakan Nominasi:
   2.1 menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
   2.2 memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
   2.3 memberikan rekomendasi Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite sebagaimana yang dipersyaratkan kepada Dewan Komisaris.

1. Review of the IAU's work plans, observation of its implementation, and performance assessment;
2. Review of the alignment of audit implementation by the public accounting firm with the auditing standards;
3. Review of the alignment of the financial statements with the accounting standards;
4. Review of t he follow up to the findings from the IAU, Public Accounting Firms, and OJK as well as the Board of Directors in a timely manner, to obtain the information used as recommendation to the Board of Commissioners.

Risk Monitoring Committee

The duties and responsibilities of the Risk Monitoring Committee include:

1. Evaluation of the alignment of policies, procedures, and risk management limit settting by implementing relevant policies;
2. Monitoring and evaluation of the execution of the implementation of duties of the Risk Management Committee and Risk Management Unit;
3. Ensuring availability of information and implementation of standards, controls, limits, guidelines, and policies in line with the measurement and management of credit risk, market risk, liquidity risk, operational risk, reputation risk, strategic risk, legal risk, and compliance risk.

Nomination & Remuneration Committee

The duties and responsibilities of the Nomination & Remuneration Committee include:

1. In relation to the Remuneration policy:
   1.1 evaluate remuneration policy; and
   1.2 recommend the remuneration policy for the Board of Commissioners and the Board of Directors to the Board of Commissioners, to be presented to the GMS.
2. In relation to the Nomination policy:
   2.1 prepare and recommend the right selection procedures and systems for replacing members of the Board of Commissioners and the Board of Directors, to the Board of Commissioners to be presented to the GMS;
   2.2 recommend candidates for the new members of the Board of Commissioners and/or the Board of Directors to the Board of Commissioners to be presented to the GMS;
   2.3 recommend independent parties that shall become members of the committee as required, to the Board of Commissioners.

3. Memastikan bahwa kebijakan remunerasi sekurang-kurangnya sesuai dengan:
   3.1 kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   3.2 prestasi kerja individual;
   3.3 kewajaran dengan peer group; dan pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.

PELAKSANAAN RAPAT

Rapat Komite telah diselenggarakan sesuai dengan agenda kerja yang telah disusun dan membahas hal-hal yang telah ditugaskan oleh Dewan Komisaris. Sepanjang tahun 2017, Komite-Komite telah melakukan rapat dengan divisi-divisi dan unit kerja terkait, dengan agenda rapat dan materi pembahasan yang signifikan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya dalam membantu fungsi pengawasan Dewan Komisaris. Komite Audit telah mengadakan rapat sebanyak 6 (enam) kali, Komite Pemantau Risiko telah mengadakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali dan Komite Remunerasi dan Nominasi telah mengadakan rapat sebanyak 10 (sepuluh) kali. Keputusan rapat Komite diambil berdasarkan musyawarah mufakat, apabila tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dan segala keputusan rapat Komite bersifat mengikat bagi seluruh anggota Komite. Hasil keputusan rapat Komite dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir dan didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat komite beserta alasan perbedaan pendapat tersebut. Hasil rapat Komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.

Demikian laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris atas kinerja dan pelaksanaan Bank di tahun 2017. Dewan Komisaris menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap jajaran Direksi dan seluruh

3. Ensure that the remuneration policy at least are aligned with:
   3.1 financial performance and provision of allowances, as regulated in the prevailing regulations;
   3.2 individual work performance;
   3.3 fairness with peer groups; and considerations on the Bank's long-term strategy and goals.

Meetings

Committees' meetings were conducted in accordance with the work agendas scheduled much earlier to discuss issues assigned by the Board of Commissioners. Throughout 2017, the committees conducted meetings with relevant divisions and work units, with the material topics of discussion in line with their duties and responsibilities in assisting the Board of Commissioners' supervision. The Audit Committee conducted 6 (six) meetings, while the Risk Monitoring Committee conducted 12 (twelve) meetings, and the Nomination & Remuneration Committee conducted 10 (ten) meetings. The decisions reached in these committee meetings are based on deliberation for consensus, and should this fail to be achieved, the next decision-making mechanism is by voting, with all the decisions binding on all members of the committees. Committees' meetings results are written down in the minutes of meetings signed by all present committees' members and properly documented, including dissenting opinions that occurred during the meetings along with the reasons for such dissent. Committees' meetings results serve as recommendations that can be implemented optimally by the Board of Commissioners.

Thus we are closing our report of the Board of Commissioners' supervision of the Bank's performance and management in 2017. The Board of Commissioners extends its utmost appreciation to the Board of Directors and all employees of

karyawan Bank BNP atas dedikasi dan kerja keras yang penuh tantangan di tahun 2017. Kepada para pemegang saham dan regulator, Dewan Komisaris menyampaikan rasa hormat yang setinggi-tingginya atas kepercayaan dan dukungan kepada pengurus Bank BNP dalam menjalankan perannya sesuai tugas pokok dan fungsinya. Besar harapan kami agar apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi perkembangan bisnis Bank BNP di masa yang akan datang.

Bank BNP for their dedication and hard work in 2017. To all shareholders and regulators, the Board of Commissioners extends its highest respect for the trust and support to Bank BNP's management in working in accordance with its main duties and responsibilities. We have high hopes that what we have achieved now will be useful for Bank BNP's business expansions in the future.

PT BANK NUSANTARA PARAHYANGAN Tbk.
DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS

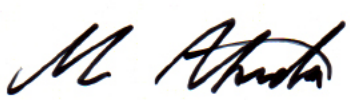

MICHIO ATSUDA
Presiden Komisaris
President Commissioner

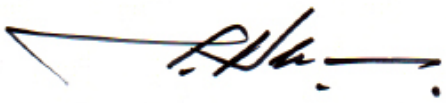

TATANG HERMAWAN
Komisaris
Commissioner

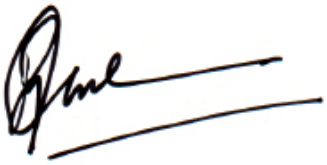

KAREL TANOK
Komisaris Independen
Independent Commissioner

BACHTIAR ALAM
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Laporan Komite Audit

Report of the Audit Committee

KOMITE AUDIT

Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk pada tahun 2001 dengan tujuan untuk membantu dan memfasilitasi Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan informasi keuangan, sistem pengendalian internal, efektivitas pemeriksaan oleh auditor eksternal dan internal, *Good Corporate Governance* (GCG), efektifitas pelaksanaan manajemen risiko (bersama-sama dengan Komite Pemantau Risiko) serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dasar Pembentukan Komite Audit mengacu pada peraturan-peraturan berikut ini:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
3. Peraturan I-A Lampiran I Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: KEP-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat.
4. Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor KEP:002-KOM/KEP/08/2017 tanggal 4 September 2017 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Audit, yang disahkan dengan Surat Keputusan Direksi Nomor SE: 116-DIR/KOM/09/2017 tanggal 4 September 2017 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Audit.

Susunan Komite Audit periode 1 Januari 2017 – 31 Agustus 2017 adalah sebagai berikut:

Ketua Komite Audit	:	Bpk. Bachtiar Alam
Anggota	:	Ibu Inge Barlian
Anggota	:	Ibu Elizabeth Tiur Manurung

Susunan Komite Audit periode 4 September 2017 – 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Ketua Komite Audit	:	Bpk. Bachtiar Alam
Anggota	:	Ibu Inge Barlian
Anggota	:	Ibu Damajanti Tanumihardja

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Komite Audit mempunyai suatu pedoman kerja Komite Audit yang tertuang dalam Piagam Komite Audit. Dalam

AUDIT COMMITTEE

The Audit Committee was established by the Board of Commissioners of PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk in 2001 with the aim to assist and facilitate the Board of Commissioners in carrying out the duties and responsibilities related to supervision of, among others, financial information, internal control system, efficacy of audit by the internal and external auditors, Good Corporate Governance (GCG), efficacy of risk management implenentation (together with the Risk Monitoring Committee) as well as compliance with prevailing regulations.

The basis for the Audit Committee establishment are as follows:

1. OJK Regulation No. 55/POJK.03/2016 on Implementation of Governance for Commercial Banks.
2. OJK Regulation No. 55/POJK.04/2015 on Establishment and Work Guidelines of Audit Committee.
3. Regulation I-A Attachment I to PT Bursa Efek Indonesia's Board of Directors' Decree No. KEP-00001/BEI/01-2014 dated 20 January 2014 on Registration of Shares and Equity Securities Other Than Shares Issued by Listed Companies.
4. Board of Commissioners' Decree No. KEP:002-KOM/KEP/08/2017 dated 4 September 2017 on the Changes to the Audit Committee's Membership Composition, ratified by the Board of Directors' Decree No. SE: 116-DIR/KOM/09/2017 dated 4 September 2017 on Ratification of the Changes to the Audit Committee's Membership Composition.

The composition of the Audit Committee from 1 January to 31 August 2017 was as follows:

Audit Committee Chairman	: Bachtiar Alam
Member	: Inge Barlian
Member	: Elizabeth Tiur Manurung

The composition of the Audit Committee from 4 September to 31 December 2017 was as follows:

Audit Committee Chairman	: Bachtiar Alam
Member	: Inge Barlian
Member	: Damajanti Tanumihardja

DUTIES AND RESPONSIBILITIES

The Audit Committee has a work guideline stipulated in the Audit Committee Charter. The Charter contains the general

Piagam Komite Audit berisi tujuan umum, kewenangan, keanggotaan, persyaratan keanggotaan, tugas dan tanggung jawab, hubungan kerja, rapat, pelaporan, masa tugas dan kompensasi, serta kerahasiaan Bank.

Komite Audit menjalankan tugas dan tanggung jawab secara profesional dan independen. Komite Audit bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan serta pemantauan terhadap kecukupan pengendalian intern, kecukupan dan kebenaran atas proses pembuatan Laporan Keuangan, efektivitas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Auditor Eksternal dan Internal, melakukan identifikasi terhadap hal–hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, melakukan penyusunan konsep dan analisa yang berhubungan dengan fungsi Komite Audit dan melaksanakan tugas–tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris, yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan
   Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Informasi Keuangan yang akan diterbitkan oleh PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk seperti Laporan Keuangan, Proyeksi dan Informasi Keuangan lainnya.
2. Sistem Pengawasan Internal
   Melakukan pemantauan dan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan dan hasil pemeriksaan oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) atas penerapan sistem pengawasan internal.
3. Kepatuhan/*Compliance*
   Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kepatuhan Bank BNP terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta Ketentuan atau Perundang-undangan lain yang berlaku terkait dengan kegiatan / usaha perbankan melalui koordinasi dengan Komite Pemantau Risiko.
4. Audit Intern
   Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Internal (SKAI).
5. Audit Ekstern
   Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap tindak lanjut yang dilakukan oleh *auditee* terhadap hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor ekstern.

   Dalam hal Bank BNP akan menunjuk Kantor Akuntan Publik maka Komite Audit akan melakukan penelaahan atas independensi dan objektivitas Kantor Akuntan Publik yang akan mengikuti tender.

purpose, authority, membership, criteria for membership, duties and responsibilities, work relationships, meetings, reporting, term of office and compensation of the Audit Committee, as well as maintenance of the Bank's confidential information by the Audit Committee.

The Audit Committee carries out its duties and responsibilities professionally and independently. The Audit Committee is responsible for executing the duties and functions of supervision and monitoring of adequacy of internal control, adequacy and accuracy of the financial reporting process, efficacy of internal and external auditors' audit reports, identification of issues requiring the Board of Commissioners' attention, preparation of concepts and analyses related to the Audit Committee's function, and other duties assigned by the Board of Commissioners, covering the following:

1. Financial Statements
   Monitor and evaluate financial information to be issued by PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk, such as Financial Statements, Projections, and other Financial Information.
2. Internal Control System
   Monitor and evaluate the efficacy of implementation of internal control system and its audit's results by the IAU.
3. Compliance
   Monitor and evaluate Bank BNP's compliance with the OJK regulations as well as other relevant regulations in the banking industry by coordinating with the Risk Monitoring Committee.
4. Internal Audit
   Monitor and evaluate the implementation of duties of the IAU.
5. External Audit
   Monitor and evaluate the follow up measures taken by auditees of the external auditors' audit results.

   Should Bank BNP choose to appoint a public accounting firm, the Audit Committee will review the independence and objectivity of the public accounting firms participating in the tender.

6. *Good Corporate Governance* (GCG)
   Mendorong secara berkelanjutan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam pengelolaan Bank yang meliputi transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), Independensi (*independence*) dan kewajaran (*fairness*).
7. Bekerja sama dengan Komite Pemantau Risiko
   Melakukan pemantauan dan evaluasi serta melaporkan berbagai risiko yang potensial akan terjadi dari pengelolaan manajemen risiko yang dilaksanakan oleh Direksi melalui koordinasi dengan Komite Pemantau Risiko.

Selama tahun 2017, Komite Audit telah melakukan pengawasan, pemantauan, evaluasi serta rekomendasi, dan telah dilaporkan kepada Dewan Komisaris secara berkala, seperti yang tercermin dalam beberapa hal berikut ini:

1. Memberikan rekomendasi mengenai Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Pemeriksaan Tahun Buku 2017, yaitu Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan, afiliasi Deloitte South East Asia Ltd. (DSEA).
2. Melakukan pemantauan dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan Standar Audit yang berlaku.
3. Melakukan pengawasan atas penyusunan laporan keuangan untuk memastikan terpenuhinya standar dan kebijakan akuntansi yang berlaku.
4. Memberikan rekomendasi dan masukan-masukan kepada Dewan Komisaris untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap Manajemen.
5. Melakukan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) secara intensif dan berkala.
6. Membantu melakukan pemantauan tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern, termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan, dengan melakukan komunikasi secara langsung maupun dalam rapat dengan Kepala Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).
7. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan atas SKAI.
8. Melakukan pemantauan dan evaluasi dan memberikan masukan terhadap Laporan Berkala yang dikeluarkan oleh Komite Kepatuhan.
9. Mengikuti workshop Corporate Governance Leadership Program (GCG) bersama-sama dengan Dewan Komisaris dan Direksi dalam rangka untuk meningkatkan penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance secara berkelanjutan dalam pengelolaan Bank.
10. Melakukan pemantauan dan evaluasi bersama-sama dengan Komite Pemantau Risiko atas berbagai

6. Good Corporate Governance (GCG)
   Support the continuous implementation of GCG principles in managing the Bank, which include transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness.

7. Coordination with Risk Monitoring Committee
   Monitor and evaluate and report various potential risks arising from the risk management initiatives by the Board of Directors by coordinating with the Risk Monitoring Committee.

Throughout 2017 the Audit Committee performed supervision, monitoring and evaluation, and provided recommendations to the Board of Commissioners regularly, as reflected on the following:

1. Provided recommendation related to the appointment of the public accounting firm to audit the Company's FY2017 financial statements, i.e. Satrio Bing Eny & Rekan, affiliate of Deloitte South East Asia Ltd. (DSEA).
2. Monitored and evaluated the alignment of audit by the public accounting firm with the prevailing audit standards.
3. Monitored the preparation of the financial statements to ensure compliance with the prevailing accounting standards and policies.
4. Provided recommendations and inputs to the Board of Commissioners to assist the Board of Commissioners in carrying out supervision of the management.
5. Monitored and evaluated the work of the IAU regularly and intensively.
6. Assisted the monitoring of audit follow up in order to assess the adequacy of internal control, including in the process of financial reporting, by communicating directly and via meetings with the Head of IAU.
7. Monitored the follow up measures on the audit performed by and recommendations from the OJK on the IAU.
8. Monitored and evaluated the Regular Reports of the Compliance Committee, and provided related inputs.
9. Participated in the Corporate Governance Leadership Program (GCG) workshop together with the Board of Commissioners and the Board of Directors to improve the continuous implementation of GCG in managing the Bank.
10. Together with the Risk Monitoring Committee, monitored and evaluated various potential risks that

risiko yang potensial akan terjadi dari pengelolaan manajemen risiko yang dilaksanakan oleh Direksi serta melaporkannya kepada Dewan Komisaris.

had arisen from risk management conducted by the Board of Directors, and reported them to the Board of Commissioners.

Laporan Keuangan Tahun Buku 2017 yang disajikan oleh Kantor Akuntan Publik telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan Peraturan Bank Indonesia yang berlaku. Independensi dan objektivitas Kantor Akuntan Publik dalam melakukan audit Laporan Keuangan Bank BNP telah mengacu pada standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI).

The FY2017 Financial Statements presented by the public accounting firm have been aligned with the prevailing Financial Accounting Standards and Bank Indonesia Regulations. Independence and objectivity of the public accounting firm in auditing Bank BNP's financial statements had been in accordance with the auditing standards determined by the Indonesian Public Accountants Association (IAPI).

PENYELENGGARAAN RAPAT

Komite Audit telah menyelenggarakan rapat sebanyak 6 (enam kali) dalam tahun 2017. Sesuai dengan Piagam, Komite Audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal Rapat Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan atau sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam setahun.

MEETINGS

The Audit Committee conducted 6 (six) meetings in 2017. In keeping with the Charter, the Audit Committee conducted meetings with the same minimum frequency as for the meetings of the Board of Commissioners as stipulated in the Bank's Articles of Association, or at least four times in one year.

Rapat bersama Satuan Kepala Kerja Audit Internal (SKAI) sepanjang tahun 2017 tersebut diatas meliputi rapat untuk membahas ruang lingkup audit internal, rencana audit internal tahunan, temuan audit internal, perkembangan pemeriksaan audit internal dan hasil pemeriksaan cabang-cabang yang telah dilakukan oleh SKAI, penataan struktur organisasi dan sumber daya di SKAI, serta rekomendasi dan usulan-usulan yang diberikan oleh Komite kepada SKAI.

Meetings together with the Head of IAU in 2017 as stated above included meetings to discuss the internal audit scope, internal audit annual plan, internal audit findings, audit developments, and audit results from the branches audited by the IAU, reorganization and management of human resources in the IAU, and recommendations from the Committee to the IAU.

Rapat diselenggarakan dengan Akuntan Publik untuk membahas ruang lingkup audit, rencana audit, temuan audit dan perkembangan pemeriksaan audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik. Rapat diadakan pula dengan Direksi, divisi terkait dan Akuntan Publik untuk membahas laporan akhir atas hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Akuntan Publik (IAPI).

Meetings together with the public accounting firm discussed the audit scope, audit plan, audit findings, and audit developments. Meetings were also held with the Board of Directors, related divisions, and the public accounting firm, to discuss the exit report related to the audit results from the Public Accounting Firm.

PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk.

BACHTIAR ALAM

Ketua Komite Audit
Audit Committee Chairman

Laporan Direksi
Report from the Board of Directors

“…. dengan menggunakan filosofi face to face business, Saya mengharapkan hubungan antara Bank BNP dengan mitra nasabahnya terjalin sangat baik dan tidak tergantikan, oleh karenanya tag line kami dari Parahyangan Untuk Nusantara menjadi nilai yang harus diusung Bank BNP kedepannya

… by leveraging on our face-to-face business philosophy, I hope that the relationship between Bank BNP and its customers can be fostered to become something irreplaceable, and therefore our tagline, ‘From Parahyangan For Nusantara’ shall be the value espoused by the Bank as we go forward”

Hideki Nakamura

Presiden Direktur
President Director

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Saya hormati,

Terhadap pertumbuhan Usaha Bank BNP di tahun 2017 tidak dapat kami sangkal bahwa masih berat perjuangan kami untuk kembali memajukan roda bisnis Bank BNP kembali sebagaimana *trend* pertumbuhan pada periode-periode sebelumnya.

Pertengahan tahun 2017 dimana saya baru bergabung dalam kepengurusan yang berjalan, kami telah melakukan berbagai upaya untuk tetap dapat tumbuh dalam sisi bisnis maupun pelaksanaan tatakelola perusahaan yang baik yang telah diupayakan oleh pimpinan terdahulu Saya.

Di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi makro yang cukup menekan sektor *riil*, kami harus mempertahankan kinerja keuangan dan upaya perbaikan kualitas aset Bank BNP yang sangat tidak mudah, Kami menutup tahun 2017 dengan mencatatkan kinerja keuangan yang tidak sesuai dengan Rencana Bisnis Bank (RBB) yang disusun sebelumnya. Hasil yang kami capai belum memuaskan dan rata-rata terhadap pencapaian budget adalah sekitar 85% - 95%.

Kondisi ini dipengaruhi selain oleh kondisi makro, juga masih terdapat adanya dampak atas Kredit yang bermasalah, dimana selain tingkat *recovery*nya cukup rendah juga menurunnya kemampuan pembayaran kewajiban dari beberapa debitur yang cukup signifikan sehingga berpengaruh pada peningkatan Kredit Bermasalah/*Non Performing Loan* (NPL).

Esteemed Shareholders and Stakeholders,

As regards Bank BNP's business growth in 2017, we have to admit that our struggle to progress and return on our growth track of the previous periods had been met with immense challenges.

Since I had joined the management in the middle of 2017, we have done numerous efforts to maintain our growth in business as well as in governance, all of which had been instigated by my predecessor.

Amidst the slowdown of macroeconomic growth that to an extent depressed the real sector, we strived to continuously maintain our financial performance and improve our assets quality. This has not been easy. We closed the year 2017 with certain financial performance that was below the targets set in the Bank's Business Plan (RBB), with average budget achievement of 85 to 95%.

This condition was primarily caused by the macroeconomic conditions as well as the non-performing loan condition that relatively had low recovery rates, compounded by the diminishing ability of certain of our debtors to service their loans, thus resulting in a worsening of our non-performing loans (NPL) performance.

Sebagai dampak dari kondisi tersebut, Bank harus meningkatkan pembentukan Cadangan Penurunan Kerugian Nilai (CKPN) kredit sebagai akibat naiknya rasio kredit bermasalah dan penurunan volume portofolio kreditnya.

Hence, the Bank was required to increase its Allowance for Impairment Losses for its loans as a result of the high NPL and the decrease in lending amount.

Secara internal Bank BNP terus menerus melakukan perbaikan disisi kualitas proses internal Bank maupun dalam melakukan seleksi target marketnya. Dengan melakukan berbagai upaya keras, maka upaya tersebut telah memberikan hasil pada Triwulan IV, bahwa terhadap beberapa komponen neraca keuangan menunjukkan perbaikan seperti meningkatnya volume kredit, menurunnya kerugian Bank dan menurunnya persentase Kredit Bermasalah.

Bank BNP continued to improve its internal processes' quality and set a finer goal in terms of target market. Through these initiatives, in the fourth quarter, certain components of our balance sheet had shown clear signs of improvement, among others the increase in lending amount, reduced losses borne by the Bank, as well as some reduction in the NPL ratio.

Sekalipun perolehan laba bersih masih dibawah proyeksi, tidak sesuai dengan proyeksi, namun dengan upaya perbaikan atas kualitas proses, Bank BNP memiliki keyakinan bahwa kinerja bisnis dan keuangannya di tahun yang akan datang akan mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini tercermin dari raihan Laba pada Triwulan IV saja diluar biaya extra ordinary yaitu adanya pembayaran pajak sudah mencatatkan Laba positif.

Despite lower-than-projected net income in 2017, thanks to the efforts to improve process quality, Bank BNP now is poised for further improvement in terms of its business and financial performance in the years to come. This has been reflected by the positive profit that we generated in the fourth quarter of 2017 alone, net of extraordinary expenses in the form of tax payments.

Lingkungan Usaha di Tahun 2017

Sebagai institusi keuangan yang memiliki fungsi sebagai lembaga intermediasi, kondisi keuangan Perseroan akan dipengaruhi oleh indikator-indikator makro ekonomi terutama nilai tukar, suku bunga maupun tingkat pertumbuhan ekonomi. Perubahan-perubahan negatif indikator makro ekonomi juga akan menyebabkan perubahan nilai surat berharga. Perubahan-perubahan tersebut akan mempengaruhi kondisi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif dan pertumbuhan bisnis Perseroan karena bisnis penghimpunan dana, penyaluran kredit dan jasa transaksional perbankan akan sangat dipengaruhi terutama oleh nilai tukar dan suku bunga. Disisi lain pertumbuhan ekonomi juga akan mempengaruhi transaksi keuangan dan daya beli masyarakat luas yang juga akan mempengaruhi pertumbuhan usaha Perseroan.

Business Climate in 2017

As a financial institution that plays a role as an intermediary, the Bank's financial condition is greatly affected by macroeconomic conditions, in particular the developments in exchange rate, interest rate, and economic growth rate. Negative performance of these macroeconomic indicators—among others the change in the valuation of bonds and in purchasing power of the population—will greatly affect the Bank's statements of financial position, comprehensive profit and loss, and its business growth, given that the Bank is engaged in the funding and lending activities, as well as banking services, all of which are closely related to the movements in exchange rate and interest rate. Economic growth also boosts financial transactions and reinforces the people's purchasing power, thus bolstering the Company's business growth.

Untuk meminimalkan dampak negatif dari perubahan kondisi perekonomian nasional terhadap kondisi keuangan Perseroan, Perseroan secara berkesinambungan menjalankan dan meningkatkan kemampuan manajemen risiko secara menyeluruh. Fungsi dari sistem manajemen risiko adalah untuk mencermati, menganalisis dan mengantisipasi perubahan-perubahan makro ekonomi. Dalam memastikan bahwa risiko dapat dikendalikan oleh Perseroan secara memadai.

To reduce the negative impacts from the changes in the national economic condition on the Bank's financial condition, Bank BNP is always striving to improve its risk management quality in its entirety, by closely identifying, analyzing, and anticipating changes in the macroeconomic condition, so that all risk potentials can be adequately controlled.

Perbankan Nasional

Sepanjang tahun 2017 ketahanan industri perbankan relatif masih tetap stabil, walaupun fungsi intermediasi perbankan

National Banking Industry

Throughout 2017, the banking industry's resilience was relatively stable, although the banking intermediary function

belum sepenuhnya pulih dan cukup kuat. Kondisi ini tercermin dari rasio kecukupan modal perbankan yang cukup tinggi mencapai 23% pada Desember 2017.

had yet to fully recover and become strengthened. This condition was reflected by a relatively high capital adequacy ratio across all banks, reaching 23% as at December 2017.

Namun sejalan dengan upaya perbankan nasional untuk terus melakukan penguatan dalam hal penerapan manajemen risiko kredit perbankan yang baik, berdampak pada menurunnya rasio kredit bermasalah (NPL) secara nasional turun menjadi 2,6% (*gross*) atau 1,2% (*nett*). Dari sisi pertumbuhan portofolio kredit pada triwulan IV 2017 membaik walaupun masih terbatas pada pertumbuhan segmen tertentu.

In line with the banking industry's efforts to continue strengthening its banking credit risk management, national NPL ratio was successfully reduced to 2.6% (gross) and 1.2% (net). Growth in lending in the fourth quarter of 2017 improved, although recovery remained limited to certain segments only.

Kredit perbankan tercatat tumbuh sebesar 7,9%, sementara itu pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) pada akhir triwulan IV 2017 tercatat 9,3% lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya 11,7%. Perlambatan pertumbuhan DPK bersumber dari melambatnya pertumbuhan giro, tabungan, dan deposito secara nasional.

Lending growth was recorded at 7.9%, while total third party funds increased by 9.3% by the fourth quarter of 2017. This was lower than the previous year's growth of 11.7% within the same period. The slowing down of third party funds growth was owing to the decelerating pace of growth in demand deposits, savings deposits, and time deposits, across the country.

Kebijakan/Langkah Strategis

Dalam upaya untuk meningkatkan pencapaian kinerja bisnis, Bank BNP menetapkan kebijakan-kebijakan dalam strategi bisnisnya dengan fokus kepada perbaikan model bisnis yang lebih ideal dengan tetap *comply* terhadap ketentuan yang berlaku. Strategi yang diterapkan diharapkan dapat memberikan dukungan yang bersifat langsung pada upaya pencapaian target yang telah ditetapkan. Bank BNP juga masih akan tetap fokus pada segmen SME dengan market debitur sampai dengan Rp 10 miliar.

Strategic Policies and Measures

To improve its business performance, Bank BNP has been focusing on creating a more ideal business model while maintaining its compliance with the prevailing regulations, so that the targets that have been set can be achieved. The strategy to be implemented is expected to provide direct support to the achievement of the targets. Bank BNP shall also be focusing on the SME segment, with loans of up to Rp10 billion per debtor.

Tahun 2017 Bank BNP menyalurkan kredit kepada perusahaan *Multi Finance* dengan tujuan untuk meningkatkan pencapaian kinerja bisnis dan melakukan diversifikasi portofolio, serta mencari peluang bisnis lainnya melalui kerja sama dengan perusahaan *Multi Finance* tersebut.

In addition, in 2017 Bank BNP also provided lending to multifinance companies, in an attempt to boost its business performance as it expanded its business by diversifying its portfolio, and sought to foster new businesses through partnerships with multifinance companies.

Konsolidasi berkelanjutan untuk membangun pondasi kuat bagi laju pertumbuhan bisnis Bank BNP ke depannya akan terus diupayakan untuk meningkatkan portofolio kredit dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

A sustainable business growth through the strengthening of the Bank's foundations by upholding the principle of prudential banking remained the Bank's core business strategy in improving lending portfolio.

Sebagai upaya untuk mendukung dan mencapai komitmen atas tujuan dan sasaran perusahaan pada tahun 2017, Bank BNP melakukan beberapa kebijakan/langkah strategis diantaranya menerapkan tata kelola perbankan yang sehat (*Good Corporate Governance*), perbaikan *Governance Risk Compliance* (GRC), peningkatan peran dan fungsi Manajemen Risiko di berbagai aspek.

To support this commitment to achieving its 2017 targets, Bank BNP had implemented a number of strategic measures and policies, among others implementation of sound GCG principles, improvement of its Governance Risk Compliance (GRC), and improvement of the function of risk management across various aspects.

Kebijakan melakukan pendekatan *face to face business* kepada calon nasabah dan nasabah adalah salah satu upaya untuk meraih target market yang memiliki kedekatan emosional yang kuat dan bukan sekedar pendekatan bisnis saja, Bank BNP berupaya untuk menghindari pendekatan hanya dengan menggunakan pendekatan referensi dari mulut ke mulut atau pendekatan reveral semata, namun kualitas hubungan akan jauh lebih memiliki nilai kedekatan antara nasabah/mitra dengan Bank BNP bila adanya ikatan emosional diantara keduanya, hal ini dapat mempengaruhi kelangsungan dan keberlanjutan bisnis kedepannya bagi kedua belah pihak.

The face-to-face business approach, which emphasizes emotional closeness to customers and prospective customers, was one of the Bank's strategy to serve its target market. The Bank avoids merely employing the word-of-mouth references or referrals only, but strives to improve relationship quality to cultivate more closeness between customers and partners with Bank BNP. The Bank's relationship with its customers and business partners, which has been built on emotional closeness, is believed to be instrumental in fostering the business of both parties for the long term.

Salah satu kegiatan yang digunakan Bank BNP untuk membangun hubungan dan mendapatkan masukan apa yang menjadi kebutuhan nasabah/mitra secara langsung, yaitu dengan mengadakan kegiatan *BNP Business Club* (BBC), yang secara reguler dilakukan di berbagai wilayah sebaran jaringan kantor Bank BNP. Kegiatan ini lebih ditujukan sebagai upaya Bank BNP menjadi mitra dalam hal berkomunikasi, konsultasi dan diskusi tentang apa saja menyangkut kegiatan dari nasabah/mitra bukan melulu dari sisi bisnis saja, melainkan mengenai perpajakan, ketenagakerjaan, harapan-harapan dan informasi-informasi lainnya yang berhubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan aktivitas nasabah/mitra.

Bank BNP conducts BNP Business Club (BBC) as a means to maintain the strong relationship between the Bank and its customers and business partners. BBC is a communication venue for Bank BNP's customers and business partners. This event is held regularly in various areas where Bank BNP's business is present. This is intended to make Bank BNP the partner in communication, consultation, and discussion on any topic related to its customers' businesses that goes beyond the realm of business, but also touching on taxation, labor, expectations and other information that are relevant be it directly or indirectly to the customers' activities.

Motto kami adalah Menjadi Mitra Usaha, maka kami menyadari bahwa suara customer terhadap Bank BNP menjadi sangat penting untuk kami dengarkan dan itulah yang melatarbelakangi dibentuknya kegiatan Bank BNP Business Club (BBC).

Our motto is To Become a Business Partner, and thus we realize that the customers' opinion on Bank BNP is of utmost importance to be heard and this was what made us establish the Bank BNP Business Club (BBC) in the first place.

Layanan Digital Banking

Kesiapan dukungan teknologi informasi yang memadai diperlukan untuk mengimbangi inovasi produk dan layanan perbankan yang semakin berkembang dan dinamis. Bank dituntut untuk senantiasa berkolaborasi dalam mengintegrasikan semua layanannya agar dapat menjamin pemberian layanan terbaik bagi nasabah dan pengembangan bisnisnya di masa mendatang.

Digital Banking Services

The development of banking products and services is aligned with the development of needs for robust information technology (IT) support. The Bank must continuously expand its utilization of IT in order to provide the best service to its customers and grow its business in the long run.

Guna meningkatkan dan memberikan kepuasan kepada para pelanggan kami (*customer experience*) Bank BNP terus berupaya untuk mengembangkan layanan perbankan melalui akses internet dan mengoptimalkan layanan/fitur-fitur melalui pemanfaatan teknologi yang dimiliki oleh Bank BNP.

To improve and satisfy our customers and enhance their experience, Bank BNP strives to develop its banking services continuously, by leveraging on internet access and optimizing features and services related to technologies owned and operated by Bank BNP.

Kami sangat menyadari IT sebagai tulang punggung bisnis kami harus terus menyesuaikan diri mengikuti tuntutan perkembangan tekhnologi yang ada, oleh karenanya sasaran utama kami dalam pengembangan tekhnologi ini difokuskan pada :

IT is one of the Bank's most crucial pillars of business, and therefore we must at all times adjust and adapt ourselves to the nascent technological challenges, and in that regard our main aim in developing our technologies are focused on:

1. Memberikan dukungan penuh untuk akselerasi bisnis tanpa mengabaikan prudential banking, dengan melakukan pengkajian yang efektif dan efisien dalam menentukan dukungan Teknologi Informasi terhadap kegiatan dan atau pengembangan bisnis;
2. Meningkatkan Tata Kelola Teknologi Informasi pada lingkungan Bank yang mencakup namun tidak terbatas pada pengelolaan, pengendalian, penggunaan dan pengamanan layanan Teknologi Informasi;

Kami berharap bahwa layanan perbankan secara digital (seperti *Internet Banking* Bank BNP) yang ditawarkan kepada para nasabah melalui berbagai fasilitas dapat memberikan pelayanan yang maksimal bagi para nasabah dan mitra kami.

Komitmen Baru

Tujuan dari Bank BNP untuk mewujudkan visi dan misinya menjadi salah satu target yang mau tidak mau harus dicapai, sehingga berdasarkan evaluasi yang cukup panjang, terhadap Visi dan Misi Bank BNP saat ini telah mengalami penyesuaian dengan dirubah menjadi "Mitra Usaha Nasabah yang Sehat dan Terpercaya". Untuk melengkapi hal tersebut kami telah membuat *tag line* "Dari Parahyangan Untuk Nusantara" hal ini kami gaungkan untuk terus meningkatkan nilai-nilai baik dalam bekerja untuk memberikan *customer experience* yang semakin baik.

Berpusat ditanah/bumi Parahyangan hampir selama setengah abad, kami melayani nasabah-nasabah dari generasi ke generasi dan kami menciptakan sebuah hubungan yang tak tergantikan (irreplaceable relationship). Hasil karya ini kami ingin sebarkan ke seluruh daerah di Nusantara sehingga dengan demikian nama Bank BNP akan dikenal sesuai dengan namanya Bank Nusantara Parahyangan.

Dengan menggunakan filosofy *face to face business*, Saya mengharapkan hubungan antara Bank BNP dengan mitra nasabahnya terjalin sangat baik dan tidak tergantikan, oleh karenanya *tag line* kami dari Parahyangan Untuk Nusantara menjadi komitmen dan nilai yang harus diusung Bank BNP kedepannya.

Komitmen Bank BNP untuk mempermudah akses layanan nasabah secara bertahap terus dilakukan baik melalui kemudahan memperoleh informasi maupun kebutuhan atas transaksi lainnya yang tentunya didukung oleh teknologi yang dimiliki Bank BNP seperti upaya untuk melakukan *e-statement*, *form* aplikasi yang secara elektronik, persiapan *Mobile Banking* dan pengembangan *internet banking phase 2* diharapkan dapat menambah nilai pelayanan Bank kepada nasabahnya.

1. Providing full support for business acceleration by continuing to uphold the principle of prudential banking and by conducting effective and efficient IT review, aligning the IT initiatives with the Bank's business development activities;
2. Improving IT Governance in the Bank's working environment, which includes but not limited to managing, controlling, utilizing, and securing our information technology system;

It is our hope that our digital banking services (such as Bank BNP's Internet Banking) offered to our customers through a range of facilities may provide maximum satisfaction to our customers and business partners.

New Commitments

Bank BNP's commitment to pursuing its vision and mission is an absolute target that must be achieved. Bank BNP's current vision and mission have been changed to "Being a Strong and Reliable Business Partner for Our Customers". To complement this, we have developed a tagline: "From Parahyangan for Nusantara". Imbued with this spirit and commitment, we hope to be able to continuously enhance our positive values in running our business activities and in improving customer experience.

Being based in Parahyangan for almost half a century, we have been serving generation after generation of loyal customers, fostering irreplaceable relationships in so doing. This work of ours we would like to spread to all regions in Nusantara, to make Bank BNP's name resonating across the region as Bank Nusantara Parahyangan.

By leveraging on our face-to-face business philosophy, I hope that the relationship between Bank BNP and its customers can be fostered to become something irreplaceable, and therefore our tagline, 'From Parahyangan For Nusantara' shall be the value espoused by the Bank as we go forward.

Furthermore, Bank BNP's commitment to providing ease of access to all customers has been implemented, among others by ensuring ease of access to information as well as other transactions, all supported by our computerized technologies, such as e-statement, e-application forms, mobile banking preparations, and development of the second stage internet banking feature.

Perubahan Pengurus
Perubahan pengurus yang dilakukan Bank BNP adalah untuk meningkatkan akselerasi bisnis, sehingga diharapkan dengan adanya perubahan-perubahan dalam jajaran pengurus akan menambah daya juang bisnis Bank BNP kedepannya.

Pada pertengahan tahun 2017, tepatnya tanggal 02 Juni 2017 setelah diperolehnya pernyataan lulus *fit & proper test* dari OJK, Bank BNP telah mengangkat Saya, Hideki Nakamura sebagai Presiden Direktur yang baru menggantikan Saudara Takeru Agawa yang mengundurkan diri. Pengangkatan ini dilakukan melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

Sedangkan perubahan pengurus juga terjadi pada *layer* kedua/pejabat eksekutif yang secara bertahap mengalami beberapa penyesuaian dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi Bank BNP.

Kinerja Keuangan Bank BNP Tahun 2017.
Sepanjang tahun 2017, Bank BNP membukukan Laba Sebelum Pajak negatif sebesar Rp 69,13 miliar atau sama dengan menurun sebesar 672,63% dari perolehan Laba tahun sebelumnya sebesar Rp 12,07 miliar. Penurunan perolehan laba ini terutama disebabkan oleh adanya pembayaran Pajak sebesar Rp. 17 miliar dan naiknya pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) sebesar Rp. 138 miliar selama tahun 2017, hal ini terkait dengan naiknya NPL netto dari semula 4,07% pada akhir tahun 2016 menjadi sebesar 4,50%, atau naik 0,43% di tahun 2017 termasuk didalamnya adalah CKPN untuk penghapusan Kredit. *Return on equity* (ROE) tercatat minus sebesar 5,27% turun sebesar 5,97% dari ROE tahun 2016, sementara rasio kecukupan modal atau CAR juga mengalami penurunan sebesar 3,08% menjadi 17,49% dari semula 20,57% di tahun 2016.

Manajemen dan karyawan Bank BNP bersama-sama berupaya merealisasikan dan mempertahankan kinerja keuangan yang mengalami tekanan dalam portofolio kredit yang dimiliki. Seiring berjalannya waktu penyelesaian kredit bermasalah dan upaya untuk mengatasi *run off loan* yang berjalan mengakibatkan menurunnya volume bisnis Bank BNP secara umum. Di samping itu, persaingan usaha di industri perbankan juga ketat, hal ini berdampak pada hasil pencapaian kinerja keuangan Bank BNP tahun 2017 yang tercermin dalam Laporan Keuangan pada Laporan Tahunan 2017 ini.

Volume bisnis Bank BNP pada tahun 2017 ini belum beranjak dari kecenderungan menurunnya perolehan Dana Pihak Ketiga, sehingga Total Aset Bank mengalami penurunan sebesar 1,62% menjadi sebesar Rp 7,58 triliun dari semula Rp 7,71 triliun pada tahun 2016, hal ini seiring

Management Changes
In line with Bank BNP's efforts to accelerate its growth, the Bank made certain changes in its management composition, which is expected to boost its long-term business sustainability.

In mid–2017, namely on 2 June 2017, after I had received the favorable fit & proper test result from the OJK, I was appointed as the new President Director by Bank BNP, to replace Mr. Takeru Agawa who had resigned from his post. This appointment was made by the General Meeting of Shareholders' resolution.

Changes also occurred on the second layer, or the executive officer layer, where certain executive officers were gradually adjusted in light of Bank BNP's needs and conditions.

Bank BNP's Financial Performance in 2017
In 2017 Bank BNP recorded a negative income before income tax of Rp69.13 billion, a decline by 672.63% from the previous year's income of Rp12.07 billion. This declining income was owing to the payment of taxes amounting to Rp17 billion, and an increase in the provision of allowance for impairment losses (CKPN) by Rp138 billion in 2017, which was needed to compensate the rising NPL net from 4.07% as at end of 2016 to 4.50% as at end of 2017 (an increase of 0.43%). This includes the CKPN for the write-off of certain loans. The Bank's return on equity (ROE) was negative 5.27%, a drop by 5.97% from 2016 ROE, while the Capital Adequacy Ratio (CAR) also dropped by 3.08%, from 20.57% in 2016 to 17.49%.

The entire management and employees of Bank BNP strived to maintain and achieve positive financial performance despite the increased pressures on its portfolio. Efforts to resolve certain non-performing loans and some run-off loans heavily impacted Bank BNP's business activities in general, and this was exacerbated by the generally tough environment in the banking industry throughout 2017. Bank BNP's financial results in 2017 have been thoroughly reflected in the accompanying Financial Statements for FY2017.

Bank BNP's business activities in 2017 was also impacted by the decline in third party funds, which reduced the Bank's assets by 1.62% to Rp7.58 trillion, from Rp7.71 trillion as at end of 2016. Total third party funds went down from Rp6.32 trillion as at end of 2016 to Rp6.22 trillion as at end of 2017,

dengan menurunnya pertumbuhan Dana Pihak Ketiga dari semula Rp 6,32 triliun pada tahun 2016 menjadi Rp 6,22 triliun pada akhir tahun 2017 atau sama dengan menurun sebesar 1,59%, di mana komposisinya masih didominasi dana dengan bunga mahal yaitu Simpanan Berjangka. Penurunan pada simpanan ini juga sebagai akibat kebijakan internal manajemen untuk melakukan perhitungan kembali atas biaya dana/*cost of fund* sehingga suku bunga simpanan berjangka secara bertahap disesuaikan menurut suku bunga acuan dan perhitungan kemampuan pembayaran bunga.

signifying a 1.59% decline. Third party funds remained heavily composed of time deposits. The reduction in this type of deposit was an impact from the management's internal policy to recalculate its cost of fund, which subsequently saw the interest rate for time deposits being gradually adjusted to the reference interest rate and also to the Bank's internal ability to pay interest.

Kemampuan Bank BNP untuk mencatatkan laba positif nampak dalam pertumbuhan beberapa pos keuangan yang terjadi pada triwulan IV tahun 2017, dimana secara bertahap capaian laba pada triwulan tersebut sudah menunjukkan hasil positif, sekalipun secara akumulasi dalam setahun masih belum membaik, hal ini juga dikarenakan adanya beberapa biaya yang tak terduga yaitu adanya pembayaran kekurangan pembayaan pajak tahun 2013 dan 2014 yang menjadi beban tahun buku 2017 sebesar Rp. 17 miliar.

Bank BNP's ability to generate positive profit was reflected in the growth in a number of accounts in the balance sheet which occurred in the fourth quarter of 2017, whereby the profitability in that quarter was positive, despite for the whole year the accumulated result was still negative, owing to unforeseen expenses, primarily for tax underpayment for tax years of 2013 and 2014, which was recorded in the 2017 financial statements, and amounted to Rp17 billion.

Pencapaian versus Target

Terhadap beberapa pos neraca yang material seperti Simpanan Dana Pihak Ketiga dan Total Aset serta beberapa rasio keuangan penting menunjukkan pencapaiannya dibawah target dengan deviasi pencapaian berkisar pada angka 90% - 97%, namun demikian pertumbuhan portofolio kredit menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan dan pencapaiannya sebesar 103,93% diatas target, hal ini menunjukkan gejala positif untuk perkembangan penyaluran kredit kedepannya.

Achievements vs. Targets

Certain material elements of the balance sheet, such as third party funds and total assets, as well as various key financial ratios, were lower than the targets, with deviations from their respective targets ranging from 90 to 97%. However, lending portfolio growth was recorded at 103.93% above target. This serves as a positive indicator for further development in lending.

Sedangkan target Laba Bersih Bank BNP pencapaiannya negatif cukup signifikan terhadap Rencana Bisnis Bank, dimana deviasi atas pencapaian Laba ini dikarenakan meningkatnya pembentukan CKPN dan adanya kurang bayar pajak selama periode 2013 dan 2014 yang menjadi beban tahun buku 2017. Manajemen akan terus berupaya melakukan perbaikan seluruh rangkaian proses dan kualitas monitoring dengan menerapkan prinsip prudential.

Bank BNP's net income was nevertheless recorded in the negative territory, deviating significantly from the target stated in the RBB. This was, as explained earlier, owing to the provision of CKPN and the tax underpayment for tax years of 2013 and 2014, which was recorded in the 2017 financial statements. The management strives to introduce key improvements across the entire chain of processes, and strengthening the quality of supervision by upholding the principle of prudential banking.

Tinjauan Lini Usaha

Tinjauan usaha pada lini usaha penyaluran kredit, setelah melalui proses konsolidasi, *profiling* debitur, dan juga perbaikan, volume kredit Bank BNP pada tahun 2017 mengalami kenaikan 9,99% dari tahun sebelumnya dan untuk sisi pertumbuhan kredit komersial mencapai pertumbuhan sebesar 15,15%. Namun demikian peningkatan ini belum sepenuhnya dapat kembali pada *trend* pertumbuhan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, khususnya dalam kontribusinya terhadap profit dan rasio-rasio keuangan

Business Review

In terms of lending, after a series of consolidations, debtor profilings, and improvement measures, we managed to record a 9.99% growth in lending in 2017, from the previous year's position, while commercial loans rose by 15.15%. However, this increase had not been in full swing when compared with growth rate in the previous years, and in particular in terms of its contribution to income and other financial ratios. The management's initiative to perform consolidation in the Bank's business has nevertheless borne

lainnya, tetapi setidaknya hal ini menunjukkan bahwa perbaikan dan konsolidasi yang dilakukan oleh manajemen sudah mulai menunjukkan arah yang benar dan memberikan hasil yang positif.

fruit as the Bank is now on track towards positive growth once again.

Penyediaan dana pada tahun 2017, memang dibuat tidak terlalu agresif, sehingga rasio *Loan to Funding Ratio* (LFR) menjadi cukup tinggi yaitu 93,99% dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 84,18% dengan tujuan mengoptimalkan dana yang diterima yang pada akhirnya dapat meningkatkan profit perusahaan. Selain itu juga, BNP mulai lebih fokus menggali dana dari Giro dan Tabungan yang biaya dana-nya relatif lebih murah dibanding dengan Deposito Berjangka. Hal ini bertujuan selain untuk meningkatkan *Net Interest Margin* (NIM), juga untuk tetap menjaga tingkat pertumbuhan dana di Bank BNP.

Funding activities in 2017 had been controlled in a way that resulted in our Loan to Funding Ratio (LFR) of 93.99%, considerably high compared with 84.18% recorded in 2016, so that all the funds collected by the Bank could be used optimally to improve profitability. In addition, Bank BNP has also been more focused to generate funding from demand deposits and savings deposits, whose cost of fund is lower than that of time deposits. This not only will improve the Bank's Net Interest Margin (NIM), but also to maintain the growth in funding.

Terhadap lini usaha berbentuk penyaluran kredit konsumer, masih mengalami pertumbuhan negatif, karena memang saat ini Bank BNP masih lebih fokus kepada pertumbuhan kredit produktif – UKM sebagai salah satu kontribusi Bank BNP dalam pembangunan di Indonesia.

Lending via consumer loans shrank owing to Bank BNP's strategy to focus more on productive loans, i.e. lending to SMEs. This is also a contribution of Bank BNP towards the national development of Indonesia.

Kredit Tanpa Agunan (KTA) dengan brand Mirai+ yang diluncurkan di awal tahun 2016, sangat memberikan kontribusi positif khususnya pada sisi perolehan *Interest Margin*, mengingat suku bunga pinjaman yang cukup tinggi. Pada tahun 2017 KTA melakukan beberapa upaya untuk *improvement* kualitas portofolio kredit dengan tetap menjaga pertumbuhan yang terkendali. Ditambah dengan *adjustment risk premium* yang tepat sesuai dengan profil market yang diaukuisisi maka KTA diharapkan dapat menjadi *second engine* bagi BNP dalam mendorong pertumbuhan pendapatan bunga.

KTA Mirai+ unsecured loan product, which was launched in 2016, contributed positively to the Bank especially in terms of NIM, given its relatively higher interest rate. In 2017, the Bank endeavored to increase KTA portfolio's quality while at the same time ensuring a controlled growth in size, as well as adjusting its premium risk to the appropriate market that it sought to acquire. Hence, KTA is expected to become a second engine for growth for Bank BNP to boost its interest income.

Dari sisi proses kredit dan tata kelola perkreditan, Bank BNP sudah menunjukkan hasil yang positif. *Tools* untuk *monitoring* sudah banyak diciptakan dan dilakukan sebagian secara sistem. Hampir semua proses dalam pemberian kredit sudah dapat di *tracking* dan sudah dapat di *monitoring follow up*-nya. Hal ini tentu meningkatkan kualitas proses kredit dan *monitoring* di BNP. Sebagai hasilnya adalah adanya pertumbuhan kredit yang disertai dengan kualitas yang diharapkan lebih baik.

Bank BNP's lending processes and lending governance have improved. Loan monitoring facility has been established and is now being implemented in various systems. Almost all processes involved in lending can now be monitored and traced, while all follow up measures can also be tracked. This has brought improvement to Bank BNP's lending and monitoring quality, and will certainly help the Bank expand its lending portfolio even as it improves its portfolio quality.

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) secara berkesinambungan menjadi salah satu upaya yang dilakukan unit *Human Capital* sehingga berdampak terhadap pencapaian bisnis dan tujuan Bank BNP.

Human Capital Development

The continuous development of our human capital has long been a strategy pursued by our Human Capital Unit in order to achieve Bank BNP's business goals and purposes.

Perseroan menjalankan *Man Power Planning* dengan didukung sistem rekrutmen berdasarkan prinsip *"the right*

The Bank implements the Man Power Planning mechanism in its recruitment, which takes place in a graded selection

man in the right position". Proses rekrutmen ini terdiri atas beberapa tahap seleksi yang harus dilalui setiap kandidat untuk dapat bergabung untuk menjadi karyawan Bank BNP.

process, in order to fulfill the principle of "the right man in the right position".

Pengelolaan sumber daya manusia sebagai mitra strategis bertujuan untuk mendorong pertumbuhan bisnis serta mendukung upaya Bank BNP untuk memberikan yang terbaik bagi semua *stakeholder.*

The management of human capital has the aim to boost business growth while supporting the initiatives of Bank BNP to create and provide the most meaningful value to all of its stakeholders.

Perseroan mengembangkan program pendidikan dan pelatihan secara internal, serta menyediakan berbagai kesempatan bagi karyawan di berbagai lini untuk mengikuti program training secara eksternal. Program eksternal dimaksudkan untuk ekspansi dan ekstensifikasi pengetahuan dan ketrampilan, sedangkan program internal bertujuan terutama untuk standarisasi mutu layanan dan peningkatan *technical & soft skill*, termasuk pengetahuan produk dan jasa Bank.

In addition, the Bank also develops internal training and development programs, and provide various opportunities for its employees to participate in external training programs. External programs are intended to expand and extensify the employees' skills and knowledge, while internal programs are intended to standardize service quality and improve technical and soft skills, including regarding the Bank's products and services.

Pengembangan SDM merupakan cara efektif dalam menghadapi beberapa tantangan, termasuk keuangan atau ketertinggalan karyawan, diversifikasi tenaga kerja, perubahan-perubahan sosioteknis dan perputaran tenaga kerja.

HR development is an effective means for dealing with various challenges, including financial hindrances and employee-related lags, workforce diversification, sociotechnical changes, and workforce turnover.

Kandidat yang masuk dalam proses tahap seleksi merupakan kandidat yang telah terjaring dalam proses rekrutmen *pro-hire* yang menggunakan jasa *headhunter*, referensi, *campus hiring, job fair*, dan beberapa media *jobseeker*. Melalui proses ini diharapkan karyawan yang bergabung adalah kandidat terbaik yang sesuai dengan kualifikasi posisi yang dibutuhkan.

The candidates that were included in the selection phase are those that have been selected via pro-hire recruitment process done by headhunters, references, campus hiring, job fair, and various jobseeker media. Through these processes, we hope that those who join us eventually are none other but the best candidates required for the vacant positions in the Bank.

Pernyataan Kepatuhan Bank terhadap Tata Kelola Perusahaan

The Bank's Compliance with Corporate Governance

Pelaksanaan atas tatakelola perusahaan merupakan cerminan kepatuhan Bank terhadap regulasi, komitmen dan aturan yang mengikat dari Bank BNP.

The implementation fo good corporate governance reflects the Bank's compliance with all the regulations, commitments, and provisions prevailing which Bank BNP must adhere to.

Kami terus berupaya mengingatkan dan menekankan kepada seluruh jajaran pengurus dan karyawan, bahwa sekalipun Bank BNP sedang berada pada kondisi keuangan yang cukup berat dan penuh tantangan, namun upaya untuk meminimalkan dampak atas tekanan kondisi eksternal maupun internal dalam menjalankan roda bisnisnya harus tetap berlandaskan pada struktur tata kelola perusahaan yang telah dibangun selama ini.

We are tirelessly inculcating the spirit of compliance in all of our management personnel and employees, so that all our efforts to minimize impacts from the external and internal conditions on the Bank's ability to conduct business always be grounded upon a good governance structure which the Bank has been relentlessly building.

Selama tahun 2017 Bank BNP berupaya untuk memperbaiki, menjaga dan menyempurnakan kualitas penerapan GCGnya baik di jajaran top level maupun di seluruh lini kerja dengan mengutamakan prinsip dasar GCG yaitu TARIF, serta upaya dalam meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan di Bank BNP melalui pembahasan dan penetapan self assessment

Throughout 2017, Bank BNP endeavored to enhance, maintain, and improve its GCG implementation quality, from top level down to all work units, by upholding the key principles of GCG, abbreviated as TARIF, and efforts to improve corporate governance quality in Bank BNP by conducting self-assessment and supervision of GCG

dan kualitas pelaksanaan GCG melalui Komite Kepatuhan, yang terdiri dari unsur Satuan Pengendali Internal, Manajemen Risiko dan Kepatuhan.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)

Dalam menjalankan roda bisnisnya, Bank BNP sebagai institusi, tidak terlepas dari kondisi lingkungan sosial dan alam serta keberadaannya mempengaruhi lingkungan di mana kantor tersebut beroperasi, sehingga dituntut tanggung jawab moral Bank BNP terhadap lingkungan dan sosial di sekitarnya serta harus dapat memberikan dampak yang berkelanjutan/*sustainability*.

Sehingga sudah seyogyanya model dan pola pelaksanaan tanggung jawab sosial harus dilakukan secara berkesinambungan dan memberikan nilai tambah baik bagi masyarakat maupun Bank BNP sebagai Bank, tentunya aktivitas CSR ini juga disesuaikan dengan kondisi Bank BNP secara keseluruhan.

Selama tahun 2017 kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan mulai berorientasi pada kegiatan bersama dengan konglomerasi keuangan Bank BNP yang dikomandoi oleh The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Ltd. dengan anggota yang lainnya, seperti halnya pemberian sumbangan buku dan renovasi ruang Perpustakaan swadaya masyarakat di Cigending Ujungberung- Jawa Barat dan lain sebagainya termasuk kegiatan edukasi dan literasi keuangan sebagaimana dijabarkan dalam pembahasan mengenai *Corporate Social Responsibility* pada bahasan berikutnya.

Prospek Usaha 2018

Pertumbuhan ekonomi global 2018 diperkirakan relatif sama seperti tahun sebelumnya, dengan peningkatan sumber pertumbuhan yang berasal dari negara berkembang. Di negara maju, pertumbuhan ekonomi AS terus berlanjut ditopang konsumsi dan investasi. Di sisi lain, pemulihan ekonomi Eropa diperkirakan sedikit tertahan dibayangi risiko politik di kawasan. Ekonomi Jepang 2018 diperkirakan tumbuh melambat karena kendala struktural aging population dan stimulus fiskal yang semakin terbatas. Sementara itu di negara berkembang, ekonomi Tiongkok diperkirakan tumbuh melambat pada 2018 seiring dengan perlambatan investasi akibat kebijakan pengetatan properti.

Perekonomian Indonesia pada triwulan IV 2017 diperkirakan tumbuh stabil dan akan meningkat pada 2018. Pada triwulan IV 2017, kinerja ekspor diperkirakan lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya di tengah pertumbuhan impor, terutama migas, yang masih cukup tinggi. Di sisi

performance by the Compliance Committee, which is composed of the Internal Control, Risk Management, and Complianc Units.

Corporate Social Responsibility (CSR)

As a responsible corporate citizen, Bank BNP strives to create a lasting and meaningful impact on the surrounding environment and the communities in and around its operational areas. Thus, Bank BNP has the moral duty to the environment and the society around it by providing a sustainable impact on them.

It is natural therefore that the corporate social and environmental responsibility must be continuous and be meaningfully impactful on the society and on Bank BNP as a bank, and certainly these CSR activities must be adjusted to Bank BNP's overall conditions.

In 2017, the Bank's CSR activities were begun to be focused on joint activities held under the coordination of Bank BNP's financial conglomeration led by The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Ltd. The activities we performed include donation of books and renovation of public library in Cigending, Ujung Berung, West Java, as well as financial education and literacy activities as detailed further in the following section on Corporate Social Responsibility in this 2017 Annual Report.

2018 Business Prospects

In 2018, the global economic growth is set to be relatively similar as in the previous years, with the driving force coming mainly from developing economies. Among the developed countries, the economic growth of the US will continued to be bolstered by consumption and investment. On the other hand, economic recovery across the European Union is predicted to be slightly weighed down by rising political risks. Japan's economy in 2018 is predicted to slow down owing to structural issues arising from its aging population and a much more limited room for fiscal stimulus. China's economy, meanwhile, is expected to slow down in 2018 owing to weaker investments driven by the government's tightening of the property market.

The Indonesian economy is expected to be thriving in 2018. In the fourth quarter of 2017, export performance is estimated to be lower than in the previous quarter, in contrast to rising import, especially that of oil and gas, which remained high. In terms of domestic demand, investments will expand with

permintaan domestik, investasi membaik ditopang proyek infrastruktur pemerintah dan peran investasi swasta yang terus meningkat. Sementara itu, perbaikan konsumsi diperkirakan belum cukup kuat.

Dengan perkembangan tersebut, untuk keseluruhan 2017, perekonomian domestik diperkirakan tumbuh sekitar 5,1%. Pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan membaik bersumber dari menguatnya permintaan domestik sejalan dengan peningkatan investasi, konsumsi rumah tangga, dan stimulus fiskal. Sementara itu, ekspor diperkirakan tetap tumbuh positif seiring dengan berlanjutnya perbaikan ekonomi global dan harga komoditas yang masih tinggi. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi 2018 diperkirakan meningkat pada kisaran 5,1-5,5%.

Transmisi pelonggaran kebijakan moneter melalui jalur suku bunga terus berlangsung, tercermin dari berlanjutnya penurunan suku bunga deposito dan suku bunga kredit, meski belum dalam besaran yang diharapkan. Transmisi melalui jalur kredit juga masih belum optimal, tercermin pada pertumbuhan kredit yang masih terbatas sejalan dengan permintaan kredit yang belum tinggi dan perilaku bank yang masih selektif dalam memberikan kredit baru. Pertumbuhan kredit November 2017 tercatat sebesar 7,5% (*yoy*), lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yaitu sebesar 8,5% (*yoy*). Di tengah pertumbuhan kredit perbankan yang terbatas, pembiayaan ekonomi melalui pasar keuangan, seperti penerbitan saham, obligasi, dan *medium term notes* (MTN), terus tumbuh tinggi hingga mencapai 29,7% (*yoy*) pada November 2017. Sementara itu, pertumbuhan DPK pada November 2017 tercatat 9,8% (*yoy*), menurun dibandingkan bulan sebelumnya 11,0% (*yoy*). Dengan perkembangan tersebut, untuk keseluruhan 2017, DPK dan kredit diperkirakan tumbuh masing-masing sekitar 9,0% (*yoy*) dan 8,0% (*yoy*). Sejalan dengan perkiraan perbaikan ekonomi dan penerapan kebijakan makro prudensial terkait intermediasi dan pengelolaan likuiditas, serta progres program konsolidasi korporasi dan perbankan yang ditempuh, Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan DPK dan kredit akan lebih baik pada 2018, masing-masing dalam kisaran 9,0-11,0% (*yoy*) dan 10,0-12,0% (*yoy*).

Strategi Usaha 2018

Perseroan terus berupaya meningkatkan kinerja bisnisnya melalui langkah-langkah strategis yang telah ditetapkan. Salah satu langkah dalam upaya meningkatkan *Corporate Branding* adalah dengan menggunakan *endorsement line "A Member of MUFG, a global financial group*" pada logo Bank BNP, langkah ini dilakukan selain perseroan merupakan

the support of the government's infrastructure projects and the increasingly strong role played by the private sector. Consumption, however, is expected to remain stagnant.

With such developments, for the whole year of 2017 the domestic economy was estimated to grow by 5.1%. In 2018, economic growth will improve, driven by the strengthening domestic demand in line with improving investment, household consumption, and fiscal stimulus. Export, meanwhile, will record an increase in line with the recovery of the global economy and the environment of high commodity prices. All in all, economic growth in 2018 will range from 5.1 to 5.5%.

The monetary expansion via interest rate channel has been reflected by the further reduction in interest rates for time deposits and lending, although with a size not as substantial as many have expected. Transmission of growth along the lines of lending has not been optimal either, as reflected by a limited growth in lending in keeping with the rather weak demand for loans and a general attitude among banks that remain selective in providing new loans. By November 2017, lending growth had only reached 7.5% (yoy), lower than the same period in the previous year, of 8.5% (yoy). Amidst such limited growth in banking lending, economic financing via the financial markets, such as via share, bond, and medium term notes (MTN) issuance, had soared to book a 29.7% (yoy) growth by November 2017. Meanwhile, Third Party Funds growth by November 2017 was recorded at 9.8% (yoy), down from the previous month's 11.0% (yoy). With these developments, for the entire year of 2017, Third Party Funds and lending are expected to grow by around 9.0% (yoy) and 8.0% (yoy), respectively. In line with improving economic growth and implementation of macroprudential policies related to intermediation and liquidity management, as well as the progress of corporation and banking consolidation efforts, Bank Indonesia projected higher growth in third party funds and lending in 2018 compared to in 2017, by 9.0 to 11.0% (yoy) and 10.0 to 12.0%, respectively.

Business Strategies

Bank BNP continuously strives to enhance its business performance by undertaking strategic initiatives, among others by improving our corporate branding by relying on the endorsement line of "A Member of MUFG, a global financial group" on Bank BNP's logo. This initiative not only is aimed at introducing Bank BNP as part of the global

bagian dari MUFG yang merupakan *financial group* dunia, juga mendukung akselerasi dan ekspansi bisnis serta kemampuan bersaing di industri perbankan.

Seiring dengan perkembangan kebutuhan bisnis perbankan di tengah masyarakat, perseroan meningkatkan perannya menjadi mitra usaha bagi nasabahnya. Hal ini ditunjukkan melalui peningkatan pelayanan seperti tercermin dalam strategi pengembangan bisnisnya.

Oleh karena itu bank mengubah visi dan misinya, visi perseroan menjadi *"Menjadi Mitra Usaha Nasabah yang Sehat dan Terpercaya"* dan Misi dari perseroan adalah : Menjadi mitra usaha terpercaya yang memberi solusi dan nilai tambah bagi seluruh *stakeholders*; Melaksanakan tata kelola usaha yang baik dan benar seiring pertumbuhan dan perkembangan perusahaan yang berkesinambungan; Secara berkesinambungan meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang mampu melampaui harapan nasabah; dan Berperan serta mendukung pertumbuhan ekonomi pembangunan nasional. Disamping perubahan visi dan misi, Bank BNP juga menambahkan *tagline "Dari Parahyangan Untuk Nusantara"*, guna meningkatkan *brand image* Bank BNP sebagai Bank yang berkantor pusat di kota Bandung.

Dalam memperkuat infrastruktur pendukung bisnis serta meningkatkan layanan kepada nasabah, Bank BNP sudah menyediakan fitur *internet banking*, jumlah pengguna *internet banking* sampai tahun 2017 sudah mencapai 1.829 orang dan kedepannya, kemudahan aktivasi akan terus ditingkatkan.

Dalam hal penghimpunan dana, Bank BNP tetap fokus pada penghimpunan Dana Pihak Ketiga khususnya dana murah, untuk meningkatkan komposisi dana murah (dari Tabungan dan Giro, yang suku bunganya lebih rendah dibandingkan Deposito), Bank terus berupaya menarik nasabah baru melalui produk Tabungan seperti: Japan, Sakura, Dollar, Parahyangan, dan TabunganKu. Di samping melakukan pemasaran langsung atas produk-produk simpanan yang ditawarkannya, Bank BNP juga mengadakan beberapa program-program reguler untuk menarik dana dari masyarakat melalui berbagai jenis kegiatan promosi. Sementara di sisi penyaluran dana, perseroan berupaya meningkatkan volume penyaluran dana melalui tingkat suku bunga yang bersaing dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Melalui berbagai inisiatif tersebut, perseroan berkeyakinan memiliki keunggulan kompetitif di tengah persaingan di industri perbankan yang cukup ketat sehingga perseroan dapat menjadi mitra usaha nasabah yang sehat dan

financial conglomeration of MUFG, but also at supporting our business acceleration and expansion while boosting our competitiveness in the banking industry.

In line with the development of society's needs for banking services, the Company is enhancing its roles as a business partner for its customers. This has been reflected thus far by the improvement of services, in alignment with its business development strategy.

The Bank, therefore, has transformed its vision and mission. Its vision is now "To Become a Sound and Reliable Business Partner for Customers", while its Mission is "to become a reliable business partner that provides solutions and added value to all stakeholders; perform good corporate governance in alignment with the sustainable growth of the Company; continuously improve technology-based product and services quality to exceed customers' expectations, and participate in the development of the national economy. In addition to the changes to the vision and mission, Bank BNP also created a tagline "From Parahyangan For Nusantara" to enhance Bank BNP's brand image as a bank headquartered in Bandung.

To strengthen its business supporting infrastructure and enhance service to customers, Bank BNP offered the internet banking feature, which by end of 2017 had been used by 1,829 users. The ease with which customers can activate their internet banking account will be further improved in the future.

In terms of funding, Bank BNP shall be focused on generating funding from third party funds, especially from low-cost funds (from savings and demand deposits, whose interest rates are lower than time deposits). The Bank will expand its customer base by offering various savings products, such as Japan, Sakura, Dollar, Parahyangan, and TabunganKu. In addition to directly marketing its savings products, Bank BNP also runs various regular programs to boost its funding from the public via a number of promotional activities. In terms on lending, the Bank shall be focused on increasing its lending volume by offering competitive interest rates by continuing to adhere to the principle of prudential banking.

Through these initiatives, Bank BNP is optimistic that its competitive advantages will help it secure growth amidst a fierce business competition in the national banking industry, and thus becoming a strong and reliable business partner of

terpercaya. Lebih lanjut, dapat berperan serta dalam mendukung pertumbuhan ekonomi pembangunan nasional.

Apresiasi

Untuk melalui tahun 2017 ini sangatlah tidak mudah, karena banyaknya tuntutan dan kerja keras, upaya yang sungguh-sungguh dalam mengevaluasi kualitas aset yang ada, kebutuhan reorganisasi, maksimalisasi pertumbuhan bisnis dengan mengupayakan perbaikan dan optimalisasi network yang dimiliki, langkah-langkah peningkatan efisiensi biaya operasional, dan adanya komitmen untuk pencapaian target yang telah disepakati, namun pada akhirnya kita dapat melewati tahun 2017 dengan cukup baik, terbukti bahwa deviasi pencapaian profit dibanding target membaik.

Izinkan saya atas nama Direksi mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan kerja keras yang telah ditunjukkan oleh seluruh karyawan dan pengurus, sehingga kita dapat mengakhiri tahun 2017 ini dengan baik. Optimisme kami bahwa Bank BNP akan mampu kembali kepada rel bisnisnya yang terbaik dengan berbagai upaya yang telah dilakukan dengan menumbuhkan semangat untuk bekerja disertai dengan tetap tersenyum untuk menyambut masa depan yang lebih baik lagi sebagai Mitra Nasabah yang Utama.

Secara khusus kepada para Nasabah, Mitra, Dewan Komisaris dan seluruh Komite, Saya mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kerjasama yang telah diberikan sehingga kita dapat melalui tantangan ini bersama-sama, demikian pula seluruh regulator seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan seluruh lembaga terkait lainnya, kami mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dukungan dan bimbingan dalam membina dan mengawasi Bank BNP selama tahun 2017 lalu.

Juga tidak lupa kepada para pemegang saham, saya secara khusus ingin menyampaikan penghargaan atas kepercayaan dan dukungan khususnya dari ACOM CO., LTD. dan The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Ltd. selaku pemegang saham pengendali, atas komitmennya untuk senantiasa mengarahkan dan membimbing Bank BNP sebagai bagian penting dari MUFG Group, khususnya di Indonesia.

its customers as it remains a meaningful participant of the national economic development.

Acknowledgments

For Bank BNP, 2017 was a truly challenging year in many respects, owing to the heaps of expectations and hard work and real determined efforts in evaluating the assets' quality, reorganizational needs, maximization of business growth by striving for improvements and optimization of existing network, measures to improve operational cost efficiency, and commitment to achieve the targets set previously. Nevertheless, we managed to close 2017 with certain satisfying results, as proven by the fact that deviation of our profit from its target has been reduced.

I hereby representing the Board of Directors am extending our utmost appreciation for the dedication and hard work of the entire management and employees, which had allowed us to close 2017 soundly. We are optimistic that Bank BNP will return to its most optimum business pathway by performing all efforts necessary to foster the spirit to work, and keep smiling as we welcome a better future for us as a main partner for our customers.

Especially to our Customers, Business Partners, the Board of Commissioners, and all Committees, we extend our thanks for the support and collaboration throughout the year, which had enabled Bank BNP to overcome the challenges. Also to the regulators, i.e. Bank Indonesia, OJK, and all relevant authorities, we are heavily indebted to their support in supervising and helping Bank BNP develop throughout 2017.

Last but not least, we want to thank our shareholders, in particular for the trust and support from ACOM CO., LTD., and The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Ltd. as our controlling shareholders, for their lasting commitment to providing us with the direction that we, as part of the MUFG Group in Indonesia, shall adhere to as we progress in the future.

Bandung, Maret 2018
Salam / Regards,

Hideki Nakamura
Presiden Direktur / President Director

BANK BNP

A member of MUFG, a global financial group

Tabungan **Sakura**

Tabungan dengan manfaat lebih

Untuk Anda yang mendambakan tabungan dengan manfaat lebih, Tabungan Sakura dari Bank BNP merupakan pilihan tepat. Dengan suku bunga premium, simpanan Anda akan berkembang lebih cepat.

Segera buka Tabungan Sakura di cabang Bank BNP terdekat di kota Anda. Untuk informasi lebih lengkap kunjungi www.bankbnp.com

BNP Call: (021) 80560383-384 / www.bankbnp.com. Bank BNP terdaftar dan diawasi oleh OJK

Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2017 PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk.

Statement of Members of Board of Directors and Board of Commissioners on the Responsibility for the 2017 Annual Report of PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk.

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk. tahun 2017 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perusahaan.

Demikian penyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

We, the undersigned, testify that all information in the Annual Report of PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk. for 2017 is presented in its entirety and we are fully responsible for the correctness of the contents in the Annual Report and Financial Report of the Company.

This statement is hereby made in all truthfulness.

Direksi

Board of Directors

Hideki Nakamura
Presiden Direktur
President Director

Kevin Cahyadi Tatang
Direktur Bisnis
Business Director

Markus Sugiono
Direktur Operasional
Operation Director

Trie Karjati Wibowo
Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko
Compliance & Risk Management Director

Eiichiro Sakai
Direktur Kredit, Keuangan & IT
Credit, Finance & IT Director

Dewan Komisaris

Board of Commissioners

Michio Atsuda
Presiden Komisaris
President Commissioner

Tatang Hermawan
Komisaris
Commissioner

Karel Tanok
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Bachtiar Alam
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Halaman ini sengaja dikosongkan

This page is intentionally left blank

Profil Bank Nusantara Parahyangan

Profile Bank Nusantara Parahyangan

52 Informasi Perusahaan
Company's Information

53 Sekilas Perusahaan
Company in Brief

57 Visi dan Misi
Vision and Mission

58 Bidang Usaha
Line of Business

62 Struktur Organisasi
Organizational Structure

64 Struktur Korporat
Corporate Structure

64 Entitas Anak dan Asosiasi
Subsidiaries and Associates

65 Profil Dewan Komisaris
The Board of Commissioners Profile

69 Profil Direksi
The Board of Directors Profile

75 Profil Anggota Komite
Profiles of Committee Member

77 Daftar Nama Kepala Divisi dan Kepala Cabang
List of Head of Divisions and Branch Offices

79 Komposisi Pemegang Saham
Shareholder Composition

82 Kronologi Pencatatan Saham dan Efek
Chronology of Shares and Securities Listing

84 Lembaga Profesi Penunjang Pasar Modal
Capital Market Supporting Professional Institution

85 Nama dan Alamat Jaringan Kantor
Name and Address of Office Branch Offices

88 Peta Operasional
Operational Map

Informasi Perusahaan

Company's Information

Uraian	Keterangan/Remarks	Description
Nama	PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk	Name
Pendirian	18 Januari 1972/January 18, 1972	Establishment
Bidang Usaha	Perbankan/Banking	Line of Business
Alamat	Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Bandung 40132, Jawa Barat - Indonesia	Address
Telepon	(022) 82560100 (Hunting)	Telephone
Call Center	(022) 82560163 – 164	
Fax	(022) 2514580	Fax
Situs Web	www.bankbnp.com	Website
E-mail	corp_communication@bankbnp.com	Email
Pencatatan Saham	Bursa Efek Indonesia Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara I Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 Telepon: (021) 5150515	Share Listing
Kode Saham	BBNP	Ticker Code
Lembaga & Profesi Penunjang Pasar Modal		**Capital Market Supporting Institutions & Professions**
Akuntan Publik	**KAP Satrio Bing Eny & Rekan** **Afiliasi/*Affiliated with* Deloitte South East Asia Ltd (DSEA)** The Plaza Office Tower, 32nd Floor, Jl. M.H. Thamrin Kav 28 – 30, RT.9/RW.5, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat 10350 Indonesia	Public Accountant
Biro Administrasi Efek	PT Sinartama Gunita Sinarmas Land Plaza Tower 3 Jl. M. H. Thamrin Kav. 22 No. 51 Jakarta 10350 Telepon: (021) 3922332	Share Registrar
Notaris	Yuliani Idawati, S.H., Sp.N. Ruko Lucky Town Jl. Ters. Jakarta No. 30 C Bandung, Indonesia Telepon: (022) 7231014	Notary

Sekilas Perusahaan
Company in Brief

PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk. ("Bank BNP") pada mulanya didirikan dengan nama "PT Bank Pasar Karya Parahyangan" berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pasar Karya Parahyangan PT No. 47 tanggal 18 Januari 1972 yang dibuat di hadapan Komar Andasasmita, S.H., Notaris di Bandung, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. Y.A.5/11/19 tanggal 15 Mei 1974 dan telah didaftarkan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Bandung pada tanggal 6 Juni 1974 di bawah No. 81/1974 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 23 Agustus 1974 No. 68, Tambahan No. 426/1074.

Nama Bank diubah menjadi PT Bank Nusantara Parahyangan berdasarkan Akta Risalah Rapat No. 27 tanggal 10 Maret 1989 yang dibuat oleh Albertus Soetjipto Budhardjoputera, S.H., Notaris di Bandung, yang telah mendapat persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C2-4155 HT.01.04.Th.89 tanggal 2 Mei 1989 dan telah didaftarkan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Bandung pada tanggal 11 Mei 1989 di bawah No. 313/1989 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 20 Juni 1989 No. 49, Tambahan No. 1093/1989.

Bank BNP mulai beroperasi sebagai bank umum di Bandung berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 748/KMK.013/1989 tanggal 3 Juli 1989. Berdasarkan Keputusan Direksi Bank Indonesia dengan Surat No. 27/54/KEP/DIR tanggal 5 Agustus 1994, Bank BNP ditingkatkan statusnya menjadi bank devisa.

Bank BNP merupakan salah satu bank umum devisa nasional yang masuk dalam kategori BUKU 2 di Indonesia. Pada tanggal 31 Desember 2017 asetnya mencapai Rp7,58 triliun dengan komposisi Dana Nasabah yang terdiri dari Simpanan dan Deposito sebesar Rp6,22 triliun, permodalan sebesar Rp1,13 triliun dan portofolio pinjaman sebesar Rp5,84 triliun.

Bank BNP menyediakan beragam produk dan layanan yang lengkap dan inovatif, mulai dari kredit pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Kredit Konsumer dan Komersial, Kredit Tanpa Agunan, hingga produk *Funding* berupa Simpanan Berjangka, Tabungan dan Giro, yang ditopang oleh kapabilitas IT dan Tresuri, dan disertai fitur-fitur layanan jasa perbankan yang lengkap.

PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk. ("Bank BNP") was initially established as "PT Bank Pasar Karya Parahyangan", based on the Notarial Deed on Establishment of Bank Pasar Karya Parahyangan PT Limited Company No. 47 dated 18 January 1973, drawn before Komar Andasasmita, S.H., Notary in Bandung, and legalized by the Decree of the Minister of Justice of the Republic of Indonesia No. Y.A.5/11/19 dated 15 May 1974, and registered in the District Court's Clerk Office in Bandung dated 6 June 1974 under No. 81/1974, and announced in the Official Gazette of the Republic of Indonesia on 23 August 1974 No. 68, Supplement No. 426/1074.

The Bank's name was changed to PT Bank Nusantara Parahyangan, based on the Deed of Minutes No. 27 dated 10 March 1989, drawn by Albertus Soetjipto Budhardjoputera, S.H., Notary in Bandung, and approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia through the Decree No. C2-4155 HT.01.04.Th.89 dated 2 May 1989, and registered in the District Court's Clerk Office in Bandung on 11 May 1989 under No. 313/1989, and announced in the Official Gazette of the Republic of Indonesia on 29 June 1989 No. 49 Supplement No. 1093/1989.

Bank BNP started to operate as a commercial bank in Bandung, based on the Decree of the Minister of Finance No. 748/KMK.013/1989 dated 3 July 1989. Subsequently, based on the Decision of the Board of Directors of Bank Indonesia with the Letter No. 27/54/KEP/DIR dated 5 August 1994, Bank BNP's status was leveled up as foreign exchange bank.

Bank BNP is one of the foreign exchange commercial banks operating in the category of BUKU 2 in Indonesia. As at 31 December 2017, its assets stood at Rp7.58 trillion, with Third Party Funds consisting of Savings and Time Deposits amounted to Rp6.22 trillion, capital of Rp1.13 trillion, and lending portfolio of Rp5.84 trillion.

Bank BNP provides a wide range of innovative banking products and services, from Lending facility for Micro, Small and Medium Enterprises (MSME), Consumer Loans, Commercial Loans, Non-Collateral Loans, to Funding products comprising Time Deposits, Savings, and Current Accounts. The Bank is supported by a dedicated IT capability and treasury function as well as many banking service features.

Bank BNP merupakan bank lokal dengan tambahan modal campuran yang berasal dari pemodal Jepang, seperti ACOM CO., LTD. (ACOM) Jepang dan The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. (BTMU) Jepang di tahun 2007 akhir.

Pemegang saham pengendali Bank BNP saat ini dengan kepemilikan sebesar 66,15% adalah ACOM dan BTMU dengan kepemilikan sebesar 9.35%. Keduanya merupakan anak perusahaan dari konglomerasi keuangan Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (MUFG) Jepang yang memiliki jaringan internasional yang luas memberikan keuntungan berupa konektivitas Bank BNP ke dalam jaringan internasional melalui MUFG Group.

Menunjuk pada Peraturan OJK No. 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, Bank BNP tergabung dalam grup konglomerasi tersebut bersama dengan The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ. Ltd Jakarta (BTMU) (*Lead Entity*) bersama dengan anak perusahaan lainnya, yakni U Finance yang berfokus pada pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor.

Bank BNP sebagai salah satu Bank Devisa Nasional, menawarkan berbagai ragam produk dan layanan serta solusi yang komprehensif bagi perusahaan dalam mengelola operasional keuangannya, baik transaksi domestik maupun internasional, dengan memanfaatkan jaringan atau akses ke hubungan korespondensi dan depositori koresponden dengan beberapa bank yang memiliki akses jaringan internasional yang terjamin baik dari sisi teknologi, layanan, dan keamanannya. Jasa layanan perbankan ini meliputi *Remittance*, *Collection*, *Trade Finance*, dan *Money Changer*.

Untuk memberikan keleluasaan dan kemudahan dalam bertransaksi melalui ATM, baik di Indonesia maupun di kawasan ASEAN, nasabah dapat mengakses berbagai ATM nasional dan regional, antara lain melalui jaringan ATM Prima, ATM Bersama, VISA, dan MEPS.

Pada posisi 31 Desember 2017, jumlah jaringan kantor Bank BNP adalah 63 kantor dengan 54 unit ATM yang didukung oleh 1.566 karyawan, didominasi lulusan sarjana (1.024 karyawan) dan kelompok usia 20–30 tahun (728 karyawan), yang tersebar di seluruh Jawa dan Bali.

Berdasarkan keputusan RUPSLB tanggal 15 September 2000, Bank BNP mengubah status perusahaan menjadi perusahaan publik (terbuka) dan menawarkan 50.000.000

Bank BNP as a local bank received capital injection from Japanese investors, namely ACOM CO., LTD. (ACOM) Japan and The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. (BTMU) Japan, in late 2007.

The controlling shareholders of Bank BNP are ACOM, with ownership of 66.15% of total shares, and BTMU (the eight largest universal bank in the world according to Bloomberg in 2010), holding 9.35% of total shares. Both ACOM and BTMU are subsidiaries of the financial conglomerate Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (MUFG) Japan, with a vast international network that provides Bank BNP with excellent connectivity with international network through MUFG Group.

Referring to OJK Regulation No. 17/POJK.03/2014 on Implementation of Integrated Risk Management in Financial Conglomerates, Bank BNP is integrated into the conglomerate together with The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ. Ltd Jakarta (BTMU) (Lead Entity) together with other subsidiaries, namely U Finance which focuses on financing of motorized vehicles.

As one of the National Foreign Exchange Banks, Bank BNP offers various products and services and comprehensive solutions for companies in managing their financial operations, including domestic and international transactions, by utilizing its correspondent networks and depository correspondence with many banks with access to international networks that are renowned for their use of technology, service, and security. These banking services include Remittance, Collection, Trade Finance, and Money Changer.

In addition, customers of Bank BNP can access various national and regional ATM networks, among others the ATM Prima, ATM Bersama, VISA, and MEPS networks. This allows the Bank's customers to conveniently perform transactions at ATMs located in Indonesia and the ASEAN region.

As at 31 December 2017, Bank BNP had 63 offices in its business network, with 54 ATMs and 1,566 employees, chiefly comprising bachelor degree holders (1,024 employees) and in the 20–30 years old age group (728 employees) spread across Java and Bali.

Based on the Decision of EGMS dated 15 September 2000, Bank BNP changed its status to public company and offered 50,000,000 ordinary shares to the public with nominal value

saham biasa kepada masyarakat dengan harga nominal Rp500 per lembar sahamnya. Bersamaan dengan penawaran saham tersebut, Bank BNP juga melakukan penerbitan waran sejumlah 20.000.000 lembar yang dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia) pada 10 Januari 2001, sehingga jumlah saham beredar saat itu menjadi sebanyak 150.000.000 saham. Sebagai akibat adanya *exercise* waran sebanyak 8.275.000 lembar pada 2004, maka jumlah saham beredar bertambah menjadi 158.275.000 saham.

of Rp500 per shares. Along with the offering, Bank BP also conducted issuance of warrants amounting to 20,000,000 sheets registered on the Jakarta Stock Exchange (now Indonesian Stock Exchange) on 10 January 2011, so that the amount of outstanding shares at that time was 150,000,000 shares. As the result of the exercise of warrants amounting to 8,275,000 shares in 2004, the total outstanding shares was increased to 158,275,000 shares.

Untuk memperkuat struktur permodalan, pada Juli 2006 dilakukan Penawaran Umum Terbatas (PUT I) kepada pemegang saham atas sejumlah 158.275.000 lembar saham dengan harga penawaran sebesar Rp550 per saham, sehingga jumlah saham beredar yang telah dikeluarkan Bank BNP menjadi 316.550.000 saham.

To strengthen its capital structure, in July 2006, Bank BNP conducted the Limited Public Offering or Rights Issue (PUT I) to the shareholders on the 158,275,000 shares with offering price of Rp550 per shares, so that the amount of outstanding shares issued by Bank BNP became 316,550,000 shares.

Pada 17 Desember 2007, kepemilikan mayoritas saham Bank BNP telah beralih kepada ACOM CO., LTD.,Japan (ACOM) dan The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. (BTMU) melalui akuisisi saham sebanyak 75,41%. ACOM menguasai 55,41% dan BTMU menguasai 20% dari seluruh saham yang dikeluarkan, menjadikan keduanya sebagai Pemegang Saham Pengendali Bank BNP.

On 17 December 2007, the majority ownership of Bank BNP's shares was switched to ACOM CO., LTD., Japan (ACOM) and The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd (BTMU) through the acquisition of shares amounting to 75.41%. ACOM controlled 55.41% and BTMU controlled 20% from the remaining issued shares, thus the two institutions became the Controlling Shareholders of Bank BNP.

Dari Januari hingga Maret 2008 dilakukan penawaran tender/*tender offer* atas kepemilikan saham Bank BNP oleh ACOM CO., LTD., sehingga jumlah kepemilikan saham ACOM CO., LTD., berubah menjadi 55,68%.

Selanjutnya, pada Oktober 2010 bank BNP kembali melakukan penambahan Modal Disetor melalui Penawaran Umum Terbatas II (PUT II) sebanyak 99.963.158 lembar saham baru dengan harga penawaran sebesar Rp1.000 per saham. Dengan demikian, jumlah saham yang dikeluarkan Bank BNP secara keseluruhan berjumlah 416.513.158 lembar dengan nominal Rp208.256.579.000.

Bank BNP melakukan Penawaran Umum Terbatas III (PUT III) pada Mei 2013 dengan jumlah saham baru yang ditawarkan sebanyak 260.320.724 dengan nominal Rp500 setiap saham dan ditawarkan dengan Harga Penawaran Rp1.150 setiap saham. Hasil PUT III tersebut mengubah komposisi kepemilikan saham Bank, di mana ACOM CO., LTD., menguasai 66,15% dan The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd menguasai 9,35% dari total 676.833.882 saham.

From January to March 2008, a tender offer was conducted on the ownership of Bank BNP by ACOM CO., LTD., so that the total shares ownership of ACOM CO., LTD., became 55.68%.

Subsequently, in October 2010 Bank BNP conducted the addition of Paid-In Capital through Rights Issue II (PUT II) of 99,963,158 new shares with offering price of Rp1,000 per shares. Therefore, the total shares issued by Bank BNP in total became 416,513,158 shares with a nominal value of Rp208,256,579,000.

Bank BNP conducted Rights Issue III (PUT III) in May 2013 with total new shares offered amounting to 260,320,724 with the nominal value of Rp500 per shares, offered with a price of Rp1,150 per shares. The result of PUT III changed the shareholding composition of the Bank, whereby ACOM CO., LTD., controlled 66.15% and The Bank of Tokyo-Mistubishi UFJ Ltd controlled 9.35% of the total of 678.833.882 shares of the Bank.

Visi dan Misi
Vision and Mission

Visi

Menjadi Mitra Usaha Nasabah yang Sehat dan Terpercaya

Misi

- Menjadi mitra usaha terpercaya yang memberikan solusi dan nilai tambah bagi seluruh *stakeholders*.
- Melaksanakan tata kelola usaha yang baik dan benar seiring pertumbuhan dan perkembangan perusahaan yang berkesinambungan.
- Secara berkesinambungan meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang mampu melampaui harapan nasabah.
- Berperan serta mendukung pertumbuhan ekonomi pembangunan nasional.

Vision

Being a Strong and Reliable Business Partner of Our Customers

Mission

- Becoming a reliable business partner that provides solutions and added value to all stakeholders.
- Implementing business governance in a proper way in line with the sustainable growth and development of the company.
- Continuously improving product and services quality with the support of technology to exceed customers' expectactions.
- Participating in supporting the development of the national economy.

Dewan Komisaris dan Direksi telah bersama-sama membahas, mengkaji, dan menyetujui Visi dan Misi Bank, dan telah berkomitmen untuk melaksanakan Visi dan Misi tersebut dalam menghadapi dinamika bisnis perbankan yang selalu berubah. Visi dan Misi Bank BNP ini disahkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 160-DIR/CORP/12/2017 pada tanggal 13 Desember 2017.

The Board of Commissioners and the Board of Directors have discussed, reviewed, and approved the Bank's Vision and Mission, and are committed to implementing this Vision and Mission in addressing the everchanging dynamics in the banking industry. The Vision and Mission of Bank BNP were ratified by the Board of Directors by the Decree No. 160-DIR/CORP/12/2017 on 13 December 2017.

Bidang Usaha
Line of Business

Berdasarkan Anggaran Dasar Bank Pasal 3 ayat 1, Bank BNP menjalankan kegiatan usaha dalam bidang Bank Umum sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Sesuai dengan Anggaran Dasar tersebut, kegiatan usaha yang dijalankan Bank BNP meliputi penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya, menyalurkan kredit, dan kegiatan Perbankan pada umumnya, serta kegiatan transaksi valas.

Based on the Bank's Articles of Association Article 3 paragraph 1, Bank BNP runs a business activity in the field of Commercial Bank in accordance with the provisions in Indonesia's Legislation.

Pursuant to the Articles of Association, the business activities run by Bank BNP include fundraising from public in the form of savings, namely demand deposits, time deposits, certificate deposits, savings and/or other forms, credit distribution, and other banking activities in general as well as foreign exchange transactions.

Produk dan Layanan

Dalam kegiatan usaha yang dijalankan, Bank BNP melakukan peningkatan kualitas produk dan layanan kepada nasabah. Peningkatan ini ditujukan agar Bank BNP senantiasa memiliki daya saing tinggi di industri perbankan.

Products & Services

In the lines of business the Bank is engaged in, Bank BNP consistently improves the quality of its products and services to its customers. This improvement is intended to render Bank BNP competitive in the banking industry at all times.

Produk **Products**	**Layanan** **Services**
Pembiayaan/*Lending*	***Bank Guarantee (IDR & Major Currencies)***
• Pinjaman Modal Kerja (IDR, USD) Working Capital Loan (IDR, USD)	• *Tender Bid Bond* *Tender Performance Bond*
• Investasi (IDR, USD) / Investment Loan (IDR, USD)	• *Advance Payment Bond*
• Kredit Konsumtif / Consumer Loan	• *Shipping Guarantee*
- Kredit Pemilikan Rumah (KPR) / Housing Loans	**Referensi Bank / Bank Reference**
- Kredit Pemilikan Mobil (KPM) / Car Loans	*Letter of Credit*
- Kredit Renovasi Rumah / House Renovation Loans	**Jual Beli Mata Uang Asing** **Foreign Exchange Transactions**
- Kredit Pemilikan Tanah – Konstruksi Land Ownership – Construction Loans	**Kiriman Uang Dalam & Luar Negeri** **Domestic & International Remittances**
- Kredit Multi Guna / Multipurpose Loans	**Kliring / Clearing & Intercity Clearing**
- Kredit Tanpa Agunan (KTA) / Unsecured Loans	**Inkaso Dalam & Luar Negeri** **Domestic & International Collection**
• Lainnya / Others	*Bank Draft, Traveller's Cheque*
- Kredit Ekspor-Impor / Export-Import Loan	**Kartu ATM & Debit / ATM & Debit Cards:**
	• ATM Bersama
Pendanaan / Funding	• ATM ALTO
• Giro / Current Accounts	• ATM Prima
- Giro Rupiah / Rupiah Current Account	• ATM Visa
- Giro Valas / Foreign Exchange Current Account	• Debit Visa
• Tabungan / Savings	**Pembayaran dan Tagihan/*Payments & Billings***
- Tabungan Parahyangan / Parahyangan Savings	• Pembayaran tagihan PLN dan pembelian token PLN *On-line* Online payment of utility bill and purchase of PLN token
- TabunganKu	• Pembayaran tagihan Telkom & Speedy *On-line* Online payment of Telkom & Speedy bills
- Tabungan Sakura / Sakura Savings	• Pembayaran tagihan Telkomsel (pascabayar) dan pengisian pulsa Telkomsel (prabayar) Payment of Telkomsel bills (postpaid) and purchase of Telkomsel top-up (prepaid)

Produk **Products**	**Layanan** **Services**
- Tabungan Dollar / Dollar Savings	• Pembayaran tagihan Indosat (pascabayar) dan pengisian pulsa Indosat (prabayar) Payment of Indosat bills (postpaid) and purchase of Indosat top-up (prepaid)
- Tabungan Japan / Japan Savings	• Pembayaran uang sekolah pendaftaran Sekolah Dasar/ Menengah/Atas Payment of tuition & enrollment fee for Elementary/ Junior High/Senior High School
• Deposito / Time Deposits	• Pembayaran pajak dengan sistem MPN G 2 Tax payments using the MPN G 2 system
- Deposito IDR / IDR Time Deposit	***Safe Deposit Box***
- Deposito USD / USD Time Deposit	**Pembayaran Gaji Karyawan / Payroll**
	Pengiriman dan Penerimaan Uang Western Union **Western Union Money Remittance**
	Kartu Kredit / Credit Cards
	Bancassurance
	PDAM / Payment of Water Bill
	Pembayaran / *Payment of* Bussan Auto Finance (BAF)
	BNP Call
	Internet Banking

BANK BNP

A member of MUFG, a global financial group

Internet Banking

Akses Layanan Perbankan Dalam Genggaman

Kami menyadari bahwa waktu Anda sangat berharga, sehingga akses layanan perbankan yang bisa dilakukan dimanapun sesuai kebutuhan menjadi landasan prioritas kami dalam menghadirkan layanan internet banking.

Segera ajukan dan gunakan internet banking Bank BNP untuk dapatkan kemudahan layanan perbankan Anda! Untuk informasi lebih lengkap kunjungi www.bankbnp.com

PT Bank BNP Tbk terdaftar dan diawasi oleh OJK

Struktur Organisasi

Organizational Structure

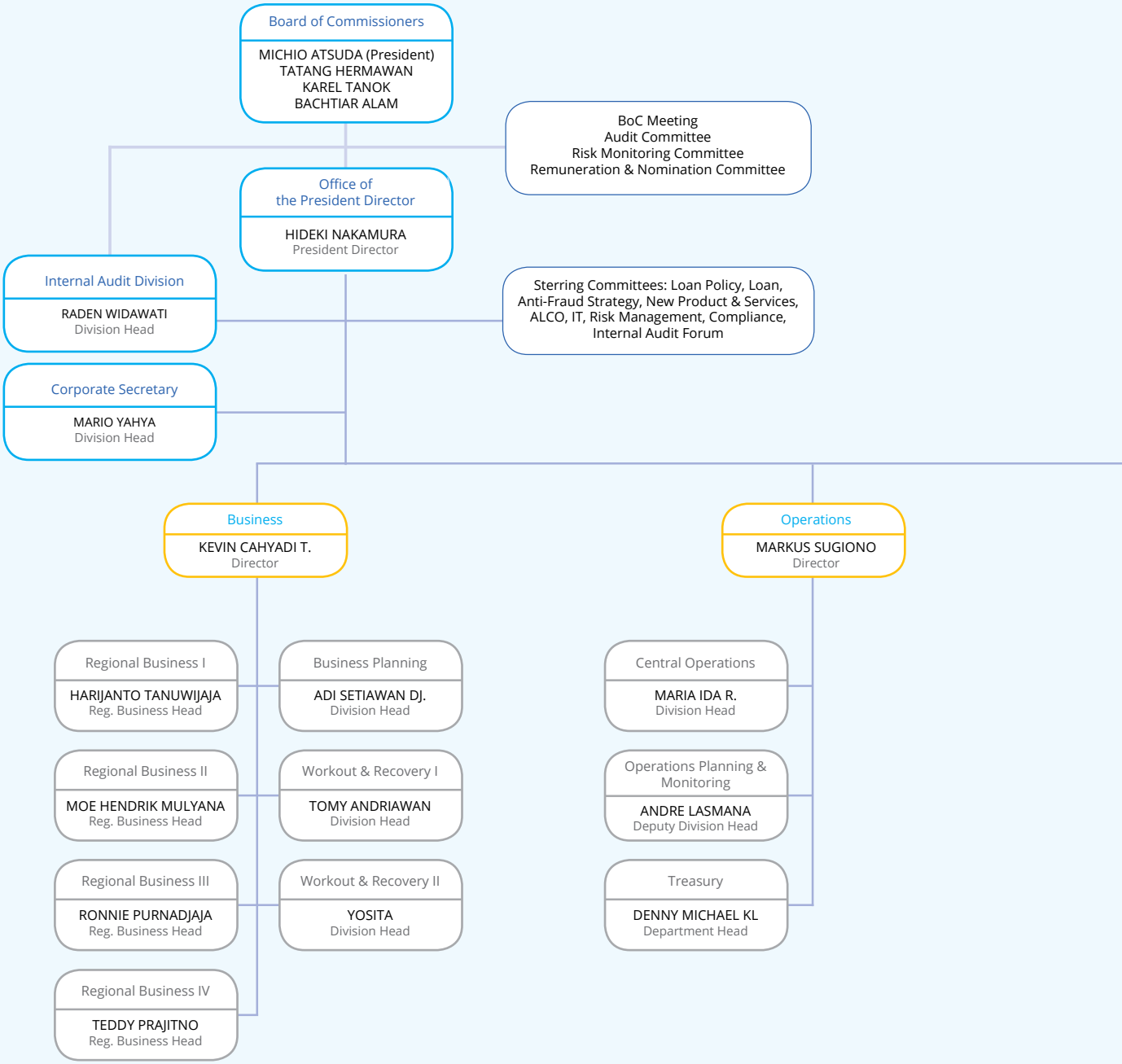

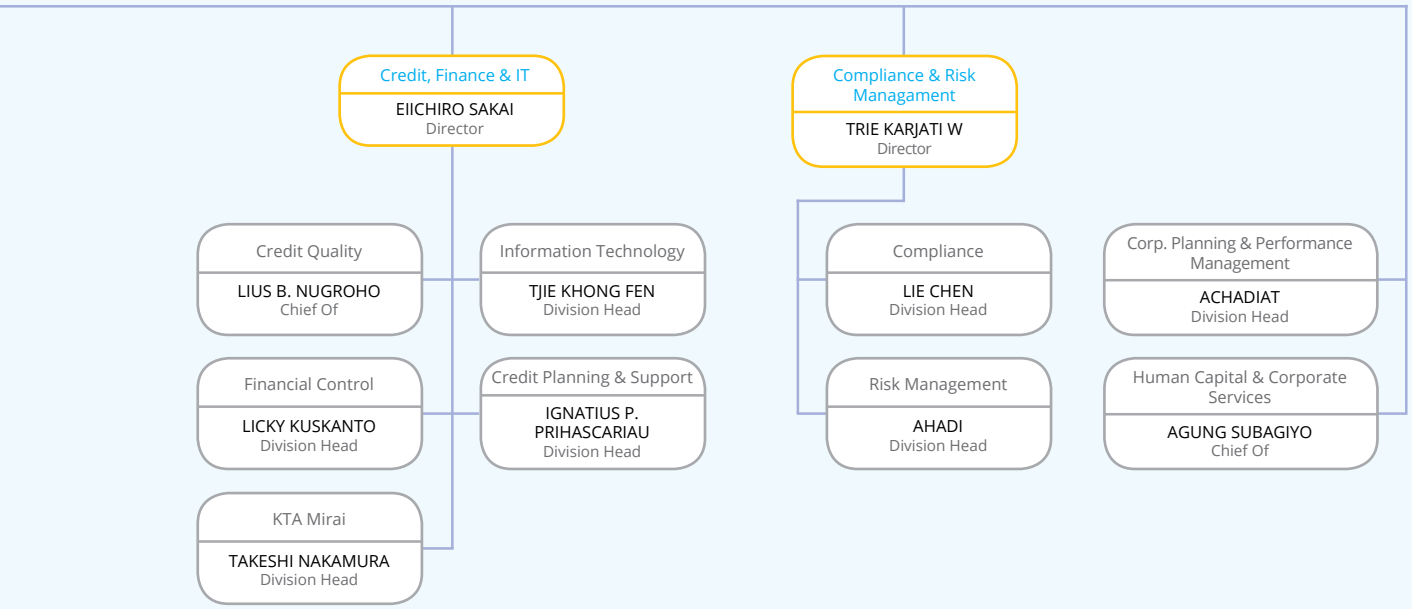
Credit, Finance & IT
EIICHIRO SAKAI
Director
Compliance & Risk Managament
TRIE KARJATI W
Director
Credit Quality
LIUS B. NUGROHO
Chief Of
Information Technology
TJIE KHONG FEN
Division Head
Compliance
LIE CHEN
Division Head
Corp. Planning & Performance Management
ACHADIAT
Division Head
Financial Control
LICKY KUSKANTO
Division Head
Credit Planning & Support
IGNATIUS P. PRIHASCARIAU
Division Head
Risk Management
AHADI
Division Head
Human Capital & Corporate Services
AGUNG SUBAGIYO
Chief Of
KTA Mirai
TAKESHI NAKAMURA
Division Head

Struktur Korporat

Corporate Structure

Bank BNP tidak memiliki grup usaha, sehingga informasi mengenai struktur korporat tidak disajikan dalam Laporan Tahunan ini.

Bank BNP does not have a business group, and thus information regarding group or corporate structure is not presented in this Annual Report.

Entitas Anak dan Asosiasi

Subsidiaries and Associates

Bank BNP tidak memiliki anak perusahaan sehingga informasi mengenai anak perusahaan tidak disajikan dalam Laporan Tahunan ini.

Bank BNP has no subsidiaries, and thus information regarding subsidiaries is not presented in the Annual Report.

Bank BNP merupakan bagian dari unit usaha ACOM CO., LTD., dan sebagai anak perusahaan, laporan keuangan Bank BNP dikonsolidasikan ke dalam Laporan Keuangan Konsolidasian ACOM CO., LTD., sebagai pemegang saham mayoritas Bank BNP.

Bank BNP is a subsidiary of ACOM CO., LTD., and as such, the financial statements of Bank BNP are consolidated to the Consolidated Financial Statements of ACOM CO., LTD., as the majority shareholder of Bank BNP.

Profil Dewan Komisaris

The Board of Commissioners Profile

Warga Negara Jepang, 59 tahun. Menjabat sebagai Presiden Komisaris pada RUPSLB tanggal 23 November 2015. Lulus dari Hitotsubashi University, Jepang, tahun 1982. Pernah bekerja antara lain di The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd dengan posisi terakhir sebagai Chief General Manager – Internal Audit & Credit Examination Department hingga tahun 2011, kemudian bekerja di ACOM CO., LTD., mulai November 2011, dengan posisi terakhir sebagai Executive Managing Officer – Overseas Business Department (sejak 2015).

Japanese citizen, 59 years of age. Appointed as President Commissioner of Bank BNP at the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) on 23 November 2015. Graduated from Hitotsubashi University, Japan, in 1982. Has worked among others at The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd with his final position as Chief General Manager – Internal Audit & Credit Examination Department up to 2011, and subsequently at ACOM CO., LTD., starting from November 2011, with the final position being Executive Managing Officer – Overseas Business Department (since 2015).

Michio Atsuda
Presiden Komisaris
President Commissioner

Tatang Hermawan
Komisaris
Commissioner

Warga Negara Indonesia, 69 tahun. Diangkat menjadi Komisaris Bank BNP pada RUPST 26 Juni 2015, pernah menjabat sebagai Presiden Komisaris Bank BNP pada RUPST 26 Mei 2001, dan pertama kali diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris pada 10 Maret 1989. Berpengalaman sebagai pengusaha tekstil dan pebisnis di bidang *hospitality*. Pernah mengendalikan beberapa perusahaan, antara lain PT Nam Nam Fashion, PT Fuji Palapa Textile, PT Central Georgette Nusantara, PT Hermawan Ladang Arta, PT Hermawan Sentral Investama, dan Oriental Indah Bali Hotel. Pelatihan yang telah diikuti di tahun 2017 adalah *Workshop Specialized Corporate Governance Leadership Program*.

Indonesian citizen, 69 years of age. Appointed as Commissioner of Bank BNP at the AGMS on 26 June 2015, with previous engagement as President Commissioner of Bank BNP starting from the AGMS on 26 May 2001, and initial term as Commissioner commencing on 10 March 1989. Has substantial experience in the textile and hospitality industries. Has controlled a number of companies, among others PT Nam Nam Fashion, PT Fuji Palapa Textile, PT Central Georgette Nusantara, PT Hermawan Ladang Arta, PT Hermawan Sentral Investama, and Oriental Indah Bali Hotel. Participated in the Specialized Corporate Governance Leadership Program Workshop in 2017.

Karel Tanok

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Warga Negara Indonesia, 79 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Independen pada RUPST tanggal 26 Juni 2015, dan pertama kali menjadi Komisaris Independen Bank BNP pada RUPST tanggal 26 Mei 2001. Dengan demikian beliau telah menjalankan masa jabatannya melampaui 2 (dua) periode, dan sesuai dengan SE OJK No. 30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik (Butir III no. 8.i) yang bersangkutan telah membuat Surat Pernyataan tentang Independensinya sebagai Komisaris Independen. Pemegang gelar Sarjana Ekonomi dan Akuntansi dari Universitas Padjajaran tahun 1967. Pernah bekerja sebagai Akuntan (BPKP) Perwakilan Jawa Barat (1968–1973), Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Padjajaran (1969–1982), Senior Consultant Group PT Jasumana, General Manager PT Carlo Erba, Direktur Keuangan & Administrasi PT Naintex, dan Managing Partner Kantor Akuntan Drs. Karel Widyarta. Pelatihan yang pernah diikuti selama tahun 2017 antara lain *Analisa Cash Flow Projection* dalam Kaitannya dengan Penetapan Kemampuan Pembayaran Restrukturisasi, Review Kebijakan atau Prosedur Sistem Remunerasi dan Mempertajam Implementasi Regulasi, *Workshop Corporate Semester II*, dan *Workshop Specialized Corporate Governance Leadership Program*.

Indonesian citizen, 79 years of age. Appointed as Independent Commissioner at the AGMS on 26 June 2015, with initial term as Independent Commissioner of Bank BNP commencing at the AGMS on 26 May 2001. He therefore has carried out his term of office for more than two periods, and in line with the POJK Circular No. 30/SEOJK.04/2016 on Form and Content of Public Issuers' Annual Report (point III no. 8.i) he has made a Statement of Independence as Independent Commissioner. He held a bachelor's degree in Economics and Accounting from Padjajaran University in 1967. He previously worked as Accountant (BPKP) West Java Representative (1968–1973), Lecturer at the Faculty of Economics, Padjajaran University (1969–1982), Senior Consultant for PT Jasumana Group, General Manager of PT Carlo Erba, Finance & Administration Director of PT Naintex, and Managing Partner at Public Accounting Firm of Drs. Karel Widyarta. He participated in various training programs in 2017, including Cash Flow Projection Analysis in Relation to Implementation of Restructuring Payment Ability, Review of Remuneration System Policy or Procedure, and Sharpening Regulatory Implementation, Workshop Corporate Semester II, and the Specialized Corporate Governance Leadership Program Workshop.

Bachtiar Alam

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Warga Negara Indonesia, 59 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Independen pada RUPST tanggal 26 Juni 2015, dan pertama kali menjadi Komisaris Independen Bank BNP pada RUPSLB 19 November 2007. Dengan demikian beliau telah menjalankan masa jabatannya melampaui 2 (dua) periode, dan sesuai dengan SE OJK No. 30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik (Butir III no. 8.i) yang bersangkutan telah membuat Surat Pernyataan tentang Independensinya sebagai Komisaris Independen. Beliau merangkap sebagai Ketua Komite Audit dan Ketua Komite Pemantau Risiko. Pemegang gelar Doctor of Philosophy (PhD) jurusan Antropologi dari Harvard University tahun 1995 dan Master of Art di bidang Regional Studies East Asia dari Harvard University tahun 1989. Pernah bekerja sebagai Dosen Tetap Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia, sejak 1987, Visiting Professor di Department of Cultural Anthropology, University of Tokyo, tahun 2003. Memperoleh penghargaan bintang jasa *The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Rosette* dari pemerintah Jepang pada tahun 2016 untuk kontribusinya bagi kemajuan Studi Jepang di Indonesia dan peningkatan saling pengertian di antara Indonesia dan Jepang. Pelatihan yang telah diikuti selama tahun 2017 antara lain *Corporate Workshop 2017* dan *Workshop Corporate Semester II*.

Indonesian citizen, 59 years of age. Appointed as Independent Commissioner at the AGMS on 26 June 2015, with initial term as Independent Commissioner of Bank BNP commencing at the EGMS on 26 December 2007. He therefore has carried out his term of office for more than two periods, and in line with the POJK Circular No. 30/SEOJK.04/2016 on Form and Content of Public Issuers' Annual Report (point III no. 8.i) he has made a Statement of Independence as Independent Commissioner. He graduated as Doctor of Philosophy (PhD) in Anthropology from Harvard University in 1995 and as Master of Arts (AM) in Regional Studies East Asia from Harvard University in 1989. He has been working as Lecturer at the Faculty of Cultural Sciences, University of Indonesia, since 1987, and was Visiting Professor at Department of Cultural Anthropology, University of Tokyo, in 2003. He was awarded The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Rosette from the Japanese government in 2016 for his contributions to the advancement of Japanese studies in Indonesia and the fostering of mutual understanding between Japan and Indonesia. He participated in various training programs in 2017, including Corporate Workshop 2017 and Corporate Semester II Workshop.

Dewan Komisaris
The Board of Commissioners

KAREL TANOK
Komisaris Independen
Independent Commissioner

TATANG HERMAWAN
Komisaris
Commissioner

MICHIO ATSUDA
Presiden Komisaris
President Commissioner

BACHTIAR ALAM
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Profil Direksi

The Board of Directors Profile

Hideki Nakamura

Presiden Direktur
President Director

Warga negara Jepang, 53 tahun. Menjabat sebagai Presiden Direktur pada RUPST tanggal 2 Juni 2017. Beliau merangkap sebagai Ketua ALCO, Ketua Komite Manajemen Risiko, Ketua Komite Kebijakan Perkreditan, dan Komite Kredit. Lulus dari Osaka University of Foreign Studies Japan jurusan Bahasa dan Kebudayaan Indonesia pada tahun 1987. Pernah bekerja di The Bank of Tokyo–Mitsubishi UFJ, Ltd. Jepang, sebagai Senior Manager (2016–2017), sebagai Presiden Direktur di PT BTMU BRI Finance, Jakarta (2014–2016), sebagai General Manager & Country Advisor for ASEAN di The Bank of Tokyo–Mitsubishi UFJ, Ltd, Jepang (2011–2014), sebagai Senior Manager di The Bank of Tokyo–Mitsubishi UFJ, Ltd, Jepang (2010–2011), sebagai Direktur bidang Planning, Finance & IT di PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk, Bandung (2007–2010), sebagai Chief Manager di The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd. Jakarta (2006–2007), sebagai Direktur bidang Credit/ Corporate Planning di PT Bank UFJ Indonesia, Jakarta (2002–2006), sebagai Senior Manager di UFJ Bank, Ltd. Jepang (Januari–Mei 2002), sebagai Assistant General Manager di Sanwa Bank, Ltd. Jepang (1999–2002), sebagai Senior Manager di PT Sanwa Indonesia Bank, Jakarta (1994–1999), dan sebagai Manager Sanwa Bank, Ltd. Higashi – Osaka Branch, Jepang (1992–1994). Pelatihan yang diikuti di tahun 2017 antara lain *Workshop Corporate Semester II*, Seminar *The Third Annual ASEAN Marketing Summit*, *"ASEAN and Indonesian: New Opportunities from The East"*, dan *Workshop Specialized Corporate Governance Leadership Program*.

Japanese citizen, 53 years of age. Appointed as President Director at the AGMS on 2 June 2017. Concurrently holding the position as Chairman of the ALCO, Risk Management, Credit Policy, and Credit Committees. Graduated from Osaka University of Foreign Studies Japan majoring in Indonesian Language and Culture in 1987. Previously worked at The Bank of Tokyo–Mitsubishi UFJ, Ltd. Japan, as Senior Manager (2016–2017), as President Director of PT BTMU BRI Finance, Jakarta (2014–2016), as General Manager & Country Advisor for ASEAN at The Bank of Tokyo–Mitsubishi UFJ, Ltd, Japan (2011–2014), as Senior Manager at The Bank of Tokyo–Mitsubishi UFJ, Ltd, Japan (2010–2011), as Director of Planning, Finance & IT at PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk, Bandung (2007–2010), as Chief Manager at The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd., Jakarta (2006–2007), as Director of Credit/Corporate Planning at PT Bank UFJ Indonesia, Jakarta (2002–2006), as Senior Manager at UFJ Bank, Ltd., Japan (January–May 2002), as Assistant General Manager at Sanwa Bank, Ltd., Japan (1999–2002), as Senior Manager at PT Sanwa Indonesia Bank, Jakarta (1994–1999), and as Manager Sanwa Bank, Ltd. Higashi – Osaka Branch, Japan (1992–1994). Participated in various training programs in 2017, including Corporate Semester II Workshop, The Third Annual ASEAN Marketing Summit Seminar, "ASEAN and Indonesian: New Opportunities from The East", and Specialized Corporate Governance Leadership Program Workshop.

Kevin Cahyadi Tatang

Direktur Bisnis
Business Director

Warga Negara Indonesia, 54 tahun. Menjabat sebagai anggota Direksi pada RUPST tanggal 26 Juni 2015. Beliau merangkap sebagai anggota Komite Manajemen Risiko, anggota Komite Kebijakan Perkreditan, dan sebagai anggota ALCO. Lulus dari Technical and Further Education di North Sydney, NSW, Australia jurusan Akuntansi (1985) dan Pemrosesan Data (1987). Pernah bekerja di Bank Bali (1989–1999), kemudian di Bank Universal (2000–2003), Bank Permata (2003–2007) dengan posisi terakhir sebagai Senior Vice President, SME & Branch Banking Head, dan di Bank Danamon Indonesia sebagai Vice President Regional SME Head (2008–2009). Bergabung dengan Bank BNP pada tahun 2010 dan menjabat sebagai Regional Business Head I (2010–2014) dan Business Deputy Director (2014). Pelatihan yang telah diikuti di tahun 2017 antara lain *Corporate Workshop 2017*, *Refreshment SMR–Executive*, *Workshop* Penilaian Dasar-dasar Properti, *Workshop Corporate Semester II*, dan *Workshop Specialized Corporate Governance Leadership Program*.

Indonesian citizen, 54 years of age. Appointed as Director at the AGMS on 26 June 2015. Concurrently holding the position as member of the Risk Management, Credit Policy, and ALCO Committees. Graduated from Technical and Further Education in North Sydney, NSW, Australia in Accounting (1985) and Data Processing (1987). Has worked at Bank Bali (1989–1999), then at Bank Universal (2000–2003), then at Bank Permata (2003–2007) with his final position as Senior Vice President SME & Branch Banking Head, and at Bank Danamon Indonesia as Vice President Regional SME Head (2008–2009). Joined Bank BNP in 2010 to serve as Regional Business Head I (2010–2014) and subsequently as Business Deputy Director (2014). In 2017, participated in various training programs, including Corporate Workshop 2017, Refreshment SMR–Executive, Basic Property Valuation Workshop, Corporate Semester II Workshop, and Specialized Corporate Governance Leadership Program Workshop.

Markus Sugiono

Direktur Operasional
Operations Director

Warga Negara Indonesia, 52 tahun. Menjabat sebagai anggota Direksi pada RUPST tanggal 26 Juni 2015, dan pertama kali diangkat menjadi anggota Direksi pada RUPSLB tanggal 26 Agustus 2009. Beliau merangkap sebagai anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi, anggota Komite Manajemen Risiko, dan anggota Komite Kebijakan Perkreditan. Lulus dengan gelar Sarjana Teknik Industri dari Institut Teknologi Nasional tahun 1990. Pernah bekerja di Bank Bali (1989–1994) kemudian di Bank BNP sebagai Kepala Ekspor Impor (1994), selanjutnya di Bank Bisnis Internasional (1994–1997), di Bank Pikko (1997–1998), sebagai Branch Manager di Keppel Tat Lee Buana Bank (1998–2001), dan Deputy Manager di Bank UOB Indonesia (2003–2004). Bergabung kembali dengan Bank BNP pada tahun 2003 sebagai Kepala Bagian Operasional (hingga 2004), dan sebagai Kepala Biro Operasional (2004–2009). Pelatihan yang telah diikuti selama tahun 2017 antara lain *Corporate Workshop 2017*, *Workshop* Penilaian Dasar-dasar Properti, *Workshop Corporate Semester II*, *Workshop Specialized Corporate Governance Leadership Program*, *Gathering* ASPI: Merangkul Ekonomi Digital yang Baru "Bertahan dan Berkembang", dan Sosialisasi Ketentuan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN).

Indonesian citizen, 52 years of age. Appointed as Director at the AGMS on 26 June 2016, with initial term as Director commencing at the EGMS on 26 August 2009. Concurrently holding the position as member of Information Technology Steering Committee as well as Risk Management and Credit Policy Committees. Graduated with a bachelor's degree in Industrial Engineering from the National Institute of Technology in 1990. Has worked at Bank Bali (1989–1994) and at Bank BNP as Head of Export & Import (1994), then at Bank Bisnis Internasional (1994–1997), at Bank Pikko (1997–1998), as Branch Manager at Keppel Tat Lee Buana Bank (1998–2001), and as Deputy Manager at Bank UOB Indonesia (2003–2004). Rejoined Bank BNP in 2003 as Head of Operations (up to 2004), and subsequently as Operations Bureau Head (2004–2009). He participated in various training programs in 2017, including Corporate Workshop 2017, Basic Property Valuations Workshop, Corporate Semester II Workshop, Specialized Corporate Governance Leadership Program Workshop, ASPI Gathering: Embracing the New Digital Economy to Survive and Thrive, and Dissemination on Provisions of the National Payment Gateway (GPN).

Trie Karjati Wibowo

Direktur Kepatuhan &
Manajemen Risiko

Compliance &
Risk Management Director

Warga Negara Indonesia, 56 tahun. Diangkat sebagai anggota Direksi pada RUPSLB 23 Januari 2015. Beliau merangkap sebagai Ketua Komite Kepatuhan, anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi, anggota Komite Kebijakan Perkreditan, dan sebagai anggota ALCO. Lulus dengan gelar Sarjana Ekonomi Manajemen dari Universitas Atmajaya Yogyakarta pada tahun 1986, dan Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 1988. Pernah bekerja di Bank Central Asia (1988), kemudian di PT Jaya Obayashi (1989–1995), di PT Asih Eka Abadi, AEA International, SOS Medika (1995–1996), sebagai Senior Manager Corporate Planning Department & Compliance Officer di PT Bank Sanwa Indonesia (1996–2001), sebagai Senior Manager Corporate Planning Department & Compliance Officer di PT Bank UFJ Indonesia (2001–2006), sebagai Vice President Planning & Compliance Department (2006–2008) dan Direktur Kepatuhan (2008–2014) di PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia. Pelatihan yang telah diikuti di tahun 2017 antara lain *Corporate Workshop 2017*, Sosialisasi PP No. 117 Tahun 2016, Sosialisasi Ketentuan Bank Umum dan *Grand Launching* SiKePO (Sistem Informasi Ketentuan Perbankan Online), *Workshop* Penilaian Dasar-dasar Properti, Sosialisasi kepada Perbankan Mengenai Implementasi Kewajiban Penggunaan Rupiah dan Ketentuan Terkait Valuta Asing Lainnya, Sosialisasi Ketentuan APU dan PPT, Seminar Arah Kebijakan dan Pengembangan Sistem Pembayaran di Indonesia, *Workshop Corporate Semester II*, Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi, *Workshop Specialized Corporate Governance Leadership Program*, Sosialisasi Pokok-pokok Peraturan Bank Indonesia Pelayanan Perizinan Terpadu Terkait Hubungan Operasional Bank Umum dengan Bank Indonesia, Seminar Arah Kebijakan APU PPT, serta Perlindungan Konsumen di Sektor Perbankan.

Indonesian citizen, 56 years of age. Appointed as Director at the EGMS on 23 January 2015. Concurrently holding the position as Chairman of Compliance Committee and member of Information Technology Steering Committee as well as Credit Policy and ALCO Committees. Graduated with a bachelor's degree in Economics, majoring in Management, from Atmajaya University Yogyakarta in 1986, bachelor's degree in Economics, majoring in Accounting, from Gadjah Mada University Yogyakarta in 1988. Has worked at Bank Central Asia (1988), then at PT Jaya Obayashi (1989–1995), di PT Asih Eka Abadi, AEA International, SOS Medika (1995–1996), at PT Bank Sanwa Indonesia (1996–2001) as Senior Manager Corporate Planning Department & Compliance Officer, then at PT Bank UFJ Indonesia as Senior Manager Corporate Planning Department & Compliance Officer (2001–2006), then as Vice President Planning & Compliance Department (2006–2008) and subsequently as Compliance Director (2008–2014) at PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia. Participated in various training programs in 2017, including Corporate Workshop 2017, Dissemination on Government Regulation No. 117/2016, Dissemination on Provisions for Commercial Banks and Grand Launching of SiKePO (Online Banking Provisions Information System), Basic Property Valuations Workshop, Dissemination to Banks on Mandatory Use of Rupiah and Provisions on Foreign Currencies, Dissemination on Provisions of Anti-Money Laundering and Prevention of Financing of Terrorism (APU PPT), Seminar on Outlook and Development of Payment Systems in Indonesia, Corporate Semester II Workshop, Dissemination on Gratification Control, Specialized Corporate Governance Leadership Program, Dissemination on Bank Indonesia's Regulations on Integrated Permit Regarding Commercial Banks' Operational Relationships with Bank Indonesia, Seminar on APU PPT Outlook, and Consumer Protection in the Banking Sector.

Eiichiro Sakai

Direktur Kredit, Keuangan & IT
Credit, Finance & IT Director

Warga Negara Jepang, 45 tahun. Menjabat sebagai anggota Direksi pada RUPSLB tanggal 19 Januari 2016. Beliau merangkap sebagai Ketua Komite Pengarah Teknologi Informasi, Ketua Komite Produk dan Aktivitas Baru, anggota Komite Manajemen Risiko, anggota Komite Kebijakan Perkreditan, dan sebagai anggota ALCO. Lulus dari Rikkyo University Japan Jurusan Ekonomi tahun 1996. Mengawali karir di The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd. Kameari Branch sebagai Account Officer (1996–2000), kemudian sebagai Trainee di The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd. Jakarta (2000–2001), sebagai Customer Relation Officer di The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd. Jakarta (2001–2002), sebagai Manager di The Bank of Tokyo Mitsubishi, Ltd. Jinbocho Commercial Banking Office (2002–2004), sebagai Central Executive Committee di Employees' Union for the Bank of Tokyo Mitsubishi, Ltd. (2004–2005), sebagai Manager Credit Policy and Planning Division di The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd. (2005–2011), kemudian di Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Berhard Kuala Lumpur, Malaysia sebagai Executive Advisor (2011–2013), dan sebagai Manager IT Solutions Department di The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd. Tokyo, Jepang (2013–2016). Pelatihan atau seminar yang telah diikuti di tahun 2017 antara lain *Corporate Workshop 2017*, *Workshop Basic Appraisal*, *Workshop* Penilaian Dasar-dasar Properti, *Workshop Corporate Semester II*, *Workshop Specialized Corporate Governance Leadership Program*, Seminar – Japan Business Desk, *Seminar on New Revenue Recognition Standards – IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers*.

Japanese citizen, 45 years of age. Appointed as Director at the EGMS on 19 January 2016. Concurrently holding the position as Chairman of the Information Technology Steering Committee and New Products & Activities Committee, and member of the Risk Management, Credit Policy, and ALCO Committees. Graduated from the Faculty of Economics, Rikkyo University Japan in 1996. Commenced his career at The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd. Kameari Branch as Account Officer (1996–2000), then as Trainee at The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd. Jakarta Branch (2000–2001), as Customer Relation Officer at The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd. Jakarta (2001–2002), as Manager at The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd. Jinbocho Commercial Banking Office (2002–2004), as Central Executive Commitee at the Employee's Union for The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd. (2004–2005), as Manager Credit Policy and Planning Division at The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd. (2005–2011), and then at The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Berhard Kuala Lumpur, Malaysia, as Executive Advisor (2011–2013), and subsequently as Manager IT Solutions Department at The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd. Tokyo, Japan (2013–2016). He participated in various training programs in 2017, including Corporate Workshop 2017, Basic Appraisal Workshop, Basic Property Valuations Workshop, Corporate Semester II Workshop, Specialized Corporate Governance Leadership Program Workshop, Seminar – Japan Business Desk, Seminar on New Revenue Recognition Standards – IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers.

Dewan Direksi
The Board of Directors

Kevin Cahyadi Tatang
Direktur Bisnis
Business Directo

Hideki Nakamura
Presiden Direktur
President Director

Markus Sugiono
Direktur Operasional
Operations Director

Eiichiro Sakai
Direktur Kredit, Keuangan & IT
Credit, Finance & IT Director

Trie Karjati Wibowo
Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko
Compliance & Risk Management Director

Profil Anggota Komite

Profiles of Committee Members

66 tahun, Warga Negara Indonesia. Menjadi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko Bank BNP sejak Oktober 2014. Sesuai dengan SE POJK No. 30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik (Butir III no. 8.i) oleh karenanya Surat Pernyataan Independensi Komisaris Independen telah diterima Perseroan. Latar belakang pendidikan Sarjana Ilmu Ekonomi jurusan Manajemen dari Universitas Katolik Parahyangan tahun 1978, dan melanjutkan S2 Magister Teknik dan Manajemen Industri di Institut Teknologi Bandung tahun 1984, kemudian memperoleh Sarjana Jurusan Akuntansi di Universitas Katolik Parahyangan Bandung tahun 1986. Pengalaman bekerja sebagai Sekretaris Senat Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan Bandung (2008–2010), sebagai Ketua Ujian Saringan Masuk Universitas Katolik Parahyangan (1990), sebagai Pembantu Dekan I Bidang Akademik Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan (1987–1993), setelah memulai karirnya sebagai Pembantu Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan, Bandung (1985–1986).

Indonesian citizen, 66 years of age. Appointed as Member of the Audit Committee and the Risk Monitoring Committee of Bank BNP in October 2014. In line with POJK Circular No. 30/SEOJK.04/2016 on Form and Content of Annual Report of Public Companies (III no. 8.i), the Statement of Independence of the Independent Commissioner has therefore been accepted by the Company. Has a bachelor's degree in Economics majoring in Management from Parahyangan Catholic University in 1978, a master's degree in Industrial Management and Engineering at Bandung Institute of Technology in 1984, and a bachelor's degree in Accounting from the Parahyangan Catholic University, Bandung, in 1986. Previously worked as Secretary of the Senate of the Faculty of Economics of Parahyangan Catholic University, Bandung (2008–2010), as Chair of Entry Examination of Parahyangan Catholic University (1990), as Assistant Dean I of Academic Affairs of the Faculty of Economics of Parahyangan Catholic University, Bandung (1987–1993), after commencing her career as Assistant Dean II of Administration and Finances of the Faculty of Economics of Parahyangan Catholic University, Bandung (1985–1986).

Dra. Inge Barlian, M.Sc. Akt.
Anggota Komite Independen
Independent Committee Member

Damajanti Tanumihardja

Anggota Komite Independen
Independent Committee Member

Warga Negara Indonesia, 48 tahun. Menjadi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko Bank BNP sejak 4 September 2017. Latar belakang pendidikan Sarjana Ilmu Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Katolik Parahyangan Bandung dan tahun 2012 melanjutkan Magister Akuntansi Universitas Padjajaran Bandung. Pengalaman bekerja sebagai Auditor KAP Prasetio Utomo, member of Arthur Andersen, Jakarta (1993–1996), sebagai Auditor KAP Prasetio Utomo, member of Arthur Andersen, Bandung (1997–2001), sebagai Dosen Luar Biasa Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan (2002–2014), dan sejak tahun 2014 hingga saat ini menjadi Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan.

Indonesian citizen, 48 years of age. Appointed as Member of the Audit Committee and the Risk Monitoring Committee of Bank BNP on 4 September 2017. Graduated with a Bachelor of Economics in Accounting from Parahyangan Catholic University in Bandung, and in 2012 continued to the Master of Accounting program at Padjajaran University, Bandung. Previously worked as Auditor at KAP Prasetio Utomo, member of Arthur Andersen, Jakarta (1993–1996), as Auditor at KAP Prasetio Utomo, member of Arthur Andersen, Bandung (1997–2001), as Visiting Lecturer at the Faculty of Economics, Parahyangan Catholic University (2002–2014), and since 2014 as Permanent Lecturer at the Faculty of Economics, Parahyangan Catholic University.

Daftar Nama Kepala Divisi dan Kepala Cabang

List of Head of Divisions and Branch Offices

Kepala Divisi / Head Of Division

Nama / Name	**Jabatan /** Position	**Divisi /** Division
Achadiat	Corporate Planning & Performance Management Division Head	Corporate Planning & Performance Management
Adi Setiawan Djajatanaga	Business Planning Division Head	Business Planning
Agung Subagiyo	Chief of Human Capital & Corporate Services	Human Capital & Corporate Services
Ahadi	Risk Management Division Head	Risk Management
Harijanto Tanuwidjaja	Regional Business Head I	Regional Business I
Ignatius P. Prihascariau	Credit Planning & Support Division Head	Credit Planning & Support
Licky Kuskanto	Financial Control Division Head	Financial Control
Lie Chen	Compliance Division Head	Compliance
Lius Budianta Nugroho	Chief Of Credit Quality	Credit Quality
Maria Ida Ratnawati	Central Operations Division Head	Central Operations
Mario Yahya	Corporate Secretary Division Head	Corporate Secretary
Moe Hendrik Muljana	Regional Business Head II	Regional Business II
Raden Widawati	Internal Audit Division Head	Internal Audit
Ronnie Purnadjaja, SE	Regional Business Head III	Regional Business III
Takeshi Nakamura	KTA Mirai+ Division Head	KTA Mirai+
Teddy Prajitno	Regional Business Head IV	Regional Business IV
Tjie Khong Fen	Information Technology Division Head	Information Technology
Tomy Andriawan	Workout & Recovery I Division Head	Workout & Recovery I
Yosita	Workout & Recovery II Division Head	Workout & Recovery II

Kepala Cabang / Head of Branch Offices

Nama / Name	**Jabatan /** Position	**Kantor Cabang /** Branch Offices
Ahmad Tedy Riswadi	Branch Manager	KCP Majalaya
Alexandri Gunawan	Branch Manager	KCP Terusan Buah Batu
Aline Norhjani	Branch Manager	KCP Kopo
Andreas Arief Yudianto	Branch Manager	KCP Jababeka
Anjar Wiguna	Branch Manager	KCP A. H. Nasution
Astrid Puspitasari Anwar Lewi	Branch Manager	KCP Gardujati
Audry Augustina	Branch Manager	KCP Sukajadi
Camellia Diana Karossi	Branch Manager	KCP Cimahi
Dadan Darmawan	Branch Manager	KCP Cikampek
Dewi Khrisnawaty	Branch Manager	KCP Pajajaran
Dhorotea Kusuma Witri, S.E	Branch Manager	KC Solo
Eddy Susanto Wibowo	Branch Manager	KC Tegal
Ellyza Zakaria	Branch Manager	KC Kedungdoro
Evan Hizkia Andreas	Branch Manager	KC Yos Sudarso

Nama / Name	**Jabatan /** Position	**Kantor Cabang /** Branch Offices
F. Y. Gandhi Pudjiono	Branch Manager	KC Malang
Feiliana	Branch Manager	KCP Gajah Mada
Fenti Widjaja	Branch Manager	KC Wahid Hasyim
Frans Budiyanto	Branch Manager	KC Yogyakarta
Hans Tobias Gunawan	Branch Manager	KCP Buah Batu
Hendrawan Saputro Hadi	Branch Manager	KCP Kelapa Gading
Ika Nurtika Dewi	Branch Manager	KC Sukabumi
Irvan Pascal	Branch Manager	KCP Asia Afrika
Iwan Jusup	Branch Manager	KC Yos Sudarso
Lenggawati Setio	Branch Manager	KC Semarang
Lies Kurnia Hidayat	Branch Manager	KCP Soreang
Linna Setiawati Setiadipura	Branch Manager	KCP Pasirkaliki
Lusy	Branch Manager	KC Bogor
Njo Budhi Junaidi Wijaya	Branch Manager	KC Denpasar
Ong Esther Mulan	Branch Manager	KC Juanda
Ore Supara	Branch Manager	KCP Jatibarang
Pratiwi	Branch Manager	KCP Cicadas
Roney Setyawan	Branch Manager	KCP Sungkono
Rosalina	Branch Manager	KCP Muara Karang
Rossetiyawati Samara	Branch Manager	KCP Sahid
Rudy Supriyadi	Branch Manager	KC Gunung Sabeulah
Sugito Santosa, SE	Branch Manager	KCP Sumber Sari
Sysca Yulianawati	Branch Manager	KCP Karawang
Verry Budhiman	Branch Manager	KCP Sudirman
Yenni Sandra	Pjs. Branch Manager	KCP Kopo Sayati
Yuliniar	Branch Manager	KCP Suniaraja

Komposisi Pemegang Saham
Shareholder Composition

Berdasarkan daftar pemegang saham yang dikeluarkan PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek Bank, struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham Bank BNP per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Based on the list of shareholders issued by PT Sinartama Gunita as the Share Registrar of the Bank, capital structure and share ownership composition of Bank BNP as at 31 December 2017 is as follows:

Kepemilikan Saham di atas 5% / **Share Ownership of more than 5%**

Keterangan / Description	**Nilai Nominal Rp500 Per Saham** Par Value of Rp500 Per Share		
	Jumlah Saham Number of Shares	**Jumlah Nominal** Nominal Value **(Rp)**	**Persentase** Percentage **(%)**
Modal Dasar / Authorized Capital	1.000.000.000	500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh / Issued and Fully Paid-In Capital			
ACOM CO., LTD	447.707.012	223.853.506.000	66,15%
PT. Hermawan Sentral Investama	72.564.211	36.282.105.500	10,72%
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd	63.310.000	31.655.000.000	9,35%
Masyarakat/Lainnya di bawah 5% / Public/Others below 5%	93.252.659	46.626.329.500	13,78%
TOTAL	**676.833.882**	**338.416.941.000**	**100,00%**

Kepemilikan Saham oleh Direksi/Komisaris / **Share Ownership by Directors/Commissioners**

Nama / Name	**Jabatan /** Position	**Jumlah Saham /** Number of Shares	**Persentase /** Percentage **(%)**
Tatang Hermawan	Komisaris / Commissioner	12.001.000	1,77%
Kevin Cahyadi Tatang	Direktur / Director	100	0,00%
Markus Sugiono	Direktur / Director	100	0,00%
Trie Karjati Wibowo	Direktur / Director	100	0,00%

Jumlah saham yang telah diterbitkan Bank BNP per Desember 2017 adalah 676.833.882 lembar, terdiri dari saham biasa bersifat ekuitas yang ditatakelolakan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dengan harga nominal per lembar sahamnya Rp500 (lima ratus Rupiah).

Total shares of Bank BNP issued per December 2017 amounted to 676,833,882 shares consisting of equity common stock governed by the Indonesian Central Securities Depository (KSEI), with the par price per share is Rp500 (five hundred Rupiah).

Sekilas Pemegang Saham Bank BNP

Kepemilikan saham pengendali Bank BNP yang oleh 2 (dua) institusi keuangan yang berasal dari Jepang, yaitu ACOM CO., LTD. (ACOM), dan The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd (BTMU) dilakukan dengan mengakuisisi saham Bank BNP sebanyak 75,50% pada 17 Desember 2007.

Overview of the Shareholders of Bank BNP

Two Japanese financial institutions, namely ACOM CO., LTD. (ACOM), and The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd (BTMU), are the controlling shareholders of Bank BNP, having acquired a total of 75.50% share ownership of the Bank on 17 December 2007.

Ini menjadikan dua perusahaan tersebut sebagai pemegang saham dan pengendali Bank BNP, dengan pemegang saham dan pengendali akhir adalah Keluarga Kinoshita dan Mitsubishi UFJ Financial Group Inc (MUFG).

Pemegang saham lain yang memiliki saham di atas 5% adalah PT Hermawan Sentral Investama.

Thus, both parties are the controlling shareholders of Bank BNP, with the ultimate controlling shareholders being the Kinoshita Family and Mitsubishi UFJ Financial Group Inc (MUFG).

Another party that owns Bank BNP's shareswith more than 5% ownership is PT Hermawan Sentral Investama.

Pemegang Saham Pengendali

ACOM CO., LTD.
ACOM adalah suatu perusahaan publik yang didirikan berdasarkan hukum dan perundang-undangan negara Jepang, berkedudukan dan berkantor di 1-1, Marunouchi 2-chome. Chiyodaku, Tokyo 100-8307, Jepang.Saham ACOM tercatat di Tokyo Stock Exchange. ACOM adalah anak perusahaan dari Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (MUFG).

Bisnis utama Grup ACOM adalah pinjaman dan bisnis kartu Kredit, bisnis penjaminan, pelayanan pinjaman dan bisnis keuangan di luar negeri, dan ACOM sendiri bergerak dalam bidang industri jasa pembiayaan dengan menyediakan pinjaman kepada perorangan.

Struktur Permodalan & Pemegang Saham Mayoritas
Berdasarkan Laporan Keuangan ACOM Tahun Buku 2016 yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 dan data yang diperoleh dari ACOM, susunan pemegang saham mayoritas ACOM per 31 Maret 2017 adalah sebagai berikut:

Controlling Shareholders

ACOM CO., LTD.
ACOM is a public company established under the Japanese law, having its registered office at 1-1, Marunouchi 2-chome. Chiyodaku, Tokyo 100-8307, Japan. ACOM's shares are listed on the Tokyo Stock Exchange. ACOM is a subsidiary of Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (MUFG).

The main business of ACOM group is extending loans and credit cards, assurance business, loans service and financial business in overseas. ACOM itself engages in the financing service industry with the main activity of providing loans to individuals.

Capital Structure & Majority Shareholders
Based on ACOM's Financial Statements for the Financial Year of 2016, which ended on 31 March 2016, and data obtained from ACOM, the composition of majority shareholders of ACOM as at 31 March 2017 is as follows:

Nama Perusahaan Company Name	**Jumlah Saham** Number of Shares (Thousands of Shares)	**Persentase** Percentage (%)
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc	588.723	36,88
Maruito Shokusan Co., Ltd.	273.467	17,13
Maruito Co., Ltd.	125.533	7,86
Foundation of Kinoshita Memorial Enterprise	92.192	5,77
Maruito Shoten Co., Ltd.	38.733	2,42
General Incorporated Association Kyoekai Trust Account	32.598	2,04
Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation (Standing proxy: The Master Trust Bank of Japan, Ltd.)	31.572	1,97
Shigeyoshi Kinoshita	30.007	1,87
NOBUKA Co., Ltd	30.000	1,87
Japan Trustee Services Bank, Ltd. (Trust Account 4)	26.822	1,68
ACOM CO., LTD. (Treasury Stocks)	29.668	1,85
Others	296.963	18,60
Total Shares	**1.596.282**	**100**

The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd ("BTMU") adalah suatu perusahaan yang didirikan pada tanggal 15 Agustus 1919 berdasarkan hukum dan perundang-undangan Jepang, berkedudukan dan berkantor di 2-7-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8388, Jepang, dan merupakan salah satu bank kelas dunia di Jepang yang kegiatan utamanya adalah usaha perbankan komersial.

The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd ("BTMU") is a company established on 15 August 1919, under the laws and regulations of Japan. The company is domiciled and headquartered in Marunouchi 2-7-1, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8388, Japan. It is one of the world-class banks in Japan which engage in commercial banking business.

Struktur Permodalan & Pemegang Saham
Berdasarkan Laporan Keuangan BTMU Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016, susunan permodalan dan pemegang saham BTMU pada tanggal 31 Maret 2017 adalah sebagai berikut:

Capital Structure & Shareholders
Based on the Financial Statements of BTMJ for the Fiscal Year ended 31 March 2016, the capital structure and shareholders of BTMJ as of 31 March 2017 are as follows:

Nama / Name	**Jumlah Saham /** Number of Shares	**Persentase /** Percentage **(%)**
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	12.350.038.000	97,18
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd (*treasury stock*)	357.700.000	2,81
Total	**12.707.738.000**	**100.00**

Pemegang Saham Utama

PT Hermawan Sentral Investama
PT Hermawan Sentral Investama ("HSI"), salah satu pemegang saham pendiri, berkedudukan di Kota Bandung dan didirikan pada tanggal 31 Mei 1997 di Bandung dengan maksud dan tujuan dalam bidang jasa. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, HSI dapat melaksanakan kegiatan usaha di bidang jasa, konsultasi di bidang bisnis, manajemen, administrasi, manajemen sumber daya manusia, pengelolaan manajemen perusahaan, manajemen properti, manajemen operasi dan pemeliharaan kawasan properti *real estate*, serta manajemen operasi dan pemeliharaan kawasan industri.

Struktur Permodalan & Pemegang Saham
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 18 tanggal 4 Oktober 2014, yang dibuat di hadapan Gunawan Kamarga, S.H., Notaris di Bandung, struktur permodalan dan susunan pemegang saham HSI adalah sebagai berikut:

Majority Shareholders

PT Hermawan Sentral Investama
PT Hermawan Sentral Investama ("HSI"), one of the founding shareholders, is domiciled in Bandung and was established on 31 May 1997 in Bandung with the intent and purpose in the field of services. To achieve such purpose, HSI is entitled to carry out business activities in the field of services, business consulting, management, administration, human resources management, corporate management, property management, operation and maintenance management of real estate, as well asoperations and maintenance management of industrial estates.

Capital Structure & Shareholders
Based on the Deed of Meeting Resolution No. 18 dated 4 October 2014, drawn up before Gunawan Kamarga, S.H., Notary in Bandung, the capital structure and shareholding composition of HIS are as follows:

Keterangan / Description	**Nilai Nominal Rp 1 juta per saham /** Par Value of Rp 1 Million per Share		
	Jumlah Saham / Number of Shares	**Jumlah Nominal /** Nominal Value	**Persentase /** Percentage **(%)**
Modal Dasar / Authorized Capital	20.000	20.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh / Issued and Fully Paid-In Capital			
- Tatang Hermawan	5.738	5.738.000.000	37,00%
- Aling Hermawan	4.781	4.781.000.000	31,00%
- Afandi Hermawan	4.781	4.781.000.000	31,00%
Total	**15.300**	**15.300.000.000**	**100,00%**
Jumlah Saham dalam Portepel / Total Shares in Portfolio	4.700	4.700.000.000	

Kronologi Pencatatan Saham dan Efek

Chronology of Shares and Securities Listing

Kronologi Pencatatan Saham

PENAWARAN UMUM PERDANA

Berdasarkan keputusan RUPSLB tanggal 15 September 2000, pada tanggal 14 Desember 2000, Bank memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal ("BAPEPAM", sekarang Otoritas Jasa Keuangan atau disingkat "OJK") melalui surat No. S-3663/PM/2000 melakukan Penawaran Umum Perdana atas 50.000.000 Saham Biasa dengan harga penawaran sebesar Rp525 setiap saham, dan 20.000.000 Waran Seri I disertai dengan Saham Biasa atas nama, Waran diberikan secara cuma-cuma dan periode pelaksanaan Waran Seri I mulai dari 10 Juli 2001 sampai dengan 9 Januari 2004 dengan harga penawaran sebesar Rp600 per saham.

Pada tanggal 10 Januari 2001 saham tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (dahulu Bursa Efek Jakarta) denganSurat Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. S-0058/BEJ-EEM/01-2001 tanggal 8 Januari 2001.

Modal Disetor Bank BNP bertambah pada bulan Januari 2004 sebagai akibat adanya *exercise* waran sebanyak 8.275.000 lembar menjadi saham biasa atas nama dengan nominal Rp500 sehingga jumlah tersebut menambah jumlah saham beredar menjadi 158.275.000 saham.

PENAWARAN UMUM TERBATAS I

Dengan tujuan untuk memperkuat struktur permodalan Bank BNP, berdasarkan surat pernyataan efektif dari BAPEPAM-LK No. S-714/BL/2006 tanggal 22 Juni 2006, Bank telah melakukan Penawaran Umum Terbatas I dengan cara penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") sebanyak 158.275.000 lembar saham dari 7 Juli sampai dengan 13 Juli 2006 dengan harga penawaran sebesar Rp550 per saham.

Pada tanggal 17 Desember 2007, ACOM CO., LTD., Japan ("ACOM") dan The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. ("BTMU") mengakuisisi masing-masing sebanyak 55,41% dan 20% dari seluruh saham yang dikeluarkan Bank BNP.

Pada bulan Januari–Maret 2008 telah dilakukan penawaran tender atas kepemilikan saham Bank BNP oleh ACOM berkaitan dengan kegiatan akuisisi, sehingga jumlah kepemilikan saham ACOM berubah menjadi 55,68%.

Share Listing Chronology

INITIAL PUBLIC OFFERING

Based on the resolution of Extraordinary General Meeting of Shareholders dated 15 September 2000, and an effective statement from the Chairman of Capital Market Supervisory Agency ("BAPEPAM", now Otoritas Jasa Keuangan or "OJK" or the Financial Services Authority) through letter No. S-3663/PM/2000 obtained on 14 December 2000, the Bank executed an Initial Public Offering (IPO) of 50,000,000 Common Shares with offering price per share at Rp525 per share, and 20,000,000 Warrants Series I, embedded to the Common Shares. The Warrant was issued free of charge in which the period of exercisable Warrant Series I wasfrom 10 July 2001 to 9 January 2004 at the offering price of Rp600 per share.

On 10 January 2001, the shares were listed on the Indonesia Stock Exchange (formerly Jakarta Stock Exchange) in accordance with the Letter of the Board of Directors of Jakarta Stock Exchange No. S-0058/BEJ-EEM/01-2001 dated 8 January 2001.

The paid-in Capital of Bank BNP increased in January 2004 due to an exercise of 8,275,000 warrants into ordinary shares with a par value of Rp500 per share, resulting in the increase of the outstanding shares of the Bank to 158,275,000 shares.

LIMITED PUBLIC OFFERING I

With a view to strengthen the Bank's capital structure, by an effective statement from BAPEPAM-LK No. S-714/BL/2006 dated 22 June 2006, the Bank executed Limited Public Offering (Rights Issue) I through the issuance of preemptive rights (HMETD) of 158,275,000 shares from 7 July 2006 to 13 July 2006, with the offering price of Rp550 per share.

On December 17, 2007, ACOM CO., LTD., Japan ("ACOM") and The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd ("BTMU") acquired 55.41% and 20% of the total shares issued by Bank BNP, respectively.

During the period of January–March 2008 the Bank conducted a tender offer of its shares belonging to ACOM with regard to the acquisition. As a result, ACOM's share ownership changed to 55.68%.

PENAWARAN UMUM TERBATAS II

Pada bulan Oktober 2010 Bank melakukan Penawaran Umum Terbatas II (PUT II) dengan cara Penerbitan HMETD atas sejumlah 99.963.158 Saham Biasa Atas nama dengan nilai nominal Rp500 setiap saham yang ditawarkan dengan harga penawaran Rp1.000 setiap saham.

Total dana hasil PUT II setelah dikurangi biaya emisi adalah sebesar Rp98.423.004.500 (sembilan puluh delapan miliar empat ratus dua puluh tiga juta empat ribu lima ratus rupiah) dan telah digunakan 100% sebagai Modal Kerja.

Per 31 Desember 2011, jumlah saham yang beredar adalah 316.513.158, di mana ACOM menguasai 60,31% dan BTMU menguasai 15.20% dari total saham tersebut.

PENAWARAN UMUM TERBATAS III

Pada bulan Mei 2013 Bank BNP melakukan Penawaran Umum Terbatas III (PUT III) dengan jumlah saham baru yang ditawarkan sebanyak 260.320.724 dengan nominal Rp500 setiap saham yang ditawarkan dengan Harga Penawaran Rp1.150 setiap saham. Hasil PUT III tersebut mengubah komposisi kepemilikan saham Bank, di mana ACOM menguasai 66,15% dan BMTU menguasai 9,35% dari total 676.833.882 saham.

LIMITED PUBLIC OFFERING II

In October 2010, the Bank performed Limited Public Offering II (PUT II) by issuing Preemptive Rights (HMETD) on 99,963,158 Registered Common Shares with nominal value of Rp500 each and offered price of Rp1,000 per share.

All PUT II proceeds after being deducted with issuance cost was Rp98,423,004,500 (ninety eight billion four hundred twenty three million four thousand five hundred rupiah); 100% of which had been used as Working Capital.

As at 31 December 2011, total circulating shares stood at 316,513,158; 60.31% of which owned by ACOM and 15,20% owned by BTMU.

LIMITED PUBLIC OFFERING III

In May 2013, Bank BNP performed Limited Public Offering III (PUT III) with total offered new shares of 260,320,724 shares, with nominal value of Rp500 per offered share with Offering Price of Rp1,150 each. The PUT III proceeds changed the Bank's shares ownership, whereby ACOM owned 66.15% and BMTU owned 9.35% of thetotal of 676,833,882 shares.

Kronologi Pencatatan Saham/Efek

Berikut ini adalah kronologis pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia.

Securities Listing Chronology

The following is the chronology of share listing on the Indonesia Stock Exchange.

Tanggal Date	Tindakan Korporasi Action	Jumlah Penambahan Amount of Increase	Akumulasi Jumlah Saham (Jumlah Saham Diterbitkan Total Shares
	Sebelum IPO / Before Initial Public Offering (IPO)		50,000,000
10-Jan-01	Penawaran Umum Terbatas / Initial Public Offering (IPO)	100,000,000	150,000,000
Apr-04	Pelaksanaan Waran / Warant Exercise	8,275,000	158,275,000
Jul-06	Penawaran Umum Terbatas (PUT) I / Right Issue 1	158,275,000	316,550,000
17-Dec-07	Akuisisi Saham Perseroan oleh ACOM CO., LTD., (ACOM) dan The Bank Of Tokyo Mitsubishi UFJ Ltd., (BTMU) masing-masing sebesar 55,41% dan 20% sehingga total menjadi 75,41% / The acquisition of the Bank's shares by ACOM CO., LTD., (ACOM) and The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Ltd., (BTMU) each by 55.41% and 20%, thus amounting to 75.41%.	-	-
Mar-08	Pemegang Saham Mayoritas melaksanakan tender offer sebesar 0,27% sehingga jumlah komposisi berubah menjadi ACOM 55,68 dan BTMU 20% dengan total 75,51 / The Majority Shareholder conducted tender offer of 0.27% stake, and thus the composition was changed to ACOM 55.68% and BTMU 20%, with a total of 75.51%.	-	-
Oct-10	Penawaran Umum Terbatas (PUT) II / Right Issue 2	99,963,158	416,513,158
May-13	Penawaran Umum Terbatas (PUT) III / Right Issue 3	260,320,724	676,833,882

Bank BNP tidak memiliki pencatatan efek lainnya, sehingga informasi kronologi pencatatan efek lainnya tidak disajikan.

Bank BNP does not have other securities listed, thus the information regarding the listing chronology of other securities is not presented.

Lembaga Profesi Penunjang Pasar Modal

Capital Market Supporting Professional Institution

Kantor Akuntan Publik /
Public Accounting Firm

KAP Satrio Bing Eny & Rekan
Afiliasi/*Affiliated with* Deloitte South East Asia Ltd (DSEA)
The Plaza Office Tower, 32nd Floor,
Jl. M.H. Thamrin Kav 28 – 30,
RT.9/RW.5, Gondangdia, Menteng,
Jakarta Pusat 10350
Indonesia

Notaris /
Notary

Yuliani Idawati, S.H., Sp.N.
Ruko Lucky Town
Jl. Ters. Jakarta No. 30 C Bandung
Telepon: (022) 7231014

Biro Administrasi Efek /
Share Registrar

PT Sinartama Gunita
Sinarmas Land Plaza Tower 3
Jl. M. H. Thamrin Kav. 22 No. 51 Jakarta 10350
Telepon: (021) 3922332

Nama dan Alamat Jaringan Kantor

Name and Address of Office Branch Offices

Kantor Wilayah Branch Office	Alamat Address
Kantor Pusat / Head Office	
Bandung	Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Bandung, Indonesia Tlp: +62-22-82560100 (Hunting) Fax: +62-22-2514580 SWIFT: NUPAID J6 Website: www.bankbnp.com
Kantor Cabang / Branch Offices	
Jakarta	Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 171, Jakarta Tlp: +62-21-3901485 (Hunting) Fax: +62-21-3144589
Surabaya	Jl. Kedungdoro No. 95, Surabaya Tlp: +62-31-99246168 Fax: +62-31-99246996
Cirebon	Jl. Yos Sudarso No. 2, Cirebon Tlp: +62-231-221491 (Hunting) Fax: +62-231-221500
Denpasar	Rukan Teuku Umar Indah Jl. Teuku Umar No. 29-31, Denpasar Tlp: +62-361-225588 Fax: +62-361-238088
Semarang	Mataram Plaza Blok A No. 14-14A, Jl. MT. Haryono No. 427-429, Semarang Tlp: +62-24-3588789 (Hunting) Fax: +62-24-3588790
Bogor	Jl. Suryakencana No. 331, Bogor Telp. +62-251-8337558 Fax: +62-251-8337408
Bekasi	Kalimalang Commercial Center Blok A6/8, Jl. Ahmad Yani, Bekasi Tlp: +62-21-29257664 (Hunting) Fax: +62-21-29257674
Tasikmalaya	Jl. Gunung Sabeulah No.41 C, Tasikmalaya Tlp: +62-265-2350100 (Hunting) Fax: +62-265-2352500
Sukabumi	Jl. Ahmad Yani No. 317, Sukabumi - 43112 Tlp: +62-266-245310 Fax: +62-266-245314
Yogyakarta	Jl. Pangeran Mangkubumi No. 99, Yogyakarta Tlp: +62-274-584999 Fax: +62-274-562877

Kantor Wilayah Branch Office	Alamat Address
Kantor Cabang / Branch Offices	
Surakarta	Jl. Urip Sumohardjo No. 103, Surakarta Tlp: +62-271-645945 Fax: +62-271-645633
Tegal	Jl. Jendral Sudirman No. 22, Tegal Tlp: +62-283-343322 Fax: +62-283-343323
Malang	Jl. Jaksa Agung Suprapto No. 67, Malang Tlp: +62-341-344900 Fax: +62-341-344880
Kantor Cabang Pembantu / Supporting Branch Offices	
Bandung	Jl. Jenderal Sudirman No. 30 - 32, Bandung Tlp: +62-22-4202088 (Hunting) Fax: +62-22-4206988
	Jl. Pajajaran No. 151, Bandung Tlp: +62-22-6019720 (Hunting) Fax: +62-22-6010579
	Jl. Suniaraja No. 57-59, Bandung Tlp: +62-22-4212188 (Hunting) Fax: +62-22-4239278
	Jl. Kopo No.97, Bandung Tlp: +62-22-5204888 Fax: +62-22-5203175
	Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 268, Bandung Tlp: +62-22-7306688 Fax: +62-22-7305133
	Jalan Pasirkaliki No. 150C Bandung Tlp: +62-22-20527779 Fax: +62-22-20527798
	Kompleks Pertokoan Sumber Sari Indah Jl. Sumber Sari Indah - T9, Bandung Tlp: +62-22-6120585 (Hunting) Fax: +62-22-6014901
	Pasar Baru Lantai 2 Blok D2 No. 01, Jl. Oto Iskandardinata No. 70, Bandung Tlp: +62-22-4245071 Fax: +62-22-4245076

Kantor Wilayah Branch Office	**Alamat** Address
Kantor Cabang Pembantu / Supporting Branch Offices	
Bandung	Jl. Gardujati No. 58A Tlp: +62-22-20525339 Fax: +62-22-20528193
	Jl. A.H. Nasution No. 258 C Bandung Tlp: +62-22-63725625 Fax: + 62-22-63725626
	Jl. Buah Batu No. 162, Bandung Tlp: +62-22-7322484 Fax: +62-22-7322426
	Jl. Kiaracondong No. 36B, Bandung Tlp: +62-22-7209240 Fax: +62-22-7209278
	Jl. Sukajadi No. 143, Bandung Tlp: +62-22-2042155 Fax: +62-22- 2042144
	Komplek Wisma Bumiputera, Jalan Asia Afrika No. 141-149 Tlp: +62-22-4240481 Fax: +62-22- 4203970
Bekasi	Ruko Metro Boulevard A No. 25 Cikarang Baru, Jababeka Tlp: +62-21-89842346 Fax: +62-21-89842345
Cikampek	Jl. Ahmad Yani Ruko ex-Timbangan No. 3-4, Cikampek, Karawang Tlp: +62-264-8385660 Fax: +62-264-8385661
Cimahi	Jl. Jendral H. Amir Machmud No.355, Cimahi Tlp: +62-22- 86002100 Fax: +62-22- 86002100
Indramayu	Jl. Letnan Joni No. 327, Jatibarang Tlp: +62-234-351288 Fax: +62-234-351424
Jakarta Barat	Jl. Gajah Mada No. 71-73, Krukut Taman Sari, Jakarta Barat Tlp: +62-21-6333511 Fax: +62-21-6340393
Jakarta Pusat	Grand Sahid Jaya Hotel Jl. Jenderal Sudirman Kav. 86, Jakarta Tlp: +62-21-5714260 Fax: +62-21-5714260

Kantor Wilayah Branch Office	**Alamat** Address
Kantor Cabang Pembantu / Supporting Branch Offices	
Jakarta Timur	Ruko Jatinegara, Jl. Pasar Barat No. 128/129 Kel. Balimester, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur Tlp: +62-21-85910018 Fax: +62-21-85909985
Jakarta Utara	Jl. Muara Karang Raya No.195, Jakarta Utara Tlp: +62-21-66696150 Fax: +62-21-66602274
	Jl. Boulevard Barat Raya Blok LC 7 No. 53, Kelapa Gading, Jakarta Utara Tlp: +62-21-45853468 Fax: +62-21-45853466
Kab Bandung	Jl. Kopo Sayati No. 105, Kab. Bandung Tlp: +62-22-5401468 Fax: +62-22-5401458
	Jl. Raya Bojongsoang No. 110, Bandung - 40288 Tlp: +62-22-87306899 Fax: +62-22-87306807
	Jl. Raya Soreang Banjaran No. 453, Soreang Tlp: 62+22-5893988 Fax: +62-22-5891374
	Jl. Kondang No. 34, Majalaya Tlp: +62-22-5950519 Fax: +62-22-5950523
Karawang	Jl. Tuparev No. 429 Tlp: +62-267-8490455 Fax: +62-267-8490460
Surabaya	Komplek Ruko Darmo Park I Blok IV A/6, Jl. Mayjen Sungkono No. 112E, Surabaya Tlp: +62-31-5660755 Fax: +62-31-5612994

Kantor Wilayah Branch Office	**Alamat** Address
Kantor Kas / Cash Offices	
Subang	Ruko Rawa Badak Regency C-3, Jl. Kapten Hanafiah Subang-41211 Tlp: +62-260-7605068 Fax: +62-260-7605089
Purwakarta	Jalan Veteran No. 136, Purwakarta - 41118 Tlp: +62-264-8305877 Fax: +62-264-8305876
Kab. Bandung Barat	Jalan Raya Cimareme - Padalarang No. 29 Padalarang-40552 Tlp: +62-22-86006208 Fax: +62-22-86006222
Kab. Bandung	Jalan Raya Bandung - Garut Km 24,5 Jalan Raya Rancaekek-40394 Tlp: +62-22-87833338 Fax: +62-22-87833339
Kab. Sidoarjo	Jalan Sunandar Priyosudarmo Blok L No. 138 Sidoarjo-61271 Tlp: +62-31-99703688 Fax: +62-31-99703992
Jakarta Timur	Komplek Pusat Perdagangan Ujung Menteng Blok B No. 17, Jl. Hamengkubuwono IX KM 25 Cakung Jakarta Timur-13960 Tlp. +62-21-29068648 Fax: +62-21-29068647
Sukabumi	Jalan Siliwangi No. 99 Cibadak Sukabumi-43351 Tlp. +62-266-6545408 Fax: +62-266-6545286
Tangerang Selatan	Ruko Sutera Niaga I No. 69, Jalan Raya Serpong Tangerang Selatan-15325 Tlp. +62-21-29672190 Fax: +62-21-5398666
Surabaya	Jalan Raya Tandes No. 03A Surabaya-60187 Tlp: +62-31-99147477 Fax: +62-31-99146810

Kantor Wilayah Branch Office	**Alamat** Address
Kantor Kas / Cash Offices	
Kab. Pasuruan	Komplek Ruko Sentra Niaga Blok A No.3, Jalan Raya Kasri Pandaan Tlp: +62-343-6740500 Fax: +62-343-6740505
Kab. Bogor	Jalan Mayor Oking Jaya Atmaja No. 22 Ruko No.2 Cibinong Bogor Tlp: +62-21-83713522 Fax: +62-21-83713561
Kab. Majalengka	Komplek Ruko Jatiwangi Square Blok A No. 3, Jalan Ahmad Yani No. 8 Jatiwangi Tlp: +62-333-8888445 Fax: +62-333-83713561
Kab. Gresik	Ruko City 9 Blok B-07, Jalan Dr.Wahidin Sudiro Husodo No. 138 Gresik Tlp: +62-31-39924380 Fax: +62-31-39924384
Kab. Karawang	Jalan Raya Kosambi No. 07 Karawang Tlp: +62-267-8402986 Fax: +62-267-8402704
Kota. Surabaya	Jalan Kalirungkut No. 27 Surabaya Tlp: +62-31-87853705 Fax: +62-31-87853276
Kota. Semarang	Ruko Ungaran Square, Jalan Diponegoro No. 145 Semarang Tlp: +62-24-76901802 Fax: +62-24-76901691
Kantor Fungsional Non Operasional / Non-Operational Functional Office	
Bandung	Jl. Pager Gunung No. 18 Tlp. +62-22-82560256 Fax: +62-22-2502123

Peta Operasional

Operational Map

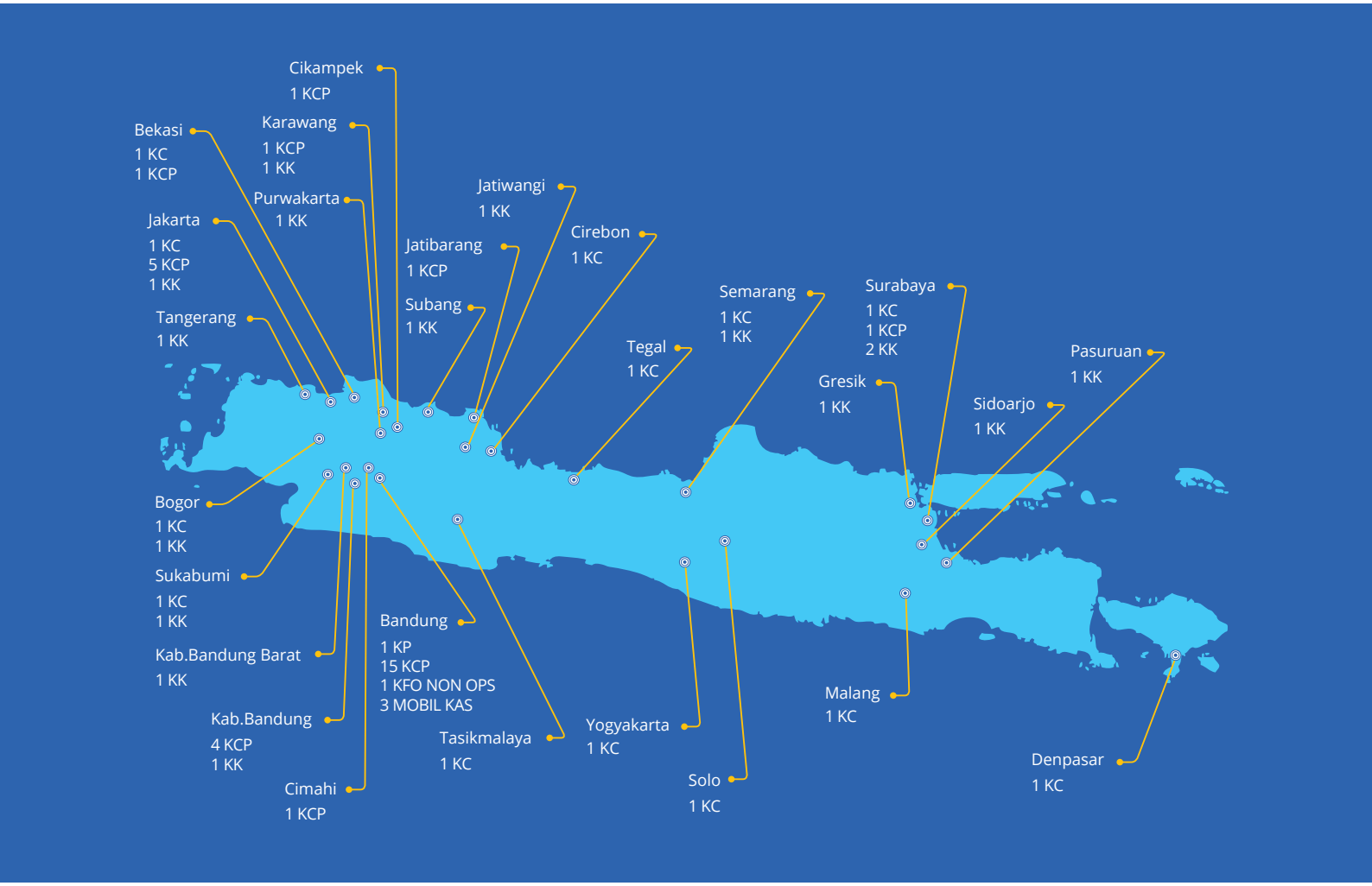

NOTE:

KP	=	Kantor Pusat / Head Office (1)
KC	=	Kantor Cabang / Branch Offices (13)
KCP	=	Kantor Cabang Pembantu / Supporting Branch Offices (29)
KK	=	Kantor Kas / Cash Offices (16)
KFO NON OPS	=	Kantor Fungsional Non Operasional (1)
		Mobil Kas / Cash Car (3)
ATM	=	Anjungan Tunai Mandiri / Automated Teller Machines (50)
ATM Seven Bank	=	ATM Seven Bank / ATM Seven Bank (3)
ATM Non Tunai	=	ATM Non Tunai / Non Cash ATM (4)

Unit Pendukung Bisnis

Supporting Business Unit

90 Sumber Daya Manusia
Human Resources

96 Teknologi Informasi
Information Technology

100 Bank Koresponden
Correspondent Banks

Sumber Daya Manusia
Human Resources

Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) secara berkesinambungan merupakan salah satu upaya Unit Human Capital yang berdampak besar terhadap pencapaian bisnis dan tujuan Bank BNP di tahun 2017.

Guna mendukung tujuan Bank, Unit Human Capital melakukan *Work Load Analysis,* yang hasilnya digunakan sebagai salah satu landasan dalam membentuk struktur organisasi yang lebih efektif.

Sepanjang tahun 2017, Unit Human Capital fokus pada upaya-upaya peletakan landasan struktur organisasi agar dapat lebih mendukung tujuan Bank. Ini dimulai dari proses rekrutmen untuk menjaring talenta-talenta terbaik, pelatihan untuk meningkatkan kompetensi *hard skill* maupun *soft skill* seluruh karyawan, serta pengelolaan SDM yang terarah dan terencana

Rekrutmen Karyawan

Bank BNP menjalankan *Man Power Planning* dengan didukung sistem rekrutmen berdasarkan prinsip *"the right man in the right position*". Proses rekrutmen ini terdiri atas beberapa tahap seleksi yang harus dilalui setiap kandidat untuk dapat bergabung untuk menjadi karyawan Bank BNP.

Kandidat yang masuk dalam proses tahap seleksi merupakan kandidat yang telah terjaring dalam proses rekrutmen *pro-hire* yang menggunakan jasa *headhunter*, referensi, *campus hiring*, *job fair*, dan beberapa media *jobseeker*. Melalui proses ini, diharapkan karyawan yang bergabung adalah kandidat terbaik yang sesuai dengan kualifikasi posisi yang dibutuhkan.

Pada tahun 2017 Bank BNP merekrut total 540 orang karyawan, sementara 625 karyawan mengundurkan diri, 15 karyawan pensiun, dan 1 karyawan meninggal dunia.

Profil SDM

Per akhir 2017, Bank BNP mempekerjakan 1.566 karyawan, dengan komposisi sebagai berikut:

Continuous improvement of the quality of Human Resources (HR) was one of the strategies of the Human Capital Unit that positively impacted on Bank BNP's business achievement and objectives in 2017.

To achieve the Bank's objectives, the Human Capital Unit performed Work Load Analysis, the output from which was subsequently used as one of the foundations in creating a more effective organizational structure.

Throughout 2017, the Human Capital Unit focused to lay the foundations of the organizational structure in order to help achieve the Bank's objectives. This started from recruitment to acquire the best talents in the market, various training programs to improve the hard skills and soft skills of all employees, and a well-planned human resource management.

Employee Recruitment

Bank BNP conducts its Man Power Planning using a recruitment system that is based on the principle of "the right man in the right place". This recruitment process consists of a number of phases of selection, which all candidates must pass in order to join Bank BNP as employees.

Candidates that have passed the selection process are those selected via pro-hire recruitment processes, which employ the service of headhunters, references, campus hiring, job fairs, and jobseeker media. Through this process, it is expected that the candidates are the best talents available to work at the Company, having the proper qualifications to fill the vacant positions.

In 2017 Bank BNP recruited a total of 540 employees, while 625 of its employees resigned, 15 employees reached retirement age, and 1 employee passed away.

Workforce Profile

As at end of 2017, Bank BNP had a total of 1,566 employees, with the following composition:

Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian / Workforce Composition by Employment Status

Uraian	2017	2016	Perubahan *Change (%)*	Description
Tetap	1.144	1.244	-8,04%	Permanent
Kontrak	422	423	-0,24%	Contract
Total	**1.566**	**1.667**	**6,06%**	**Total**

Komposisi Karyawan Berdasarkan Level Organisasi / Workforce Composition by Organizational Level

Uraian	2017			2016			Perubahan *Change (%)*	Description
	P	L	Total	P	L	Total		
Top Management	4	16	20	3	17	20	0%	Deputy Director/Division Head
Middle Management	43	78	121	49	79	128	-5%	Deputy Division/Dept. Head
Lower Management	258	268	526	241	272	513	3%	Section Head/Officer
Staff	428	468	896	466	533	999	-10%	Staff
Non-Staff	0	3	3	0	7	7	-57%	Non-Staff
Total	**1.566**			**1.667**			**10%**	**Total**

Komposisi Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan / Workforce Composition by Level of Education

Uraian	2017	2016	Perubahan *Change (%)*	Description
Master	29	19	63%	Master's degree
Bachelor	995	1017	-2%	Bachelor's degree
Diploma	275	315	-13%	Diploma
Non Graduate	267	316	-16%	High School
Total	**1.566**	**1.667**	**-6%**	**Total**

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Usia / Workforce Composition by Age Group

Uraian	2017	2016	Perubahan *Change (%)*	Description
18–19 Tahun	5	9	-44%	18–19 years old
20–30 Tahun	728	742	-2%	20–30 years old
31–40 Tahun	567	611	-7%	31–40 years old
41–50 Tahun	214	244	-12%	41–50 years old
> 51 Tahun	52	61	-15%	> 51 years old
Total	**1.566**	**1.676**	**-6%**	**Total**

Diagram Berdasarkan Tingkat Pendidikan /
Diagram Based on Education Level

No.	Tingkat Pendidikan / *Educational Level*	FTE
1.	Pascasarjana / Master's degree	31
2.	Sarjana / Bachelor's degree	996
3.	Diploma / Diploma	275
4.	SLTA / High School	264
Total		**1.566**

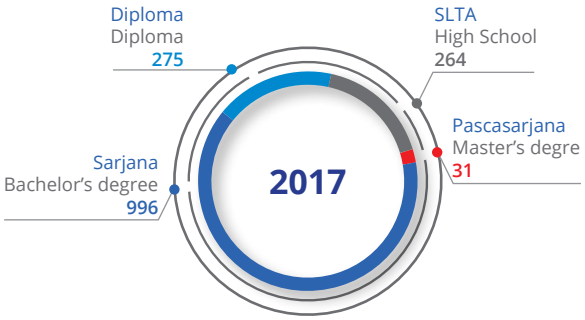

Diagram Berdasarkan Jenjang Jabatan /
Diagram Based on Position Level

No.	Tingkat Jabatan / *Position Level*	FTE
1.	Top Management / Deputy Director & Division Head	**20**
2.	Middle Management / Deputy Division & Department Head	121
3.	Lower Management / Section Head & Officer	526
4.	Staff / Staff	896
5.	Non Staff / Non Staff	3
Total		**1.566**

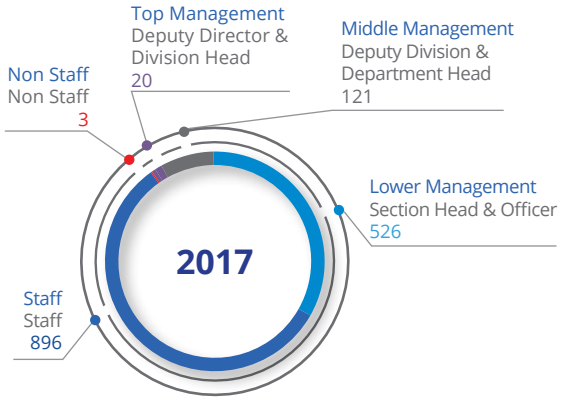

Diagram Berdasarkan Status /
Diagram Based on Status

No.	Status / *Status*	FTE
1.	Karyawan Tetap / Permanent Employee	1.144
2.	Karyawan Tidak Tetap / Contract Employee	422
Total		**1.566**

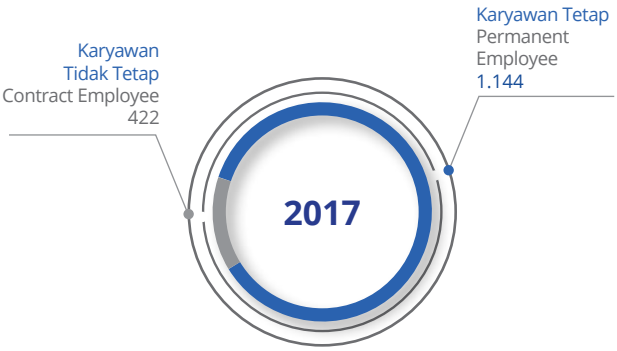

Diagram Berdasarkan Jenjang Usia /
Diagram Based on Age Level

No.	Usia / *Age*	FTE
1.	18–19 tahun / 18–19 years old	5
2.	20–30 tahun / 20–30 years old	728
3.	31–40 tahun / 31–40 years old	567
4.	41–50 tahun / 41–50 years old	214
5.	> 51 tahun / > 51 years old	52
Total		**1.566**

Pengembangan SDM

Pengembangan SDM merupakan salah satu usaha yang harus dilakukan untuk membentuk karyawan yang lebih berkualitas, memiliki keterampilan, kemampuan kerja dan loyalitas kerja terhadap perusahaan.

Pengembangan SDM merupakan cara efektif dalam menghadapi beberapa tantangan, termasuk keuangan atau ketertinggalan karyawan, diversifikasi tenaga kerja, perubahan-perubahan sosioteknis, dan perputaran tenaga kerja.

Strategi pengembangan SDM yang dijalankan Bank antara lain:

- Mengembangkan dan meningkatkan kualitas sistem manajemen kinerja agar lebih transparan, adil, dan objektif melalui penerapan *Performance Management* setiap karyawan. *Performance Management* dijalani melalui penilaian *Key Performance Indicators*, *Work Behavior* dan penilaian *360-Degree Feedback*.

- Penerapan kebijakan *compensation & benefit* yang kompetitif, menyesuaikan dengan keadaan pasar tenaga kerja.
- Penyelenggaraan berbagai pelatihan teknis maupun *soft skill* baik secara internal maupun eksternal.

Human Resources Development

Human resources development is one of the means to foster employees that are of the highest quality and the strongest set of skills, capabilities, and loyalty toward the Company.

Human resources development provides an effective way to help the Company to overcome its challenges, including of financial challenges and lack of employee skills, workforce diversification, sociotechnical changes and employee turnover.

The human resources development strategies that the Bank is engaged in include:

- Developing and improving the quality of performance management system so as to become more transparent, fair, and objective by applying the Performance Management system on each employee. The Performance Management consists of evaluation of Key Performance Indicators, Work Behavior, and 360-Degree Feedback.
- Implementation of a competitive compensation & benefit policy, aligned with the latest conditions in the labor market.
- Numerous technical and soft skills training, both internally and externally.

Pada tahun 2017 Bank BNP menyelenggarakan berbagai program pelatihan, dengan total 4.424 peserta, dengan jumlah jam pelatihan 45.251,5 jam, atau rata-rata 10,2 jam/karyawan. Total biaya pelatihan karyawan untuk tahun 2017 adalah Rp10,1 miliar.

Pelatihan yang diselenggarakan di tahun 2017 dijabarkan dalam tabel berikut.

In 2017 Bank BNP conducted various training programs involving a total of 4,424 participants, recording a total of 45,251.5 hours of training, resulting in an average training duration of 10.2 hours per employee. All employee training programs in 2017 incurred Rp10.1 billion.

Training programs held in 2017 are detailed in the following table.

Program Pelatihan Karyawan 2017/2017 Employee Training Programs

Jenis Pelatihan *Type of Training*	Materi *Topic*	Peserta *Number of Participants*
Technical Skill	Pelaporan Bank/Reporting in Banking	2
	Perkreditan/Lending Treasuri/Treasury	137
	Manajemen Risiko/Risk Management	190
	Sosialisasi Ketentuan Perbankan/Dissemination on Banking Regulations	1.519
	Audit	39
	Teknologi Informasi/Information Technology	69
	Manajemen Umum/General Management	203
	Manajemen Perbankan/Banking Management	1.165
	Lainnya/Other	528
Soft Skill	Customer Relationship Skill	293
	Kepemimpinan/Leadership	21
	Teknik Presentasi & Komunikasi/Presentation & Communication Techniques	49
	Lainnya/Other	209
Total		4.424

Sertifikasi

Bank BNP mengikutsertakan karyawannya dalam program Sertifikasi Manajemen Risiko sesuai persyaratan Bank Indonesia. Pada tahun 2017, sebanyak 79 karyawan mengikuti program Sertifikasi Manajemen Risiko, dengan tingkat kelulusan 98% atau setara dengan 78 orang.

Selain Sertifikasi Manajemen Risiko, Bank BNP mengikutsertakan karyawannya dalam Sertifikasi Audit, Sertifikasi Kepatuhan, Sertifikasi Penilai (*Appraisal*), dan Sertifikasi AAJI, sesuai bidang pekerjaan karyawan.

Fasilitas & Tunjangan Karyawan

Kesejahteraan karyawan Bank BNP terus ditingkatkan dengan fasilitas dan tunjangan yang bersaing di industri perbankan nasional.

Karyawan Bank BNP mendapatkan fasilitas pemeriksaan kesehatan gratis secara berkala selain mendapatkan tunjangan kesehatan beserta tunjangan kacamata. Seluruh karyawan mendapatkan jaminan kesehatan dari asuransi kesehatan swasta dan juga diikutsertakan dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Certifications

Bank BNP enrolls its employees in the Risk Management Certification program in accordance with the requirement of Bank Indonesia. In 2017, a total of 79 employees participated in the Risk Management Certification program, with a graduation rate of 98% (78 employees).

In addition to the Risk Management Certification, BNP also enrolls its relevant employees on Audit Certification, Compliance Certification, and Appraisal (AAJI) Certification courses, in line with the employees' line of work.

Employee Benefits & Allowances

Bank BNP's employees' welfare is constantly enhanced by the range of facilities and benefits offered at a competitive scale within the banking industry.

Bank BNP employees receive free regular medical check-ups, as well as allowances for prescriptive glasses and healthcare allowances. All employees are protected by a private health insurance scheme and are enrolled on the social security program run by the National Social Security Agency (BPJS).

Hideki Nakamura
Presiden Direktur
President Director

Eiichiro Sakai
Direktur Kredit, Keuangan & IT
Credit, Finance & IT Director

Michio Atsuda
Presiden Komisaris
President Commissioner

Fumitaka Hamanishi
Advisor
Advisor

Takeshi Nakamura
Kepala Divisi KTA Mirai+
KTA Mirai+ Division Head

Penggunaan Tenaga Kerja Asing & Advisor

Bank BNP mempekerjakan beberapa ekspatriat yang berasal dari atau direkomendasikan oleh pemegang saham. Para ekspatriat yang telah mendapatkan izin bekerja tersebut masing-masing menjabat sebagai Presiden Komisaris (Michio Atsuda), Presiden Direktur (Hideki Nakamura), Direktur Kredit, Keuangan & IT (Eiichiro Sakai), dan Kepala Divisi KTA Mirai+ (Takeshi Nakamura), dengan masa kerja sesuai batas waktu pengangkatannya melalui hasil RUPS.

Keberadaan tenaga kerja asing adalah sesuai dengan kebutuhan Bank untuk peningkatan dan kemajuan kualitas bisnis Bank.

Berdasarkan POJK no. 37/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan, Bank BNP dalam mengembangkan bisnis, khususnya Kredit Tanpa Agunan, juga mempekerjakan seorang tenaga asing dari Jepang, yaitu Fumitaka Hamanishi, sebagai Advisor.

Employment of Expatriates & Advisor

Bank BNP employs expatriates that hailed from, or were recommended by, the Bank's shareholders. They have a license to work at the Bank, and are serving as the President Commissioner (Michio Atsuda) and President Director (Hideki Nakamura), Credit, Finance & IT Director (Eiichiro Sakai), and Non-Collateral Loans Mirai+ Division Head (Takeshi Nakamura), with their respective tenures set in accordance with the limits determined upon their appointment through the GMS resolutions.

The presence of expatriate employees is in line with the Bank's needs for improving the quality of its business.

Based on the Regulation of POJK No. 37/POJK.03/2017 dated 12 July 2017 on Utilization of Foreign Workforce and Knowledge Transfer Program in the Banking Sector, with respect to its business development, particularly Non-Collateral Loans, Bank BNP also employs one expatriate from Japan, Fumitaka Hamanishi, as Advisor.

Teknologi Informasi
Information Technology

Kesiapan teknologi informasi yang memadai diperlukan untuk mengimbangi inovasi produk dan layanan perbankan yang semakin berkembang dan dinamis. Bank dituntut untuk senantiasa berkolaborasi dalam mengintegrasikan semua layanannya agar dapat menjamin pemberian layanan terbaik bagi nasabah dan pengembangan bisnisnya di masa mendatang.

Divisi Teknologi Informasi bertugas untuk membantu Bank memberikan pelayanan yang terbaik bagi nasabah melalui penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing.

Bank meyakini bahwa misi tersebut dapat dicapai dengan melakukan hal-hal berikut:
1. Memberikan dukungan penuh untuk akselerasi bisnis tanpa mengabaikan *prudential banking*, dengan melakukan pengkajian yang efektif dan efisien dalam menentukan dukungan Teknologi Informasi terhadap kegiatan dan atau pengembangan bisnis;
2. Meningkatkan Tata Kelola Teknologi Informasi pada lingkungan Bank yang mencakup namun tidak terbatas pada pengelolaan, pengendalian, penggunaan dan pengamanan layanan Teknologi Informasi;
3. Memperluas pengendalian internal pada unit kerja pengelola dan pengguna Teknologi Informasi, agar pengawasan melekat dapat berlangsung simultan;
4. Mendukung dan menjembatani setiap upaya untuk pengembangan Teknologi Informasi sesuai kebutuhan unit kerja;
5. Melakukan analisis proses bisnis dan otomasi layanan perbankan di lingkungan Bank agar lebih efektif dan efisien; dan
6. Meningkatkan dan mengembangkan layanan *electronic banking*.

Program kerja dan pencapaian kinerja Divisi TI selama tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Information technology readiness is of paramount importance for the Bank to have, in order to keep up with the rapid and dynamic innovations of banking products and services. The Bank is compelled to maintain collaboration in integrating all its services so that it can guarantee the best service for its customers, and ensure its future business development.

The Information Technology Division has the function of assisting the Bank in providing the best level of service to all customers, through the implementation of information technology to improve service quality and competitiveness.

The Bank believes that the above mission can be fulfilled by performing the following:
1. Providing full support to accelerate business without disregarding prudential banking principle, through effective and efficient reviews in determining what types of support Information Technology can give to the Bank's activities and or business development;
2. Improve Information Technology Governance within the Bank's environment which includes but not limited to the management, control, utilization and securing of Information Technology services;
3. Expanding internal control in the work units that manage and use Information Technology so inherent supervision can be carried out simultaneously;
4. Supporting and facilitating efforts to develop Information Technology further, in line with the needs of the work units;
5. Conducting business process analyses and banking service automation within the Bank's environment so as to be more effective and efficient; and
6. Improve and develop electronic banking services.

The IT Division's work plans and achievements in 2017 are as follows:

Program Kerja Work Plan	**Penjelasan** Description
Mobile Device Management	Implementasi *Mobile Device Management* bertujuan untuk menjaga keamanan Bank BNP, sehingga hanya gawai yang didaftarkan yang bisa mengakses data. The implementation of Mobile Device Management is aimed at ensuring security in Bank BNP, by limiting access to data only to previously registered mobile devices.

Program Kerja Work Plan	Penjelasan Description
NSICCS (*National Standard Integrated Chip Card Specification*)	Pada bulan Maret 2017, Bank BNP menyelesaikan secara keseluruhan untuk implementasi NSICCS baik di sisi *back end* sistem maupun di seluruh terminal ATM dan EDC. Saat ini secara bertahap sedang dilakukan penggantian kartu yang lama dengan yang baru. Batas akhir penggantian untuk seluruh kartu adalah tahun 2021. March 2017 Bank BNP completed the entire process for NSICCS implementation, both in the system's back end as well as across all of the ATMs and EDCs. Currently, existing cards are being replaced gradually with the new cards. The time limit for the replacement of all cards is set at 2021.
Implementasi Aplikasi Tom and Spot Tom and Spot Application Implementation	Modul transaksi untuk Tom dan Spot diintegrasikan di aplikasi *core banking*. Tom and Spot transactions have been integrated into the Bank's core banking application.
Implementasi Aplikasi e-KTP e-KTP Application Implementation	Aplikasi ini bertujuan untuk mengakses data kependudukan yang berada di Dirjen Dukcapil dan kemudian digunakan baik untuk validasi pembukaan rekening nasabah baru maupun nasabah yang sudah ada. This application is intended to access civil registry data stored in the Directorate General of Civil Registry's database, to be subsequently used to validate the opening of accounts by new and existing customers alike.
Pengkinian Situs Web Bank BNP dan Implementasi Situs Web KTA Mirai+ Bank BNP Website Updating and Implementation of KTA Mirai+ Website	Kini situs web Bank BNP memuat isi yang lebih lengkap dan penampilan yang lebih menarik, dan juga tersedia tautan ke situs web KTA Mirai+. Selain itu juga ditambahkan fitur pengamanan SSL, untuk memberikan akses yang aman kepada pengunjung situs web Bank BNP dan KTA Mirai+. Now, Bank BNP's website contains more comprehensive information with more attractive look, and a link to KTA Mirai+ website has also been provided. The website's security is now based on SSL, thereby allowing secure access to all visitors to the websites of Bank BNP and KTA Mirai+.
Implementasi Aplikasi e-Budgeting e-Budgeting Application Implementation	Aplikasi ini berfungsi untuk memantau alokasi penggunaan anggaran teknologi informasi yang telah direncanakan pada awal tahun. This application can monitor the allocation of IT budget as planned in the beginning of each year.
Implementasi Aplikasi SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) SLIK (Financial Information Services System) Application Implementation	Aplikasi ini digunakan untuk membuat laporan debitur yang diperlukan oleh OJK, dan akan digunakan untuk menggantikan aplikasi SID (Sistem Informasi Debitur) milik BI (Bank Indonesia) mulai tahun 2018. This application is used to prepare reports on debtors as required by the OJK, set to supplant Bank Indonesia's older Debtors Information System (SID), beginning in 2018.
Implementasi Aplikasi APU PPT APU PPT Application Implementation	Aplikasi ini dibutuhkan oleh bagian *Compliance* untuk mendeteksi kemungkinan rekening nasabah dipergunakan untuk melakukan pencucian uang atau pendanaan terorisme. This application is required by the Compliance unit to detect any possibility that a customer's account is being used for the purpose of money laundering or financing of terrorism.

Pelatihan dan Pengembangan

Bank BNP mengembangkan kualitas karyawan yang bekerja di Divisi Teknologi Informasi dengan kompetensi dan kapasitas sesuai perkembangan teknologi informasi Bank, melalui pemberian pelatihan. Pelatihan yang diikuti selama 2017 adalah:

Training and Development

Bank BNP develops its Information Technology Division staff with the necessary competencies and capacity, in accordance with the Bank's information technology development by providing training. The training programs conducted in 2017 were:

No	Nama Training *Training Name*	Jumlah Peserta *Number of Participants*
1	Corporate Workshop 2017	4
2	Refreshment SMR – Eksekutif	1
3	Tata Cara Penyusunan Pengelolaan Ketentuan Internal (I) dan (II)	3
4	Pelatihan Sertifikasi Manajemen Risiko Level II	1
5	Seminar Microsoft Azure Day	1
6	Uji Sertifikasi Manajemen Risiko Level II	1
7	Tata Cara Penyusunan Pengelolaan Ketentuan Internal	1
8	Training Installing & Configure Windows 10	13
9	Core Solutions of Microsoft	5
10	Training HR Knowledge & Corporate Policy (BDG)	31
11	Sosialisasi Sistem Aset (Aktiva)	7
12	Training Core Solution MS Exchange 2013	5
13	Training HR Knowledge & Corporate Policy (Manager)	4
14	Training HR Knowledge & Corporate Policy (SBY)	1
15	Workshop Corporate Semester II	5
16	Training PSAK 71	3
17	Training HR Knowledge & Corporate Policy (Bekasi)	1
18	Pelatihan Tematik Pelaporan LBU 2017	1
19	Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko	1
20	Motivational Session with Mr. Hideki Nakamura	9
21	Training Introduction to Thales PayShield – Hardware Security Module	6
22	Seminar IBEX 2017 – Indonesia Banking Expo 2017	1
23	Workshop Specialized Corporate Governance Leadership Program	1

Rencana Strategis Teknologi Informasi

Divisi Teknologi Informasi telah menyusun rencana kerja untuk satu tahun ke depan (2018) dan jangka waktu yang lebih panjang, yaitu lima tahun ke depan.

Rencana Strategis TI telah disusun untuk menyelaraskan kinerja TI Bank BNP dengan strategi bisnis Bank BNP, untuk meraih keunggulan kompetitif. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Divisi Teknologi Informasi telah menetapkan sasaran dan target yang dijelaskan di bawah ini.

Rencana TI untuk jangka pendek:

a) Kecukupan kaji ulang fungsi, tugas dan tanggung jawab masing-masing unit kerja yang terdapat pada struktur organisasi TI.

Information Technology Strategic Plans

The Information Technology Division has formulated the plans for the year 2018 as well as for a longer time frame, i.e. five years.

The IT Strategic Plans have been conceived in order to align the IT performance of the Bank's with its business strategy, so as become a competitive advantage. In order to achieve this goal, the Information Technology Division has determined a number of goals and targets, as stated below.

Short-term plans in IT:

a) Adequacy of review of functions, duties and responsibilities of each work units in the IT organization structure.

b) Peningkatan kualitas sumber daya TI yang dimiliki dan standar perekrutan karyawan baru serta pembinaan yang berkelanjutan agar dapat sejalan dengan tujuan bisnis Bank;
c) Kecukupan pemantauan kinerja TI, dan upaya peningkatannya misalnya dengan mendeteksi keusangan TI dan mengukur efektivitas dan efisiensi penerapan kebijakan pengamanan TI.
d) Kecukupan penerapan dan kepatuhan terhadap kebijakan-kebijakan internal dan eksternal terkait dengan pengelolaan layanan dan tata kelola TI di Bank.
e) Kecukupan penerapan Manajemen Risiko dalam penggunaan TI oleh Bank BNP meliputi:
   - Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi.
   - Kecukupan kebijakan manajemen risiko terkait penggunaan layanan TI di Bank BNP.
   - Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko penggunaan TI.
   - Sistem pengendalian internal atas penggunaan layanan TI.

Rencana TI untuk jangka menengah dan panjang adalah rencana yang dibuat untuk jangka waktu lima tahun ke depan. Rencana-rencana ini meliputi:
a) Menyelaraskan antara Rencana Strategis TI (RSTI) dan Rencana Strategis Bisnis Bank (RBB) sehingga peningkatan kinerja dan keunggulan kompetitif dapat diraih untuk dapat bertumbuh dan bertahan dalam kompetisi perbankan yang kian sengit;
b) Memaksimalkan daya dukung TI dalam memberikan dukungan pada kegiatan operasional dan secara efisien dan efektif seperti tertuang dalam *Key Performance Indicators* (KPI) untuk level personel, bagian, dan divisi TI, serta *Service Level Agreement* (SLA) untuk masing-masing layanan TI ke *end user*;
c) Meningkatkan kualitas personel TI dalam melakukan kegiatan operasional TI melalui pelatihan dan *workshop* sesuai dengan masing-masing bidang pekerjaannya;
d) Membentuk budaya risiko pada masing-masing personel TI dan organisasi TI dengan melakukan sosialiasi dan pelatihan yang berkesinambungan; dan
e) Menggunakan standar-standar yang sudah menjadi *best practice* seperti COBIT 5, CMMI, ValIT untuk melakukan tata kelola organisasi TI yang baik.

b) Enhancement of IT human resources' quality and standardization of new employee recruitment criteria as well as continuous development to be aligned with the Bank's business goals;
c) Adequacy of monitoring of IT performance, and efforts of improvement, among others by detecting IT obsolescence and measuring the IT security policy's effectiveness and efficiency.
d) Adequacy of implementation and compliance with internal and external policies related to the management of IT services and governance at the Bank.
e) Adequacy of Risk Management implementation in the use of IT by Bank BNP, encompassing:
   - Active supervision by the Boards of Commissioners and Directors;
   - Adequacy of risk management policy on the Bank's IT services utilization.
   - Adequacy of identification, measurement, monitoring, and control processes of the risks related to IT utilization.
   - Internal control system on IT services utilization.

Meanwhile, the medium- and long-term plans in IT are those that have been conceived to be implemented within the next five years. These plans include:
a) Aligning the IT Strategic Plan (RSTI) and the Bank's Strategic Business Plan (RBB) so that performance improvement and competitive advantage can be attained to continue growing and thrive in the more competitive banking industry;
b) Maximizing IT capability for providing support to operational activities in an efficient and effective manner, as stipulated in the Key Performance Indicators (KPI) for IT personnel, units and division, as well as the Service Level Agreement (SLA) for each IT service provided to end users;
c) Enhancing the quality of IT personnel in conducting IT operational activities through training and workshops in line with their particular line of work;
d) Fostering the culture of risk awareness in each IT personnel and within the IT organization, by conducting dissemination and training continuously; and
e) Employing standards that have been considered as best practice, such as COBIT 5, CMMI, ValIT, to ensure IT good governance.

Bank Koresponden

Correspondent Banks

Bank BNP sebagai Bank Devisa dan Perusahaan Publik memiliki akses dan jaringan transaksi domestik hingga ke mancanegara, keberadaan Bank Koresponden menjadi salah satu modal untuk melancarkan kegiatan bisnis perbankannya.

Hubungan Bank BNP dengan Bank Koresponden merupakan hal penting dalam mendukung berkembangnya usaha Bank BNP, dimana hubungan koresponden ini dapat terjalin diantara bank yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri.

Untuk mendukung kegiatan trade finance, remittance dan transaksi valuta asing lainnya, Bank Koresponden Bank BNP di Luar Negeri yang memiliki rekening Nostro (Depository Banks) terdiri dari beberapa mitra yang telah memiliki hubungan kerjasama yang saling menguntungkan. Pada posisi Desember 2016, Bank Depositori Koresponden Bank BNP yang terdapat di dalam dan luar negeri untuk mata uang asing adalah sebagai berikut :

- Commonwealth Bank Of Australia Sydney, Australia (AUD)
- PT Bank ICBC Indonesia Jakarta, Indonesia (CNY)
- Standard Chartered Bank Frankfurt, Germany (EUR)
- Standard Chartered Bank London, United Kingdom (GBP)
- United Overseas Bank Ltd Hong Kong, Hong Kong (HKD)
- Bank of Tokyo Mitsubishi Ufj Ltd Tokyo, Japan (JPY)
- Sumitomo Mitsui Banking Corporation Tokyo, Japan (JPY)
- United Overseas Banks Singapore, Singapore (SGD)
- Standard Chartered Bank New York, U.S.A. (USD)
- Bank Central Asia Jakarta, Indonesia (USD)
- Bank Mandiri (Persero), PT, Jakarta, Indonesia (USD)

For Bank BNP, as a Foreign Exchange Bank and a Public Company, to have access and transaction networks domestically and abroad, it is essential for the Bank to have a host of Correspondent Banks to assist in its banking business activities.

Bank BNP's relationship with these Correspondent Banks is crucial for supporting the development of Bank BNP's business. This correspondence is established between the banks in the country and the banks abroad.

To support trade finance, remittance, and other foreign exchange activities, Bank BNP's Correspondent Banks located abroad owning the Nostro account (Depository Banks) consisting of a number of partners with mutuallybeneficial cooperation agreements. As of December 2015, Bank BNP's Correspondent Depository Banks located within and outside of the country to assist in foreign exchange transactions are:

- Commonwealth Bank Of Australia Sydney, Australia (AUD)
- PT Bank ICBC Indonesia Jakarta, Indonesia (CNY)
- Standard Chartered Bank Frankfurt, Germany (EUR)
- Standard Chartered Bank London, United Kingdom (GBP)
- United Overseas Bank Ltd Hong Kong, Hong Kong (HKD)
- Bank of Tokyo Mitsubishi Ufj Ltd Tokyo, Japan (JPY)
- Sumitomo Mitsui Banking Corporation Tokyo, Japan (JPY)
- United Overseas Banks Singapore, Singapore (SGD)
- Standard Chartered Bank New York, U.S.A. (USD)
- Bank Central Asia Jakarta, Indonesia (USD)
- Bank Mandiri (Persero), Pt, Jakarta, Indonesia (USD)

Analisis dan Pembahasan Manajemen

Management Discussion and Analysis

102 Analisis Makroekonomi
Macroeconomic Analysis

104 Tentang Analisis dan Pembahasan Manajemen
Disclaimer on the Management Discussion and Analysis

107 Tinjauan Bisinis
Business Review

108 Tinjauan Operasional per Segmen Usaha
Operational Review by Business Segment

122 Tinjauan Keuangan
Financial Review

129 Kemampuan Membayar Utang dan Tingkat Kolektibilitas Piutang
Solvability and Receivables Collectibility

131 Perbandingan Target dan Realisasi 2017 dan Proyeksi 2018
Comparison of 2017 Targets and Actual Achievements, and 2018 Projections

132 Kenaikan/Penurunan Material dari Pendapatan Usaha/Bersih
Material Increase/Decline in Operating/Net Income

132 Struktur Permodalan dan Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal
Capital Structure and Management's Policy on Capital Structure

134 Kebijakan Manajemen Atas Struktur Modal
Management's Policy on Capital Structure

134 Ikatan Material Terkait Investasi Barang Modal
Material Commitments Related to Investments In Capital Goods

134 Investasi Barang Modal
Investments in Capital Goods

134 Komitmen dan Kontinjensi
Commitments and Contingencies

135 Kebijakan Dividen
Dividend Policy

136 Realisasi Dana Hasil Penawaran Umum
Actual Use of Public Offering Proceeds

136 Derivatif dan Fasilitas Lindung Nilai
Derivatives and Hedging

137 Program Pemilikan Saham oleh Manajemen dan Karyawan
Management and Employee Share Option Program

137 Informasi Keuangan Luar Biasa dan Jarang Terjadi
Rare and Extraordinary Financial Events

138 Informasi dan Fakta Material Setelah Tanggal Laporan Akuntan
Subsequent Facts and Information

138 Perubahan Kebijakan Akuntansi yang Berdampak Terhadap Kinerja Keuangan
Changes in Accounting Principles Bearing Significant Impact on Financial Performance

138 Aspek Pemasaran
Marketing Aspect

140 Prospek Usaha
Business Prospect

141 Arah Kebijakan Bank
Policy Direction of the Bank

Analisis Makroekonomi

Perekonomian Global

Berdasarkan data dari IMF sejak tahun 2010 pertumbuhan ekonomi dunia yang berada di angka 5,4% terus mengalami tren penurunan di tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2016, pertumbuhan ekonomi dunia menjadi 3,2%. Perekonomian global yang mengalami perlambatan di tahun 2016 secara tidak langsung berdampak pada perkembangan ekonomi Indonesia. Menurut prediksi IMF, tahun 2017 akan menjadi momentum kebangkitan ekonomi dunia.

Pemulihan ekonomi dunia lebih merata, terutama ditopang oleh Amerika Serikat, Eropa, dan Tiongkok disertai dengan masih tingginya harga komoditas. Sumber pertumbuhan ekonomi dunia yang lebih merata ini disumbang oleh negara maju dan negara berkembang. Membaiknya pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat ditopang oleh peningkatan investasi dan konsumsi yang stabil serta rendahnya tingkat pengangguran. Tingkat inflasi Amerika Serikat tercatat masih lebih rendah dari target yang telah ditentukan. Rendahnya inflasi membuat The Fed menaikan suku bunga sebanyak 3 kali selama tahun 2017 dan melakukan *balance sheet reduction* (pengurangan kepemilikan instrumen surat berharga oleh The Fed) pada bulan Oktober 2017.

Data perekonomian Tiongkok tahun 2017 menunjukkan perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Di tahun 2016, pertumbuhan ekonomi Tiongkok berada pada 6,7%, angka terendah dalam 26 tahun. Menurut laporan biro statistik pemerintah, pertumbuhan ekonomi Tiongkok sepanjang tahun 2017 mencapai 6,9%, angka ini melampaui target pemerintah, yakni 6,5%. Pertumbuhan ekonomi tersebut ditopang oleh konsumsi dan ekspor sejalan dengan strategi *rebalancing* ekonomi yang ditempuh secara gradual. Konsumsi merupakan kekuatan utama dari pertumbuhan ekonomi Tiongkok selain itu permintaan ekspor ke Amerika Serikat, Eropa, dan ASEAN ikut meningkatkan kinerja ekspor. Peningkatan kinerja ekspor juga mendukung perbaikan aktivitas manufaktur yang tercermin dari peningkatan PMI manufaktur dan keuntungan sektor industri.

Pemulihan ekonomi dunia mendorong peningkatan volume perdagangan dunia di tahun 2017. Peningkatan perdagangan dunia tercermin dari kinerja ekspor dan impor baik dari negara *advanced economies* dan *emerging market* yang menunjukan tren meningkat.

Harga komoditas pada tahun 2017 juga mengalami peningkatan terutama komoditas energi. Meningkatnya harga komoditas minyak dari sisi permintaan disebabkan oleh *net demand* atau menurunnya pasokan minyak dunia. Di

Macroeconomic Analysis

Global Economy

According to IMF data, since 2010 the global economic growth that at that time achieved 5.4% had gone on a slumping trend which lasted for years afterwards. In 2016, growth was registered at 3.2%. The global economy slowed down in 2016 and this had hampered Indonesia's economic growth, in turn. According to IMF's forecast, 2017 would be a momentous year for the global economic rebound.

Indeed, recovery in the global economy took place in general, bolstered in particular by growth in the United States, Europe, and China, coupled with the relatively high commodity prices. A more spread out source of economic growth was seen in both developed and developing countries alike. The improvement of the US economy was underpinned by investment growth and stable consumption, alongside low unemployment rate. Inflation rate in the US was lower than the target, which subsequently prompted the US Federal Reserve (The Fed) to hike its interest rate three times throughout 2017, and reduced its securities position in its balance sheet in October 2017.

China's economic data in 2017 showed a slightly improved growth compared to the previous year's. In 2017, China's economy grew by 6.7%, the lowest in 26 years. According to the government's statistics bureau, China's economic growth throughout 2017 was 6.9%, far higher than the government's target of 6.5%. Such an economic growth was propped by consumption and export, in line with the government's gradual economic rebalancing strategy. Consumption, which was the main driver for growth in the Chinese economy, was coupled with export to the US, Europe, and ASEAN countries. An increased export performance of the country further drove certain improvements in the manufacturing activities, as reflected in the increase of PMI Manufacturing index and greater profits for the industry sector.

The global economic recovery drove up global trade volume in 2017, as reflected by the steadily improving export–import performance of both advanced countries and emerging countries alike.

Prices of commodities in 2017 also increased, especially those of energy commodities. The rising oil price was driven by a net demand condition, due to the drop in global oil supply. This was owing to the agreement among OPEC and

sisi penawaran disebabkan oleh terealisasi dengan baiknya kesepakatan pemotongan produksi minyak oleh negara OPEC dan beberapa negara non-OPEC, serta perpanjangan kesepakatan hingga Desember 2018. Selain itu terdapat pula gangguan produksi di beberapa negara.

Menurut Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) yang berbasis di Paris, perekonomian dunia telah menguat, stimulus moneter dan fiskal mendasari peningkatan pertumbuhan dan sinkronisasi berbasis luas pada hampir seluruh negara, serta pertumbuhan telah meraih momentum dan prospek jangka pendek positif. Secara keseluruhan perekonomian dunia pada tahun 2017 memperlihatkan pemulihan.

Perekonomian Indonesia

Perekonomian Indonesia pada tahun 2017 tumbuh membaik secara gradual. Pada semester I 2017 perekonomian Indonesia tumbuh secara terbatas, tetapi pada semester II ekonomi Indonesia menunjukan perbaikan tercermin dari pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,07%. Pertumbuhan ekonomi tersebut didorong oleh peningkatan ekspor komoditas sejalan dengan pemulihan ekonomi dunia dan tingginya harga komoditas. Hal tersebut berdampak pada peningkatan investasi khususnya oleh korporasi berbasis komoditas. Pertumbuhan investasi didukung dengan realisasi proyek-proyek infrastruktur yang gencar dilakukan oleh pemerintah maupun swasta, perbaikan iklim usaha, dan peningkatan ekspor sumber daya alam non-migas. Selain itu, Indonesia juga mendapatkan predikat layak investasi dan perbaikan peringkat daya saing dari World Economic Forum ditambah survei kemudahan usaha dari Bank Dunia turut memberikan dampak peningkatan investasi.

Rupiah cenderung stabil pada tahun 2017 meski sempat mengalami tekanan yang bersumber dari eksternal. Beberapa tekanan tersebut berkaitan dengan pengumuman rencana reformasi perpajakan di AS serta faktor ketidakpastian tentang penggantian posisi Janet Yellen sebagai Gubernur Bank Sentral AS (Federal Reserve). Pada triwulan IV 2017, secara rata-rata harian Rupiah melemah sebesar 1,51% menjadi Rp13.537 per dolar AS.

Tinjauan Industri Perbankan

Ketahanan industri perbankan masih tetap stabil, walaupun intermediasi perbankan belum cukup kuat. Hal tersebut tercermin pada rasio kecukupan modal perbankan yang cukup tinggi mencapai 23% pada Desember 2017. Sementara itu, sejalan dengan upaya penguatan manajemen risiko kredit perbankan yang baik rasio kredit bermasalah (NPL)

non-OPEC oil exporting countries to put a cap on oil lifting, and the extension of such agreement well until December 2018. A number of countries also experienced disruption in their oil production.

According to the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) in Paris, the global economy has indeed strengthened, owing to the monetary and fiscal stimulus packages that boosted growth and wide-scale synchronization across most countries worldwide, and this growth has reached a point where the momentum will be continued in the short term. On the whole, the global economy in 2017 was on an upward trend.

Indonesian Economy

The Indonesian economy in 2017 gradually improved. In the first semester of 2017, the Indonesian economy still grew at a sluggish pace, however in the second semester it picked up considerably as reflected by the year-on-year growth in 2017 that was registered at 5.07%. Such a growth was driven by the increase in the export of commodities, in line with the global economic recovery and the high commodity prices. This in turn buoyed up investments, in particular investments in commodity-related businesses. The growth in investment was supported by the fulfillment of infrastructure projects pushed by the government as well as private companies, an improved business climate, and increased export activities related to non-oil and gas resources. Indonesia also received an investment grade and had its competitiveness level upgraded by the World Economic Forum as well as in terms of ease of doing business by World Bank—all this has led to an acceleration in investment.

The Rupiah's fluctuations tended to be mild throughout 2017 although it received substantial external pressures. Some of these pressures came from the announcement of the planned tax reform in the US and the uncertainty surrounding the replacement of Janet Yellen as the Chair of the Federal Reserve. In the fourth quarter of 2017, the Rupiah's exchange rate depreciated by 1.51% to Rp13,537 to the US Dollar.

Overview of the Banking Industry

The banking industry's resilience remained stable, although financial intermediary could still be improved. This was reflected by the banking capital adequacy ratio that was relatively high, at 23%, in December 2017. In addition, in keeping with the efforts to strengthen the banking credit risk management, Non-Performing Loans (NPL) ratio had dropped

turun menjadi 2,6% (*gross*) atau 1,2% (*net*). Pertumbuhan kredit pada triwulan IV 2017 membaik walaupun terbatas. Kredit perbankan tercatat tumbuh sebesar 7,9%, sementara itu pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) pada akhir triwulan IV 2017 tercatat 9,3% lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya 11,7%. Perlambatan pertumbuhan DPK bersumber dari melambatnya pertumbuhan giro, tabungan, dan deposito.

to 2.6% (gross) and 1.2% (net). By the fourth quarter of 2017, growth in lending had improved slightly. Total commercial banks' lending grew by 7.9%, while total third party fund in the banks by end of the fourth quarter of 2017 grew by 9.3%. This growth rate, however, was lower than in the previous quarter, which was 11.7%. Slowing growth of third party funds was due to the weak performance across the current account, savings account, and time deposit products.

Tentang Analisis dan Pembahasan Manajemen

Pembahasan dan analisis yang dilakukan oleh manajemen berdasarkan pada laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2017.

Laporan keuangan Bank untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio Bing Eny & Rekan Afiliasi Deloitte South East Asia Ltd (DSEA) dengan memberikan opini bahwa Laporan Keuangan tersebut disajikan secara wajar, terhadap semua hal yang material seperti posisi keuangan PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk. Kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Disclaimer On the Management Discussion and Analysis

The following management discussion and analysis has been performed based on the Company's financial statements for the years ended 31 December 2016 and 2017.

The Bank's financial statements for the year ended 31 December 2017 had been audited by the Satrio Bing Eny & Rekan, an affiliate of Deloitte South East Asia Ltd (DSEA) public accounting firm, which had given the opinion that the financial statements had presented fairly, in all material aspects, the financial positions of PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk. The Company's financial performance and cash flows for the year ended 31 December 2017 have been presented in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards.

dalam jutaan Rupiah / in million Rupiah

Keterangan	2017	2016	Description
Neraca			**Balance Sheets**
Total Aset	7.581.032	7.705.782	Total Assets
Kredit yang Diberikan	5.844.252	5.313.629	Total Loans
Surat Berharga	665.846	1.012.183	Marketable Securities
Aset Produktif	7.013.569	7.111.379	Earning Assets
Dana Pihak Ketiga	6.218.180	6.312.303	Third Party Fund
Giro	367.304	553.893	Current Accounts
Tabungan	1.073.119	931.836	Saving Accounts
Deposito	4.777.757	4.826.574	Time Deposits
Simpanan dari Bank Lain	93.038	53.358	Deposits from Other Banks
Total Liabilitas	6.443.183	6.508.273	Total Liabilities
Pinjaman Subordinasi	80.510	79.946	Subordinated Loans
Ekuitas	1.137.848	1.197.510	Equity
Laba Rugi			**Profit and Loss**
Pendapatan Bunga	824.900	905.311	Interest Income
Beban Bunga	(367.812)	(419.598)	Interest Expense
Pendapatan Bunga Bersih	457.088	485.713	Net Interest Income
Pendapatan Operasional Lainnya	43.793	41.146	Other Operating Income
Beban Operasional Lainnya	(567.329)	(510.375)	Other Operating Expenses

Keterangan	2017	2016	Description
Laba Operasional Bersih	(66.448)	16.485	Net Operating Income
Laba Sebelum Pajak	(69.132)	12.073	Income Before Tax
Laba Bersih	(59.661)	8.109	Net Income
Laba Bersih per Saham Dasar (dalam Rupiah penuh)	(88)	12	Earning Per Share (in full Rupiah)
Jumlah Saham (dalam lembar)	676.833.882	676.833.882	Total Number of Shares

dalam miliar Rupiah/in billion Rupiah

GIRO
Demand Deposits

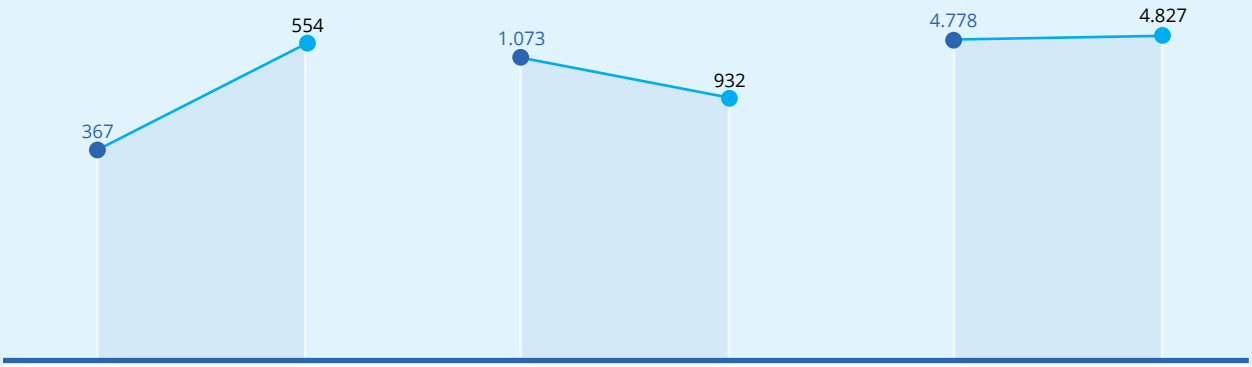

TABUNGAN
Savings

DEPOSITO
Time Deposits

KREDIT MIKRO
Micro Loan

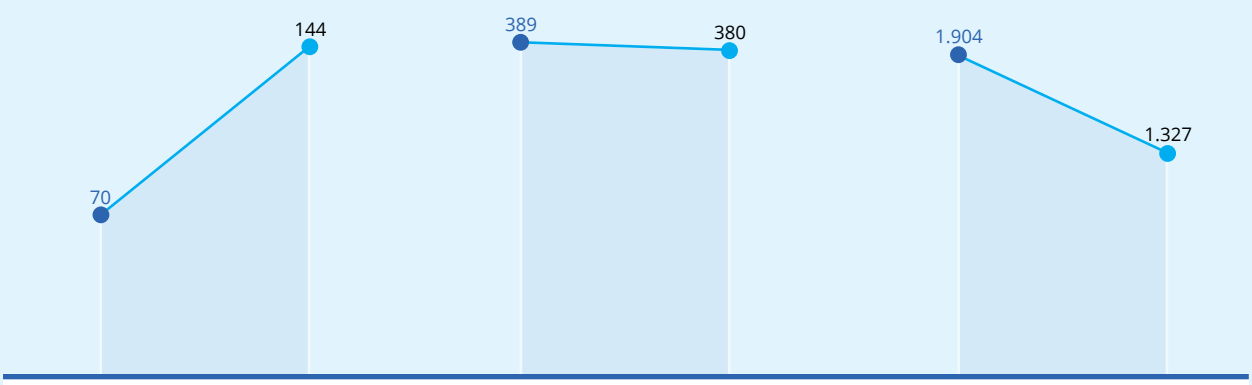

KREDIT TANPA AGUNAN
Unsecured Loan

KREDIT TIME LOAN FLAT
Time Loan Flat

TIME LOAN REVOLVING
Time Loan Revolving

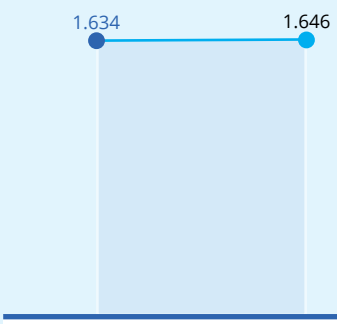

2017 2016

OVERDRAFT LOAN
Overdraft Loan

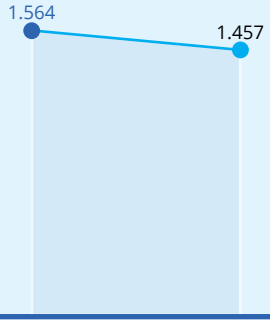

2017 2016

KREDIT PEMILIKAN KENDARAAN
Vehicle Loan

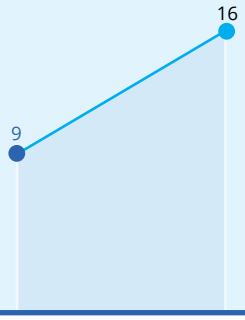

2017 2016

KREDIT PEMILIKAN RUMAH
Housing Loan

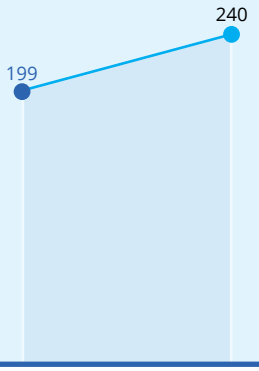

2017 2016

KREDIT MULTI GUNA
Multipurpose Loan

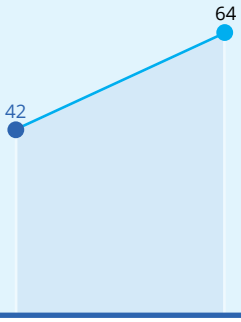

2017 2016

KREDIT LAINNYA
Other Loan

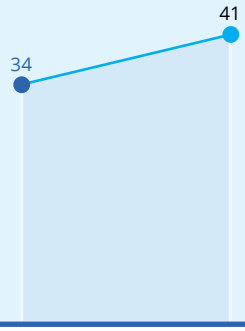

2017 2016

Tinjauan Bisnis

Dalam upaya untuk meningkatkan pencapaian kinerja bisnis, Bank BNP menetapkan strategi bisnisnya dengan fokus kepada perbaikan model bisnis yang lebih ideal dengan tetap mematuhi terhadap ketentuan yang berlaku. Strategi ini diharapkan memberikan dukungan yang bersifat langsung pada upaya pencapaian target yang telah ditetapkan. Bank BNP juga akan tetap fokus pada segmen SME dengan market debitur sampai dengan Rp10 miliar.

Tahun 2017, Bank BNP menyalurkan kredit kepada *multifinance* dengan tujuan untuk meningkatkan pencapaian kinerja bisnis dan melakukan diversifikasi portofolio, serta mencari peluang bisnis lainnya melalui kerja sama dengan *multifinance* tersebut.

Manajemen Bank BNP melakukan konsolidasi berkelanjutan untuk membangun pondasi kuat bagi laju pertumbuhan bisnis Bank BNP ke depannya. Bank akan terus berupaya untuk meningkatkan portofolio kredit dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian (*prudential banking)* sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Sampai dengan tahun 2017, Bank BNP telah menyalurkan kredit sebesar Rp5,84 triliun. Sejalan dengan fokus utama Bank BNP, sebagian besar penyaluran kredit tersebut ditujukan pada segmen menengah ke bawah tanpa mengesampingkan segmen korporasi. Jenis kredit modal kerja mencapai Rp4,49 triliun dengan komposisi kredit sebesar 76,88% dari total kredit. Kredit tersebut disalurkan untuk pembiayaan sektor ekonomi seperti industri, pertanian, perdagangan, transportasi, konstruksi, dan lain-lain.

Sedangkan konsentrasi penyaluran kredit dengan porsi/peringkat terbesar pada tahun 2017 dialokasikan untuk pembiayaan sektor ekonomi Perdagangan Besar dan Eceran dengan nilai kredit mencapai Rp1,88 triliun atau 32,24% dari total penyaluran kredit Bank BNP. Penyaluran kredit terbesar kedua adalah Industri Pengolahan sebesar Rp1,59 triliun.

Berdasarkan pada data di atas, sektor ekonomi Perdagangan Besar dan Eceran menempati porsi terbesar sebesar 32,24% dari total penyaluran kredit, persentase komposisi ini mengalami penurunan dari periode yang sama di tahun sebelumnya, yaitu sebesar 37,11%. Hal ini sejalan dengan langkah mitigasi risiko terhadap risiko konsentrasi kredit pada satu segmen ekonomi.

Business Review

With an aim to continuously improve its business performance, Bank BNP has formulated a business strategy that is focused on improvements to create an ideal business model that remains compliant with the prevailing regulations. The strategy is expected to directly boost the Bank's achievement of its targets. Bank BNP remains committed to focusing on the SME segment, with maximum debt size of Rp10 billion.

In 2017, Bank BNP began to extend loans to multifinance companies, aiming to enhance its business performance and diversify its portfolio, while seeking other business opportunities by collaborating with these multifinance companies.

Bank BNP's management has continued its ongoing consolidation in order to build a strong business foundation for its future endeavors. The Bank will remain strongly committed to the expansion of lending portfolio, by continuing to adhere on the principle of prudential banking, and in line with the given target.

Up to 2017, Bank BNP had extended loans amounting to Rp5.84 trillion. In line with the main focus of Bank BNP, a majority of these loans were for the low to middle economic segment, with a portion also being extended to the corporate segment. Working capital loans amounted to Rp4.49 trillion, composing 76.88% of the Bank's total lending. The working capital loans were distributed among various economic sectors, such as industry, agriculture, trading, transportation, construction, and others.

The largest contribution to total lending in 2017 was allocated for the Wholesale and Retail Trade economic sector, with a total amount of Rp1.88 trillion or 32.24% of Bank BNP's total lending portfolio. The second largest contributor to total lending was the Processing Industry, at Rp1.59 trillion.

According to the data above, the Wholesale and Retail Trade sector, who accounted for 32.24% of the total lending of the Bank, was lower in terms of percentage than in the previous year's, whose contribution to the total lending was 37.11%. This was in keeping with the Bank's measures for mitigating the risk arising from a concentration of lending in any one economic segment.

Tinjauan Operasional per Segmen Usaha

Segmen operasi didefinisikan sebagai komponen dari Bank BNP yang terlibat dalam aktivitas bisnis Bank, memperoleh pendapatan, dan menimbulkan beban terkait dengan transaksi yang dilakukan oleh atau melibatkan Bank.

Operational Review by Business Segment

Operating segment is defined as a component of Bank BNP that is involved in the Bank's business activities, collects revenues and incur expenses related to the transactions performed by or involving the Bank.

Penyaluran Pinjaman

Lending

Tabel Jenis-Jenis Pinjaman / Types of Loan

dalam miliar Rupiah

in billion Rupiah

Pinjaman	2017	2016	Loans
Kredit Mikro	70	144	Micro Loan
Kredit Tanpa Agunan	389	380	Unsecured Loan
Time Loan Flat	1.904	1.327	Time Loan Flat
Time Loan Revolving	1.634	1.646	Time Loan Revolving
Overdraft Loan	1.564	1.457	Overdraft Loan
Kredit Pemilikan Kendaraan	9	16	Vehicle Loan
Kredit Pemilikan Rumah	199	240	Housing Loan
Kredit Multi Guna	42	64	Multipurpose Loan
Kredit Lainnya	34	41	Other Loan

Pinjaman Komersil

Commercial Loans

Pinjaman Komersil di tahun 2017 mengalami kenaikan sebagai hasil dari konsolidasi dan juga perbaikan proses perkreditan yang sudah dilakukan sejak 2016. BNP lebih memfokuskan penyaluran dana di kredit produktif dibandingkan dengan sektor konsumer. Hal ini juga sejalan dengan semangat pemerintah yang ingin menggerakkan sektor riil dan sesuai dengan *tagline* BNP yaitu "Dari Parahyangan Untuk Nusantara".

In 2017, Commercial Loans expanded owing to the result of consolidation efforts and improvement in lending processes that have been taking place since 2016. BNP has been focusing more on lending to productive sectors rather than as consumer loans. This has been in line with the government's initiative to propel the real sector and also in line with BNP's tagline, "From Parahyangan For Nusantara".

Pemberian kredit komersial banyak diberikan untuk modal kerja dalam bentuk *overdraft loan* dan juga dalam mendukung investasi yang dilakukan oleh pengusaha menengah dalam bentuk *time loan*.

Commercial loans are mostly provided in the form of overdraft loan for working capital as well as those supporting medium-scale businesses' investments in the form of time loans.

Komposisi pinjaman di Bank BNP didominasi oleh Pinjaman Komersil yang mencapai 87,28% (Rp5.102 miliar) di 2017 meningkat dari 83,35% (Rp4.430 miliar) di 2016, atau mengalami pertumbuhan sekitar 15,17%. Angka pertumbuhan ini lebih baik dari rata-rata pertumbuhan nasional dan menunjukkan hasil nyata dari konsolidasi

Lending in Bank BNP is dominated by Commercial Loans, which accounted for 87.28% of the total (Rp5,102 billion) in 2017, up from 83.35% (Rp4,430 billion) in 2016, or growing with a rate of 15.17%. This growth rate was higher than the average national growth and demonstrated the success of consolidation and improvement initiatives in terms of credit

dan perbaikan dalam proses kredit, serta turut membantu pemerintah untuk menggerakkan sektor riil.

Bank BNP akan selalu melakukan inovasi dan upaya perbaikan dalam proses kredit sehingga dapat memberikan solusi yang tepat kepada mitra bisnis Bank. Telah dilakukan banyak penyederhanaan proses dengan tetap meningkatkan kualitas, yang didukung oleh sistem *monitoring* yang semakin menyeluruh. Selain itu juga untuk mendukung proses dan memberikan layanan yang lebih baik, dilakukan peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan dan magang di bagian terkait. Semua ini bertujuan untuk memberikan layanan dan solusi yang terbaik bagi mitra bisnis BNP.

process, while also supporting the government in boosting up the real sector.

Bank BNP shall always be committed to innovating and improving its lending processes so as to be able to provide the most suitable solutions for the Bank's business partners. The Bank has simplified numerous processes by upholding quality, and this has also been supported by a more thorough monitoring system. In addition, to support processes and provide better service to customers, the Bank enhances its human resources capabilities by conducting training and internships in related units. These are all aimed at delivering the best services and solutions to BNP's business partners.

Pembiayaan Konsumen

Tahun 2017, Bank BNP tidak berfokus pada kredit konsumen, karena BNP melihat bahwa sektor properti belum terlalu pulih, daya beli yang masih belum membaik, dan persaingan pada sektor kredit konsumen sangat ketat, sehingga kurang dapat memberikan margin yang diharapkan. Dengan demikian, pemberian kredit konsumen lebih diarahkan untuk debitur yang telah ada dan dengan demikian kualitasnya dapat diketahui dengan pasti.

Consumer Loans

In 2017, Bank BNP did not focus on consumer lending owing to a number of factors: mainly that recovery had not to take place in full swing in the property sector nor in the public's purchasing power, while competition in consumer loans business has become ever tighter, thus reducing margins below the Bank's expectations. Thus, the Bank's consumer loans have been more targeted to existing debtors whose repayment quality has been well-ascertained.

dalam miliar Rupiah/in billion Rupiah

KREDIT PEMILIKAN KENDARAAN
Vehicle Loan

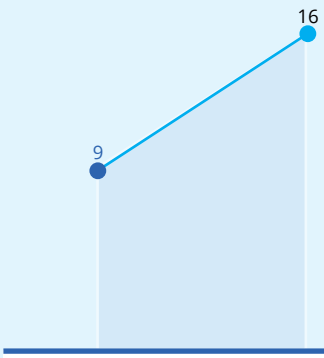

KREDIT PEMILIKAN RUMAH
Housing Loan

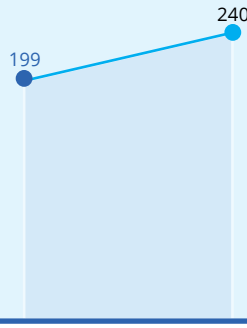

KREDIT MULTI GUNA
Multipurpose Loan

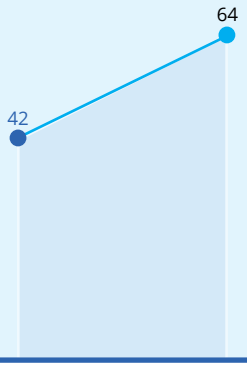

Bisnis Kredit Tanpa Agunan (KTA)

Kredit Tanpa Agunan (KTA) merupakan salah satu jenis pinjaman yang ditawarkan Bank BNP. Produk yang bersifat *unsecured* ini cukup memberikan kontribusi terhadap pencapaian portofolio pinjaman dan menyumbang *spread margin* yang cukup baik.

Unsecured Loans Business

KTA is a loan product offered by Bank BNP. The product, which is an unsecured loan, contributed considerably to the total lending portfolio of the Bank, and provided a fairly satisfactory spread margin.

Sepanjang tahun 2017, respon masyarakat atas produk KTA Mirai+ sangat baik, sebagaimana tercermin dari jumlah aplikasi masuk yang meningkat dari semula 145,444 aplikasi di tahun 2016 menjadi 180,852 aplikasi di tahun 2017, dengan *disbursement rate* sebesar 26%, dengan *Number of Accounts* (NoA) menjadi 46,147 di akhir 2017.

In 2017, the public's response to KTA Mirai+ product was remarkably strong, as reflected by the total number of loan applications increasing, from 145,444 applications in 2016 to 180,852 applications in 2017, with a disbursement rate of 26%, with a total number of accounts (NoA) 46,147 accounts as at end of 2017.

Berikut merupakan grafik yang menunjukkan jumlah aplikasi masuk, NoA cair, dan pertumbuhan O/S.

The following graph illustrates the number of loan applications, current NoA, and O/S growth.

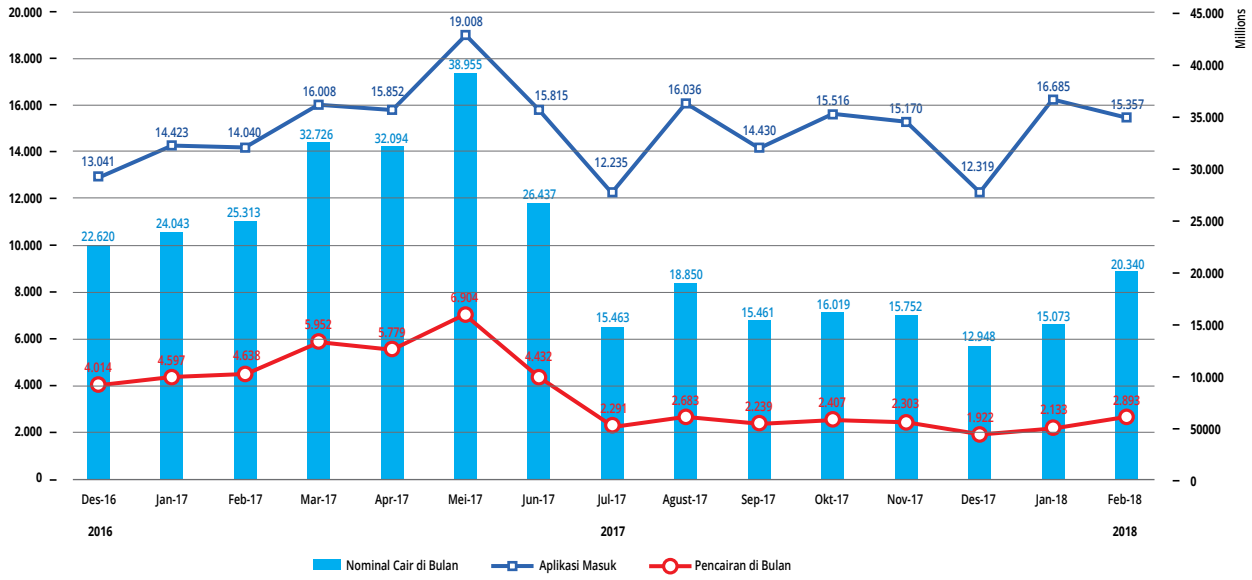

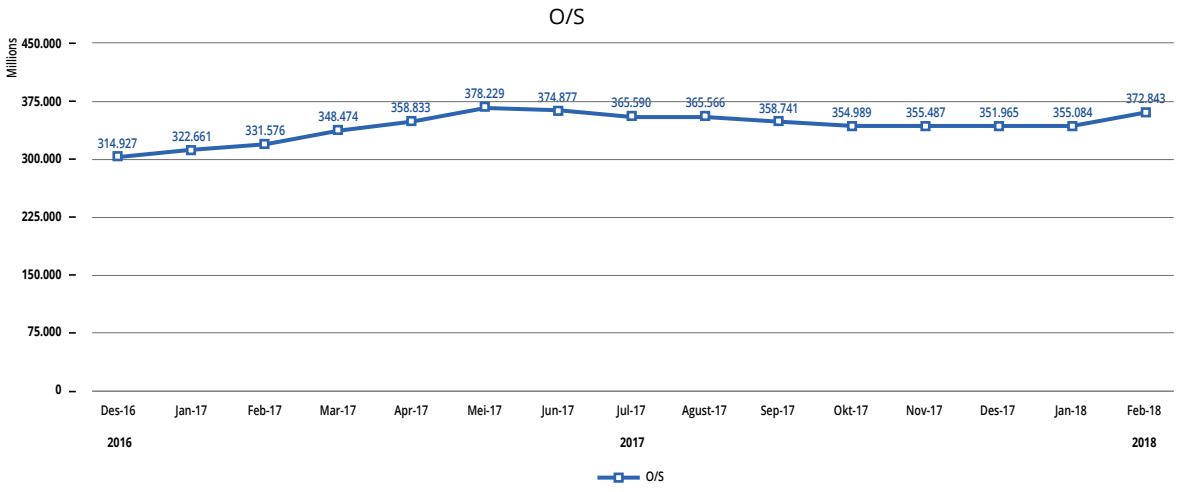

Untuk mengimbangi respons pasar yang sangat tinggi, Bank BNP melalui Divisi KTA Mirai+ pada tahun 2017 telah melakukan beberapa upaya perbaikan dan pengembangan proses baik secara kualitas, maupun akurasi dan percepatan dalam persetujuan pinjaman KTA Mirai+ tanpa mengabaikan faktor kehati-hatian, perbaikan dan pengembangan SDM serta lingkungan kerja yang kondusif dan memadai.

To keep up with the strong market response, through its Non-Collateral or Unsecured Loans (KTA) Mirai+ Division, Bank BNP in 2017 conducted various improvements and process development measures in terms of quality, accuracy, and speed in approving Unsecured Loans Mirai+ by abiding to the principle of prudence, improvement and development of human resources and working environment that are conducive to business.

Berikut strategi yang dilakukan oleh Bank BNP untuk mencapai target KTA Mirai+:

1. Selective target market karyawan khususnya karyawan pabrik (blue-collar workers) dengan *higher income*.
2. Sistem *scoring* yang lebih akurat.
3. Optimalisasi debitur eksisting dengan pemberdayaan tim Tele Message (Tele Sales) dalam menawarkan beberapa program pemasaran, seperti Re-Instate dan Top-Up.
4. Promosi melalui social media dan video commercial di situs web.

Untuk ke depan, Bank BNP telah menyiapkan rencana kerja di tahun 2018 diantaranya dengan meningkatkan jumlah walk in customer melalui optimalisasi kantor cabang Bank BNP sebagai sales counter, memperluas jaringan target market ke area Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan meningkatkan peran IT di sisi proses persetujuan kredit dan collection, untuk mendukung program pencapaian target Mirai+ di tahun 2018 dengan kualitas yang baik.

In addition, Bank BNP also employed a number of strategies to achieve the KTA Mirai+ target, among others:

1. Focus on employees, especially blue-collar workers (factory workers) as the target market.
2. More accurate scoring system.
3. Optimization of existing debtors by empowering the Tele Message (Tele Sales) team in marketing various programs, such as, Re-Instate and Top-Up.

7. Promotion via social media and commercial videos on the website.

Going forward, Bank BNP has prepared its 2018 business plan, which includes increasing the number of walk in customers by optimizing Bank BNP's branch offices as sales counters, expanding the target market to Central Java and East Java, and improving the role of IT for loan approval and collection processes, to support the measures to achieve the Mirai+ targets in 2018 with the desirable quality.

Pembiayaan Berdasarkan Lapangan Usaha

Penyaluran kredit menurut lapangan usaha didominasi oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran yakni 32,24% dari total penyaluran kredit 2017, dengan target proyeksi yaitu sebesar 34,50%. Pembiayaan kepada sektor-sektor lain seperti Industri Pengolahan, Penyediaan Akomodasi, Real Estate dan lainnya terus diupayakan pertumbuhannya.

Lending by Business Segment

The composition of lending by business segment in 2017 was dominated by the Wholesale and Retail Trade sector with 32.24% of the total lending, while it was targeted to reach 34.50% of the total. The Bank also strived to boost lending to other business sectors, such as Processing Industry, Provision of Accommodation and Food & Beverage, Real Estate, and Others.

dalam jutaan Rupiah / in million Rupiah

No	Lapangan Usaha / Business Segment	Realisasi / Realization		Proyeksi / Projection				Pertumbuhan / Growth	Achievement RBB 2017	
		2016	Proporsi Proportion	2017	Proporsi Proportion	2017	Proporsi Proportion		+/-	%
A.	Industri Pengolahan/ Processing Industry	1.518.915	28,59%	1.591.483	27,23%	1.405.855	25,00%	4,78%	185.628	113,20%
B.	Perdagangan Besar dan Eceran/ Wholesale and Retail Trade	1.972.122	37,11%	1.884.245	32,24%	1.940.080	34,50%	-4,46%	(55.835)	97,12%
C.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ Provision of Accommodation and Food & Beverage	190.296	3,58%	196.625	3,36%	160.759	2,86%	3,33%	35.866	122,31%

No	Lapangan Usaha / Business Segment	Realisasi / Realization		Proyeksi / Projection				Pertumbuhan / Growth	Achievement RBB 2017	
		2016	Proporsi Proportion	2017	Proporsi Proportion	2017	Proporsi Proportion		+/-	%
D.	Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan/ Real Estate, Leasing, and Company Service	244.914	4,61%	224.881	3,85%	233.983	4,16%	-8,18%	(9.102)	96,11%
E.	Lainnya/Others	1.387.383	26,11%	1.947.018	33,32%	1.882.742	33,48%	40,34%	64.276	103,41%
	Total	5.313.629	100,00%	5.844.252	100,00%	5.623.419	100,00%	9,99%	220.833	103,93%

Pembiayaan Berdasarkan Jenis Penggunaan

Penyaluran Kredit Bank BNP berdasarkan pada jenis penggunaan, terdiri dari Modal Kerja, Investasi, dan Konsumsi. Pada posisi Desember 2017, porsi penggunaan terbesar adalah Modal Kerja yaitu 76,88%, untuk pembiayaan investasi sebesar 11,75% serta sisanya sebesar 11,37% ditujukan untuk membiayai tujuan konsumsi. Secara volume penyaluran kredit untuk tujuan Modal Kerja mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun 2016, sedangkan untuk tujuan Konsumsi dan Investasi mengalami penurunan.

Lending by Type of Use

Bank BNP's lending composition by type of use consists of Working Capital, Investment, and Consumption. As at December 2017, the largest portion of lending by type of use was for Working Capital, at 76.88%, while lending for Investment purposes was 11.75% of total, and the remaining 11.37% was for Consumption purposes. The amount of lending for Working Capital purposes increased in 2017 compared to in 2016, while the amounts for Consumption and Investment, on the other hand, both declined.

dalam jutaan Rupiah

in million Rupiah

No	Jenis Penggunaan/ Type of Use	Realisasi/ Realization		Proyeksi/ Projection				Pertumbuhan/ Growth	Achievement RBB 2017	
		2016	Proporsi Proportion	2017	Proporsi Proportion	2017	Proporsi Proportion		+/-	%
A.	Modal Kerja/ Working Capital	3.695.788	69,55%	4.493.279	76,88%	4.042.040	71,88%	21,58%	451.239	111,16%
B.	Investasi/ Investment	888.022	16,71%	686.479	11,75%	787.279	14,00%	-22,70%	(100.800)	87,20%
C.	Konsumsi/ Consumption	729.818	13,73%	664.494	11,37%	794.100	14,12%	-8,95%	(129.606)	83,68%
	Total	5.313.629	100,00%	5.844.252	100,00%	5.623.419	100,00%	9,99%	220.833	103,93%

Pembiayaan Berdasarkan Provinsi

Konsentrasi penyaluran pinjaman menurut wilayah dan provinsi terbesar masih berada di provinsi Jawa Barat, sebab lebih dari 70% sebaran jaringan kantor Bank BNP berada di wilayah tersebut.

Bank BNP terus-menerus melakukan upaya untuk memperbesar wilayah sebaran kreditnya ke provinsi selain Jawa Barat, seperti DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan luar Jawa–Bali. Penyaluran pinjaman wilayah DKI Jakarta mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode sama tahun 2016.

Lending by Province

The largest amount of lending in the Bank's total portfolio in 2017, by province, was disbursed in West Java. This was due to the fact that more than 70% of Bank BNP's offices are located in the province.

Bank BNP continues to expand its operational area for its lending activities to other provinces beyond West Java, such as DKI Jakarta, Central Java, East Java, Bali, and outside of the Java–Bali region. Thus, lending in DKI Jakarta also improved from the amount in 2016.

dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah

No	Provinsi/ *Province*	Realisasi / *Realization*			Proyeksi / *Projection*			Pertumbuhan/ *Growth*	Achievement RBB 2017	
		2016	Proporsi *Proportion*	2017	Proporsi *Proportion*	2017	Proporsi *Proportion*		+/-	%
A.	Bali	114.918	2,16%	78.767	1,35%	84.351	1,50%	-31,46%	(5.584)	93,38%
B.	DKI Jakarta	493.751	9,29%	1.067.573	18,27%	1.004.470	17,86%	116,22%	63.103	106,28%
C.	Jawa Barat/ *West Java*	3.879.323	73,01%	3.904.351	66,81%	3.908.276	69,50%	0,65%	(3.925)	99,90%
D.	Lainnya/*Others*	825.637	15,54%	793.560	13,58%	626.322	11,14%	-3,89%	167.238	126,70%
	Total	5.313.629	100,00%	5.844.252	100,00%	5.623.419	100,00%	9,99%	220.833	103,93%

Pembiayaan Berdasarkan UMKM

Kontribusi sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia di 2017 adalah 62,57%. Jumlah pelaku UMKM di Indonesia per Desember 2017 mencapai 59.697.827 unit dengan rincian Usaha Mikro 58,9 juta, Usaha Kecil 716,8 ribu, Usaha Menengah 65,5 ribu, dan Usaha Besar 5,03 ribu. Dalam lima tahun terakhir, kontribusi sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap produk domestik bruto (PDB) semakin menggeliat. Di Indonesia, UMKM selain berperan dalam pertumbuhan pembangunan dan ekonomi, juga memiliki kontribusi yang penting dalam mengatasi masalah pengangguran, sehingga sektor UMKM akan memberikan kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bank BNP berkomitmen untuk turut serta dalam mengembangkan potensi dari UMKM.

Per akhir 2017, persentase kredit kepada UMKM memang belum menempati posisi terbesar, namum manajemen berkeyakinan pencapaian UMKM sebesar 41,28% dinilai cukup baik, karena mendekati target yang berada pada angka 44%.

Lending by SME

Contribution from the Small and Medium Enterprises (SME) sector to Indonesia's Gross Domestic Product (GDP) in 2017 was 62.57%. As at December 2017 there were a total of 59,697,827 units of SME in Indonesia, consisting of 58.9 million Microbusinesses, 716.8 thousand Small Businesses, 65.5 thousand of Medium Businesses, and 5.03 thousand of Large Enterprises. In the past five years, contribution from SME sector to Indonesia's GDP has been on the rise. In addition to boosting Indonesia's economic development and growth, these SMEs also play a crucial role in solving unemployment, and thus the sector gives a further boost to the Indonesian economic growth. Bank BNP is thus committed to continuing its support to the development of SMEs.

In light of the end-of-2017 achievements, lending to SME had yet to be the largest in terms of portion, however the management believes that the SME's share of 41.28% had been highly satisfactory, as it was very close to the

dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah

Uraian/ *Description*	Realisasi/ *Realization*		Proyeksi/ *Projection*	Pertumbuhan/ *Growth*	Achievement RBB 2017	
	2016	2017	2017		+/-	%
UMKM	2.521.926	2.412.655	2.474.304	-4,33%	(61.649)	97,51%
Non-UMKM	2.791.703	3.431.597	3.149.115	22,92%	282.482	108,97%
Total	5.313.629	5.844.252	5.623.419	9,99%	220.833	103,93%
Rasio UMKM	47,46%	41,28%	44,00%	-13,02%	-2,72%	93,82%

Pembiayaan UMKM Berdasarkan Lapangan Usaha

Secara komposisi, penyaluran kredit segmen UMKM menurut lapangan usaha di tahun 2017 masih didominasi oleh sektor

SME Lending by Business Segment

The Bank's lending to the SMEs by business segment in 2017 was dominated by the Wholesale and Retail Trade segment,

ekonomi Perdagangan Besar dan Kecil yaitu 42,19%, sedikit meningkat dari tahun 2016, sedangkan Industri Pengolahan menyumbangkan 31,65%, juga meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk volume penyaluran kredit segmen UMKM menurut lapangan usaha, yang terdiri dari Perdagangan Besar dan Kecil, Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2016, sedangkan pada Industri Pengolahan dan penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mengalami peningkatan.

at 42.19% of the total. This signified a marginal increase from 2016 figure, while the Processing Industry contributed 31.65% to the total, also increasing from last year's figure. In terms of amount of lending to the SME by business segment, the Wholesale and Retail Trade, Real Estate, Leasing and Company Services segments declined compared to their respective 2016 figures, while in the Processing Industry and Provision of Accommodation and Food & Beverage segments expanded.

dalam jutaan Rupiah / in million Rupiah

No	Lapangan Usaha/ Business Segment	Realisasi / Realization		Proyeksi / Projection				Pertumbuhan/ Growth	Achievement RBB 2017	
		2016	Proporsi Proportion	2017	Proporsi Proportion	2017	Proporsi Proportion		+/-	%
A.	Industri Pengolahan/ *Processing Industry*	708.974	28,11%	763.717	31,65%	694.709	28,08%	7,72%	69.008	109,93%
B.	Perdagangan Besar dan Eceran/ *Wholesale and Retail Trade*	1.052.612	41,74%	1.017.893	42,19%	1.116.540	45,13%	-3,30%	(98.647)	91,16%
C.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ *Provision of Accommodation and Food & Beverage*	141.339	5,60%	152.618	6,33%	120.160	4,86%	7,98%	32.458	127,01%
D.	Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan/*Real Estate, Leasing, and Company Service*	190.548	7,56%	140.569	5,83%	167.323	6,76%	-26,23%	(26.754)	84,01%
E.	Lainnya/*Others*	428.453	16,99%	337.858	14,00%	375.572	15,18%	-21,14%	(37.714)	89,96%
Total		**2.521.926**	**100,00%**	**2.412.655**	**100,00%**	**2.474.304**	**100,00%**	**-4,33%**	**(61.649)**	**97,51%**

Pembiayaan UMKM Berdasarkan Jenis Penggunaan

Secara komposisi pembiayaan UMKM yang digunakan untuk tujuan Modal Kerja naik dari periode yang sama tahun lalu menjadi sebesar 82,41%, dan sisanya yang digunakan untuk investasi sebesar 17,59% menurun dibandingkan dengan tahun lalu. Penggunaan kredit sebagai modal kerja yang bersifat jangka pendek (1 tahun) dan dapat diperpanjang, memberikan efek *turn over* kebutuhan kredit menjadi sangat tinggi. Hal ini diharapkan dapat menggairahkan pertumbuhan sektor riil dengan skala UMKM.

SME Lending by Type of Use

Lending to SME by type of use was dominated by lending for Working Capital, which rose from the previous year's share to 82.41% of the total. The remainder, i.e. 17.59% of the total, was used for other purposes, and its amount declined from the previous year's. The use of loans as short-term working capital (for 1 year) that is extendable has created an effect of high demand for loan turnover. This is expected to boost the growth among the SMEs in the real sector.

dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah

No	Jenis Penggunaan/ Type of Use	Realisasi / Realization		Proyeksi / Projection	Pertumbuhan/ Growth	Achievement RBB 2017	
		2016	2017	2017		+/-	%
A.	Modal Kerja / Working Capital	2.009.009	1.988.304	1.985.333	-1,03%	2.971	100,15%
B.	Investasi / Investment	512.917	424.350	488.971	-17,27%	(64.621)	86,78%
C.	% Modal Kerja / Working Capital	79,66%	82,41%	80,24%	3,45%	2,17%	102,71%
D.	% Investasi / Investment	20,34%	17,59%	19,76%	-13,52%	-2,17%	89,00%
Total		**2.521.926**	**2.412.655**	**2.474.304**	**-4,33%**	**(61.649)**	**97,51%**

Pembiayaan UMKM Berdasarkan Provinsi

Untuk segmen UMKM, alokasi portofolio pinjaman menurut wilayah/provinsi, Provinsi Jawa Barat masih berada di urutan pertama dengan nilai sebesar 75,53% yang menunjukkan kenaikan dari periode sebelumnya. Di tahun mendatang, volume untuk provinsi Jawa Barat akan ditingkatkan dengan tetap memperhatikan penetrasi penyaluran kredit di wilayah luar Jawa Barat.

SME Lending by Province

Lending to SME by province in 2017 was broken down as follows: West Java was leading with 75.53% contribution to the total, improving from the previous period. In the coming year, the Bank shall increase the amount of lending to SMEs in West Java but by also taking adequate measures to penetrate the market for lending to SMEs in areas outside of West Java.

dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah

No	Provinsi/ *Province*	Realisasi/ *Realization*				Proyeksi/ *Projection*		Pertumbuhan/ *Growth*	Achievement RBB 2017	
		2016	Proporsi *Proportion*	2017	Proporsi *Proportion*	2017	Proporsi *Proportion*		+/-	%
A.	Bali	60.215	2,39%	44.341	1,84%	65.914	2,66%	-26,36%	(21.573)	67,27%
B.	DKI Jakarta	293.074	11,62%	210.003	8,70%	273.480	11,05%	-28,34%	(63.477)	76,79%
C.	Jawa Barat/*West Java*	1.862.448	73,85%	1.822.219	75,53%	1.820.500	73,58%	-2,16%	1.719	100,09%
D.	Jawa Tengah/*East Java*	168.471	6,68%	157.654	6,53%	170.648	6,90%	-6,42%	(12.994)	92,39%
E.	Lainnya/*Others*	137.718	5,46%	178.438	7,40%	143.762	5,81%	29,57%	34.676	124,12%
	Total	2.521.926	100,00%	2.412.655	100,00%	2.474.304	100,00%	-4,33%	(61.649)	97,51%

Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

Kegiatan usaha Bank dalam pemberian kredit telah dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian (*prudent*), termasuk dengan memperhatikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) sebagaimana diatur dalam:

Legal Lending Limit (LLL)

The Bank's business activities in terms of lending have been conducted with due regard of the principle of prudence, including by complying with the following Legal Lending Limit (LLL) regulations, i.e.:

- Peraturan Bank Indonesia No. 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum;
- Peraturan Bank Indonesia No. 8/13/PBI/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 7/3/PBI/2005 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum; dan
- Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/14/DPNP tanggal 18 April 2005 Perihal Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.

- Bank Indonesia Regulation No. 7/3/PBI/2005 dated 20/01/2005 on Legal Lending Limit for Commercial Banks;
- Bank Indonesia Regulation No. 8/13/PBI/2006 on the Amendment to Bank Indonesia Regulation No. 7/3/PBI/2005 on Legal Lending Limit for Commercial Banks; and
- Bank Indonesia Circular No. 7/14/DPNP dated 18 April 2005 on Legal Lending Limit for Commercial Banks.

Selama tahun 2017 tidak terdapat pelanggaran dan/atau pelampauan limit BMPK untuk pihak terkait (*related party*), perorangan (*individual debtor*) ataupun kelompok peminjam (*group debtor*).

Throughout 2017 the Bank did not violate or exceed the LLL for related parties, individual debtors, nor group debtors.

Posisi BMPK Tahun 2017 / LLL Positions in 2017

Posisi Bulan *Position in*	Modal *Capital*	Pihak Terkait *Related Party*			Individual *Individual*			Grup *Group*		
		(10% dari modal / *of capital*)			(20% dari modal / *of capital*)			(25% dari modal / *of capital*)		
		Limit	Realisasi *Actual*	%	Limit	Realisasi *Actual*	%	Limit	Realisasi *Actual*	%
Januari	1.256.779	125.677	94.074	74,85	251.355	47.170	18,77	314.194	66.323	21,11
Februari	1.228.349	122.834	93.908	76,45	245.669	46.602	18,97	307.087	65.905	21,46
Maret	1.219.434	121.943	94.223	77,27	243.886	45.971	18,85	304.858	65.460	21,47
April	1.212.713	121.271	92.820	76,54	242.542	45.380	18,71	303.178	75.000	24,74
Mei	1.194.116	119.411	90.012	75,38	238.823	73.206	30,65	298.529	64.586	21,64
Juni	1.172.407	117.240	89.419	76,27	234.481	100.000	42,65	293.101	58.358	19,91
Juli	1.203.581	120.358	88.891	73,86	240.716	100.000	41,54	300.895	63.696	21,17
Agustus	1.204.691	120.469	91.307	75,79	240.938	100.000	41,5	301.172	63.247	21,0
September	1.196.988	119.698	86.135	71,96	239.397	100.000	41,77	299.247	62.791	20,98
Oktober	1.191.114	119.111	91.910	77,16	238.222	100.000	41,98	297.778	62.348	20,94
November	1.188.886	118.888	88.079	74,09	237.777	100.000	42,06	297.221	61.906	20,83
Desember	1.170.923	117.092	88.944	75,96	234.184	100.000	42,7	297.730	66.625	22,76

*dalam jutaan rupiah / in Rp million

Kegiatan Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana di 2017 lebih difokuskan kepada tabungan sebagai salah satu upaya untuk menurunkan *cost of fund*. BNP menyadari bahwa salah satu kunci sukses bersaing dalam industri perbankan adalah adanya *cost of fund* yang murah.

Di tahun 2017, komposisi CASA sedikit menurun dibandingkan 2016, karena di akhir tahun 2017 terjadi penurunan yang cukup signifikan pada giro. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap komposisi CASA BNP.

Secara nominal, terjadi peningkatan signifikan di tabungan akibat naiknya dana yang tersimpan dalam produk-produk tabungan andalan di BNP, yaitu tabungan Sakura, Tabungan Jangka Panjang, dan program-program lainnya yang sangat menunjang kenaikan dana dalam tabungan ini.

Funding

Funding in 2017 was more focused on savings, as one of the initiatives for reducing cost of fund. BNP believes that one of the keys to successfully thrive in the banking industry is by having a low cost of fund ratio.

In 2017, the low-cost funds (CASA) composition declined slightly from 2016's figure, as in the end of 2017 there was a significant decline in funds in demand deposits. This had brought a substantial impact on BNP's low-cost funds composition.

In nominal terms, there was a significant increase in savings account, owing to the rising performance of BNP's flagship savings, namely Sakura, Long-Term Savings, and other savings products that were highly supportive of this increase in savings.

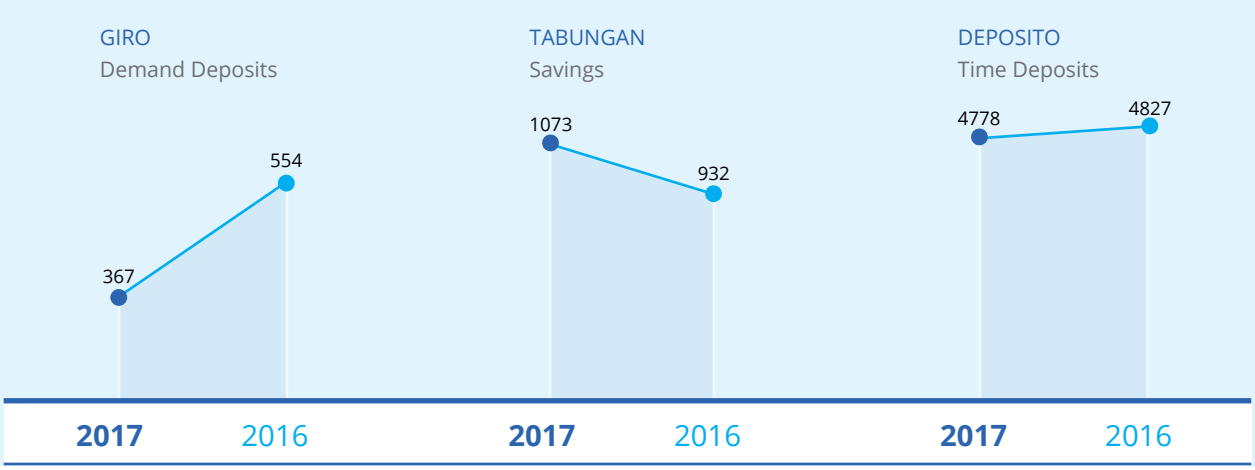

Komposisi Pendanaan Desember 2017 / Funding Composition as at December 2017

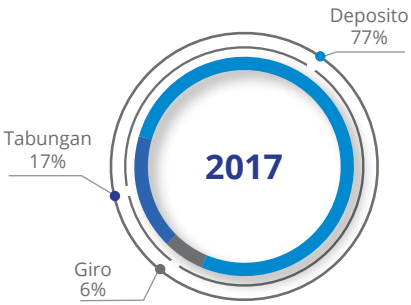

Persaingan suku bunga di pasar dalam hal penghimpunan dana di pasar sangat ketat. Bank BNP menemui pesaing dari semua level BUKU dan juga BPR. Oleh karena itu, Bank BNP menyiasatinya dengan menawarkan tabungan yang memberikan nilai lebih kepada nasabahnya. Variasi tabungan yang dimiliki oleh Bank BNP telah mencakup semua segmen dan dengan strategi akusisi yang tepat, maka tercapai pertumbuhan volume tabungan, sebagai berikut:

Komposisi Pendanaan Desember 2016 / Funding Composition as at December 2016

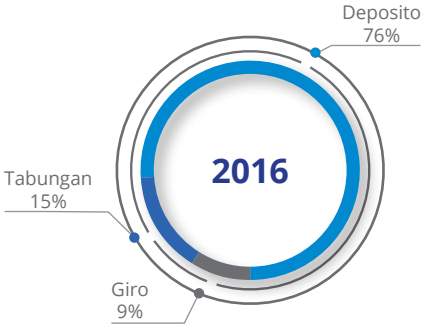

Competition in terms of interest rate in the market for funding has been intensely tight. Bank BNP has been met with competitors from banks across all group of business activities (BUKU), and also Rural Banks. Bank BNP therefore strived to offer value-added savings products to its customers to forge ahead in the competition. The range of savings products offered by Bank BNP cover all segments of the market, and with the right acquisition strategy, growth in savings has been achieved, as detailed below:

Produk/Product	2017	2016
Parahyangan	276,859	206,996
Sakura	459,318	365,357
Japan	66,515	38,422
TOTAL	802,692	610,776

Peningkatan tabungan ini sangat dipengaruhi oleh program yang menarik sehingga dapat meningkatkan volume melalui akuisisi dan top up dana dari nasabah eksisting

The increase in savings was greatly affected by the offering of attractive programs to increase volume via acquisition and funding top up from existing customers.

Tresuri & Transaksi Valuta Asing

Pertumbuhan ekonomi global yang meningkat 3% di 2017, terkuat sejak 2011, yang disertai dengan pergerakan transaksi global yang mulai pulih, memberi kesempatan bagi banyak negara untuk berfokus pada isu-isu jangka panjang. Bank Sentral AS menaikkan suku bunga acuannya tiga kali di 2017, sebagai dampak dari peningkatan aktivitas ekonomi di AS sepanjang tahun. Bagaimanapun juga, pencapaian pertumbuhan ekonomi di AS masih lebih rendah daripada yang diperkirakan, khususnya di triwulan keempat. Tiongkok mencatat pertumbuhan ekonomi 6,9% di 2017, melampaui target pemerintah sebesar 6,5% dan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya 6,7%, yang terendah selama 26 tahun terakhir. Sementara itu, bank-bank sentral di negara-negara maju lainnya juga terus melanjutkan kebijakan pengetatan moneter masing-masing.

Perekonomian Indonesia sendiri mengalami pertumbuhan 5,07% di 2017, lebih tinggi daripada di 2016. Pertumbuhan tertinggi pada sisi produksi didorong oleh bidang usaha informasi dan komunikasi, sementara kenaikan pengeluaran tertinggi didorong oleh komponen ekspor barang dan jasa. Kontribusi terbesar terhadap PDB Indonesia di sepanjang 2017 masih didominasi oleh dua kawasan, yakni Jawa (58%) dan Sumatera (22%). Kondisi perbankan Indonesia mengalami pertumbuhan yang terbatas di 2017, ditopang oleh suku bunga acuan yang diturunkan dua kali oleh Bank Indonesia. Nilai tukar rupiah mengalami penurunan sepanjang tahun 2017, sehingga bagi bank-bank yang menjalankan bisnis transaksi mata uang asing, salah satu isu yang utama di 2017 adalah memantau pergerakan nilai tukar dan menjaga *open position* valuta asing agar dapat senantiasa memberikan kurs yang kompetitif bagi nasabahnya.

Bank BNP melaksanakan berbagai strategi untuk melakukan pendekatan kepada nasabah agar mereka lebih aktif bertransaksi valuta asing dengan difasilitasi oleh Bank, selain juga melakukan pemasaran ke nasabah yang dianggap potensial, untuk meningkatkan volume transaksi valuta asing di Bank.

Bank BNP juga menyediakan layanan *trade finance* dan jasa kiriman uang (*remittance*) baik masuk maupun keluar. Kegiatan *trade finance* di 2017 mencatat penerbitan *letter of credit* (LC) untuk ekspor sebanyak 220 dokumen dengan nilai total USD 8,4 juta, dan kegiatan *trade finance* tanpa LC membukukan nilai USD 2,5 juta, sedangkan LC yang diterbitkan untuk impor berjumlah 45 dokumen dengan nilai total USD 8,5 juta (dalam bentuk *Sight LC* dan *Usance LC*).

Treasury & Foreign Exchange Transactions

The global economy grew by a pace of 3% in 2017, strongest since 2011, accompanied with a considerable recovery in global transactions, allowing many countries to shift their focus towards more long-term issues. The US Federal Reserve hiked its Fed Funds Rate by three times in 2017, in response to the increasingly exuberant economic activities in the US throughout the year. However, the US's economic growth rate was still lower than many had expected, especially in the fourth quarter. China, meanwhile, posted a 6.9% growth in 2017, exceeding the government's target of 6.5% and at the same time outpaced the previous year's growth of 6.7%, which was slowest in the past 26 years. In line with this, many central banks across other developed economies continued their monetary tightening policies in their respective domains.

The Indonesian economy grew by 5.07% in 2017, higher than in 2016. The greatest growth in terms of production was driven by information and communications sector, while the largest increase in expenditures was due to the export of goods and services. The largest contributions to Indonesia's GDP in 2017, by region, came from the two heavyweights, Java (58%) and Sumatera (22%). The Indonesian banking industry's situation grew at a limited pace in 2017, underpinned by the reference interest rate which was slashed twice by Bank Indonesia. The rupiah's exchange rate slid down throughout 2017, and thus, for banks that engage in foreign exchange transactions, one of the main issues of 2017 was closely monitoring exchange rate fluctuations and maintaining foreign exchange open positions so as to be able to provide competitive exchange rates for its customers.

Bank BNP engaged in various strategies to approach its customers and encourage them to perform more transactions involving foreign exchange through the Bank. Marketing activities to potential customers were also performed, to increase the Bank's foreign exchange transaction volume.

Bank BNP provides trade finance and remittance (incoming and outgoing) services to its customers. In 2017, Bank BNP's trade finance activities recorded the issuance of 220 letters of credit (LC) for export purposes amounting to USD 8.4 million, and non-LC trade finance amounting to USD 2.5 million, and 45 LC for import purposes (in the form of Sight LC and Usance LC), amounting to USD 8.5 million.

Kegiatan *remittance* yang difasilitasi Bank BNP di tahun 2017 mencatat kiriman uang masuk sebanyak 1.697 transaksi, dengan nilai USD 27,7 juta, dan transaksi kiriman uang keluar tercatat 4.015 kali dengan nilai USD 109,1 juta.

Pengembangan Bisnis

Selama tahun 2017, Bank BNP menjalankan bisnisnya dengan penuh perhitungan dan kehati-hatian sambil terus mengedepankan prinsip *prudential banking*, melakukan upaya efisiensi dan efektivitas operasional bisnisnya berdasarkan strategi bisnis pada tahun tersebut.

Di tahun 2017 Bank BNP mulai memberikan kredit *multifinance* yang bertujuan untuk diversifikasi portofolio dan mencari peluang bisnis lainnya melalui kerja sama dengan *multifinance* tersebut.
Untuk mendukung pertumbuhan kredit sesuai dengan target Rencana Bisnis Bank pada tahun 2017, Bank BNP menerapkan sentralisasi proses awal kredit dengan membentuk bagian *credit pre-screen process* dengan tujuan menghilangkan proses *redundancy,* meningkatkan kualitas proses dan analisis yang pada akhirnya menghasilkan percepatan keputusan kredit.

Bank BNP juga melakukan pembukaan kantor di lokasi yang menjadi ciri khas kota Bandung yaitu di Jalan Asia Afrika. Hal tersebut dilakukan dalam mendukung *Focus to Bandung Strategy* yang bertujuan untuk menanamkan kembali *image* Bank BNP sebagai Bank lokal Bandung.

Pada tahun 2017 Bank BNP melakukan pembukaan 1 Kantor Cabang Pembantu, 7 Kantor Kas, beserta 3 ATM Non-Tunai, selain itu Bank BNP melakukan penutupan 1 Kantor Cabang, 5 Kantor Cabang Pembantu, 1 Kantor Kas, beserta 10 ATM Tunai sehingga di tahun 2017 perubahan jumlah jaringan kantor Bank BNP menjadi 63 kantor dengan rincian 1 Kantor Pusat, 13 Kantor Cabang, 29 Kantor Cabang Pembantu, 16 Kantor Kas, 1 Kantor Fungsional Non-Operasional, 3 Mobil Kas Keliling, 54 ATM Tunai dan Non-Tunai, serta 3 ATM bekerja sama dengan Seven Bank. Bank BNP juga melakukan relokasi beberapa jaringan kantor ke tempat yang lebih prospektif dan melakukan perubahan status kantor.

Upaya lainnya yang dilakukan Bank BNP untuk mengembangkan bisnisnya selain mengevaluasi kinerja jaringan kantor adalah dengan mengembangkan produk dan aktivitas baru antara lain melakukan pengembangan fitur internet banking, dan fitur ATM sebagai upaya meningkatkan layanan Bank BNP.

In 2017, Bank BNP also facilitated 1,697 incoming remittances, with total value of USD 27.7 million, and 4,015 outgoing remittances, with total value of 109.1 million.

Business Development

Throughout 2017 Bank BNP conducted its business with caution and prudence, upholding the principle of prudential banking at all times, while striving to enhance its operational efficiency and effectiveness of its business, in accordance with its business strategy for the year.

In 2017, Bank BNP started to extend multifinance loans, as a means to diversify its portfolio and seek new business opportunities, among others by forging cooperations with the multifinance companies.
To boost lending performance in alignment with the target set in the Bank's Business Plan for 2017, Bank BNP had implemented a centralization of the first stages of lending by establishing the credit pre-screen process unit, with the goal of eliminating redundant processes, and improving the quality of processes and analyses, which in turn will speed up decision-making for lending approval.

Bank BNP also inaugurated a new branch office in an iconic location in Bandung, i.e. on Jalan Asia Afrika. This was a manifestation of the Bank's Focus to Bandung Strategy, which is intended to create a corporate image of Bank BNP as "Bandung's local bank".

In 2017, Bank BNP opened 1 Sub-Branch Office, 7 Cash Offices, and 3 Non-Cash ATM. Furthermore, the Bank also closed 1 Branch Office, 5 Sub-Branch Offices, 1 Cash Office, and recalled 10 Cash ATMS. Thus, in 2017 the Bank's operational network consisted of 63 offices, comprising 1 Head Office, 13 Branch Offices, 29 Sub-Branch Offices, 16 Cash Offices, 1 Functional Non-Operational Office, 3 Mobile Banking Vehicles, 54 Cash and Non-Cash ATMs, and 3 ATMs in partnership with Seven Bank. Bank BNP also relocated a number of its branch offices to more promising places, and changed the status of certain branch offices.

Another initiative of Bank BNP to expand its business, apart from evaluating the performance of each one of its offices in its operational network, is by developing new products and activities. This has included the development of internet banking and ATM features to improve Bank BNP's service quality.

Kebijakan Suku Bunga

Bank Indonesia mengganti *BI Rate* dengan BI 7-*Day Repo Rate* sebagai suku bunga acuan yang baru. Perubahan suku bunga acuan memberikan dampak positif, salah satunya adalah transmisi kebijakan moneter bisa berlangsung lebih efektif, dan diharapkan suku bunga kebijakan BI dapat langsung direspons dan penyesuaian biaya dana perbankan akan lebih cepat. Kenaikan/penurunan tingkat suku bunga BI akan mempengaruhi kebijakan tingkat suku bunga Bank BNP baik simpanan maupun pinjaman.

Bank BNP menetapkan suku bunga rata-rata per tahun untuk tahun 2016 dan 2017, yaitu suku bunga simpanan dan pinjaman sebagai berikut:

Interest Rate Policy

Bank Indonesia had changed its BI Rate with the BI's 7-Day Repo Rate as the new reference interest rate. This change in the reference interest rate has proven positive, among others by allowing monetary policy transmission to take place more effectively. It is further expected that this policy of BI can be immediately responded to, in the form of faster adjustments to the banking sector's cost of fund. A rise or fall of BI's interest rate shall directly affect the interest rate policy of Bank BNP's, both for its funding and its lending products.

Bank BNP set its average annual interest rates for the years 2016 and 2017, for the funding and lending products, as follows:

Keterangan	2017	2016	Description
Kredit Rupiah			Loans in Rupiah
Pinjaman Rekening Koran	12,28%	13,55%	Demand Deposits Loans
Pinjaman Berjangka	11,28%	12,80%	Time Loans
Kredit Kendaraan Bermotor	14,70%	13,77%	Vehicle Ownership Loans
Kredit Pemilikan Rumah	12,04%	12,77%	Housing Loans
Kredit *Time Loan Flat*	35,09%	21,43%	Time Loans Flat
Kredit Mikro	16,05%	8,85%	Micro Finance Loans
Kredit Valuta Asing			Loans in Foreign Currency
Pinjaman Rekening Koran	0,00%	0,00%	Demand Deposits Loans
Kredit Modal Kerja	5,03%	4,56%	Working Capital Loans
Simpanan Rupiah			Deposits in Rupiah
Giro	0,84%	0,93%	Demand Deposts
Tabungan	3,67%	3,13%	Saving Deposits
Deposito Berjangka	6,87%	7,60%	Time Deposits
Simpanan Valuta Asing			Deposits in Foreign Currencies
Giro	0,08%	0,08%	Demand Deposts
Tabungan	0,23%	0,43%	Saving Deposits
Deposito Berjangka	0,63%	0,89%	Time Deposits

Perkembangan suku bunga Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan intermediasi Bank BNP (kredit dan simpanan DPK) sepanjang 2017 adalah sebagai berikut:

The movements of Bank Indonesia's, the Indonesia Deposit Insurance Corporation (LPS), and Bank BNP's intermediary interest rates (for funding and lending) in 2017 are as follows:

Indikator	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sep	Okt	Nov	Des
BI 7-day (Reverse) Repo Rate	4,75%	4,75%	4,75%	4,75%	4,75%	4,75%	4,75%	4,50%	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%
Suku Bunga Kredit BNP	13,71%	13,70%	13,72%	13,72%	13,59%	13,62%	13,58%	13,54%	13,46%	13,41%	13,35%	13,29%
Suku Bunga DPK BNP	5,46%	5,46%	5,47%	5,48%	5,49%	5,51%	5,53%	5,55%	5,57%	5,58%	5,56%	5,54%

Berikut adalah Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) yang telah dihitung dan dipublikasikan pada akhir Desember 2017:

The following are the Prime Lending Rates calculated and published at the end of December 2017:

Suku Bunga Dasar Kredit/ Prime Lending Rate	Suku Bunga Dasar Kredit Berdasarkan Segmen Bisnis / *Prime Lending Rate Based On Business Segment*				
	Kredit Korporasi/ Corporate Loans	Kredit Ritel/ Retail Loans	Kredit Mikro/ Micro Loans	Kredit Konsumsi / *Consumer Loans*	
				KPR/ Housing Loans	Non-KPR/ Non-Housing Loans
	12,69%	12,22%	8,08%	8,45%	8,17%

Catatan : Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) digunakan sebagai dasar penetapan suku bunga kredit yang akan dikenakan oleh Bank Kepada nasabah. SBDK belum memperhitungkan komponen estimasi premi risiko yang besarnya tergantung dari penilaian Bank terhadap risiko untuk masing-masing debitur atau kelompok debitur. Dengan demikian, besarnya suku bunga kredit yang dikenakan kepada debitur belum tentu sama dengan SBDK.
Kredit konsumsi non-KPR tidak termasuk penyaluran dana melalui Kredit Tanpa Agunan (KTA).
Informasi SBDK yang berlaku setiap saat dapat dilihat pada publikasi di setiap kantor Bank dan/atau situs web Bank.

Notes : Prime Lending Rate, were used as the basis for determining the lending interest rate to be charged by the Bank on its customers. The Prime Lending Rate has not taken into account the estimated risk premium, whose amount depends on the Bank's risk assessment on each of its debtors or group of debtors. Thus, the lending interest rate charged on the debtors do not always correspond or is equal to the Prime Lending Rate.
Non-Housing Consumer Loans does not include Unsecured Loans. The information on the prevailing Prime Lending Rate is available at each of the Bank's offices and also on Bank BNP's website.

Operasional Bank BNP di Bandung

Sepanjang 2017, secara umum kinerja Bank BNP untuk wilayah kerja Bandung dan sekitarnya mengalami penurunan, dengan uraian sebagai berikut:

Pendapatan Bunga berikut provisi dan komisi pada Desember 2017 sebesar Rp575,47 miliar menurun 2,14% dari pendapatan tahun 2016 sebesar Rp588,02 miliar. Sementara itu, laba operasional Bank BNP tercatat negatif Rp90,64 miliar, menurun dari laba operasional negatif tahun 2016 sebesar Rp53,35 miliar.

Laba Bersih yang semula tercatat minus Rp57,51 miliar di tahun 2016 menurun menjadi minus Rp84,13 miliar. Dari total aset dan liabilitas Bank BNP di Bandung juga mengalami penurunan masing-masing menjadi Rp4,50 triliun dan Rp4,11 triliun dibandingkan perolehan tahun 2016 sebesar Rp5,07 triliun dan Rp4,23 triliun.

Operasional Bank BNP di Jakarta

Pencapaian kinerja wilayah Jakarta mengalami penurunan pada tahun 2017. Bank BNP Jakarta mencatatkan pendapatan bunga ditambah provisi dan komisi sebesar Rp71,14 miliar, atau turun 17,58% dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp86,31 miliar, akibat turunnya suku bunga rata-rata pinjaman. Pencapaian laba operasional dan laba bersih menurun, masing-masing Rp19,87 miliar dan Rp19,95 miliar, dibandingkan pencapaian tahun 2016 yaitu Rp55,74 miliar dan Rp52,24 miliar. Jumlah aset naik 49,43% atau menjadi Rp741,64 miliar dari semula Rp496,31 miliar di tahun 2016. Jumlah liabilitas juga naik menjadi Rp1.166,92 miliar di tahun 2017, dibandingkan di 2016 sebesar Rp1.027,59 miliar.

Bank BNP's Bandung Operations

Throughout 2017, the overall performance of Bank BNP in the business region of Bandung and the surrounding areas declined, with the breakdown as follows:

Interest income, fees and commissions as at end of December 2017 amounted to Rp575.47 billion, a drop of 2.14% from Rp588.02 billion in 2016. Bank BNP's operating profit, meanwhile, stood at minus Rp90.64 billion, a drop from the negative Rp53.35 billion of operating income in 2016.

Net Income, which had been recorded at negative Rp57.51 billion in 2016, was drop at negative Rp84.13 billion in 2017. Decline was also seen in Bank BNP's assets and liabilities in its Bandung operations, each amounting at Rp4.50 trillion and Rp4.11 trillion, compared to 2016 figures of Rp5.07 trillion and Rp4.23 trillion.

Bank BNP's Jakarta Operations

Bank BNP's performance in Jakarta decreased in 2017. Bank BNP Jakarta recorded interest income plus fees and commissions amounting to Rp71.14 billion, a 17.58% drop from Rp86.31 billion in 2016. This was due to the lower lending interest rate on average. Operating profit and net profit declined by Rp19.87 billion and Rp19.95 billion, respectively, from their 2016 figures of Rp55.74 billion and Rp52.24 billion, respectively. Assets also increased by 49.43% to Rp741.64 billion, from Rp496.31 billion as at end of 2016. Total liabilities also increased to Rp1,166.92 billion in 2017, compared to Rp1,027.59 billion in 2016.

Segmen Operasional Wilayah Lainnya

Pendapatan Segmen usaha wilayah lainnya sebesar Rp177,51 miliar turun dari semula Rp229,99 miliar pada tahun 2016. Hal ini disebabkan karena penurunan suku bunga rata-rata pinjaman. Perolehan Laba Operasional dan Laba Bersih juga mengalami penurunan masing-masing Rp4,32 miliar dan Rp4,52 miliar dari pencapaian tahun 2016 sebesar Rp14,10 miliar dan Rp13,38 miliar.

Jumlah aset mengalami peningkatan menjadi Rp1.742,11 miliar dari semula Rp1.591,95 miliar di 2016. Jumlah liabilitas di 2017 mengalami penurunan menjadi Rp1.061,89 miliar dari semula Rp1.139,44 miliar pada tahun 2016.

Profitabilitas

Dari kinerja operasi per segmen di atas, profitabilitas Bank BNP tercatat sebagai berikut:

Pendapatan Bunga Bersih sebesar Rp457,09 miliar, menurun 5,89% dari pendapatan tahun lalu sebesar Rp485,71 miliar. Sementara Laba Operasional Bersih tercatat minus Rp66,45 miliar atau turun 503,08% dari perolehan Laba Operasional tahun 2016 sebesar Rp16,49 miliar. Laba bersih yang semula tercatat Rp8,11 miliar pada tahun 2016 turun menjadi minus Rp59,66 miliar di tahun 2017, akibat meningkatnya biaya CKPN pada tahun 2017 sebagai salah satu langkah yang diambil Bank dalam menjaga kualitas rasio NPL serta adanya pembayaran pajak kurang bayar selama periode 2013 dan 2014.

Penurunan juga terjadi pada total aset dan liabilitas, masing-masing menjadi sebesar Rp7.581,03 miliar dan Rp6.443,18 miliar dibandingkan perolehan tahun 2016 masing-masing sebesar Rp7.705,78 miliar dan Rp6.508,27 miliar.

Bank BNP's Operations in Other Regions

Bank BNP's operations in other areas recorded revenues of Rp177.51 billion, a drop from Rp229.99 billion in 2016. This was due to the lower lending interest rate on average. Pperating profit and net income also decreased by Rp4.32 billion and Rp4.52 billion from their 2016 figures of Rp14.10 billion and Rp13.38 billion, respectively.

Total assets rose to Rp1,742.11 billion, from Rp1,591.95 billion in 2016. Meanwhile, total liabilities in 2017 contracted to Rp1,061.89 billion, from Rp1,139.44 billion in 2016.

Profitability

From the explanation on operating performance by segment as mentioned above, Bank BNP's profitability is as follows:

Net Interest Income amounted to Rp457.09 billion, signifying a 5.89% decline from Rp485.71 billion in the previous year. Meanwhile, Net Operating Profit amounted to negative Rp66.45 billion, a steep drop of 503.08% from positive Rp16.49 billion in 2016. Net income, which in 2016 was recorded at Rp8.11 billion in 2016, took a reverse course to reach negative Rp59.66 billion in 2017, owing to the increase in Provision for Impairment Losses in 2017 as a measure taken by the Bank to maintain its NPL quality, along with the payment of tax underpayment from the tax periods of 2013 and 2014.

Decline also occurred in total assets and total liabilities, each to Rp7,581.03 billion and Rp6,443.18 billion, compared to Rp7,705.78 billion and Rp6,508.27 billion in 2016.

Tinjauan Keuangan
Analisis Pendapatan Komprehensif

Financial Review
Analysis of Comprehensive Income

Keterangan	2017	2016	*Description*
Pendapatan Bunga	824.900	905.311	Interest Income
Beban Bunga	(367.812)	(419.598)	Interest Expense
Pendapatan Bunga Bersih	457.088	485.713	Net Interest Income
Pendapatan Operasional Lainnya	43.793	41.146	Other Operating Income
Beban Operasional Lainnya	(567.329)	(510.375)	Other Operating Expenses
Laba Operasional Bersih	(66.448)	16.485	Net Operating Income
Laba Sebelum Pajak	(69.132)	12.073	Income Before Tax

Keterangan	2017	2016	*Description*
Laba Bersih	(59.661)	8.109	Net Income
Laba per Saham Dasar (dalam Rupiah penuh)	(88)	12	Earning Per Share (in full Rupiah)
Jumlah Saham (dalam lembar)	676.833.882	676.833.882	Total Number of Shares

Pendapatan & Beban Bunga

Pada tahun 2017 pendapatan bunga Bank tercatat Rp824,90 miliar, turun 8,88% dari Rp905,31 miliar di tahun 2016.
Pendapatan bunga tahun 2017 berasal dari kredit yang diberikan sebesar Rp738,85 miliar, penempatan pada Bank Indonesia sebesar Rp47,22 miliar, efek-efek sebesar Rp32,53 miliar, penempatan pada bank lain sebesar Rp5,51 miliar, dan lainnya sebesar Rp782 juta. Dibandingkan tahun 2016, penurunan terbesar tercatat pada nilai kredit yang diberikan, sedangkan kenaikan terbesar tercatat pada penempatan pada Bank Indonesia.

Sementara itu, beban bunga juga mengalami penurunan sebesar 12,34% di tahun 2017, mencapai Rp367,81 miliar, dari nilai Rp419,60 miliar di tahun 2016. Hal ini disebabkan oleh penurunan simpanan pihak ketiga sebesar 1,49% dari Rp6.312,30 miliar pada tahun 2016 menjadi Rp6.218,18 miliar di tahun 2017 ditambah dengan terjadinya penurunan suku bunga deposito.

Beban bunga tahun 2017 berasal dari deposito Rp312,62 miliar, tabungan Rp35,47 miliar, premi program penjaminan simpanan Rp11,91 miliar, giro Rp3,93 miliar, *call money* Rp40,10 miliar dan pinjaman subordinasi Rp3,85 miliar, dan lainnya Rp520 juta. Penurunan terbesar dibandingkan tahun 2016 tercatat pada beban bunga dari deposito.

Pendapatan Bunga Bersih

Pendapatan bunga bersih tahun 2017 adalah Rp457,09 miliar, menurun 5,89% dari Rp485,71 miliar di tahun 2016. Penurunan ini berasal dari penurunan pendapatan bunga yang lebih besar dibandingkan dengan penurunan beban bunga. Penurunan pendapatan bunga diakibatkan oleh penurunan suku bunga rata-rata kredit.

Pendapatan Operasional lainnya

Pendapatan operasional lainnya di tahun 2017 mengalami kenaikan 6,43% dari Rp41,15 miliar di tahun 2016 menjadi Rp43,79 miliar. Kenaikan ini didorong oleh pendapatan lainnya sebesar Rp5,45 miliar atau meningkat 16,29% dari tahun 2016. Peningkatan pendapatan lainnya didukung oleh

Interest Income & Expenses

In 2017 the Bank's interest income was Rp824.90 billion, a 8.88% drop from Rp905.31 billion in 2016.
Interest income in 2017 was derived from loans disbursed, amounting to Rp738.85 billion, placements with Bank Indonesia amounting to Rp47.22 billion, securities amounting to Rp32.53 billion, placements with other banks amounting to Rp5.51 billion, and others amounting to Rp782 million. Compared to 2016, the largest decrease in value was seen in loans disbursed, while the largest increase was recorded in placement with Bank Indonesia.

Interest expenses, meanwhile, also dropped by 12.34% in value in 2017, reaching Rp367.81 billion, from Rp419.60 billion in 2016. This was owing to the 1.49% lower amount of total third party funds, from Rp6,312.30 billion in 2016 to Rp6.218.18 billion in 2017, alongside the decline in interest rate for time deposits.

Interest expenses in 2017 were derived from time deposits of Rp312.62 billion, savings of Rp35.47 billion, premium for deposit insurance program of Rp11.91 billion, demand deposits of Rp3.93 billion, call money of Rp40.10 billion, and subordinated loans of Rp3.85 billion, and others of Rp520 milion. The largest decrease in value from the 2016 figures was recorded in interest expense for time deposits.

Net Interest Income

Net interest income in 2017 amounted to Rp457.09 billion, 5.89% lower than Rp485.71 billion in 2016. This decline resulted from a greater decrease in interest income than the decrease in interest expense. The reduction in interest income was owing to the decline in the average interest rate for loans.

Other Operating Income

Other operating income in 2017 rose 6.43% from Rp41.15 billion in 2016 to Rp43.79 billion. Such an increase was attributable to the increase in other income by Rp5.45 billion or 16.29% from its value in 2016. The increase in other operating revenues was bolstered by the increase in various

kenaikan beberapa pendapatan, yaitu: Pendapatan dari kredit yang telah dihapuskan bertumbuh sebesar Rp6,24 miliar dan pendapatan administrasi menjadi Rp478,82 juta.

Sementara itu, pendapatan provisi dan komisi lainnya turun 12%, sedangkan pendapatan devisa-bersih turun 57% dibandingkan realisasi tahun 2016.

Beban Operasional lainnya

Pada tahun 2017, jumlah beban operasional lainnya mengalami kenaikan 11,16% dari Rp510,38 miliar di tahun 2016 menjadi Rp567,33 miliar. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan, dari Rp101,12 miliar menjadi Rp138.43 miliar. Kenaikan juga terjadi pada beban umum dan administrasi sebesar 1,43% atau dari Rp170,73 miliar menjadi Rp173,18 miliar, beban gaji dan tunjangan sebesar 5,82% atau dari Rp216,94 miliar menjadi Rp229,57 miliar, dan beban lainnya sebesar 21,17% atau Rp21,58 miliar menjadi Rp26,15 miliar pada tahun 2017.

Pendapatan & Beban Non-Operasional

Pada tahun 2017 Bank mencatat pendapatan non-operasional sebesar Rp4,81 miliar, meningkat 280% dari nilai tahun 2016, dan beban non-operasional sebesar Rp7,49 miliar, meningkat 31,97% dari nilainya di tahun 2016. Beban non-operasional meningkat signifikan karena adanya biaya denda sebesar Rp6,36 miliar menjadi Rp6,41 miliar.

Laba Tahun Berjalan

Perolehan laba sebelum pajak tahun 2017 adalah minus Rp69,13 miliar, turun 672,63% dari Rp12,07 miliar di tahun 2016. Pada tahun 2017 laba bersih tahun berjalan untuk tahun 2017 adalah minus Rp59,66 miliar, atau 836% lebih rendah dari laba tahun berjalan untuk tahun yang 2016 sebesar Rp8,11 miliar.

components of income, namely: Income from loans written off increased by Rp6.42 billion, and administrative income rose to Rp478.82 million.

Other fees and commissions dropped by 12%, while gain from foreign exchanges – net dropped by 57%, respectively, from their figures in 2016.

Other Operating Expenses

In 2017, total other operating expenses increased by 11.16% from Rp510.38 billion in 2016 to Rp567.33 billion. This increase was contributed primarily by the formation of allowance for impairment losses on financial assets, from Rp101.12 billion in 2016 to Rp138.43 billion. An increase was also seen in general and administrative expenses by 1.43% or from Rp170.73 billion to Rp173.18 billion, and an increase of 5.82%, from Rp216.94 billion to Rp229.57 billion, was seen in salaries and allowance expenses. Meanwhile, other expenses rose by 21.17% or Rp21.58 billion, from Rp26.15 billion in 2017.

Non-Operating Income & Expenses

In 2017 the Bank recorded non-operating income of Rp4.81 billion, up by 280% from 2016 figure. Non-operating expenses reached Rp7.49 billion, a rise of 31.97% from its amount in 2016. Non-operating expenses rose significantly, with penalty expenses rising from Rp6.36 bilion to Rp6.41 bilion.

Income for the Year

The Bank recorded income before tax expense amounted to negative Rp69.13 billion in 2017, down by 672.63% from a net income of Rp12.07 billion in 2015. In 2017 net profit for the year was negative Rp59.66 billion, or 836% lower than the net income for the year in 2016, of Rp8.11 billion.

Analisis Posisi Keuangan
Aset Keuangan

Analysis of Financial Position
Financial Assets

dalam Jutaan Rupiah / in million Rupiah

Uraian	2017	2016	Pertumbuhan / *Growth*		*Description*
1	2	3	4 = (2-3)	5 = (2-3)/3	1
Kas	88.984	88.121	863	0,98%	Cash
Giro pada Bank Indonesia	463.950	433.528	30.422	7,02%	Demand deposits with Bank Indonesia
Giro pada Bank Lain	111.548	361.355	(249.807)	-69,13%	Demand deposits with other banks

Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain	391.923	417.881	(25.958)	-6,21%	Placement with Bank Indonesia and other banks
Efek-Efek	665.846	1.012.183	(346.337)	-34,22%	Securities
Tagihan Spot dan Derivatif	-	-	-	0,00%	Spot and Derivatif Receivables
Kredit yang diberikan	5.844.252	5.313.629	530.623	9,99%	Loans
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(156.581)	(107.701)	(48.880)	45,38%	Allowance for Impairment Losses
Tagihan Akseptasi	-	6.330	(6.330)	-100,00%	Acceptance Receivables
Total	7.409.922	7.525.326	(115.404)	-1,53%	Total

Aset

Total aset keuangan Bank BNP pada tahun 2017 mencapai Rp7.410 miliar, menurun sebesar Rp115,40 miliar atau sekitar 1,53% dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp7.525,33 miliar. Penurunan aset keuangan disebabkan beberapa faktor, utamanya penurunan Efek-Efek dan Giro pada Bank Lain. Untuk rincian dapat dilihat pada tabel di atas.

Assets

Bank BNP's financial assets in 2017 reached Rp7,410 billion, a drop of Rp115.40 billion or about 1.53% from the position of one year earlier, of Rp7,525.33 billion. This was due to a number of factors, the most dominant one being the contraction in Securities and Demand Deposits with Other Banks. Detailed descriptions are provided in the above table.

Aset Non-Keuangan

dalam Jutaan Rupiah

Non-Financial Assets

in million Rupiah

Uraian	2017	2016	Pertumbuhan / *Growth*		*Description*
1	2	3	4 = (2-3)	5 = (2-3)/3	*1*
Aset Tetap - neto	30.474	27.619	2.855	10,34%	*Fixed Assets - Net*
Aset Tak Berwujud - neto	4.626	3.227	1.399	43,35%	*Intangible Assets - Net*
Aset Lain-lain - neto	136.010	149.608	(13.598)	-9,09%	*Other Assets - Net*
Total	**171.110**	**180.454**	**(9.344)**	**-5,18%**	***Total***

Aset non-keuangan Bank menurun Rp9,34 miliar atau 5,18% dari Rp180,46 miliar di tahun 2016 menjadi Rp171,11 miliar di 2017. Hal ini disebabkan oleh menurunnya realisasi Aset lain-lain – neto yang cukup besar sejumlah 9,09% atau Rp13,60 miliar. Realisasi aset lain-lain – neto menurun karena adanya penurunan pada agunan yang diambil alih sebesar Rp8,84 miliar, piutang transaksi nasabah menurun sebesar Rp8,76 miliar, biaya bayar di muka menurun sebesar Rp2,54 miliar, pendapatan bunga yang akan diterima menurun Rp2,50 miliar, setoran jaminan menurun sebesar Rp435 juta, dan aset lainnya menurun sebesar Rp2,43 miliar. Peningkatan yang terjadi di 2017 pada uang muka pajak sebesar Rp4,37 miliar.

Secara konsolidasi, pada akhir tahun 2017 Bank mencatat total aset sebesar Rp7.581,03 miliar, turun 1,62% dari total aset per akhir tahun 2016. Kontribusi terbesar dari penurunan ini disebabkan oleh Efek-Efek sebesar Rp346,34

The Bank's non-financial assets declined by Rp9.34 billion or 5.18%, from Rp180.46 billion in 2016 to Rp171.11 billion in 2017. This was owing to the 15.42% decline in the realized amount of Other Assets – Net, amounting to 9.09% or Rp13.60 billion. Realization of Other Assets – Net declined due to the decrease in foreclosed assets of Rp8.84 billion, customer transactions receivables' decline by Rp8.76 billion, prepaid expenses' decline by Rp2.54 billion, deferred interest income's decline by Rp2.50 billion, payment of guarantee's decline by Rp435 million, and other assets' decline by Rp2.43 billion. An increase in tax advance payment, however, increased in 2017, by Rp4.37 billion.

Overall, total assets of the Bank as at the end of 2017 amounted to Rp7,581.03 billion, a 1.62% decline from the total assets as at end of 2016. The largest contribution to the decrease was from the decrease in Securities, amounting to

miliar. Komponen terbesar dari total aset Bank, yakni sebesar 77,09% adalah kredit yang diberikan kepada pihak ketiga sebesar Rp5.844,25 miliar.

Posisi kas Bank per akhir 2017 adalah Rp88,98 miliar, meningkat 0,98% dari Rp88,12 miliar di tahun sebelumnya. Giro pada Bank Indonesia mengalami peningkatan 7,02% menjadi Rp463,95 miliar, sementara giro pada bank lain menurun 69,13% menjadi Rp111,55 miliar. Realisasi total kredit yang diberikan dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai adalah Rp5.687,67 miliar, 9,25% lebih tinggi dari Rp5.205,93 miliar per akhir 2016.

Elemen-elemen lain yang berkontribusi terhadap perubahan nilai aset total Bank di tahun 2017 adalah penurunan 34,22% pada efek-efek menjadi Rp665,85 miliar dan penurunan 100% pada tagihan akseptasi.

Rp346.34 billion. The largest component of the Bank's total assets, accounting for 77.09% of the total, was third party loans, amounting to Rp5,844.25 billion.

The Bank's cash as at the end of 2017 stood at Rp88.98 billion, a slight rise of 0.98% from Rp88.12 billion as at end of 2016. Demand deposits with Bank Indonesia rose by 7.02% to Rp463.95 billion, while demand deposits with other banks dropped by 69.13% to Rp111.55 billion. Total loans less allowance for impairment losses reached Rp5,687.67 billion, 9.25% higher than Rp5,205.93 billion as at end of 2016.

Other components that contributed to the change in the Bank's total assets as at end of 2017 were: a 34.22% decline in securities, to Rp665.85 billion, and a 100% drop in acceptance receivables.

Liabilitas

Liabilities

dalam Jutaan Rupiah / in million Rupiah

Uraian	2017	2016	Pertumbuhan / *Growth*		*Description*
1	2	3	4 = (2-3)	5 = (2-3)/3	*1*
Liabilitas Segera	10.993	12.786	(1.793)	-14,02%	Obligation Due Immediately
Simpanan Nasabah	6.218.180	6.312.303	(94.123)	-1,49%	Deposits from Customer
Simpanan dari Bank Lain	93.038	53.358	39.680	74,37%	Deposits from Other Banks
Utang Akseptasi	-	10.342	(10.342)	-100,00%	Acceptance Payable
Utang Pajak	9.332	9.440	(108)	-1,14%	Taxes Payables
Liabilitas Spot dan Derivatif	-	-	-	0,00%	Spot and Derivative Liabilities
Pinjaman Subordinasi	80.510	79.946	564	0,71%	Subordinated Loans
Liabilitas Lain-Lain	31.130	30.099	1.031	3,43%	Other Liabilities
Total	6.443.183	6.508.273	(65.089)	-1,00%	Total

Total liabilitas Bank per akhir 2017 mencapai Rp6.443,18 miliar, 1% lebih rendah dari angka per akhir tahun 2016 Rp6.508,27 miliar. Penurunan ini terutama berasal dari berkurangnya simpanan nasabah pihak ketiga sebesar 1.49%, dari Rp6.312,30 miliar di 2016 menjadi Rp6.218,18 miliar di tahun 2017.

Posisi liabilitas segera Bank per akhir 2017 adalah Rp10,10 miliar (turun 14,02% dari nilai tahun 2016), simpanan nasabah Rp6.218,18 miliar (turun 1,49%), simpanan dari Bank lain Rp93,04 miliar (meningkat 74,37%), utang akseptasi menurun 100%, utang pajak Rp9,33 miliar (turun 1,14%), pinjaman subordinasi Rp80,51 miliar (meningkat 0,71%), dan liabilitas lain-lain sebesar Rp31,13 miliar (meningkat 3,43%).

The Bank's total liabilities as at end of 2017 amounted to Rp6,443.18 billion, 1% lower than Rp6,508.27 billion as at end of 2016. This decrease was primarily attributable to the lower amount of third party funds by 1.49%, from Rp6,312.30 billion in 2016 to Rp6,218.18 billion in 2017.

The Bank's obligations due immediately as at end of 2017 amounted to Rp10.10 billion (down 14.02% from 2016 figure), total deposits from customers of Rp6,218.18 billion (down 1.49%), deposit from other banks of Rp93.04 billion (an increase of 74.37%), a 100% decline in acceptance payables, subordinated loans of Rp80.51 billion (up 0.71%), and other liabilities of Rp31.13 billion (up by 3.43%).

Ekuitas

Equity

dalam Jutaan Rupiah / in million Rupiah

Uraian	2017	2016	Pertumbuhan / *Growth*		*Description*
1	2	3	4 = (2-3)	5 = (2-3)/3	1
Modal Saham	338.417	338.417	-	0,00%	Share Capital
Tambahan Modal Disetor-penuh	221.038	221.038	-	0,00%	Additional Paid in Capital-net
Saldo Laba Ditentukan penggunaannya	72.580	71.770	810	1,13%	Retained earnings Appropriated
Saldo laba Belum Ditentukan penggunaannya	505.813	566.285	(60.472)	-10,68%	Retained earnings Unappropriated
Total	1.137.848	1.197.510	(59.662)	-4,98%	Total

Jumlah ekuitas Bank BNP per akhir tahun 2017 adalah Rp1.137,85 miliar, atau 4,98% lebih rendah dari Rp1.197,51 miliar per akhir 2016. Penurunan pada ekuitas Bank BNP ini berasal dari saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sebesar Rp505,81 miliar, 10,68% lebih rendah dibandingkan nilai tahun 2016 yang sebesar Rp566,29 miliar, sedangkan saldo laba yang ditentukan penggunaannya meningkat 1,13% dari Rp71,77 miliar di tahun 2016 menjadi Rp72,58 miliar.

Bank BNP's total equity as at end of 2017 was Rp1,137.85 billion, 4.98% lower than the figure as at end of 2016 of Rp1,197.51 billion. The decline in Bank BNP's equity was derived from the unappropriated retained earnings of Rp505.81 billion, which was 10.68% lower than the unappropriated retained earnings of Rp566.29 billion as at end of 2016. Meanwhile, appropriated retained earnings rose by 1.13% from Rp71.77 billion as at end of 2016 to Rp72.58 billion as at end of 2017.

Analisis Arus Kas

Analysis of Cash Flows

dalam Jutaan Rupiah / in million Rupiah

Uraian	2017	2016	Perubahan / Changes		Description
			Selisih / Difference	YoY	
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	(585.555)	255.730	(841.285)	328,97%	Net Cash From Operating Activities
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	341.076	(450.160)	791.236	175,77%	Net Cash used in Investing Activities
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	-	(6.091)	6.091	100,00%	Net Cash From Financing Activities
Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas	(244.480)	(200.521)	(43.959)	-21,92%	Net Increase in Cash and Cash Equivalents
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	1.300.886	1.501.407	(200.521)	-13,36%	Cash and Cash Equivalents at the Beginning of Period
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	1.056.406	1.300.886	(244.480)	-18,79%	Cash and Cash Equivalents at the End of Year

Pada awal tahun 2017, jumlah kas dan setara kas Bank adalah Rp1.300,89 miliar. Bank mencatat penurunan dalam kas dan setara kas senilai Rp244,48 miliar, sehingga per akhir tahun 2017 jumlah kas dan setara kas Bank mencapai Rp1.056,41 miliar.

At the start of 2017, total cash and cash equivalents stood at Rp1,300.89 billion. The Bank recorded a decline in cash and cash equivalents of Rp244.48 billion, so that its cash and cash equivalents' position as at end of 2017 stood at Rp1,056.41 billion.

Kas dan setara kas Bank per akhir tahun 2017 terdiri dari kas senilai Rp88,98 miliar, giro pada Bank Indonesia senilai Rp463,95 miliar, giro pada bank lain senilai Rp111,55 miliar, dan penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain senilai Rp391,92 miliar.

Dari aktivitas operasi di tahun 2017 Bank mencatat penurunan arus kas untuk aktivitas operasi sebesar 329%. Arus kas bersih yang berasal dari aktivitas investasi di tahun 2017 meningkat 176% menjadi Rp341,08 miliar dibandingkan kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi di tahun 2016 yang sebesar Rp450,16 miliar.

Sementara itu di sisi pendanaan, arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan, yaitu pembayaran dividen, pada tahun 2016 adalah Rp6,09 miliar, sedangkan pada tahun 2017 tidak melakukan pembayaran dividen.

The Bank's cash and cash equivalents as at the end of 2017 comprised cash of Rp88.98 billion, current account at Bank Indonesia of Rp463,95 billion, current account at other banks of Rp111.55 billion, and placement with Bank Indonesia and other banks of Rp391.92 billion.

From its operating activities in 2017 the Bank recorded a net decrease in cash flows of 329%. The net cash flows from investing activities in 2017 also rose by 176% from Rp341.08 billion, against net cash flows for investing activities in 2016, which amounted to Rp450.16 billion.

In terms of financing, the Bank's net cash flows from its financing activities, i.e. payment of dividends, in 2016 was 6.09 billion, while in 2017 this was zero as the Bank did not distribute any dividends.

Rasio Keuangan Penting

Key Financial Ratios

Uraian	2017	2016	Description
CAR	17,50%	20,57%	CAR
NIM	6,12%	6,13%	NIM
ROA	-0,90%	0,15%	ROA
ROE	-5,27%	0,70%	ROE
NPL (Gross)	6,57%	5,31%	NPL (Gross)
NPL (Neto)	4,50%	4,07%	NPL (Neto)
LDR	93,99%	84,18%	LDR
BOPO	108,42%	98,52%	BOPO

Margin Bunga Bersih

Margin bunga bersih, yang dihitung dengan membandingkan pendapatan bunga bersih terhadap rata-rata total aset produktif di tahun 2017 terealisasi 6,12% sedikit menurun dari 6,13% di tahun 2016. Penurunan ini berasal dari penurunan dalam pendapatan bunga bersih di tahun 2017 lebih besar dibandingkan penurunan total aset produktif di tahun 2017.

Net Interest Margin

Net interest margin, which is the ratio of net interest income to the average total value of productive assets, reached 6.12% in 2017, slightly lower from 6.13% in 2016. This decline was owing to the larger decline in the amount of net interest income recorded in 2017 compared to the decline in the amount of total productive assets in 2017.

Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Rasio BOPO tahun 2017 adalah 108,42% lebih tinggi daripada rasio BOPO tahun 2016 sebesar 98,52%. Faktor utama kenaikan BOPO adalah adanya peningkatan pada beban operasional lainnya terutama disebabkan oleh kenaikan biaya CKPN sebesar 37% di tahun 2017 sebagai upaya dalam menjaga kualitas rasio NPL dan adanya pembayaran pajak kurang bayar selama periode 2013 dan 2014.

Operating Expenses to Operating Revenues Ratio

The Operating Expenses to Operating Income Ratio reached 108.42%, compared to 98.52% in 2016. The main factor causing the increase in this ratio was the 37% increase in allowance for impairment losses in 2017, as an effort of the Bank's to maintain NPL quality, along with the payment of tax underpayment for the tax periods of 2013 dan 2014.

Imbal Hasil atas Aset

Nilai Imbal Hasil atas Aset (ROA) pada tahun 2017 terealisasi minus 0,90% menurun dibandingkan tahun 2016 sebesar 0,15%. Penurunan ROA ini disebabkan oleh turunnya perolehan laba sebelum pajak terhadap rata-rata total asetnya pada tahun 2017 dibandingkan di tahun 2016.

Imbal Hasil atas Ekuitas

Nilai Imbal Hasil atas Ekuitas (ROE) pada tahun 2017 terealisasi minus 5,27%. Pada tahun 2016, ROE tercatat sebesar 0,70%. Penurunan ROE ini disebabkan oleh turunnya perolehan laba bersih terhadap rata-rata modal intinya (*Tier* 1) pada tahun 2017 dibandingkan di tahun 2016.

Kemampuan Membayar Utang dan Tingkat Kolektibilitas Piutang

Rasio Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum

Rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio* – CAR) dengan memperhitungkan risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional tercatat sebesar 17,50% pada tahun 2017, menurun 3,07% dari tahun 2016 yang sebesar 20,57%.

Return on Assets

The Bank's Return on Assets (ROA) in 2017 was negative 0.90%, as opposed to positive 0.15% in 2016. The decrease in ROA was owing to lower income before tax expense to be divided by the average total assets in 2017 compared with the figure in 2016.

Return on Equity

Return on Equity (ROE) in 2017 was negative 5.27%, down from 0.70% in 2016. The lower ROE was attributable to lower net income compared to the average Tier 1 Capital in 2017 compared with the ratio in 2016.

Solvability and Receivables Collectibility

Capital Adequacy Ratio

The Bank's Capital Adequacy Ratio (CAR) taking into account credit risk, market risk, and operational risk, was 17.50% in 2017, or 3.07% lower than in CAR figure of 20.57% in 2016.

RASIO KECUKUPAN MODAL
Capital Adequacy Ratio

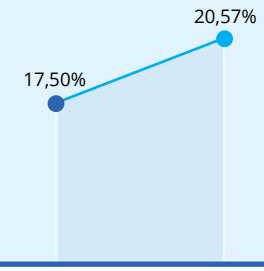

2017 2016

Total modal inti (*Tier* 1) mengalami penurunan sebesar Rp77,98 miliar menjadi Rp1.103 miliar di tahun 2017. Bank BNP berada pada kategori BUKU 2 (Modal Inti di atas Rp1 triliun – 5 triliun) berdasarkan ketentuan otoritas.

Total Modal Bank BNP per 31 Desember 2017 adalah Rp1.171 miliar atau turun 7,10% dari Rp1.261 miliar per akhir 2016, akibat realisasi laba tahun berjalan minus dan adanya

Total Tier 1 Capital declined slightly by Rp77.98 billion to Rp1,103 billion in 2017. Bank BNP is in the banking category of BUKU 2 (Group of Business Activities 2, i.e. Banks with Tier 1 Capital between Rp1–5 trillion) based on the regulations set by the authorities.

Total capital of Bank BNP as at 31 December 2017 was Rp1,171 billion or 7.10% lower than Rp1,261 billion as at the end of 2016, due to the net loss sustained by the Bank

amortisasi volume pinjaman subordinasi yang diakui sebagai modal pelengkap. Sementara itu, total Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) meningkat 9,20%, dari Rp6.127 miliar per akhir 2016 menjadi Rp6.691 miliar per akhir 2017 utamanya karena adanya peningkatan dari volume aktiva kreditnya. Penurunan total modal menjadi faktor CAR pada tahun 2017, sedangkan total ATMR meningkat. Rasio CAR Bank masih jauh di atas ketentuan otoritas sebesar 8%.

Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas Bank tercermin dari rasio kredit yang diberikan terhadap simpanan (*Loan to Deposit Ratio* - LDR) maupun rasio pinjaman terhadap total dana yang dihimpun (*Loan to Funding Ratio* – LFR). Dalam instrumen pendanaannya, Bank BNP tidak mengeluarkan instrumen keuangan lainnya seperti Sertifikat Deposito atau surat hutang, sehingga pendanaannya murni dari simpanan pihak ketiga. Dengan demikian, perhitungan LDR dan LFR adalah sama dan posisi pada akhir tahun 2017 tercatat 93,99%, meningkat 9,81% dari periode yang sama tahun 2016 yaitu 84,18%.

and the amortization of subordinated loans recognized as Tier 2 Capital. Meanwhile, total Risk Weighted Assets (RWA) increased by 9.20%, from Rp6,127 billion as at end of 2016 to Rp6,691 billion as at end of 2016, mainly owing to the increase in loans. The decline in total capital the greatest determinant for Capital Adequacy Ratio (CAR) in 2017, while RWA increased. The Bank's CAR, however, remains well above the minimum limit of 8% set by the authorities.

Liquidity Ratios

The Bank's liquidity ratios are calculated as total loans divided by total deposits or commonly known as the Loan to Deposit Ratio (LDR), as well as total loans to total funding or the Loan to Funding Ratio (LFR). Bank BNP's funding instruments do not include other financial instruments such as Negotiable Certificate of Deposit or Bonds, and thus its funding was derived solely from third party funds. Therefore, Bank BNP's LDR and LFR are identical, with the position as at the end of 2017 being 93.99%, rising by 9.81% from the 2016 figure of 84.18%.

RASIO LIKUIDITAS BANK
Loan to Deposit Ratio

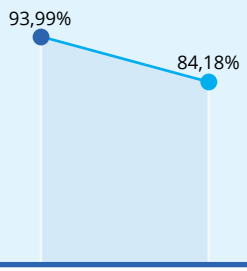

2017 2016

Rasio Kredit Bermasalah

Penyaluran dana melalui kredit oleh Bank BNP mencapai kira-kira 77% dari total aset yang dimiliki Bank. Dengan demikian Bank menghadapi risiko memburuknya kualitas aset akibat adanya kredit bermasalah. Hal ini diantisipasi oleh Bank dengan menerapkan pemberian kredit yang berhati-hati (*prudent).*

Per 31 Desember 2017, rasio kredit bermasalah (*Non-Performing Loans* – NPL) Bank adalah 6,57% (bruto) dan 4,50% (netto), dibandingkan per 31 Desember 2016 masing-masing 5,31% (bruto) dan 4,07% (netto). Kenaikan NPL ini berasal dari meningkatnya jumlah kredit bermasalah yang dimiliki karena menurunnya kualitas kredit debitur yang disebabkan faktor kemampuan pengembalian pinjaman. Namun, angka NPL netto masih berada di bawah ketentuan otoritas sebesar 5%,

Non-Performing Loans Ratio

Provision of loans by Bank BNP accounted for around 77% of the Bank's total assets. In light of this situation, the Bank faces the risk of declining assets quality due to the existence of non-performing loans. The Bank has anticipated this by conducting prudent lending at all times.

As at 31 December 2017, the Bank's non-performing loans (NPL) ratio stood at 6.57% (gross) and 4.50% (net), compared to 5.31% (gross) and 4.07% (net) as at 31 December 2016. The increase in NPL ratios was attributable to the rising amount of non-performing loans recorded by the Bank, owing to the decline in debtors' loan quality in line with their collectibility together with the decline in loan portfolio. However, these ratios were still below the maximum limit set

dan dengan demikian kualitas aset Bank BNP masih cukup kuat.

by the authorities, i.e. 5%, and thus the Bank's asset quality has been deemed as financially sound.

RASIO KREDIT BERMASALAH BRUTO
Non-Performing Loans Gross

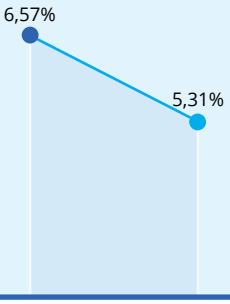

RASIO KREDIT BERMASALAH NETTO
Non-Performing Loans Net

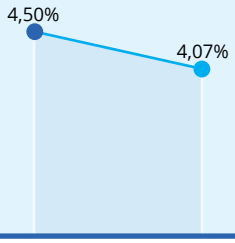

Perbandingan Target dan Realisasi 2017 dan Proyeksi 2018

Target dan realisasi kinerja keuangan Bank di tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Comparison of 2017 Targets and Actual Achievements, and 2018 Projections

The targets and actual achievements of the Bank's financial performance in 2017 are as follows:

dalam Jutaan Rupiah / in million Rupiah

Uraian	RBB 2017 2017 Target	Realisasi 2017/ 2017 Realization	Pencapaian Achievement (%)	Proyeksi 2018/ 2018 Projections	Description
Neraca					Balance Sheet
Total Aset	7.829.744	7.581.032	96,82%	8.079.437	Total Assets
Pinjaman yang Diberikan	5.623.419	5.844.252	103,93%	6.253.349	Loans
Total Pendanaan	6.390.244	6.218.180	97,31%	6.582.473	Total Funding
Laporan Laba Rugi					Income Statements
Pendapatan Bunga	831.299	824.900	99,23%	796.305	Interest Income
Pendapatan Operasional Selain Bunga	98.699	43.793	44,37%	94.203	Non-Interest Operating Income
Beban Bunga	(351.618)	(367.812)	104,61%	(345.383)	Interest Expenses
Beban Operasi Selain Bunga	(568.297)	(567.329)	99,83%	(550.239)	Non-Interest Operating Expenses
Beban Tenaga Kerja	(200.000)	(229.574)	114,79%	(218.203)	Employment Expenses
Beban Umum, Administrasi, dan Lainnya	(368.297)	(337.755)	91,71%	(332.036)	General, Administrative & Other Expenses
Laba Operasional	10.083	(66.448)	-659,01%	(5.114)	Operating Income
Laba Non-Operasional	411	(2.683)	-652,80%	15.241	Non-Operating Income
Laba Bersih Setelah Pajak	7.871	(59.661)	-757,99%	7.595	Net Income

Secara umum pencapaian kinerja keuangan menunjukkan pencapaian terhadap target Rencana Bisnis Bank (RBB) untuk tahun 2017. Pencapaian profitabilitas terhadap target RBB

In general, the financial performance of the Bank was on par with the targets stated in the Bank's 2017 RBB. Profitability, however, did not meet the target stated in the RBB, owing to

belum tercapai karena adanya peningkatan pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan sebagai upaya untuk menjaga kualitas portofolio kredit, selain itu pada tahun 2017 Bank BNP melakukan pembayaran pajak atas pajak kurang bayar, yang menyebabkan profitabilitas Bank minus. Manajemen akan terus berupaya melakukan perbaikan seluruh rangkaian proses dan kualitas *monitoring* bisnis dan operasionalnya dengan menerapkan prinsip *prudential banking*. Pada tahun 2018 Bank memproyeksikan pertumbuhan volume bisnis dan perolehan laba yang positif.

the creation of allowance for impairment losses of financial assets as a measure to maintain lending portfolio's quality, and moreover in 2017 Bank BNP made tax payments for the tax underpayment of the previous years. All this resulted in a negative profit of the Bank. The management shall be continuously striving to improve all the processes as well as its business and operational monitoring quality by implementing the principle of prudential banking. For 2018, the Bank projects growth in terms of business volume and positive profitability.

Kenaikan/Penurunan Material dari Pendapatan Usaha/Bersih

Pada tahun 2017 pendapatan bersih Bank mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 835% atau menjadi minus Rp59,66 miliar dari sebelumnya Rp8,11 miliar pada tahun 2016. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya beban operasional lainnya yang mengalami kenaikan sebesar 11,16% di tahun 2017. Salah satu penyebab dari kenaikan beban operasional lainnya karena Bank harus membentuk cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan yang cukup besar dalam rangka menjaga kualitas rasio NPL yang meningkat sebesar Rp37,31 miliar atau 36,90% dari periode yang sama tahun lalu menjadi Rp138,43 miliar pada tahun 2017. Pendapatan Bank juga mengalami penurunan pada pendapatan bunga bersih sebesar Rp5,89% dalam periode yang sama. Pada tahun 2017 Bank juga melakukan pembayaran pajak kurang bayar selama periode 2013 dan 2014.

Material Increase/Decline in Operating/Net Income

In 2017 the Bank's net income decreased significantly by 835%, to a net loss of Rp59.66 billion, from a net income of Rp8.11 billion in 2016. This was owing to the increase in other operating expenses by 11.16% in 2017. One of the drivers of this increase in other operating expenses was the fact that the Bank had to form allowance for impairment losses on financial assets whose amount was substantial in order to mitigate its rising NPL, which surged from Rp37.31 billion or 36.90% from the previous year to Rp138.43 billion in 2017. The Bank's revenue from net interest income also contracted by 5.89% within the same period. In 2017 the Bank also made payments of tax underpayment for the tax periods of 2013 and 2014.

Struktur Permodalan dan Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal

Struktur permodalan Bank BNP berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/35/DPNP, tanggal 10 Desember 2012, saat ini terdiri dari Modal Inti (*Tier 1*) dan Modal Pelengkap (*Tier* 2) dengan uraian sebagaimana tertera dalam perhitungan rasio kecukupan modal (CAR), diungkapkan secara kuantitatif sebagai berikut:

Capital Structure and Management's Policy on Capital Structure

The capital structure of Bank BNP is governed by Bank Indonesia Circular Letter No. 14/35/DPNP, dated 10 December 2012, to consist of Core Capital (Tier 1 Capital) and Supplementary Capital (Tier 2 Capital) with the descriptions as stated in the Capital Adequacy Ratio (CAR), the quantitave disclosure thereof is given below:

dalam Jutaan Rupiah / in million Rupiah

Penjelasan	2017	2016	Description
Modal Inti (Tier1)			Tier 1 Capital
Modal disetor	338.417	338.417	Paid in Capital
Tambahan modal disetor bersih			Additional Paid in Capital Net
Agio	221.038	221.038	Agio
Cadangan umum	72.580	71.770	General Reserve
Laba bersih tahun sebelumnya	565.475	558.177	Net Income of previous year
Laba bersih tahun berjalan	(59.661)	8.109	Net Income for the year

Penjelasan	2017	2016	Description
Selisih kurang antara penyisihan penghapusan aset dan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan & aset non-keuangan	(21.076)	(13.625)	Difference between allowance for uncollectible accounts and allowance for impairment losses on financial assets and non-financial assets
Pajak tangguhan	-	-	Deferred taxes
Aset tidak berwujud lainnya	(14.097)	(3.227)	Other intangible assets
Jumlah	1.102.676	1.180.659	Total
Modal Pelengkap (*Tier* 2)			Supplementary Capital (Tier 2)
Cadangan umum atas aset produktif	54.825	50.484	General reserve of the productive assets
Pinjaman subordinasi	13.418	29.314	Subordinated loans
Jumlah Modal (*Tier* 1 dan *Tier* 2)	1.170.919	1.260.457	Capital Modal (Tier 1 & Tier 2)
Jumlah ATMR	6.690.796	6.127.141	Total ATMR
CAR setelah Risiko Kredit, Operasional, dan Pasar	17,50%	20,57%	CAR after the credit, operational, and market risk
Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang diwajibkan	8,00%	8,00%	Capital Adequacy Ratio required

Pengungkapan Permodalan Bank secara Kualitatif, menyangkut unsur/instrumen permodalan yang diterbitkan oleh Bank dalam rangka menyokong permodalan, diuraikan berikut ini:

Qualitative Disclosures of the Bank's Capital, involving elements/capital instruments issued by the Bank in order to bolster capital, are outlined below:

Instrumen Permodalan Bank BNP untuk *Tier* 1/Modal Inti terdiri dari Modal Disetor yang berdasarkan jumlah Saham Biasa yang telah diterbitkan oleh Bank BNP sebanyak 676.833.822 lembar dengan nominal Rp500 (Rp338.416.941.000 atau dibulatkan menjadi Rp338,417 juta).

Bank BNP's Tier 1 Capital consists of Paid-in Capital that is based on the number of Common Shares issued by Bank BNP, i.e. as many as 676,833,882 shares, with nominal value of Rp500 (Rp338,416,941,000 or rounded up to Rp338,417 million).

Tambahan Modal Bersih bersumber dari agio hasil emisi saham (selisih harga nominal saham perlembar dengan harga pelaksanaan pada saat emisi) setelah dikurangi keseluruhan Biaya Emisi Saham.

Additional sources of Additional Paid-In Capital were the net proceeds of the shares (the difference between the nominal price per strip stock at an exercise price at the time of emission) net of issuance costs overall.

Komponen lainnya adalah pembentukan cadangan umum sebesar 10% dari laba bersih Bank BNP selama ini terakumulasi, dan adanya Laba hasil usaha tahun sebelumnya yang tidak dibagikan pada tahun berikutnya disimpan sebagai laba ditahan (*retained earnings*) atau laba yang belum ditentukan tujuannya.

Other components are the establishment of general reserves amounting to 10% of the accumulated Bank's net profit, and the profit from the previous year, which had not been distributed and was kept as unappropriated retained earnings.

Sedangkan untuk Komponen Modal Pelengkap, selain Cadangan Umum atas Aset Produktif, juga terdapat Pinjaman Subordinasi dari ACOM CO., LTD, sebesar USD 5,934 juta dengan jangka waktu 7 (tujuh) tahun.

As for the Supplementary Capital Components, in addition to General Reserves on Earning Assets, there was also a subordinated loan from ACOM CO., LTD, at $5.934 million with a tenure of 7 (seven) years.

Kebijakan Manajemen Atas Struktur Modal

Kebijakan pengelolaan modal bertujuan untuk memastikan bahwa Bank BNP memiliki modal yang kuat dalam mendukung strategi pengembangan usaha Bank saat ini dan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan di masa mendatang. Kebijakan ini juga disusun dengan memperhatikan persyaratan permodalan yang ditentukan oleh regulator. Pada tahun 2017, seluruh kebutuhan permodalan Bank dapat terpenuhi dari pertumbuhan modal secara organik. Bank BNP memandang tidak melakukan penambahan modal akan tetapi manajemen mewaspadai perkembangan makro ekonomi khususnya perbankan dengan risiko-risikonya yang dapat berdampak terhadap tergerusnya permodalan Bank, tentunya dengan memperhatikan masukan dan bimbingan dari otoritas

Management's Policy on Capital Structure

The management's policy on capital structure has the purpose of ensuring that Bank BNP has a strong capital to support the current business development strategy as well as ensuring a sustainable growth in the future. This policy has also been formulated by taking into consideration the capital adequacy requirements determined by the regulators. In 2017, all capital requirements of the Bank were fully met through organic growth of capital. Bank BNP sees that it does require need any capital injection, although the management is closely watching the macroeconomic developments, especially in the banking sector, along with the associated risks that may result in the diminishing of the Bank's capital, taking into consideration the recommendations and guidance from the relevant authorities.

Ikatan Material Terkait Investasi Barang Modal

Bank tidak memiliki ikatan material terkait investasi barang modal yang dilakukan di tahun 2017. Seluruh kegiatan investasi barang dalam bentuk penambahan mesin kantor, perlengkapan, dan perabotan kantor, dibiayai oleh Bank dalam mata uang rupiah.

Atas barang modal tersebut, telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan pencurian dengan nilai pertanggungan seluruhnya pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp176,08 miliar.

Manajemen Bank berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset tetap yang dipertanggungkan.

Material Commitments Related to Investments In Capital Goods

The Bank did not have any material commitments in relation to investments of capital in 2016. All activities related to the investment in capital goods, involving office machinery and office equipment, were fully financed by the Bank in rupiah currency.

Such capital goods are covered by insurance against losses by fire and theft, with a total insurance coverage of Rp176.08 billion.

The management of the Bank believes that the amount is adequate to cover possible losses of the fixed assets that have been insured against such risks.

Investasi Barang Modal

Selama tahun 2017, Bank telah melakukan investasi barang modal yang dibutuhkan untuk tujuan kegiatan operasional Bank dengan jumlah biaya perolehan mencapai Rp11,89 miliar. Kegiatan investasi barang modal tersebut dalam bentuk penambahan mesin kantor sebesar Rp2,11 miliar, perlengkapan dan perabotan kantor sebesar Rp9,78 miliar.

Investments in Capital Goods

In 2016 the Bank made an investment in capital goods required for the Bank's operational activities, with a total acquisition value of Rp11.89 billion. The capital goods included the addition of office machinery with the value of Rp2.11 billion, and office equipment with the value of Rp9.78 billion.

Komitment dan Kontijensi

Bank BNP mempunyai komitmen dan kontijensi. Ikhtisar komitmen dan kontijensi Bank yang dinyatakan dalam nilai kontrak sebagai berikut:

Commitments and Contingencies

Bank BNP has certain commitments and contingencies. The summary of Bank BNP's commitments and contingencies stated in their contract values are as follows:

Komitmen & Kontijensi **Commitments & Contingencies**

dalam ribuan rupiah (in Rp thousand)

Keterangan	2017	2016	Description
Tagihan Komitmen			Commitment Receivables
Pembelian valuta asing tunai yang belum diselesaikan	-	-	Unsettled purchase of spot foreign currency
Jumlah tagihan komitmen	-	-	Total commitment receivables
Liabilitas Komitmen			Commitment Liabilities
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan	(1,566,845,422)	(1,578,986,781)	Unused loan facilities
Penjualan valuta asing tunai yang belum diselesaikan	-	-	Unsettled sales of spot foreign currency
L/C yang *irrevocable* dan masih berjalan			Outstanding irrevocable letters of credit
Pihak ketiga	(2,609,369)	(19,481,351)	Third parties
Pihak berelasi	(8,581,275)	(26,877,100)	Related parties
Jumlah liabilitas komitmen	(1,578,036,066)	(1,625,345,232)	Total commitment liabilities
Jumlah liabilitas komitmen – bersih	(1,578,036,066)	(1,625,345,232)	Total commitment liabilities – net
Kontinjensi			**Contingencies**
Tagihan Kontinjensi			Contingent Receivables
Pendapatan bunga dalam penyelesaian	142,175,593	72,751,876	Past due interest receivable
Liabilitas Kontinjensi			Contingent Liabilities
Garansi yang diterbitkan dalam bentuk:			Guarantees issued in the form of:
Garansi penawaran Rupiah	(13,643,663)	(9,282,764)	Bid bonds – Rupiah
Garansi pelaksanaan Rupiah	(42,868,982)	(41,976,536)	Performance bonds – Rupiah
Garansi uang muka Rupiah	-	-	Advance payment bonds – Rupiah
Lain-lain Rupiah	-	-	Others – Rupiah
Jumlah liabilitas kontinjensi	(56,512,645)	(51,259,300)	Total contingent liabilities
Jumlah liabilitas kontinjensi –bersih	85,662,948	21,492,576	Total contingent liabilities – net
Lain-lain Titipan kliring	(23,117,883)	(51,635,213)	Others – Funds for clearing
Jumlah liabilitas komitmen dan kontinjensi	(1,515,491,001)	(1,655,487,869)	Total contingent and commitment liabilities

Kebijakan Dividen

Pelaksanaan kebijakan pembagian dan penetapan dividen bagi Bank BNP merupakan kewenangan mutlak Pemegang Saham. Direksi hanya dapat mengusulkan formula perhitungan dan besarannya, dan keputusan akhir terletak pada kesepakatan Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

Pembagian dividen diatur sedemikian rupa sehingga tercapai keseimbangan yang baik antara kepentingan Pemegang Saham, kesehatan keuangan, dan pertumbuhan Bank, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Bank dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar.

Dalam Kebijakan Dividen yang dituangkan pada Prospektus Bank BNP saat melakukan aksi korporasinya, dinyatakan

Dividend Policy

Implementing the dividends distribution policy in Bank BNP is the sole authority of the Shareholders. The Board of Directors may only propose the formula for the calculation of its amount, and the final decision is made upon the agreement of the Shareholders at the General Meeting of Shareholders.

Distribution of dividends is arranged such that there is a good balance between the interests of Shareholders, and the Bank's financial health and growth, without compromising the financial soundness of the Bank and without prejudice to the right of the GMS to determine otherwise in accordance with the Articles of Association.

In the Dividend Policy as outlined in the Prospectus of Bank BNP at the time of its corporate action, it is declared

komitmen pembagian dividen tunai sekurang-kurangnya 10% (sepuluh per seratus) dengan memperhatikan kondisi keuangan dan permodalan Bank saat itu.

Pada pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2017 untuk tahun Buku 2016 telah disepakati untuk tidak membagikan dividen kepada para Pemegang Saham.

Informasi pelaksanaan pembagian dividen tercantum pada tabel berikut ini:

that a cash dividend of at least 10% (ten per cent) will be distributed, taking into consideration the Bank's financial situation and capital at the time.

At the General Meeting of Shareholders in 2017 for FY 2016, it was decided that dividends will not be distributed to the Shareholders.

Information on the dividend distribution is provided the following table:

No	Tahun Buku / Fiscal Year	Laba Bersih (Rp Juta) / Net Income (Rp Million)	Jumlah Dividen (Rp Juta) / Total Dividend (Rp Million)	% Dividend / Dividend Payout Ratio	Dividen Tunai per Saham / Cash Dividends per Share	Jumlah Lembar Saham (ribu) / Number of Shares (thousand)
1	2000	12.201	9.000	73,76%	60	150.000
2	2001	18.238	5.550	30,43%	37	150.000
3	2002	18.245	9.000	49,33%	60	150.000
4	2003	21.263	9.497	44,66%	60	158.275
5	2004	28.044	9.971	35,55%	63	158.275
6	2010	51.085	4.748	9,29%	11	416.513
7	2011	68.146	7.081	10,39%	17	416.513
8	2012	85.430	8.799	10,30%	13	676.833
9	2013	105.234	10.829	10,29%	16	676.833
10	2014	96.532	9.476	9,82%	14	676.833
11	2015	66.867	6.092	9,11%	9	676.833
12	2016	8.108	-	-	-	676.833

Realisasi Dana Hasil Penawaran Umum

Pada 2 Mei 2013, Bank BNP melakukan Penawaran Umum Terbatas III dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak 260.320.724 lembar saham dari 17 Mei 2013 sampai dengan 23 Mei 2013 dengan harga penawaran sebesar Rp1.150 (nilai penuh) per saham.

100% dana hasil PUT III tersebut telah habis digunakan sebagai modal kerja untuk penyaluran dan pemberian kredit dan dilaporkan pada pelaksanaan RUPS Tahunan untuk tahun buku 2014.

Dengan demikian, untuk tahun-tahun berikutnya, Bank BNP tidak lagi berkewajiban melaporkan hal tersebut.

Actual Use of Public Offering Proceeds

On 2 May 2013, Bank BNP performed the Rights Issue III for the issuance of as many 260,320,724 Preemptive Rights (HMETD), in the period that started from 17 May 2013 and ended on 23 May 2013, with the offering price of Rp1,150 (full amount) per share.

The entire proceeds (100%) from the Rights Issue III have been used up for working capital for lending activities, as reported at the Annual General Meeting of Shareholders for FY 2014.

Thus for the subsequent years Bank BNP have not had any obligation to report on such use of public offering proceeds.

Derivatif dan Fasilitas Lindung Nilai

Bank BNP, sekalipun beroperasi sebagai bank devisa, namun belum melakukan transaksi berikut turunannya, dan sepanjang tahun 2017 Bank tidak melakukan transaksi derivative atau lindung nilai apapun.

Derivatives and Hedging

Although it has a license to operate as a foreign exchange bank, Bank BNP did not conduct any derivative or hedging transactions nor was involved in such transactions in 2017.

Program Kepemilikan Saham oleh Manajemen dan Karyawan

Hingga tahun 2017 Bank BNP tidak menerapkan program kepemilikan saham oleh manajemen dan karyawan, namun sebagai realisasi dari kepatuhan terhadap ketentuan di Pasar Modal, Bank BNP telah memenuhi jumlah pemegang saham minimum sebagai perusahaan terbuka yaitu sekurang-kurangnya 300 (tiga ratus) pemegang saham yang telah dipenuhi pada bulan Oktober 2016, di mana pemegang saham baru tersebut merupakan karyawan Bank BNP, serta kepemilikannya bukan merupakan/berasal dari program MSOP/ESOP namun perolehan murni dari perdagangan di Pasar Saham.

Berikut ini adalah informasi kepemilikan saham yang dimiliki oleh Direksi, Komisaris dan karyawan:

Management and Employee Share Option Program

Up to 2017 Bank BNP had not implemented any management and employee share option program (MSOP/ESOP). However, in accordance with the provisions in the Capital Market, Bank BNP has adhered to the provision on minimum number of shareholders for public companies, i.e. at least 300 (three hundred) shareholders, which had been met in October 2016, whereby the new shareholders were employees of Bank BNP, and the ownership was not derived from the MSOP/ESOP, but instead purely via trading in the stock market.

The following are details on share ownership by the Board of Directors, the Board of Commissioners, and employees of the Bank:

Nama Name	**Jabatan** **Position**	**Jumlah Saham** Number of Shares	**Persentase** Percentage
Tatang Hermawan	Komisaris/Commissioner	12.001.000	1,77%
Kevin Cahyadi Tatang	Direktur/Director	100	0,00%
Markus Sugiono	Direktur/Director	100	0,00%
Trie Karjati Wibowo	Direktur/Director	100	0,00%
Karyawan		29.700	0,00%

Informasi Keuangan Luar Biasa dan Jarang Terjadi

Di tahun 2017 tidak terdapat informasi keuangan yang luar biasa dan jarang terjadi di Bank.

Rare and Extraordinary Financial Events

In 2017 there were no rare or extraordinary financial events taking place in the Bank.

Informasi Material Mengenai Investasi, Divestasi, Restrukturisasi Utang/Modal

Di tahun 2017, tidak terdapat transaksi material mengenai investasi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi atau restrukturisasi utang/modal.

Material Information Regarding Investments, Divestments, and Debt/Capital Restructuring

In 2017 there were no material transactions involving investments, divestments, mergers, acquisitions, or debt/capital restructuring.

Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi

Selama tahun 2017, Bank BNP tidak terdapat transaksi yang bersifat materil dan mengandung benturan kepentingan, namun terdapat transaksi antara Bank BNP dengan pihak-pihak berelasi/terafiliasi dengan Bank, diantaranya

Material Transactions with Conflict of Interest or Transactions with Related Parties

In 2017 Bank BNP did not conduct any material transactions with conflict of interest. However, certain transactions took place between Bank BNP and related parties, such as between the Bank and the Shareholders, the Commissioners,

Pemegang Saham, Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif, dan Karyawan. Transaksi tersebut meliputi kegiatan pokok/utama Bank BNP seperti pemberian pinjaman dan penghimpunan dana serta beberapa transaksi sewa-menyewa yang telah dipenuhi sesuai ketentuan sebagaimana terurai dalam Catatan 37 atas Laporan Keuangan Bank BNP Tahun 2017 (dalam ribuan rupiah).

the Directors, Executive Officers, and Employees. These transactions covered the main activities of Bank BNP, such as lending and funding, and a number of lease transactions compliant with the prevailing regulations, as stated in Note 37 to Bank BNP's 2017 Financial Statements (stated in thousand of rupiah).

dalam ribuan rupiah / (in Rp thousand)

Keterangan	2017	2016	Description
Aset			**Assets**
Kredit	72,232,249	41,294,197	Loans
Giro pada Bank Lain	6,849,926	748,736	Demand Deposits with Other Banks
Liabilitas			**Liabilities**
Simpanan	331,486,860	508,696,165	Deposits
Giro	110,517,186	194,995,186	Demand Deposits
Tabungan	26,761,792	38,377,215	Saving Deposits
Deposito Berjangka	194,207,882	275,323,764	Time Deposits
Utang Akseptasi	-	4,011,504	Acceptance Payables
Pinjaman Subordinasi	80,509,545	79,945,815	Subordinated Loans
Letter of Credit/Usance	8,581,275	26,877,100	Letter of Credit/Usance
Bank Garansi	-	-	Bank Guarantees

Informasi dan Fakta Material Setelah Tanggal Laporan Akuntan

Di tahun 2017, Bank BNP tidak mengalami kejadian penting yang berpengaruh cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Bank, yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen No. GA118 0140 BNP RW tanggal 7 Maret 2018 atas laporan keuangan untuk periode 1 (satu) tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan telah diaudit oleh KAP Satrio Bing Eny & Rekan, dengan pendapat "wajar tanpa modifikasi".

Subsequent Facts and Information

In 2017, there were no significant events experienced by the Bank that resulted in a material change to the Bank's financial condition and business results, which occurred subsequent to the date of the Independent Auditor's Report No. GA118 0140 BNP RW dated 7 March 2018, on the financial statements for the period of 1 (one) year ended 31 December 2017, as audited by the KAP Satrio Bing Eny & Rekan, which resulted in an "unmodified opinion".

Perubahan Kebijakan Akuntansi yang Berdampak Terhadap Kinerja Keuangan

Di tahun 2017 tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi yang berlaku yang berdampak signifikan terhadap kinerja keuangan Bank.

Changes in Accounting Principles Bearing Significant Impact on Financial Performance

In 2017 there were no changes to the prevailing accounting principles that had any significant impact on the Bank's financial performance.

Aspek Pemasaran

Tahun 2017 merupakan tahun yang bisa disebut tahun titik balik BNP untuk kembali bertumbuh. Hal ini merupakan hasil dari strategi bisnis dan pemasaran yang diterapkan dengan

Marketing Aspect

The year 2017 was a tipping-point year for Bank BNP as it was poised to continue its growth. This was a result of the business and marketing strategies that had been focused

fokus pada *target market*, perbaikan proses kerja, pengkajian secara komprehensif yang semuanya dapat mendukung pencapaian strategi pemasaran yang terintegrasi, agar dapat mendukung pencapaian target Bank.

Dalam menerapkan strategi pemasaran, Bank BNP telah banyak melakukan perbaikan di banyak aspek yang bertujuan untuk mencapai target Bank dengan efektif dan efisien, beberapa upaya yang dilakukan, antara lain:

1. Melakukan redefinisi terhadap visi, misi dan *tagline* Bank BNP yang lebih tajam, fokus dan jelas untuk menjadi mitra bisnis nasabah, serta meluncurkan *tagline* "Dari Parahyangan Untuk Nusantara".
2. Penghimpunan dana yang lebih difokuskan pada COF yang lebih rendah melalui Tabungan Sakura, Tabungan Japan, dan program tabungan lainnya. Selain itu, Bank mengadakan program untuk mengakuisisi deposan baru. Kebijakan suku bunga penghimpunan dana ini juga tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku, speerti SBDK, Suku Bunga Bank Indonesia (*7-Day Repo Rate*) dengan memperhitungkan kondisi internal dan eksternal Bank, diantaranya COF dan COM, serta tingkat suku bunga pasar (pesaing).
3. Melakukan reorganisasi dengan tujuan untuk memberikan solusi yang lebih baik kepada nasabah BNP, yaitu dengan adanya fokus kepada penyaluran kredit dan juga kepada layanan, operasional, dan penghimpunan dana. Di setiap kota besar, dibuat organisasi Central Lending yang disesuaikan dengan potensi pasar daerah tersebut. Semua ini bertujuan untuk memberikan layanan dan solusi yang lebih baik kepada debitur, mengakuisisi debitur baru, meningkatkan KYC dan juga kualitas *monitoring*.
4. Membuat inisiatif *BNP Business Club* yang bertujuan memberikan nilai tambah kepada mitra bisnis BNP melalui forum diskusi antar mitra bisnis dan atau juga melalui forum diskusi dan *talk show* dengan instansi seperti pajak, dsb. Ini bertujuan agar terjadi *business matching* antara sesama mitra bisnis dan juga agar semua nasabah BNP *update* terhadap peraturan yang berlaku. Selain itu, ini bertujuan membantu pemerintah mensosialisasikan peraturan yang berlaku dan berpengaruh terhadap mitra bisnis.
5. Meneruskan dan meningkatkan *service campaign* TOUCH yang bertujuan untuk memberikan standar layanan yang lebih baik melalui layanan yang tulus dan mengena di hati nasabah.
6. Pengembangan Produk dan Aktivitas Baru dalam upaya mendukung akselerasi bisnis Bank BNP dan meningkatkan layanan dan kepuasan kepada nasabah. Ini termasuk melakukan penetrasi pasar melalui peluncuran produk, antara lain: *Smart Hospital Plan*, dan produk dan aktivitas baru yang disertai dengan kegiatan

on the proper target market, work process improvements, and comprehensive reviews, all of which have supported the integrated marketing strategy of the Bank, so as to achieve the Bank's targets.

In implementing its marketing strategy, Bank BNP have made numerous improvements in various aspects, all aimed at achieving the targets effectively and efficiently, encompassing the following initiatives:

1. Redefining the vision, mission, and tagline of Bank BNP to make them sharper, more focused and clearer, that is, to become the customers' business partner, and launching the tagline of "From Parahyangan For Nusantara".
2. Funding was more focused on obtaining low COF through Sakura, Japan, and other savings products. In addition, the Bank implemented programs to acquire new customers for its time deposit products. The low funding interest rate policy also took into account the prevailing regulations, such as SBDK, Bank Indonesia's 7-Day Repo Rate, the Bank's internal and external conditions, among others COF and COM, and competitors' interest rate.
3. Reorganized the Bank to provide better solutions for BNP customers, by focusing on lending as well as on service, operations, and funding. In each of the major cities, a Central Lending unit has been organized and geared to harness the potentials of the specific areas. All these efforts were undertaken in order to provide better service and solutions to debtors, to acquire new debtors, to improve KYC, and also to enhance monitoring quality.
4. Established the BNP Business Club to provide added value to BNP's business partners via discussions forum amongst business partners as well as via other discussion forums and talk shows with authorities, such as the Tax Office. This was intended to promote business matching between business partners, as well as to update all BNP customers regarding the prevailing regulations. In addition, this also helped the government disseminate the latest regulations that may affect the Bank's business partners.
5. Continuing and improving the TOUCH service campaign, aimed at providing the best level of service through sincere attention and service that touches the customers' hearts.
6. Developing New Products and Activities to accelerate Bank BNP's business and improve service to customers to boost their level of satisfaction. This included market penetration via product launchings, among others: Smart Hospital Plan, and other new products and activities accompianed by promotional activities, to further

promosi, sehingga *brand awareness* Bank BNP semakin meluas. Salah satu bentuk promosi untuk memperkuat *brand image* dan *tagline* BNP adalah melalui pembuatan kalendar 2018.

7. Memantau *customer needs* dan juga menganalisis pergerakan bisnis dari kompetitor lainnya, agar Bank BNP dapat terus berkembang sesuai dengan persaingan industrinya.
8. Khusus untuk pemasaran Kredit Tanpa Agunan (MIRAI+), saat ini kegiatan *Direct Sales* selain melalui kantor pemasaran khusus KTA juga dilakukan melalui beberapa rangkaian pameran (*exhibition*) diantaranya *Car Free Day*, Pameran KTA langsung ke lokasi calon nasabah.
9. Pemanfaatan Sosial Media, seperti Facebook dan Twitter. Tujuan Bank BNP memakai sosial media untuk pemasaran adalah karena Facebook dan Twitter saat ini sudah menjadi salah satu bagian penting dalam kehidupan masyarakat, tidak hanya di Indonesia, tetapi di dunia. Selain banyak digunakan untuk bersosialisasi, tidak sedikit juga masyarakat yang menggunakan sosial media untuk berbisnis.

improve Bank BNP's brand awareness and standing in the public. One of the promotional efforts to strengthen Bank BNP's brand image and tagline was the production of the 2018 calendar.

7. Monitoring customer needs and analyzing business movements from other competitors, so that Bank BNP can continue to progress in the midst of the competition in the industry.
8. Specifically for the marketing of KTA MIRAI+ (unsecured loan product), currently the Direct Sales' activities are conducted via the KTA dedicated marketing offices as well as via various exhibitions, among others Car Free Day, and direct KTA exhibition to the locations of prospective customers.
9. Utilizing social media such as Facebook and Twitter. Bank BNP is using social media for marketing as Facebook and Twitter are now widely used as a key element in the Indonesian society, as well as the world's. In addition to being used for socializing, social media applications have also been used by the public to do business.

Prospek Usaha

Kondisi keuangan dan prospek usaha Bank di masa yang akan datang tidak terlepas dari pengaruh kondisi perekonomian global serta pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi global 2018 diperkirakan meningkat dan diikuti kenaikan harga komoditas dunia. Peningkatan pertumbuhan ekonomi global bersumber dari perbaikan ekonomi negara maju dan negara berkembang yang lebih kuat dari perkiraan semula.

Di negara maju, pertumbuhan ekonomi AS diprakirakan meningkat ditopang oleh investasi dan konsumsi yang menguat seiring optimisme terhadap reformasi pajak di AS. Ekonomi Eropa juga diprakirakan tumbuh lebih baik, didukung oleh perbaikan ekspor dan konsumsi serta kebijakan moneter yang akomodatif.

Di negara berkembang, pertumbuhan ekonomi Tiongkok diprakirakan tetap tumbuh tinggi terutama didorong oleh ekspor seiring peningkatan permintaan, khususnya dari negara maju. Prospek pemulihan ekonomi global yang membaik tersebut akan meningkatkan aktivitas perdagangan dunia dan harga komoditas global, termasuk minyak bumi, pada 2018.

Perekonomian Indonesia terus menunjukkan kinerja yang membaik dengan struktur yang lebih berimbang. Realisasi pertumbuhan PDB triwulan IV 2017 yang membaik menjadi 5,19% (yoy) dari 5,06% (yoy) pada triwulan

Business Prospect

The Bank's future financial condition and business prospect will be inseparable from the condition of the global economy and the growth of the national economy. In 2018, global economic growth rate is expected to rise, followed by the rise in global commodity prices. The rising global economic growth will be derived from improving economy in the developed countries and stronger-than-initially-expected growth in developing countries.

Among developed nations, the US's economic growth will strengthen owing to the stronger investment and consumption, in line with greater optimism associated with the US tax reform. European economies are also expected to fare better, supported by strengthening of export and consumption and accomodating monetary policies.

Meanwhile, among developing nations, China's economic growth is expected to improve, bolstered by export that is underpinned by increased demand, especially from developed countries. The better prospect of global economic recovery will boost global trading activities as well as global commodity prices, including oil, in 2018.

The Indonesian economy continues to show improving performance with greater structural balance. In the fourth quarter of 2017, GDP growth improved from 5.19% (yoy) from 5.06% (yoy) recorded in the previous quarter, showing

sebelumnya menunjukkan terus berlangsungnya proses pemulihan ekonomi domestik. Perbaikan pertumbuhan ekonomi tersebut juga didukung struktur yang lebih kuat dengan investasi dan ekspor sebagai sumber utama pertumbuhan. Investasi tumbuh cukup tinggi 7,27% (yoy) didorong kenaikan investasi bangunan sejalan berlanjutnya pembangunan infrastruktur dan meningkatnya investasi nonbangunan sebagai antisipasi peningkatan permintaan ke depan. Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi 2018 berada pada kisaran 5,1-5,5%. Pertumbuhan ekonomi tersebut akan didukung oleh investasi seiring dengan berlanjutnya proyek infrastruktur dan terus meningkatnya investasi nonbangunan termasuk investasi swasta, khususnya mesin dan perlengkapan. Selain itu, ekspor diperkirakan tetap tumbuh cukup tinggi seiring dengan berlanjutnya pemulihan ekonomi dunia dan harga komoditas yang tetap tinggi.

a continuation of the domestic economic recovery. Such improvement in the economy was also underpinned by a stronger structure where investments and exports serve as the main drivers of growth. Investment grew 7.27% (yoy) on the back of increased spending for buildings, in line with the ongoing infrastructure development programs and increasing non-building investments in anticipation of stronger demands in the future. Bank Indonesia predicts that economic growth in 2018 will be in the range of 5.1% to 5.5%. Such growth will be supported by investment, as infrastructure projects are ongoing, and non-building investments, including private ones in particular in machinery and equipment, continue to be made. In addition, export is also expected to grow substantially, in line with the global economic recovery and strong commodity prices in the global markets.

Kondisi sistem keuangan tetap stabil di tengah intermediasi perbankan yang belum kuat. Terjaganya stabilitas sistem keuangan tercermin pada rasio kecukupan modal (CAR) perbankan yang cukup tinggi mencapai 23,0% dan rasio likuiditas (AL/DPK) sebesar 21,5% pada Desember 2017. Transmisi pelonggaran kebijakan moneter dan makroprudensial melalui jalur suku bunga terus berlangsung. Meski demikian, transmisi melalui jalur kredit masih belum optimal sejalan dengan permintaan kredit yang belum tinggi dan perilaku bank yang masih selektif dalam memberikan kredit baru. Dengan perbaikan ekonomi dan kemajuan program konsolidasi korporasi dan perbankan, Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan Kredit dan DPK akan lebih baik pada 2018, masing-masing dalam kisaran 10,0-12,0% (yoy) dan 9,0-11,0% (yoy).

A relatively stable financial system will be maintained even when the banking intermediary functions are still relatively fragile. The financial system will be stably maintained as demonstrated by the capital adequacy ratio (CAR) in banking that remained high at 23.0% and liquidity ratio held at 21.5% in December 2017. The transmission of monetary easing policy and macroprudential policy via the setting of interest rate is ongoing. However, transmission via lending is not yet optimal, in line with the weak demand for loans and banks' selectiveness in extending new loans. With the improving economy and progress in the corporation and banking consolidation program, Bank Indonesia expects total lending and third-party funds to improve in 2018, each posting a growth rate of around 10.0% to 12.0% (yoy) and 9.0% to 11.0% (yoy), respectively.

Dalam kondisi persaingan dalam industri perbankan yang semakin kompetitif, pemegang saham, manajemen dan sumber daya manusia di Bank berkomitmen untuk mempertahankan dan mengembangkan keunggulan kompetitif dengan memperhatikan posisi Bank di pasar.

Amidst increasing competition in the banking industry, the shareholders, the management, and all employees of the Bank remain committed to maintaining and cultivating its competitive advantages by taking into account the Bank's position in the market.

Di tahun 2018 Bank mengambil langkah-langkah strategis untuk memperkuat organisasi, optimalisasi jaringan kantor yang ada, serta meningkatkan volume usaha dengan tetap berasaskan pronsip kehati-hatian (*prudential banking*), dan Bank akan senantiasa melaksanakan praktik tata kelola perusahaan yang baik.

In 2018 the Bank will undertake certain strategic measures to strengthen the organization, optimize existing office network, and increase business volume by adhering to the principle of prudential banking, and the Bank will continue its implementation of good corporate governance practices.

Arah Kebijakan Bank

1. Berperan aktif dalam pembiayaan pasar ritel di Indonesia, termasuk tetap menjaga pembiayaan pada sektor UMKM.

Policy Direction of the Bank

1. Actively participating in the retail financing market in Indonesia, including to maintain financing in the MSME sector.

2. Fokus pada perbaikan kualitas bisnis melalui mekanisme perbaikan proses kredit dan operasionalisasi yang lebih mengedepankan *Risk Based Approach*.
3. Menjaga tingkat kecukupan modal sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam API (Arsitektur Perbankan Indonesia).
4. Terus-menerus mengupayakan tingkat kesehatan Bank, *risk profile* dan indikator nilai komposit yang baik secara khusus dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik.
5. Memastikan Fungsi intermediasi berjalan sesuai dengan ketentuan dan perolehan laba yang positif.

6. Menerbitkan dan mengembangkan Aktivitas dan Produk perbankan sesuai pada ketentuan yang diatur pada kelompok BUKU 2 (dua).
7. Mengupayakan pemenuhan kebutuhan nasabah dengan melengkapi fitur-fitur yang dapat berpotensi menjaring pasar baru.
8. Melakukan optimalisasi jaringan kantor disesuaikan dengan strategi bisnis sehingga dapat mendorong upaya efisiensi dan efektivitas bisnis.
9. Mendukung upaya akselerasi bisnis, *improvement* model dan proses bisnis – operasional antara lain dengan melakukan perubahan struktur organisasi bisnis dan operasional.

2. Focusing on business quality improvement through the lending process improvement mechanism and risk-based approach implementation in operations.
3. Maintaining capital adequacy ratio in line with the provisions in the Indonesian Banking Architecture (API).
4. Maintaining the Bank's soundness level, risk profile, and excellent composite score especially in terms of good corporate governance implementation.
5. Ensuring the well-functioning of the intermediation system in line with the regulations and positive profitability.
6. Launching and developing new banking products and activities in accordance with the provisions for the BUKU 2 group of business activities.
7. Addressing all of the customers' needs by complementing the features that have the potential of acquiring new markets.
8. Optimizing the office network in alignment with the business strategy in order to sustain efforts to boost business efficiency and effectiveness.
9. Support business acceleration efforts, improvement model, and business – operational processes, among others by restructuring the business and operational organizations.

Tantangan Indonesia di Tahun 2018

Terlepas dari prediksi pertumbuhan ekonomi tahun 2018, perekonomian Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, baik yang datang dari eksternal atau global maupun domestik, diantaranya:

1. Faktor Eksternal/Global
   a. Risiko meningkatnya proteksionisme negara Amerika Serikat yang ingin meningkatkan tarif terhadap negara-negara tertentu dan hasil pemilihan umum di Prancis dan Jerman;
   b. Risiko yang dihadapi pemerintah RRT, yaitu tingginya tingkat hutang, terutama di korporasi, serta penyaluran kredit yang terlalu cepat;
   c. Ketidakpastian pasca-negosiasi Brexit, kemungkinan terburuk adalah ketika Brexit diikuti juga oleh negara-negara lain;
   d. Berlanjutnya kenaikan tingkat suku bunga di negara maju;
   e. Harga komoditas berada pada level yang rendah;
   f. Penurunan tingkat produktivitas di beberapa negara dunia dan fenomena *aging population* di negara-negara maju yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi global relatif terbatas;
   g. Risiko meningkatnya tensi geopolitik dan aksi terorisme di berbagai belahan dunia.

Challenges for Indonesia in 2018

Notwithstanding the economic growth predictions for 2018, the Indonesian economy remains fraught with many challenges, from both externally (globally) as well as from within. Some of these challenges are explained below:

1. External/Global Factors
   a. Risk of increasing protectionism by the US, in the form of tariff implementation against certain countries as well as from the results of general election in France and Germany;
   b. Risks faced by the Chinese government, i.e. mounting debt level, especially among corporations, and uncontrolled lending;
   c. Uncertainties post-Brexit negotiations, with the worst possible outcome being Brexit followed by the exit of other countries;
   d. Continuation of the hike in interest rates in developed economies;
   e. Low commodity prices;
   f. Decline of productivity in various countries around the world, and the aging population in developed countries that caps global economic growth;

   g. Risk of increasing geopolitical tension and terrorism activities in various regions around the world.

2. Faktor Internal/Domestik
   a. Terbatasnya ruang untuk stimulus fiskal yang disebabkan oleh rendahnya tingkat rasio penerimaan perpajakan, keseimbangan primer yang negatif dan tingkat defisit anggaran yang mendekati batas;
   b. Masih lemahnya aktivitas sektor swasta disebabkan penurunan permintaan, operasionalisasi industri masih berada di bawah kapasitas terpasang, serta meningkatnya *Non-Performing Loan*s (NPL);
   c. Tren penurunan pertumbuhan ekonomi potensial yang disebabkan rendahnya tingkat produktivitas, rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja, dan rendahnya jumlah kuantitas dan kualitas infrastruktur.

Langkah Strategis

Untuk mendukung komitmen terhadap pencapaian tujuan dan sasarannya pada tahun mendatang, Bank BNP melakukan beberapa langkah strategis berikut:

1. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan prinsip perbankan yang sehat, perbaikan *risk compliance governance*, serta peningkatan peran dan fungsi manajemen risiko;
2. Pengupayaan permodalan dan aktiva yang sehat;
3. Penerapan model bisnis yang sesuai dengan kekuatan BNP;
4. Peningkatan pengendalian internal: *dual control*, waskat, dan *three lines of defense;*
5. Perbaikan proses bisnis dan operasional: sarana, implementasi, dan *review;*
6. Peningkatan kompetensi SDM dan mewujudkan organisasi yang sehat;
7. Pengembangan teknologi informasi;
8. Optimalisasi jaringan kantor yang ada; serta
9. Peluncuran baru dan pengembangan produk dan aktivitas yang telah ada.

Dengan kondisi dan perspektif sebagaimana diuraikan di atas, pada tahun 2018 mendatang Bank BNP memproyeksikan pertumbuhan bisnisnya sebesar 7% dengan tetap menerapkan prinsip *prudential banking*, peningkatan pengendalian internal, dan penerapan proses bisnis yang baik.

Hal-Hal yang Berpotensi Berpengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha

Mencermati perkembangan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank BNP, pengelolaan risiko *inherent* atas delapan risiko yang dihadapi oleh Bank selama periode Q4-2017 secara

2. Internal/Domestic Factors
   a. Limited room for fiscal stimulus caused by low tax income ratio, negative primary balance, and budget deficit that approaches the limit;
   b. Weak economic activities in the private sector owing to declining demand, low industrial operating rate (below installed capacity), and rising Non-Performing Loans (NPL) ratio;
   c. The trend of declining economic growth potential owing to low productivity, low workforce participation rate, and low quantity and quality of infrastructure.

Strategic Measures

In an aim to support its commitment to achieving its goals and purposes in the coming years, Bank BNP is undertaking a number of strategic measures, namely:

1. Implementation of good corporate governance and sound banking principles, improvement of risk compliance governance, as well as improvement of risk management roles and functions;
2. Fostering of sound capital and assets;
3. Implementation of business models that are aligned with BNP's strengths;
4. Improvement of internal control: dual control, supervision, and three lines of defense;
5. Improvement of operational and business processes: means, implementation, and review;
6. Enhancement of human resources competence and sound organization;
7. Development of information technology;
8. Optimization of existing office network; and
9. Launching of new products and activities, and development of existing ones.

With the abovementioned conditions and perspectives, in 2018 Bank BNP is projecting business growth of 7%, by continuing to adhere to the principle of prudential banking, strengthening of internal control, and implementation of good business practices.

Issues with Significant Potential to Affect Business Continuity

Scrutinizing the development of Bank BNP's business activities, the management of inherent risks encompassing eight risks faced by the Bank throughout the Q4-2017

komposit tergolong ***Low to Moderate,*** dengan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (*Risk Control System*) dari kedelapan risiko tergolong ***Satisfactory***.

Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank BNP, di samping kondisi ekternal perusahaan/makro ekonomi, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank bersumber dari Risiko Kredit tergolong cukup tinggi dan memerlukan perhatian dengan segera, terkait dengan hal sebagai berikut:

- Portfolio penyediaan dana didominasi oleh eksposur kredit yang moderat.
- Terdapat konsentrasi penyediaan dana yang cukup signifikan.
- Penyediaan dana memiliki kualitas *moderate to high*.
- Portofolio penyediaan dana cukup terpengaruh dengan perubahan faktor eksternal.

Permasalahan yang dihadapi yang diprediksi berpotensi dan dapat berpengaruh pada kelangsungan usaha Bank BNP secara umum adalah antara lain:

a. Dengan kondisi makroekonomi yang berpengaruh terhadap kemampuan membayar debitur, maka Bank terekspose mengalami peningkatan rasio NPL *Gross* dan *Net*. Peningkatan rasio NPL antara lain dimungkinkan karena penurunan kualitas kredit dan penurunan porfolio kredit (Bank mengalami penurunan portofolio kredit sampai dengan Q3-2017, namun mengalami perbaikan pada Q4-2017 dengan pertumbuhan pinjaman sebesar 11,06% pada akhir Q4-2017 apabila dibandingkan posisi akhir Q3-2017), sehingga rasio NPL mulai mengalami perbaikan (tren menurun) selama periode Q4-2017.
b. Bank juga dihadapi oleh penurunan kualitas portfolio kredit mikro yang meningkatkan NPL dari perburukan/ penurunan kolektibilitas kredit Mikro.
c. Kondisi persaingan perbankan yang semakin ketat baik dalam hal pemberian suku bunga kredit, limit kredit, kecepatan proses persetujuan kredit, proses layanan, sehingga Bank berpotensi kehilangan potensial debitur yang berpindah ke bank lain.

d. Terkait peningkatan *inherent* risiko operasional dalam bidang perkreditan, masih diperlukan upaya peningkatan pemahaman proses pembelajaran dan evaluasi terhadap debitur bermasalah serta potensi debitur bermasalah melalui *Vintage Analysis*. Pemantauan atas hasil *Vintage Analysis* ditindaklanjuti dengan melakukan diskusi dengan divisi terkait sehingga Bank dapat mengetahui penyebab permasalahan dan tindakan mitigasi yang diperlukan.

as a composite is considered Low to Moderate, with the Risk Control System encompassing eight risks considered Satisfactory.

By taking into account Bank BNP's business activities, in addition to the external/macroeconomic conditions surrounding the Bank, the possibility of losses faced by the Bank arises from the relatively high Credit Risk which requires immediate attention, in regards to the following:

- Lending portfolio is dominated by a moderate level of credit exposure.
- There is a significant concentration of lending.

- Lending quality is considered Moderate to High.
- Lending portfolio is relatively affected by changes in external factors.

Issues that are currently faced and are predicted to potentially affect Bank BNP's business continuity in general are as follows:

a. With the current macroeconomic situation that may affect debtors' ability to repay their loans, the Bank is exposed to a risk of increasing NPL gross and NPL net ratios. The increase in NPL ratios may happen owing to the decline in lending quality and the decline in lending portfolio quality (the Bank's lending portfolio declined up to Q3-2017, however, it started to recover in Q4 2017, with loan growth of 11.06% by end of Q4-2017 vs. end of Q3-2017), and thus the NPL ratios showed certain improvement throughout the period of Q4-2017.

b. The Bank is also facing the risk of the decline in micro-lending portfolio quality, which increases NPL from the deteriorating collectibility of micro loans.
c. The ever-tighter competition in the banking industry, in terms of lending interest rate, lending limit, speed of loan facility applications approval, and service processes, resulted in the Bank's potentially facing a loss of potential debtors and having some of its existing debtors switch to other banks.
d. In relation to the increase in inherent operational risk in lending still requires a better understanding in the learning process and discussion as well as evaluation of troubled debtors and potential troubled debtors via Vintage Analysis. Monitoring of Vintage Analysis is followed up via discussions with related divisions so that the Bank can find out the root causes of the issues and the mitigative measures required.

e. Peningkatan risiko *inherent* dapat berakibat pada peningkatan risiko kredit dan berdampak pada risiko lain seperti risiko hukum, risiko reputasi, risiko stratejik, serta rentabilitas Bank, yang pada akhirnya berdampak pada penilaian GCG dan Tingkat Kesehatan Bank.

Menyikapi permasalahan tersebut, *assessment* dan kajian yang telah dilakukan manajemen Bank BNP dengan tetap berupaya untuk meningkatkan portfolio kredit (volume) dengan kualitas kredit yang baik/sehat untuk dapat mengimbangi laju *run off* dan peningkatan portfolio debitur bermasalah, melalui upaya dan kebijakan sebagai berikut:

- Penetapan *Risk Appetite* melalui penetapan *selected target market* dan pembiayaan kepada perusahaan pembiayaan dengan penetapan *Risk Acceptance Criteria* dan *Loan Pricing Strategy* sebagai upaya meningkatkan portofolio kredit pada beberapa sektor industri unggulan.
- Meningkatkan *Credit Risk Governance* dalam proses persetujuan kredit dan proses restrukturisasi kredit berdasarkan prinsip kehati-hatian melalui analisis 3 pilar.
- Membangun dan meningkatkan kepedulian bersama dalam upaya menjaga, memelihara dan menyelamatkan aset Bank dalam implementasi proses KYC (*Know Your Customer*) terhadap informasi calon debitur, kondisi usaha calon debitur secara transparan, luas dan mendalam.
- Meningkatkan fungsi *monitoring* dan kontrol terhadap potensi dan indikasi penurunan kualitas kredit baik secara individual maupun secara portfolio, melalui mekanisme *meeting* koordinasi yang dilakukan setiap bulan dan rapat panel perkreditan (*joint meeting BOD* dan *BOC* serta keseluruhan fungsional perkreditan) yang dilakukan setiap tiga bulanan.
- Melakukan identifikasi terhadap penanganan debitur besar secara lebih awal, yang berpotensi mengalami penurunan kualitas kredit.
- Meningkatkan diskusi dengan *risk taking unit* dengan melakukan sharing/pembahasan/diskusi terkait permasalahan yang terjadi dan dampak risikonya kepada bank atas hasil proses pemantauan risiko kredit melalui *Vintage Analysis* terhadap debitur yang mengalami tunggakan (debitur baru di bawah 1 tahun sejak dilakukan pengikatan kredit).
- Meningkatkan fungsi Komite Strategi Anti *Fraud*, untuk melakukan identifikasi terhadap potensi/indikasi *fraud* terhadap debitur bermasalah baik dari data internal (hasil pemeriksaan SKAI dan hasil identifikasi Divisi Manajemen Risiko) maupun eksternal bank (pengaduan nasabah/debitur).

e. The increase in inherent risk may result in the increase in lending risk, and may affect other risks, such as legal risk, reputation risk, profitability risk, strategic risk, and the Bank's profitability, which in turn may eventually affect the result of GCG Bank Soundness Level evaluation.

In view of the abovementioned issues, assessments and reviews are conducted by Bank BNP's management by continuing to improve lending portfolio in terms of both volume and lending quality, in addition to compensate the run off rate and increase in the troubled debtors portfolio. To that end, the following measures and policies have been set up:

- Determining the Risk Appetite by determining the selected target market and financing to multifinance companies by implementing the Risk Acceptance Criteria and Loan Pricing Strategy as an effort to expand lending portfolio into the most potential industrial sectors.
- Increasing Credit Risk Governance in the loan approval process and loan restructuring process based on the principle of prudence by conducting the three-pillar analysis.
- Building and improving general awareness in an effort to maintain, preserve, and protect the Bank's assets in the implementation of KYC (Know Your Customer) in relation to the information on potential debtors and their businesses' conditions in a transparent, extensive, and thorough manner.
- Strengthening monitoring and control functions regarding the potentials and indications of declining lending quality in terms of both individuals and as a portfolio, via coordination meetings conducted monthly and credit panel meetings (joint meetings of BOD and BOC and the entire lending unit), once every three months.
- Performing early identification of large debtors that have the potential to experience a decline in lending quality.
- Encouraging discussions with risk taking units by sharing/discussing the relevant issues and their potential impacts and risks on the Bank, based on the credit risk monitoring process through the Vintage Analysis on debtors that have outstanding repayment of debts, for new debtors (less than 1 year since the loan approval).
- Strengthening the function of Anti-Fraud Strategy Committee to identify any potentials/indications of fraud involving troubled debtors, either from internal data (Internal Audit's results and Risk Management Division's identification results) or from external data (complaints/grievances reported by customers/debtors).

- Meningkatkan *Early Warning Signal* dalam upaya pemantauan terhadap meningkatnya rasio kredit kualitas rendah (kolektibilitas 2, 3, 4, dan 5) yang disebabkan peningkatan pada kolektibilitas 2.
- Bank telah melakukan *write off* terhadap portfolio kredit bermasalah yang sudah tidak memiliki harapan untuk dilakukan penagihan atau penyelesaian biasa.
- Melakukan *monitoring* secara intensif terhadap proses dan target *Recovery Asse*t.
- Melakukan proses penyelesaian kredit bermasalah melalui penggunaan jasa pihak ketiga atau pengacara.

- Strengthening the Early Warning Signal mechanism in order to monitor the increase in low-quality lending ratio (collectibility levels of 2, 3, 4, and 5) caused by the increase in collectibility level 2.
- The Bank has written off a certain portion of the non-performing loans portfolio that has been deemed unresovable.
- Performing intensive monitoring on Asset Recovery processes and targets.
- Resolving non-performing loans by employing third parties or lawyers.

Perubahan Undang Undang yang Berdampak Terhadap Kinerja Keuangan

Undang Undang No. 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan memberikan akses yang luas kepada otoritas perpajakan Indonesia untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan, khususnya terkait nasabah simpanan di perbankan Indonesia.

Untuk mengantisipasi persepsi negatif yang ditimbulkan dari pemberlakuan undang-undang tersebut, maka Bank BNP telah melaksanakan sosialisasi langsung kepada Nasabah melalui kerja sama dengan otoritas pajak.

Changes in Regulations Bearing Significant Impact on Financial Performance

Law No. 9/2017 on Ratification of Government Regulation In Lieu of Law No. 1/2017 on Financial Information Access for Taxation Purposes gives a broad access to the Indonesian taxation authority to receive and obtain financial information, especially as regards funding products' customers in Indonesian banks.

To anticipate the negative perception that may result from the enactment of such law, Bank BNP has conducted adequate dissemination directly to its customers in collaboration with the tax authority.

Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance

148 Penerapan Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance Implementation

149 *Roadmap* Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance Roadmap

150 Penilaian Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance Assessment

155 Struktur & Mekanisme Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance Structure & Mechanism

222 Laporan Manajemen Risiko
Risk Management Report

239 Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Tahun 2017
Compliance Function Implementation in 2017

245 Kode Etik & Budaya Perusahaan
Code of Conduct & Corporate Culture

247 Kasus Hukum & Sanksi Administratif
Litigations & Administrative Sanctions

249 Komitmen Bank terhadap Perlindungan Konsumen
Bank's Commitment to Consumer Protection

252 Sistem Pelaporan Pelanggaran
Whistleblowing System

255 Akses Informasi & Data Perusahaan
Access to Company Information & Data

255 Kepatuhan Perpajakan
Tax Compliance

256 Kebijakan Strategi Anti-Fraud
Policy on Anti-Fraud Strategy

258 Pakta Integritas
Integrity Pact

259 Transparansi Kondisi Keuangan dan Non-Keuangan Bank
Disclosure of the Bank's Financial and Non-Financial Conditions

262 Pernyataan Kesesuaian Penerapan GCG Bank dengan Roadmap GCG OJK
Statement of Conformity of the Bank's GCG Implementation with OJK GCG Roadmap

Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance Implementation

Bank BNP menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*—GCG) secara disiplin. Praktik GCG Bank senantiasa disesuaikan dengan perkembangan terkini agar kinerja Bank yang optimal dapat tercapai.

Bank BNP implements the principles of good corporate governance (GCG) in its business with diligence. The Bank's GCG practices are continuously adjusted to the latest developments in the field, to ensure that optimum performance can be achieved.

Seiring Bank BNP melaksanakan kepatuhannya terhadap segala bentuk peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di industri perbankan di Indonesia, penerapan GCG dijadikan sebagai dasar bagi Bank BNP untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat, nasabah dan semua pemangku kepentingan lainnya.

As Bank BNP complies with all the regulations and laws in the banking industry prevailing within the jurisdictions of the Republic of Indonesia, the implementation of GCG becomes the foundation for the Bank to garner trust from the public, customers, and all stakeholders.

Lima prinsip dasar GCG ditanamkan dan dijalankan dalam melaksanakan semua kegiatan usaha Bank. Prinsip-prinsip dasar GCG tersebut adalah:

Bank BNP conducts its business activities based on the five principles of GCG. These five GCG principles are:

Prinsip / Principle	**Deskripsi /** Description	**Implementasi /** Implementation
Transparansi Transparency	Merupakan keterbukaan Perusahaan dalam menyampaikan informasi yang material dan relevan dalam melakukan kegiatan usaha. The Company's transparency in reporting material and relevant information in conducting business activities.	Bank BNP memberikan informasi secara jelas, tepat waktu, akurat, dan mudah diakses oleh para pemangku kepentingan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Bank BNP provides information in a clear, timely, and acurrate manner, to be easily accessed by all stakeholders, in line with the prevailing regulations.

Prinsip / Principle	**Deskripsi /** Description	**Implementasi /** Implementation
Akuntabilitas Accountability	Merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. A clarity of function, structure, system, and accountability of the Company's organ in order to conduct its management effectively.	Pengelolaan Bank BNP terlaksana secara efektif melalui pengawasan setiap kinerja organ perusahaan dengan baik. The management of Bank BNP is conducted effectively through the supervision of each of the Company's organs' performance.
Pertanggungjawaban Responsibility	Merupakan kesesuaian pengelolaan perusahaan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat. Management of the Company in accordance with the laws and regulations as well as principles of sound and healthy business.	Bank BNP secara konsisten memegang teguh prinsip prinsip pengelolaan Bank yang sehat dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Bank BNP consistently upholds the principles of sound and healthy management of the Bank, and maintains its responsibility to the public.
Independensi Independency	Merupakan pengelolaan perusahaan secara profesional tanpa adanya pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Professional management of the Company without any influence or pressure from any party that is not in accordance with the laws and regulations as well as the principles of sound and healthy business.	Bank BNP dikelola secara profesional dan independen tanpa adanya benturan kepentingan. Bank BNP is managed professionally and independently without any conflict of interest.
Kewajaran Fairness	Merupakan perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Equal treatment of stakeholders' rights based on the prevailing laws and regulations.	Bank BNP senantiasa memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan dan pemegang saham dengan baik, sesuai asas kewajaran dan kesetaraan. Bank BNP pays attention to the interests of stakeholders and shareholders at all times, in accordance with the principle of fairness.

Roadmap Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Roadmap

Implementasi GCG yang berkelanjutan membantu Bank BNP meningkatkan daya saingnya. Bank BNP telah menyusun suatu peta arah tata kelola perusahaan sesuai acuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia agar menjadi warga nergara korporat yang baik dalam melaksanakan penerapan GCG.

Pada tahun 2017, Bank BNP terus melanjutkan tindak lanjut terhadap instruksi dari peta arah tata kelola perusahaan. Pedoman Infrastruktur GCG disusun untuk dijadikan

An ongoing GCG implementation is key to enhancing Bank BNP's competitiveness in business. Bank BNP has compiled a corporate governance roadmap that adheres to the regulations of the Financial Services Authority (OJK) and Bank Indonesia, in order to become a good corporate citizen with respect to GCG implementation.

In 2017, Bank BNP continued to implement the directives stated in its corporate governance roadmap. The GCG Infrastructure Guideline has been established to be used

sebagai panduan GCG bagi Bank BNP dan sebagai rujukan penting bagi seluruh elemen Bank dalam penerapan GCG di setiap aktivitas. Pihak Internal Bank terlibat penuh atas penyusunan pedoman ini khususnya pada *top level* perusahaan, mengingat pendekatan *top down* masih menjadi pendekatan yang paling efektif dalam menerapkan GCG. Selain itu di tahun 2017, Bank BNP melakukan *sharing session* kepada karyawan mengenai penerapan GCG dalam kegiatan perusahaan untuk menunjang karyawan agar menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam kegiatan bekerja.

Sedangkan untuk infrastruktur yang meliputi Ketersediaan SDM, Kompetensi yang cukup, Manual GCG *Code*, *Board Manual*, Mekanisme Penilaian, Penyediaan Kertas Kerja dan Skoring, *Corporate Values*, dan lain-lain masih terus-menerus dikembangkan.

Berikut merupakan diagram *roadmap* GCG Bank BNP:

as a GCG guideline for Bank BNP and as a crucial reference for all elements of the Bank in implementing GCG across all activities. The Bank internal parties are fully engaged in the formulation of this guideline, in particular the top level, considering that the top down approach remains the most effective approach to implementing GCG principles. In addition, in 2017 Bank BNP conducted sharing session involving its employees, with the topic of GCG implementation in company activities to support employees in implementing the GCG principles at work.

Infrastructural elements related to the human resources availability, adequate competencies, GCG Code Manual, Board Manual, Assessment Mechanisms, Provision of Working Papers and Scoring, Corporate Values, and others are enhanced and developed from time to time.

The diagram of Bank BNP's GCG roadmap is as follows:

Penilaian Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Assessment

Sebagai wujud peningkatan kualitas pelaksanaan GCG, Bank secara bertahap melakukan penilaian sendiri (*self-assessment)* atas 11 (sebelas) Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG. *Assessment* tersebut juga bertujuan mengawasi dan mengevaluasi implementasi GCG serta wujud Bank dalam mengembangkan GCG yang berkelanjutan.

Dalam melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) GCG Bank menggunakan kriteria penilaian sesuai dengan yang diatur di dalam Lampiran III Surat Edaran OJK (OJK) No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Berikut ini merupakan *self-assessment* GCG yang dilaksanakan Bank BNP, antara lain:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, dengan memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG melalui peran pengawasan yang aktif dan efektif, serta memberi masukan/rekomendasi kepada Direksi untuk kepentingan perseroan sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank BNP.

As a form of improving the quality of GCG, Bank periodically conducts an assessment (self-assessment) on 11 (eleven) Factors of GCG Implementation Assessment. It also aims to monitor and evaluate GCG implementation as well as the the development of sustainable GCG.

In conducting its GCG self-assessment, the Bank uses the assessment criteria as stipulated in the Appendix III of OJK Circular No. 13/SEOJK.03/2017 on Corporate Governance for Commercial Banks.

Self-Assessment of GCG conducted by Bank BNP is as follows:

1. The duties and responsibilities of the Board of Commissioners, by ensuring GCG implementation through an active and effective supervision, as well as providing advice or recommendation to the Directors with respect to the Company's interest in accordance with the complexity of Bank BNP's business.

2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, dengan memastikan bahwa operasional dan usaha Bank BNP telah diwujudkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang berjalan sangat efektif.

3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite, dengan memastikan Bank BNP telah memiliki semua Komite yang dipersyaratkan sesuai ketentuan regulator, dan telah melaksanakan fungsi serta tugasnya secara optimal dan efektif dalam memberikan rekomendasi yang digunakan sebagai acuan Dewan Komisaris.
4. Penanganan benturan kepentingan, dengan memastikan Bank BNP telah memiliki kebijakan dan prosedur penanganan benturan kepentingan, yang dilakukan agar tidak merugikan dan mengurangi keuntungan Bank BNP serta terdokumentasikan dengan baik untuk setiap keputusan, yang dilengkapi dengan risalah rapat.
5. Penerapan fungsi kepatuhan, dengan memastikan Bank BNP terus menerus melakukan penerapan fungsi kepatuhan terhadap aktivitas operasional maupun terhadap usaha Bank, agar senantiasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta meminimalisasi pelanggaran.
6. Penerapan fungsi audit intern, dengan memastikan pelaksanaan fungsi Audit Intern Bank BNP telah berjalan lebih efektif, independen dan objektif. Pelaksanaan Audit Intern senantiasa berpedoman pada standar yang ditetapkan dalam SPFAIB (Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank).
7. Penerapan fungsi audit ekstern, dengan memastikan pelaksanaan fungsi Audit Ekstern berjalan dengan independen serta telah sangat efektif sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan, dengan menghasilkan kualitas dan cakupan hasil audit yang sangat baik.
8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern, dengan memastikan pelaksanaan fungsi manajemen risiko telah lebih efektif melakukan peran dan fungsinya dalam sistem pengendalian intern yang lebih komprehensif seperti melakukan pengkinian kebijakan, prosedur dan penetapan limit, sesuai dengan regulasi, tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha Bank.
9. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, dengan memastikan bahwa Bank BNP telah memiliki kebijakan tertulis mengenai penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar. Tidak terdapat pelanggaran maupun pelampauan BMPK, diversifikasi penyediaan dana yang cukup merata serta pengambilan keputusan dalam penyediaan dana dilakukan secara independen.
10. Transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan Bank, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal, dengan memastikan Bank BNP telah transparan dalam

2. Implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors, by ensuring that Bank BNP's operations and business have been implemented in accordance with an effective execution of duties and responsibilities.
3. The completion and implementation of the Committees' duties, by ensuring that Bank BNP has all the Committees required in accordance with the regulations, and has conducted its functions and duties optimally and effectively by providing recommendations for reference to the Board of Commissioners.
4. Handling of conflicts of interest, by ensuring that Bank BNP has established policies and procedures for handling conflicts of interest in order not to harm and reduce the profit of Bank BNP, and in a way that is well-documented regarding each decision, complete with the minutes of meetings.
5. Implementation of compliance function, by ensuring that Bank BNP continuously applies the compliance function on its operational activities and to its business, in order to be in accordance with the applicable regulations and minimize the occurrence of violations.

6. Implementation of internal audit function, by ensuring that the Internal Audit function in Bank BNP has been executed effectively, independently and objectively. Internal Audit implementation always refers to the standards in the SPFAIB (Standards for the Implementation of Internal Audit Function in Banks).
7. Implementation of external audit function, by ensuring that the External Audit function is conducted independently and effectively in accordance with the regulations, producing excellent quality of results within the scope given in relation to the audit.

8. Implementation of risk management including internal control system, by ensuring that the risk management function is conducted as per its role and function effectively within a more comprehensive internal control system, such as updating policies, procedures and limit determination, in accordance with the regulations, purpose, and complexity of the Bank's business.
9. Provision of funds to related parties and large exposures by ensuring that Bank BNP has a written policy regarding the provision of funds to related parties and provision for large exposures. There has been no violation of BMPK, diversification of equitable fund provision, and decision-making in the provision of funds conducted independently.

10. Transparency of financial and non-financial conditions of the Bank, GCG implementation report, and internal report, by ensuring that Bank BNP has been transparent in providing information regarding its financial and non-

menyampaikan informasi keuangan maupun non-keuangan kepada publik secara tepat waktu, lengkap, akurat, kini dan utuh, termasuk penyampaian laporan pelaksanaan GCG kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya didukung dengan Sistem Informasi Manajemen Bank yang mampu menyediakan data dan informasi untuk pengambilan keputusan manajemen.

11. Rencana strategis Bank, dengan memastikan penyusunan RBB Bank BNP dilakukan dengan realistis dan telah memperhatikan faktor eksternal dan internal, prinsip prudent dan azas perbankan yang sehat dan sesuai dengan visi dan misi Bank serta rencana korporasi Bank.

financial conditions to the public in a timely, complete, accurate, current, and holistic manner, including the submission of GCG reports to the shareholders and other stakeholders, with the support of the Management Information System of the Bank that is able to provide data and information for the management's decision-making.

11. The Bank's strategic plan, by ensuring that the preparation of Bank's Business Plan (RBB) of Bank BNP is conducted realistically and with due consideration to external and internal factors, principle of prudence, principle of healthy banking, and in accordance with the vision and mission of the Bank as well as the Bank's corporate plan.

Self assessment tersebut dilakukan Bank secara komprehensif dan terstruktur yang digabungkan ke dalam 3 (tiga) aspek *governance*, yaitu *governance structure*, *governance process* dan *governance outcome*, sebagai suatu proses yang berkelanjutan dilakukan secara berkala yaitu setiap 6 (enam) bulan sekali oleh *Corporate Secretary* sebagai tahap *preliminary* sebagaimana diatur di dalam Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 bahwa *corporate secretary* membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan atau GCG. Di tahun 2017 Bank BNP telah melakukan penilaian dengan bantuan sistem aplikasi, untuk mempercepat dan mempermudah proses penilaian.

The self-assessment is conducted by the Bank comprehensively and structurally, combining three (3) aspects of governance, namely governance structure, governance process, and governance outcome, as a continuous process and is carried out once every six months by the Corporate Secretary as the preliminary stage, as stipulated in OJK Regulation No. 35/POJK.04/2014 which states that the corporate secretary must assist the Board of Directors and Board of Commissioners in ensuring GCG implementation. In 2017 Bank BNP utilized an application to conduct the self-assessment in a more speedy and convenient manner.

1. Penilaian *governance structure* bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank agar proses pelaksanaan prinsip GCG menghasilkan outcome yang sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan Bank.
2. Penilaian *governance process* bertujuan untuk menilai efektivitas proses pelaksanaan prinsip GCG yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan Bank.
3. Penilaian *governance outcome* bertujuan untuk menilai kualitas *outcome* yang memenuhi harapan pemangku kepentingan Bank yang merupakan hasil proses pelaksanaan prinsip GCG yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank.

1. Assessment of governance structure is aimed at assessing the structure and infrastructure of the Bank's governance, so that GCG implementation process produces outcomes that are in line with the expectations of the Bank's stakeholders.
2. Assessment of governance process is aimed at assessing the efficacy of the implementation of GCG principles supported by an adequate governance structure and infrastructure of the Bank, so that this produces outcomes that are in line with the expectations of the Bank's stakeholders.
3. Assessment of governance outcomes is aimed at assessing the quality of the outcome that meets the expectations of the Bank's stakeholders, which is the result of implementation of GCG principles supported by an adequate governance structure and infrastructure of the Bank.

Teknis penilaian mandiri GCG di Bank BNP dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Membagikan kertas kerja penilaian mengenai 11 aspek penilaian GCG kepada unit kerja terkait untuk diisi dan dilengkapi dengan dokumen pendukungnya;

GCG self-assessment at Bank BNP is conducted as follows:

- Distribution of working paper for the assessment of 11 GCG aspects to related work units to be filled out and accompanied by supporting documentation;

- Melakukan verifikasi atas kertas kerja yang telah diisi oleh seluruh unit terkait;
- Melakukan *review*, konfirmasi dan diskusi dengan para unit terkait atas pelaksanaan 11 aspek penilaian GCG untuk mendapatkan kepastian atas nilai yang diberikan;
- Merangkum dan melakukan rekapitulasi penilaian atas hasil penilaian tersebut;
- Rangkuman atas kertas kerja penilaian tersebut dipresentasikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris, melalui mekanisme Rapat Komite Kepatuhan atau melalui rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris, untuk diperoleh persetujuannya.

- Verification of the working paper that have been filled out by all relevant work units;
- Review, confiration, and discussion with related work units on the implementation of 11 GCG aspects to obtain assurance on the scores provided;
- Summary and recapitulation of scores from the self-assessment results;
- Summary of the self-assessment working paper is presented to the Board of Directors and the Board of Commissioners via the Compliance Committee Meeting or via the Board of Commissioners and Board of Directors joint meeting, to obtain approval.

Bank BNP telah melakukan *self-assessment* terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip GCG untuk periode Desember 2017 dan memperoleh Peringkat 2 (BAIK).

Bank BNP conducted self-assessment on its GCG principles implementation for December 2017 and obtained the Score of 2 (GOOD).

Berikut rincian penilaian sendiri (self-assessment) pelaksanaan prinsip-prinsip GCG untuk periode Desember 2017 antara lain sebagai berikut

The following are the details related to the self-assessment of the GCG principles implementation for the period of December 2017:

No.	Faktor/Kriteria Penilaian Assessment Factor/Criterion	Nilai Komposit Composite Score
1.	Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Dewan Komisaris Execution of Board of Commissioners Duties & Responsibilities	1,31
2.	Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Direksi Execution of Board of Directors Duties & Responsibilities	1,13
3.	Kelengkapan & Pelaksanaan Tugas Komite Adequacy and Implementation of Committees' Duties	1,14
4.	Penanganan Benturan Kepentingan Handling of Conflicts of Interest	1,33
5.	Penerapan Fungsi Kepatuhan Implementation of Compliance Function	1,53
6.	Penerapan Fungsi Audit Intern Implementation of Internal Audit Function	1,83
7.	Penerapan Fungsi Audit Ekstern Implementation of External Audit Function	1,00
8.	Penerapan Manajemen Risiko & Sistem Pengendalian Implementation of Risk Management & Control System	1,83
9.	Penyediaan Dana Related Party & Large Exposure Funding to Related Parties & Large Exposure	1,11
10.	Transparansi Kondisi Keuangan & Non-Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG, Laporan Internal Transparency of Financial & Non-Financial Conditions, GCG Implementation Report, Internal Reports	1,17
11.	Rencana Strategis Bank Bank's Strategic Plan	1,60

LAMPIRAN IV
Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (*SELF-ASSESSMENT*) PELAKSANAAN GCG
Nama Bank: PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk
Posisi: 31 Desember 2017

ATTACHMENT IV
OJK Circular No. 13/SEOJK.03/2017 on Corporate Governance Implementation for Commercial Banks.

SELF-ASSESSMENT REPORT ON IMPLEMENTATION OF GCG
Bank Name: PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk
Position: 31 December 2017

Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan GCG
Self Assessment Report on Implementation of GCG

	Peringkat Score	**Definisi Peringkat /** Scoring Definition
Individual	2	**Baik**: Mencerminkan Manajemen Bank BNP telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank. / **Good**: Reflecting that Bank BNP's management has implemented GCG properly in general terms. This is demonstrated by adequate fulfillment of the GCG principles. Any weaknesses found in the GCG principles implementation were generally not significant and thus were able to be addressed by normal course of action by the Bank's management.
Konsolidasi Consolidation	-	-

Analisis / Analysis

Pada periode Desember 2017, Bank BNP telah menerapkan prinsip-prinsip GCG dengan berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar yaitu TARIF yang dikelompokkan dalam suatu *governance system* yang mencakup 3 (tiga) aspek *governance* (*Structure, Process* dan *Outcome*) secara umum yang direfleksikan dalam 11 (sebelas) faktor Penilaian Pelaksanaan GCG telah dilakukan Bank dengan Baik.

Berdasarkan pada hasil analisis Penilaian Sendiri (*self-assessment*) terhadap aspek *Governance Structure*, *Governance Process*, dan *Governance Outcome* pada masing-masing Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG, dapat disimpulkan sebagai berikut

1. *Governance Structure* tata kelola pada seluruh Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG sudah lengkap dan cukup memadai. Dalam hal terdapat kelemahan pada penerapan prinsip-prinsip GCG secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Bank.
2. *Governance Process* tata kelola pada penilaian pelaksanaan GCG sudah berjalan sesuai dengan struktur dan infrastukturnya, dalam hal masih terjadi beberapa kelemahan dalam proses pelaksanaannya, hal ini disebabkan karena perbaikan proses yang sedang dan tengah dijalankan oleh manajemen Bank BNP, sehingga masih ditemui *human error*/*fraud*/kesalahan proses.
3. *Governance Outcome* tata kelola pada hasil dari aspek governance process perlahan sudah mulai memadai, Hal ini tercermin dari akselerasi pertumbuhan kredit, peningkatan *Net Interest Income* (NII), peningkatan laba sebelum pajak, serta penurunan *cost of fund*.

Meskipun pada hasil penilaian periode Juni 2017 yang dilakukan oleh OJK sempat mengalami penurunan, tetapi upaya perbaikan kinerja tata kelola perusahaan terus ditingkatkan dan sudah mulai menunjukkan kemajuan yang semakin baik, ditunjukkan melalui pertumbuhan bisnis Bank yang mulai terlihat. Diharapkan dengan upaya terus-menerus yang dilakukan oleh manajemen ke depannya, dapat menunjukkan kemajuan yang semakin baik, sehingga Bank beralasan kuat perbaikan dalam sisi pelaksanaan tata kelola perusahaan adalah Baik.

In December 2017, Bank BNP implemented GCG principles based on the five basic principles, i.e. TARIF, classified into a governance system that covers three governance aspects (Structure, Process, and Outcome), that are generally reflected in eleven factors for GCG Implementation Assessment, which resulted in an assessment score of Good.

Based on the self-assessment result analysis conducted by the Bank on the Governance Structure, Governance Process, and Governance Outcome aspects on each of the eleven factors for GCG Implementation Assessment, the following conclusions have been made:

1. There is an adequate and complete Governance Structure across all factors considered in the GCG Implementation Assessment. Any weaknesses in the implementation of GCG principles were generally insignificant and could be immediately addressed by the Bank's management.
2. The Governance Process in the overall GCG implementation assessment has taken place in line with the existing structure and infrastructure. Any weaknesses found were owing to the excess of quality improvement processes currently undertaken by the Bank's management, and thus it might result in human errors/frauds/process errors.
3. The Governance Outcome as a result of the governance process has been improving towards adequate levels. This is reflected in the acceleration of loan growth, increased net Interest Income (NII), increase in income before tax, and reduction in cost of fund.

Although during the June 2017 assessment period conducted by OJK the result was lower, efforts to improve corporate governance performance have been continued and have shown significant progress, as demonstrated by a palpable improvement in the Bank's business. It is expected that continued effort by the management will result in even better progress, and this provides the basis for the Bank to argue that the improvement in corporate governance performance has been Good.

Struktur & Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

GCG Structure & Mechanism

Struktur GCG di Bank BNP disusun berdasarkan peraturan Bank Indonesia, Peraturan OJK, Anggaran Dasar Perusahaan dan ketentuan terkait lainnya yang sejalan dengan praktik-praktik terbaik. Struktur GCG Bank memastikan pelaksanaan GCG berjalan dengan sistematis melalui pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas.

Struktur GCG Bank BNP terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite yang membantu Dewan Komisaris, Fungsi Audit Intern, Fungsi Kepatuhan, Fungsi Pengendalian Internal, dan Sekretaris Perusahaan. Setiap bagian dari struktur ini harus menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bank BNP's GCG structure was prepared based on the regulations of Bank Indonesia, Financial Service Authority (OJK), Articles of Association of the Company, and other relevant regulations that are in line with the best practices in the field. The GCG structure ensures that GCG implementation is systematic, through the clear division of roles and responsibilities.

Bank BNP's GCG structure consists of the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners, the Board of Directors, Committees assisting the Board of Commissioners, Internal Audit, Compliance Function, Internal Control Function, and Corporate Secretary. Each part of this structure should conduct its respective functions in accordance with the applicable laws and regulations.

Rapat Umum Pemegang Saham

Organ tertinggi di Perusahaan yang memegang seluruh kewenangan yang tidak terdapat pada Direksi dan Dewan Komisaris adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Melalui RUPS Tahunan (RUPST), Direksi dan Dewan Komisaris melaporkan dan menyampaikan tanggung jawab mereka atas kinerja Bank BNP kepada para pemegang saham, dengan pembahasan mengenai strategi, kebijakan, hasil-hasil usaha dan hal-hal penting lainnya, termasuk pemilihan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Bank BNP juga dapat menyelenggarakan RUPS Luar Biasa (RUPSLB) sewaktu-waktu jika diperlukan.

Selama tahun 2017, Bank BNP menyelenggarakan RUPS Tahunan, dengan perincian sebagai berikut:

RUPS Tahunan

RUPS Tahunan (RUPST) diadakan pada tanggal 2 Juni 2017, dihadiri oleh tiga anggota Dewan Komisaris dan seluruh Direksi Bank, beserta perwakilan dari 606.547.660 lembar saham dengan hak suara sah, atau 89,62% dari jumlah saham yang dikeluarkan Bank. Hasil keputusan RUPST tersebut dijabarkan di bawah ini. Seluruh keputusan RUPST disetujui secara bulat, melalui musyawarah untuk mufakat.

General Meeting of Shareholders

The General Meeting of Shareholders (GMS) is the highest organ within the Company which holds certain authority not conferred to the Board of Directors or the Board of Commissioners. Through the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS), the Board of Directors and the Board of Commissioners report and are held accountable for Bank BNP's performance to the shareholders, through discussions on strategies, policies, business results and other important matters, including the appointment and dismissal of members of the Board of Commissioners and the Directors. Bank BNP may also conduct Extraordinary General Meetings of Shareholders (EGMS) at any time when deemed necessary.

In 2017, Bank BNP held one Annual General Meeting of Shareholders, with the details as follows:

Annual General Meeting of Shareholders (AGMS)

An Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) was held on 2 June 2017, attended by three members of the Board of Commissioners and all members of the Board of Directors of the Bank, and representatives of 606,547,660 shares with valid voting rights, or 89.62% of the total shares issued by the Bank. The resolutions of the AGMS are detailed below. All of the AGMS resolutions were reached unanimously, via deliberation for consensus.

Mata Acara 1 / Agenda 1

Keputusan	Resolution	Realisasi / Actualization
Menyetujui Laporan Direksi mengenai kegiatan Perseroan selama tahun buku yang berakhir 31 Desember 2016 dan Rencana Bisnis Bank tahun 2017–2019, serta Laporan Dewan Komisaris mengenai pelaksanaan pengawasan atas jalannya Perseroan oleh Direksi.	Approved the Directors' Report regarding the activities of the Company for the year ended 31 December 2016 and the Bank's Business Plan for 2017–2019, as well as the Board of Commissioners' report regarding the supervision of the management of the Company by the Board of Directors.	Telah direalisasikan Actualized

Mata Acara 2 / Agenda 2

Keputusan	Resolution	Realisasi / Actualization
Menyetujui Neraca dan Perhitungan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan Neraca Perseroan untuk tahun buku 2016.	Approved the Company's Balance Sheet and Profit for the year ended 31 December 2016, and fully absolved the responsibility (acquit et de charge) of each member of the Board of Commissioners and the Board of Directors for their supervision and management actions, as long as these actions are reflected in the Company's Balance Sheet for the fiscal year of 2016.	Telah direalisasikan Actualized

Mata Acara 3 / Agenda 3

Keputusan	Resolution	Realisasi / Actualization
Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2016 sebesar Rp8.108.625.364 dengan cara sebagai berikut: a. Perseroan tidak membagikan Dividen Tunai kepada pemegang saham; b. Membentuk Cadangan Umum sebesar Rp810.000.000 atau sama dengan +/- 10% dari hasil usaha tahun buku 2016 sesuai pasal 70 ayat 1 Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007; c. Sisanya digunakan untuk menambah Saldo Laba Ditahan Perseroan; d. Memberikan kuasa kepada Direksi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut diatas sesuai ketentuan yang berlaku, tanpa tindakan yang dikecualikan, termasuk untuk mengumumkannya di media massa.	Approved the use of the Company's net profit for the fiscal year of 2016 amounted to Rp8,108,625,364 in the following manner: a. The Company will not distribute Cash Dividends to shareholders; b. Establishment of General Reserve amounting to Rp810,000,000 or equal to about 10% of the profit for the year 2016 in accordance with Article 70 paragraph 1 of the Limited Liability Company Law No. 40/2007; c. The remainder is to be used to increase the Company's Retained Earnings; d. Authorized the Directors to conduct all actions deemed necessary in accordance with the above details in line with the prevailing regulations, without exception, including to announce it in the media.	Telah direalisasikan Actualized

Mata Acara 4 / Agenda 4

Keputusan	Resolution	Realisasi / Actualization
a. Memberikan bonus kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pencapaiannya dalam tahun buku 2016 dengan total maksimal sebesar Rp405.431.000 termasuk PPH 21, yang pemberiannya hanya dilakukan setahun satu kali dan menjadi Beban Usaha di Tahun Buku 2017; b. Memberikan kuasa kepada Direksi untuk melaksanakan keputusan butir (1) dimaksud.	a. Provided bonuses to the Board of Directors and the Board of Commissioners for their achievements in 2016 with a total of Rp405,431,000, inclusive of PPH 21 Income Tax, only provided one time per year and recognized as Operating Expenses in the fiscal year of 2017; b. Conferred authority to the Board of Directors to implement resolution (1) as above.	Telah direalisasikan Actualized

Mata Acara 5 / Agenda 5

Keputusan	Resolution	Realisasi / Actualization
a. Menyetujui pengunduran diri Sdr. Takeru Agawa sebagai Presiden Direktur sekaligus mengangkat Sdr. Hideki Nakamura sebagai Presiden Direktur, sehingga Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2018 adalah sebagai berikut: **Dewan Komisaris:** Presiden Komisaris : Michio Atsuda Komisaris : Tatang Hermawan Komisaris Independen : Karel Tanok Komisaris Independen : Bachtiar Alam **Direksi:** Presiden Direktur : Hideki Nakamura Direktur : Kevin Cahyadi Tatang Direktur : Markus Sugiono Direktur : Eiichiro Sakai Direktur Independen : Trie Karjati Wibowo	a. Accepted the resignation of Takeru Agawa from the position of President director and appointed Hideki Nakamura as the Company's President Director, therefore the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company effective from the closing of this meeting up to the closing of the 2018 Annual General Meeting of Shareholders become as follows: **Board of Commissioners:** President Commissioner : Michio Atsuda Commissioner : Tatang Hermawan Independent Commissioner : Karel Tanok Independent Commissioner : Bachtiar Alam **Board of Directors:** President Director : Hideki Nakamura Director : Kevin Cahyadi Tatang Director : Markus Sugiono Director : Eiichiro Sakai Independent Director : Trie Karjati Wibowo	Telah direalisasikan Actualized
b. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Mario Yahya, Corporate Secretary Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan keputusan-keputusan tersebut di dalam suatu Akta Notaris tersendiri dan memberitahukannya kepada instansi yang berwenang serta melakukan tindakan lainnya yang diperlukan untuk mencapai maksud tersebut di atas, tidak ada yang dikecualikan.	b. Granted the authority with substitution right to Mario Yahya, the Company's Corporate Secretary, to take all measures necessary related to the above, including but not limited to declaring such resolutions in a specific Notarial Deed and notifying the authorities accordingly, as well as conducting all other actions deemed necessary to achieve the abovementioned purpose, without exception.	

Mata Acara 6 / Agenda 6

Keputusan	Resolution	Realisasi / Actualization
a. Menyetujui penyesuaian jumlah remunerasi dan/atau tunjangan lainnya yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris berkaitan dengan pergantian pengurus ini menjadi total kurang lebih Rp15.167.000.000 per tahun terhitung sejak bulan Juni 2017;	a. Approved the changes to the remuneration and/or other benefits for the members of the Board of Directors and Board of Commissioners in accordance with the change in the management composition, to a total of roughly Rp15,167,000,000 per year, effective from June 2017;	Telah direalisasikan Actualized
b. Memberikan kuasa kepada Direksi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan butir (1) dimaksud.	b. Conferred authority to the Directors to conduct all actions deemed necessary in accordance with the implementation of point (1) above.	

Mata Acara 7 / Agenda 7		
Keputusan	**Resolution**	**Realisasi /** Actualization
a. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Deloitte yang akan melakukan pemeriksaan Umum atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tahun 2017; b. Dalam hal KAP yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, menyetujui mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk KAP pengganti dan menetapkan jumlah honorarium serta persyaratan penunjukan lainnya dengan memperhatikan kriteria dan batasan akuntan publik yang dapat ditunjuk.	a. Approved the appointment of Public Accounting Firm of Deloitte to audit the Financial Statements of the Company for the fiscal year of 2017; b. In the event that the appointed Public Accounting Firm fails to conduct or continue its duties for any reason, the meeting approved to delegate authority to the Board of Commissioners to appoint another Public Accounting Firm as a replacement, and to determine the amount of honorarium and other requirements related to the appointment, by taking into account the criteria and limitations of the public accountant to be appointed.	Telah direalisasikan Actualized

Pemegang Saham Utama dan Pengendali

Pemegang saham utama adalah pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh Perusahaan atau Bank, atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh OJK.

Badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham perusahaan atau Bank sebesar 25% atau lebih dari jumlah yang saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara atau memiliki saham perusahaan dan/atau Bank kurang dari 25% dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan atau Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung disebut Pemegang Saham Pengendali.

Pemegang saham pengendali di Bank BNP dimiliki oleh 2 (dua) institusi keuangan yang berasal dari negara Jepang yaitu ACOM CO., LTD. (ACOM) dan The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. (BTMU) dilakukan dengan mengakuisisi saham Bank BNP sebanyak 75,50% pada tanggal 17 Desember 2007, sehingga menjadikan dua perusahaan tersebut sebagai Pemegang Saham Pengendali Bank BNP, sedangkan bertindak sebagai Pemegang Saham Pengendali Akhir/*Ultimate Shareholders* adalah Keluarga Kinoshita dan Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc (MUFG).

Principal and Controlling Shareholders

Principal shareholder is any party that either directly or indirectly own at least 20% of the total voting rights from all the shares with voting rights issued by the Company or the Bank, or any smaller amount as regulated by OJK.

Any legal entity, individual, and/or group of entities that owns the Company's or the Bank's shares amounting to 25% or more of the total shares issued with voting rights or own the Company's or the Bank's shares amounting to less than 25% of the total shares issued with voting rights as long as the party can be proven to have controlled the Company or the Bank either directly or indirectly, is designated as the Controlling Shareholder.

The controlling shareholders of Bank BNP are 2 (two) financial institutions from Japan, namely ACOM CO., LTD. (ACOM) and The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. (BTMU), which have acquired the shares of Bank BNP amounting to 75.50% of the total on 17 December 2007, which rendered both companies as the Controlling Shareholders of Bank BNP. The ultimate shareholders of the Bank are the Kinoshita Family and Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc (MUFG).

1. ACOM CO., LTD. (ACOM)

ACOM adalah suatu perusahaan publik yang didirikan berdasarkan hukum dan perundang-undangan negara Jepang, berkedudukan dan berkantor di 1-1, Marunouchi 2-chome. Chiyodaku, Tokyo 100-8307, Jepang. Sahamnya tercatat di Tokyo Stock Exchange. ACOM adalah anak perusahaan dari Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG).

Bisnis utama group ACOM adalah pinjaman dan bisnis kartu kredit, bisnis penjaminan, pelayanan pinjaman dan bisnis keuangan di luar negeri, dan ACOM sendiri bergerak dalam bidang industri jasa pembiayaan dengan menyediakan pinjaman kepada perorangan.

2. THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, Ltd. (BTMU).

BTMU adalah suatu perusahaan yang didirikan pada tanggal 15 Agustus 1919 berdasarkan hukum dan perundang-undangan Jepang, berkedudukan dan berkantor di 2-7-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8388, Jepang, dan merupakan salah satu bank berkelas internasional di Jepang yang kegiatan utamanya adalah usaha perbankan komersial.

Sedangkan pemegang saham lainnya yang memiliki saham di atas 5% yaitu PT Hermawan Sentral Investama yang juga merupakan bagian dari pemegang saham pendiri.

1. ACOM CO., LTD. (ACOM)

ACOM is a public company established based on the the laws and regulations prevailing in Japan, domiciled and headquartered in 1-1, Marunouchi 2-chome, Chiyodaku, Tokyo 100-8307, Japan. Its shares are listed on the Tokyo Stock Exchange. ACOM is a subsidiary of Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG).

ACOM Group's main businesses are loan and credit card business, loan guarantee, loan services, and overseas financial business, while ACOM itself is engaged in the financing services industry by providing loans to individuals.

2. THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, Ltd. (BTMU)

BTMU is a company established on 15 August 1919 based on the laws and regulations prevailing in Japan, domiciled and headquartered in 2-7-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8388, Japan, and is one of the banks with international standards in Japan. Its main business is commercial banking.

The other shareholder with ownership of more than 5% is PT Hermawan Sentral Investama, which is part of the founding shareholders.

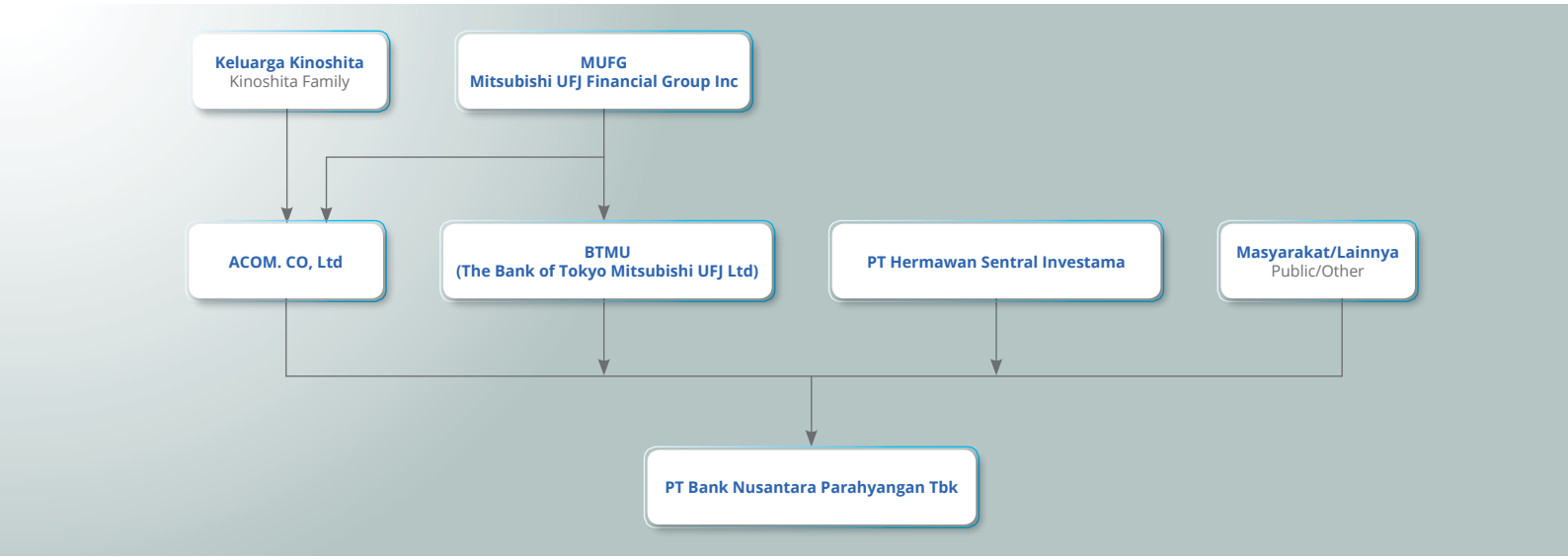

Dewan Komisaris

Komposisi, Kriteria dan Independensi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan salah satu organ Perusahaan yang melakukan pengawasan dan memberikan arahan kepada Direksi dalam menjalankan kepengurusan Bank. Dewan Komisaris turut melakukan pemantauan terhadap efektivitas implementasi GCG yang dilakukan Bank sesuai dengan Anggaran Dasar.

Berdasarkan RUPS pada tanggal 27 Juni 2016, jumlah anggota Dewan Komisaris adalah 4 (empat) orang dengan susunan sebagai berikut:

Board of Commissioners

Composition, Criteria, and Independence of the Board of Commissioners

The Board of Commissioners is an organ of the Company which is responsible for supervising and advising the Board of Directors in carrying out the management of the Bank. The Board of Commissioners also participates in monitoring the effectiveness of the implementation of GCG by the Bank in accordance with the Articles of Association.

Based on the GMS on 27 June 2016, the Board of Commissioners consists of 4 (four) members, with the following composition:

Nama / Name	**Jabatan /** Position
Michio Atsuda	Presiden Komisaris / President Commissioner
Tatang Hermawan	Komisaris / Commissioner
Karel Tanok	Komisaris Independen / Independent Commissioner
Bachtiar Alam	Komisaris Independen / Independent Commissioner

Komposisi Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan tenaga kerja asing Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang menetapkan bahwa 50% atau lebih anggota Dewan Komisaris wajib berkewarganegaraan Indonesia.

Anggota Dewan Komisaris tidak boleh merangkap jabatan, baik sebagai Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pejabat Eksekutif pada Lembaga/Perusahaan bukan Lembaga Keuangan Lain/Bukan Bank atau sebagai Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan Fungsi Pengawasan pada Perusahaan Anak Bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank.

Komisaris Independen merupakan anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau dengan pemegang saham mayoritas atau hubungan lainnya dengan Bank, di mana hal tersebut dapat memengaruhi pengambilan keputusan dan tindakan secara independen. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia, Bank BNP memiliki 2 (dua) orang anggota Komisaris Independen dengan setiap Komisaris Independen mengetuai Komite-komite di bawah Dewan Komisaris.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Berdasarkan PBI No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 dan SE Bank Indonesia No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 perihal pelaksanaan GCG Bagi Bank

The composition of the Board of Commissioners is in accordance with Financial Services Authority Regulation stipulating that 50% or more members of the Board of Commissioners should be Indonesian citizens.

Members of the Board of Commissioners must not hold concurrent position either as a Member of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and/or as Executive Officer in any Non-Financial/Non-Bank Institution or Company or as a Member of the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or Executive Officer performing Supervisory Function in a Non-Bank Subsidiary controlled by the Bank.

The Independent Commissioners are members of the Board of Commissioners who do not have any financial, management, share ownership and/or family relations with other members of the Board of Commissioners and/or with major shareholders or any other relations with the Bank, which may affect decision-making and independence of action. In accordance with Bank Indonesia Regulations, Bank BNP has 2 (two) members as Independent Commissioners, with each of the Independent Commissioners chairing the Committees under the Board of Commissioners.

Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners

In accordance with PBI No. 8/4/PBI/2006 dated 30 January 2006 on the Implementation of GCG for Commercial Banks, as amended by the PBI No. 8/14/PBI/2006 dated 5 October 2006 and Bank Indonesia Circular No. 15/15/DPNP dated 29 April 2013 on the Implementation of GCG

Umum yang mana telah dicabut dan digantikan dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, dan SEOJK no. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kegiatan operasional sehari-hari.

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan dan mengarahkan Direksi untuk menjamin keberlangsungan bisnis Bank BNP. Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan mengadakan rapat Dewan Komisaris dan rapat gabungan dengan Direksi. Tugas pokok, fungsi (TUPOKSI) dan tanggung jawab Dewan Komisaris diatur lebih detail di dalam Pedoman Kerja Dewan Komisaris *(Board Manual)* Tahun 2017.

Pedoman/Piagam Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki pedoman kerja yang disebut *Board Manual*, yang merupakan salah satu komponen dari Struktur Tata Kelola dalam penjabaran atas Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang mengacu pada Anggaran Dasar Perusahaan dan merupakan uraian komitmen Dewan Komisaris yang bertujuan untuk:

1. Menjadikan pedoman tentang tugas pokok dan fungsi masing-masing organ perusahaan.
2. Meningkatkan & memperjelas kualitas dan efektivitas hubungan kerja antar organ.

Dengan diberlakukannya *Board Manual*, maka semua kegiatan usaha Perusahaan dapat dilaksanakan secara harmonis dengan mengacu kepada prinsip-prinsip GCG.

Dalam upaya pencapaian visi dan misi Perusahaan, maka Dewan Komisaris berkomitmen untuk membangun Bank BNP yang bersih, yang dilandasi prinsip kejujuran dan transparansi, serta menghindarkan diri dari konflik kepentingan.

Hal tersebut di atas dinyatakan dalam pernyataan komitmen bersama Dewan Komisaris dan Direksi serta ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 15 Mei 2017.

Pedoman Kerja Dewan Komisaris (*Board Manual*)

Board Manual merupakan suatu petunjuk penatalaksanaan pekerjaan Dewan Komisaris yang menjelaskan tahapan aktivitas secara sistematis, terstruktur dan mudah dipahami serta dapat dilakukan dengan konsisten, sehingga dengan sendirinya *Board Manual* ini dapat menjadi acuan bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya masing-masing untuk mencapai Visi dan Misi Perusahaan sebagaimana tertuang dalam kebijakan strategis Bank.

for Commercial Banks as revoked and supplanted by OJK Regulation No. 55/POJK.03/2016 dated 7 December 2016 on the Implementation of GCG for Commercial Banks, and SEOJK no. 13/SEOJK.03/2017 on the Implementation of GCG for Commercial Banks, the Board of Commissioners is not involved in decision-making activities related to daily operations.

The Board of Commissioners performs a supervisory function on management policies and advises the Board of Directors with respect to the Bank's business sustainability. The Board of Commissioners performs its duties and responsibilities by conducting the Board of Commissioners meetings, as well as joint meetings with the Board of Directors. The main duties, functions, and responsibilities of the Board of Commissioners are further detailed in the 2017 Board Manual.

Board of Commissioners Charter/Guideline

The Board of Commissioners has a guideline called the Board Manual as a component of the Governance Structure as explained in the Corporate Governance Guideline that refers to the Company's Articles of Association. It is a detailed explanation of the Board of Commissioners' commitments, whose purposes are:

1. To prepare the guideline for the primary duties and functions of each organs of the Company.
2. To improve and clarify the quality and efficacy of working relationships between the organs.

With the Board Manual in place, all of the Company's business activities can be conducted in harmony by referring to the principles of GCG.

In an effort to achieve the Company's vision and mission, the Board of Commissioners is committed to promoting the growth of Bank BNP in a clean, honest, and transparent manner, while avoiding at all times any conflict of interest.

The above is stated in the joint statement of commitment of the Board of Commissioners and the Board of Directors, signed by both the Board of Commissioners and the Board of Directors on 15 May 2017.

Board of Commissioners' Board Manual

The Board Manual provides a guideline for the work procedures of the Board of Commissioners, detailing the stages of activities in a systematic, structured and easily understandable manner so as to be able to be executed with consistency, and automatically the Board Manual will be used as the reference for the Board of Commissioners in carrying out their duties in order to achieve the Vision and Mission of the Company as stipulated in the Bank's strategic policy.

Board Manual bagi Dewan Komisaris merupakan uraian tentang tugas dan kewajiban, hak dan wewenang, fungsi, persyaratan, keanggotaan, masa jabatan, etika jabatan, serta rapat Dewan Komisaris yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip hukum korporasi, ketentuan sesuai Anggaran Dasar Bank BNP maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip korporasi yang sehat dengan memperhatikan arahan dari Pemegang Saham maupun praktik-praktik terbaik (*best practices*) dalam penerapan GCG.

The Board Manual for the Board of Commissioners details the duties and obligations, rights and authority, functions, requirements, membership, term of office, work ethics, and the meetings of the Board of Commissioners, all of which are prepared based on the principles of corporate laws, in line with Bank BNP's Articles of Association as well as the prevailing regulations and the principles of a sound corporation, by taking into account the directive from the Shareholders and the best practices in GCG implementation.

Penyusunan *Board Manual* ini ditujukan untuk memberi batasan/arahan serta untuk menjelaskan hubungan kerja Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya agar tercipta pengelolaan perusahaan yang secara profesional, transparan dan efisien. Board Manual Edisi Revisi 2 Tahun 2017 ini telah disahkan di dalam Surat Keputusan Direksi NOKEP: 076-DIR/GCG/05/2017.

The preparation of the Board Manual is intended to provide boundaries/directives as well as to explain the working relationship of the Board of Commissioners in carrying out its duties so as to foster a professional, transparent, and efficient management of the Company. The Board Manual, 2nd Revised Edition 2017, has been ratified by the Directors' Decree NOKEP: 076-DIR/GCG/05/2017.

Isi dari *Board Manual* Edisi Revisi 2 Tahun 2017 mengatur Dewan Komisaris mengenai hal-hal sebagai berikut:

A. Kelembagaan Dewan Komisaris
B. Tugas Pokok, Fungsi (TUPOKSI) dan Tanggung Jawab
C. Pengangkatan, Pengunduran Diri dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris
D. Pengisian Jabatan Lowong Dewan Komisaris
E. Independensi dan Transparansi Dewan Komisaris
F. Pengaturan Kerja Dewan Komisaris
G. Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris
H. Kebijakan Menggunakan Saran Profesional
I. Hak dan Kewenangan Dewan Komisaris
J. Sarana dan Prasarana Dewan Komisaris
K. Program Orientasi dan Peningkatan Kapabilitas Dewan Komisaris
L. Benturan Kepentingan
M. Organ Pendukung Dewan Komisaris
N. Pelaporan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.

The Board Manual, 2nd Revised Edition 2017 governs the following aspects of the Board of Commissioners:

A. Institution of the Board of Commissioners
B. Main Duties and Functions and Responsibilities
C. Appointment, Resignation and Dismissal of Members of the Board of Commissioners
D. Filling of Vacancies in the Board of Commissioners
E. Independence and Transparency of the Board of Commissioners
F. Work Procedures of the Board of Commissioners
G. Performance Evaluation of the Board of Commissioners
H. Policy on Obtaining Professional Advice
I. Rights and Authority of the Board of Commissioners
J. Facilities for the Board of Commissioners
K. Orientation and Capability Enhancement of the Board of Commissioners
L. Conflict of Interest
M. Supporting Organs of the Board of Commissioners
N. Reporting of the Board of Commissioners' Responsibility

Hak dan Kewenangan Dewan Komisaris

1. a. Anggota Dewan berhak menerima gaji/remunerasi dan/atau tunjangan lainnya yang besaran dan bentuk tunjangan lainnya dari waktu ke waktu disesuaikan berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi yang telah ditetapkan dan disetujui oleh RUPS serta dituangkan dalam Surat Keputusan tersendiri sesuai amanat RUPS.

   b. Remunerasi bagi anggota Dewan dalam bentuk upah variabel yang diberikan, nantinya akan diberikan sebagian dalam bentuk tunai dan sebagian dalam bentuk saham, dalam hal terkait kedudukannya sebagai *Material Risk Taker* (MRT), maka anggota Dewan akan terkena kebijakan Malus dan *Claw Back*.

Rights and Authority of the Board of Commissioners

1. a. Members of the Board of Commissioners has the right to receive salary/remuneration and/or other benefits whose amount and form from time to time can be adjusted based on the recommendations of the Remuneration and Nomination Committee as established and approved by the GMS and stipulated in separate decrees in line with the mandate of the GMS.

   b. Remuneration for the members of the Board of Commissioners in variable amount will be paid partly in cash and the rest in shares, in the event that their position as a Material Risk Taker (MRT), such members will be governed by the "Malus" and Claw Back policy.

2. Dewan dalam melakukan pengawasannya dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali:
   a. Penyediaan dana kepada pihak terkait, sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum;
   b. Hal-hal lain yang diatur dalam Anggaran Dasar Bank BNP atau peraturan perundangan yang berlaku.
3. Dalam hal pemberian persetujuan penyediaan dana kepada pihak terkait, maka penetapan limit plafon penyediaan dana kepada pihak terkait harus diputuskan dalam rapat Dewan. Pengambilan keputusan tersebut merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Dewan, sehingga tidak menghapuskan/meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan pengurusan Bank.

4. Anggota Dewan melalui Rapat Dewan setiap waktu berhak dan dapat memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberhentian anggota Direksi tersebut wajib diberitahukan kepada yang bersangkutan dengan disertai alasannya.
   Dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah pemberhentian sementara tersebut, Dewan diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS (sesuai ketentuan yang mengaturnya) yang akan memutuskan apakah anggota Direksi tersebut akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula. Terhadap anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut diberikan kesempatan untuk hadir guna membela diri. Apabila setelah melewati batas 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal pemberhentian sementara tidak dapat dilaksanakan RUPS, maka dengan sendirinya pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali seperti posisi dan jabatan semula.
5. Berhak untuk memanggil anggota Direksi, sejauh diperlukan dan secara signifikan untuk memberikan penjelasan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas mereka.
6. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan berhak untuk mendapatkan data serta informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu dari Direksi, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal berikut:
   a. Rencana penyusunan, penyusunan dan hasil akhir dari Rencana Bisnis Bank (RBB);
   b. Laporan Bulanan/periodik dalam bentuk *financial highlights*; dan
   c. Laporan-laporan tertentu dan Laporan Lainnya, segera setelah diketahui mengenai adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan, *fraud*/penyimpangan dan kondisi lainnya serta

2. The Board of Commissioners in conducting its duties are not allowed to be involved in the decision-making part of any operational activities of the Bank, except:
   a. Provision of funds to related parties as stipulated in Bank Indonesia Regulation on Maximum Lending Limit for Commercial Banks;
   b. Other aspects stipulated in the Articles of Association of Bank BNP or the prevailing regulations.
3. In the event that an approval is given for the provision of funding to a related party, the lending limit for the funding to the related party must be established in a Board of Commissioners meeting. The decision must be made as part of the supervisory duty of the Board of Commissioners, so that this does not eliminate/release the responsibility of the Board of Directors for managing the Bank.
4. Members of the Board of Commissioners through the Board of Commissioners meetings at any time have the rights and may suspend temporarily one or more members of the Board of Directors should said member or members have acted in violation of the Articles of Association and/or the prevailing regulations. The dismissal of the member or members of the Board of Directors must be notified to the person(s) in question along with the reason.
   Within 90 (ninety) calendar days since that temporary suspension, the Board of Commissioners is required to convene GMS (in accordance with the prevailing regulations) to determine whether the member or members of the Board of Directors in question will be permanently dismissed or reinstated. The member or members of the Board of Directors in question are allowed to attend the meeting to provide explanation or defense. If after the 90 (ninety) calendar day limit a GMS cannot be convened, the temporary suspension is automatically revoked by law, and the person(s) in question can return to work in their previous roles and positions.
5. The Board of Commissioners has the right to summon the Directors when deemed necessary and significant to provide explanation in relation to the execution of their duties.
6. In conducting its duties and responsibilities, the Board of Commissioners has the right to acquire accurate, relevant and timely information and data from the Directors, including but not limited to:
   a. Planning, preparation and results of the Bank's Business Plan (RBB);
   b. Monthly (period) reports in the form of financial highlights; and
   c. Certain reports and other reports as soon as it is known that a violation of any law or regulation or fraud or other such conditions have occurred, or that a situation that may endanger the existence of the

kondisi yang diperkirakan dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank, sesuai dengan ketentuan.

7. Setiap keputusan/kebijakan Dewan Komisaris dilakukan melalui mekanisme Rapat Dewan Komisaris yang dihadiri secara kuorum anggota Dewan, dalam hal rapat Dewan tidak terlaksana, maka mekanisme *Circular Resolution*/Sirkulasi diperkenankan kepada seluruh Anggota Dewan.
8. Menandatangani seluruh dokumen yang berkaitan dengan administratif Dewan, perkreditan, pelaporan dan kelengkapan administrasi lainnya yang berkaitan dengan kelancaran operasional bank sejauh sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Bank.

9. Kuasa Penandatanganan atas nama Dewan Komisaris sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 033-KOM/KEP/3/2016 tentang Penunjukan Penandatanganan Dokumen-dokumen atas nama Dewan Komisaris ditetapkan sebagai berikut:
   a. Pihak yang menandatangani dan/atau mewakili Dewan Komisaris adalah Presiden Komisaris;
   b. Apabila Presiden Komisaris berhalangan hadir untuk menandatangani dokumen dimaksud, maka salah satu dari Komisaris Independen dapat bertindak untuk dan atas nama Presiden Komisaris;
   c. Masing-masing anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani dokumen sebagaimana diatur dalam angka (2.a) & (2.b) dalam SK tersebut wajib memperoleh penjelasan dan penyampaian informasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris yang dibuktikan dengan tanda terima, surat dan dokumen pendukung lainnya sebelum penandatanganan dokumen dimaksud.

Rapat Dewan Komisaris

Selama 2017, Dewan Komisaris melakukan 6 (enam) kali pertemuan dalam rapat internalnya. Pengambilan keputusan rapat dilakukan melalui musyawarah dan mufakat, serta dituangkan dalam risalah rapat yang diberikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris untuk didokumentasikan dengan baik. Jika dalam mekanisme rapat tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan melalui suara terbanyak. Jika terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam rapat Dewan Komisaris, hal tersebut dicantumkan dengan jelas dalam risalah rapat beserta alasannya.

Frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat Dewan Komisaris sepanjang 2017 sebagai berikut:

Bank exists. This must be carried out in line with the prevailing regulations.

7. All decisions/policies of the Board of Commissioners are reached through the Board of Commissioners meetings attended by quorum of its members. In the event that a Board of Commissioners meeting fails to be convened, the Circular Resolution mechanism is allowed to be applied to all members.
8. The Board of Commissioners has the right to sign all documents related administratively to the Board of Commissioners, lending, reporting and other administrative requirements in relation to the Bank's operations, as long as they are in accordance with the Board of Commissioners' authority established by the prevailing regulations and the Bank's Articles of Association.
9. Authority to sign documents on behalf of the Board of Commissioners is in accordance with the Decree of the Board of Commissioners No. 033-KOM/KEP/3/2016 on Appointment for Signing Documents on Behalf of the Board of Commissioners, with the following stipulations:
   a. The party signing for and/or representing the Board of Commissioners is the President Commissioner;
   b. Should the President Commissioner be absent to sign the document, one of the Independent Commissioners may act for and on behalf of the President Commissioner;
   c. Each member of the Board of Commissioners that does not sign the document as governed in points (2.a) and (2.b) in the Decree must obtain explanation and information on the execution of duties and functions of the Board of Commissioners as proven by a receipt, letter, and other supporting documentation prior to the signing of the document.

Board of Commissioners' Meetings

Throughout 2017, the Board of Commissioners held 6 (six) internal meetings. The decisions of the meetings are made through deliberation and consensus, and disclosed in the minutes of meetings circulated to all members of the Board of Commissioners to be documented properly. If the meeting is not conducted through deliberation and consensus, decisions will be made through majority vote. However, if there are dissenting opinions in the Board of Commissioners' meetings, the dissenting opinions and their reasons have to be clearly stated in the minutes of meetings.

Frequency of meetings and attendance rate of members of the Board of Commissioners in the Board of Commissioners meetings throughout 2017 are as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Total Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Frekuensi Frequency (%)
Michio Atsuda	Presiden Komisaris / President Commissioner	6	6	100%
Tatang Hermawan	Komisaris / Commissioner	6	2	33%
Karel Tanok	Komisaris Independen / Independent Commissioner	6	6	100%
Bachtiar Alam	Komisaris Independen / Independent Commissioner	6	6	100%

Hasil rapat Dewan Komisaris merupakan rekomendasi dan/atau nasihat yang dapat diimplementasikan oleh RUPS dan/atau Direksi.

The results of the Board of Commissioners meetings are recommendations and/or suggestions that can be implemented by the General Meeting of Shareholders and/or the Board of Directors.

Agenda Rapat Dewan Komisaris

Board of Commissioners' Meeting Agendas

Tanggal Rapat / Meeting Date	Materi Rapat	Meeting Materials
20 Jan 2017	Membahas agenda kerja Dewan Komisaris dan Komite-komite di bawah Dewan Komisaris tahun 2017;	Discussion on work agendas of the Board of Commissioners and Committees under the Board of Commissioners in 2017;
	Membahas laporan kinerja Komite-komite di bawah Dewan Komisaris tahun 2016.	Discussion on reports of performance of committees under the Board of Commissioners in 2016.
30 Mar 2017	NPL dan AYDA;	NPL and AYDA;
	Isu-isu penting lainnya.	Other important issues.
25 Jul 2017	Laporan hasil pengawasan aktif Dewan Komisaris terhadap fungsi Kepatuhan Bank semester I tahun 2017;	Report on active supervision by the Board of Commissioners on the Bank's Compliance function for 1st semester of 2017;
	Hotline;	Hotline;
	Lain-lain	Others
29 Ags 2017	Rekomendasi *Fit and Proper Test* untuk pengganti Presiden Komisaris;	Recommendations on Fit and Proper Test for President Commissioner's position candidate;
	Lain-lain.	Others.
25 Okt 2017	Pembahasan hasil *exit meeting* OJK.	Discussion on results from exit meeting with OJK.
23 Nov 2017	Membahas laporan semester 1/2017 dari Komite-Komite;	Discussion on 1st semester of 2017's report from Committees;
	Membahas tindak lanjut hasil pemeriksaan OJK terkait Komisaris;	Discussion on follow up measures on OJK's audit of Commissioners;
	RBB 2018–2020;	Bank's Business Plan 2018–2020;
	Lain-lain.	Others.

Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Komisaris

Pengawasan atas kebijakan kepengurusan yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris, antara lain adalah sebagai berikut

1. Menyetujui rekomendasi usulan calon Presiden Direktur yang baru.
2. Menyetujui rekomendasi usulan remunerasi Presiden Direktur yang baru.
3. Menyetujui rekomendasi Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Pemeriksaan Tahun Buku 2017, yaitu Deloitte.
4. Menyetujui rekomendasi usulan Rekomendasi Penunjukan Kantor Akuntan Publik dalam rangka Evaluasi Penilaian Kinerja Fungsi SKAI Bank BNP dan

Board of Commissioners' Supervision and Recommendations

The Board of Commissioners' supervision on the management's policies includes:

1. Approving the recommendation regarding candidates for the President Director position.
2. Approving the recommendation regarding remuneration for the new President Director.
3. Approving the recommendation regarding the appointment of public accounting form to audit the Company's financial statements for 2017, namely Deloitte.
4. Approving the recommendation regarding the appointment of public accounting form to evaluate the performance of SKAI function in Bank BNP and the

Fungsi Audit Intern atas Penggunaan TI periode 01 Januari 2014 sampai 31 Desember 2016.
5. Menyetujui rekomendasi Usulan Perubahan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, Pemberian Bonus atas Laba Perseroan Tahun Buku 2016.
6. Menyetujui rekomendasi usulan Calon Presiden Komisaris.
7. Menyetujui Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko.
8. Menyetujui Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Audit.
9. Memonitoring rencana penjualan tanah dan bangunan/ aset milik Bank.
10. Memberikan rekomendasi-rekomendasi/saran perbaikan kepada Direksi berdasarkan hasil pengawasan Dewan Komisaris yang dilakukan melalui Komite-Komite untuk diperhatikan dan ditindaklanjuti oleh Direksi.

Uji Kemampuan & Kepatutan
Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang baik, dan tidak berasal dari mantan anggota Direksi dan/atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan Bank.

Setiap anggota Dewan Komisaris juga telah lulus *Fit & Proper Test* (Uji Kemampuan & Kepatutan) dan memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Dengan demikian, Dewan Komisaris secara efektif diangkat setelah dinyatakan lulus *Fit & Proper Test*.

Program Orientasi bagi Komisaris Baru
Program orientasi bagi Komisaris yang baru diangkat, diatur di dalam Board Manual Dewan Komisaris dan Direksi. Program Orientasi yang diberikan dapat berupa sebuah sesi pertemuan yang disertai dengan presentasi baik dari Dewan maupun Direksi, kunjungan ke kantor-kantor Perseroan, perkenalan dengan para pejabat eksekutif/*Branch Manager* serta pengenalan program-program SDM lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris
Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dibuat sebagai pedoman untuk menilai efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris secara kolegial dan individu. Evaluasi penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan oleh Pemegang Saham, khususnya Pemegang Saham Mayoritas/ Pengendali. Penilaian kinerja mengacu pada target-target yang tertuang dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) yang telah ditetapkan di awal periode dan dituangkan sebagai Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators* atau KPI) Dewan Komisaris.

internal audit function on the use of IT for the period of 1 January 2014 to 31 December 2016.
5. Approving the recommendation regarding the changes to the remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners, and bonus from the Company's FY2016 net income.
6. Approving the recommendation regarding the candidates for the President Commissioner position.
7. Approving the recommendation regarding the changes to the membership of the Risk Monitoring Committee.
8. Approving the recommendation regarding the changes to the membership of the Audit Committee.
9. Monitoring the Bank's plans to sell land and fixed assets.
10. Providing recommendations and inputs to the Board of Directors based on the result of supervision by the Board of Commissioners via the committees, to be followed up by the Board of Directors.

Fit & Proper Test
Each of the members of the Board of Commissioners of Bank BNP possesses a strong integrity, competence, and adequate financial reputation, and does not come from the previous members of the Board of Directors and/or Bank Executive Officers or other parties related to the Bank.

Each member of the Board of Commissioners has passed the Fit & Proper Test and has been approved by Financial Services Authority. Therefore, members of the Board of Commissioners are appointed effectively after being declared as passing the Fit & Proper Test.

Orientation for New Commissioners
Orientation program for newly appointed Commissioners is regulated in the Board Manual for both the Board of Commissioners and the Board of Directors. The orientation program provided can take the form of a meeting featuring a presentation from the Board of Commissioners or the Directors, visitation to the Company's offices, introduction to the executive officers or branch managers, and introduction to other HR programs in line with the perceived needs.

Board of Commissioners' Performance Assessment
The Board of Commissioners' performance assessment measures the efficacy of execution of its duties and responsibilities, both performed collegially and individually. The performance assessment of the Board of Commissioners is conducted by Shareholders, in particular the Primary/ Controlling Shareholders. The Board of Commissioners' performance assessment targets are stipulated in the Bank's Business Plan (RBB) as determined in the beginning of the period and manifested as Key Performance Indicators (KPI) for the Board of Commissioners.

KPI Dewan Komisaris, pada dasarnya adalah KPI Korporat dan sama dengan KPI untuk Direksi, hanya saja penekanan pertanggungjawabannya adalah pada aspek fungsi pengawasan, mitigasi risiko dan kepatuhan pada seluruh peraturan perundangan yang berlaku.

The KPI for the Board of Commissioners are essentially the same for the Company and the Board of Directors, with a difference in focus, i.e. on the functions of supervision, risk mitigation, and compliance to the prevailing regulations.

Selain penilaian KPI yang dilaksanakan berdasarkan pencapaian kinerja korporat, Bank BNP juga melakukan penilaian kinerja Dewan Komisaris dalam rangka pelaksanaan penilaian kualitas penerapan praktik GCG sesuai kriteria indikator penilaian penerapan *best practices* GCG di Bank BNP.

In addition to the KPI assessment that refers to the achievement of corporate targets, Bank BNP also assesses the Board of Commissioners performance in terms of the implementation of GCG practices quality in line with the criteria for the implementation of GCG best practices in Bank BNP.

Direksi

Direksi merupakan organ Perusahaan yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan seluruh kegiatan usaha Bank BNP dan mempertangungjawabkan pelaksanaan tugasnya melalui RUPS. Direksi berwenang dan bertanggung jawab sesuai dengan Anggaran Dasar Bank BNP yang merujuk kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas, ketentuan OJK dan ketentuan terkait lainnya.

Board of Directors

The Board of Directors is an organ of the Company which is responsible for the management of all business activities of Bank BNP and is the one that assumes accountability for the execution of its duties to the GMS. The Board of Directors has the authority and responsibility that correspond to the Articles of Association of Bank BNP, which refer to the Limited Liability Company Law, OJK Regulations, and other relevant regulations.

Komposisi dan Kriteria Direksi
Berdasarkan RUPST tanggal 2 Juni 2017, jumlah anggota Direksi adalah 5 (lima) orang dengan susunan sebagai berikut:

Composition and Criteria of the Board of Directors
Based on the General Meeting of Shareholders on 2 June 2017, the Board of Directors consists of 5 (five) members, as follows:

Nama / Name	**Jabatan /** Position
Hideki Nakamura	Presiden Direktur / President Director
Kevin Cahyadi Tatang	Direktur Bisnis / Business Director
Markus Sugiono	Direktur Operasional / Operations Director
Eiichiro Sakai	Direktur Kredit, Keuangan & IT / Credit, Finance & IT Director
Trie Karjati Wibowo	Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko / Compliance & Risk Management Director

Sebelum RUPST 2 Juni 2017, susunan Direksi adalah:

Priort to the AGMS on 2 June 2017, the composition of the Board of Directors was:

Nama / Name	**Jabatan /** Position
Takeru Agawa	Presiden Direktur / President Director
Kevin Cahyadi Tatang	Direktur Bisnis / Business Director
Markus Sugiono	Direktur Operasional / Operations Director
Eiichiro Sakai	Direktur Kredit, Keuangan & IT / Credit, Finance & IT Director
Trie Karjati Wibowo	Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko / Compliance & Risk Management Director

Bank BNP patuh pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengharuskan calon Direktur wajib memenuhi persyaratan dan lolos seleksi Uji Kemampuan & Kepatutan yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia.

Bank BNP complies with Financial Services Authority regulations that require candidates for Directors to meet the requirements and to pass the Fit & Proper Test held by Bank Indonesia.

Merujuk pada Peraturan Bursa Efek Indonesia mengenai perubahan Peraturan No. I-A tentang Pencatatan Saham

Referring to the Indonesian Stock Exchange Regulation regarding amendments to Regulation No. I-A on Shares

dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat yang mewajibkan setiap Perusahaan Tercatat sekurang-kurangnya memiliki 1 (satu) Direktur Independen, Direktur yang membawahkan Kepatuhan & Manajemen Risiko telah ditetapkan sebagai Direktur Independen.

Listing and Securities other than Shares issued by Listed Companies, which requires all Listed Companies to have at least 1 (one) Independent Director, the Director in charge of Compliance & Risk Management was appointed as an Independent Director.

Independensi Direksi

Independensi Direksi Bank BNP terbukti dari tidak adanya perangkapan jabatan dan kepemilikan saham yang tidak sesuai peraturan, tidak terdapat hubungan keluarga, baik antara anggota Direksi maupun antara anggota Direksi dengan Dewan Komisaris dan pemegang saham pengendali. Seluruh anggota Direksi Bank BNP tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan/atau lembaga lain, selain yang diizinkan oleh Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 dan No. 8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan GCG Bank Umum, yang telah dicabut dan digantikan dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Board of Directors' Independence

The independence of the Board of Directors of Bank BNP is reflected by the fact that its members have no concurrent position and share ownership that is not in accordance with the regulations, no family relations either with other members of the Board of Directors or with the members of the Board of Commissioners and with the controlling shareholders. All members of the Board of Directors of Bank BNP do not have concurrent position as a Commissioner, Director or Bank Executive Officer, other than those permitted by Bank Indonesia Regulations No. 8/4/PBI/2006 and No. 8/14/PBI/2006 on the Implementation of GCG for Commercial Banks, as revoked and supplanted by OJK Regulation No. 55/POJK.03/2016 dated 7 December 2016 on the Implementation of GCG for Commercial Banks.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi bertugas dan bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan usaha Bank, yaitu dari terselenggaranya kegiatan bisnis Bank BNP sesuai dengan ketentuan yang mengatur dan memenuhi sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB), serta amanat yang dituangkan dalam RUPS. Direksi turut bertanggung jawab dan terlibat dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional Bank sehari-hari.

Duties and Responsibilities of the Board of Directors

The Board of Directors has the duties and responsibilities on all of the Bank's business activities, in line with the regulations regarding implementation of Bank BNP's business activities and the achievement of goals set out in the Bank's Business Plan, as well as the mandate set out in the GMS. The Board of Directors also assumes the responsibility and is involved in decision-making activities related to the Bank's daily operations.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi / Duties and Responsibilities of the Board of Directors

Nama / Name	**Jabatan /** Position	**Tugas dan Tanggung Jawab /** Duties & Responsibilities
Hideki Nakamura*	Presiden Direktur President Director	Sebagai *Chief Executive Officer* (CEO) dan penanggung jawab utama atas pelaksanaan bisnis dan operasional Bank, serta mengkoordinasikan tugas dan tanggung jawab seluruh anggota Direksi dalam mewujudkan dan memenuhi sasaran/target perusahaan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank, dan mengacu pada GCG, Manajemen Risiko serta kebijakan lainnya yang telah diamanatkan oleh RUPS. As the Chief Executive Officer (CEO) and the main party responsible for the execution of the Bank's business and operations, responsible for coordinating the duties and responsibilities of all members of the Board of Directors in achieving the Bank's business targets as stated in the Bank's Business Plan, by adhering to the principles of GCG, Risk Management, and other policies mandated by the GMS.
Kevin Cahyadi Tatang	Direktur Bisnis Business Director	Bertanggung jawab atas pencapaian dan pengendalian atas target bisnis Bank sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank, menjaga posisi likuiditas Bank, melakukan perluasan usaha, menetapkan strategi pemasaran yang efektif, dan inovasi bisnis yang berkesinambungan, dengan mengacu pada prinsip GCG, Manajemen Risiko, serta kebijakan yang telah diamanatkan oleh RUPS. Responsible for achieving and controlling the Bank's business targets as stated in the Bank's Business Plan, maintaining the Bank's liquidity position, expanding business, determining effective marketing strategies, and continuously innovating the business, by abiding to the principles of GCG, Risk Management, and other policies mandated by the GMS.

Nama / Name	**Jabatan /** Position	**Tugas dan Tanggung Jawab /** Duties & Responsibilities
Markus Sugiono	Direktur Operasional Operations Director	Bertanggung jawab atas kecepatan dan ketepatan proses dan layanan operasional Bank, akurasi pengelolaan dokumen operasional, pelaksanaan administrasi dokumen perkreditan Bank, memastikan proses pengikatan kredit sesuai dengan prinsip-prinsip legalitas yang berlaku, sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank, GCG, Manajemen Risiko, dan kebijakan lainnya yang telah diamanatkan oleh RUPS. Responsible for the speed and accuracy of processes and operational services of the Bank, accuracy in the management of operational documents, administering of the Bank's credit-related documentation, ensuring the alignment of lending approval processes with the prevailing legal principles, as stated in the Bank's Business Plan, GCG, Risk Management, and other policies mandated by the GMS.
Eiichiro Sakai	Direktur Kredit, Keuangan & IT Credit, Finance & IT Director	Bertanggung jawab atas penyusunan administrasi keuangan Bank sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku dan akurasi data keuangan yang dihasilkan, pengelolaan fungsi kredit planning dan kredit quality, pengelolaan kredit tanpa agunan dan penerapan sistem informasi teknologi yang tepat guna bagi Bank sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank, GCG, Manajemen Risiko dan kebijakan lainnya yang telah diamanatkan oleh RUPS. Responsible for the Bank's financial administration in alignment with the prevailing accounting principles, and for the accuracy of all financial data, management of credit planning and credit quality, for the management of unsecured loans, and for the implementation of effective information technology system in the Bank as stipulated in the Bank's Business Plan, for the GCG, Risk Management, and other policies mandated by the GMS.
Trie Karjati Wibowo	Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko Compliance & Risk Management Director	Bertanggung jawab atas terlaksananya kepatuhan atas prosedur dan ketentuan yang berlaku baik internal maupun eksternal yang telah ditetapkan dan penerapan pelaksanaan manajemen risiko oleh seluruh level organisasi, dengan mengacu pada GCG dan Manajemen Risiko, serta kebijakan lainnya yang diamanatkan oleh RUPS Responsible for the Bank's compliance with prevailing internal and external procedures and provisions, and the implementation of risk management by all levels of the organization, by abiding to the principles of GCG, Risk Management, and other policies mandated by the GMS.

* Hideki Nakamura diangkat sebagai Presiden Direktur menggantikan Takeru Agawa berdasarkan RUPST tanggal 2 Juni 2017.
Hideki Nakamura was appointed as President Director, replacing Takeru Agawa, based on AGMS on 2 June 2017.

Pedoman/Piagam Direksi

Direksi memiliki pedoman kerja yang disebut *Board Manual* Edisi Revisi 2 Tahun 2017, sebagai salah satu komponen dari Struktur Tata Kelola dalam penjabaran atas Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*GCG Code*) yang mengacu pada Anggaran Dasar Perusahaan dan merupakan uraian komitmen Direksi yang bertujuan untuk:

1. Menjadikan pedoman tentang tugas pokok dan fungsi masing-masing organ perusahaan.
2. Meningkatkan dan memperjelas kualitas dan efektifitas hubungan kerja antar organ.

Dengan diberlakukannya *Board Manual* ini, maka semua kegiatan usaha Perusahaan dapat dilaksanakan secara harmonis dengan mengacu kepada prinsip-prinsip GCG.

Dalam upaya pencapaian visi dan misi perusahaan, maka Direksi berkomitmen untuk membangun Bank BNP yang bersih, yang dilandasi prinsip kejujuran dan transparan serta menghindarkan diri dari konflik kepentingan.

Hal tersebut dinyatakan dalam pernyataan komitmen bersama Direksi dan Dewan Komisaris serta ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris pada tanggal 15 Mei 2017.

Board of Directors Charter/Guideline

The Board of Directors has a guideline called the Board Manual, 2nd Revised Edition 2017, as a component of the Governance Structure as detailed in the Corporate Governance Guideline that refers to the Company's Articles of Association. It is a thorough explanation of the Board of Directors' commitments, whose purposes are:

1. Setting a guideline for the primary duties and functions of each corporate governance organs.
2. To improve and clarify the quality and efficacy of working relationships between them.

With this Board Manual in place, all of the Company's business activities can be conducted in harmony by referring to the principles of GCG.

In an effort to achieve the Company's vision and mission, the Board of Directors is committed to promoting the growth of Bank BNP in a clean, honest, and transparent manner, while avoiding at all times any conflict of interest.

The above is stated in the joint statement of commitment of the Board of Commissioners and the Board of Directors, signed by both the Board of Commissioners and the Board of Directors on 15 May 2017.

Pedoman Kerja Direksi (*Board Manual*)

Sama halnya dengan Dewan Komisaris, Pedoman kerja Direksi. (*Board Manual*) merupakan suatu petunjuk penatalaksanaan pekerjaan Direksi yang menjelaskan tahapan aktivitas secara sistematis, terstruktur dan mudah dipahami serta dapat dilakukan dengan konsisten, sehingga *Board Manual* ini dapat menjadi acuan bagi Direksi dalam melaksanakan tugasnya masing-masing untuk mencapai Visi dan Misi Perusahaan sebagaimana tertuang dalam kebijakan strategis Bank.

Board Manual bagi Direksi merupakan uraian tentang tugas dan kewajiban, hak dan wewenang, fungsi, persyaratan, keanggotaan, masa jabatan, etika jabatan, serta rapat Direksi yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip hukum korporasi, ketentuan sesuai Anggaran Dasar Bank BNP maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip korporasi yang sehat dengan memperhatikan arahan dari Pemegang Saham maupun praktik-praktik terbaik (*best practices*) dalam penerapan GCG.

Penyusunan *Board Manual* ini ditujukan untuk memberi batasan/arahan serta untuk menjelaskan hubungan Direksi dalam melaksanakan tugasnya agar tercipta pengelolaan perusahaan yang secara profesional, transparan dan efisien. Board Manual ini telah disahkan di dalam Surat Keputusan Direksi NOKEP: 076-DIR/GCG/05/2017.

Isi dari *Board Manual* Edisi Revisi 2 Tahun 2017 mengatur Direksi mengenai hal-hal sebagai berikut:

A. Kelembagaan Direksi
B. Tugas Pokok, Fungsi (TUPOKSI) & Tanggung jawab
C. Pengangkatan, Pengunduran Diri dan Pemberhentian Anggota Direksi
D. Pengisian Jabatan Lowong Direksi
E. Independensi & Transparansi Direksi

F. Pengaturan Kerja Direksi
G. Penilaian Kinerja Direksi
H. Kebijakan Menggunakan Saran Profesional
I. Hak dan Kewenangan Direksi
J. Sarana dan Prasarana Direksi
K. Program Orientasi dan Peningkatan Kapabilitas Direksi

L. Benturan Kepentingan
M. Organ Pendukung Direksi
N. Pelaporan Tanggung Jawab Direksi

Beberapa pokok pedoman kerja Direksi yang diatur di dalam *Board Manual* dijabarkan sebagai berikut.

Board of Directors' Board Manual

As is for the Board of Commissioners, the work guidelines for the Board of Directors. The Board Manual provides a guideline for the work procedures of the Board of Directors, detailing the stages of activities in a systematic, structured and easily understandable manner so as to be able to be executed with consistency, and the Board Manual will naturally be used as the reference for the Board of Directors in carrying out their duties in order to achieve the Vision and Mission of the Company as stipulated in the Bank's strategic policy.

The Board Manual for the Board of Directors details the duties and obligations, rights and authority, functions, requirements, membership, term of office, work ethics, and the meetings of the Board of Directors, all of which are prepared based on the principles of corporate laws, in line with Bank BNP's Articles of Association as well as the prevailing regulations and the principles of a sound corporation, by taking into account the directive from the Shareholders and the best practices in GCG implementation.

The preparation of the Board Manual is intended to provide boundaries/directives as well as to explain the working relationship of the Board of Directors in carrying out its duties so as to foster a professional, transparent, and efficient management of the Company. The Board Manual has been ratified by the Directors' Decree NOKEP: 076-DIR/GCG/05/2017.

The Board Manual, 2nd Revised Edition 2017 governs the following aspects of the Board of Directors:

A. Institution of the Board of Directors
B. Main Duties, Functions and Responsibilities
C. Appointment, Resignation and Dismissal of Members of the Board of Directors
D. Filling of Vacancies in the Board of Directors
E. Independence and Transparency of the Board of Directors
F. Work Procedures of the Board of Directors
G. Performance Evaluation of the Board of Directors
H. Policy on Obtaining Professional Advice
I. Rights and Authority of the Board of Directors
J. Facilities for the Board of Directors
K. Orientation and Capability Enhancement of the Board of Directors
L. Conflict of Interest
M. Supporting Organs of the Board of Directors
N. Reporting of the Board of Directors' Responsibility

Several main work guidelines for the Board of Directors regulated in the Board Manual are further detailed below.

Tugas Pokok, Fungsi (TUPOKSI) & Tanggung Jawab

Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Perseroan serta mengelolanya sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank BNP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Secara khusus tugas dan wewenang Direksi diatur lebih terperinci sebagaimana garis besar yang dituangkan dalam Anggaran Dasar Bank sebagai berikut:

1. Presiden Direktur sebagai penanggung jawab utama atas pelaksanaan bisnis dan operasional Bank, serta mengkoordinasikan tugas dan tanggung jawab seluruh anggota Direksi dalam mewujudkan dan memenuhi sasaran/target perusahaan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank dan mengacu pada GCG, Manajemen Risiko serta kebijakan lainnya yang telah diamanatkan oleh RUPS.
2. Menetapkan kebijakan kepengurusan Perseroan termasuk di dalamnya mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang atau beberapa orang pejabat eksekutif/ pegawai Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang atau badan lain.
3. Bertanggung jawab atas pengendalian bisnis, aktivitas operasional, ketersediaan likuiditas, Kualitas aktiva dan aktiva produktif, penggunaan teknologi informasi yang tepat guna serta melakukan perluasan usaha, menetapkan strategi pemasaran yang efektif, dan inovasi bisnis yang berkesinambungan dengan mengacu pada prinsip GCG, Manajemen Risiko serta kebijakan lainnya, yang telah diamanatkan oleh RUPS.
4. Dalam hal RUPS tidak memutuskan pembagian kerja dan tanggung jawab Direksi, maka Presiden Direktur bersama anggota Direksi lainnya melakukan pembagian tugas sesuai jabatan dan fungsinya serta seluruh Direksi harus menandatangani kesepakatan pembagian tugas dan tanggung jawab tersebut dalam sebuah dokumen resmi.
5. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk mengangkat/memberhentikan, penetapan remunerasi dan/atau tunjangan, pensiun atau jaminan hari tua, jasa produksi dan penghasilan lain bagi pegawai Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Membentuk Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*).
7. Menatalaksanakan/melakukan kegiatan penyelamatan aktiva bermasalah melalui restrukturisasi dan/ atau penyelesaian kredit namun dengan kewajiban melaporkan kepada Dewan Komisaris yang ketentuan tata cara pelaporannya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

Main Duties, Functions and Responsibilities

The Board of Directors bears full responsibility to manage the Company in line with its authority and responsibilities mandated to the Board of Directors as stipulated in Bank BNP's Articles of Association and the prevailing regulations. Specifically, the duties and authority of the Board of Directors are stipulated in greater detailed in accordance with the following outlines present in the Bank's Articles of Association:

1. The President Director is the main party responsible for business and operations of the Bank and for coordinating tasks and responsibilities of all the members of the Board of Directors in achieving the Company's targets as stipulated in the Bank's Business Plan and with due regard to GCG, Risk Management, and other policies mandated by the GMS.
2. Determine the Company's management policy, including to establish the transfer of authority of the Board of Directors to represent the Company in and outside of the court of law to one or more members of the Board of Directors specifically appointed for the purpose, or to one or more executive officers of the Company, either individually or collectively, or to one or more persons or institutions.
3. Responsible for managing the business, operational activities, liquidity, quality of assets and productive assets, use of effective information technology and business expansion, determination of an effective marketing strategy, and sustainable business innovation, by upholding the principles of GCG, Risk Management, and other policies mandated by the GMS.
4. In the event that the GMS does not determine the division of duties and responsibilities of the Board of Directors, the President Director and the other members of the Board of Directors divide the duties in accordance with their respective positions and functions, and all members of the Board of Directors must sign an agreement for the division of duties and responsibilities made into a formal document.
5. Set rules regarding the Company's employment aspect, including appointment/dismissal, remuneration and/or benefits, pension or retirement fund, production fee and other income for the Company's employees based on the prevailing regulations.
6. Establish the Corporate Secretary function.
7. Salvage non-performing assets through restructuring and/or resolution of credit, with obligation to report to the Board of Commissioners, for which the procedures are determined by the Board of Commissioners.

8. Melakukan penghapusan tagih dan hapus buku atas piutang macet (NPL) yang selanjutnya dilaporkan dan dipertanggungjawabkan dalam Laporan Tahunan Bank.
9. Menyiapkan Rencana Jangka Panjang Perseroan (*Corporate Planning*), Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan (RBB)/*Business Plan* dan rencana kerja lainnya, berikut perubahannya serta menyampaikannya paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tahun buku baru dimulai kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan.
10. Melaksanakan rapat-rapat reguler dan rutin Direksi maupun *Joint Meeting* dengan Dewan Komisaris.
11. Bertanggungjawab untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) baik Tahunan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas hasil kinerja dalam periode tahun buku dan meminta persetujuan Pemegang Saham untuk hal-hal yang bukan kewenangan Direksi dan Komisaris serta pelaksanaan RUPS Luar Biasa sesuai kebutuhan.
12. Membuat dan memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, dan Risalah Rapat Direksi dan Risalah Rapat *Joint Meeting* dengan Komisaris.
13. Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan Perseroan, serta dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan.
14. Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit.
15. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan.
16. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan di bidang Pasar Modal.
17. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya, serta menghindari terjadinya temuan berulang.
18. Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian dan pembagian tugasnya.
19. Memastikan fungsi komite-komite di bawah Direksi berjalan dengan maksimal dan efektif serta mendorong pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal yang terintegrasi, memaksimalkan fungsi pengawasan oleh unit Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) sesuai dengan SPFAIB, penerapan dan pelaksanaan Manajemen Risiko dan Kepatuhan.

8. Writeoff non-performing loans (NPL), subsequently reported and accounted for in the Bank's Annual Report.
9. Prepare the Bank's Long-Term Planning, Work Plan and Budget (Business Plan), and other work plans, along with their amendments, and submit them at the latest 60 (sixty) days before the start of a new fiscal year to the Board of Commissioners for approval.
10. Conduct regular meetings of the Board of Directors as well as joint meetings with the Board of Commissioners.
11. Be responsible to convene the Annual General Meeting of Shareholders as part of its accountability for the performance in the fiscal year and request the approval of the Shareholders for issues that are beyond the Board of Directors's or the Board of Commissioners' authority, and to convene the Extraordinary General Meeting of Shareholders as deemed necessary.
12. Prepare and maintain the Shareholders' List, Special List, Minutes of GMS, and Minutes of Board of Directors Meetings and Minutes of Joint Meetings with the Board of Commissioners.
13. Prepare the Annual Report as part of its accountability for managing the Company and the Company's financial documents as mentioned in the laws on Company Documents.
14. Prepare the Financial Statements based on the Financial Accounting Standards and submit the statements to a public accountant to be audited.
15. Prepare an accounting system in line with the Financial Accounting Standards and based on the principles of internal control, especially the segregation of management, recording, storage, and supervisory functions.
16. Provide regular reports according to the manner and timing required by the prevailing regulations, and other reports when requested by the Board of Commissioners and/or shareholders, by taking into account the prevailing regulations especially those in the capital markets.
17. Follow up audit findings and recommendations from the IAU, external auditors, supervision results from Bank Indonesia/Financial Services Authority and/or other authorities, and prevent similar findings from reoccurring.
18. Prepare the organization structure of the Company, complete with the details and division of duties.
19. Ensure that the committees under the Board of Directors function optimally and effectively and support the implementation of an integrated Internal Control System, which maximizes the function of supervision by the Internal Audit Unit (IAU) in accordance with the SPFAIB, implementation of Risk Management and Compliance.

20. Menciptakan budaya kerja yang harmonis, kondusif, objektif, keterbukaan dan wajib menerapkan pelaksanaan manajemen risiko dan prinsip-prinsip GCG secara utuh dan menyeluruh terhadap seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, serta menjaga citra perusahaan.
21. Menjalankan fungsi sosial dan kemasyarakatan (CSR, Edukasi & Literasi Keuangan) juga menghadiri pertemuan atau undangan yang diselenggarakan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Pasar Modal, BMPD, Perbanas, dan instansi lainnya.
22. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris, pemegang saham, OJK untuk Pengawasan Bank maupun peraturan perundang-undangan khususnya peraturan di bidang Pasar Modal.
23. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Hak dan Kewenangan Direksi

Direksi berwenang untuk melakukan antara lain hal-hal sebagai berikut:

1. a. Anggota Direksi berhak menerima gaji/renumerasi dan/atau tunjangan lainnya yang besaran dan bentuk tunjangan lainnya dari waktu ke waktu disesuaikan berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi yang telah ditetapkan dan disetujui oleh RUPS serta dituangkan dalam Surat Keputusan tersendiri sesuai amanat RUPS;
   b. Remunerasi bagi Direksi dalam bentuk upah variable yang diberikan, nantinya akan diberikan sebagian dalam bentuk tunai dan sebagian dalam bentuk saham, dalam hal terkait dengan kedudukannya sebagai *Material Risk Taker* (MRT) maka anggota Direksi akan terkena kebijakan Malus dan *Claw Back*.

2. Dalam hal pemberian persetujuan penyediaan dana kepada pihak ketiga, berdasarkan jumlah tertentu harus diputuskan melalui mekanisme Rapat Komite Perkreditan, atau ditetapkan lain sebagaimana keputusan Rapat Direksi, kecuali penetapan limit plafon dan penyediaan dana kepada pihak terkait harus disetujui Dewan Komisaris. Pengambilan keputusan tersebut merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris, namun tidak menghapuskan/ meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan pengurusan Bank dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku dan Anggaran Dasar Bank.
3. Mewakili dan mengikat Perseroan dengan pihak lain serta menjalankan segala tindakan kepengurusan dan kepemilikan sesuai ketentuan yang mengaturnya;

20. Foster a harmonious, conducive, objective, transparent work culture where risk management and GCG principles are upheld fully and entirely across all levels of the organization, and maintain the image of the Company.
21. Carry out the social functions (CSR, Education & Financial Literacy) as well as attend events/invitations from Bank Indonesia, Financial Services Authority, the capital market authorities, BMPD, Perbanas, and other relevant institutions.
22. Provide explanation on any issues inquired by the members of the Board of Commissioners, shareholders, or OJK regarding the Bank's supervision or the prevailing regulations, especially those prevailing in the capital market.
23. Ensure that other obligations are conducted in line with the stipulations of the Articles of Association and as determined by the GMS based on the prevailing regulations.

Rights and Authority of the Board of Directors

The Board of Directors has the right to do among others the following:

1. a. Members of the Board of Directors has the right to receive salary/remuneration and/or other benefits whose amount and form from time to time can be adjusted based on the recommendations of the Remuneration and Nomination Committee as established and approved by the GMS and stipulated in separate decrees in line with the mandate of the GMS;
   b. Remuneration for the members of the Board of Directors in variable amount will be paid partly in cash and the rest in shares, in the event that their position as a Material Risk Taker (MRT), such members will be governed by the "Malus" and Claw Back policy.
2. In the event of approving any provision of funds to third parties, approval for certain amounts of funding must be avhieved through the meeting of Credit Committee or determined otherwise as stipulated in the Board of Directors meeting, with the exception of the determination of the lending limit and provision of funds to related parties, which must obtain approval from the Board of Commissioners. Such decisionmaking is part of the supervisory function of the Board of Commissioners, but does not eliminate/release the responsibility of the Board of Directors for managing the Bank.
3. Represent and bind the Company with other parties as well as conduct all management and ownership functions in line with the prevailing regulations;

4. Mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan surat kuasa untuk tindakan-tindakan tertentu;
5. Direksi diberikan hak untuk melakukan *entertain* dengan pihak ketiga yang berkaitan dengan usaha Bank, dalam jumlah dan limit yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku di Bank BNP.
6. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara waktu berhak untuk memperoleh kembali posisinya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, apabila dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah pemberhentian sementara tersebut, Bank tidak/lalai menyelenggarakan RUPS (sesuai ketentuan yang mengaturnya) atau RUPS diselenggarakan sesuai ketentuan dan anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut diberikan kesempatan untuk hadir guna membela diri sehingga hasil akhir RUPS tersebut menolak usulan pemberhentian anggota Direksi tersebut.

4. Appoint one or more persons as representatives of the Board of Directors by power of attorney to perform certain actions;
5. The Board of Directors has the right to entertain third parties related to the Bank's businesses, within an amount determined in line with the prevailing regulations in Bank BNP.
6. Members of the Board of Directors that are temporarily suspended may regain their post or be reinstated to their original positions if within the period of 90 (ninety) calendar days after the temporary suspension the Bank does not or fails to convene a GMS (in line with the prevailing regulations) or that the GMS is conducted in line with the prevailing regulations, and the suspended members attend the GMS and are given the opportunity to defend their position, which results in the GMS resolving to reject the motion to dismiss the members in question.

Rapat Direksi

Di tahun 2017 Direksi menyelenggarakan rapat sebanyak 14 (empat belas) kali rapat internal. Rincian rapat dan kehadiran Direksi dalam rapat dijabarkan berikut ini.

Board of Directors' Meetings

In 2017, the Board of Directors held 14 (fourteen) internal meetings. The meetings and meeting attendance details are provided below.

Nama Name	**Jabatan** Position	**Jumlah Rapat** Total Meetings	**Jumlah Kehadiran** Total Attendance	**Frekuensi** Frequency (%)
Hideki Nakamura*	Presiden Direktur / President Director	7	7	100%
Kevin Cahyadi Tatang	Direktur Bisnis / Business Director	14	12	86%
Markus Sugiono	Direktur Operasional / Operations Director	14	14	100%
Eiichiro Sakai	Direktur Kredit, Keuangan & IT / Credit, Finance & IT Director	14	14	100%
Trie Karjati W	Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko / Compliance & Risk Management Director	14	13	93%

* Hideki Nakamura diangkat sebagai Presiden Direktur menggantikan Takeru Agawa berdasarkan RUPST tanggal 2 Juni 2017.
Hideki Nakamura was appointed as President Director, replacing Takeru Agawa, based on AGMS on 2 June 2017.

Agenda Rapat Direksi **Board of Directors' Meeting Agendas**

Tanggal Rapat / Meeting Date	**Materi Rapat**	**Meeting Materials**
20 Jan 2017	Laporan Kinerja data Desember 2016; Laporan *self-assessment* profil risiko Desember 2016; Laporan *compliance data* Desember 2016 & *update new regulations*; *Business update* Q4/2016; Lain-lain.	Performance Report for December 2016; Risk Profile Self-Assessment Report for December 2016; Compliance Report for December 2016 & update new regulations; Business update Q4/2016; Others.
28 Feb 2017	Laporan kinerja data Januari 2017; Laporan *self-assessment* profil risiko Januari 2017; Laporan *compliance data* Januari 2017 & *update new regulations*; Estimasi NPL/Kolektibilitas sampai dengan Desember 2017; Metode perhitungan CKPN; *Corporate planning* 10 tahun; Lain-lain.	Performance Report for January 2016 Risk Profile Self-Assessment Report for January 2017; Compliance Report for January 2017 & update new regulations; Estimation of NPL/Collectibility up to December 2017; Allowance for Impairment Losses; 10-year corporate planning; Others.

Tanggal Rapat / Meeting Date	Materi Rapat	Meeting Materials
01 Mar 2017	Rencana revisi parameter pembentukan CKPN.	Plan for revision of parameters for Allowance for Impairment Losses formation.
30 Mar 2017	Laporan kinerja data Februari 2017; Laporan *self-assessment* profil risiko Februari 2017; Laporan *compliance data* Februari 2017 & *update new regulations*; Hasil audit pajak (estimasi tambahan bayar); Proposal strategi & penanganan *recovery* mikro; Presentasi pemeriksaan SKAI Q1/2017; Lain-lain.	Performance Report for February 2017; Risk Profile Self-Assessment Report for February 2017; Compliance Report for February 2017 & update new regulations; Results from tax audit (estimation of additional payment); Proposal of strategy and handling of recovery of micro segment; Presentation of Internal Audit's audit in Q1/2017; Others.
20 Apr 2017	Laporan kinerja data Maret 2017; Laporan *self-assessment* profil risiko Maret 2017; *Action plan* terhadap rentabilitas; Proposal mengenai pembagian dividen tahun buku 2016; *Business update* Q1/2017; Laporan *compliance data* Maret 2017 & *Update new regulations*; Hasil pemeriksaan kantor pajak; Lain-lain.	Performance Report for March 2017; Risk Profile Self-Assessment Report for March 2017; Action plan for profitability; Proposal for distribution of dividends for fiscal year 2016; Business update Q1/2017; Compliance Report for March 2017 & update new regulations; Audit results by tax office; Others.
26 Apr 2017	*Financial highlight action plan* terhadap rentabilitas.	Financial highlight action plan for profitability.
19 Mei 2017	Laporan kinerja data April 2017; Laporan *self-assessment* profil risiko dan *action plan* April 2017; Laporan *compliance* dan APU-PPT April 2017; *Update new regulations*; Penambahan revisi Rencana Strategis Bank 2017–2019; Lain-lain.	Performance Report for April 2017; Risk Profile Self-Assessment Report for April 2017; Compliance Report and APU-PPT report for April 2017; Update new regulations; Additional revisions to the Bank's Strategic Plan for 2017–2019; Others
20 Jun 2017	Pengarahan pengelolaan Bank, Visi dan Misi Presiden Direktur; Laporan kinerja data Mei 2017; Laporan *compliance* dan APU-PPT Mei 2017; *Progress* program efisiensi (presentasi Corporate Planning); *Update* regulasi baru Mei 2017; *Update* hasil kunjungan Tim Integrated Compliance dan Internal Audit BTMU; Lain-lain.	Direction on Bank's management, Vision and Mission by the President Director; Performance Report for May 2017; Compliance Report and APU-PPT report for May 2017; Progress of efficiency program (presentation by Corporate Planning); Update new regulations in May 2017; Update on results from BTMU's Integrated Compliance Team and Internal Audit's visit; Others.
21 Jul 2017	Laporan kinerja data Juni 2017; Laporan *self-assessment* profil risiko Juni 2017; *Update* regulasi baru Juni 2017; *Business performance* Q2/2017; Laporan KTA Mirai+ bulan Juni 2017; Lain-lain.	Performance Report for June 2017; Risk Profile Self-Assessment Report for June 2017; Update new regulations in June 2017; Business performance in Q2/2017; KTA Mirai+ Report for June 2017; Others.
25 Ags 2017	Laporan kinerja data bulan Juli 2017; Laporan *self-assessment* profil risiko Juli 2017; Laporan *compliance* dan APU-PPT Juli 2017; Laporan KTA Mirai+ bulan Juli 2017; *Update business performance* Juli 2017; *Update* regulasi baru Juli 2017; Lain-lain.	Performance Report for July 2017; Risk Profile Self-Assessment Report for July 2017; Compliance Report and APU-PPT report for July 2017; KTA Mirai+ Report for July 2017; Update business performance in July 2017; Update new regulations in July 2017; Others.
26 Sep 2017	Laporan Kinerja data Agustus 2017; Laporan *self-assessment* profil risiko Agustus 2017; Laporan *compliance* dan APU-PPT Agustus 2017; *Update* regulasi baru bulan Agustus 2017; Laporan KTA Mirai+ bulan Agustus 2017; Lain-lain.	Performance Report for August 2017; Risk Profile Self-Assessment Report for August 2017; Compliance Report and APU-PPT report for August 2017; Update new regulations in August 2017; KTA Mirai+ Report for August 2017; Others.

Tanggal Rapat / Meeting Date	Materi Rapat	Meeting Materials
25 Okt 2017	Laporan kinerja data September 2017; Laporan profil risiko Juni dan September 2017; Pembahasan hasil pemeriksaan OJK dan tindak lanjutnya; Laporan *compliance* dan APU-PPT September 2017; *Update* regulasi baru bulan September 2017; Laporan KTA Mirai+ bulan September 2017; *Update business performance* September 2017; Pengajuan persetujuan hasil *review* Visi dan Misi Bank BNP; Lain-lain.	Performance Report for September 2017; Risk Profile Report for June and September 2017; Discussion on OJK's audit results and the follow up measures; Compliance Report and APU-PPT report for September 2017; Update new regulations in September 2017; KTA Mirai+ Report for September 2017; Update business performance in September 2017; Proposal for approval of Bank BNP's Vision and Mission review results; Others.
20 Nov 2017	Laporan kinerja data Oktober 2017; Laporan profil risiko Juni dan Oktober 2017; Laporan *compliance* dan APU-PPT Oktober 2017; Laporan tim Task Force penyelesaian atas komitmen hasil pemeriksaan OJK Periode 30 Juni 2017; Laporan KTA Mirai+ bulan Oktober 2017; *Update business performance* Oktober 2017; *Update existing* struktur organisasi 2017 dan *draft* struktur organisasi efektif Januari 2018; Rencana Bisnis Bank (RBB) 2018–2020; Pembahasan mengenai penambahan modal; Lain-lain.	Performance Report for October 2017; Risk Profile Report for June and October 2017; Compliance Report and APU-PPT report for October 2017; Report from Task Force team for resolution of commitments to OJK's audit results for the 30 June 2017's period; KTA Mirai+ Report for October 2017; Update business performance in October 2017; Update of existing organization structure in 2017 and draft of new organization structure to be effective in January 2018; Bank's Business Plan (RBB) for 2018–2020; Discussion on addition of capital; Others.
20 Des 2017	Laporan kinerja data November 2017; Laporan *self-assessment* profil risiko November 2017; Laporan *compliance* dan APU-PPT November 2017; Laporan Tim Task Force penyelesaian atas komitmen hasil pemeriksaan OJK periode 30 Juni 2017; Laporan KTA Mirai+ bulan November 2017; *Update business performance* November 2017; Pembahasan mengenai rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi; Pembahasan mengenai rencana raker dan HUT Bank BNP di bulan Januari 2018; Pembahasan mengenai rencana pelaksanaan RUPS Luar Biasa; Lain-lain.	Performance Report for November 2017; Risk Profile Self-Assessment Report for November 2017; Compliance Report and APU-PPT report for November 2017; Report from Task Force team for resolution of commitments to OJK's audit results for the 30 June 2017's period; KTA Mirai+ Report for November 2017; Update business performance in Oc November tober 2017; Discussion on recommendations from the Board of Commissioners to the Board of Directors; Discussion on work meeting plan and Bank BNP's anniversary in January 2018; Discussion on the implementation of Extraordinary GMS; Others.

Rapat Gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris

Mekanisme pelaksanaan rapat gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi dapat diinisiasi oleh pemrakarsa rapat yang memiliki kepentingan. Dalam program kerja Direksi harus dilakukan penjadwalan rapat gabungan dengan Dewan Komisaris guna mendapatkan masukan/arahan dan bimbingan dari Dewan Komisaris, sedangkan dalam program kerja Dewan Komisaris, inisiatif rapat gabungan diperlukan karena adanya kepentingan untuk melakukan koordinasi/ konfirmasi dan monitoring atas jalannya kegiatan usaha Bank BNP oleh Direksi, di mana keinginan melakukan rapat gabungan tersebut didasarkan pada itikad baik.

Joint Meetings of the Board of Directors and the Board of Commissioners

The joint meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors may be initiated by any interested party. In the work program of the Board of Directors, joint meetings with the Board of Commissioners must be scheduled so that direction and guidance from the Board of Commissioners can be obtained. Meanwhile, in the work program of the Board of Commissioners, the initiative for the joint meetings is required as there is an interest to perform coordination/ confirmation and monitoring of Bank BNP's business as led by the Board of Directors, whereby the initiative for the joint meeting is based on good faith.

Sepanjang 2017, Direksi menyelenggarakan 11 (sebelas) kali rapat gabungan dengan Dewan Komisaris.

Throughout 2017, the Board of Directors held a total of 11 (eleven) joint meetings with the Board of Commissioners.

Tingkat Kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris dalam Rapat Gabungan

Attendance of the Board of Directors and the Board of Commissioners in the Joint Meetings

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Total Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Frekuensi Frequency (%)
Michio Atsuda	Presiden Komisaris / President Commissioner	11	11	100%
Tatang Hermawan	Komisaris / Commissioner	11	3	27%
Karel Tanok	Komisaris Independen / Independent Commissioner	11	11	100%
Bachtiar Alam	Komisaris Independen / Independent Commissioner	11	11	100%
Hideki Nakamura*	Presiden Direktur / President Director	6	6	100%
Kevin Cahyadi Tatang	Direktur Bisnis / Business Director	11	11	100%
Markus Sugiono	Direktur Operasional / Operations Director	11	11	100%
Eiichiro Sakai	Direktur Kredit, Keuangan & IT / Credit, Finance & IT Director	11	11	100%
Trie Karjati W	Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko / Compliance & Risk Management Director	11	11	100%

* Hideki Nakamura diangkat sebagai Presiden Direktur menggantikan Takeru Agawa berdasarkan RUPST tanggal 2 Juni 2017.
Hideki Nakamura was appointed as President Director, replacing Takeru Agawa, based on AGMS on 2 June 2017.

Agenda Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris 2017

Joint Meetings of the Board of Directors and the Board of Commissioners Agendas in 2017

Tanggal Rapat / Meeting Date	Materi Rapat	Meeting Materials
23 Feb 2017	Pembahasan hasil kinerja Q4/2016; Pembahasan hasil kinerja Januari 2017; Metode perhitungan CKPN; Penerapan APU-PPT semester 2/2016; *Corporate planning* BNP 10 tahun.	Discussion on Q4/2016 performance results; Discussion on January 2017's performance; Method for calculating Allowance for Impairment Losses; Implementation of APU-PPT 2nd semester of 2016; BNP's 10-year corporate planning.
23 Feb 2017	Rapat Panel Perkreditan: *Economic Outlook* dan *Loan Portfolio Monitoring*; Laporan portofolio KTA Mirai+; *Overview* 25 *main debtors & action plan*; *Update special asset management;* Laporan NPL & AYDA; Lain-lain.	Credit Panel Meeting: Economic Outlook and Loan Portfolio Monitoring; KTA Mirai+ portofolio report; Overview of 25 main debtors & action plan; Update special asset management; NPL & AYDA report; Others.
27 Apr 2017	Pembahasan hasil kinerja Q1/2017; *Progress update* komentar Direksi dan Dewan Komisaris pada rapat gabungan sebelumnya; Efisiensi biaya; *Action plan* atas rentabilitas; *Update* penerapan APU-PPT; Penjelasan agenda RUPS; Lain-lain.	Discussion on Q1/2017 performance results; Update progress on comments from the Board of Directors and the Board of Commissioners in the previous joint meeting; Cost efficiency; Action plan for profitability; Update of APU-PPT implementation; Explanation of GMS agendas; Others.
23 Mei 2017	Pembahasan Revisi RBB 2017; *Progress action plan* April 2017; Rencana kegiatan (*action plan*) penerapan program APU-PPT tahun 2017.	Discussion on RBB 2017 revision; Progress of action plan in April 2017; Action plan for APU-PPT implementation program for 2017.

Tanggal Rapat / Meeting Date	Materi Rapat	Meeting Materials
23 Mei 2017	Rapat Panel Perkreditan: *Economic Outlook* dan *Loan Portfolio Monitoring*; Laporan portofolio KTA Mirai+; Laporan kepada Dewan Komisaris untuk pemberian kredit di atas Rp50 miliar; *Overview* 25 *main debtors & action plan*; *Update special asset management;* *Update litigation & collateral selling support*; *Update* dari Workout & Recovery Division; Lain-lain.	Credit Panel Meeting: Economic Outlook and Loan Portfolio Monitoring; KTA Mirai+ portofolio report; Report to the Board of Commissioners on loan disbursement with values of above Rp50 billion; Overview of 25 main debtors & action plan; Update special asset management; Update litigation & collateral selling support; Update from Workout & Recovery Division; Others.
25 Jul 2017	Hasil rapat koordinasi (RAKOR) 2017; Kasus *fraud* di KC Wahid Hasyim Jakarta; Pembahasan hasil kinerja Bank Q2/2017; Penerapan APU-PPT semester 1/2017.	Results from Coordination Meeting 2017; Fraud case at Wahid Hasyim Jakarta Branch Office; Discussion on Q2/2017's performance results; Implementation of APU-PPT 1st semester of 2017.
29 Ags 2017	Rapat Panel Perkreditan: *Economic Outlook* dan *Loan Portfolio Monitoring*; *Update* dari KTA Mirai+; *Overview* 25 *main debtors & action plan*; *Update* dari Workout & Recovery; *Update litigation;* Lain-lain.	Credit Panel Meeting: Economic Outlook and Loan Portfolio Monitoring; Update from KTA Mirai+; Overview of 25 main debtors & action plan; Update from Workout & Recovery Division; Update litigation; Others.
29 Ags 2017	Pelaksanaan tindak lanjut rakor terkait *selected target market*; Pelaksanaan kebijakan penyelesaian kredit di bawah pokok.	Implementation of follow up measures to the coordination meeting related to selected target market; Implementation of below-principal loans resolution policy.
25 Okt 2017	Laporan kinerja Bank Q3/2017; Pembahasan hasil pemeriksaan OJK dan tindak lanjutnya; Pembahasan hasil sementara pemeriksaan pajak tahun buku 2013 dan 2014; Lain-lain.	Bank's performance report for Q3/2017; Discussion on OJK's audit results and the follow up measures; Discussion on interim results of tax audit for fiscal years 2013 and 2014; Others.
23 Nov 2017	Arahan Dewan Komisaris kepada Direksi terkait rekomendasi dari Komite di bawah Dewan Komisaris; Laporan tim Task Force penyelesaian atas komitmen hasil pemeriksaan OJK periode 30 Juni 2017; *Review* pemberian kredit pada *multifinance*; *Update existing* struktur organisasi 2017 dan draft struktur organisasi efektif Januari 2018; Persetujuan RBB 2018–2020; Pembahasan mengenai penambahan modal.	Direction from the Board of Commissioners to the Board of Directors related to the recommendations from Committees under the Board of Commissioners; Report from Task Force team for resolution of commitments to OJK's audit results for the 30 June 2017's period; Review of loan disbursement to multifinance companies; Update of existing organization structure in 2017 and draft of new organization structure to be effective in January 2018; Approval of 2018–2020 RBB; Discussion on addition of capital.
23 Nov 2017	Rapat Panel Perkreditan: Kesimpulan & *follow up meeting* Panel Perkreditan sebelumnya, *Economic Outlook* dan *Loan Portfolio Monitoring*; *Update* dari KTA Mirai+; *Overview* 25 *main debtors & action plan*; *Update* dari Workout & Recovery; *Update* litigasi.	Credit Panel Meeting: Conclusions & follow up of previous Credit Panel Meeting, Economic Outlook and Loan Portfolio Monitoring; Update from KTA Mirai+; Overview of 25 main debtors & action plan; Update from Workout & Recovery Division; Update litigation.

Program Orientasi bagi Direksi Baru

Program orientasi bagi Direksi yang baru diangkat, diatur di dalam *Board Manual* Direksi. Program Orientasi mengenai Bank BNP wajib diberikan kepada anggota Direksi yang baru pertama menjabat di Bank BNP. Program Orientasi yang diberikan dapat berupa sebuah sesi pertemuan yang disertai dengan presentasi baik dari Dewan Komisaris

Orientation Program for New Directors

The orientation program for newly appointed directors is regulated in the Board Manual for both the Board of Commissioners and the Board of Directors. The orientation program provided can take the form of a meeting featuring a presentation from the Board of Commissioners or the Directors, visitation to the offices, introduction to the

maupun Direksi, kunjungan ke kantor-kantor, perkenalan dengan para pejabat eksekutif atau *Branch Manager* serta pengenalan program SDM lainnya sesuai kebutuhan. Pada tahun 2017 terdapat Direksi baru, yaitu Hideki Nakamura yang diangkat sebagai Presiden Direktur berdasarkan RUPST 2 Juni 2017, menggantikan Takeru Agawa. Hideki Nakamura telah mengikuti Program Orientasi Bank BNP pada tanggal 6–13 Juni 2017.

Penilaian Kinerja Direksi

Salah satu aspek penting dalam implementasi GCG adalah peran dari organ perusahaan dalam pelaksanaan GCG. RUPS, Dewan Komisaris, dan Direksi ketiganya merupakan segi tiga organ yang harus bersinergi dalam pelaksanaan pengurusan perusahaan maupun pelaksanaan GCG.

Dewan Komisaris dan Direksi memiliki fungsi dan perannya masing-masing. Penilaian kinerja masing-masing anggota Direksi dilaksanakan sekali setiap tahun.

Penilaian kinerja anggota Direksi dilakukan dengan cara melaksanakan *self-assessment* dan di-*review* oleh Presiden Direktur serta direkomendasikan kepada Komite Nominasi untuk kemudian mendapatkan persetujuan oleh Dewan Komisaris/Presiden Komisaris.

Secara garis besar hal-hal yang menjadi dasar penilaian terhadap anggota Direksi yang tercermin dalam *Key Performance Indicators* (KPI) masing-masing anggota Direksi yang memuat antara lain sebagai berikut:

1. Kinerja Perencanaan/*Performance Planning*
   Bagaimana pelaksanaan Direksi dalam merencanakan/menyusun strategi yang sejalan dengan visi dan misi Perseroan dalam program kerja di tahun berjalan, jangka pendek dan jangka panjangnya dengan tetap berpegang kepada nilai-nilai Perseroan dan prinsip-prinsip dalam GCG.

2. Kinerja Pelaksanaan/*Performance Review*
   Bagaimana eksekusi/pelaksanaan dari kinerja stratejik dalam perencanaan Bank untuk tahun berjalan dilakukan oleh Direksi dengan menggunakan berbagai macam parameter penilaian dan dilakukan secara mandiri/*self-assessment* berdasarkan KPI yang dimilikinya.

3. Kinerja *Monitoring*/Evaluasi dan *Improvement*
   Bagaimana Direksi melakukan *monitoring*, evaluasi dan melakukan *improvement* atas kinerja yang telah dilakukan sehingga dapat memastikan kinerjanya sesuai dengan target stratejik, prinsip GCG dan Manajemen Risiko yang dapat memberikan nilai tambah di kemudian hari.

executive officers or branch managers, and introduction to other HR programs in line with the perceived needs. In 2017, a new Director, Hideki Nakamura, was appointed as President Director based on the resolution of the AGMS on 2 June 2017, to replace Takeru Agawa. Hideki Nakamura participated in Bank BNP's Orientation Program on 6–13 June 2017.

Board of Directors Performance Assessment

One of the crucial aspects in GCG implementation is the roles of the corporate governance organs in implementing GCG. The synergy between the triad of organs, i.e. GMS, the Board of Commissioners, and the Board of Directors, must be maintained both for running and managing the Company as well as for implementing GCG.

The Board of Commissioners and the Board of Directors, have their respective functions and roles. Performance assessment of each member of the Board of Directors is conducted yearly.

Performance assessment of each member of the Board of Directors takes the form of self-assessment, reviewed by the President Director and nominated to the Nomination Committee to obtain subsequent approval from the Board of Commissioners/President Commissioner.

The main aspects underpinning the performance assessment of members of the Board of Directors, as reflected in the Key Performance Indicators (KPI) of each member of the Board of Directors, contain the following:

1. Performance Planning
   How the Board of Directors implements planning and formulation of strategies that are aligned with the Company's vision and mission within the work programs for the current year, the short term, and the long term, while upholding the corporate values and the GCG principles.

2. Performance Review
   The strategic performance in executing the Bank's plans for the current year by the Board of Directors using various assessment parameters, carried out through a self-assessment mechanism based on their own KPI.

3. Evaluation and Improvement Performance
   How the Board of Directors has monitored, evaluated and made improvements to its performance to ensure that it is aligned with the Bank's strategic targets, GCG principles and Risk Management that can provide added value in the future.

Distribusi Kompetensi/Pelatihan dari Direksi

Sebagai bagian dari program pengembangan kompetensi atau pembelajaran berkelanjutan dari Direksi, pada tahun 2017 Hideki Nakamura selaku Presiden Direktur memberikan Motivation Session kepada 163 orang karyawan, yang diadakan pada tanggal 8 Agustus 2017, 11 September 2017, 23 Oktober 2017, 27 November 2017, dan 11 Desember 2017 secara internal

Distribution of Competence/Training by the Board of Directors

As part of the competence development or continuous learning from the Board of Directors, in 2017 Hideki Nakamura, President Director, conducted internal Motivation Sessions to a total of 163 employees on 8 August 2017, 11 September 2017, 23 October 2017, 27 November 2017, and 11 December 2017.

Kebijakan Remunerasi

Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi Bank BNP direkomendasikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan perumusan remunerasi yang berpedoman kepada kebijakan internal Bank BNP, peraturan eksternal yang berlaku, serta pertimbangan atas kinerja Bank BNP. Rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi diserahkan kepada Dewan Komisaris dan disampaikan pada RUPS untuk mendapatkan persetujuan, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank.

Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain yang diperoleh Dewan Komisaris dan Direksi meliputi:

a. Remunerasi dalam bentuk non-natura, termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya antara lain tunjangan, kompensasi berbasis saham, dan bentuk remunerasi lainnya; dan
b. Fasilitas lain dalam bentuk natura/non-natura yaitu penghasilan tidak tetap lainnya, termasuk tunjangan untuk perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dan fasilitas lainnya yang dapat dimiliki maupun tidak dapat dimiliki.

Remuneration Policy

The remuneration of the Board of Commissioners and the Board of Directors of Bank BNP is proposed by the Nomination and Remuneration Committee using a calculation based on a remuneration formula that considers the Bank's internal policy, the prevailing external regulations, and the Bank's performance. The recommendation made by the Nomination and Remuneration Committee is submitted to the Board of Commissioners, and then to the GMS for approval, as stipulated in the Bank's Articles of Association.

The remuneration package/policy and other facilities for the Board of Commissioners and the Board of Directors are:

a. Remuneration in the form of non-natura, including salary and other fixed income among other benefits, stock-based compensation and other forms of remuneration; and
b. Other facilities in the form of natura/non-natura, which is not other fixed income, including allowances for housing, transportation, health insurance, and other facilities that can as well as cannot be possessed.

Jumlah Remunerasi dan Fasilitas Lain Amount of Remuneration and Other Facilities	**Jumlah Diterima dalam 1 Tahun** Amount Received in 1 Year			
	Dewan Komisaris Board of Commissioners		**Direksi** Board of Directors	
	Orang Person	**Rp Juta** Million Rp	**Orang** Person	Rp Juta Million Rp
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)/ Remuneration (salary, bonuses, regular benefits, and other facilities in the form of non-natura)	4	2.256	5	11.719
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang/ Other facilities in the form of natura (housing, transportation, health insurance, etc.) which: a) dapat dimiliki/can be possessed b) tidak dapat dimiliki/cannot be possessed	4	18	5	1.051
TOTAL	**4**	**20.256**	**5**	**12.770**

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun, pada tahun 2017, dikelompokkan sesuai tingkat penghasilan sebagai berikut:

The members of the Board of Commissioners and the Board of Directors who received remuneration in 1 (one) year, in 2017, are classified by income level as follows:

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 Tahun Amount of Remuneration per Person in 1 year*)	Jumlah Direksi Number of Directors	Jumlah Komisaris Number of Commissioners
Di atas Rp2 Miliar More than Rp2 billion	-	-
Di atas Rp1 Miliar s.d. Rp2 Miliar From Rp1 billion to Rp2 billion	4	-
Di atas Rp500 juta s.d Rp1 Miliar From Rp500 million to Rp1 billion	1	2
Rp500 juta ke bawah Below Rp500 million	-	2

*) yang diterima secara tunai/received in cash

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

1. Gaji didefinisikan sebagai hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya.
2. Rasio gaji tertinggi dan terendah, dalam skala perbandingan berikut:
   a. rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah;
   b. rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah;
   c. rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah; dan
   d. rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi.

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji adalah imbalan yang diterima anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai per bulan. Pegawai didefinisikan sebagai pegawai tetap Bank sampai dengan jabatan Pelaksana.

Ratio of Highest to Lowest Salary

1. Salary is defined as the right of an employee to be received, and is stated in monetary terms, as a compensation from company or employer to said employee, and is determined and paid out based on a work agreement, a contract, or the prevailing regulations, including benefits for the employee and their family for the work and/or service rendered.
2. The highest to lowest salaries are compared as follows:
   a. the highest employee's salary against the lowest;
   b. the highest Director's salary against the lowest;
   c. the highest Commissioner's salary against the lowest; and
   d. the highest Director's salary against the highest employee's salary.

The salaries compared in the salary ratios are the monthly amount received by members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or the employees. Employees are defined as permanent employees up to the Executive level.

Rasio Gaji Tertinggi & Terendah	Highest & Lowest Salaries	Rasio *Ratio*
Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	The highest employee's salary against the lowest	34,78
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	The highest Director's salary against the lowest	2,86
Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	The highest Commissioner's salary against the lowest	1,40
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan pegawai tertinggi	The highest Director's salary against the highest employee's salary	2,88

Keterangan *) Description	Gaji Tertinggi Highest Salary	Gaji Terendah Lowest Salary	Rasio Ratio
Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah The highest employee's salary against the lowest	69.550.000	2.000.000	34,78
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah The highest Director's salary against the lowest	200.000.000	70.000.000	2,86
Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah The highest Commissioner's salary against the lowest	70.000.000	50.000.000	1,40
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan pegawai tertinggi The highest Director's salary against the highest employee's salary	200.000.000	69.550.000	2,88

*) Jenis & jumlah remunerasi diambil dari tabel gaji dan fasilitas Komisaris & Direksi./
Type & amount of remuneration refer to the table of Commissioners & Directors salaries and facilities.

Di tahun 2017, Bank BNP telah menyusun kebijakan internal mengenai Tata Kelola Remunerasi, namun untuk penerapannya Bank masih dalam tahap persiapan sesuai dengan yang diatur dalam kebijakan internal dan Peraturan OJK No. 45/POJK.03/2015 mengenai Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum.

In 2017, Bank BNP formulated an internal policy on Remuneration Governance. However, its implementation is still underway, as it is still being prepared in accordance with the internal policy and OJK Regulation No. 45/POJK.03/2015 on Implementation of Governance in Providing Remuneration in Commercial Banks.

Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris & Direksi

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi mengikuti sejumlah pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi kepemimpinan dan kaderisasi. Selama tahun 2017, pelatihan yang diikuti meliputi:

Board of Commissioners & Board of Directors Competence Enhancement

the Board of Commissioners and the Board of Directors participated in a number of training programs to improve their leadership and subsequent development. In 2017, those training programs were:

Komisaris

Commissioners

Nama Name	Materi Pelatihan Title/Topic	Waktu & Tempat Pelatihan Time and Place	Jenis Pelatihan dan Penyelenggara Pelatihan Type of Training and Organizer
Tatang Hermawan	• Workshop Specialized Corporate Governance Leadership Program	Bandung, 30 Sep 2017	In-House Training – IICD
Karel Tanok	• Analisa Cash Flow Projection dalam Kaitannya dengan Penetapan Kemampuan Pembayaran Restrukturisasi	Jakarta, 17–18 Mei 2017	Training – Risk Management Guard
	• Review Kebijakan atau Prosedur Sistem Remunerasi & Mempertajam Implementasi Regulasi	Bandung, 9 Jun 2017	Training – Risk Management Guard
	• Workshop Corporate Semester II	Bandung, 14 Jul 2017	Training – Internal BNP
	• Workshop Specialized Corporate Governance Leadership Program	Bandung, 30 Sep 2017	In-House Training – IICD
Bachtiar Alam	• Corporate Workshop 2017	Bandung, 14 Jan 2017	Training – Internal BNP
	• Workshop Corporate Semester II	Bandung, 14 Jul 2017	Training – Internal BNP

Direksi

Directors

Nama Name	Materi Pelatihan Title/Topic	Waktu & Tempat Pelatihan Time and Place	Jenis Pelatihan dan Penyelenggara Pelatihan Type of Training and Organizer
Hideki Nakamura*	• Workshop Corporate Semester II	Bandung, 14 Jul 2017	Training – Internal BNP
	• Seminar The 3rd Annual ASEAN Marketing Summit, ASEAN & Indonesian: New Opportunities from the East	Jakarta, 7 Sep 2017	Training – PERBANAS
	• Workshop Specialized Corporate Governance Leadership Program	Bandung, 30 Sep 2017	In-House Training – IICD
Kevin Cahyadi Tatang	• Corporate Workshop 2017	Bandung, 14 Jan 2017	Training - Internal BNP
	• Refreshment SMR – Eksekutif	Jakarta, 11 Feb 2017	Refreshment – Risk Management Guard;
	• Workshop Penilaian Dasar-Dasar Properti	Bandung, 4 Apr 2017	Training – BNP University
	• Workshop Corporate Semester II	Bandung, 14 Jul 2017	Training – Internal BNP
	• Workshop Specialized Corporate Governance Leadership Program	Bandung, 30 Sep 2017	In-House Training – IICD

Nama Name	Materi Pelatihan Title/Topic	Waktu & Tempat Pelatihan Time and Place	Jenis Pelatihan dan Penyelenggara Pelatihan Type of Training and Organizer
Markus Sugiono	• Corporate Workshop 2017	Bandung, 14 Jan 2017	Training – Internal BNP
	• Workshop Penilaian Dasar-Dasar Properti	Bandung, 4 Apr 2017	Training – Internal BNP
	• Workshop Corporate Semester II	Bandung, 14 Jul 2017	Training – Internal BNP
	• Workshop Specialized Corporate Governance Leardership Program	Bandung, 30 Sep 2017	In-House Training – IICD
	• Gathering ASPI: Merangkul Ekonomi Digital yang Baru "Bertahan dan Berkembang"	Yogyakarta, 13 Okt 2017	Training – Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia
	• Sosialisasi Ketentuan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN)	Jakarta, 30 Nov 2017	Training – Bank BNP
Eiichiro Sakai	• Corporate Workshop 2017	Bandung, 14 Jan 2017	Training – Internal BNP
	• Workshop Basic Appraisal	Bandung, 24 Mar 2017	Training – Internal BNP
	• Workshop Penilaian Dasar-Dasar Properti	Bandung, 4 Apr 2017	Training – BNP University
	• Workshop Corporate Semester II	Bandung, 14 Jul 2017	Training – Internal BNP
	• Workshop Specialized Corporate Governance Leadership Program	Bandung, 30 Sep 2017	In-House Training – IICD
	• Seminar – Japan Business Desk	Jakarta, 24 Nov 2017	Training – PWC
	• Seminar On New Revenue Recognition Standards – IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers	Jakarta, 19 Des 2017	Training – Deloitte
Trie Karjati Wibowo	• Corporate Workshop 2017	Bandung, 14 Jan 2017	Training – Internal BNP
	• Sosialisasi PP No. 117 Tahun 2016	Jakarta, 1 Feb 2017	Training – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
	• Sosialisasi Ketentuan Bank Umum dan Grand Launching SIKEPO (Sistem Informasi Ketentuan Perbankan Online)	Jakarta, 27 Feb 2017	Training – OJK
	• Workshop Penilaian Dasar-Dasar Properti	Bandung, 4 Apr 2017	Training – Internal Bank BNP
	• Sosialisasi kepada Perbankan mengenai Implementasi Kewajiban Penggunaan Rupiah dan Ketentuan terkait Valuta Asing Lainnya	Jakarta, 10 Apr 2017	Training – Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan
	• Sosialisasi Ketentuan APU-PPT	Jakarta, 4 Mei 2017	Training – OJK
	• Seminar Arah Kebijakan dan Pengembangan Sistem Pembayaran di Indonesia	Jakarta , 24 Mei 2017	Training – Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan
	• Workshop Corporate Semester II	Bandung, 14 Jul 2017	Training- Internal BNP
	• Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi	Jakarta, 7 Sep 2017	Training – KPK
	• Workshop Specialized Corporate Governance Leadership Program	Bandung, 30 Sep 2017	In House Training – IICD
	• Sosialisasi Pokok-pokok Peraturan Bank Indonesia Pelayanan Perizinan Terpadu terkait Hubungan Operasional Bank Umum dengan Bank Indonesia	Jakarta, 27 Nov 2017	Training – Bank Indonesia
	• Seminar Arahan Kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) serta Perlindungan Konsumen di Sektor Perbankan	Jakarta, 7 Des 2017	Training Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan dan Perbankan

* Hideki Nakamura diangkat sebagai Presiden Direktur menggantikan Takeru Agawa berdasarkan RUPST tanggal 2 Juni 2017.
Hideki Nakamura was appointed as President Director, replacing Takeru Agawa, based on AGMS on 2 June 2017.

Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris & Direksi

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan Bank. Dewan Komisaris dan Direksi juga tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain dari yang telah ditetapkan RUPS.

Affiliations of the Board of Commissioners & the Board of Directors

Members of the Board of Commissioners and the Board of Directors shall not exploit the Bank for personal, family, and/or other parties interests which may cause losses to the Bank. The Board of Commissioners and the Board of Directors shall not take and/or receive personal gain from the Bank, other than those set forth in GMS.

Nama Name	Hubungan Keuangan Dengan Financial Relationship with						Hubungan Keluarga Dengan Family Relationship with					
	Komisaris Commissioner		Direktur Director		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholder		Komisaris Commissioner		Direktur Director		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholder	
	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Michio Atsuda		✓		✓	✓			✓		✓		✓
Tatang Hermawan		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Karel Tanok		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Bachtiar Alam		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Hideki Nakamura*		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Kevin Cahyadi Tatang		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Markus Sugiono		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Eiichiro Sakai		✓		✓	✓			✓		✓		✓
Trie Karjati Wibowo		✓		✓		✓		✓		✓		✓

* Hideki Nakamura diangkat sebagai Presiden Direktur menggantikan Takeru Agawa berdasarkan RUPST tanggal 2 Juni 2017.
Hideki Nakamura was appointed as President Director, replacing Takeru Agawa, based on AGMS on 2 June 2017.

Komite Audit

Komite Audit merupakan komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk bekerja secara kolektif dan berfungsi untuk menjaga efektivitas tugas dan tanggung jawabnya, khususnya dari segi pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit internal serta pemantauan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan audit (eksternal/internal) dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.

Dasar dan acuan hukum dari pembentukan Komite Audit adalah:

1. Keputusan Ketua Bapepam-LK NO. KEP-643/BL/2012 tanggal 07 Desember 2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Kerja Komite Audit, yang ditelah dicabut dan digantikan dengan POJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
2. Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum.
3. Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang pelaksanaan GCG bagi Bank Umum.

Audit Committee

The Audit Committee is formed by the Board of Commissioners to work collectively, with the function of maintaining the effectiveness of its duties and responsibilities, in particular with regard to monitoring and evaluation of internal audit planning and implementation as well as supervision of the follow up to the internal and external audit findings in order to assess the adequacy of internal control, including the adequacy of financial reporting process.

The legal references for the Audit Committee establishment are:

1. Decree of the Chairman of Bapepam-LK No. KEP-643/BL/2012 on 7 December 2012 on the Establishment and Work Guidelines of the Audit Committee, as revoked and supplanted by POJK No. 55/POJK.04/2015 dated 23 December 2015 on the Establishment and Work Guideline of Audit Committee.
2. Bank Indonesia Regulation No. 1/6/PBI/1999 on 20 September 1999 on Assignment of the Compliance Director and Implementation of Internal Audit Function Standards for Commercial Banks.
3. Bank Indonesia Regulation No. 8/4/PBI/2006 on 30 January 2006 on GCG Implementation for Commercial Banks.

4. Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang pelaksanaaan GCG bagi Bank Umum.
5. Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 tentang pelaksanaan GCG bagi Bank Umum.
6. Anggaran Dasar Perseroan tentang Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris.

4. Bank Indonesia Regulation No./14/PBI/2006 on 5 October 2006 on GCG Implementation for Commercial Banks.
5. Bank Indonesia Circular No. 15/15/DPNP on 29 April 2013 on GCG Implementation for Commercial Banks.
6. The Company's Articles of Association on the Duties and Authority of the Board of Commissioners.

Susunan Keanggotaan Komite Audit

Pada tahun 2017, Komite Audit mengalami perubahan susunan, sebagai berikut:

Ketua : Bachtiar Alam, M.Si., A.M., Ph.D.
Anggota : Dr. Elizabeth Tiur Manurung Msi.Ak.
Anggota : Dra. Inge Barlian, M.Sc.Akt.

Terhitung sejak 4 September 2017, Direksi menetapkan dalam Surat Keputusan NOKEP: 116-DIR/KOM/09/2017 susunan Komite Audit sebagai berikut:

Ketua : Bachtiar Alam, M.Si., A.M., Ph.D.
Anggota : Dra. Inge Barlian, M.Sc.Akt
Anggota : Damajanti Tanumihardja

Audit Committee Composition

In 2017 the composition of the Audit Committee was changed, as detailed below:

Chairman : Bachtiar Alam, M.Si., A.M., Ph.D.
Member : Dr. Elizabeth Tiur Manurung Msi.Ak.
Member : Dra. Inge Berlian M.Sc.Akt.

Starting from 4 September 2017, the Board of Directors set in the Decree NOKEP: 116-DIR/KOM/09/2017, the composition of the Audit Committee to be as follows:

Chairman : Bachtiar Alam, M.Si., A.M., Ph.D.
Member : Dra. Inge Berlian M.Sc.Akt.
Member : Damajanti Tanumihardja

Profil Anggota Komite Audit

Profiles of the Audit Committee Members

Bachtiar Alam, M.Si., A.M., Ph.D.

Warga Negara Indonesia, 59 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Independen pada RUPST tanggal 26 Juni 2015, dan pertama kali menjadi Komisaris Independen Bank BNP pada RUPSLB 19 November 2007. Dengan demikian beliau telah menjalankan masa jabatannya melampaui 2 (dua) periode, dan sesuai dengan SE OJK No. 30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik (Butir III no. 8.i) yang bersangkutan telah membuat Surat Pernyataan tentang Independensinya sebagai

Bachtiar Alam, M.Si., A.M., Ph.D.

Indonesian citizen, 59 years of age. Appointed as Independent Commissioner at the AGMS on 26 June 2015, with initial term as Independent Commissioner of Bank BNP commencing at the EGMS on 26 December 2007. He therefore has carried out his term of office for more than two periods, and in line with the POJK Circular No. 30/SEOJK.04/2016 on Form and Content of Public Issuers' Annual Report (point III no. 8.i) he has made a Statement of Independence as Independent Commissioner. He graduated as Doctor of Philosophy

Komisaris Independen. Beliau merangkap sebagai Ketua Komite Audit dan Ketua Komite Pemantau Risiko. Pemegang gelar Doctor of Philosophy (PhD) jurusan Antropologi dari Harvard University tahun 1995 dan Master of Art di bidang Regional Studies East Asia dari Harvard University tahun 1989. Pernah bekerja sebagai Dosen Tetap Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia, sejak 1987, Visiting Professor di Department of Cultural Anthropology, University of Tokyo, tahun 2003. Memperoleh penghargaan bintang jasa *The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Rosette* dari pemerintah Jepang pada tahun 2016 untuk kontribusinya bagi kemajuan Studi Jepang di Indonesia dan peningkatan saling pengertian di antara Indonesia dan Jepang. Pelatihan yang telah diikuti selama tahun 2017 antara lain *Corporate Workshop 2017* dan *Workshop Corporate Semester II*.

(PhD) in Anthropology from Harvard University in 1995 and as Master of Arts (AM) in Regional Studies East Asia from Harvard University in 1989. He has been working as Lecturer at the Faculty of Cultural Sciences, University of Indonesia, since 1987, and was Visiting Professor at Department of Cultural Anthropology, University of Tokyo, in 2003. He was awarded The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Rosette from the Japanese government in 2016 for his contributions to the advancement of Japanese studies in Indonesia and the fostering of mutual understanding between Japan and Indonesia. He participated in various training programs in 2017, including Corporate Workshop 2017 and Corporate Semester II Workshop.

Dra. Inge Barlian, M.Sc. Akt.

66 tahun, Warga Negara Indonesia. Menjadi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko Bank BNP sejak Oktober 2014. Latar belakang pendidikan Sarjana Ilmu Ekonomi jurusan Manajemen dari Universitas Katolik Parahyangan tahun 1978, dan melanjutkan S2 Magister Teknik dan Manajemen Industri di Institut Teknologi Bandung tahun 1984, kemudian memperoleh Sarjana Jurusan Akuntansi di Universitas Katolik Parahyangan Bandung tahun 1986. Pengalaman bekerja sebagai Sekretaris Senat Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan Bandung (2008–2010), sebagai Ketua Ujian Saringan Masuk Universitas Katolik Parahyangan (1990), sebagai Pembantu Dekan I Bidang Akademik Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan (1987–1993), dan memulai karirnya sebagai Pembantu Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan, Bandung (1985–1986). Pelatihan yang diikuti selama tahun 2017 ialah *ISO 31000 International Risk Management Standard*, *IFC Corporate Governance Methodology Training of Trainers*, *Workshop Specialized Corporate Governance Leadership Program*, serta mengikuti Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat 1.

Dra. Inge Barlian, M.Sc. Akt.

66 years old, Indonesian citizen. Became member of the Audit Committee and the Risk Monitoring Committee of Bank BNP in October 2014. Has a bachelor's degree in Economics majoring in Management from the Parahyangan Catholic University in 1978, a master's degree in Industrial Management and Engineering at Bandung Institute of Technology in 1984, and a bachelor's degree in Accounting from the Parahyangan Catholic University in 1986. Previously worked as Secretary of the Senate of the Faculty of Economics of Parahyangan Catholic University, Bandung (2008–2010), as Chair of Entry Examination of Parahyangan Catholic University (1990), as Assistant Dean I of Academic Affairs of the Faculty of Economics of Parahyangan Catholic University, Bandung (1987–1993), and as Assistant Dean II of Administration and Finances of the Faculty of Economics of Parahyangan Catholic University, Bandung (1985–1986). In 2017 she participated in ISO 31000 International Risk Management Standard, IFC Corporate Governance Methodology Training of Trainers, Workshop Specialized Corporate Governance Leadership Program, and the Risk Management Certification Level 1.

Damajanti Tanumihardja
48 tahun, Warga Negara Indonesia, latar belakang pendidikan tahun 2012 Magister Akuntansi Universitas Padjadjaran Bandung. Tahun 1993 lulus dari Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Pengalaman jabatan sebagai Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan (2015–saat ini), sebagai Dosen Luar Biasa Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan (2002–2014), sebagai Auditor KAP Prasetio Utomo, *member of* Arthur Andersen, Jakarta (1993–1996).

Piagam Komite Audit
Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite Audit dapat menjalankan tugasnya secara efektif. Dalam rangka meningkatkan efektivitas tugas dan tanggung jawab Komite Audit, maka dilengkapi dengan Piagam Komite Audit yang merupakan "Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit". Piagam Komite Audit menjadi sebagai landasan kerja dari Komite Audit dan memberi kejelasan bagi semua pihak yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab Komite Audit, yaitu Dewan Komisaris, Manajemen, Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), serta unit-unit kerja dan komite-komite lain yang berkaitan dengan penerapan GCG.

Piagam Komite Audit disusun berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan ditinjau ulang secara berkala dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris NOKEP: 002-KOM/KEP/06/2017 tentang Pengesahan Perubahan Piagam Komite Audit tanggal 22 Juni 2017. Piagam Komite Audit berisi beberapa hal sebagai berikut:
1. Latar Belakang
2. Referensi
3. Pengertian

Damajanti Tanumihardja
48 years old, Indonesian citizen, obtained a Master in Accounting degree from Padjajaran University, Bandung, in 2012. Graduated from the Faculty of Economics majoring in Accounting from Parahyangan Catholic University, Bandung, in 1993. Previously served as Lecturer at the Faculty of Economics of Parahyangan Catholic University, Bandung (2015–present), as Visiting Lecturer at the Faculty of Economics of Parahyangan Catholic University (2002–2014), and as Auditor at Public Accounting Firm of Prasetio Utomo, member of Arthur Andersen, Jakarta (1993–1996).

Audit Committee Charter
The Board of Commissioners ensures that the Audit Committee is able to carry out its duties effectively. In order to improve the effectiveness of the duties and responsibilities of the Audit Committee, the committee is equipped with the Audit Committee Charter which is the "Guidelines and Procedures of the Audit Committee". It is a necessary tool that provides a basis the work of the Audit Committee and to provide clarity to all parties associated with the tasks and responsibilities of the Audit Committee, i.e. the Board of Commissioners, the Management, Internal Audit Unit (IAU), as well as other units and other committees related to the implementation of GCG.

The Audit Committee Charter was drafted pursuant to the prevailing regulations and is periodically reviewed. It was approved through the Board of Commissioners Decree NOKEP: 002-KOM/KEP/06/2017 on the Ratification of the Amendment to the Audit Committee Charter, dated 22 June 2017. The Charter contains among others the following aspects:
1. Background
2. References
3. Definitions

4. Visi dan Misi Komite Audit
5. Kode Etik
6. Pedoman Komite
7. Komposisi Keanggotaan
8. Persyaratan Anggota Komite Audit
9. Pengangkatan Keanggotaan
10. Masa Tugas Anggota
11. Tata Cara dan Prosedur Kerja

Tugas & Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit Bank BNP bertugas dan bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan serta pemantauan terhadap kecukupan pengendalian intern, kecukupan dan kebenaran atas proses pembuatan laporan keuangan, efektivitas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Auditor Eksternal dan Internal, melakukan identifikasi terhadap hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, melakukan penyusunan konsep dan analisis terkait fungsi Komite Audit, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris, yang meliputi hal-hal sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

Adapun perincian tugas dan tanggung jawab Komite Audit mencakup:

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap informasi keuangan yang akan diterbitkan oleh Bank BNP, seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya;
2. Melakukan review dan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) atau Auditor Eksternal atas pelaksanaan pengawasan internal;
3. Melakukan review dan evaluasi terhadap kepatuhan Bank BNP terhadap peraturan OJK serta ketentuan atau perundang-undangan lain yang berlaku terkait dengan kegiatan/usaha perbankan, berkoordinasi dengan Komite Pemantau Risiko dan Komite Kepatuhan;
4. Melakukan review dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas SKAI;
5. Melakukan review dan evaluasi terhadap tindak lanjut yang dilakukan oleh *auditee* atas hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh audit eksternal;
6. Mendorong penerapan prinsip-prinsip GCG dalam pengelolaan Bank, meliputi transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran, secara berkelanjutan;
7. Melakukan review dan evaluasi serta melaporkan berbagai risiko yang potensial akan terjadi dari manajemen risiko yang dilaksanakan oleh Direksi melalui koordinasi dengan Komite Pemantau Risiko.

4. Audit Committee Vision and Mission
5. Code of Conduct
6. Guidelines
7. Composition of Membership
8. Terms of Membership
9. Appointment of Members
10. Term of Office
11. Rules and Procedures

Audit Committee Duties & Responsibilities

Bank BNP's Audit Committee has the duties and responsibilities to perform supervision on the adequacy of internal control, adequacy and truthfulness of the preparation of the financial statements, efficacy of the Audit Result Report (LHP) of the External and Internal Auditors, identify issues that require the attention of the Board of Commissioners, prepare concepts and analyses related to the function of the Audit Committee and conduct other tasks given by the Board of Commissioners, covering the ones described below.

The details of the Audit Committee's duties and responsibilities are:

1. Reviewing and evaluating all financial information to be published by Bank BNP, such as the financial statements, projections and other statements relating to financial information of Bank BNP;
2. Reviewing and evaluating the efficacy of the implementation and Audit Result Report from the Internal Audit Unit or the External Auditors on the implementation of internal control;
3. Reviewing and evaluating Bank BNP's compliance with OJK regulations as well as other prevailing regulations in relation to the banking sector, by coordinating with the Risk Monitoring Committee and Compliance Committee;
4. Reviewing and evaluating the implementation of duties of the Internal Audit Unit;
5. Reviewing and evaluating the follow up measures taken by the auditees on the audit results submitted by the external auditors;
6. Encouraging continuous implementation of GCG principles in the management of the Bank, covering transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness;
7. Reviewing and evaluating and reporting various potentail risks that may arise from the risk management conducted by the Board of Directors in coordination with the Risk Monitoring Committee.

Wewenang Komite Audit

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit memiliki wewenang sebagai berikut:

1. Memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris mengenai laporan keuangan dan/atau hal lain yang disampaikan Direksi;
2. Melakukan komunikasi dengan unit kerja terkait dan pihak-pihak lain di Bank BNP serta KAP yang memeriksa Bank BNP untuk memperoleh informasi dan klarifikasi serta meminta dokumen dan laporan yang dilakukan terkait dengan pelaksanaan tugas Komite Audit;
3. Meminta Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari SKAI dan Auditor Eksternal, serta institusi pengawas/pemeriksa lainnya;
4. Meminta SKAI dan/atau Audit Eksternal, melakukan pemeriksaan/investigasi khusus, apabila terdapat dugaan kuat telah terjadi kecurangan, pelanggaran hukum, dan pelanggaran terhadap ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Mengakses data/informasi tentang karyawan, data aset, serta sumber daya perusahaan lainnya terkait pelaksanaan tugasnya;
6. Meminta bantuan pihak luar untuk melakukan pemeriksaan yang bersifat khusus dan sangat teknis dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.

Audit Committee Authority

In performing its duties, the Audit Committee has the authority to:

1. Give opinion to the Board of Commissioners on the financial statements and or other matters submitted by the Board of Directors;
2. Communicate with relevant work units and other parties in Bank BNP as well as the public accounting firm that audits Bank BNP to obtain information and clarification and request documents and reports, in relation to the implementation of the tasks of the Audit Committee;
3. Request for Audit Result Report (LHP) from the Internal Audit Unit and the External Auditor, as well as institutional supervisors/other parties;
4. Request the Internal Audit Unit and/or the External Auditor to conduct special inspection/investigation, if there is a strong suspicion of foul play, violations of the law or the prevailing regulations;
5. Access the data/information about employees, assets data, as well as other resources related to the performance of its duties;
6. Request for outside help in specific and highly technical audits, with the approval of the Board of Commissioners.

Rapat Komite Audit

Selama 2017, Komite Audit mengadakan 6 (enam) kali rapat, dengan tingkat kehadiran 100%. Hasil rapat berupa kajian, analisis maupun rekomendasi dan keputusan yang ditetapkan telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

Frekuensi dan catatan kehadiran Rapat Komite Audit disajikan pada tabel berikut:

Audit Committee Meetings

Throughout 2017, the Audit Committee held 6 (six) meetings with 10% attendance rate. Results of the meetings, taking the form of recommendations as well as decisions, were recorded in the minutes of meetings and properly documented.

The frequency of meetings and attendance of the Audit Committee members are provided in the table below:

Rapat Komite Audit / **Audit Committee Meetings**

No	Nama Name	Jabatan Position	Rapat Komite Audit Audit Committee Meetings		
			Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Attendance	% Kehadiran % Attendance
1	Bachtiar Alam	Ketua Komite/Komisaris Independen Committee Chairman/Independent Commissioner	6	6	100%
2	Inge Barlian	Anggota Komite Independen Independent Committee Member	6	6	100%
3	Damajanti Tanumihardja*	Anggota Komite Independen Independent Committee Member	2	2	100%

* Damajanti Tanumihardja diangkat sebagai Anggota Independen Komite Audit menggantikan Elizabeth Tiur Manurung berdasarkan SK NOKEP: 116-DIR/KOM/09/2017 tanggal 4 September 2017.
Damajanti Tanumihardja was appointed as Independent Member of the Audit Committee, replacing Elizabeth Tiur Manurung, pursuant to Decree NOKEP: 116-DIR/KOM/09/2017 dated 4 September 2017.

Agenda Rapat Komite Audit **Audit Committee Meeting Agendas**

No	Tanggal Date	Materi Rapat	Meeting Agenda
1	20 Jan 2017	Hasil Penilaian SKAI Q4/2016; Lain-lain.	Result of Internal Audit for Q4/2016; Others
2	16 Feb 2017	Laporan hasil pemeriksaan KAP; Lain-lain.	Report of Public Accounting Firm's audit results; Others.
3	27 Apr 2017	Hasil pemeriksaan SKAI Q1/2017; Lain-lain.	Result of Internal Audit for Q1/2017; Others.
4	26 Jul 2017	Hasil Pemeriksaan SKAI Q2/2017; Lain-lain.	Result of Internal Audit for Q2/2017; Others.
5	25 Okt 2017	Hasil Pemeriksaan SKAI Q3/2017; Lain-lain.	Result of Internal Audit for Q3/2017; Others.
6	1 Nov 2017	Laporan pemeriksaan OJK; Lain-lain.	OJK's audit report; Others.

Program Pendidikan/Pelatihan Komite Audit
Selama 2017 anggota Komite Audit mengikuti sejumlah pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, meliputi:

Audit Committee Training/Education Programs
In 2017 members of the Audit Committee participated in the following competence enhancement programs:

Nama Name	Materi Pelatihan Title/Topic	Waktu & Tempat Pelatihan Time and Place	Jenis Pelatihan dan Penyelenggara Pelatihan Type of Training and Organizer
Bachtiar Alam	• Corporate Workshop 2017 • Workshop Corporate Semester II	Bandung, 14 Jan 2017 Bandung, 14 Jul 2017	Training – Internal BNP Training – Internal BNP
Inge Barlian	• ISO 31000, International Risk Management Standard • IFC Corporate Governance Methodology Training of Trainers • Workshop Specialized Corporate Governance Leadership Program • Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1	Bandung, 15-18 Mei 2017 Jakarta, 20 Sep 2017 Bandung, 30 Sep 2017 Jakarta, 14 Okt 2017	Training – CRMS IFC World Bank Group In House Training – IICD Sertifikasi – BSMR

Laporan Pelaksanaan Tugas
Komite Audit melaporkan hasil pengawasan kepada Dewan Komisaris setelah menjalankan tugas secara profesional dan independen dalam membantu Dewan Komisaris melakukan fungsi pengawasan proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit, dan implementasi GCG.

Pada 2017 Komite Audit melaksanakan beberapa hal, antara lain:
1. Memberikan laporan secara berkala, disertai rekomendasi dan masukan-masukan kepada Dewan Komisaris untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap manajemen;
2. Memberikan rekomendasi mengenai Penunjukan KAP untuk Pemeriksaan Tahun Buku 2017 yaitu KAP Satrio Bing Eny & Rekan, afiliasi Deloitte Southeast Asia Ltd (DSEA).
3. Melakukan pemantauan kesesuaian pelaksanaan audit oleh KAP Satrio Bing Eny & Rekan, afiliasi Deloitte South Asia Ltd (DSEA) dengan standar audit yang berlaku;

Report of Duties Implementation
The Audit Committee reported the results of its supervision to the Board of Commissioners after performing its duties professionally and independently in assisting the Board of Commissioners to supervise financial reporting process, risk management, auditing, and GCG implementation.

In 2017 the Audit Committee carried out a number of tasks, among others:
1. Provided periodic reports accompanied by recommendations and inputs for the Board of Commissioners to assist the Board of Commissioners in conducting supervision of the management;
2. Provided recommendation for the appointment of Public Accounting Firm for the Audit of the FY 2017 Financial Statements, namely Satrio Bing Eny & Rekan, an affiliate of Deloitte Southeast Asia Ltd (DSEA);
3. Monitored and evaluated the conformity of the audit implementation by Public Accounting Firm Satrio Bing Eny & Rekan, an affiliate of Deloitte Southeast Asia Ltd (DSEA), with the applicable auditing standards;

4. Melakukan kajian atas rencana kerja Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), memantau pelaksanaannya dan melakukan evaluasi atas hasil kerjanya;
5. Memantau kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku; dan
6. Memastikan terlaksananya tindak lanjut hasil temuan SKAI, Akuntan Publik, dan hasil pemeriksaan OJK oleh Direksi secara tepat waktu guna mendapatkan informasi yang digunakan sebagai rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
7. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan atas SKAI;

8. Melakukan pemantauan dan evaluasi dan memberikan masukan terhadap laporan berkala yang dikeluarkan oleh Komite Kepatuhan;
9. Mengikuti workshop Corporate Governance Leadership Program (GCG) bersama-sama dengan Dewan Komisaris dan Direksi dalam rangka untuk meningkatkan penerapan prinsip-prinsip GCG secara berkelanjutan dalam pengelolaan Bank;
10. Melakukan pemantauan dan evaluasi bersama-sama dengan Komite Pemantauan Risiko atas berbagai risiko yang potensial akan terjadi dari pengelolaan manajemen risiko yang dilaksanakan oleh Direksi serta melaporkannya kepada Dewan Komisaris

Hasil evaluasi Komite Audit menunjukkan bahwa seluruh proses kegiatan Bank BNP telah mampu mendukung pelaksanaan manajemen risiko dan penerapan GCG.

Hal senada terdapat dalam Laporan Keuangan Tahun Buku 2017 yang disajikan oleh KAP dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan Peraturan Bank Indonesia yang berlaku. Independensi dan objektivitas KAP dalam mengaudit Laporan Keuangan Bank BNP berpedoman pada standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Komite Lain di Bawah Dewan Komisaris

Komite Pemantau Risiko

Untuk meningkatkan pelaksanaan GCG melalui penguatan fungsi Dewan Komisaris, Bank BNP membentuk Komite Pemantau Risiko yang terdiri dari 3 (tiga) orang, yaitu 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua Komite dan 2 (dua) pihak independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko dan perbankan.

4. Monitored and evaluated the duties and implementation of Internal Audit Unit intensively and periodically;
5. Monitored and evaluated the conformity of the financial statements with the applicable accounting standards; and
6. Monitored follow up of findings from the Internal Audit Unit, Public Accountant, and OJK's audit by the Board of Directors in a timely manner, in order to obtain information to be used as a recommendation to the Board of Commissioners.
7. Monitored the follow up measures to the audit results and recommendations from the OJK on the Internal Audit Unit;
8. Monitored and evaluated and provided input regarding periodic reports issued by the Compliance Committee;

9. Participated in the Corporate Governance Leadership Program (GCG) workshop together with the Board of Commissioners and the Board of Directors to enhance the ongoing implementation of GCG principles in the management of the Bank;
10. Together with the Risk Monitoring Committee, Monitored and evaluated various potential risks in the risk management implementation by the Board of Directors, and reported the results to the Board of Commissioners.

The result of Audit Committee's evaluation indicated that the whole Bank BNP activity process has been able to support the risk management and GCG implementation.

Likewise, the Financial Statements for FY 2017 presented by the Public Accounting Firm and has been in accordance with applicable Financial Accounting Standards and Bank Indonesia Regulations. The independence and objectivity of Public Accounting Firm in auditing the Bank BNP Financial Statements is guided by auditing standard stipulated by Indonesia Accountant Association (IAI).

Other Committees Under the Board of Commissioners

Risk Monitoring Committee

Risk Monitoring Committee is formed to enhance GCG implementation by strengthening the Board of Commissioners' functions. Bank BNP formed the Risk Monitoring Committee, comprising 3 (three) members, namely 1 Independent Commissioner as Committee Chairman and 2 (two) independent parties with expertise in risk management and banking.

Piagam Komite Pemantau Risiko

Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite Pemantau Risiko dapat menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien. Dalam rangka mengefektifkan tugas Komite Pemantau Risiko, maka diperlukan Piagam Komite Pemantau Risiko yang merupakan "Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko", Piagam Komite Pemantau Risiko ini diperlukan sebagai landasan kerja dari Komite Pemantau Risiko dan untuk kejelasan bagi semua pihak yang berkaitan dengan Tugas Komite Pemantau Risiko, yaitu Dewan Komisaris, Manajemen, Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), Divisi Kepatuhan serta unit kerja dan komite-komite lain yang berkaitan dengan GCG.

Sehubungan dengan hal tersebut maka disusunlah Piagam Komite Pemantau Risiko berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan senantiasa ditinjau ulang secara berkala dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. 008-KOM/KEP/11/2015 tentang Pengesahan Perubahan Piagam Komite-Komite Di Bawah Dewan Komisaris tanggal 13 November 2015.

Piagam Komite Pemantau Risiko berisi beberapa hal sebagai berikut:

1. Latar Belakang
2. Referensi
3. Definisi
4. Visi dan Misi Komite Pemantau Risiko
5. Kode Etik
6. Pedoman Komite
7. Komposisi Keanggotaan
8. Persyaratan Anggota Komite Pemantau Risiko
9. Pengangkatan Keanggotaan
10. Masa Tugas Anggota
11. Tata Cara dan Prosedur Kerja

Tugas Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko bertugas membantu pelaksanaan fungsi pengawasan dan pembinaan Dewan Komisaris terhadap Direksi dalam penerapan manajemen risiko. Dalam rangka memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai analisis sistem manajemen risiko dan perbaikannya, Komite Pemantau Risiko Bank BNP melakukan tugas-tugas sebagai berikut:

1. Menelaah Kecukupan Kebijakan Manajemen Risiko;
2. Melakukan penelaahan atas berfungsinya manajemen risiko;
3. Melakukan penelaahan atas kualitas informasi;
4. Laporan Profil Risiko yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia;
5. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris sehubungan dengan pelaksanaan manajemen risiko; dan

Risk Monitoring Committee Charter

The Board of Commissioners ensures that the Risk Monitoring Committee is able to carry out its duties effectively and efficiently. In improving the efficacy of the tasks of the Risk Monitoring Committee, a Guideline and Work Procedures for the Risk Monitoring Committee in the form of a Risk Monitoring Committee Charter is required as a foundation for the work of the Risk Monitoring Committee and to provide clarity of information to all parties dealing with the Risk Monitoring Committee, namely the Board of Commissioners, the Management, the Risk Management Unit (RMU), the Compliance Division, and other work units and committees related to GCG.

Accordingly, the Risk Monitoring Committee Charter has been formulated based on the prevailing regulations and is reviewed regularly and has been ratified by the Decree of the Board of Commissioners No. 008-KOM/KEP/11/2015 on the Ratification of the Amendment to the Charters of Committees under the Board of Commissioners dated 13 November 2015.

The Risk Monitoring Committee Charter contains among others the following:

1. Background
2. References
3. Definitions
4. Audit Committee Vision and Mission
5. Code of Conduct
6. Guidelines
7. Composition of Membership
8. Terms of Membership
9. Appointment of Members
10. Term of Office
11. Rules and Procedures

Duties of the Risk Monitoring Committee

Risk Monitoring Committee is responsible for assisting the supervision and advisory functions of the Board of Commissioners on the Board of Directors with regard to risk management. To provide recommendations to the Board of Commissioners in reviewing the risk management system and its improvements in the Bank, Risk Monitoring Committee carries out the following tasks:

1. Review the Adequacy of Risk Management Policy;
2. Review the functioning of risk management;
3. Review the quality of information;
4. Risk Profile Report submitted to Bank Indonesia;
5. Identify matters requiring the attention of the Board of Commissioners in relation to the policy of risk management and its implementation; and

6. Memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Kebijakan Manajemen Risiko dan pelaksanaannya.

Wewenang Komite Pemantau Risiko

Untuk melaksanakan tugasnya, anggota Komite Pemantau Risiko sesuai dengan Pedoman Kerja yang berlaku memiliki wewenang sebagai berikut:

1. Menelaah masalah yang timbul.
2. Memperoleh informasi secara menyeluruh tentang aset, liabilitas, serta sumber daya Bank lainnya terkait dengan pelaksanaan tugasnya.
3. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pejabat eksternal dalam melaksanakan fungsi pemantauan risiko dan kegiatan lainnya (apabila ada).
4. Apabila diperlukan, dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris, Komite Pemantau Risiko dapat meminta bantuan tenaga ahli, dan/atau Konsultan Independen.
5. Melakukan pertemuan dengan pihak eksternal, termasuk menghadiri pertemuan anggota Komite Eksekutif apabila diperlukan.

Dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana tersebut di atas, Komite Pemantau Risiko dapat bekerja sama dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), serta komite–komite lain yang berada di bawah Dewan Komisaris.

Susunan Komite Pemantau Risiko

Pada tahun 2017, Komite Pemantau Risiko mengalami perubahan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Ketua : Bachtiar Alam, M.Si., A.M., Ph.D.
Anggota : Dr. Elizabeth Tiur Manurung, Msi.Ak.
Anggota : Dra. Inge Barlian, M.Sc Akt.

Terhitung sejak tanggal 4 September 2017, Direksi menetapkan dalam Surat Keputusan NOKEP: 115-DIR/KOM/09/2017 susunan Komite Pemantau Risiko sebagai berikut:

Ketua : Bachtiar Alam, M.Si., A.M., Ph.D.
Anggota : Dra. Inge Barlian, M.Sc.Akt.
Anggota : Damajanti Tanumihardja

Profil Anggota Komite Pemantau Risiko

Profil Anggota Komite Pemantau Risiko dapat dilihat di dalam Profil Anggota Komite Audit.

Rapat Komite Pemantau Risiko

Selama 2017, Komite Pemantau Risiko menyelenggarakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali dengan tingkat kehadiran

6. Provide advice and recommendations to the Board of Commissioners regarding the Risk Management Policy and its implementation.

Risk Monitoring Committee Authority

To conduct their duties, the members of the Risk Monitoring Committee in accordance with the prevailing regulations have the following authority:

1. Review issues that arise.
2. Obtain information thoroughly on assets, liabilities, and other resources of the Bank in line with its performance of duties.
3. Directly communicate with the employees, including the Board of Directors and external officers in performing the risk monitoring function and other activities (if any).
4. When necessary, and by written approval from the Board of Commissioners, the Risk Monitoring Committee may acquire outside help from experts and or independent consultants.
5. Conduct meetings with external parties, including attending the meetings of the Executive Committee when necessary.

In carrying out the above authority, the Risk Monitoring Committee may cooperate with the Risk Management Unit (RMU), and other committees under the Board of Commissioners.

Risk Monitoring Committee Composition

In 2017, the Risk Monitoring Committee composition was changed, as follows:

Chairman : Bachtiar Alam, M.Si., A.M., Ph.D.
Member : Dr. Elizabeth Tiur Manurung, Msi.Ak.
Member : Dra. Inge Barlian, M.Sc.Akt.

Starting from 4 September 2017, the Board of Directors set in the Decree NOKEP: 116-DIR/KOM/09/2017, the composition of the Risk Monitoring Committee to be as follows:

Chairman : Bachtiar Alam, M.Si., A.M., Ph.D.
Member : Dra. Inge Berlian M.Sc.Akt.
Member : Damajanti Tanumihardja

Profile of the Risk Monitoring Committee Members

Profiles of the Chairman and Members of the Risk Monitoring Committee are presented in the Profile of the Audit Committee Members.

Risk Monitoring Committee Meetings

Throughout 2017, the Risk Monitoring Committee organized 12 (twelve) meetings with 93% attendance rate. Results of

rata-rata 93% Hasil rapat berupa kajian, analisis maupun rekomendasi dan keputusan yang telah ditetapkan, dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

the meetings, such as studies, analysis, recommendations or decisions, were stated in minutes of meetings and properly documented.

Frekuensi dan catatan kehadiran Rapat Komite Pemantau Risiko disajikan pada tabel berikut:

The frequency of meetings and attendance of the Risk Monitoring Committee members are provided in the table below:

Rapat Komite Pemantau Risiko **Risk Monitoring Committee Meetings**

No	Nama Name	Jabatan Position	Rapat Komite Pemantau Risiko Risk Monitoring Committee Meetings		
			Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Attendance	% Kehadiran % Attendance
1	Bachtiar Alam	Ketua Komite/Komisaris Independen *Committee Chairman/Independent Commissioner*	12	12	100%
2	Inge Barlian	Anggota Komite Independen *Independent Committee Member*	12	10	83%
3	Damajanti Tanumihardja*	Anggota Komite Independen *Independent Committee Member*	4	4	100%

* Damajanti Tanumihardja diangkat sebagai Anggota Independen Rapat Komite Pemantau Risiko menggantikan Elizabeth Tiur Manurung berdasarkan SK NOKEP: 115-DIR/KOM/09/2017 tanggal 4 September 2017.
Damajanti Tanumihardja was appointed as Independent Member of the Risk Monitoring Committee, replacing Elizabeth Tiur Manurung, pursuant to Decree NOKEP: 115-DIR/KOM/09/2017 dated 4 September 2017.

Agenda Rapat Komite Pemantau Risiko **Risk Monitoring Committee Meeting Agendas**

No	Tanggal Date	Materi Rapat	Meeting Agenda
1	20 Jan 2017	Laporan Bulanan Manajemen Risiko November & Desember 2016; Lain-lain	Risk Management Monthly Report for November & December 2017; Others
2	24 Feb 2017	Laporan Bulanan Manajemen Risiko Januari 2017; Lain lain	Risk Management Monthly Report for January 2017; Others
3	30 Mar 2017	Laporan Bulanan Manajemen Risiko Februari 2017; Lain-lain	Risk Management Monthly Report for February 2017; Others
4	26 Apr 2017	Laporan Bulanan Manajemen Risiko Maret 2017; Lain-Lain	Risk Management Monthly Report for March 2017; Others
5	24 Mei 2017	Laporan Bulanan Manajemen Risiko April 2017; Lain-Lain	Risk Management Monthly Report for April 2017; Others
6	22 Jun 2017	Laporan Bulanan Manajemen Risiko Mei 2017; Lain-lain	Risk Management Monthly Report for May 2017; Others
7	26 Jul 2017	Laporan Bulanan Manajemen Risiko Juni 2017; Lain-lain	Risk Management Monthly Report for June 2017; Others
8	29 Ags 2017	Laporan Manajemen Risiko Juli 2017; Lain-lain	Risk Management Monthly Report for July 2017; Others
9	28 Sep 2017	Laporan bulanan manajemen risiko Agustus 2017; Lain-lain	Risk Management Monthly Report for August 2017; Others
10	25 Okt 2017	Laporan Manajemen Risiko September 2017; Lain-lain	Risk Management Monthly Report for September 2017; Others
11	23 Nov 2017	Laporan Bulanan Manajemen Risiko Oktober 2017; Lain-lain	Risk Management Monthly Report for October 2017; Others
12	20 Des 2017	Laporan bulanan Manajemen Risiko November 2017; Lain-lain	Risk Management Monthly Report for November 2017; Others

Program Pendidikan/Pelatihan Komite Pemantau Risiko

Program pendidikan/pelatihan bagi anggota Komite Pemantau Risiko dapat dilihat di dalam **Program Pendidikan/Pelatihan Anggota Komite Audit.**

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko melaporkan hasil pengawasan kepada Dewan Komisaris setelah menjalankan tugas secara profesional dan independen dalam membantu Dewan Komisaris melakukan fungsi pengawasan.

Pada tahun 2017 Komite Pemantau Risiko melaksanakan beberapa hal, antara lain:

1. Melakukan pemantauan terhadap pemeliharaan Tingkat Kesehatan Bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan mengedepankan manajemen risiko dalam menjalankan usaha;
2. Melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) secara berkala dan memberikan rekomendasi dalam mengambil langkah-langkah perbaikan secara efektif sehingga dapat mempertahankan profil risiko pada level *low to moderate* dan komponen tingkat kesehatan Bank lainnya sehingga secara komposit dapat dipertahankan dengan kondisi sehat;
3. Melakukan pemantauan atas upaya dalam menciptakan suasana dan lingkungan kerja yang positif, nyaman serta memberikan kesempatan kepada Risk Taking Unit (RTU) untuk berkonsultasi dan berbagai informasi sehingga *feedback* memadai dapat diberikan kepada RTU;
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi manajemen risiko yang terintegrasi, di mana Bank BNP adalah merupakan lembaga jasa keuangan dalam kelompok konglomerasi keuangan MUFG Group di Indonesia dengan *Lead Entity* Bank BTMU Cabang Jakarta. Penerapan pengelolaan 8 (delapan) risiko dalam proses pelaksanaannya telah dituangkan ke dalam kebijakan dan atau prosedur yang menjadi tanggung jawab dari Divisi Manajemen Risiko;
5. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan usaha dari berbagai aktifitas fungsional Bank tidak melebihi *risk appetite* dan *risk tolerance* yang telah diputuskan bersama dengan Direksi;
6. Melakukan pemantauan kecukupan berbagai kebijakan dan prosedur pengelolaan risiko yang telah tersedia dan yang belum tersedia;
7. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap seluruh risiko pada umumnya dan penekanan terhadap risiko kredit, risiko operasional, risiko stratejik, risiko hukum, risiko reputasi, risiko kepatuhan pada khususnya, secara periodik, untuk aktivitas utama fungsional Bank, sehingga mampu untuk mengantisipasi, mengukur, dan mengurangi risiko secara kuantitatif dan sistematis;

Risk Monitoring Committee Training/Education Programs

The training/education programs for members of the Risk Monitoring Committee are presented in the section on **Training/Education Programs for Members of the Audit Committee.**

Report of the Risk Monitoring Committee's Duties Implementation

The Risk Monitoring Committee reports the supervision results to the Board of Commissioners after performing the duties professionally and independently in assisting the Board of Commissioners' supervision.

In 2017 the Risk Monitoring Committee performed among others:

1. Conduct monitoring on the maintenance of the Bank's Soundness Level by implementing the principle of banking prudence and implementing risk management in running the business;
2. Conduct self-assessment on a regular basis and provide recommendations in taking improvement measures effectively so as to maintain the risk profile at low to moderate level, as well as maintain the other measures of the Bank's soundness level, thus ensuring a sound condition overall;
3. Monitor efforts to create a positive and convenient atmosphere and work environment, and provide opportunity to the Risk Taking Unit (RTU) to consult and exchange various information so that adequate feedback can be provided to the RTU;
4. Monitor and evaluate the integrated risk management, whereby Bank BNP is a financial services institution within the financial conglomeration of MUFG Group in Indonesia, with the Lead Entity being BTMU Bank Jakarta Branch. The implementation of management of 8 (eight) risks in practice has been stipulated in the policies and/or procedures that are the responsibility of the Risk Management Division;
5. Monitor and evaluate the implementation of business activities across various functional activities so that they do not exceed the risk appetite and risk tolerance of the Bank as determined together with the Board of Directors;
6. Monitor the adequacy of policies and procedures related to risk management, both existing and yet to be established;
7. Monitor and evaluate all the risks in general, with emphasis on credit risk, operational risk, strategic risk, legal risk, reputation risk, compliance risk, on a periodic basis, for the Bank's main functional activities, so as to be able to anticipate, measure, and minimize risk quantitatively and systematically;

8. Melakukan pemantauan dan penelaahan terhadap upaya pengembangan sistem pelaporan risiko yang akurat dan komprehensif dalam Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIM) yang lebih terintegrasi, terpadu sehingga dapat mencapai sasaran dalam penerapan kerangka manajemen risiko dan penerapan praktik tata kelola perusahaan yang sehat (GCG);
9. Melakukan evaluasi dan penelaahan pilar pengendalian internal dalam koordinasi kerja secara komprehensif dengan melibatkan unit kerja kontrol yaitu Divisi Kepatuhan, Credit Quality Division (Credit Review) & Internal Audit Division.

Hasil evaluasi Komite Pemantau Risiko menunjukan bahwa seluruh proses kegiatan Bank BNP telah mampu mendukung pelaksanaan manajemen risiko dan GCG.

Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi merupakan Komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait Remunerasi dan Nominasi terhadap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris serta memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait dengan kebijakan Remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan karyawan secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.

Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri dari minimal 3 (tiga) orang, yaitu 1 (satu) orang Komisaris Independen yang menjabat Ketua serta 1 (satu) orang Komisaris dan 1 (satu) orang Chief of Human Capital & Corporate Services sebagai anggota.

Berdasarkan Surat Keputusan NOKEP: 143-DIR/KOM/11/2015 tanggal 23 November 2015, susunan Komite Nominasi & Remunerasi per akhir tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Ketua : Drs. Karel Tanok, Ak.
Anggota : Michio Atsuda
Anggota : Tatang Hermawan
Anggota : Bachtiar Alam
Anggota : Agung Subagiyo

8. Monitor and review the efforts to develop a risk reporting system that is accurate and comprehensive within the Risk Management System that is more integrated so that the targets in relation to risk management framework and implementation of good corporate governance in the Bank can be achieved;

9. Evaluate and review the internal control pillars in the work coordination on a comprehensive scale by involving the control work units, i.e. Compliance Division, Credit Quality Division (Credit Review), and Internal Audit Division.

The Risk Monitoring Committee's evaluation results show that all of the activities of Bank BNP have been adequately supporting the implementation of risk management and GCG principles.

Remuneration and Nomination Committee

The Remuneration and Nomination Committee is a committee established by and responsible to the Board of Commissioners in assisting the Board of Commissioners carry out its functions related to Remuneration and Nomination as regards members of the Board of Commissioners and the Board of Directors, and to provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the remuneration policy for Executive Officers and employees in general, to be submitted to the Board of Directors.

The Remuneration and Nomination Committee consists of at least 3 persons, namely 1 (one) Independent Commissioner who serves as the Chairman, 1 (one) Commissioner and 1 (one) Human Capital & Corporate Services Division Head as members.

Based on the Decree NOKEP: 143-DIR/KOM/11/2015 dated 23 November 2015, the composition of the Remuneration and Nomination Committee as at the end of 2017 was as follows:

Chairman : Drs. Karel Tanok, Ak.
Member : Michio Atsuda
Member : Tatang Hermawan
Member : Bachtiar Alam
Member : Agung Subagiyo

Profil Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Profile of Remuneration and Nomination Committee Members

Drs. Karel Tanok, Ak.

Warga Negara Indonesia, 79 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Independen pada RUPST tanggal 26 Juni 2015, dan pertama kali menjadi Komisaris Independen Bank BNP pada RUPST tanggal 26 Mei 2001. Dengan demikian beliau telah menjalankan masa jabatannya melampaui 2 (dua) periode, dan sesuai dengan SE OJK No. 30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik (Butir III no. 8.i) yang bersangkutan telah membuat Surat Pernyataan tentang Independensinya sebagai Komisaris Independen. Pemegang gelar Sarjana Ekonomi dan Akuntansi dari Universitas Padjajaran tahun 1967. Pernah bekerja sebagai Akuntan (BPKP) Perwakilan Jawa Barat (1968–1973), Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Padjajaran (1969–1982), Senior Consultant Group PT Jasumana, General Manager PT Carlo Erba, Direktur Keuangan & Administrasi PT Naintex, dan Managing Partner Kantor Akuntan Drs. Karel Widyarta. Pelatihan yang pernah diikuti selama tahun 2017 antara lain *Analisa Cash Flow Projection* dalam Kaitannya dengan Penetapan Kemampuan Pembayaran Restrukturisasi, Review Kebijakan atau Prosedur Sistem Remunerasi dan Mempertajam Implementasi Regulasi, *Workshop Corporate Semester II*, dan *Workshop Specialized Corporate Governance Leadership Program*.

Drs. Karel Tanok, Ak.

Indonesian citizen, 79 years of age. Appointed as Independent Commissioner at the AGMS on 26 June 2015, with initial term as Independent Commissioner of Bank BNP commencing at the AGMS on 26 May 2001. He therefore has carried out his term of office for more than two periods, and in line with the POJK Circular No. 30/SEOJK.04/2016 on Form and Content of Public Issuers' Annual Report (point III no. 8.i) he has made a Statement of Independence as Independent Commissioner. He held a bachelor's degree in Economics and Accounting from Padjajaran University in 1967. He previously worked as Accountant (BPKP) West Java Representative (1968–1973), Lecturer at the Faculty of Economics, Padjajaran University (1969–1982), Senior Consultant for PT Jasumana Group, General Manager of PT Carlo Erba, Finance & Administration Director of PT Naintex, and Managing Partner at Public Accounting Firm of Drs. Karel Widyarta. He participated in various training programs in 2017, including Cash Flow Projection Analysis in Relation to Implementation of Restructuring Payment Ability, Review of Remuneration System Policy or Procedure, and Sharpening Regulatory Implementation, Workshop Corporate Semester II, and the Specialized Corporate Governance Leadership Program Workshop.

Agung Subagiyo
45 tahun, Warga Negara Indonesia. Menjadi Kepala Divisi Human Capital & Corporate Services sejak tahun 2009. Latar belakang pendidikan Sarjana Ekonomi jurusan Manajemen dari STIE Inaba Bandung tahun 2008, Magister Manajemen dari Universitas BSI Bandung tahun 2011. Pengalaman bekerja sebagai Team Leader/Senior Consultant di PT Asuransi Bumi Asih Jaya (1998–1999), sebagai Manager di Marubeni Consortium (1993–1998). Pelatihan yang telah diikuti selama tahun 2017 ialah *Corporate Workshop 2017*, *Refreshment SMR* – Eksekutif, Strategi Penagihan Piutang Macet Secara Dini & Terintegrasi serta Aman dari Jerat Hukum, *Workshop Corporate Semester II*, *Workshop Specialized Corporate Governance Leadership Program,* serta Training Restrukturisasi, Penyehatan dan Penyelesaian Kredit yang Efektif Guna Meningkatkan Kinerja Bank.

Profil anggota Komite Remunerasi dan Nominasi lainnya dapat dilihat di **Profil Dewan Komisaris.**

Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi
Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite Remunerasi dan Nominasi dapat menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien. Dalam rangka mengefektifkan tugas Komite Remunerasi dan Nominasi, maka diperlukan Piagam Remunerasi dan Nominasi yang merupakan "Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi", Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi ini diperlukan sebagai landasan kerja dari Komite Remunerasi dan Nominasi dan untuk kejelasan bagi semua pihak yang berkaitan dengan Tugas Komite Remunerasi dan Nominasi. Pengkinian piagam sedang dilakukan oleh Bank BNP mengikuti aturan-aturan yang dikeluarkan oleh regulator mengenai kebijakan Komite Remunerasi dan Nominasi, seperti POJK No. 45/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum,

Agung Subagiyo
45 years old, Indonesian citizen. Became the Human Capital & Corporate Services Division Head in 2009. Has a bachelor's degree in Economics majoring in Management from STIE Inaba Bandung in 2008 and Master of Management from BSI University Bandung in 2011. Previously worked as Team Leader/Senior Consultant at PT Asuransi Bumi Asih Jaya (1998–1999), and as Manager at Marubeni Consortium (1993–1998). In 2017, he participated in the Corporate Workshop 2017, Refreshment SMR – Executive, Strategy for Early, Integrated, and Lawful Collection of NPF, Workshop Corporate Semester II, Workshop Specialized Corporate Governance Leadership Program, and Training for Restructuring, Strengthening, and Resolving Loans Effectively to Improve Bank's Performance.

The profiles of the other Members of the Remuneration and Nomination Committee are presented in the **Profile of the Board of Commissioners section.**

Remuneration and Nomination Committee Charter
The Board of Commissioners ensures that the Remuneration and Nomination Committee is able to carry out its duties effectively and efficiently. In improving the efficacy of the tasks of the Remuneration and Nomination Committee, a Guideline and Work Procedures for the Remuneration and Nomination Committee in the form of a Remuneration and Nomination Committee Charter is required as a foundation for the work of the Remuneration and Nomination Committee and to provide clarity of information to all parties dealing with the Remuneration and Nomination Committee. Updating of the charter is currently underway at Bank BNP, to align with the regulations issued by the regulator concerning the policy for the Remuneration and Nomination Committee, such as POJK No. 45/POJK.03/2015 dated 23 December 2015 on Implementation of Corporate Governance in Remuneration

serta POJK No. 27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi telah disahkan dalam Keputusan Dewan Komisaris No. 002-KOM/KEP/01/2016 tentang Pengesahan Perubahan Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi tanggal 22 Januari 2016. Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi berisi beberapa hal sebagai berikut:

1. Latar Belakang
2. Referensi
3. Definisi
4. Visi dan Misi Komite Pemantau Risiko
5. Kode Etik
6. Pedoman Komite
7. Komposisi Keanggotaan
8. Persyaratan Anggota Komite Pemantau Risiko
9. Pengangkatan Keanggotaan
10. Masa Tugas Anggota
11. Tata Cara dan Prosedur Kerja

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut:

1. Mendorong secara berkelanjutan diterapkannya prinsip-prinsip GCG dalam pengelolaan Bank yang meliputi transparansi, akuntabilitas. pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran;
2. Melakukan evaluasi terhadap Kebijakan Remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif dan Karyawan;
3. Dalam menentukan kebijakan Remunerasi, Komite Remunerasi dan Nominasi wajib mempertimbangkan hal-hal berikut:
   a. Kondisi kinerja keuangan Bank dan kewajiban pemenuhan cadangan sebagaimana diatur di dalam ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   b. Prestasi kerja individual;
   c. Kewajaran *peer group*;
   d. Sasaran dan strategi jangka panjang Bank;
4. Menyusun kebijakan dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk disampaikan kepada RUPS;
5. Memberikan rekomendasi tentang Calon Anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk disampaikan kepada RUPS melalui Dewan Komisaris;
6. Memberikan rekomendasi tentang Calon Pihak Independen yang dapat menjadi Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi kepada Dewan Komisaris.

in Commercial Banks, and POJK No. 27/POJK.03/2016 dated 22 July 2016 on the Fit and Proper Test for Primary Parties in Financial Services Institutions.

The Remuneration and Nomination Committee Charter has been ratified by the Decree of the Board of Commissioners No. 002-KOM/KEP/01/2016 on the Ratification of the Amendment to the Remuneration and Nomination Charter dated 22 January 2016. The Remuneration and Nomination Committee Charter contains among others the following:

1. Background
2. References
3. Definitions
4. Audit Committee Vision and Mission
5. Code of Conduct
6. Guidelines
7. Composition of Membership
8. Terms of Membership
9. Appointment of Members
10. Term of Office
11. Rules and Procedures

Remuneration and Nomination Committee Duties and Responsibilities

The duties and responsibilities of the Remuneration and Nomination Committee are as follows:

1. Supporting the continuous implementation of GCG principles in the management of the Bank, covering the principles of transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness;
2. Evaluating the Remuneration Policy for the Board of Commissioners, Board of Directors, Executive Officers and Employees;
3. In determining the Remuneration Policy, the Remuneration and Nomination Committee must consider the following components:
   a. The Bank's financial performance and condition and minimum reserve requirement as stipulated in the prevailing regulations;
   b. Individual work performance;
   c. Fairness in the peer group;
   d. The Bank's long-term strategies and goals;
4. Preparing policies and procedures for selecting and/or replacing members of the Board of Commissioners and/or Board of Directors to be submitted to the GMS;
5. Providing recommendations on the candidates for members of the Board of Commissioners and/or Board of Directors to be submitted to the GMS through the Board of Commissioners;
6. Providing recommendations on the candidates from independent parties for members of the Remuneration and Nomination Committee, to the Board of Commissioners.

Wewenang Komite Remunerasi dan Nominasi
Dalam rangka pelaksanaan tugasnya, anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sesuai dengan prosedur yang berlaku memiliki wewenang untuk membuat Sistem Remunerasi dan Nominasi Perusahaan.

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi
Di tahun 2017, Komite Remunerasi dan Nominasi mengadakan 10 (sepuluh) kali rapat, dan seluruh hasil rapat yang memerlukan keputusan pemegang saham disampaikan untuk diagendakan dalam pelaksanaan RUPS dan didokumentasikan.

Frekuensi dan catatan kehadiran Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi disajikan pada tabel berikut:

Remuneration and Nomination Committee Authority
In performing their duties, members of the Remuneration and Nomination Committee in accordance with the prevailing procedures have the authority to create a Corporate Remuneration and Nomination System.

Remuneration and Nomination Committee Meetings
In 2017, the Remuneration and Nomination Committee held 10 (ten) meetings, with the entire meeting results that require the decision from the shareholders will be proposed to be scheduled in the GMS and properly documented.

The frequency of meetings and attendance of the Remuneration and Nomination Committee members are provided in the table below:

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi / **Remuneration and Nomination Committee Meetings**

No	Nama Name	Jabatan Position	Rapat Komite Remunerasi/Nominasi Remuneration and Nomination Committee Meetings		
			Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Attendance	% Kehadiran % Attendance
1	Karel Tanok	Ketua Komite/Komisaris Independen Committee Chairman/Independent Commissioner	10	10	100%
2	Michio Atsuda	Anggota Komite / Committee Member	10	5	50%
3	Tatang Hermawan	Anggota Komite / Committee Member	10	0	0%
4	Bachtiar Alam	Anggota Komite/ Komisaris Independen Committee Member/Independent Commissioner	10	10	100%
5	Agung Subagiyo	*Chief of HC & Corporate Services*	10	9	90%

Agenda Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi / **Remuneration and Nomination Committee Meeting Agendas**

No	Tanggal Date	Materi Rapat	Meeting Agenda
1	17 Jan 2017	Nominasi Direksi & *Interview* Kandidat Presiden Direktur.	Nomination of Board of Directors and Interview of Candidate for President Director.
2	9 Feb 2017	Upah minimum regional; Kenaikan gaji karyawan.	Minimum regional wage; Increase of employees' salaries.
3	9 Mar 2017	Remunerasi, Tunjangan, Bonus Dewan Komisaris & Direksi.	Remuneration, benefits, and bonus for the Board of Commissioners and the Board of Directors.
4	26 Apr 2017	Remunerasi, Tunjangan, Bonus Dewan Komisaris & Direksi; Lain-lain.	Remuneration, benefits, and bonus for the Board of Commissioners and the Board of Directors; Others.
5	23 Mei 2017	Persiapan RUPS Tahunan; Lain-lain.	Preparation of AGMS; Others.
6	2 Jun 2017	*Interview* Calon Kandidat Pengganti Presiden Komisaris.	Interview of Candidate for President Commissioner.
7	25 Jul 2017	*Update* mengenai POJK No. 45/POJK.03/2015; Lain-lain.	Update on POJK No. 45/POJK.03/2015; Others.

8	29 Ags 2017	Rekomendasi *Fit & Proper Test* untuk Pengganti Presiden Komisaris; Perubahan anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko; Lain-lain.	Recommendation of Fit & Proper Test for Replacement of President Commissioner; Change of composition of Audit Committee and Risk Monitoring Committee; Others.
9	28 Sep 2017	*Update* perkembangan organisasi karyawan; *Turn Over* & Demografi Karyawan; Lain-lain.	Update on employees' organizational development; Employee turnover and demographics; Others.
10	20 Des 2017	Laporan semester 2 tahun 2017 untuk Dewan Komisaris; Nominasi calon anggota Dewan Komisaris & Direksi Periode Juli 2018–Juni 2020; Lain-lain.	2nd Semester 2017's Report for the Board of Commissioners; Nomination for members of the Board of Commissioners and the Board of Directors for July 2018–June 2020; Others.

Program Pendidikan/ Pelatihan Komite Remunerasi dan Nominasi

Selama 2017 anggota Komite Remunerasi dan Nominasi mengikuti sejumlah pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, meliputi:

Remuneration & Nomination Committee Training/ Education Programs

In 2017 members of the Remuneration & Nomination Committee participated in the following competence enhancement programs:

Nama Name	**Materi Pelatihan** Training Material	**Waktu & Tempat Pelatihan** Training Period & Venue	**Jenis Pelatihan dan Penyelenggara Pelatihan** Training Type & Organizer
Karel Tanok	• Analisa Cash Flow Projection dalam Kaitannya dengan Penetapan Kemampuan Pembayaran Restrukturisasi • Review Kebijakan atau Prosedur Sistem Remunerasi & Mempertajam Implementasi Regulasi • Workshop Corporate Semester II • Specialized Corporate Governance Leadership Program	Jakarta, 17–18 Mei 2017 Bandung, 9 Jun 2017 Bandung, 14 Jun 2017 Bandung, 30 Sep 2017	Training – Risk Management Guard Training – Risk Management Guard Training – Internal BNP In-House Training – IICD
Tatang Hermawan	• Specialized Corporate Governance Leadership Program	Bandung, 30 Sep 2017	In-House Training - IICD
Bachtiar Alam	• Corporate Workshop 2017 • Workshop Corporate Semester II	Bandung, 14 Jan 2017 Bandung, 14 Jul 2017	Training – Internal BNP Training – Internal BNP
Agung Subagiyo	• Corporate Workshop 2017 • Refreshment SMR – Eksekutif • Strategi Penagihan Piutang Macet Secara Dini & Terintegritas Serta Aman dari Jerat Hukum • Workshop Corporate Semester II • Specialized Corporate Governance Leadership Program • Training Restrukturisasi, Penyehatan dan Penyelesaian Kredit yang Efektif Guna Meningkatkan Kinerja Bank	Bandung, 14 Jan 2017 Bandung, 11 Feb 2017 Jakarta, 17–18 Mei 2017 Bandung, 14 Jul 2017 Bandung, 30 Sep 2017 Bandung, 12–13 Des 2017	Training – Internal BNP Refreshment – Risk Management Guard Training – Kontan Academy Training – Internal BNP Training – Internal BNP Training – De Best Solution Consultant and Training Center

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi melaporkan hasil pengawasan kepada Dewan Komisaris setelah menjalankan tugas secara profesional dan independen dalam membantu Dewan Komisaris melakukan fungsi pengawasan.

Report of the Remuneration and Nomination Committee's Duties Implementation

The Remuneration and Nomination Committee reports their supervision results to the Board of Commissioners after performing their duties professionally and independently in assisting the latter supervise the Bank.

Pada tahun 2017 Komite Remunerasi dan Nominasi melaksanakan antara lain:

1. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima oleh masing-masing anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dan melaksanakan penyusunan tentang struktur remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon Presiden Direktur yang baru;
4. Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai usulan perubahan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, dan pemberian bonus atas laba Perseroan tahun buku 2016;
5. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon Presiden Komisaris yang baru; dan
6. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai perubahan susunan keanggotaan Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.

Hasil evaluasi Komite Remunerasi dan Nominasi menunjukan bahwa seluruh proses kegiatan pemberikan remunerasi dan nominasi telah sesuai dengan penerapan manajemen risiko.

Komite-Komite di Bawah Direksi

Direksi dibantu oleh komite-komite yang berada di bawah tanggung jawab Direksi dan mendukung peran dan tugas keseharian Direksi meliputi:

1. **Komite Pemutus Kredit**, sesuai dengan SK NOKEP 125-DIR/RM/10/2015 bertugas untuk:
   a. Memberikan pengarahan apabila perlu dilakukan analisa kredit yang lebih mendalam dan komprehensif.
   b. Memberikan keputusan atau rekomendasi atas rancangan keputusan kredit yang diajukan oleh pemberi rekomendasi atau pengusul, yang terkait dengan:
      - Debitur-debitur besar;
      - Industri-industri yang tidak biasa diterima atau ditangani Bank BNP.
   c. Melakukan koordinasi dengan ALCO, dalam aspek pendanaan perkreditan (pengelolaan sumber dana dan penyediaan dana).
   d. Memastikan bahwa keputusan dan persetujuan pemberian kredit dilakukan berdasarkan ketersediaan informasi yang maksimal dan

In 2017 the Remuneration and Nomination Committee performed among others:

1. Assisted the Board of Commissioners conduct assessment of performance and conformity with remuneration received by each member of the Board of Directors and/or Board of Commissioners;
2. Provided recommendation to the Board of Commissioners and formulated the remuneration structure for members of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners;
3. Provided recommendation to the Board of Commissioners on the candidate for the new President Director;
4. Provided recommendation to the Board of Commissioners regarding the proposal to amend the remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors and provide bonus for the Company's profit for 2016;
5. Provided recommendation to the Board of Commissioners on the candidate for the new President Commissioner; and
6. Provided recommendation to the Board of Commissioners on the changes to the membership of the Audit Committee and the Risk Monitoring Committee.

The Remuneration and Nomination Committee's evaluation results show that all of the remuneration and nomination activities have been adequately supporting the implementation of risk management.

Committees Under the Board of Directors

The Board of Directors are supported by committees under its responsibility, to assist in the execution of roles and duties of the Board of Directors, including:

1. **Credit Approval Committee**, in accordance with Decree NOKEP 125-DIR/RM/10/2015, whose duties include:
   a. Providing direction if it is deemed necessary to perform more thorough and comprehensive credit analyses;
   b. Making decisions or providing recommendations on lending decision design proposed by the recommending party, in relation to:
      - Large debtors;
      - Uncommon industries.
   c. Coordinating with the ALCO in terms of loan funding (funding source management and provision of funds).
   d. Ensuring that the decisions and credit approvals are arrived at based on the optimal presence of transparent information, in order to support credit

transparan untuk mendukung proses analisa kredit dan proses persetujuan kredit yang optimal.

e. Memastikan bahwa keputusan pemberian kredit telah dilakukan melalui analisa/evaluasi kuantitatif dan kualitatif secara objektif, jujur, cermat, independen dan komprehensif dengan memperhatikan kondisi dan dampak ekonomi makro dan mikro, *industry analysis*, *business cycle* debitur dan prospek usaha debitur, kompetisi atau persaingan usaha, karakter debitur, kemampuan membayar debitur, permodalan debitur, tujuan kredit, sumber pembayaran atau *cash flow*, profitabilitas, kemampuan agunan sebagai *second way out*, *risk bearing ability* berupa asuransi atas agunan, dan *protection* atau *guarantee* dari induk perusahaan.

f. Memastikan keputusan pemberian kredit telah memenuhi atau sesuai dengan regulasi OJK, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, azas-azas perkreditan yang sehat, maupun Kebijakan Perkreditan dan Pedoman Pelaksanaan Perkreditan Bank, dalam upaya membangun dan meningkatkan budaya risiko kredit dan kepatuhan bank yang sehat dan *prudent*.

g. Memastikan bahwa dalam melakukan keputusan pemberian kredit telah dilakukan proses identifikasi terhadap sumber-sumber risiko kredit terkait dengan risiko risiko lainnya, yakni *market risk*, *legal risk*, *strategic risk*, *operational risk*, dan risiko-risiko lain yang dianggap relevan).

h. Keputusan pemberian kredit harus mempertimbangkan *risk and return* seperti bobot risiko kredit, kecukupan modal Bank, besarnya cadangan kerugian kredit yang dibentuk, *pricing* (pemberian suku bunga) yang didasarkan pada suku bunga dasar kredit bank yang berdampak pada *interest income*, administrasi/*fee* dan provisi melalui analisa *cost and benefit*, jangka waktu kredit dan risiko konsentrasi kredit (portofolio kredit, sektor ekonomi, industri dan segmen bisnis).

i. Bertanggung jawab atas segala keputusan kredit dan persetujuan pemberian kredit terhadap penyimpangan dari standar penilaian kredit dan kebijakan perkreditan yang berlaku, dengan dilandasi pada alasan dan analisa yang kuat, serta harus memberikan tindakan mitigasi yang diperlukan dalam upaya meminimalisasi dampak risiko yang akan terjadi.

j. Memastikan bahwa setiap syarat dan ketentuan kredit termasuk dokumen dan perijinan yang diwajibkan (*Covenant*) telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan waktu yang telah ditentukan.

k. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuantan dan struktur organisasi Bank, Direktur Kepatuhan

analysis process and optimal credit approval process.

e. Ensuring that credit approvals have taken into account the quantitative analysis/evaluation and qualitative evaluation in an objective, honest, prudent, independent and comprehensive manner, and considering the current macro- and microeconomic conditions and their impacts, industry analysis, business cycle of the debtor, business competition, debtor's characteristics, debtor's ability to repay loans, debtor's capital structure, loan purpose, cash flows, profitability, usability of collateral as second way out, risk bearing ability in the form of insurance of collaterals, and protection or guarantee from the parent company.

f. Ensuring that credit approvals have been in compliance with the regulations of OJK, the prevailing regulations, the sound lending principles, as well as the Lending Policy and Lending Guidelines of the Bank, in order to develop and increase the credit risk culture and compliance risk culture of a financially sound and prudent bank.

g. Ensuring that prior to credit approval, identification has been done on the potential sources of credit risk in relation to other risks, namely market risk, legal risk, strategic risk, operational risk, and other relevant risks.

h. Credit approval must take into consideration the risk and return, such as the weighting of credit risk, the Bank's capital adequacy, amount of provision for impairment, pricing (setting of interest rate) based on the Bank's base lending interest rate affecting interest income, fees, and provisions through a cost and benefit analysis, loan time frame and risk of credit concentration (credit portfolio, economic sector, industry, and business segment).

i. Being responsible for all credit-related decisions and credit approvals against violations from the prevailing lending policies and credit evaluation standards, with sufficient grounds and strong analyses, and being responsible for providing mitigation measures required to minimize the potential risk impacts that may occur.

j. Ensuring that all lending requirements and provisions, including required covenants, have been fulfilled as per the agreed upon terms and timeframe.

k. In accordance with the Regulations of OJK and the Bank's organization structure, the Compliance & Risk

& Manajemen Risiko tidak memiliki kewenangan dalam memberikan keputusan dan persetujuan pemberian kredit, namun hanya terbatas pada memberikan opini/komentar terkait dengan risiko kredit dan kepatuhan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh pemutus kredit, demikian pula halnya dengan Anggota Independen lainnya.

Selama tahun 2017, Komite Pemutus Kredit telah melaksanakan rapat komite sebanyak 115 (seratus lima belas) kali, membahas mengenai evaluasi dan/atau memustuskan permohonan kredit untuk jumlah dan jenis kredit yang ditetapkan oleh Direksi.

2. **Asset Liabilities Committee (ALCO)**, bertugas untuk mengelola kebijakan dan strategi dalam mengkoordinasikan sumber dana dan penggunaan dana secara efektif dan efisien untuk mencapai profitabilitas Bank yang optimum serta risiko likuiditas, risiko suku bunga dan risiko nilai tukar yang terkendali sehingga diperoleh *high level and stable pattern of NIM (Net Interest Margin*). Komite ini diketuai oleh Presiden Direktur sesuai dengan SK NOKEP: 046-DIR/RM/06/2015.

   Selama tahun 2017, ALCO telah melaksanakan rapat ALCO sebanyak 12 (dua belas) kali, yang membahas mengenai kinerja keuangan Bank setiap bulannya, termasuk tresuri, likuiditas, dan risiko pasar.

3. **Komite Manajemen Risiko**, bertugas menyusun kebijakan Manajemen Risiko serta perubahannya, termasuk strategi manajemen risiko, tingkat risiko & toleransi risiko, kerangka manajemen risiko dan Kebijakan Rencana Darurat (*contingency plan*) apabila terjadi kondisi yang tidak normal; menyempurnakan proses Manajemen Risiko baik secara berkala maupun insidentil sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan/atau internal Bank yang berpengaruh terhadap kecukupan permodalan, profil risiko Bank dan tidak efektifnya penerapan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi; menetapkan kebijakan dan/atau rekomendasi terkait keputusan bisnis apabila terdapat ketidaksesuaian dengan Kebijakan dan Prosedur, misalnya pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan Rencana Bisnis Bank yang telah disusun dan ditetapkan sebelumnya atau eksposur risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan; mempersiapkan dan membahas hasil penilaian *self-assessment* mengenai hasil penilaian *risk profile* triwulanan untuk disampaikan pada Rapat Direksi dan kepada Komite Pemantau Risiko; memberikan masukan kepada sekretaris komite berupa topik yang dibicarakan pada rapat komite; Komite Manajemen Risiko berwewenang mengkaji dan memberikan rekomendasi mengenai manajemen risiko

Management Director has no authority to decide and approve any lending, as his/her authority is limited only to providing opinion/comment related to the credit risk and compliance risk that may be a point to be considered by the loan approval officer. The same applies to other Independent Parties.

In 2017 the Credit Approval Committee conducted 115 (one hundred and fifteen) meetings to discuss evaluation and/or approval of loan applications for various amounts and types of loan as determined by the Board of Directors.

2. **Asset Liabilities Committee (ALCO)**, responsible for managing policies and strategies in coordinating funding resources and use of fund effectively and efficiently to achieve the optimum profitability for the Bank, while controlling liquidity risk, interest rate risk, and foreign exchange risk, so that a high and stable Net Interest Margin (NIM) can be achieved. The committee is chaired by the President Director, in accordance with Decree NOKEP: 046-DIR/RM/06/2015.

   In 2017 ALCO conducted 12 (twelve) meetings to discus the Bank's performance on a monthly basis in terms of finances, treasury, liquidity, and market risk.

3. **Risk Management Committee**, in charge of preparing the Risk Management policy and subsequent amendments thereof, the risk level and risk appetite, the framework for risk management, and contingency plan should abnormal conditions take place; enhancing risk management processes both regularly and incidentally as a result of changes in external conditions and/or internal to the Bank that have substantial effect on capital adequacy, risk profile, and ineffective implementation of the Bank's risk management based on evaluation results; determining the policy and/or recommendations related to business decisions should gaps occur between Policies and Procedures, for example when there is a significant excess of business expansion that is greater than the Bank's Business Plan as established and determined previously and the taking of position/ risk exposure that is beyond the predetermined limits; preparing and discussing the self-assessment result on the quarterly risk profile evaluation result to be presented to the Board of Directors meetings and to the Risk Monitoring Committee; providing input to the secretary of committee related to the topics to be discussed in committee meetings; the Risk Management Committee has the authority to review and provide recommendation on issues related to risk management

untuk dimintakan keputusan dari Rapat Direksi; turut membangun dan menciptakan budaya risiko (*risk culture*) di seluruh unit kerja; serta memberikan pelaporan dan/atau rekomendasi kepada Rapat Direksi mengenai tugas dan pelaksanaan fungsi Komite Manajemen Risiko serta pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya. Komite ini diketuai oleh Presiden Direktur; sesuai dengan SK NOKEP: 048-DIR/RM/04/2016.

Selama tahun 2017, Komite Manajemen Risiko telah melaksanakan rapat sebanyak 4 (empat) kali atau triwulanan, hal-hal yang dibahas di dalam rapat Komite Manajemen Risiko antara lain mengenai Penilaian Profil Risiko Bank, Tingkat Kesehatan Bank, kemajuan dari instruksi Direksi, *Internal Capital Adequacy Assessment Process* (ICCAP), *Risk-Based Bank Rating* (RBBR).

4. **Komite Produk dan Aktivitas Baru**, bertugas untuk mempertimbangkan setiap pengajuan Produk dan Aktivitas Baru dari unit kerja yang akan mengembangkan produk atau aktivitas di Bank BNP dengan memperhatikan kajian/opini/disposisi dari unit kerja terkait. Komite ini diketuai oleh Direktur yang membawahi fungsi perencanaan.

   Selama tahun 2017, Komite Produk dan Aktivitas Baru (PAB) telah melaksanakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali, yang membahas mengenai kemajuan PAB di setiap bulannya serta rencana PAB RBB tahun 2018.

5. **Komite Kepatuhan**, bertugas mewujudkan budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha serta mengelola risiko kepatuhan yang dihadapi oleh Bank BNP termasuk ketentuan kehati-hatian Bank, Tingkat Kesehatan Bank, serta Penerapan GCG di Bank BNP. Komite ini diketuai oleh Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko sesuai dengan SK NOKEP: 044-DIR/COMP/03/2016.

   Selama tahun 2017, Komite Kepatuhan telah melaksanakan rapat sebanyak 4 (empat) kali atau triwulanan, hal-hal yang dibahas di dalam rapat antara lain pembaruan regulasi, pembahasan APU-PPT, pengendaan denda-denda, tindak lanjut rekomendasi hasil kunjungan BTMU (Tata Kelola Terintegrasi), tindak lanjut hasil pemeriksaan OJK, pelaksanaan dan penerapan GCG, serta dampak hasil pemeriksaan OJK.

6. **Komite Pengarah Teknologi Informasi**, bertugas memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait dengan rencana strategis IT, pengembangan dan evaluasi sistem IT yang digunakan dan yang akan digunakan kemudian dan lain-lain. Komite ini diketuai oleh Direktur Kredit,

to be decided at the Board of Directors meeting; building and creating risk culture in all work units; and reporting and/or providing recommendations to the Board of Directors meetings on the duties and implementation of the Risk Management Committee's functions as well as the exercise of its authority. This committee is chaired by the President Director, in accordance with the Decree NOKEP: 048-DIR/RM/04/2016.

In 2017 the Risk Management Committee conducted 4 (four) meetings on a quarterly basis, with the issues discussed in the meetings including Assessment of the Bank's Risk Profile, the Bank's Soundness Level, progress related to the Board of Directors' instructions, Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICCAP), and Risk-Based Bank Rating.

4. **New Products and Activities Committee**, in charge of carefully considering each application of new product and activity from the work units developing new products or activities in Bank BNP by taking into consideration the review, opinion, or disposition from the related work units. This committee is chaired by Director supervising the planning function.

   In 2017 the New Products and Activities Committee conducted 12 (twelve) meetings, discussing issues such as PAB's monthly progress and PAB RBB 2018 plan.

5. **Compliance Committee**, in charge of implementing the compliance culture across all organization levels and business activities, and managing the Bank's compliance risk, including the provisions on banking prudence, the Bank's soundness level, and the implementation of GCG in Bank BNP. This committee is chaired by the Compliance and Risk Management Director in accordance with the Decree NOKEP: 044-DIR/COMP/03/2016.

   In 2017 the Compliance Committee conducted 4 (four) meetings on a quarterly basis, with the issues discussed in the meetings including update on new regulations, APU-PPT, fines, follow up to the recommendations from BTMU's visit (Integrated Governance), follow up to OJK's audit, GCG implementation, and impacts from OJK's audit results.

6. **Information Technology Steering Committee**, in charge of providing recommendations to the Board of Directors related to the strategic IT plans, development and evaluation of IT systems currently used or will be used by the Bank, and so forth. This committee is chaired by the Credit, Planning & Information Technology

Perencanaan & Teknologi Informasi sesuai dengan SK NOKEP: 099-DIR/IT/05/2016.

Selama tahun 2017, Komite Pengarah Teknologi Informasi telah melaksanakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali, hal-hal yang dibahas di dalam rapat antara lain proyek *E-Statement*, *e-KTP checking* (DUKCAPIL), *EDC Teller*, *Loan Origination System for SME*, Aplikasi SLIK, instalasi server, proyek Tom Spot, proyek Western Union, *upgrade* pada aplikasi SWIFT, *E-Budgeting Program*, proyek *Internet Banking*, serta kemajuan proyek pengembangan IT.

7. **Komite Kebijakan Perkreditan**, yang diketuai oleh Presiden Direktur sesuai dengan SK NOKEP: 122-DIR/RM/06/2016 memiliki fungsi sebagai berikut:
   a. Membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan perkreditan, mengedepankan prinsip kehati-hatian.
   b. Memantau dan mengevaluasi penerapan kebijakan perkreditan agar terlaksana secara konsisten.
   c. Melakukan pengkajian secara berkala terhadap KPB dan memantau perkembangan dan kondisi portofolio perkreditan.
   d. Memberikan saran kepada Direksi apabila diperlukan perubahan/perbaikan KPB memantau perkembangan dan kondisi portofolio perkreditan.

   Selama tahun 2017, Komite Kebijakan Perkreditan telah melaksanakan rapat sebanyak 2 (dua) kali atau semesteran, hal-hal yang dibahas di dalam rapat antara lain pemenuhan komitmen Bank kepada OJK terkait profil risiko, pengaturan mengenai ketentuan AYDA, revisi *EWS Mapping*, ketentuan kredit konsumer, *multifinance*, *review* KJPP, *Customer Profitability Account* (CPA), batas wewenang memutus kredit, dan kebijakan kredit bermasalah.

8. **Komite Strategi Anti-Fraud**, yang diketuai oleh Chief of Human Capital & Corporate Services sesuai SK NOKEP: 102-DIR/COMP/08/2017, bertugas membantu manajemen Bank BNP dalam rangka pengembangan kualitas sumber daya manusia, budaya dan kepedulian terhadap *anti-fraud* pada seluruh jenjang organisasi di lingkungan Bank BNP, melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan penerapan strategi *anti-fraud* dalam lingkungan Bank BNP, melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka melakukan penilaian dan identifikasi serta tindak lanjut untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan atas kejadian ataupun potensi *fraud*, mengusulkan dan meminta persetujuan kepada Presiden Direktur perihal bentuk sanksi yang akan diberikan kepada pelaku *fraud* dan terhadap pihak-pihak internal Bank BNP yang terkait

Director in accordance with the Decree NOKEP: 099-DIR/IT/05/2016.

In 2017 the Information Technology Steering Committee conducted 12 (twelve) meetings, with issues discussed in the meetings including E-Statement project, e-KTP checking (DUKCAPIL), EDC Teller, Loan Origination System for SME, SLIK Application, server installation, Tom Spot project, Western Union project, upgrade of SWIFT application, E-Budgeting Program, Internet Banking project, and progress of IT development projects.

7. **Credit Policy Committee**, chaired by the President Director in accordance with the Decree NOKEP: 122-DIR/RM/06/2016, has the following functions:
   a. Assisting the Board of Directors in formulating lending policy by upholding the principle of banking prudence.
   b. Monitoring and evaluating the implementation of the lending policy in a consistent manner.
   c. Reviewing the KPB regularly and monitor the developments and conditions of the credit portfolio.
   d. Providing recommendations to the Board of Directors when changes or improvements to the KPB are required, by monitoring the developments and conditions of the credit portfolio.

   In 2017 the Credit Policy Committee conducted 2 (two) meetings, i.e. once every six months, with the issues discussed in the meetings including fulfillment of the Bank's commitment to OJK related to risk profile, arrangements regarding AYDA provision, revision of EWS Mapping, consumer loans provision, multifinance, KJPP review, Customer Profitability Account (CPA), credit approval authority limit, and non-performing loans policy.

8. Anti-Fraud Strategy Committee, chaired by the Chief of Human Capital & Corporate Services in accordance with the Decree NOKEP: 102-DIR/COMP/08/2017, in charge of supporting the management of Bank BNP in order to develop human capital quality, culture and concern for anti-fraud across all organizational levels within Bank BNP, monitoring the implementation of anti-fraud strategy within Bank BNP's environment, coordinating with related work units for assessment and identification as well as follow up to fix weaknesses related to the fraud events and potentials, proposing and requesting for approval from the President Director the types of sanction to be given to those who have committed fraud and to internal parties of Bank BNP related directly or indirectly to the fraud, monitoring the handling of fraud and determining follow up measures to ensure the

baik langsung maupun tidak langsung atas terjadinya *fraud*, memantau penanganan *fraud* dan penetapan tindaklanjutnya hingga kejadian *fraud* tersebut dinyatakan telah diselesaikan untuk dilaporkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris, melakukan langkah efektif yang diperlukan dalam kegiatan pemantauan tidak lanjut penyelesaian *fraud* yang telah mendapat putusan tetap baik dari pengadilan maupun dari Direksi guna kepentingan pengembalian aset Bank dalam kewajiban penyelesaian *fraud*, bertanggung jawab atas biaya-biaya yang dikeluarkan dalam proses hukum penanganan kejadian *fraud*, menerima laporan dari SKAI dan/ atau unit kerja lain yang melakukan investigasi awal atau investigasi lanjutan atas indikasi kejadian *fraud*, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan strategi *anti-fraud* dan berbagai laporan kejadian *fraud* kepada pihak internal Bank BNP dan pihak eksternal yang berkepentingan, serta memastikan pelaksanaan prinsip *Know Your Employee* (KYE).

Selama tahun 2017, Komite Strategi Anti-Fraud telah melaksanakan rapat sebanyak 10 (sepuluh) kali, dengan agenda rapat antara lain mengenai evaluasi & *review* kejadian *fraud* selama tahun 2016, penanganan kejadian *fraud* 2017, serta *review* kebijakan strategi *anti-fraud*.

9. **Komite Harga,** merupakan komite di bawah tanggung jawab Direksi yang baru dibentuk pada tahun 2017 dan bertujuan dalam pengadaan barang dan jasa diperlukan proses yang tepat, transparan dan independen guna mendukung GCG serta dalam rangka tertib administrasi dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa diperlukan penetapan kualifikasi atas kualitas dan harga barang atau jasa sesuai dengan standar yang wajar dan terukur. Komite Harga dikoordinasikan oleh Corporate Planning & Perfomance Management Division sesuai dengan SK NOKEP: 079-DIR/PLAN/05/2017 tentang Pembentukan Komite Harga, dengan tugas sebagai berikut:

   a. Meminta informasi hal-hal yang diperlukan terkait pengadaan barang dan jasa dari berbagai pihak, baik internal dan eksternal;
   b. Melakukan seleksi terhadap kebutuhan pengadaan barang dan jasa yang diusulkan;
   c. Melakukan pemilihan terhadap daftar pihak ketiga/ vendor penyedia barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh *user*/unit pengadaan (barang dan/ atau jasa IT dan non-IT) termasuk penentuan harga penawaran dan/atau penjualan gedung kantor dan investasi kantor;
   d. Memberikan rekomendasi terhadap pengajuan pengadaan barang dan jasa.

resolution of fraud cases to be subsequently reported to the Board of Directors and the Board of Commissioners, conducting effective measures required in the monitoring of follow up measures to resolve fraud cases for which a verdict has been given by the court or by the Board of Directors to serve the interest of recovering the Bank's assets in the fraud resolution obligation, holding the responsibility for the expenses incurred during the legal process for the fraud case, receiving report from the Internal Audit Unit and/or other work units that conduct preliminary investigation or subsequent investigations on fraud indications, preparing and presenting reports related to the implementation of anti-fraud strategy and various fraud incidents to internal parties within Bank BNP and relevant external parties, as well as ensuring the implementation of the Know Your Employee (KYE) principle.

In 2017, the Anti-Fraud Strategy Committee conducted 10 (ten) meetings, with the agendas including evaluation and review of fraud cases throughout 2016, handling of fraud cases throughout 2017, as well as review of the anti-fraud strategy policy.

9. Price Committee, established in 2017 under the Board of Directors with the purpose of ensuring effective, transparent, and independent procurement of goods and services in order to uphold GCG and proper administration in the procurement of goods and services activities, including to determine the qualifications on the quality and prices of goods and services in accordance with the standards of fairness and measurability. The Price Committee is coordinated by the Corporate Planning & Performance Management Division in accordance with the Decree NOKEP: 079-DIR/PLAN/05/2017 on the Establishment of the Price Committee, with the duties as follows:
   a. Request information on matters that are required in relation to procurement of goods and services from various parties, both internal and external;
   b. Perform selection on the needs for procurement of goods and services proposed;
   c. Perform selection from a list of third parties or vendors of goods and services collected by the users or procuring unit (for goods and services of IT and non-IT nature), including to determine the offering price and/or sale of office buildings and office investments;
   d. Provide recommendations on the proposal for the procurement of goods and services.

Selama tahun 2017 Komite Harga telah melaksanakan rapat sebanyak 3 (tiga) kali, membahas mengenai pengadaan *hard ware* sistem informasi dan *event management*, pemilihan vendor *mobile banking*, serta pemilihan vendor e-KTP *card reader*.

In 2017 the Price Committee conducted 3 (three) meetings, in which the following were discussed: procurement of hard ware information system and event management, selection of mobile banking vendor, and selection of e-KTP card reader vendor.

Sekretaris Perusahaan & Hubungan Investor

Sekretaris Perusahaan berperan sebagai penghubung antara Bank BNP dengan otoritas Pasar Modal, pemegang saham dan investor/calon investor, media massa, dan pihak eksternal lainnya. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab menyampaikan laporan tahunan, laporan triwulanan, mengelola laman Bank, rilis pers, dan media lainnya. Berdasarkan Peraturan No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat butir III.I.8, Bank BNP memiliki Sekretaris Perusahaan yang diatur dan ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku.

Corporate Secretary & Investor Relations

The Corporate Secretary acts as a liaison between Bank BNP with Capital Market authorities, shareholders and investors/ potential investors, the media, and other external parties. The Corporate Secretary is responsible for the submission of annual reports, quarterly reports, managing the Company's website, press releases and other media. In accordance with the Rule No. I-A on the Listing of Shares and Other Non-Share Securities Issued by Listed Companies, point III.I.8, Bank BNP has appointed a Corporate Secretary whose conduct is governed and defined by the prevailing regulations.

Profil Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary Profile

Mario Yahya
54 tahun, Warga Negara Indonesia, lahir di Sukabumi, Jawa Barat, pada tahun 1963. Beliau menyelesaikan pendidikan Sarjana Muda Perbankan Indonesia dan bergabung dengan Bank BNP pada tahun 1999. sebelumnya bekerja di PT Bank Umum Nasional (BUN) dari 1987 sampai 1998.

Berdasarkan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan meliputi:

Mario Yahya
54 years old, Indonesian Citizen, born in Sukabumi, West Java in 1963. Graduated with a bachelor's degree in Indonesian Banking and joined Bank BNP in 1999, after previously working at PT Bank Umum Nasional (BUN) from 1987 to 1998.

Based on the Regulation of OJK No. 35/POJK.04/2014 on the Corporate Secretary of Issuers or Public Companies, the duties and responsibilities of the Corporate Secretary are:

a. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
b. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
c. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
   - Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perusahaan;
   - Penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
   - Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
   - Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
   - Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
d. Sebagai penghubung antara Perusahaan dengan Pemegang Saham Perusahaan, OJK, dan Pemangku Kepentingan lainnya.

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan Bank BNP menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan Peraturan No. X.I.4 No. 1. Adapun kegiatan yang dilakukan Sekretaris Perusahaan Bank BNP selama 2017 adalah:

1. Mengirimkan pemberitahuan dan mempersiapkan segala sesuatu terkait dengan penyelenggaraan RUPS dan mempublikasikan hasil keputusan rapat;
2. Menjaga hubungan baik dengan otoritas Pasar Modal dan mempersiapkan laporan-laporan mengenai pengungkapan keterbukaan informasi Perseroan sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Melakukan koordinasi dan administrasi pencatatan kepemilikan saham dan tindakan korporasi;
4. Melakukan hal-hal terkait kebijakan, antara lain: pengkinian kebijakan CSR dan penerbitan Internal Memorandum mengenai tata laksana rapat di Bank BNP;
5. Membuat Laporan Tahunan;
6. Membuat Laporan GCG;
7. Membuat Laporan Edukasi, Literasi dan Inklusi Keuangan;
8. Melaksanakan program CSR;
9. Melaksanakan program edukasi literasi keuangan untuk konsumen dan masyarakat;
10. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan;

a. Keeping abreast with the Capital Market Developments especially the prevailing regulations in the Capital Market;
b. Providing input to the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company to comply with the rules and regulations in the Capital Market;
c. To help the Board of Directors and the Board of Commissioners in implementing corporate governance which includes:
   - Information disclosure to the public, including the availability of information on the Company's website.
   - Timely submission of reports to OJK;
   - Organizing and documenting the General Meetings of Shareholders;
   - Organizing and documenting the Board of Directors' and Board of Commissioners' Meetings; and
   - Implementing the corporate orientation program for the Board of Directors and/or the Board of Commissioners.
d. Serving as a liaison between the Company with its Shareholders, OJK, and other Stakeholders.

Implementation of the Corporate Secretary's Duties

Corporate Secretary of Bank BNP performs its function and duties in accordance with the Rule No. X.I.4 No. 1. Bank BNP's Corporate Secretary's activities in 2017 were as follows:

1. Delivered the notification and prepare things related to the implementation of GMS and published the meeting resolutions;
2. Maintained good rapport with the Capital Market authorities and prepare reports on the Company's information disclosure in accordance with the prevailing regulations;
3. Coordinated and administered the record-keeping of shares ownership and corporate actions;
4. Performed issues that are related to policy, among others: updated the CSR policy and issued Internal Memoranda related to the administration of meetings at Bank BNP;
5. Prepared the Annual Report;
6. Prepared the GCG Report;
7. Prepared the Financial Education, Literacy and Inclusion Report;
8. Implemented CSR programs;
9. Implemented the financial education, literacy, and inclusion programs for the public and customers;
10. Assisted the Board of Directors and the Board of Commissioners in ensuring GCG;

11. Menyelenggarakan *Workshop* GCG *"Specialized Corporate Governance Leadership Program"*;
12. Membuat video *e-learning* GCG;
13. Melakukan *sharing session* mengenai GCG kepada karyawan;
14. Mengundang media untuk mewawancarai dan meliput profil Presiden Direktur Bank BNP, Hideki Nakamura;
15. Membantu pelaksanaan *Branch Manager Meeting* (BMM);
16. Membantu pelaksanaan Rapat Koordinasi (RAKOR);
17. Membantu pelaksanaan Customer Gathering (*BNP Business Club*);
18. Menjaga dan memelihara hubungan dengan media dan sarana informasi lainnya;
19. Menjadi juru bicara perusahaan dalam hal berhubungan dengan Media/Regulator/Investor; dan
20. Merevisi *Board Manual* di bulan Mei 2017.

11. Conducted GCG Workshop titled "Specialized Corporate Governance Leadership Program";
12. Produced the GCG e-learning video;
13. Conducted sharing session on GCG with the employees;
14. Invited the media to interview and cover Hideki Nakamura, the President Director of Bank BNP;
15. Assisted the implementation of Branch Manager Meeting (BMM);
16. Assisted the implementation of the Coordination Meeting;
17. Assisted the implementation of Customer Gathering (BNP Business Club);
18. Maintained relationship with the media and other means of information disclosure;
19. Acted as the Company's spokesperson in matters related to the Media/Regulators/Investors; and
20. Revised the Board Manual in May 2017.

Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Selama tahun 2017 Sekretaris Perusahaan mengikuti sejumlah pelatihan dan seminar yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, meliputi:

Corporate Secretary Competence Enhancement

In 2017, the Corporate Secretary participated in the following training programs and seminars intended to enhance the Corporate Secretary's competencies, covering:

Nama Name	Materi Pelatihan Training Material	Waktu & Tempat Pelatihan Training Period & Venue
Mario Yahya	• Corporate Workshop 2017	Bandung, 14 Jan 2017
	• Refreshment SMR – Eksekutif	Bandung, 11 Feb 2017
	• Merger dan Akusisi serta Diskusi POJK 74	Jakarta, 8 Mar 2017
	• Sosialisasi Peraturan OJK (POJK)	Jakarta, 18 Apr 2017
	• Workshop Corporate Semester II	Bandung, 14 Jul 2017
	• Workshop Specialized Corporate Governance Leadership Program	Bandung, 30 Sep 2017
	• Sosialisasi Program Kerja Literasi dan Inklusi	Jakarta, 6 Okt 2017

Satuan Kerja Audit Internal

Fungsi SKAI

Fungsi audit internal di Bank BNP dilaksanakan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yang dipimpin oleh seorang Kepala SKAI dengan jabatan *Internal Audit Division Head*. Dalam menjalankan fungsinya, SKAI berperan dalam:

- Membantu semua tingkatan manajemen dalam mengamankan kegiatan operasional Bank yang melibatkan dana dari masyarakat luas.
- Membantu manajemen dalam menjalankan fungsi pengawasan atas transaksi keuangan, pelaksanaan peraturan, prosedur dan sistem.
- Membantu manajemen dengan menjalankan fungsi konsultasi dalam meningkatkan kecukupan dan efektivitas struktur pengendalian internal dan kualitas pelaksanaannya.

Internal Audit Unit

IAU Function

The internal audit function at Bank BNP is carried out by the Internal Audit Unit (IAU) led by the Internal Audit Division Head. In carrying out its function, the IAU plays a role in:

- Assisting all levels of management in securing the operational activities of the Bank that involves public funds.
- Assisting the management in carrying out supervision on financial transactions, implementation of regulations, procedures, and systems.
- Assisting the management in carrying out the consultative function in improving the adequacy and effectiveness of the internal control structure and the quality of execution thereof.

Pengangkatan Kepala SKAI

Kepala SKAI diangkat oleh Presiden Direktur dengan persetujuan Dewan Komisaris efektif per tanggal 1 November 2015 dan telah dilaporkan kepada OJK berdasarkan surat No. 188-DIR/2015 tanggal 12 November 2015. Pejabat Kepala SKAI per akhir 2017 adalah Raden Widawati.

Appointment of the IAU Division Head

The IAU Division Head was appointed by the President Director upon the approval by the Board of Commissioner on 1 November 2015 and reported to OJK based on letter No. 188-DIR/2015 dated 12 November 2015. Raden Widawati held the position of IAU Division Held as at end of 2017.

Raden Widawati
Kepala SKAI

Warga Negara Indonesia, 46 tahun. Memulai karir di perbankan sebagai Money Market Dealer di Bank Tiara Asia sejak tahun 1994. Pada tahun 1996, melanjutkan karir sebagai Money Market dan Valas Dealer di Bank Papan Sejahtera. Menjabat sebagai Senior Derivative and Option Dealer di Bank of Tokyo Mitsubishi-UFJ Jakarta pada tahun 1998, dan ditempatkan sebagai Deputy Manager Risk Management di Bank of Tokyo Mitsubishi-UFJ Singapore pada tahun 2012. Kemudian menjabat sebagai Vice President Risk Management Bank of Tokyo Mitsubishi-UFJ Jakarta sampai dengan tahun 2013. Selanjutnya, lulusan Jurusan Kimia Institut Teknologi Bandung tahun 1994 ini menjadi Direktur Utama PT Prima Aras Jaya.

Raden Widawati
IAU Division Head

Indonesian citizen, 46 years old. Appointed as the IAU Division Head of Bank BNP on 1 November 2015. Started her banking career as Money Market Dealer at Bank Tiar Asia in 1994. Then she worked as Money Market and Forex Dealer at Bank Papan Sejahtera in 1996. In 1998, she worked as Senior Derivative and Option Dealer at Bank of Tokyo Mitsubishi-UFJ Jakarta and in 2012 was appointed as Deputy Manager Risk Management at Bank of Tokyo Mitsubishi-UFJ Singapore. She then served as Vice President Risk Management at the Bank of Tokyo Mitsubishi-UFJ Jakarta until 2013. Graduated from the Chemistry Department, Bandung Institute of Technology, in 1994, she became President Director of PT Prima Aras Jaya.

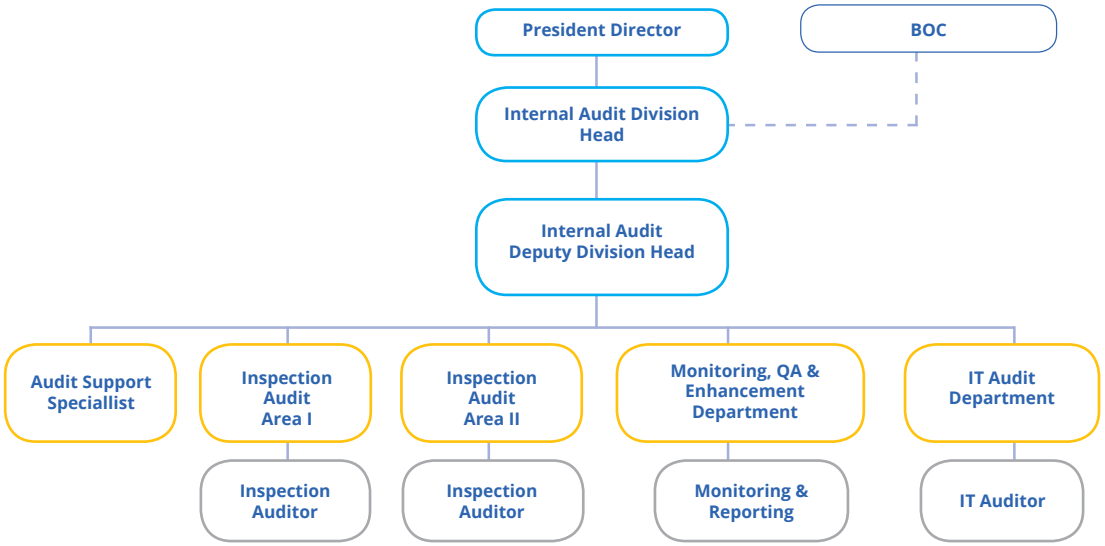

Jumlah Pegawai dan Sertifikasi

Sampai dengan akhir 2017, pegawai SKAI berjumlah 38 orang termasuk Pejabat SKAI. Untuk meningkatkan kompetensi, seluruh pegawai diprasyaratkan untuk memperoleh sertifikasi profesi audit intern. Program sertifikasi profesi audit intern yang telah diikuti di tahun 2017 adalah Sertifikasi Profesi Audit Intern Level Auditor yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan, serta sertifikasi manajemen risiko sebagaimana yang diprasyaratkan oleh OJK, sebagai berikut:

Staff Count & Certifications

Until the end of 2017, the number of employees working at the IAU was 38, including the IAU Officer. In order to enhance their competence, all staff are required to obtain internal audit professional certifications. The internal audit professional certifications in which the staff participated in 2017 were the Internal Audit Professional Certification for Auditor Level, organized by the Banking Profession Certification Institution, and the risk management certification as required by OJK, as follows:

Sertifikasi Certification	**Jumlah Auditor** Number of Auditors 2016	**Jumlah Auditor** Number of Auditors 2017
Sertifikat Kompetensi Level Auditor Auditor Level Competence Certification	23	31
BSMR Level 1	17	27
BSMR Level 2	5	5
BSMR Level 3	3	3
BSMR Level 4	1	1

Piagam Audit Intern

SKAI dalam pembentukan dan pelaksanaan tugasnya berpedoman pada Piagam Audit Intern yang memuat Kedudukan, Visi, Misi, Peran, Ruang Lingkup, Wewenang, Tanggung Jawab, Akuntabilitas, Independensi, Tidak Memihak, Kode Etik, Standar Pelaksanaan Audit Intern, Pengawasan Manajemen, dan Hubungan dengan Auditor Ekstern.

Internal Audit Charter

In the establishment and execution of its duties, the IAU uses the Internal Audit Charter as its guideline. The Internal Audit Charter defines the Position, Vision, Mission, Roles, Scope of Work, Authority, Responsibilities, Accountability, Independence, Impartiality, Code of Conduct, Internal Audit Execution Standards, Management Supervision, and Relationship with External Auditors.

Piagam Audit Intern ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris pada tanggal 4 Januari 2016 dan telah mengikuti ketentuan regulator yaitu:

1. Peraturan BI No. 1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 perihal Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum;
2. Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 perihal Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal (konversi dari ketentuan Bapepam-LK No. IX.I.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-496/ BL/2008 tanggal 28 November 2008 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Audit Internal);
3. POJK No. 18/POJK.03/2014 perihal Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, khususnya Hubungan dengan Auditor Ekstern.

Tugas dan Tanggung Jawab

Sesuai dengan yang tertuang dalam Piagam Audit Intern, tugas dan tanggung jawab SKAI adalah sebagai berikut:

1. Menyusun Rencana Audit Tahunan (RAT) yang fleksibel dengan menggunakan metodologi pemeriksaan berbasis risiko, merekomendasikan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit dan selanjutnya disetujui oleh Presiden Direktur;
2. Memelihara dan mengembangkan auditor profesional yang memiliki pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang memadai;
3. Menerbitkan laporan intern secara periodik yang disetujui oleh Presiden Direktur, dengan tembusan laporan kepada Dewan Komisaris (melalui Komite Audit);
4. Menerbitkan laporan hasil audit setelah penugasan audit dan menyampaikan laporannya kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris (melalui Komite Audit), dengan tembusan laporan kepada Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko;
5. Menerbitkan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern termasuk informasi hasil audit yang bersifat rahasia secara periodik dan tepat waktu yang ditandatangani oleh Presiden Direktur dan Dewan Komisaris (melalui Komite Audit), dengan tembusan laporan kepada Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko, untuk disampaikan kepada OJK selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah bulan laporan;
6. Menerbitkan laporan khusus mengenai setiap temuan audit intern yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha Bank, yang ditandatangani oleh Presiden Direktur dan Dewan Komisaris (melalui Komite

The Internal Audit Charter was established by the Board of Directors upon approval from the Board of Commissioners on 4 January 2016, in accordance with provisions from the regulators, namely:

1. BI Regulation No. 1/6/PBI/1999 on 20 September 1999 on the Appointment of Compliance Director and Implementation of Internal Audit Function Standards for Commercial Banks;
2. OJK Regulation No. 56/POJK.04/2015 on the Establishment and Guideline for Preparation of Internal Audit Charter (converted from the Bapepam-LK Regulation No. IX.I.7 Attachment to the Decree of the Chairman of Bapepam-LK No. Kep-496/BL/2008 on 28 November 2008 on the Establishment and Guidelines for the Preparation of the Internal Audit Charter);
3. POJK No. 18/POJK.03/2014 on Integrated Governance Implementation for Financial Conglomerates, in particular Relations with External Auditors.

Functions and Responsibilities

In line with the provisions in the Internal Audit Charter, the functions and responsibilities of the IAU are as follows:

1. Prepare the Annual Audit Plan (RAT) that is flexible using a risk-based audit methodology, providing recommendations to the Board of Commissioners via the Audit Committee to be subsequently approved by the President Director;
2. Maintain and develop professional auditors who have adequate knowledge, expertise and experience;
3. Publish internal reports periodically and in a timely manner, as approved by the President Director, with a copy of the report sent to the Board of Commissioners (through the Audit Committee);
4. Publish audit result reports upon audit completion and submit the reports to the President Director and the Board of Commissioners (through the Audit Committee), with a copy sent to the Compliance & Risk Management Director;
5. Publish implementation report and summary of internal audit results, including confidential information from the audit results, in a timely and regular manner, and signed by the President Director and the Board of Commissioners (through the Audit Committee), with a copy sent to the Compliance & Risk Management Director, to be presented to OJK at the latest two months after the reporting month;
6. Publish a special report for each internal audit finding that is believed to have a potential to disrupt the Bank's business continuity, and signed by the President Director and the Board of Commissioners (through the

Audit) untuk segera disampaikan kepada OJK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak temuan audit diketahui;

7. Memberikan informasi kepada Presiden Direktur perihal pelaksanaan audit dan memberikan rekomendasi untuk keperluan pengkinian Piagam Audit Intern dan Panduan Audit Intern;
8. Membantu dalam melakukan penyelidikan atau investigasi atas indikasi aktivitas kecurangan (bila diperlukan) dan melaporkan kepada Presiden Direktur dengan tembusan kepada Dewan Komisaris (melalui Komite Audit) dan Komite Strategi Anti Fraud (KSAF);
9. Memastikan bahwa auditor patuh terhadap Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB), Piagam Audit Intern, Panduan Audit Intern, dan kebijakan audit intern;
10. Melaporkan temuan audit yang belum ditindaklanjuti oleh *Auditee* kepada Presiden Direktur secara periodik sekali dalam 1 (satu) bulan, dengan tembusan kepada Dewan Komisaris (melalui Komite Audit) setiap 3 bulan sekali;
11. Berperan sebagai konsultan bagi pihak-pihak internal Bank yang membutuhkan bantuan, terutama yang menyangkut ruang lingkup tugas audit internal.

Fokus Audit 2017

Pada tahun 2017, kegiatan SKAI berfokus pada hal-hal berikut:

1. Melanjutkan semua aktivitas SKAI di tahun 2016, baik aktivitas baru maupun lama.
2. Meningkatkan kualitas temuan, agar dapat menemukan kunci permasalahan. Untuk itu, pembuatan RAT di tahun 2017 telah melibatkan semua anggota SKAI melalui pertemuan intens oleh Kepala Departemen sebelum para auditor bertugas di lapangan. Jika diperlukan dapat juga dilakukan pertemuan dengan wakil kepala SKAI atau kepala SKAI.
3. Meningkatkan kualitas laporan dengan kunjungan langsung oleh wakil kepala SKAI atau kepala SKAI di hari terakhir pemeriksaan lapangan. Diharapkan adanya temuan yang lebih mendalam sehingga menghasilkan laporan yang efisien, efektif dan berkualitas.
4. Meningkatkan kendali mutu audit (*Quality Assurance*) dengan melakukan pemeriksaan dan memastikan cara kerja para auditor telah sesuai dengan RAT, program audit serta waktu pengerjaan yang telah disepakati (SLA). SKAI akan terus mengingatkan kembali fungsi-fungsi audit seorang auditor.
5. Meningkatkan efektivitas pemantauan proses tindak lanjut hasil audit agar longgarnya pengendalian dapat diperbaiki dengan lebih optimal.

Audit Committee), with a copy sent to the Compliance & Risk Management Director, to be presented to OJK at the latest seven days after the date of the audit finding;

7. Provide information to the President Director regarding the audit process and provide recommendations for the purposes of updating the Internal Audit Charter, Internal Audit Guideline, and the internal audit policy;
8. Assist in the investigation of indications of fraud activity (if needed) and report it to the President Director with a copy sent to the Board of Commissioners (through the Audit Committee);
9. Ensure that the auditors adhere to the Standards for the Execution of Functions of the Internal Audit in Banks (SPFAIB), Internal Audit Charter, Internal Audit Guideline, and the internal audit policy;
10. Report audit findings that have not been followed up on by the auditees to the President Director periodically, every 1 month, with a copy sent to the Board of Commissioners (through the Audit Committee) once every 3 months;
11. Serve as a consultant for the Bank's internal parties that may require such service, especially within the scope of work of internal audit.

Audit Focus in 2017

In 2017, the IAU's activities were focused on the following matters:

1. Continuing all IAU activities in 2016, both new and existing activities.
2. Improving audit findings' quality to provide a deeper understanding of the root causes. Thus in 2017 the preparation of the work plan and budget involves all IAU members and an intense meeting has been held by the Department Head before the auditors are assigned to their jobs, and meetings are done with the IAU Deputy Head or Head when deemed necessary.
3. Improving the quality of reporting with the IAU Deputy Head or Head conducting site visits at the final day of the site visits, so that a higher quality report can be obtained, while continuing to improve efficiency and effectiveness.
4. Improving audit quality assurance, namely auditing the work methodology of the auditors to ensure their compliance with the RAT, audit program, and the agreed upon timeline (SLA). The IAU will continue to remind the auditors on the functions of an auditor.
5. Improving the effectiveness of the monitoring of follow up to audit findings, so that weaknesses in control can be more optimally addressed.

6. Mengembangkan observasi hingga ke proses operasional baik secara menyeluruh (*bank wide*) apabila memang diperlukan.

Di tahun 2017, SKAI mendorong unit kerja terkait untuk melakukan perbaikan pengendalian internal lainnya, seperti penggunaan *checklist* dokumen dan sebagainya. SKAI melakukan pemantauan terhadap fasilitas-fasilitas kredit yang berpotensi terpapar risiko kredit ataupun risiko operasional yang melekat di dalamnya (risiko inheren).

Mengacu pada Piagam Audit Intern, SKAI telah menerapkan *Rating* Audit yang merupakan penilaian terhadap pengendalian internal yang telah dilakukan *auditee*, dihitung berdasarkan hasil temuan audit intern dan hal-hal baik yang telah dilakukan *auditee*.

Fokus Tahun 2018

SKAI akan melanjutkan upaya untuk memperkuat pengendalian intern serta fungsi SKAI di tahun 2018 dengan beberapa langkah berikut:

1. Melakukan pertemuan/rapat secara aktif, setidaknya 1 (satu) bulan sekali dengan Presiden Direktur dalam Internal Audit Forum untuk membahas hasil pemeriksaan SKAI, tindak lanjut temuan dan hal-hal yang dianggap penting dalam upaya pengendalian internal.
2. Menyelidiki temuan secara aktif untuk dapat diambil inti permasalahannya, serta menginisiasi rapat dengan departemen/divisi terkait apabila dianggap perlu atas persetujuan Presiden Direktur untuk penyelesaiannya dan mencegah temuan berulang.
3. Melakukan proses audit untuk membantu pengendalian internal dari sisi efektivitas *flow*/ proses.

Selain langkah-langkah di atas, SKAI juga menambahkan beberapa hal baru berikut:

1. Melakukan rekonsiliasi analisis hasil temuan dengan prosedur/kebijakan yang berlaku, mendiskusikan efektivitas prosedur/kebijakan tersebut dengan Presiden Direktur ataupun departemen/divisi terkait, mensosialisasikan dengan internal SKAI dan cabang-cabang terpilih.
2. Membuat penilaian/*rating auditee* berdasarkan temuan di lapangan untuk menunjukkan tingkat *risk awarness* sehingga dapat dilakukan langkah-langkah penting bersesuaian dengan tingkatan ini.
3. Menjadi *observer* pada setiap komite di bawah Direksi guna memastikan terlaksananya pesan-pesan Direksi dalam komite tersebut.
4. Meningkatkan kualitas program audit terutama untuk bidang perkreditan serta memasukkan efektivitas BOPO.
5. Meningkatkan *Quality Assurance* dalam internal SKAI sehingga kualitas pekerjaan auditor SKAI tetap terjaga dengan baik.

6. Expanding the scope of observation to all of the Bank's operational processes (bank-wide), if deemed necessary.

In 2017 the IAU encouraged related units to improve internal control, such as by using document checklist, etc. Also, the IAU monitored loan facilities that have the potential to be exposed to inherent credit risks and inherent operational risks.

With reference to the Internal Audit Charter, the IAU has initiated to implement the Audit Rating that evaluates internal control performed by the auditee, measured based on the internal audit findings and the positive actions taken by the auditee.

Focus in 2018

IAU will continue to strengthen internal control and functions of the IAU in 2018 with the following measures:

1. Conducting meetings actively, at least once every month with the President Director in the Internal Audit Forum, to discuss the results of the IAU audits, follow up the findings and matters that are considered important related to internal control.
2. Investigating the findings actively to identify the core issues, as well as initiating meetings with relevant departments/divisions if necessary upon the approval of the President Director for solving issues and preventing recurring findings.
3. Conducting the audit process to boost effectiveness of flow/process of internal control.

In addition to the steps above, the IAU also adds the following new tasks:

1. Reconciling the analysis of the findings with the applicable procedures/policies, discussing the effectiveness of the procedures/policies with the President Director as well as with the relevant departments/divisions, disseminating the procedures/policies internally within the IAU and to selected branches.
2. Ranking the auditees based on findings to show the level of risk awareness so that important steps can be taken that are suitable to that level.
3. Becoming an observer at every committee under the Board of Directors to ensure the implementation of the Board of Directors' messages for the committees.
4. Improving the quality of audit programs, especially in lending, and including the effectiveness of operational expenses to operational income ratio.
5. Improving internal Quality Assurance in the IAU to maintain the quality of the IAU auditors' work.

Berkenaan dengan SDM, di tahun 2018 SKAI akan menerapkan hal-hal di bawah ini:

1. Mengadakan pertemuan di awal tahun menyoal rencana audit selama tahun 2018. Hal ini dimaksudkan agar semua anggota SKAI mengetahui rencana dan tujuan yang ingin dicapai selama tahun 2018.
2. Membentuk departemen baru pada awal tahun 2018 yaitu auditor kredit spesialis yang akan berfokus kepada kondisi risiko kredit saat ini.
3. Melakukan analisis bersama dalam bentuk pasif audit terhadap semua *auditee* yang akan diperiksa di tahun 2018.
4. Mengikuti *training* internal jika tersedia.

With regard to Human Resource, in 2018 the IAU will apply the following measures:

1. Conducting a meeting at the start of the year to discuss audit plans for 2018. This is intended to inform all members of the IAU about the plans and goals for 2018.
2. Establishing a new department in early 2018, i.e. the specialized credit auditor, to focus on current credit risk situation.
3. Conducting a joint analysis in the form of a passive audit on all auditees to be examined in 2018.
4. Participating in internal training whenever available.

Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal (SPI) Bank BNP telah menyesuaikan dengan *Internal Control Integrated Framework* yang dikembangkan oleh *The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO) dan sejalan dengan Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko untuk Bank Umum, Surat Edaran OJK No. 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, Surat Edaran OJK No. 35/SEOJK.03/2017 tanggal 07 Juli 2017 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum, dan Kebijakan Sistem Pengendalian Intern Bank BNP Serial No. K.P.KEP-11, versi 1, tanggal 18 Oktober 2017

Sistem pengendalian internal (SPI) Bank BNP mencakup seluruh aktivitas SDM secara berkesinambungan untuk mencapai tujuan Bank melalui kerjasama yang baik. SPI dilakukan untuk mencapai kesuksesan melalui pertumbuhan yang signifikan dalam laporan keuangan dan kepatuhan Bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. SPI juga memiliki peranan sebagai pencegah dan mendeteksi kecurangan (*fraud*) yang terjadi di dalam Bank dengan meningkatkan dan menguatkan lingkup pengendalian internal melalui efektivitas Bank.

Model Sistem Pengendalian Internal Bank BNP mengacu pada model pertahanan 3 (tiga) lapis (*Three Lines of Defense*). Model ini berupa rangkaian aktivitas pengendalian dengan melibatkan seluruh unit kerja yang terdiri dari *First Line*, *Second Line*, dan *Third Line* yang masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab terkait pengendalian intern yang dilaksanakan secara komprehensif dan terintegrasi untuk mencapai tujuan pengendalian intern.

Internal Control System

The Internal Control System of Bank BNP has been adjusted to the Internal Control Integrated Framework developed by the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), and is in compliance with the Regulation of OJK No. 18/POJK.03/2016 dated 16 March 2016 on Implementation of Risk Management for Commercial Banks, OJK Circular No. 34/SEOJK.03/2016 dated 1 September 2016 on Implementation of Risk Management for Commercial Banks, OJK Circular No. 35/SEOJK.03/2017 dated 7 July 2017 on Standard Guidelines for Internal Control System in Commercial Banks, and Bank BNP's Internal Control System Policy No. K.P.KEP-11, version 1, dated 18 October 2017

The Internal Control System (SPI) of the Bank is a continuous overarching process of all Human Resources activities to achieve the target of the Bank through mutual cooperation. The SPI was established so that the Bank may achieve sustainable success through a significant growth in financial reporting and compliance with the prevailing regulations. SPI also plays a role in preventing and detecting fraud occurences in the Bank. This function is conducted by improving and strengthening the scope of internal control through the Bank's effectiveness.

The Internal Control System of Bank BNP employs the Three Lines of Defense model. This model is a series of control activities that involves all work units classified into the First Line, Second Line and Third Line. Each line and its work units have their respective duties and responsibilities related to internal control. The duties shall be carried out comprehensively and in an integrated manner to achieve the target of internal control.

Fungsi pengendalian internal 3 (tiga) lapis, yaitu:
1. Fungsi pelaksanaan/pemilik risiko sebagai *First Line of Defense*: *First Line of Defense* dalam pelaksanaan pengendalian intern dilakukan oleh unit kerja yang melakukan aktivitas yang langsung mengandung risiko. Unit kerja yang masuk dalam kategori *First Line of Defense* ini terdiri dari unit kerja yang melakukan aktivitas operasional sehari-hari seperti aktivitas bisnis, transaksi operasional harian dan aktivitas pendukung atau penunjang lainnya;
2. Fungsi yang mengelola dan memantau risiko sebagai *Second Line of Defense*: *Second Line of Defense* dalam pelaksanaan pengendalian intern ini dilakukan oleh unit kerja yang melakukan fungsi manajemen risiko dan fungsi kepatuhan;
3. Fungsi yang melakukan penilaian terhadap pelaksanaan dan pengelolaan risiko secara independen sebagai *Third Line of Defense*: *Third Line of Defense* dalam pelaksanaan pengendalian intern ini dilakukan oleh unit kerja yang melakukan fungsi penilaian secara independen yaitu auditor internal dan auditor eksternal.

Meskipun model *Three Lines of Defense* lebih menitikberatkan hubungan dan tanggung jawab dari masing-masing unit kerja namun pertanggung jawaban pelaksanaannya menjadi tanggung jawab akhir dari Direksi dengan pengawasan aktif dari Dewan Komisaris.

Secara struktur, infrastruktur SPI di Bank BNP sampai dengan akhir tahun 2017 telah sesuai dengan tuntutan regulasinya, termasuk terkait *three lines of defense*, namun implementasi proses SPI masih memerlukan peningkatan dalam hal koordinasi, komunikasi dan komprehensi dari seluruh unit terkait dari 3 (tiga) lapis SPI ini sehingga dapat dihasilkan suatu SPI yang terintegrasi. Kekuatan fungsi kontrol dan *monitoring* di segala lini sangat diperlukan mengingat segmen bisnis Bank BNP didominasi segmen retail, dan upaya ini adalah untuk meminimalisasi risiko yang timbul di kemudian hari, dan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing di pasar perbankan nasional khususnya.

Kegiatan Pengendalian & Pemisahan Fungsi
Kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan berkesinambungan dengan melibatkan semua pihak. Semua pihak yang terlibat dalam struktur organisasi Bank harus mencerminkan adanya pemisahan fungsi yang jelas sehingga dapat meminimalkan tingkat risiko penyimpangan.

Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi pada Bank BNP, antara lain sebagai berikut:
1. Pengendalian Kebijakan dan Prosedur
   Kegiatan pengendalian kebijakan dan prosedur dilaksanakan melalui:

The three lines of internal function comprise:
1. Function of risk implementer/owner as the First Line of Defense: In the implementation of internal control, the work units that conduct activities with potential risks serve as the First Line of Defense. Work units that are classified in this category are the units that perform regular operations such as daily business activities, operational transactions, and other supporting activities;
2. Functions that manage and monitor risk as the Second Line of Defense: The Second Line of Defense in this implementation of internal control is manned by the work units that carried out the functions of risk management and compliance;
3. Functions that assess the implementation of risk management independently as the Third Line of Defense: The Third Line of Defense in this internal control implementation is manned by work units that conduct independent assessments, namely the internal auditors and external auditors.

Although the Three Lines of Defense Model emphasizes more on the relationships and responsibilities of each work unit, the Board of Directors is ultimately responsible for its implementation, under active supervision from the Board of Commissioners.

Structurally, Bank BNP's internal control system infrastructure up until the end of 2017 had been aligned with regulatory requirements, including those related to the three lines of defense. However, in its implementation, the internal control system shall be improved in terms of coordination, communications, and comprehension from all units involved in these three layers of internal control system, so as to result in an integrated system. Strength in control and monitoring across all lines is essential, considering the Bank's business is dominated by retail business, and thus efforts must be done to minimize future risk as well to enhance quality and competitiveness in the national banking industry.

Control & Segregation of Functions
Controlling activities are aimed at ensuring that the supervision mechanism is implemented effectively and continuously, with the participation of all parties. All related parties that are involved in the Bank's organization must reflect a clear separation of functions so as to minimize the risk of fraud.

The activities of Control and Segregation of Functions in the Bank are as follows:
1. Control of Policies and Procedures
   The activities to control policies and procedures are implemented through:

- Arahan dari Dewan Komisaris dan Direksi atas pelaksanaan penerapan kebijakan dan prosedur pengelolaan dan pengendalian risiko yang dilakukan oleh *Three Lines of Defense*;
- Pengkinian kebijakan dan prosedur secara periodic berdasarkan hasil review dari divisi terkait ataupun membuat kebijakan dan prosedur baru sesuai dengan pengembangan produk baru dan organisasi;

- Kewajiban untuk mengetahui, membaca, dan melaksanakan setiap kebijakan dan prosedur yang berlaku, minimal yang terkait dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing karyawan;
- Pelaksanaan sosialisasi kebijakan dan prosedur kepada karyawan;
- Serangkaian kecukupan kebijakan dan prosedur tersedia sebagai bentuk mitiasi risiko terhadap kegiatan operasional dan bisnis, yang melibatkan unit kerja dan/atau karyawan serta pejabat;

2. Pengendalian Aset Fisik
   Pengendalian aset fisik mencakup pengamanan aset, catatan, program komputer dan *file* data;

3. Pengendalian Transaksi
   Pengendalian transaksi mencakup sumber data, infrastruktur dan proses pengolahan data transaksi, untuk menghasilkan informasi yang akurat, tepat waktu dan aman. Aktivitas pengendalian transaksi meliputi *Dual Control*, Verifikasi, Otorisasi;

4. Pengendalian Sumber Daya Manusia
   Pengendalian SDM meliputi proses rekrutmen, penerimaan karyawan, penempatan karyawan, promosi, demosi, pengembangan kompetensi, rotasi, imbal jasa, cuti dan sebagainya.

5. Pemisahan Tugas dan Pendelegasian Wewenang.
   Kejelasan dalam pemisahan tugas dan fungsi akan memberikan kepastian tanggung jawab dan kewenangan yang ditetapkan berdasarkan kemampuan dan kapabilitas fungsi dan jabatannya, dan pemisahan tugas ini disertai dengan kewenangan yang diberikan sesuai dengan skala tugas dan tanggung jawabnya.

Akuntan Perusahaan & Auditor Eksternal

Sesuai dengan ketentuan bahwa penunjukan KAP yang akan digunakan untuk melakukan pemeriksaan umum atas Laporan Keuangan Tahunan Bank BNP harus melalui mekanisme yang telah ditetapkan yaitu mendapat kajian

- Directions from the Board of Commissioners and the Board of Directors on the implementation of policies and procedures of risk management and control carried out by the Three Lines of Defense;
- Updating of policies and procedures periodically based on the results of reviews from related divisions, or drafting of new policies and procedures according to the development of new products and the organization;
- Obligation to know, read and implement each policy and procedure, at least those that are related to their respective duties and responsibilities as employees;

- Dissemination of policies and procedures to all employees;
- An adequate set of policies and procedures made available as a form of risk mitigation for the operational and business activities involving the work units and/or employees and officers;

2. Physical Assets Control
   Physical assets control includes asset security, records, computer programs, and data files;

3. Transactions Control
   Transactions control includes the controlling of data source, infrastructure and processing of transaction data to produce accurate and secure information in timely manner. The activity of transaction control covers Dual Control, Verification, and Authorization;

4. Human Resources Control
   HR Control covers the processes of recruitment, admission and placement of employees, promotion, demotion, skill enhancement, job rotation, remuneration, leave, etc.

5. Segregation of Duties and Delegation of Authority.
   Clarity in the segregation of duties and functions provide certainty of responsibility and authority based on the abilities and capabilities of functions and positions, and this segregation of duties is also accompanied with authority granted in proportion to the scale of the respective duties and responsibilities.

External Auditor & Accountant

In accordance with the regulations, the appointment of a Public Accounting Firm, for the purpose of performing a general audit on the Annual Financial Statements of Bank BNP, should be carried out through mechanisms

dan rekomendasi dari Komite Audit serta disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

Untuk kepentingan Pemeriksaan Keuangan Bank BNP tahun buku yang berakhir 31 Desember 2017, telah ditunjuk KAP Satrio Bing Eny & Rekan, afiliasi Deloitte Southeast Asia Ltd (DSEA) untuk pertama kalinya. KAP tersebut telah terdaftar di Bank Indonesia ataupun di OJK.

Penetapan penggunaan KAP Satrio Bing Eny & Rekan, afiliasi Deloitte Southeast Asia Ltd (DSEA) dilakukan melalui Surat Penunjukan No. 023-KOM/2017 tanggal 4 Mei 2017, berdasarkan Surat Rekomendasi dari Komite Audit kepada Dewan Komisaris dan Direksi melalui surat No. 022-KOM/KA/2017 tanggal 4 Mei 2017, di mana sebelumnya Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan tahun 2017 telah mendapat Kuasa dari pemegang saham untuk menunjuk KAP yang akan melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan yang berakhir 31 Desember 2017 beserta dengan hal-hal yang berkaitan dengan penunjukan KAP tersebut, diantaranya persetujuan biaya Audit.

Nama Kantor Akuntan Publik:
KAP Satrio Bing Eny & Rekan

Nama Akuntan Publik:
Riniek Winarsih

Kapasitas KAP
KAP Satrio Bing Eny & Rekan merupakan kantor akuntan yang berafiliasi dengan Deloitte Southeast Asia Ltd. Deloitte Southeast Asia Ltd merupakan perusahaan anggota Deloitte Touche Tohmatsu Limited, dengan lebih dari 80 *partners* dan *directors* dan lebih dari 1.200 staf, dengan dua kantor, yakni di Jakarta dan Surabaya.

KAP Satrio Bing Eny & Rekan secara global merupakan salah satu *Big Four* yang memiliki basis klien yang beragam termasuk perusahaan multinasional besar, perusahaan nasional besar, institusi publik, klien penting lokal dan perusahaan global yang berkembang pesat dengan sukses. Kliennya di Indonesia berasal dari industri besar seperti perbankan dan keuangan, manufaktur, transportasi, teknologi, media, telekomunikasi dan riset, grosir, minyak dan gas, pertambangan, dan ilmu pengetahuan dan kesehatan.

that have been established, namely by assessment and recommendation of the Audit Committee and approved by the General Meeting of Shareholders.

For the purposes of audit of Bank BNP's Financial Statements for the fiscal year ended 31 December 2017, the Public Accounting Firm of Satrio Bing Eny & Rekan, an affiliate of Deloitte Southeast Asia Ltd (DSEA) was appointed for the first time. The public accounting firm is registered at Bank Indonesia and OJK.

The decision to contract Satrio Bing Eny & Rekan, an affiliate of Deloitte Southeast Asia Ltd (DSEA) was made via the Letter of Appointment No. 023-KOM/2017 dated 4 May 2017, based on the Letter of Recommendation from the Audit Committee to the Board of Commissioners and the Board of Directors No. 022-KOM/KA/2017 dated 4 May 2017, whereby prior to that the Board of Commissioners and the Board of Directors based on 2017 Annual GMS resolution had obtained authority from shareholders to appoint a public accounting firm to audit the Bank's financial statements for the year ended 31 December 2017, along with matters relating to the public accounting firm's appointment, including the audit fee approval.

Public Accounting Firm:
Satrio Bing Eny & Rekan

Certified Public Accountant:
Riniek Winarsih

Public Accounting Firm's Capacity
Satrio Bing Eny & Rekan is a public accounting firm affiliated with Deloitte Southeast Asia Ltd. Deloitte Southeast Asia Ltd is a member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited. It has more than 80 partners and directors under its employ, along with more than 1,200 staff, and operates two offices, one in Jakarta and one in Surabaya.

Satrio Bing Eny & Rekan is one of the global Big Four accounting firms that have a vast range of client base, including large multinational companies, large national companies, public institutions, local and global clients that are successfully thriving fast. Its clients in Indonesia hail from various large industries, such as banking and finance, manufacturing, transportation, technology, media, telecommunications and research, wholesale, oil and gas, mining, as well as education and healthcare.

Ruang Lingkup Pemeriksaan KAP

Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab KAP yang ditunjuk untuk hanya memberikan jasa audit yang melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan yang berakhir 31 Desember 2017 meliputi sebagai berikut:

1. Laporan Posisi Keuangan;
2. Laporan Laba Rugi Komperhensif;
3. Laporan Perubahan Ekuitas;
4. Laporan Arus Kas;
5. Catatan atas Laporan Keuangan;
6. Penggolongan Kualitas Aset Produktif dan Kecukupan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang dibentuk Bank, yang didasarkan atas penilaian sekurang-kurangnya mencakup 70% dari jenis Aktiva Produktif Bank dengan sekurang-kurangnya mencakup 25 Debitur terbesar atau berdasarkan komunikasi antara OJK dengan Akuntan Publik;
7. Penilaian terhadap rupa-rupa aktiva termasuk namun tidak terbatas pada agunan yang diambil alih oleh Bank;
8. Hal-hal lain yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan dan Pedoman Akutansi Perbankan Indonesia yang berlaku termasuk catatan atas Laporan Keuangan;
9. Pendapat terhadap kewajaran atas transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan berelasi maupun transaksi yang dilakukan dengan perlakuan khusus;
10. Jumlah dan kualitas penyediaan dana kepada Pihak Terkait;
11. Rincian pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang meliputi nama Debitur, kualitas penyediaan dana, presentase dan jumlah pelanggaran BMPK;
12. Rincian Pelampauan BMPK yang meliputi presentase dan jumlah pelampauan BMPK;
13. Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum;
14. Hal-hal lain yang ditentukan berdasarkan hasil komunikasi OJK dengan KAP;
15. Transaksi Spot dan Transaksi Derivatif;
16. Rasio Posisi Devisa Neto;
17. Keandalan sistem pelaporan Bank kepada OJK dan pengujian terhadap keandalan laporan keuangan yang disampaikan oleh Bank kepada OJK;
18. Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2017; dan
19. Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.6/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank dan perubahannya melalui POJK No.32/POJK.03/2016 tanggal 12 Agustus 2016 tentang Perubahan atas POJK No.6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.

Scope of Audit

The scope of work and responsibility of the public accounting firm appointed by the Bank is to strictly provide audit services of the financial statements for the year ended 31 December 2017, including the following:

1. Statements of Financial Positions;
2. Statements of Comprehensive Income;
3. Statement of Changes in Equity;
4. Statements of Cash Flows;
5. Notes to the Financial Statements;
6. Classification of Earning Assets Quality and Adequacy of Allowance for Earning Assets formed by the Bank, which is based on an assessment that shall include at least 70% of the Bank's Earning Assets with at least the 25 largest debtors of the Bank or based on the communication between OJK with the public accounting firm;
7. Assessment of miscellaneous assets including but not limited to foreclosed assets by the Bank;
8. Other matters set forth in the applicable Financial Accounting Standards and Guidelines for Indonesian Banking, including the notes to the Financial Statements;
9. Opinion on the fairness of transactions with related parties as well as unrelated parties that have been carried out with special treatment;
10. Amount and quality of the provision of funds to Related Parties;
11. Details of violations of the Lending Limit (BPMK), which include the name of the debtors, the quality of provision of funds, the percentage and number of violations of the BPMK;
12. Details of Excess BPMK, including the percentage and amount of excess;
13. Calculation of the Minimum Capital Requirement;
14. Other matters as determined by the results of the communication between OJK and the public accounting firm;
15. Spot Transactions and Derivative Transactions;
16. Ratio of Net Open Position;
17. Reliability of reporting systems of the Bank to OJK and testing of the reliability of the financial statements submitted by the Bank to OJK;
18. Board of Directors' Statement of Responsibility for the Financial Statements for 2017;
19. The scope as stipulated in the OJK Regulation No. 6/POJK.03/2015 dated 31 March 2015 on Transparency and Publication of Bank Reports and subsequent amendments through POJK No. 32/POJK.03/2016 dated 12 August 2016 on Amendment to POJK No. 6/POJK.03/2015 on Transparency and Publication of Bank Reports.

Independensi & Profesionalitas Akuntan Publik dan KAP

KAP Satrio Bing Eny & Rekan telah menyampaikan hasil audit dan management letter kepada Bank BNP tepat waktu, dan manajemen menilai KAP tersebut mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.

Independence & Professionalism of the Public Accountant and Public Accounting Firm

Satrio Bing Eny & Rekan has submitted the results of the audit and management letter to Bank BNP timely, and the management assessed that the public accounting firm would be able to work independently, meet professional standards and agreements public accountant and audit scope defined.

Periode KAP dan Akuntan dalam Pemeriksaan Keuangan Bank

KAP Satrio Bing Eny & Rekan pertama kali ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Bank BNP yang berakhir tahun 2017 Penunjukan KAP ini masih sejalan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, di mana penunjukan KAP yang sama diperkenankan untuk 5 (lima) tahun berturut-turut.

Public Accounting Firm and Public Accountant's Audit Period with the Bank

Satrio Bing Eny & Rekan was first appointed to audit the financial statements of Bank BNP for the year 2017. The appointment of the public accounting firm was in accordance with Regulation of OJK No. 6/POJK.03/2015 on on Transparency and Publication of Bank Reports. which stipulates that a public accounting firm is allowed to audit the financial statements of the same company for a total of 5 (five) consecutive years.

Tahun Year	Nama Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	Nama Akuntan Accountant
2017	Satrio Bing Eny & Rekan (Afiliasi DSEA)	Riniek Winarsih
2016	Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali (BKR)	Deddy Supardi, CPA
2015	Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali (BKR)	Deddy Supardi, CPA
2014	Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali (BKR)	Deddy Supardi, CPA
2013	Gani Mulyadi & Handayani (Grant Thornton)	Hanna P. Handayani

Biaya Audit Tahun 2017

Biaya jasa audit untuk KAP Satrio Bing Eny & Rekan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2017 berkisar Rp490 juta.

2017 Audit Fee

The audit fee for Satrio Bing Eny & Rekan for the audit of the financial statements for the year ended 31 December 2017 was around Rp490 million.

Opini Akuntan

Laporan Keuangan Bank BNP telah menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Bank BNP tanggal 31 Desember 2017, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Auditor's Opinion

Bank BNP's Financial Statements have presented fairly, in all material aspects, the financial position of Bank BNP on 31 December 2017, as well as the financial performance and cash flows for the year ended on said date, in accordance with the prevailing Financial Accounting Standards in Indonesia.

Laporan Manajemen Risiko

Risk Management Report

Peran manajemen risiko dari Bank BNP adalah untuk memastikan bahwa atas seluruh risiko yang dapat berdampak negatif terhadap pelaksanaan pencapaian tujuan strategis Bank dapat diidentifikasi, dikenali, diukur, dipantau, dan dikendalikan sesuai dengan *risk appetite* Bank, sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan.

The role of Bank BNP's risk management is to ensure that all the risks that may have adverse impacts on the Bank's pursuit of its strategic goals can be identified, recognized, measured, monitored, and controlled adequately in line with the Bank's risk appetite, so that it may create added value to the shareholders and stakeholders.

Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko

Acuan dasar penerapan manajemen risiko adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 (POJK No. 18) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum SE OJK No. 34/SEOJK.03/2016, yang dilaksanakan melalui suatu kerangka kerja dan tata kelola manajemen risiko melalui tahapan proses manajemen risiko yaitu identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko pada semua unit kerja dan lini organisasi Bank, serta didukung oleh Sistem Informasi Manajemen Risiko.

Bank BNP menyadari bahwa dalam melaksanakan kegiatan usahanya Bank selalu menghadapi risiko yang melekat (inheren) pada kegiatan bisnis maupun operasional perbankan. Dalam rangka mengendalikan risiko tersebut, Bank BNP secara berkesinambungan menerapkan sistem manajemen risiko terintegrasi yang mencakup seluruh aspek risiko yang dihadapi oleh Bank.

Bank BNP tengah mengembangkan suatu Kerangka Manajemen Risiko yang selaras dengan strategi bisnis, struktur organisasi, kebijakan dan pedoman, serta penyempurnaan infrastruktur Bank. Kebijakan Dasar Manajemen Risiko bertujuan untuk memastikan risiko-risiko yang dihadapi Bank dapat dikenali, diukur, dikendalikan, dan dilaporkan dengan baik. Untuk mendukung pelaksanaan manajemen risiko yang efektif, Bank BNP terus melakukan pengembangan infrastruktur manajemen risiko dengan mengacu pada peraturan yang berlaku maupun *international best practices* (MUFG Group).

Compliance & Risk Management Director

The references for the application of risk management are the Financial Services Authority Regulation No. 18/POJK.03/2016 dated 16 March 2016 (POJK No. 18) and the Financial Services Authority Circular No. 34/SEOJK.03/2016 dated 1 September 2016 on the Application of Risk Management for Commercial Banks SE OJK No. 34/SEOJK.03/2016, which is implemented through a risk management governance framework and through risk management processes of identification, measurement, monitoring and control of risks in all work units and organizational lines of the Bank, supported by the risk Management Information System.

Bank BNP realizes that in order to perform its business activities the Bank is constantly faced with inherent risks in its banking business and operational activities. in order to control these risks, Bank BNP constantly implements an integrated risk management system that encompasses all the aspects of the risks faced by the Bank.

The Bank is developing a Risk Management Framework that is aligned with the Bank's business strategy, organization structure, policies and guidelines, and infrastructure development. The Basic Risk Management Policy is aimed at ensuring that the risks faced by the Bank can be identified, measured, controlled, and reported properly. To support effective risk management, Bank BNP is continuously developing its risk management infastructure by referring to the prevailing regulations and the international best practices espoused by the MUFG Group.

Dalam melakukan penerapan manajemen risiko yang efektif, Bank BNP mengacu pada 4 (empat) pilar sebagaimana ditetapkan dalam POJK, yaitu:

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi
   a. Komite Pemantau Risiko (KPR) sebagai komite yang beranggotakan Komisaris independen, pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan dan pihak independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko yang berada di bawah pengawasan Dewan Komisaris yang memiliki tugas utama melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara kebijakan dan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko, serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko (KMR) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.

   b. Komite Manajemen Risiko (KMR) sebagai komite yang beranggotakan Direksi dan Kepala Divisi dan/ atau Kepala Departemen yang memiliki tugas utama menyusun Kebijakan Manajemen Risiko serta perubahannya termasuk merancang dan menetapkan strategi manajemen risiko dan rencana darurat (*contingency plan*) pada saat kondisi eksternal menjadi tidak normal, mengawasi penerapan atau pelaksanaan kebijakan serta memberikan rekomendasi mengenai hal-hal yang perlu dilakukan oleh Direksi Bank BNP berkaitan dengan manajemen risiko.

2. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit
   Bank BNP secara berkala melakukan kaji ulang terhadap kecukupan kebijakan dan prosedur Bank untuk memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan atau perundang- undangan yang berlaku serta mengevaluasi limit *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* dan kesesuaiannya dengan Rencana Bisnis Bank.

3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko
   Bank melakukan identifikasi risiko terhadap seluruh produk dan aktivitas Bank, termasuk didalamnya adalah identifikasi risiko atas produk dan/ atau aktivitas baru. Bank antara lain menggunakan metode sensitivitas dan *stress testing* untuk mengukur risiko. Pemantauan terhadap risiko dilakukan oleh pemangku risiko (*risk*

For conducting effective risk management, Bank BNP refers to the four pillars as defined in the POJK, namely:

1. Active supervision by the Board of Commissioners and the Directors
   a. Risk Oversight Committee (KPR) as a committee made up of independent commissioners, independent parties with expertise in finance and independent parties with expertise in risk management under the supervision of the Board of Commissioners who has the primary duty of evaluating the compatibility between the risk management policies and implementation of said policies, as well as monitor and evaluate the implementation of the Risk Management Committee (RMC) and the Risk Management Unit.
   b. Risk Management Committee (RMC) as a committee made up of the Directors and Division and/ or Department Heads who have the primary task of preparing the Risk Management Policy and amendments thereto, including drafting and determining the risk management strategy and contingency plan when external conditions become abnormal, overseeing the implementation or execution of the policies and providing recommendations on matters that need to be performed by the Board of Directors of Bank BNP linked to risk management.

2. Adequacy of policies, procedures and limits
   Bank BNP periodically conducts a review of the adequacy of the Bank's policies and procedures to ensure its compliance with the prevailing regulations or laws as well as the evaluation of the limit of Risk Appetite and Risk Tolerance and their alignment with the Bank's Business Plan.

3. Adequacy of identification, measurement, monitoring and control of risk and risk management information system
   The Bank identifies the risks carried by all products and activities of the Bank, including the identification of risks for the new products and/or activities. The Bank uses, among others, sensitivity method and stress testing to measure risks. Monitoring of the risks is undertaken by the risk owners and the Risk Management Division, with

owner) dan *Risk Management Division* dengan didukung oleh Sistem Informasi Manajemen Risiko yang dimiliki oleh Bank.

4. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh
   Sistem pengendalian dilakukan dengan prinsip *Three Lines of Defense*.

Penerapan tata kelola Manajemen Risiko dan Kepatuhan yang efektif dapat mendukung pencapaian rencana bisnis Bank BNP baik tujuan jangka pendek, menengah dan jangka panjang secara sehat dan berkelanjutan, di mana setiap keputusan strategis yang diambil selalu mempertimbangkan prinsip kewajaran, tingkat risiko (*risk appetite* dan *risk tolerance*) serta tingkat pengembalian yang akan diterima, yang didasarkan pada 5 (lima) prinsip manajemen risiko Bank BNP, yaitu:

1. Transparansi
   Pengelolaan risiko Bank BNP bersifat inklusif dan transparan dengan melibatkan semua pihak yang terkait dengan risiko tersebut dan Bank secara terbuka menyampaikan informasi yang relevan dalam proses pengambilan risiko.
2. Akuntabilitas
   Bank menerapkan kebijakan dan prosedur untuk menjamin akuntabilitas manajemen terhadap para pemangku kepentingan (*stakeholders*).
3. Responsibilitas
   Bank memastikan bahwa setiap pemangku risiko (*Risk Owner*) memiliki pemahaman yang baik dalam melakukan identifikasi risiko dan pengelolaan risiko.
4. Independensi
   Manajemen Bank bertindak secara professional dan terbebas dari tekanan dan pengaruh dari pihak lain dalam merumuskan penanganan risiko.
5. Terintegrasi
   Penerapan manajemen risiko dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi pada seluruh lini organisasi Bank.

POJK no 18/POJK.03/2016 dan SEOJK No. 34/SEOJK.03/2016 juga mensyaratkan Bank untuk menyusun rencana darurat (*contingency plan*) dalam kondisi terburuk. Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur yang memadai atas rencana darurat dan menguji efektivitas dari kebijakan dan prosedur dengan melakukan simulasi, antara lain:

the support of the Risk Management Information System owned by the Bank.

4. Thorough internal control system
   The internal control system is carried out with the principle of Three Lines of Defense.

Implementation of an effective Risk Management and Compliance governance can effectively support the achievement of the business plan of Bank BNP including its short-term, medium-term and long-term goals in a sustainable and sound manner, whereby each strategic decision taken always considers the principle of fairness, level of risk (risk appetite and risk tolerance) and returns that will be received, based on Bank BNP's five risk management principles of:

1. Transparency
   Bank BNP's risk management is inclusive and transparent by involving all parties with respect to these risks and the Bank openly conveys the relevant information in the process of risk-taking.
2. Accountability
   The Bank implements policies and procedures to ensure the accountability of management to the stakeholders.
3. Responsibility
   The Bank ensures that every Risk Owner has a good understanding in risk identification and risk management.
4. Independence
   The Bank's management acts in a professional way and is free from pressures and influences from other parties in formulating the risk management procedures.
5. Integrated
   Application of risk management is comprehensive and integrated in all organizational lines of the Bank.

POJK no 18/POJK.03/2016 and SEOJK No. 34/SEOJK.03/2016 also require the Bank to draw up a Contingency Plan in the worst conditions. The Bank has adequate policies and procedures in place on these contingency plans and has tested the effectiveness of policies and procedures by conducting a simulation, among others:

- Tanggap darurat kebakaran di KCP Sudirman – Bandung, pada tanggal 25 Agustus 2017 yang diikuti oleh ± 400 orang dengan melibatkan *Director*, *Division Head, Departement Head, Section Head, Officer*, *Security* dan *Office Boy*.
- *SMS Tree* setelah simulasi tanggap darurat kebakaran selesai dilakukan di KCP Sudirman.
- Tanggap darurat kebakaran di KCP Suniaraja – Bandung, pada tanggal 15 September 2017 yang diikuti oleh ± 150 orang dengan melibatkan *Director, Division Head, Departement Head, Section Head, Officer, Security* dan *Office Boy*.
- *SMS Tree* setelah simulasi tanggap darurat kebakaran selesai dilakukan di KCP Suniaraja.
- Uji coba akses dan input transaksi untuk 42 kantor cabang pada *core banking* pada *Disaster Recovery Site* (DRC) serta simulasi terhadap kesiapan dan keamanan data transaksi jika terjadi kondisi *force majeure* seperti bencana alam.

Terkait dengan POJK No. 17/POJK.03/2014 tanggal 14 November 2014 (POJK No. 17) dan SEOJK No. 14/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 (SE OJK No. 14) tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, Bank BNP adalah merupakan Lembaga Jasa Keuangan dalam kelompok konglomerasi keuangan MUFG Group di Indonesia dengan Bank BTMU–UFJ Cabang Jakarta sebagai Entitas Utama.

Menindaklanjuti POJK No. 17 dan SEOJK No. 14 tersebut maka disusun Piagam Manajemen Risiko Terintegrasi untuk Konglomerasi Keuangan MUFG yang berlaku efektif tanggal 1 Desember 2015. Piagam tersebut menjadi panduan bagi Komite Manajemen Risiko Terintegrasi dalam melakukan pemantauan terhadap aktivitas manajemen risiko yang terintegrasi. Rapat Komite Manajemen Risiko Terintegrasi diadakan setiap semester atau sewaktu- waktu apabila terdapat peristiwa atau kejadian yang dapat berdampak signifikan pada aktivitas usaha dari konglomerasi keuangan.

- Fire emergency response at the Sudirman sub-branch office in Bandung, on 25 August 2017, with about 400 participants, including Directors, Division Heads, Department Heads, Section Heads, Officers, Security Personnel, and Office Boys.
- SMS Tree after the fire emergency response simulation was completed in Sudirman sub-branch office.
- Fire emergency response at the Suniaraja sub-branch office in Bandung, on 15 September 2017, with about 150 participants, including Directors, Division Heads, Department Heads, Section Heads, Officers, Security Personnel, and Office Boys.
- SMS Tree after the fire emergency response simulation was completed in Suniaraja sub-branch office.
- Trial of the Disaster Recovery Site at 42 offices of the Bank on the core banking in the Disaster Recovery Site (DRC), and simulation on the readiness and security of transactional data should a force majeure, such as a natural disaster, occurs.

In line with POJK No. 17/POJK.03/2014 dated 14 November 2014 (POJK No. 17) and SEOJK No. 14/SEOJK.03/2015 dated 25 May 2015 (SEOJK No. 18) on the Implementation of Integrated Risk Management for Financial Conglomerates, Bank BNP is part of the financial services institutions under the MUFG Group financial conglomerate in Indonesia, with the BTMU–UFJ Jakarta Branch as the Main Entity.

Following up on the POJK No. 17 and SEOJK No. 14, the Integrated Risk Management Charter for the MUFG Finances Conglomeration was formulated and deemed valid starting from 1 December 2015. This charter serves as a guideline for the Integrated Risk Management Committee to conduct monitoring of the integrated risk management activities. The Integrated Risk Management Committee meetings are held once per semester or at any time should there be an event that may significantly result in the business activities and financial conglomerates.

Struktur Organisasi Tata Kelola Manajemen Risiko

Risk Management Governance Organization Structure

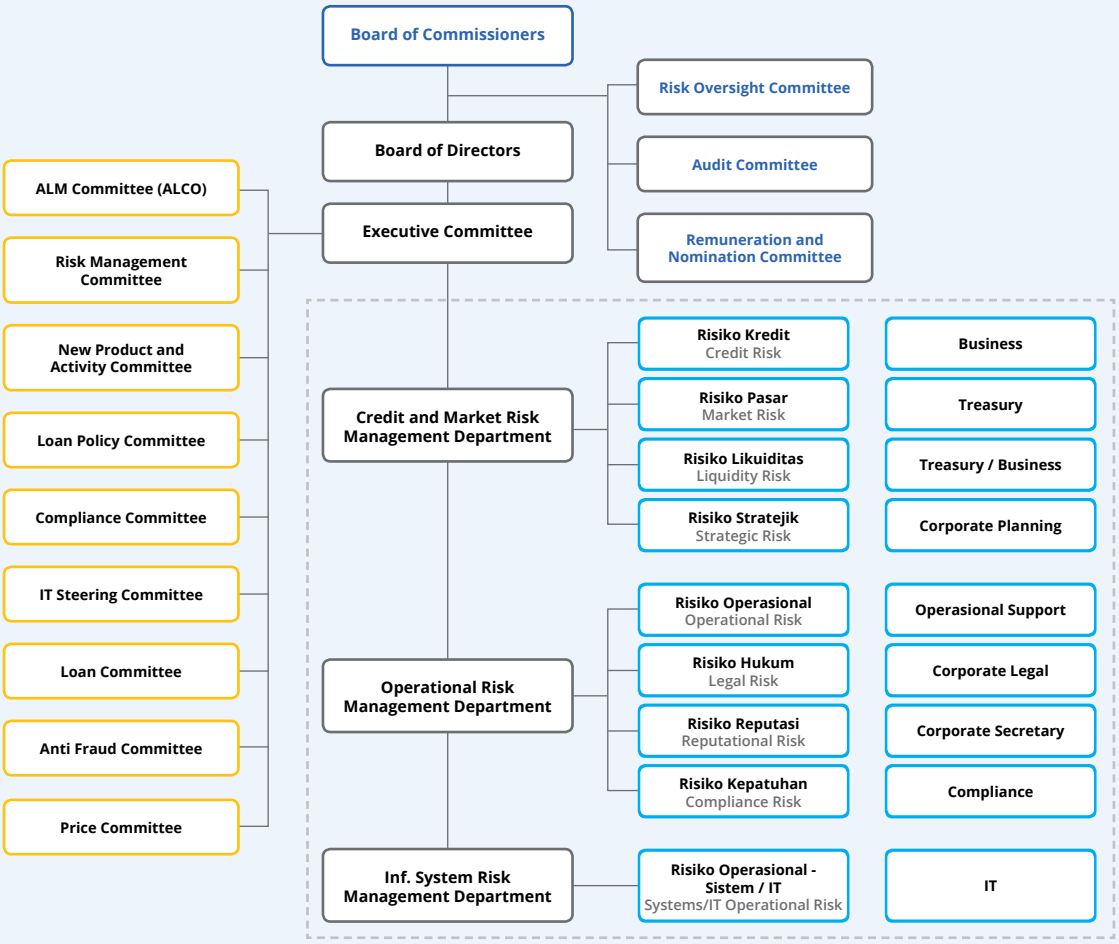

Kerangka Kerja Penerapan Manajemen Risiko

Kerangka kerja manajemen risiko Bank BNP merupakan dasar atau landasan dalam penataan seluruh kegiatan operasional Bank di segala lini organisasi untuk membantu mengelola risiko secara efektif. Kerangka kerja ini akan memastikan bahwa Unit Kerja Manajemen Risiko memperoleh informasi risiko yang lengkap, terintegrasi dan akurat dari seluruh risk taking unit untuk kemudian dilaporkan secara transparan, dapat dipertanggungjawabkan, serta digunakan sebagai landasan untuk pengambilan keputusan.

Risk Management Implementation Framework

Bank BNP's risk management framework is the basis for organizing all operational activities of the Bank across all organizational lines to ensure that the Bank manages its risks effectively. This framework shall ensure that the Risk Management Work Unit has obtained a complete, integrated and accurate set of risks from all risk taking units to be presented transparently, be made liable, and used as a basis for decisionmaking.

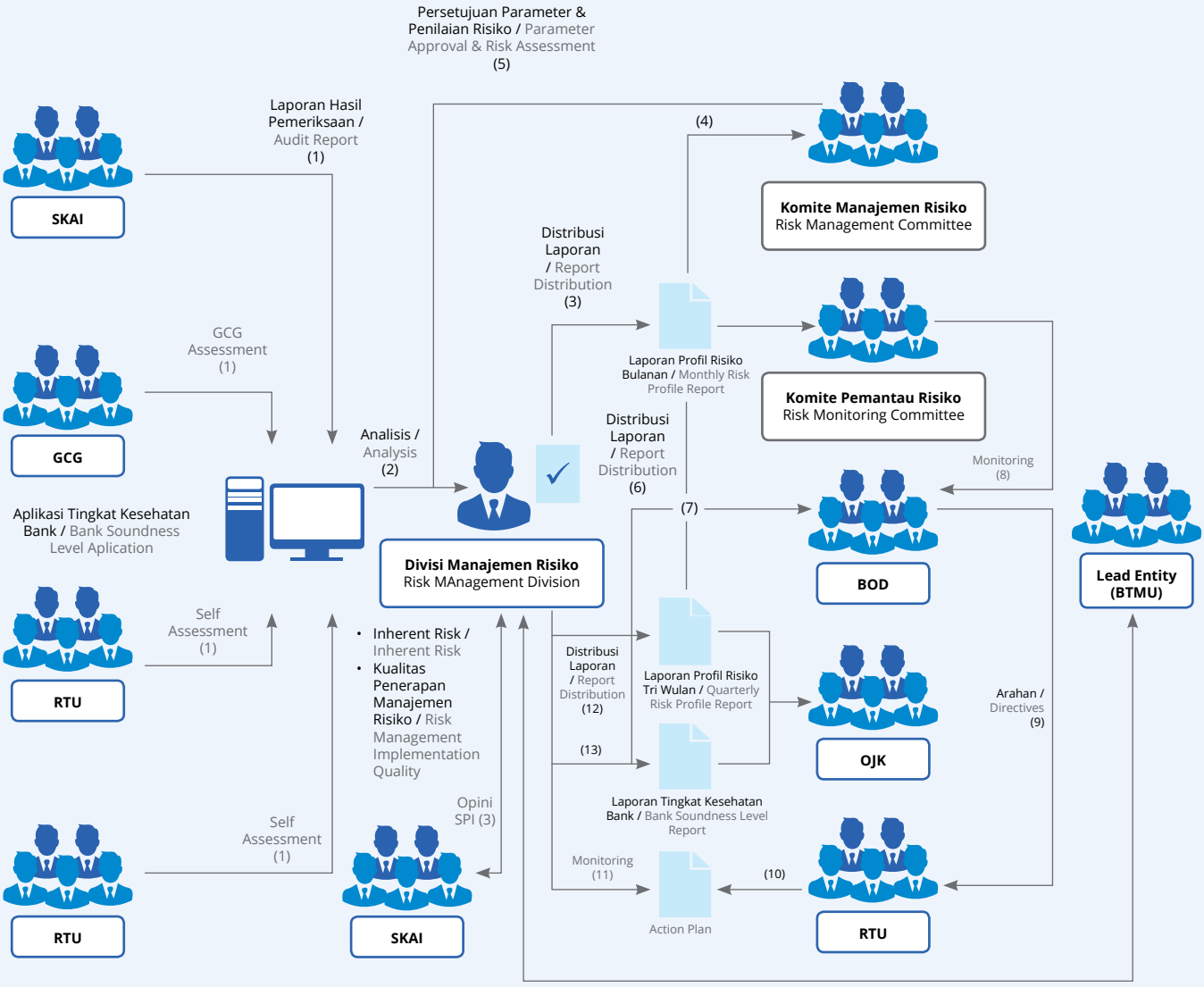

Bank BNP telah melakukan perubahan terhadap visi dan strateginya sebagai bank mitra usaha untuk berperan serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional khususnya. Untuk mencapai misi tersebut Bank BNP berfokus pada pertumbuhan kredit di segmen kredit usaha kecil dan menengah, komersial, dan kredit retail, yaitu Kredit Tanpa Agunan Mirai+.

Sebagai upaya dalam mengantisipasi berbagai perkembangan eksternal, pada tahun 2017 manajemen risiko Bank BNP diarahkan untuk memastikan bahwa Bank memiliki kualitas kredit, posisi likuiditas dan permodalan yang memadai. Untuk mendukung pertumbuhan kredit maka diperlukan suatu pengelolaan risiko yang andal melalui:

Bank BNP has made changes to its vision and strategy to become a partnering bank for participating in the efforts to drive the national economy and development. To achieve this mission, Bank BNP focuses on the growth of loans in small and medium enterprises (SMEs) segment, commercial segment and retail segment, i.e. Non-Collateral Loan Mirai+.

In an effort to anticipate various external developments, in 2017 Bank BNP's risk management was directed towards ensuring that the Bank has an adequate credit quality, liquidity position, and adequate capital. To support growth in lending, the Bank implements a reliable risk management system by:

1. Pengelolaan Risiko Melalui Permodalan

Pengelolaan risiko melalui permodalan dengan melakukan diversifikasi sumber permodalan yang disinkronisasi dengan rencana strategis jangka panjang dan kebijakan alokasi modal secara efisien pada segmen bisnis yang memiliki profil *risk-return* yang optimal. Hal ini bertujuan untuk memenuhi ekspektasi para pemangku kepentingan termasuk investor dan regulator.

Untuk pengukuran risiko kredit, Bank menggunakan Pendekatan Standar (*Standardized Approach*), dan saat ini Bank secara bertahap sedang melakukan simulasi *stress test* risiko kredit dengan menggunakan pendekatan Internal model. Untuk risiko pasar, Bank menggunakan Pendekatan Standar (*Standardized Approach*), sedangkan secara internal Bank telah menggunakan *Value at Risk* sebagai model internal. Pengukuran risiko operasional Bank menggunakan *Basic Indicator Approach*. Bank BNP memiliki kecukupan modal terhadap potensi kerugian risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional, baik berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku (*regulatory capital*) maupun kebutuhan internal (*economic capital*).

Berikut adalah penilaian kecukupan permodalan bank melalui *Internal Capital Adequacy Assessment Process* yang didasarkan pada profil Risiko Bank.

1. Capital Risk Management

Capital risk management is performed by capital resources diversification which is efficiently synchronized with long-term strategic plan and capital allocation policy for business segment which is having optimum risk-return profile. This is to fulfill the expectation of stakeholders, including investors and regulators.

To measure credit risk, the Bank uses the Standardized Approach, and currently the simulation is being gradually performed for bank credit risk stress test using the Internal model. For market risk, the Bank implements the Standardized Approach, while internally the Bank uses Value at Risk as internal model. Operational risk measurement uses the Basic Indicator Approach. Bank BNP has sufficient capital to overcome the potential loss owing to credit risk, market risk and operational risk, both based on regulatory capital or internal needs (economic capital).

The following is the Bank's capital adequacy valuation done through the Internal Capital Adequacy Assessment Process based on the Bank's risk profile.

No	Keterangan	31 Desember 2015 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)	Description
A	**Kecukupan Modal Bank (Pilar 1)** Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) dengan memperhitungkan Risiko Kredit, Risiko Operasional dan Risiko Pasar.	18,08%	**20,57%**	**17.50%**	**Capital Adequacy (Pillar 1)** Minimum Capital Adequacy Requirement by taking into consideration Credit Risk, Operational Risk and Market Risk
B	**Kecukupan Modal Bank (Pilar 2)** Profil Risiko Bank Kecukupan Pemenuhan Modal sesuai profil risiko	2 9,00%	2 9,00%	2 9,00%	**Capital Adequacy (Pillar 2)** Bank's Risk Profile Minimum Capital Adequacy based on risk profile
C	**Add on** Risiko Konsentrasi Risiko Likuiditas Risiko Suku Bunga Banking Book Risiko Stratejik Risiko Reputasi Risiko Hukum Risiko Kepatuhan Total Add On	 0,15% 0,00% 0,01% 0,06% 0,01% 0,01% 0,03% **0,27%**	 0,07% 0,02% 0,02% 0,14% 0,00% 0,00% 0,05% **0,30%**	 0,11% 0,07% 0,02% 0,17% 0,00% 0,01% 0,03% **0,41%**	**Add On** Concentration Risk Liquidity Risk Banking Book Interest Rate Risk Strategic Risk Reputation Risk Legal Risk Compliance Risk Total Add On
D	**Total Modal Menurut Pilar 2 (B+C)**	9,27%	9,30%	9,41%	Total Pillar 2 Capital (B+C)
E	***Excess* Modal (A-D)**	8,81%	11,28%	8,09%	Capital Excess (A-D)

2. Pengelolaan Risiko Melalui Aktivitas Operasional

Pengelolaan risiko melalui aktivitas operasional lebih ditujukan terhadap risiko operasional pada aktivitas perkreditan, pasar dan operasional pada level yang dapat diterima. Bank BNP juga menerapkan *risk appetite* dan *risk tolerance* dalam bentuk kebijakan limit dan sistem limit.

Penetapan limit didasarkan atas limit secara keseluruhan, limit per jenis risiko maupun limit per aktivitas fungsional tertentu yang memiliki eksposur risiko. Kebijakan limit tidak saja berfungsi dalam proses pengendalian risiko namun juga mendorong strategi bisnis dan ekspansi bisnis ke dalam koridor pertumbuhan dengan profil risk-return yang optimal. Pengelolaan risiko kredit dilakukan melalui *front end*, *middle end* dan *back end*. Pengelolaan risiko pasar dan likuiditas dilakukan melalui sistem limit. Pengelolaan risiko operasional pada produk dan aktivitas Bank dilakukan oleh seluruh unit kerja dan dikaji ulang secara menyeluruh oleh *Risk Management Division*, serta diukur efektivitas pelaksanaannya (*assurance*) oleh *Internal Audit Division*.

Pengelolaan Manajemen Risiko

1. Pengelolaan Risiko Kredit

Risiko kredit berasal dari aktivitas pemberian kredit, penempatan pada surat berharga dan kepada bank lain dan aktivitas *trading*. Risiko kredit juga berasal dari transaksi komitmen dan kontinjensi dengan nasabah dan pihak lawan lainnya. Pengelolaan risiko kredit bertujuan untuk mengukur, mengantisipasi, dan meminimalkan kerugian akibat kegagalan nasabah debitur atau pihak lawan lainnya dalam memenuhi kewajibannya.

Kerangka Kerja Manajemen Risiko Kredit

Dengan kondisi ekonomi global yang tumbuh melamban dan masih berlangsungnya proses pemulihan perekonomian nasional, Bank BNP senantiasa mewaspadai risiko penurunan kualitas aset dan menjaga kualitas portofolio kredit melalui penerapan manajemen risiko kredit yang *prudent* dan menerapkan *early warning system* untuk memantau perubahan kemampuan bayar debitur dan mengambil langkah-langkah preventif untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah. Secara periodik melakukan pemantuan kinerja usaha maupun kinerja keuangan para debitur dan segera mengambil tindakan yang dipandang perlu apabila debitur mengalami kesulitan usaha maupun kesulitan keuangan, serta melakukan upaya restrukturisasi atas kredit bagi debitur yang mengalami kesulitan keuangan tetapi masih memiliki prospek usaha yang solid dalam jangka panjang.

2. Operational Activities Risk Management

Operational activities risk management is addressed for operational risk on credit, market and operational activities on acceptable levels. Bank BNP is applying risk appetite and risk tolerance in the form of limit policy and limit system.

Limit determination is based on the overall limit, limit by risk type and limit by certain functional activities that carry risk exposure. Limit policy not only functions in the risk control process, but also in the supporting business strategy and business expansion into a growth corridor with optimum risk-return profile. Credit risk management is performed on front end, middle end and back end. Market risk management and liquidity is performed through limit system. Operational risk management on product and Bank activity is performed by all units and wholly reviewed by the Risk Management Division, and the effectiveness of the assurance is measured by Internal Audit Division.

Risk Management Governance

1. Credit Risk Management

Credit risk arises from credit disbursement, placement in securities and with other banks, and trading activities. Credit risk also arises from commitment and contingency transactions with customers and other counterparties. Credit risk management aims to measure, anticipate, and minimize loss caused by any customer's or counterparty's failure in fulfilling their obligations.

Credit Risk Management Framework

With the slowing rate of growth in the global economy, and the continued recovery of the national economy, Bank BNP is closely watching the risk of reduced asset quality and thus maintains its lending portfolio quality by implementing prudent credit risk management and the early warning system to monitor any change in the ability of the debtors to repay their debts. The Bank also takes the necessary preventive measures to reduce the risk of non-performing loans. Periodically the Bank conducts monitoring on its debtors' business and financial performance, and take immediate actions that it considers necessary should any debtor is found to have any difficulty in their business or finances, and perform loan restructuring on debtors that are having financial difficulties yet still believed to have a solid long-term business prospect.

Proses Manajemen Risiko Kredit adalah penerapan secara sistematik kebijakan manajemen, prosedur dan praktik manajemen dalam pelaksanaan tugas untuk melakukan *monitoring* dan *reporting*, identifikasi, *assessment* (pengukuran dan evaluasi), respons risiko dan mitigasi risiko untuk memastikan atas seluruh aktivitas perkreditan Bank dapat dikendalikan dengan baik pada tingkat risiko yang telah ditetapkan.

Credit Risk Management Process is a systematic implementation of management policy, procedures and practices in performing duties on monitoring and reporting, identification, assessment (measurement and evaluation), risk response, and risk mitigation to ensure that all credit activities of the Bank can be well controlled on the risk level that has been set.

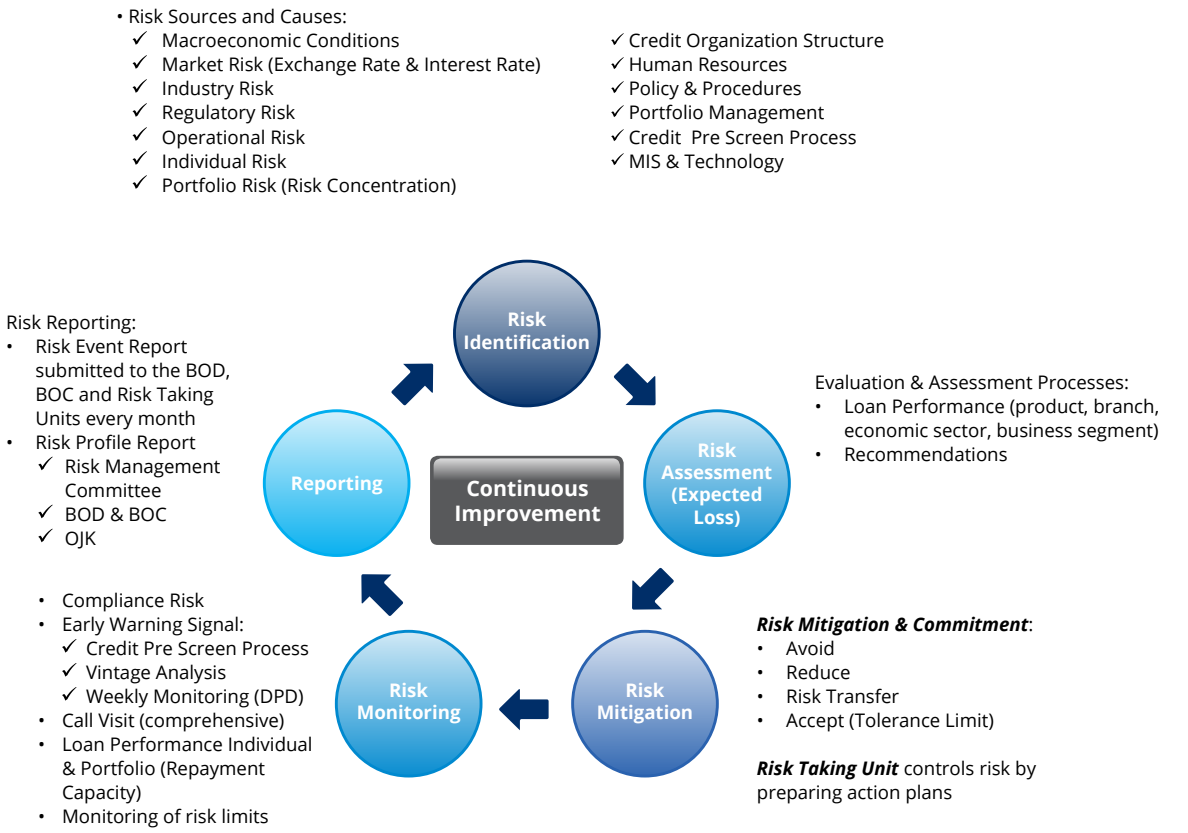
• Risk Sources and Causes:
✓ Macroeconomic Conditions
✓ Market Risk (Exchange Rate & Interest Rate)
✓ Industry Risk
✓ Regulatory Risk
✓ Operational Risk
✓ Individual Risk
✓ Portfolio Risk (Risk Concentration)
✓ Credit Organization Structure
✓ Human Resources
✓ Policy & Procedures
✓ Portfolio Management
✓ Credit Pre Screen Process
✓ MIS & Technology
Risk Reporting:
• Risk Event Report submitted to the BOD, BOC and Risk Taking Units every month
• Risk Profile Report
✓ Risk Management Committee
✓ BOD & BOC
✓ OJK
Risk Identification
Risk Assessment (Expected Loss)
Risk Mitigation
Risk Monitoring
Reporting
Continuous Improvement
Evaluation & Assessment Processes:
• Loan Performance (product, branch, economic sector, business segment)
• Recommendations
• Compliance Risk
• Early Warning Signal:
✓ Credit Pre Screen Process
✓ Vintage Analysis
✓ Weekly Monitoring (DPD)
• Call Visit (comprehensive)
• Loan Performance Individual & Portfolio (Repayment Capacity)
• Monitoring of risk limits
Risk Mitigation & Commitment:
• Avoid
• Reduce
• Risk Transfer
• Accept (Tolerance Limit)
Risk Taking Unit controls risk by preparing action plans

Bank BNP secara berkelanjutan melakukan proses evaluasi dan kaji ulang dalam penyempurnaan pengelolaan risiko kredit meliputi:

- Peningkatan dan pengembangan manusia yang bersumber daya untuk menunjang pengelolaan risiko kredit yang layak;
- Pembenahan infrastruktur untuk menunjang efisiensi dan efektivitas pengelolaan risiko kredit dengan melakukan re-organisasi (perubahan struktur organisasi) dengan mengedepankan prinsip pengendalian internal secara melekat, pengembangan sistem dan teknologi, serta kecukupan manajemen sistem informasi secara terintegrasi;

Bank BNP is sustainably performing evaluation and reviews in risk management improvement as follows:

- Human capital development and enhancement to support decent credit risk management;
- Infrastructure revamping to support efficiency and effectiveness of credit risk management by performing re-organization (change of organization structure) by prioritizing the internal control principle inherently, system and technology development, and integrated information system management adequacy;

- Peningkatan pemahaman *Knowing Your Customer* melalui analisis 6C terhadap pengenalan *Character*, *Capital*, *Capacity*, *Collateral*, *economic Condition*, dan *Constraints* calon debitur secara lebih mendalam melalui hubungan kemitraan;
- Peningkatan Pemahaman KYC juga dilakukan dengan adanya *Business Club* sebagai media yang dapat menggali keluhan, masukan dari nasabah dan berbagi informasi dalam upaya meningkatkan pelayanan dan hubungan bank dengan nasabahnya secara lebih dekat;
- Pengelolaan Portofolio Kredit yang dibagi berdasarkan sektor ekonomi dan industri yang didasarkan pada prinsip *risk and return* dan risiko konsentrasi kredit;
- Mengembangkan dan meningkatkan *Early Warning System*, metode identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko kredit secara berkelanjutan.
- Penyusunan penetapan batas wewenang pemutus kredit dalam rangka penegakan prinsip kehati-hatian perbankan;
- Proses pemberian kredit berprinsip pada *four eyes principles* dan kehati-hatian dengan melalui beberapa tahapan, di mana keputusan persetujuan kredit diberikan oleh Komite Kredit dan dibantu rekomendasi dari *Credit Process Division (Legal Credit Department), Credit Quality Division (Credit Review Department)*, serta opini dari *Compliance & Risk Management Directorate* apabila diperlukan.
- Pemantauan pergerakan kualitas kredit yang dilakukan secara periodik oleh *Risk Management Division* sebagai unit kerja independen;
- Menetapkan dan melakukan pengawasan terhadap kecukupan cadangan kerugian penurunan nilai dan pengaruhnya terhadap pencapaian target laba bank dan *economic capital*;
- Kecukupan proses administrasi, pengukuran dan pemantauan kredit secara lengkap, antara lain dengan mengelola informasi dan dokumentasi legal jaminan kredit untuk meminimalkan dampak risiko.

2. Pengelolaan Risiko Pasar

Risiko pasar merupakan potensi kerugian yang disebabkan oleh perubahan suku bunga dan nilai tukar, termasuk instrumen derivatif.

Pengelolaan risiko pasar didasarkan atas hal-hal sebagai berikut:

- Pengembangan SDM yang berkompeten dalam melakukan transaksi sesuai dengan kewenangan dan batas;
- Senantiasa mengembangkan metode *Early Warning System*, dan metode identifikasi, pengukuran,

- Improvement of Knowing Your Customer through a more thorough analysis of 6C, namely Character, Capital, Capacity, Collateral, economic Condition, and Constraints of potential debtors, using the partnership approach;
- Improvement of KYC is also performed through the Business Club as a medium for receiving complaints and inputs from customers and for sharing information in order to improve performance and cultivate the relationship between the Bank and its customers;
- Credit portfolio management, which is divided by economic and industry sector based on risk and return and credit concentration risk principle;
- To develop and improve Early Warning System, identification method, measurement, monitoring, and controlling of the credit risk continuously.
- Preparation of credit approval officer's authority in order to establish prudent banking principle;
- Credit disbursement process is based on the four eyes principle and the principle of prudence through certain phases where credit approval decision is granted by Credit Committee and supported by the recommendation from Credit Process Division (Legal Credit Department), Credit Quality Division (Credit Review Department), and opinion from Compliance and Risk Management Directorate if required.
- Monitoring of credit quality movement, which is performed periodically by Risk Management Division as an independent unit;
- To set and perform supervision toward sufficiency of impairment loss reserves and its effect to profit target achievement and economic capital;
- Adequacy of administration processes, complete credit measurement and monitoring, by organizing legal information and documentation of credit insurance to minimizing risks.

2. Market Risk Management

Market risk is a potential loss arising from the change in interest rates and exchange rates, including derivative instruments.

Market risk is managed based on the following:

- Development of competent human capital in performing transactions in accordance with the authority and limitation;
- Constantly developing Early Warning System method and identification, measurement, monitoring and

pemantauan dan pengendalian risiko pasar (risiko suku bunga dan risiko nilai tukar);
- Menetapkan dan melakukan kaji ulang atas limit-limit risiko pasar;
- Pelaksanaan *Asset and Liability Committee* (ALCO) yang dijalankan secara periodik, yang bertugas mengelola kebijakan dan strategi dalam mengkoordinasikan sumber dan penggunaan dana secara efektif dan efisien melalui pengelolaan likuiditas, suku bunga dan nilai tukar, serta penetapan batas risiko dan pengukuran risiko yang ditunjang oleh sistem yang mencukupi;
- Pemantauan terhadap suku bunga penempatan pada Surat Berharga dan Bank Lain secara rata-rata di atas suku bunga DPK;
- Pengelolaan Posisi Devisa Netto (PDN) pada posisi harian yang selalu berada pada tingkat ketentuan yang berlaku.

3. Pengelolaan Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas dapat terjadi apabila Bank tidak mampu menyediakan likuiditas dengan tingkat harga yang wajar yang akan berdampak kepada profitabilitas dan modal Bank. Likuiditas Bank dipengaruhi oleh struktur pendanaan, likuiditas aset, kewajiban kepada pihak lawan dan komitmen kredit kepada debitur. Risiko likuiditas Bank diukur melalui beberapa indikator, antara lain *primary reserve ratio* (rasio Giro Wajib Minimum dan Kas), *secondary reserve* (cadangan likuiditas), *Loan Funding Ratio* (LFR), *Liquidity Coverage Ratio* (LCR), dan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR). Pengendalian risiko likuiditas dilakukan dengan menetapkan limit-limit yang mengacu pada ketentuan regulator dan internal.

Pengelolaan risiko Likuiditas dilakukan dengan cara:
- Mengembangkan metode *Early Warning System* yang efektif secara berkesinambungan;
- Melakukan review dan mengembangkan metode proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko likuiditas;
- Menetapkan batas kecukupan *secondary reserves/ liquidity reserves* Bank, baik dalam kondisi normal maupun kondisi ekstrem;
- Melakukan kaji ulang dan pengawasan terhadap limit risiko likuiditas Bank secara periodik;
- Pengawasan *Maturity Gap (Asset and Liabilities)* setiap bulan sebagai tindakan mitigasi risiko likuditas;
- Pelaksanaan Komite ALCO yang secara periodik dilaksanakan untuk memastikan kondisi likuiditas Bank sesuai dengan kondisi industri perbankan di Indonesia;

controlling of market risk (interest rate risk and exchange rate risk);
- Setting and performing reviews on limits of market risk;
- Regular implementation of Asset and Liability Committee (ALCO), whose task is to manage policy and strategy in coordinating fund sources and utilization effectively and efficiently through liquidity management, interest rate and exchange rate, and setting of risk limits and risk measurements, supported by an adequate system.

- Monitoring of interest rates and the placements in securities and other banks so that on average they are above the interest rate for Third Party Funds;
- Daily management of Net Open Position to be always compliant with the applicable regulations.

3. Liquidity Risk Management

Liquidity risk is the risk of the Bank being unable to provide liquidity at the appropriate price which affects its profitability and capital. The Bank's liquidity is influenced by the funding structure, asset liquidity, liabilities to counterparties, and credit commitment to debtors. The Bank's liquidity risk is measured using certain indicators, such as primary reserve ratio, secondary reserve, Loan to Funding Ratio (LFR), Liquidity Coverage Ratio (LCR), and Net Stable Funding Ratio (NSFR). Liquidity risk control is performed by setting up limits in accordance wih the regulations and internal provisions.

Liquidity risk management is performed by:
- Developing effective Early Warning System continuously;
- Performing review and developing identification process method, measurement, monitoring, and control of liquidity risk;
- Setting the limit for the Bank's secondary reserves/ liquidity reserves, in normal as well as extreme conditions;
- Reviewing and monitoring liquidity risk limit periodically;
- Controlling maturity gap (Asset and Liabilities) on a monthly basis as an action of liquidity risk mitigation;
- Periodic meetings of the ALCO to ensure that the Bank's liquidity is in accordance with banking industry's conditions in Indonesia;

- Melaksanakan analisis *behavioural dynamic* dengan melakukan *cashflow projection* setiap bulan yang dilakukan secara komprehensif oleh *Business Division, Risk Management Division, Treasury Division* dan *Financial Control Division* untuk mengetahui *Core* dan *Non-Core* Dana Pihak Ketiga (DPK) dan projection Net Interest Income (NII).
- Memelihara Giro Wajib Minimum (GWM) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
- Melakukan Stress Test (*General Market Crisis & Bank Specific Crisis*) untuk memastikan kecukupan likuiditas Bank.

4. Pengelolaan Risiko Operasional

Manajemen risiko operasional yang andal dan efektif merupakan kunci utama dalam memperbaiki dan mempertahankan posisi Bank BNP. Bank BNP menghadapi risiko operasional yang disebabkan oleh kesalahan manusia, ketidakcukupan proses internal, kegagalan sistem, dan/atau kejadian eksternal. Bank BNP memiliki *Operational Risk Event* (ORIENT) yaitu aplikasi berbasis web yang dirancang untuk meningkatkan *risk awareness* dan memberikan informasi yang berguna untuk meminimalkan dan memitigasi risiko operasional. Selain itu, Bank BNP juga memiliki aplikasi berbasis *web* untuk penilaian Profil Risiko Cabang (PRC) yang bertujuan untuk memantau pergerakan profil risiko keseluruhan dari masing-masing kantor cabang.

Selain itu, dalam rangka mendukung inovasi Bank untuk memenuhi kebutuhan Nasabah atas produk dan layanan Bank, maka disusun pedoman mengenai pengelolaan risiko dan langkah-langkah mitigasi pada Produk atau Aktivitas Baru (PAB), yaitu Kebijakan dan Prosedur Pengajuan Produk atau Aktivitas Baru yang bertujuan untuk menetapkan standarisasi dalam pengelolaan risiko PAB secara *end-to-end* dan menghasilkan produk atau aktivitas yang handal serta dapat meningkatkan keuntungan, *corporate image*, dan kualitas layanan Bank.

Untuk senantiasa melaksanakan prinsip kehati-hatian dan menerapkan tata kelola yang baik, maka dalam Kebijakan dan Prosedur Pengajuan Produk atau Aktivitas Baru dirumuskan metodologi penilaian terhadap 8 jenis risiko. Hal ini untuk menjaga seluruh produk atau aktivitas baru yang diterbitkan telah memenuhi ketentuan regulator.

- Performing behavioral dynamic analyses through monthly cash flow projection conducted comprehensively by Business Division, Risk Management Division, Treasury Division, and Financial Control Division to find out Core and Non-Core Third Party Funds and Net Interest Income projections.
- Maintaining the Minimum Reserve Requirement in accordance with Bank Indonesia regulations.
- Conducting Stress Tests (General Market Crisis & Bank Specific Crisis) to determine the adequacy of the Bank's liquidity.

4. Operational Risk Management

A reliable and effective operational risk management is key to improving and maintaining Bank BNP's position in the industry. Bank BNP faces operational risk that may arise from human error, inadequacy and/or dysfunction of the internal process, system failure, or the existence of external factors that influence the Bank's operations. Bank BNP has an Operational Risk Event (ORIENT) application that is web-based and designed to improve risk awareness and provide adequate and useful information for minimizing and mitigating operational risk. In addition, Bank BNP also possesses a web-based application to assess its branches' risk profile, so that the movements in each branch's risk profile can be constantly monitored.

In addition, in order to support the Bank's innovation to fulfill the customers' needs regarding the Bank's services and products, a guidance on risk management and mitigation phases for New Products and Activities has been prepared, and called the Policy and Procedures for Filing New Products or Activities, which is aimed to standardize the management of New Products or Activities risk in an end-to-end manner and produce reliable products or activities, and also able to improve profit, corporate image, and service quality of the Bank.

As an effort to constantly perform the prudent banking principle and good governance, in the Policy and Procedures for Filing New Products or Activities the methodology for evaluating 8 types of risk has been defined. This is to ensure that all new products or activities are in compliance with the regulations.

- Collect Data:
  - ✓ Risk Taking Unit reports independently to ORIENT Reporting System
- Identification of risk sources and causes (internal & external)
- Consolidation/integrated data ORIENT System
  - ✓ LHP SKAI, CSIC, CMSIC, OSIC, Fraud (internal & external), & LHP OJK
- Early Warning Signals:
  - ✓ CDD, EDD, Whsitle Account, Suspended Account, Transaction Limit
- Classification of Risk Data - ORIENT

Risk Reporting:
- Risk Event Report submitted to the BOD, BOC and Risk Taking Units every month
- Risk Profile Report
  - ✓ Risk Management Committee
  - ✓ BOD & BOC
  - ✓ OJK

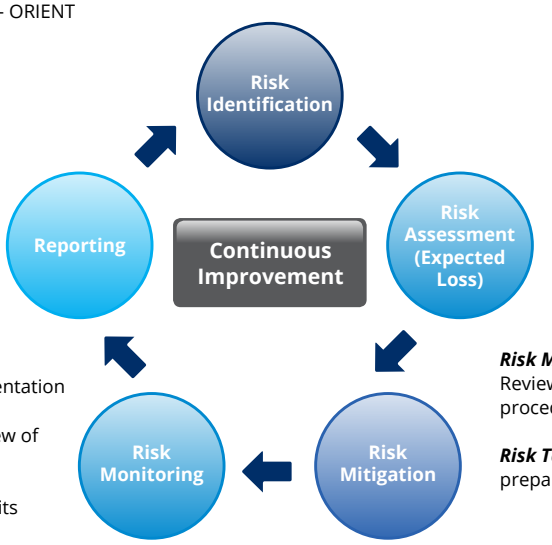

Evaluation & Assessmnet Processes:
- Impacts (Financial & Non-Financial)
- Frequency
- Causes
- Solutions/Recommendations

Risk Mitigation & Commitment:
Review and or Updating of policies and procedures

Risk Taking Unit controls risk by preparing action plans

- ORIENT Trend
- Monitoring of implementation and action plan
- Evaluation of and review of potential risks
- Early Warning Signal
- Monitoring of Risk Limits

Pengelolaan Risiko Operasional dilakukan antara lain dengan cara:

1. Memberikan pengarahan, pemahaman budaya risiko kepada seluruh karyawan untuk meningkatkan sistem pengendalian internal secara komprehensif, sehingga tidak terjadi kerugian akibat kegagalan sistem, kesalahan manusia, kesalahan proses, kejadian eksternal, dan *fraud*;
2. Mengembangkan dan meningkatkan parameter *Early Warning System* dalam upaya menemukan lebih awal risiko operasional dan *fraud*;
3. Menetapkan dan meningkatkan sistem pengawasan yang terpadu atas seluruh kegiatan operasional dengan format-format laporan dan mekanisme sistem pelaporan secara terstruktur dengan mengedepankan prinsip pengendalian internal;
4. Membangun budaya risiko dengan adanya laporan kegiatan *Operational Risk Event* (ORIENT) dari seluruh aktivitas fungsional yang disampaikan kepada *Operational Risk Department* dan Laporan Profil Risiko Cabang (PRC) untuk dilakukan analisis, evaluasi dan mitigasi risiko yang selanjutnya dilaporkan kepada Direksi;
5. Meningkatkan proses pengendalian pelaksanaan aktivitas operasional bank dan kesesuaian dengan *Standard Operating Procedures* (SOP);

Operational Risk Management is performed by:

1. Briefing and giving understanding of risk culture to all employees to comprehensively improve internal control system, so that there is no loss because of system failure, human error, process failure, external factors, and fraud;
2. Developing and improving Early Warning System parameters in order to detect early operational risk and fraud;
3. Setting and improving an integrated monitoring system on all operational activities with structured report format and reporting system mechanism by prioritizing internal control principles;
4. Building risk culture through Operational Risk Event (ORIENT) activity report from all functional activities delivered to the Operational Risk Department and included in the Branch Risk Profile Report for analysis, evaluation, and risk mitigation, which is subsequently reported to the Board of Directors;
5. Improving the controlling the process of operational activities and their suitability with the Standard Operating Procedures (SOP);

6. Melakukan kaji ulang, pengkinian, pengawasan dan sosialisasi terhadap *Standard Operating Procedure* yang disesuaikan dengan hasil analisis ORIENT, rekomendasi dari *Internal Audit Division* (IAD), perkembangan bisnis, kompleksitas produk serta aktivitas Bank secara bertahap, termasuk peluncuran produk/aktivitas baru.

6. Performing review, updates, monitoring, and information dissemination of Standard Operating Procedures adjusted with the ORIENT analysis result, recommendations from the Internal Audit Division (IAD), business development, product complexity, and the Bank's activities gradually, including the launching of new product/activity.

System Information Management Operational Risk Event

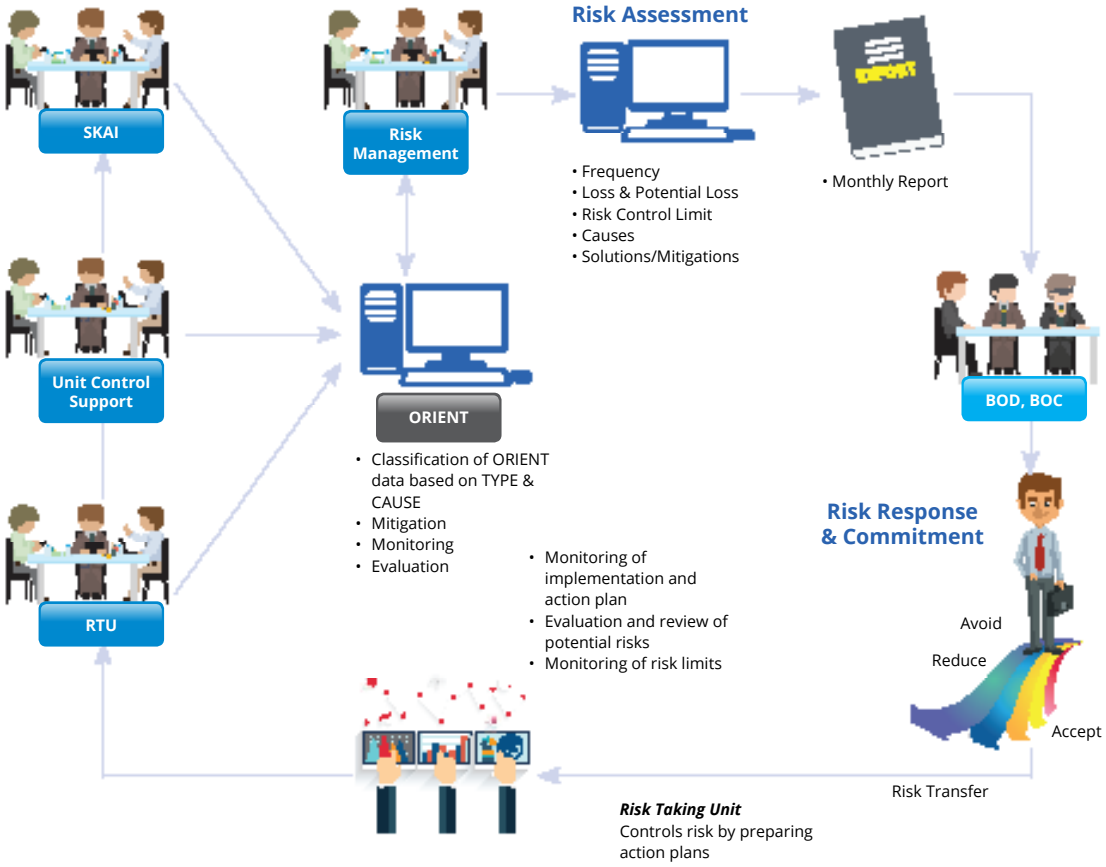

5. Pengelolaan Risiko Hukum dan Reputasi

Pengelolaan risiko hukum dan Reputasi dengan melakukan identifikasi, mitigasi, pemantauan serta pengendalian dalam seluruh aktivitas dan hubungan Bank dengan semua pihak yang dilandaskan pada regulasi dan persyaratan yang dapat melindungi kepentingan Bank dan nasabah. Upaya Bank dalam menangani risiko hukum dan risiko reputasi dalam hal menghindari pemberitaan dan tanggapan negatif yaitu dengan melakukan pemantauan berita di media. Oleh karena itu, setiap keluhan dan pengaduan nasabah ditangani dengan cepat sesuai prosedur internal Bank.

5. Legal & Reputation Risk Management

Legal and reputation risk management is performed through identification, mitigation, monitoring and controlling of all activities and relationships of the Bank with all parties based on the terms and regulations which are able to protect the Bank's interests as well as each customer's. The measure in handling legal and reputation risks in terms of avoiding negative news and responses is to monitor various media. Hence, every customer's complaint has to be addressed promptly in accordance with the Bank's internal procedures.

6. Pengelolaan Risiko Strategi

Corporate Planning and Performance Management Division, *Business Division* dan *Risk Management Division* mengelola risiko strategis secara bersama-sama dengan membandingkan rencana bisnis yang disusun Bank dengan hasil pencapaian setiap unit terkait. Pengelolaan risiko strategis turut dilakukan dengan melaksanakan proses identifikasi secara berlanjut terhadap faktor-faktor yang berpotensi menghambat terwujudnya rencana strategis Bank, baik faktor eksternal, antara lain kondisi ekonomi global, regional, perubahan nilai tukar, suku bunga, persaingan bank, dan teknologi, maupun faktor internal, antara lain manusia yang bersumber daya, *Management Information System* (MIS), sistem pengendalian internal, kebijakan dan prosedur, kewenangan dan tanggung jawab.

7. Pengelolaan Risiko Kepatuhan

Pengelolaan risiko kepatuhan dikoordinasikan oleh *Compliance Division* yang bertanggung jawab langsung kepada *Compliance & Risk Management Director*. Dalam rangka mengelola risiko kepatuhan, *Compliance Division* melakukan identifikasi, analisis, pengukuran, pemantauan dan pengendalian terhadap pemenuhan pelaksanaan peraturan, yang dilakukan melalui perumusan kebijakan kepatuhan, dan pelaksanaan program-program kepatuhan secara rutin untuk memastikan seluruh karyawan dalam setiap aktivitas fungsional telah mengetahui, memahami dan menjalankan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

6. Strategic Risk Management

Corporate Planning and Performance Management Division, Business Division and Risk Management Division manage strategic risk together by comparing business plan with achievement outcome of every related unit. Strategic risk management is performed by continuously running the identification process toward factors that have potential to deter the achievement of the Bank's strategic plans, be they external factors, such as global or regional economic conditions, changes in exchange rate, interest rate, banking competition, and technologies, or internal factors, such as human resources, Management Information System (MIS), internal control, policies and procedures, authority and responsibilities.

7. Compliance Risk Management

Compliance risk management is coordinated by the Compliance Division which is directly responsible to the Compliance and Risk Management Director. In order to manage compliance risk, Compliance Division performs identification, analysis, measurement, monitoring and controlling on the fulfillment of regulations through compliance policy arrangement and regular compliance programs implementation to ensure that all employees in all functional activities have known, understood, and conduct their work in accordance with the rules and regulations.

Profil Risiko

Bank melakukan penilaian profil risiko secara bulanan yang kemudian dibahas dalam rapat Direksi. Setiap triwulan, penilaian profil risiko dipresentasikan dalam Komite Manajemen Risiko sebelum dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Penilaian jenis risiko merupakan kombinasi dari risiko-risiko yang melekat pada setiap aktivitas fungsional (risiko inheren) dan sistem pengendalian risiko. Penilaian profil risiko dilakukan terhadap 8 risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, dan risiko kepatuhan, yang terdapat pada aktivitas fungsional Bank dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi Bank.

Penilaian profil risiko Bank pada posisi Q4- 2017 secara agregat adalah "*Low to Moderate*", di mana peringkat komposit *inherent risk* adalah *"low to moderate"* dan *risk*

Risk Profile

The Bank evaluates its risk profile on monthly basis prior to being discussed in the Board of Directors meetings. Every quarter, the risk profile evaluation is presented in Risk Management Committee meeting before being reported to OJK.

The evaluation of risk types is a combination of the risks inherent to functional activities (inherent risk) and risk control system. The evaluation of the risk profile is performed on 8 risks: credit risk, market risk, liquidity risk, operational risk, legal risk, reputation risk, strategic risk, and compliance risk, all of which are present in the Bank's functional activities and may cause losses for the Bank.

The Bank's risk profile assessment in Q4-2017 resulted in an aggregate ranking of "Low to Moderate", and the composite ranking for both inherent risk was "low to moderate", and the

control system atau Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Bank adalah *"satisfactory"*.

Dari hasil penilaian profil risiko Bank pada posisi Q4-2017, Bank BNP secara berkesinambungan melakukan evaluasi yang terintegrasi secara menyeluruh terhadap risiko-risiko yang dihadapi dan potensi risiko yang akan dihadapi Bank. Beberapa hal yang dihadapi Bank BNP beserta dengan mitigasi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Bank's risk control system, or the Bank's risk management quality implementation, was deemed "satisfactory".

From the evaluation result of the Bank's risk profile for Q4-2017, Bank BNP is reported to have continuously conducted an integrated and overall evaluation on the risks the Bank currently faces and the potential risks it will face. A number of issues encountered by the Bank, including the mitigation measures that were undertaken, are:

Risiko Yang Dihadapi/ *Risk Faced*	**Keterangan/** *Description*	**Mitigasi/** *Mitigation*
Konsentrasi kredit / Credit Concentration	Eksposur yang berlebihan kepada satu atau beberapa individu atau entitas, sekelompok entitas yang saling terkait, suatu wilayah geografis, sektor industri, produk tertentu dan lain sebagainya yang mempunyai kriteria sistematik yang serupa, dapat mengakibatkan potensi kerugian yang sangat besar. Excessive exposure on one or some individuals or entities, a group of related entities, geographic areas, industrial sectors, certain products, etc. with similar systematic criteria, may cause huge loss for the Bank.	• Mengembangkan Portfolio Management yang terintegrasi pada seluruh tahapan pengelolaan risiko kredit Develop integrated Management Portfolio on all credit risk management stages • Melakukan pembatasan eksposur melalui kebijakan limit (limit industri dan limit debitur) Perform exposure limitation through the limit policy (industry limit and debtor limit)
Perlambatan pertumbuhan ekonomi karena krisis global / Economic growth slowdown due to global crisis	Meningkatnya potensi risiko kredit individual dan / atau group. Increase of individual and/or group credit risk potential.	• Melakukan pengelolaan portfolio secara aktif untuk mendapatkan portfolio kredit di sektor-sektor yang prospektif Actively perform portfolio management to secure credit portfolio in prospective sectors • Melakukan *stress testing* secara komprehensif dan berkala, serta menyusun *contingency plan* Perform stress testing comprehensively and periodically, and arrange contingency plans • Memantau secara ketat sektor industri yang berpotensi terkena dampak krisis dan resesi, misalnya pertambangan, komoditas dan tekstil Tightly monitor the industrial sectorsthat can be affected by crisis and recession, like mining, commodity and textile • Mengembangkan *watch list tools/Negative List Industry* Develop watch list tools/negative list of industries • Melakukan review parameter *Credit Assessment Process* dan *Credit Early Warning Signal* Review the parameters for *Credit Assessment Process* and *Credit Early Warning Signal*

Risiko Yang Dihadapi/ *Risk Faced*	Keterangan/ *Description*	Mitigasi/ *Mitigation*
Internal dan eksternal Fraud Internal and External Fraud	Tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan Bank dan/ atau menggunakan sarana Bank sehingga mengakibatkan Bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/ atau pelaku fraud memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung. Action of irregularities or omissions intentionally done to deceive and manipulate the Bank, its customers, or other parties, that happen within the Bank's environment and/or using the facilities of the Bank that cause losses and/or the fraud-committing party gaining economic benefit either directly or indirectly	• Pengelolaan risiko operasional oleh seluruh unit kerja Conduct operational risk management by all units • Meningkatkan *risk awareness* melalui serangkaian program sosialisasi kepada seluruh unit kerja di seluruh aktivitas fungsional, yang dipantau secara periodik melalui Komite Manajemen Risiko dan Komite Pemantau Risiko Improve risk awareness through information disseminationto all units in all functional activities, which is monitored periodically by Risk Management Committee and Risk Monitoring Committee • Menerapkan proses *due dilligence* dan pengelolaan risiko terhadap nasabah mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia dan didasarkan pada prinsip *risk-based approach* Apply due diligence process and risk management on customersby referring to Bank Indonesia regulations and based on risk-based approach principle

Proses Evaluasi Efektivitas Sistem Manajemen Risiko

Untuk mengetahui efektivitas Sistem Manajemen Risiko dan penerapannya, maka dilakukan evaluasi dan review baik secara internal maupun eksternal.

Secara internal, Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan kajian dan evaluasi atas kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko Bank, serta memberikan masukan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka melaksanaan fungsi pengawasan.

Satuan kerja audit intern secara rutin melakukan review dan audit terhadap penerapan manajemen risiko Bank berdasarkan prinsip risk-based audit dengan tujuan tak hanya sebagai pengendalian intern namun juga untuk perbaikan penerapan manajemen risiko secara berkelanjutan.

Evaluation of Risk Management System Effectiveness

To mesaure the effectiveness of Risk Management System and its implementation, evaluation and internal or external review have to be performed.

Internally, Risk Oversight Committee and Audit Committee have duties and responsibilities to review and evaluate the policy and risk management implementation, and also to give inputs and recommendations to the Board of Commissioners in order to perform the monitoring function.

Internal Audit unit routinely performs review and audit on risk management of the Bank based on risk-based audit principle with the intention not only as internal control but also for continuous improvement of risk management implementation.

Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Tahun 2017

Compliance Function Implementation in 2017

Sepanjang tahun 2017, pelaksanaan fungsi Kepatuhan fokus pada pengembangan budaya kepatuhan di seluruh jenjang organisasi, melakukan Uji Kepatuhan (*Compliance Test*) atas penerapan Prinsip Kehati-hatian Perbankan (*Prudential Banking*), memastikan pelaksanaan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU-PPT) serta memastikan terlaksananya upaya penerapan Perlindungan Konsumen yang tercakup dalam setiap aspek kegiatan operasional dan bisnis di Bank BNP.

A. Kegiatan

Langkah-langkah yang diambil dalam rangka mengembangkan budaya kepatuhan antara lain melalui:

1. **Sosialisasi dan Edukasi**
   a. Memberikan pelatihan atau sosialisasi secara berkala kepada karyawan mengenai berbagai aspek kepatuhan.
   b. Menyampaikan penjelasan singkat mengenai peraturan dan atau perubahan peraturan yang berlaku serta hal-hal lain yang berkaitan dengan Kepatuhan.
   c. Menyampaikan pesan kepatuhan melalui berbagai sarana, antara lain penayangan video yang berisikan pesan kepatuhan di setiap kantor bank, penayangan pesan kepatuhan di media komunikasi internal bank dan rapat koordinasi tahunan yang dihadiri oleh para karyawan bank setara kepala departemen dan kepala divisi.
   d. Memberikan pelatihan mengenai pedoman dan ketentuan yang berlaku kepada karyawan baru sebagai langkah awal untuk menumbuhkan kesadaran kepatuhan.
   e. Mendistribusikan Peraturan Bank Indonesia, OJK atau Peraturan Perundang-undangan terkait lainnya yang terkini dan atau perubahannya kepada Unit Kerja terkait serta mendiskusikan implementasinya.
   f. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan Sumber Daya Manusia di Unit Kerja Kepatuhan dengan mengirimkan karyawan pada pelatihan/seminar eksternal terkait dengan Bidang Kepatuhan Bank yang diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan (FKDKP), Bank Indonesia, OJK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Instansi terkait lainnya.

Throughout 2017, the implementation of the Compliance function was focused on fostering the culture of compliance across all levels of the organization, conducting the Compliance Test on the prudential banking principles, ensuring the implementation of Anti-Money Laundering and Prevention of Financing of Terrorism (APU-PPT) program, as well as upholding consumer protection in each aspect of Bank BNP's operations and business.

A. Activities

Measures taken in order to develop the culture of compliance among others are:

1. **Dissemination and Education**
   a. Providing training or dissemination periodically to employees regarding various aspects of compliance.
   b. Delivering succinct description regarding the prevailing regulations and/or amendments thereto as well as other aspects related to Compliance.
   c. Delivering compliance messages thru various media, among other video viewing that contains compliance message at each bank offices, compliance message viewing in bank internal communication media and annual coordination meeting attended by bank's employee at department head and division head level.
   d. Providing training regarding the guidelines and prevailing regulations to new staff and employees as the first step towards developing the awareness about compliance.
   e. Circulating the Regulations of Bank Indonesia, OJK, and/or other updated pertinent regulations and/or the amendments thereto to the relevant Work Units and discussing the implementation thereof.
   f. Enhancing knowledge and capability of human resources in the Compliance Unit by enrolling the staff on external seminars and training programs related to Banking Compliance, which were organized by the Compliance Director Communication Forum (FKDKP), Bank Indonesia, OJK, Center for Reporting and Analysis of Financial Transactions (PPATK), and other related institutions.

2. Verifikasi dan Validasi

a. Melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka memastikan kesesuaian dan keselarasan antara Kebijakan dan Prosedur serta pelaksanaannya terhadap Peraturan Bank Indonesia, OJK dan atau Peraturan Perundang-undangan terkait lain yang berlaku.

b. Memastikan pemenuhan komitmen bank kepada OJK atas hasil pemeriksaan/pengawasan OJK.

3. *Monitoring* dan *Review*

a. Melakukan pemantauan kepatuhan terhadap kegiatan operasional dan bisnis antara lain kepatuhan terhadap peraturan ketentuan mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum, Batas Maksimum Pemberian Kredit, Kewajiban Pemenuhan Giro Wajib Minimum, Posisi Devisa Neto, kepatuhan terhadap Peraturan Perpajakan, dan lain-lain.

b. Melakukan pemantauan terhadap kelengkapan data dan informasi Nasabah pada *banking system* yang dilakukan secara bulanan serta pelaksanaan pengkinian data nasabah.

c. Melakukan pemantauan terhadap proses Pembukaan Rekening dan penetapan Klasifikasi Risiko Nasabah.

d. Melakukan pemantauan terhadap kegiatan Transaksi Nasabah.

4. Ketersediaan dan Kecukupan

a. Melakukan kaji ulang terhadap kecukupan dan kesesuaian Kebijakan dan Prosedur Internal serta pelaksanaannya yang mengacu pada Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku dalam menunjang kegiatan operasional dan bisnis Bank BNP.

b. Melaksanakan fungsi *advisory* kepatuhan internal terkait dengan kegiatan di bidang perkreditan, operasional, *treasury* dan *market*.

B. Bidang-Bidang yang Menjadi Prioritas

Beberapa hal yang menjadi fokus utama pelaksanaan fungsi kepatuhan sepanjang tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Prinsip kehati-hatian Bank

Dalam rangka menaati ketentuan Bank Indonesia tentang Prinsip Kehati-hatian Bank, maka sepanjang tahun 2017 Bank BNP senantiasa mematuhi ketentuan tersebut dalam menjalani kegiatan operasional dan bisnis. Adapun pemenuhan

2. Verification and Validation

a. Conducting monitoring and evaluation to ensure the appropriateness and alignment of policies and procedures and the implementation thereof against the Regulations of Bank Indonesia, OJK, and/or other relevant prevailing regulations.

b. Ensuring the fullfillment of the Bank's commitment to OJK examination result.

3. Monitoring and Review

a. Conduct monitoring toward the implementation of compliance at each operational and business activities, among others compliance with the regulation on Capital Adequacy Ratio, Legal Lending Limit, Minimum Reserves Requirement, Net Open Position, compliance with Taxation Regulations, and others.

b. Conduct monitoring toward the completeness of customer data and information in the banking system on monthly basis as well as updating cutomer information.

c. Monitoring the processes of Account Opening and determination of Customer Risk Classification.

d. Monitoring customers' transactional activities.

4. Availability and Adequacy

a. Reviewing the adequacy and alignment of internal policies and procedures as well as the implementation thereof by referring to the prevailing rules and regulations that support Bank BNP's operational and business activities.

b. Performing the advisory function for internal compliance in relation to the activities of lending, operations, treasury and market.

B. Areas of Priority

Various areas that were prioritized in terms of compliance aspect throughout 2017 were as follows:

1. Prudential Banking Principles

In order to comply with the regulations of Bank Indonesia in relation to the Prudential Banking Principles, throughout 2017 Bank BNP continued to abide by said regulations in conducting its business and operational activities. The fulfillment of such

ketentuan Bank Indonesia tersebut pada posisi 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

regulations of Bank Indonesia as at 31 December 2017 was demonstrated as follows:

Aspek Kepatuhan Per 31 Desember 2017 Compliance Aspect As of 31 December 2017	Kepatuhan Bank BNP Bank BNP's Level of Compliance	Persyaratan Otoritas Requirement from Authority	Status Status
Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum setelah memperhitungkan risiko kredit, pasar dan operasional Capital Adequacy Ratio after considering credit, market and operasional risk	17,50%	≥8%	Terpenuhi/Fulfilled
Pelampauan/Pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Violation of Legal Lending Limit	Tidak ada/None	Tidak Diperkenankan/ Not Allowed	Terpenuhi/Fulfilled
Rasio *Non Performing Loan* (NPL)-Net NPL-Net Ratio	4,50%	≤5%	Terpenuhi/Fulfilled
Posisi Devisa Neto (PDN) Net Open Position	0,73%	≤20%	Terpenuhi/Fulfilled
Rasio Giro Wajib Minimum (GWM) Primer Minimum Reserve Requirement – Primary	7,10%	≥6,5%	Terpenuhi/Fulfilled
Rasio GWM Sekunder Minimum Reserve Requirement – Secondary	8,48%	≥4%	Terpenuhi/Fulfilled
Rasio GWM dalam Valuta Asing Minimum Reserve Requirement in Foreign Currencies	8,37%	≥8%	Terpenuhi/Fulfilled

2. **Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT)** dengan menitikberatkan pada pemenuhan dan pelaksanaan:
   a. Analisa Transaksi Keuangan Nasabah dan *Walk In Customer (WIC)* terkait dengan pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM)/ Suspicious Transaction Report (STR) ke PPATK,
   b. Penerapan *Risk-Based Approach* Pelaksanaan *Customer Due Diligence (CDD)* dan *Enhanced Due Diligence (EDD)* yang berkaitan dengan pemantauan profil nasabah,
   c. Pelaporan Transaksi Kiriman Uang dari dan ke Luar Negeri,
   d. *Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA).*

Dalam tahun 2017 beberapa hal telah dilakukan untuk menunjang penerapan APU-PPT lebih baik dan memadai, yakni:

a. Pengembangan aplikasi yang dapat mendukung program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme agar mampu mendeteksi lebih dini *(red flag)*, mengidentifikasi, menganalisis, memantau, dan menyediakan laporan secara lebih efektif terhadap karakteristik transaksi yang dilakukan oleh nasabah dan *walk in customer* (WIC) sebagai bentuk ketersediaan sistem informasi manajemen.

2. **Anti-Money Laundering and Prevention of Financing of Terrorism (APU-PPT)** with emphasis on fulfillment and implementation of:
   a. Customers & Walk In Customers (WIC) Financial Transaction Analysis, in relation to the reporting of suspicious financial transactions report to PPATK,
   b. Risk-Based Approach to the Implementation of Customer Due Diligence (CDD) and Enhanced Due Diligence (EDD) in relation to the monitoring of customer profile,
   c. Reporting of International Fund Transfer Instructions (IFTI),
   d. Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA).

In 2017 the following were implemented to support stronger performance of APU-PPT:

a. Development of applications that support anti-money laundering and prevention of financing of terrorism programs in order to be able to perform early detection (red flag), identification, analysis, monitoring, and more effective reporting of transactions performed by customers and walk in customers (WIC) with certain characteristics, as part of the management information system.

b. Pengembangan sistem dalam *core banking* terkait pengelolaan data *beneficial owner* (BO), data pihak-pihak tercela (DTTOT, OFAC, Proliferasi Senjata Pemusnah Masal) untuk mendukung proses kelengkapan database dan proses penyaringan (*screening)* data nasabah.
c. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman akan pentingnya penerapan program APU-PPT di setiap kegiatan bisnis dan operasional Bank untuk menghindarkan Bank BNP dimanfaatkan sebagai sarana tindak pidana pencucian uang dan/atau pendanaan teroris dengan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada seluruh Petugas Bank yang berkaitan langsung dengan nasabah, kepada seluruh karyawan baru, dan kepada karyawan yang mendapatkan promosi jabatan. Bentuk sosialisasi dan edukasi dilakukan juga melalui pembuatan video animasi berdurasi ± 10 menit yang disebarluaskan kepada seluruh kantor bank dan ditayangkan pada saat program-program pembelajaran yang dilaksanakan di *Learning Center* Bank BNP.
d. Pemanfaatan Hak Akses Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan, dan Kartu Penduduk Elektronik (KTP-el) untuk digunakan sebagai alat deteksi dan identifikasi keabsahan dan kelengkapan data kependudukan terhadap calon Nasabah (penyimpan dan/atau debitur) yang akan memulai melakukan hubungan usaha dengan Bank BNP dan digunakan juga terhadap nasabah *existing* dengan melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pihak Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, yang selanjutnya dilakukan pengembangan dalam *core banking system* untuk mengakomodasi hasil proses *query* ke *database* milik DUKCAPIL.

3. Perlindungan Nasabah yang mencakup Penanganan Penyelesaian Pengaduan Nasabah *(Customer Complaint).*

Sesuai dengan ketentuan yang terkait dengan Perlindungan Konsumen sektor Jasa Keuangan yang menerapkan 5 (lima) prinsip dasar sebagai berikut:
a. Transparansi,
b. Perlakuan adil,
c. Keandalan,
d. Kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen,
e. Penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa Konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau,

b. Core banking system development in relation with beneficial owner and disgraced party (DTTOT, OFAC, proliferation of weapons of mass destruction) data management in order to support customer data completeness and screeening process.
c. Enhancement of knowledge and understanding on the importance of the APU-PPT program implementation across all of the Bank's operational and business activities, to ensure that Bank BNP will not be utilized as a means of money laundering and/or financing of terrorism, by conducting dissemination and education to all Bank Officers that are interacting directly with the customers, as well as to new employees and employees that have been recently promoted. This dissemination and education also took place in the form of animation video with duration approximately of 10 minutes, circulated to all offices of the Bank and presented during learning programs conducted in Bank BNP's Learning Center.

d. Utilization of the Right to Access to National Identification Number, Population Data, and Electronic Identification Card (KTP-el), to be used as a means to detect and identify the validity and completeness of prospective customers' (creditors and/or debtors) data who will begin to have a business relationship with Bank BNP. This was also performed on existing customers by entering into Cooperation Agreement with the Directorate General of Population and Civil Registration (DUKCAPIL) – Ministry of Home Affairs of the Republic of Indonesia, and subsequently the core banking system was developed in order to accomodate the query result toward DUKCAPIL's database.

3. Customer Protection measures include the handling of customer complaints.

In line with the regulation on Consumer Protection in the Financial Services sector where the following five basic principles are implemented:
a. Transparency,
b. Fair treatment,
c. Reliability,
d. Confidentiality and security of customer data and information,
e. Handling of complaints and resolution of consumer disputes in a simple, quick, and affordable manner,

maka sepanjang tahun 2017, Bank BNP senantiasa melaksanakan dan menerapkan ketentuan tersebut dengan:

a. Melakukan evaluasi terhadap produk-produk yang ditawarkan kepada masyarakat.
b. Melakukan identifikasi dan verifikasi atas penyimpangan kegiatan operasional yang memungkinkan timbulnya kerugian pada nasabah.
c. Membuka layanan pengaduan nasabah untuk memperoleh masukan secara langsung dari nasabah mengenai aspek-aspek yang perlu diperbaiki untuk mengurangi risiko operasional.

4. Pengendalian Internal

Pengendalian internal merupakan bentuk pengawasan yang harus ditetapkan oleh manajemen secara berkesinambungan (*on going basis)* guna:

a. Menjaga dan mengamankan harta kekayaan Bank;
b. Menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat;
c. Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku;
d. Mengurangi dampak keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/*fraud*, dan pelanggaran aspek kehati-hatian;
e. Meningkatkan efektivitas organisasi dan sumber dayanya dan meningkatkan efisiensi dalam hal pengendalian biaya.

5. Pengendalian, deteksi dan pencegahan terjadinya pelanggaran atau kecurangan (*Fraud Management)* yang mencakup:

a. Pengaduan pelanggaran (*Whistleblowing*)
b. Perbaikan jalur pelaporan
c. Kaji ulang pelaksanaan kegiatan operasional dan bisnis Bank yang memiliki risiko tinggi.

6. Melakukan kaji ulang terhadap pelaksanaan Budaya Kepatuhan *(Compliance Culture/Compliance Awareness)* diantaranya dengan menyebarkan kuesioner secara rutin per triwulan kepada seluruh karyawan untuk memastikan tentang pemahaman karyawan terhadap Ketentuan dan/ atau Peraturan lain yang terkait dengan praktik perbankan.

7. Manajemen Risiko & Tata Kelola Terintegrasi

Sesuai dengan Peraturan OJK mengenai Tata Kelola dan Manajemen Risiko Terintegrasi, maka Bank BNP sebagai anggota dari Konglomerasi Keuangan Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) telah

throughout 2017 Bank BNP continued to perform the above regulation via the following activities:

a. Evaluating the products offered to the public.
b. Identifying and verifying the violations to the operational activities that might result in losses having to be borne by the customers.
c. Setting up the customer care center to obtain direct input from customers regarding aspects that needed improvement in order to minimize the operational risk.

4. Internal Control

Internal control is a type of supervision that must be performed by the management on an ongoing basis, in order to:

a. Protect and secure the assets of the Bank;
b. Ensure the availability of more accurate reporting;
c. Enhance compliance to the prevailing regulations;
d. Reduce the financial impact/losses, violations including fraud, and violation to the aspect of prudent banking;
e. Enhance the organizational effectiveness and resource and improve cost control efficiency.

5. Control, detection and prevention of fraud (Fraud Management), which includes:

a. Whistleblowing mechanism
b. Reporting line improvement
c. Review of the Bank's business and operational activities that carry a high level of risk.

6. Review and enhancement of Compliance Culture/ Compliance Awareness, among others by distributing a quarterly questionnaire to all employees to ensure that their understanding of the prevailing rules and regulations related to banking practices is up to date.

7. Integrated Risk Management & Governance Function

In line with OJK Regulation on Integrated Governance and Risk Management, Bank BNP as a member of the financial conglomeration of Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) conducted a number of activities to

melakukan berbagai aktivitas untuk mendukung kepatuhan terhadap ketentuan dimaksud, antara lain:

a. Setiap semester, BTMU sebagai Entitas Utama melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan fungsi kepatuhan, fungsi audit dan tata kelola di Bank BNP melalui kunjungan langsung.
b. Menindaklanjuti hasil evaluasi kunjungan BTMU.
c. Setiap triwulanan Bank melaporkan hasil penilaian profil risiko kepada BTMU dan hadir dalam rapat Komite Manajemen Risiko Terintegrasi yang diadakan setiap semesteran.

8. Compliance Opinion/Compliance Check List

Dalam rangka memastikan kegiatan usaha Bank BNP telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka setiap penyediaan dana lebih besar dari Rp10 miliar serta penerbitan dokumen yang berhubungan dengan kegiatan usaha bank wajib untuk dilakukan kajian kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan kegiatan tersebut di atas, maka pelaksanaan fungsi kepatuhan tahun 2017 di Bank BNP dinilai telah memadai, dengan mempertimbangkan bahwa:

1. Dewan Komisaris dan Direksi Bank BNP memiliki *awareness* dan pemahaman yang baik terkait fungsi kepatuhan.
2. Bank BNP memiliki strategi manajemen risiko kepatuhan yang searah dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko yang ditetapkan.
3. Bank BNP memiliki perangkat organisasi yang mendukung terlaksananya manajemen risiko kepatuhan secara efektif termasuk kejelasan wewenang dan tanggung jawab.
4. Tidak terdapat pelanggaran atas ketentuan prinsip kehati-hatian perbankan (*prudential banking principles*).
5. Kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank BNP dari risiko kepatuhan tergolong rendah.
6. Denda/sanksi yang dibebankan oleh regulator selama tahun 2017 merupakan sanksi yang bersifat administratif.

support its compliance with the abovementioned regulations, among others:

a. Every semester, BTMU as the Lead Entity, conducts monitoring and evaluation toward the implementation of the compliance function, audit function and governance in Bank BNP via direct visit.
b. Follow up BTMU's visit evaluation result.
c. On quarterly basis bank reports risk profile assessment to BTMU and attend Integrated Risk Management Committee Meeting every six months.

8. Compliance Opinion/Compliance Check List

To ensure that Bank BNP's business activities are in line with the prevailing regulations, for the provision of funding whose amount is larger than Rp10 billion and the issuance of documents related to banking business activities, a compliance check list review against the prevailing regulations must be performed.

Based on the aforementioned activities, the implementation of the compliance function in Bank BNP throughout the year 2017 was considered adequate, taking into consideration that:

1. The Board of Commissioners and the Board of Directors of Bank BNP have excellent awareness and understanding of the compliance function.
2. Bank BNP has a compliance risk management strategy that is aligned with the risk level to be taken and the determined risk tolerance.
3. Bank BNP has an adequate organizational tool to ensure the effective implementation of compliance risk management including the clarity of authorities and responsibilities.
4. There have been no violations to the prudential banking principles.
5. The possibility of losses for Bank BNP from its compliance risk is considered low.
6. Penalty/sanctions imposed by regulator during year 2017 were administrative sanctions.

Kode Etik & Budaya Perusahaan

Code of Conduct & Corporate Culture

Kepercayaan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) seperti karyawan, pelanggan, pemasok, dan pemangku kepentingan lainnya merupakan faktor yang sangat menentukan bagi peningkatan nilai dan kelangsungan kegiatan usaha Perusahaan. Citra dan reputasi Perusahaan dengan kepercayaan para pemangku kepentingan sangat erat kaitannya dengan perilaku setiap individu dalam Perusahaan dalam berinteraksi dengan para pemangku kepentingan.

The confidence of stakeholders, such as employees, customers, suppliers, and other parties, is a key factor in increasing the value and ensuring the business continuity of the Company. The Company's image and reputation, bolstered by the stakeholders' confidence, is closely linked to the behaviors of every individual within the Company and is manifested in their interaction with the stakeholders of the Company.

Atas dasar pemikiran ini, maka Perusahaan menyusun Kode Etik (*Code of Conduct*—COC) ini untuk diterapkan sebagai suatu standar perilaku yang harus dipatuhi oleh seluruh Individu Perusahaan di semua level organisasi, yang akan mencerminkan kualitas dan budaya Perusahaan. Kode Etik (COC) ini merupakan serangkaian komitmen yang terdiri dari visi misi Bank BNP; informasi "*BNP Hotline*" sebagai media pelaporan atas perilaku yang tidak baik (*misconduct*) dan/atau kejadian *fraud*, aspirasi dan/atau ide perbaikan; informasi budaya kerja Perusahaan; prinsip karyawan profesional dan integritas; implementasi dalam menciptakan lingkungan yang kondusif; pengelolaan dan pengamanan informasi; ketentuan dalam penggunaan fasilitas perusahaan; pencegahan dan penanganan *fraud*; dan penerapan kode etik.

In light of this, the Company has established the Code of Conduct (COC) to be implemented as a behavioral standard that must be adhered to by all individuals within the Company across all levels, thus reflecting the quality and culture of the Company. The COC is a set of commitments comprising Bank BNP's vision and mission, information regarding "BNP Hotline" as the medium for reporting misconducts and/or fraud activities, employee aspirations and/or ideas for improvement; information on the work culture of the Company; the principles of professionalism and integrity; implementation in creating a conducive working environment; information management and security; regulations regarding the use of company facilities; prevention and handling of fraud; and implementation of the COC.

Informasi mengenai isi Kode Etik Perusahaan disampaikan melalui buku Kode Etik Perusahaan yang dibagikan kepada seluruh level organisasi di Bank BNP dari jenjang level tertinggi sampai yang paling bawah, serta melalui media informasi internal Bank BNP yang dapat diakses oleh seluruh level organisasi Bank BNP.

Information regarding the Company's COC is presented in the book titled "The Company's Code of Conduct", distributed to all levels of Bank BNP's organization, from the highest to the lowest level, and also circulated through Bank BNP's internal media accessible by all levels of Bank BNP's organization.

Seluruh level organisasi Bank BNP wajib untuk menerima dan menerapkan Budaya Perusahaan dan Kode Etik Perusahaan sebagai panduan bertindak dalam menetapkan hubungan kerja, pola pikir, sikap dan perilaku sehari-hari dengan sesama karyawan dan/atau pihak-pihak lainnya yang meliputi namun tidak terbatas pada mitra kerja, masyarakat atau pemangku kepentingan lainnya.

All levels of Bank BNP's organization are obliged to adopt and apply the Corporate Culture and the COC of the Bank as a guideline in their action, shaping the wys they relate to each other at work, how they think, how they behave, and how they interact daily with fellow employees and/or other parties, which include but not limited to the suppliers, the general public, and other stakeholders.

Pelanggaran Kode Etik

Penyimpangan, kelalaian atau pelanggaran terhadap Kode Etik yang menyebabkan kerugian Perusahaan akan dikenakan sanksi, setinggi-tingginya, baik secara perdata ataupun pidana sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang

Violations of the Code of Conduct

Irregularities, negligence or violation of the COC which have led to losses suffered by the Company will be penalized, as harshly as possible, either via civil or criminal court in accordance with the prevailing procedures and regulations,

berlaku, dan pada tingkat tertentu dapat mengakibatkan Pemutusan Hubungan kerja dengan atau tanpa peringatan. Karyawan yang mengetahui pelanggaran atau percobaan pelanggaran Kode Etik tapi tidak melaporkannya, dianggap melanggar Kode Etik.

Selama tahun 2017 terdapat 54 (lima puluh empat) penyimpangan, kelalaian atau pelanggaran terhadap kode etik di Bank BNP, dengan sanksi yang diberikan sebagai berikut:

- 17 (tujuh belas) pelanggaran diberikan Surat Teguran;
- 37 (tiga puluh tujuh) pelanggaran diberikan Surat Peringatan.

Budaya Perusahaan

NEVER SAY NO merupakan bentuk komitmen dan aksi nyata dari seluruh karyawan Bank BNP sebagai nilai yang menjadi sifat, kebiasaan dan juga pendorong yang tercermin dalam sikap, pendapat, pandangan serta tindakan yang diterapkan dalam pernyataan "apa yang bisa saya bantu".

NEVER SAY NO diterapkan dalam prinsip *Three No's*, yaitu:

NO EXCUSES
Penuh tanggung jawab serta tidak mencari alasan atas permasalahan yang timbul.

NO PENDING
Tidak menunda pekerjaan atau sigap dalam memberikan respons.

NO EYES CLOSING
Peka dan tanggap terhadap segala hal yang terjadi di lingkungan Bank BNP.

and to a certain extent may result in termination of employment with or without prior warning. Employees who are aware of such violations or attempted violations of the COC but choose not to report them are themselves considered to be violating the COC.

In 2017 there were 54 (fifty four) cases of violation, negligence, or misconduct involving the implementation of Bank BNP's Code of Conduct, with the sanctions given as follows:

- Reprimand Letter given to the perpetrators in 17 (seventeen) cases of violation;
- Warning Letter given to the perpetrators in 37 (thirty seven) cases of violation.

Corporate Culture

NEVER SAY NO is a commitment and manifesto for real action of all employees of Bank BNP, serving as a value that becomes the behavior, habit and encouragement, as reflected in the attitudes, opinions, views, and actions that can all be distilled into the statement of "what assistance I can provide".

NEVER SAY NO is implemented through the Three No's principle, that is:

NO EXCUSES
Fully responsible and not finding faults from the issues that arise.

NO PENDING
Never postpones work and always alert to provide response.

NO EYES CLOSING
Sensitive and responsive to the issues that arise within Bank BNP.

Kasus Hukum & Sanksi Administratif

Litigations & Administrative Sanctions

Selama periode tahun 2017, tidak terdapat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Bank BNP yang dalam masa jabatannya memiliki/terjerat permasalahan hukum, baik perdata maupun pidana.

Throughout 2017 there were no members of the Board of Directors or the Board of Commissioners of Bank BNP that during their term of office were involved in litigations in either criminal or civil.

Permasalahan hukum adalah permasalahan hukum Non-Pidana (Perdata, PTUN, PHI, Perpajakan, dll.) dan Pidana, yang dihadapi oleh Bank BNP selama periode tahun laporan dan telah diajukan melalui proses hukum.

The legal issues that are present are Non-Criminal (Civil, Administrative, Industrial Relations, Taxation, etc.) and Criminal, faced by Bank BNP throughout the reporting year, which are being duly processed in the legal domain.

Pengungkapan mengenai permasalahan hukum Bank adalah sebagai berikut:

a. Jumlah permasalahan hukum Non-Pidana (Perdata, PTUN, PHI, Perpajakan, dll.) dan Pidana yang dihadapi dan telah mendapat putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
b. Jumlah permasalahan hukum Non-Pidana (Perdata, PTUN, PHI, Perpajakan, dll.) dan Pidana yang dihadapi dan masih dalam proses penyelesaian.

The disclosure of the Bank's legal issues are as follows:

a. Number of legal issues or litigations both Non-Criminal (Civil, Administrative, Industrial Relations, Taxation, etc.) and Criminal, which are faced by the Bank and have obtained verdict with permanent legal standing; and
b. Number of legal issues or litigations both Non-Criminal (Civil, Administrative, Industrial Relations, Taxation, etc.) and Criminal, which are faced by the Bank and are currently being processed.

Permasalahan Hukum *Litigation*	**Jumlah Kasus Pidana** *Criminal Cases*	**Jumlah Kasus Non-Pidana** *Non-Criminal Cases*
Telah mendapatkan keputusan yang berkekuatan hukum tetap Obtained verdict with permanent legal standing	1	17
Dalam proses penyelesaian In process	13	14
Total	14	31

Sebanyak 1 (satu) kasus hukum pidana yang telah berkekuatan hukum tetap terkait dengan permasalahan perkreditan.

One of the criminal cases for which the verdict has obtained a permanent legal standing was related to lending issue.

Dari 17 (tujuh belas) kasus hukum non-pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, 6 (enam) di antaranya merupakan permasalahan non-perkreditan, sedangkan 11 (sebelas) sisanya terkait permasalahan perkreditan.

Out of the 17 (seventeen) non-criminal cases for which the verdict has obtained a permanent legal standing, 6 (six) were related to non-lending issues, while 11 (eleven) were related to lending issues.

Dari 13 (tiga belas) kasus hukum pidana yang masih dalam proses penyelesaian, sebanyak 5 (lima) kasus merupakan permasalahan non-perkreditan, dan 8 (delapan) kasus sisanya terkait permasalahan perkreditan. Kasus-kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan oleh pihak Kepolisian. Kasus pidana yang terkait permasalahan perkreditan hingga saat ini belum menimbulkan kerugian finansial bagi Bank BNP, namun atas kasus pidana tersebut fasilitas kreditnya dapat berpotensi

Out of the 13 (thirteen) criminal cases in process, 5 (five) three cases were related to non-lending issues, and the remaining 8 (eight) cases were related to lending issues. At the point of writing of this Annual Report, these cases are in the process of being investigated by the Police. As regards the criminal cases related to lending issues, up to this point Bank BNP has not suffered any financial losses, however, owing to these cases, the Bank's lending facility may be

menjadi kredit bermasalah sehingga hal ini secara finansial akan berdampak merugikan bagi Bank BNP, yang harus mengeluarkan biaya penanganan kasus hukum dan melakukan pencadangan atas kredit bermasalah sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dari 14 (empat belas) kasus hukum non-pidana yang masih dalam proses, sejumlah 12 (dua belas) kasus berhubungan dengan kegiatan usaha Bank, yaitu perkreditan (mengenai materi penanganan kredit bermasalah, yang sebagian besar materinya merupakan gugatan bantahan/perlawanan terhadap Eksekusi Hak Tanggungan yang dilakukan Debitur atau Pihak Ketiga agar eksekusi yang dilakukan oleh Bank BNP ditunda atau dibatalkan). Sebanyak 2 (dua) kasus sisanya terkait dengan kegiatan non-perkreditan/operasional.

Dalam penyelesaian kredit bermasalahnya, Bank BNP telah melakukan upaya-upaya persuasif, namun dikarenakan Debitur tidak kooperatif, maka Bank BNP melakukan upaya hukum berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1996 dengan mengajukan Eksekusi Lelang Hak Tanggungan atas obyek jaminan yang diserahkan oleh Debitur kepada Bank BNP.

Dalam penanganan kasus hukum tersebut dan berdasarkan Ketentuan Internal, maka Bank BNP juga menggunakan pelayanan jasa hukum dari kantor hukum (pengacara) untuk ditunjuk melakukan penanganan serta persetujuan biaya penyelesaian permasalahan hukum.

Dampak terhadap Bank

Atas timbulnya permasalahan hukum perdata dan pidana selama tahun laporan (baik yang masih proses hukum dan telah diputus oleh Pengadilan), pengaruhnya terhadap Perusahaan tidak signifikan karena telah dilakukan mitigasi dan penanganan kasus sesuai ketentuan hukum.

Namun untuk perkara perdata yang telah ada pemberitaan dalam beberapa media cetak maupun *online*, yakni terhadap 3 (tiga) perkara hukum di pengadilan, atas 2 (dua) perkara perdata tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*), sedangkan 1 (satu) perkara perdata (PKPU) masih dalam tahap proses di Pengadilan Niaga.

downgraded to non-performing and thus this may result in certain financial losses to be borne by Bank BNP, which may be required to disburse certain fees for the handling of the criminal cases and form allowances for the non-performing loans in accordance with the prevailing regulations.

Out of the 14 (fourteen) non-criminal cases in process, as many as 12 (twelve) cases are related to issues pertaining to the Bank's business activities, i.e. lending (regarding the handling of non-performing loans, the majority of the material being appelant's response with respect to the Execution of Mortgate Rights by the Debtors or Third Parties so that the execution carried out by Bank BNP could be delayed or annulled). Meanwhile, the other 2 (two) cases are related to non-lending/operational activities.

In resolving its non-performing loans issues, Bank BNP has taken certain persuasive measures. However, as the Debtors have been refusing to cooperate with the Bank, Bank BNP thus has taken legal measures based on the Law of the Republic of Indonesia No. 4/1996 by Executing the Auction of Collaterals handed over by the Debtors to Bank BNP in the process of securing the loans.

In handling these legal cases, and based on Internal Provisions, Bank BNP also obtains the legal services from law firms (lawyers) that have been appointed to handle the cases, for which the service fees have been agreed upon.

Impacts on the Bank

All civil and criminal litigations being processed during the reporting year and filed through due legal process have no significant impact on the Company, as the Company has taken all necessary measures to mitigate them, and the legal procedures have been adhered to in handling these cases.

However, for the civil cases that have been reported on various print media and online media, i.e. 3 (three) cases at the court, 2 (two) of these civil cases have been decided with a permanent legal standing, while 1 (one) other case (PKPU) is currently being processed at the Commercial Court.

Komitmen Bank terhadap Perlindungan Konsumen

Bank's Commitment to Consumer Protection

Sebagai wujud tanggung jawab dalam penerapan GCG ("GCG") kepada Nasabah atau masyarakat yang menggunakan produk atau layanan Bank BNP ("Konsumen"), dan sejalan dengan penerapan ketentuan-ketentuan Perlindungan Konsumen, sebagaimana tertuang dalam Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, dan Surat Edaran OJK No. 2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Bank BNP menerapkan prinsip Perlindungan Konsumen berikut:

1. Transparansi,
2. Perlakuan yang adil,
3. Keandalan,
4. Kerahasiaan dan keamanan data/informasi Konsumen,
5. Penanganan Pengaduan serta penyelesaian sengketa Konsumen secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau.

Dalam rangka penerapan Perlindungan Konsumen, Bank BNP selalu menyediakan dan/atau menyampaikan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang akurat, jujur dan tidak menyesatkan yang telah tertuang dalam dokumen atau sarana lain dan disampaikan pada saat konsumen akan menggunakan produk atau layanan Bank BNP. Penyediaan dan/atau penyampaian informasi oleh Bank BNP ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi Konsumen terhadap produk dan/atau layanan serta hak dan kewajiban Konsumen.

Setelah Nasabah/Konsumen menyetujui untuk menggunakan produk/layanan yang disediakan oleh Bank BNP, maka apabila dikemudian hari terjadi perubahan pada produk/layanan (baik mengenai manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan) dan sebelum diberlakukannya perubahan dimaksud, Bank BNP telah menginformasikan hal itu kepada Nasabah/Konsumen melalui media sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku. Bank BNP juga bertanggung jawab untuk memenuhi harapan nasabahnya, oleh karena itu dilakukan langkah-langkah antisipasi dengan menindaklanjuti setiap Keluhan/Pengaduan akibat ketidakpuasan Pengadu terhadap produk atau layanan Bank.

Mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No. 10/10/PBI/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/13/DPNP tanggal 6 Maret 2008 tentang Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/24/

As a form of responsibility to the implementation of GCG to Customers and the public that utilize the products and services of Bank BNP (collectively referred to as the "Consumers"), and to be aligned with the implementation of the provisions on Consumer Protection, as stipulated in OJK Regulation No. 1/POJK.07/2013 on Consumer Protection in the Financial Services Sector, and OJK Circular No. 2/SEOJK.07/2014 on Financial Services Consumer Complaints Handling and Resolution, Bank BNP currently implements the following Consumer Protection principles:

1. Transparency,
2. Fair treatment,
3. Reliability,
4. Confidentiality and security of consumer data/information,
5. Handling of complaints and resolution of consumer disputes in a simple, prompt and affordable manner.

In the implementation of Consumer Protection, Bank BNP always provides and/ or conveys information about the products and/or services in an accurate, truthful and not misleading manner, as described in the document or other means and delivered at a time before the consumers will use the products or services of Bank BNP. The provision and/or delivery of information by Bank BNP is expected to give understanding to the consumers regarding the products and/or services and the rights and obligations of the Customer.

After the Client/Customer agrees to use the products/services provided by Bank BNP, should in the future there be a change in the product/service (either on the benefits, costs, risks, terms and conditions) and before the enactment of the change, Bank BNP has informed to Customer/Consumer through media as well as the prevailing laws. Bank BNP also has a responsibility to meet the expectations of its customers, therefore it is necessary to take measures in anticipation to follow up on any complaint/grievance caused by the dissatisfaction of the Consumers related to the products or services provided by the Bank.

Referring to Bank Indonesia Regulation No. 10/10/PBI/2008 on Amendment to Bank Indonesia Regulation No. 7/7/PBI/2005 on the Settlement of Customer Complaints and Bank Indonesia Circular Letter No. 10/13/DPNP dated 6 March 2008 on Amendment to Bank Indonesia Circular

DPNP tanggal 18 Juli 2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah, dan POJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan serta SE 02/SEOJK.07/2014 tentang Layanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan. Bank BNP telah memiliki Unit Kerja yang dibentuk secara khusus untuk menangani Pengaduan Nasabah yang berfungsi untuk menerima, menangani dan menyelesaikan Pengaduan secara baik serta tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan yang baik di setiap Kantor Bank BNP akan meningkatkan kepercayaan Nasabah (*confidence*), dan kepercayaan nasabah akan meningkatkan kesetiaan nasabah (*loyalty*) dan kesetiaan Nasabah akan meningkatkan potensi pendapatan Bank (*profitability*). Unit Kerja Penanganan Pengaduan Nasabah (disebut juga "Complaint Care Unit") ini secara struktur organisasi berada di bawah Corporate Service Division dan Corporate Legal Department.

Letter No. 7/24/DPNP dated 18 July 2005 on the Settlement of Customer Complaints, xxx

Bank BNP has a work unit formed specifically to deal with Customer Complaints, whose function is to receive, handle and resolve complaints properly and timely in accordance with applicable regulations. The proper Complaints Handling and Resolution any branch office of Bank BNP will increase customer confidence, and in turn customer confidence will increase customer loyalty, which in turn will improve the profitability potential of the Bank. The Work Unit for Handling Customer Complaints (called the "Complaint Care Unit") is the placed under the Corporate Services Division and the Corporate Legal Department.

Apabila Nasabah/Konsumen memiliki pertanyaan atau ketidakpuasan terkait produk dan/atau layanan Bank BNP, maka Bank BNP memiliki mekanisme Pengaduan Nasabah yang dapat disampaikan melalui Kantor Cabang terdekat, situs web Bank BNP, media sosial Bank BNP (Facebook dan Twitter), Kotak Saran yang tersedia di setiap Kantor Cabang, email pengaduan.nasabah@bankbnp.com dan BNP Call.

Should the Customer/Consumer have any questions or dissatisfaction related products and/or services of Bank BNP, Bank BNP has a mechanism that allows the Customer Complaints to be submitted through the nearest branch office, the Website of Bank BNP, Bank BNP's social media accounts (Facebook and Twitter), Suggestion Box at each branch office, email (pengaduan.nasabah@bankbnp.com), and BNP Call.

Adapun mekanisme Pengaduan Nasabah sebagai tindak lanjut terhadap Pengaduan Nasabah ditentukan sebagai berikut:

1. Nasabah/Konsumen menyampaikan pengaduan melalui Kantor Cabang terdekat, situs web Bank BNP, Media sosial Bank BNP (*Facebook* dan *Twitter*), Kotak Saran di setiap Kantor Cabang, *email* pengaduan.nasabah@bankbnp.com dan BNP *Call*.
2. Nasabah datang ke Kantor Cabang kemudian mengisi Formulir Pengaduan untuk keluhan/pengaduan yang terkait dengan transaksi keuangan, layanan jasa, dan pengaduan lainnya.
3. Keluhan/Pengaduan yang tidak dapat ditangani langsung oleh Petugas Bank BNP/*Risk Taking Unit* wajib segera disampaikan dan dikonsultasikan kepada *Complaint Care Unit* melalui email pengaduan.nasabah@bankbnp.com.
4. Keluhan/pengaduan yang tidak dapat ditangani oleh Unit Kerja dan/atau Pejabat Bank BNP yang berwenang wajib segera disampaikan dan dikonsultasikan kepada Direksi Bank BNP.
5. Petugas Bank BNP/unit kerja yang terkait dengan keluhan/pengaduan *(Complaint Care Unit)* harus segera menyampaikan hasil penyelesaian keluhan/pengaduan kepada Nasabah/Konsumen secara tertulis.

The Customer Complaint mechanism as a follow-up to the Customer Complaint consists of the following steps:

1. The Customer/Consumer delivers the complaint through the nearest branch office, Website of Bank BNP, Bank BNP's social media accounts (Facebook and Twitter), Suggestion Box available in each branch office, the email address of pengaduan.nasabah@bankbnp.com, or BNP Call.
2. The Customer visits the branch office and fills out the Complaint Form for complaint related to financial transactions, services, and other issues.
3. Complaints that cannot be handled directly by Bank BNP Officer/Risk Taking Unit shall be immediately communicated and consulted with the Complaint Care Unit via the email address of pengaduan.nasabah@bankbnp.com.
4. Complaints that cannot be handled by the Work Unit and/or authorized officials of Bank BNP shall be immediately communicated and consulted with the Board of Directors of Bank BNP.
5. Bank BNP Officers/Unit related to complaint handling (Complaint Care Unit) must immediately submit the results of the settlement of grievances/complaints to the Customer, in writing.

6. Petugas Bank BNP wajib mencantumkan tanggal dan hasil penyelesaian penanganan keluhan/pengaduan di kolom penyelesaian pada Formulir Pengaduan.
7. Petugas Bank BNP/unit kerja yang terkait dengan keluhan/pengaduan Nasabah/Konsumen *(Complaint Care Unit)* wajib melakukan dokumentasi dan administrasi terhadap tanggal dan hasil penyelesaian keluhan/pengaduan pada Formulir Pengaduan.
8. Sesuai ketentuan yang mengatur mengenai waktu penanganan, maka keluhan/pengaduan yang diterima oleh Kantor Cabang Bank BNP harus dilakukan penyelesaian dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya keluhan/pengaduan. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, maka Bank BNP dapat melakukan perpanjangan waktu sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja berikutnya dan mengenai hal ini Bank BNP akan memberitahukan kepada Nasabah/ Konsumen.

6. Bank BNP Officer shall include the date and the complaint settlement results in the "completion" column in the Complaint Form.
7. The Complaint Care Unit shall carry out the documentation and administration of the dates and results of the completion of the complaint in the Complaint Form.

8. In accordance to the provisions governing the handling time, the grievance/complaints received by the Bank BNP branch office should be resolved within a period of 20 (twenty) working days from the receipt of the complaint. In special circumstances, Bank BNP can extend the settlement time by up to 20 (twenty) working days and regarding this extension Bank BNP has to notify the Customer/Consumer.

Bahwa berdasarkan Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan dan dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan Nasabah di Bank BNP, maka Nasabah/Konsumen dan Bank BNP dapat melakukan penyelesaian sengketa/Pengaduan Nasabah di luar pengadilan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) dan saat ini Bank BNP sudah tercatat sebagai anggota Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa tersebut.

Based on OJK Regulation No. 1/POJK.07/2014 on Alternative Institution for Dispute Resolution in the Financial Services Sector, and in the case where no agreement is reached in the process of settlement of Customer Complaint, the Customer/ Consumer and Bank BNP can arbitrate the dispute outside of the court through the Indonesian Banking Alternative Institution for Dispute Resolution (LAPSPI), of which currently Bank BNP is registered as member.

Dalam hal pemantauan penanganan dan penyelesaian Pengaduan Nasabah, Bank BNP melalui Unit Kerja Pengaduan Nasabah (*Complaint Care Unit*) telah melakukan penatausahaan dokumen yang berkaitan dengan penerimaan, penanganan dan penyelesaian Pengaduan Nasabah. Sedangkan mengenai kewajiban pelaporan tentang penanganan dan penyelesaian pengaduan yaitu kepada regulator:

a. Bank Indonesia melalui Laporan Kantor Pusat Bank Umum (LKPBU), yang meliputi laporan:
   1) Laporan Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah.
   2) Laporan Penanganan Pengaduan Konsumen Terkait Penyetoran dan/atau Penarikan Uang.
b. Menyampaikan Laporan Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen terkait Sistem Informasi Debitur (SID).
c. OJK melalui Sistem Informasi Pelaporan dan Perlindungan Konsumen (SI PEDULI).

In terms of monitoring the handling and settlement of Customer Complaints, Bank BNP through the Complaint Care Unit has conducted administration of documents related to the receipt, handling, and settlement of Customer Complaints. Meanwhile, the reporting obligations concerning the handling and settlement of complaints to regulators are as follows:

a. To Bank Indonesia through the Commercial Bank Head Office Report (LKPBU), which includes the statement of:
   1) Report of Customer Complaints Handling and Resolution.
   2) Report of Consumer Complaints Related to Deposits and/or Cash Withdrawals.
b. Delivering Report of Service and Consumer Complaints Settlement related to the Debtors Information System (SID).
c. OJK via the Consumer Protection and Reporting Information System (SI CARES).

Pelaporan internal wajib juga dilakukan ke:

a. Regulatory Compliance Department melalui system Aplikasi Monitoring (AMOR).

Internal reporting is also performed obligatorily to:

a. Regulatory Compliance Department through the Application Monitoring (AMOR) system.

b. Operational Risk Management Departement melalui sistem Aplikasi Tingkat Kesehatan Bank (TKB) yang terdiri dari:
   1) Frekuensi Materialitas dan Eksposur Pemberitaan Negatif Bank.
   2) Frekuensi dan Materialitas Keluhan/Pengaduan Nasabah.

Tingkat penyelesaian Pengaduan Nasabah selama tahun 2017 adalah sebagai berikut:

b. Operational Risk Management Department via the Banking Soundness Level (TKB) system, consisting of:
   1) Frequency of Negative Coverage Materiality and Exposure of the Bank.
   2) Frequency and Materiality of Customer Complaints.

The Customer Complaint settlement rate for 2017 is as follows:

Triwulan Quarter (2017)	Jumlah Pengaduan Number of Complaints		% Tingkat Penyelesaian Completion Rate (%)
	Penerimaan Received	Penyelesaian Resolved	
Q1	90	78	86,67%
Q2	97	82	84,54%
Q3	154	129	83,80%
Q4	194	176	90,70%
Jumlah Total	535	465	86,90%

Selama tahun 2017, total pengaduan nasabah sebanyak 666, dengan 131 pengaduan yang masuk berkenaan dengan kelalaian nasabah terkait sistem pembayaran. Sebanyak 129 pengaduan telah diselesaikan dan 2 pengaduan masih belum terselesaikan, sehingga tingkat penyelesaiannya 98,47%. Total pengaduan nasabah yang tidak disebabkan kelalaian adalah 535 pengaduan. Sampai akhir tahun 2017, Bank telah menyelesaikan 86,90% dari total pengaduan nasabah tersebut.

In 2017, a total of 666 customer complaints were received, with 131 of them were related to the lapses by the customers related to payment systems. As many as 129 reports were solved and 2 reports are still in the resolution process, and thus the resolution rate was 98.47%. Total complaints from customers not caused by lapses or oversight were 535 reports. Up to the end of 2017, the Bank had resolved 86.90$ of the total customer complaints.

Sistem Pelaporan Pelanggaran

Whistleblowing System

Bank BNP berkomitmen untuk menjalankan perusahaan secara profesional dengan berdasarkan pada prinsip dan ketentuan-ketentuan pengelolaan perusahaan terbuka, memperhatikan batasan etika bisnis yang berlaku serta berdasarkan pada perilaku perusahaan yang sesuai dengan budaya dan sikap kerja perusahaan, serta melengkapi infrastruktur etika dan mendeteksi adanya pelanggaran kode etik/pedoman perilaku, dengan menerapkan suatu sarana untuk menyampaikan informasi/aspirasi maupun guna melaporkan perbuatan atau perilaku atau peristiwa pelanggaran, yaitu berupa *BNP Hotline* (*whistleblowing system*).

Bank BNP is committed to running its business in a professional manner based on the principles and provisions of the management of a public company, to attending to the limits of accepted business behaviors and based on the corporate behaviors in accordance with the culture and work ethic of the Company, as well as to enhancing the infrastructure of ethics and detect any violation of code of conduct, by applying a means to convey information/ aspirations as well as to report any misconduct or violation, namely in the form of BNP Hotline (whistleblowing system).

BNP Hotline merupakan sarana terkoordinasi dan terintegrasi dari penerimaan laporan hingga tindak lanjut penegakan dugaan pelanggaran yang disediakan oleh Manajemen Bank untuk menerima informasi tentang fakta atau adanya indikasi pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku baik peraturan internal maupun eksternal dan/atau aspirasi dari Karyawan dengan menggunakan sarana elektronik (telepon, pesan singkat (SMS), dan *email*), yang dapat digunakan oleh karyawan jika menemukan kesulitan atau kendala dalam menyampaikan informasi melalui jalur formal yang normal.

Sarana *BNP Hotline* (*whistleblowing system*) ini juga dilaksanakan sebagai wujud penerapan Pilar 2 (dua) tentang deteksi *fraud* pada ketentuan Strategi *Anti-Fraud* dan juga merupakan penerapan GCG.

Peran serta Manajemen dan seluruh Karyawan dalam pemanfaatan Sarana *BNP Hotline* (*whistleblowing system*) sangat penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan penanganan terhadap kejadian pelanggaran dapat dilakukan dengan segera, efektif dan efisien. *BNP Hotline* (*whistleblowing system*) harus dikelola dengan baik agar tujuan penyediaan sarana pelaporan pelanggaran tersebut dapat terwujud dan bermanfaat, yaitu untuk:

1. Menerapkan Budaya Kerja secara konsisten khususnya pelaksanaan Budaya Integritas;
2. Menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif, sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja;
3. Mencegah kemungkinan Karyawan memanfaatkan pihak luar/pihak ketiga untuk menyampaikan informasi/aspirasi termasuk pengaduan Karyawan;
4. Meminimalkan risiko kerugian keuangan, operasional, reputasi dan hukum yang mungkin dihadapi Bank akibat pelanggaran yang terjadi di lingkungan Bank;
5. Meningkatkan dan menjaga reputasi Bank di mata pemangku kepentingan, regulator, dan masyarakat umum;
6. Memberikan masukan kepada Bank untuk mengkaji kelemahan pengendalian internal, serta merancang tindakan perbaikan (*improvement*) yang diperlukan;
7. Menciptakan sistem saling mengawasi terhadap kesesuaian perilaku dan ketaatan prosedur kerja yang dilaksanakan oleh seluruh Insan Bank untuk senantiasa menjaga integritas dan profesionalitas, termasuk akuntabilitas dalam penegakan dugaan ataupun indikasi pelanggaran.

Dalam penerapan *BNP Hotline* (*whistleblowing system*) memiliki azas-azas sebagai berikut:

1. Azas Kerahasiaan
   a. Informasi yang diterima dijamin kerahasiaannya untuk membangun kepercayaan dan independensi *BNP Hotline* (*whistleblowing system*),

BNP Hotline is a means that is co-ordinated and integrated, from the receipt of the report to the follow-up enforcement of alleged violations, performed by the Bank's management to receive information about facts or indications of violations of the applicable regulations both internal and external and/or aspiration to be conveyed by employees using electronic means (telephone, SMS, and email), which may be used by employees should they encounter issues or problems in conveying the information through the formal channels that are normally employed.

BNP Hotline (whistleblowing system) is also implemented as a form of application of Pillar 2 (two) on fraud detection as stated in the Anti-Fraud Strategy provisions, and also an application of GCG.

The role and participation of the management and all employees in the use of BNP Hotline (whistleblowing system) is important to prevent violations and handling of the incidence of violations in a prompt, effective, and efficient manner. The BNP Hotline (whistleblowing system) must be managed properly so that the purpose of the provision of reporting the violation can be realized and become beneficial, i.e. to:

1. Implement the Work Culture consistently in particular the implementation of Integrity Culture;
2. Create a working environment that is comfortable and conducive, so as to increase productivity;
3. Prevent the possibility of employees utilizing external/third parties to submit information/aspiration including employee grievances;
4. Minimize the risk of financial loss, or operational, reputation and legal risks that might be encountered by the Bank due to violations occurred within the Bank;
5. Improve and maintain the Bank's reputation in the view of stakeholders, regulators and the general public;
6. Provide feedback to the Bank to assess the internal control weaknesses, as well as designing the corrective action (improvement) as required;
7. Create a system of mutual monitoring of the alignment of behaviors and adherence to work procedures implemented by the Bank's personnel to always maintain integrity and professionalism, including accountability in the enforcement of the alleged violation or indication of violation.

In the application of BNP Hotline (whistleblowing system), the following principles are upheld:

1. Principle of Confidentiality
   a. Information received is guaranteed to be confidential, to build confidence and independence of BNP Hotline (whistleblowing system),

b. Kerahasiaan yang dimaksud mencakup kerahasiaan terhadap:
   1) Identitas Karyawan/Pelapor
   2) Hal-hal atau materi informasi yang disampaikan
   3) Seluruh data pendukung yang terkait dengan informasi

2. Azas Keadilan atau Tidak Diskriminatif
   Setiap Karyawan baik Karyawan Tetap, Karyawan *Outsourcing*, dan/atau Karyawan Kontrak di Bank BNP berhak untuk menyampaikan informasi/aspirasi kepada *BNP Hotline* (*whistleblowing system*).
3. Azas Perlindungan Pelapor
   a. Karyawan yang menyampaikan informasi melalui *BNP Hotline* (*whistleblowing system*) tidak akan dikenakan sanksi apapun.
   b. Perlindungan Pelapor hanya diberikan kepada Karyawan yang menyampaikan informasi dengan kategori *full disclosure.*
   c. Perlindungan Pelapor tersebut bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada Karyawan dari ancaman/tindakan akibat penyampaian informasi/ aspirasi yang dilakukan.
   d. Dalam kondisi tertentu Karyawan sebagai Pelapor dapat diberikan perlindungan sebagaimana diatur dalam Ketentuan atau Peraturan Perundang-Undangan tentang Perlindungan Hukum yang berlaku.

Penanggung jawab dalam pengelolaan sarana *BNP Hotline* (*whistleblowing system*) dilakukan oleh tim yang diketuai oleh Komisaris Independen. Tim pengelola *BNP Hotline* (*whistleblowing system*) dapat berkoordinasi dengan Unit Kerja terkait seperti Internal Audit Division (SKAI), Compliance Division, Risk Management Division, Human Capital Division, dan lainnya, untuk melakukan proses investigasi dengan proses tindak lanjut dengan SLA selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal penerimaan informasi/aspirasi; dan apabila informasi atau laporan yang disampaikan berindikasi tindakan *fraud* maka pengelola *BNP Hotline* (*whistleblowing system*) akan berkoordinasi dengan Komite Strategi Anti-Fraud untuk dilakukan tindak lanjut/ penelusuran lebih lanjut dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas Karyawan yang melaporkannya.

Pengelola *BNP Hotline* (*whistleblowing system*) wajib mendokumentasikan seluruh laporan informasi/aspirasi yang diterima dan menyusun laporan secara bulanan untuk disampaikan kepada Presiden Direktur dan Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko yang mencakup tentang:
1. Informasi/aspirasi yang diterima;
2. Tindak lanjut penyelesaian informasi/aspirasi Karyawan, termasuk penyelesaian dan keputusan yang diambil.

Selama tahun 2017, BNP Hotline (*whistleblowing system*) menerima 11 (sebelas) informasi dan masukan serta telah diambil tindakan penyelesaian dan/atau keputusan oleh Manajemen.

b. Confidentiality encompasses confidentiality as regards:
   1) Identity of the Employee/Reporting Party
   2) Matter or information submitted
   3) Supporting data relating to information submitted

2. Principles of Fairness or Non-Discrimination
   Every employee, be they permanent employee, outsourced employee, and/or contract employee of Bank BNP, is entitled to submit information/aspiration to the BNP Hotline (whistleblowing system).
3. Principle of Protection of the Reporting Party
   a. Employees who submit information via BNP Hotline (whistleblowing system) will not be subject to any sanctions.
   b. The reporter's protection is given only to employees who conveyed the information that can be categorized as full disclosure.
   c. The Reporting Party protection aims to provide a sense of security to the employees of threats/reprisals due to the submission of information/aspiration.
   d. Under certain conditions, the Reporting Party can be given protection under the prevailing provisions or laws concering Legal Protection.

The party responsible for managing the BNP Hotline (whistleblowing system) is a team chaired by the Independent Commissioner. The BNP Hotline (whistleblowing system) team may coordinat with the relevant Work Units, such as the Internal Audit Division (SKAI), Compliance Division, Risk Management Division, Human Capital Division, and others, to proceed with the investigation with the follow up whose SLA covers at the latest 5 (five) working days since the date of receipt of the information/ aspiration; and should the information or the report has an indication of fraud, the BNP Hotline (whistleblowing system) management team will be coordinating with the Anti-Fraud Strategy Committee to perform further investigation, by upholding the confidentiality of the Reporting Party's identity.

The BNP Hotline (whistleblowing system) management team must document all reports of information/aspiration received, and prepare a monthly report to be submitted to the President Director and the Compliance and Risk Management Director. The report should cover:
1. The information/aspiration received;
2. Follow up on the resolution of information/aspiration of the Employees, including decisions taken and the resolutions.

In 2017, BNP Hotline (whistleblowing system) received 11 (eleven) reports and inputs, for all of which actions have been taken to resolve or decisions have been made by the Management.

Akses Informasi & Data Perusahaan

Access to Company Information & Data

Informasi dan data mengenai Bank BNP dapat dilihat oleh publik melalui laman www.bankbnp.com untuk menghubungi Bank BNP terkait informasi dan data yang diperlukan dapat melalui nomor telepon (+62 22) 82560163-164 (*hunting*) dan faksimili (+62 22) 2514580, serta email: **corp_communication@bankbnp.com.**

Information and data concerning Bank BNP is made available to the public through www.bankbnp.com to obtain further information and data regarding Bank BNP, please contact the Bank via the following phone number (+6222) 82560163-164 (*hunting*) and facsimile (+6222) 2514580, and email: **corp_commmunication@bankbnp.com.**

Kepatuhan Perpajakan

Tax Compliance

Peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia khususnya dalam sisi kewajiban pembayaran Pajak, senantiasa dipatuhi Bank BNP dalam setiap aktivitas bisnisnya. Ini merupakan wujud konsistensi komitmen Bank dalam turut serta membangun Negara melalui penerimaan Pajak oleh Negara.

Bank BNP always complies with all the taxation regulations and Government Regulations of the Republic of Indonesia, including the regulations concerning the obligation to pay taxes. This shows the consistency of the Bank's commitment to participating in the building of the nation via state revenue from tax proceeds.

Sistem Perpajakan di Indonesia masih menerapkan sistem penilaian mandiri (*self assessment*) yang menyerahkan kepercayaan kepada wajib Pajak untuk melakukan sendiri kewajiban perpajakannya, diawali dengan mendaftarkan diri sebagai wajib Pajak, menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak terutangnya. Wajib Pajak harus memahami ketentuan-ketentuan umum perpajakan yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, serta Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

The Indonesian taxation system applies the self assessment method, giving the opportunity to taxpayers to self-assess their tax obligations, starting from registering themselves as taxpayers, calculating, paying, and reporting their taxes. The taxpayers must comprehend the general provisions on taxation as stipulated in the Law No. 28/2007 on the General Provisions and Procedures for Taxation, and Law No. 36/2008 on Income Tax.

Selama tahun buku 2017, beberapa kebijakan perpajakan yang baru/perubahan telah diterbitkan antara lain:

Throughout 2017, various new tax policies or amendments to the existing tax policies were issued, among others:

1. PP No. 1 Tahun 2017
   Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan: Meliputi akses untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan dalam pelaksanaan perjanjian internasional.

1. Government Regulation No. 1/2017
   Access to Financial Information for Tax Purposes: Covering access to receive and obtain financial information for the implementation of the laws and regulations in taxation in line with international treaties.

2. PER 10/PJ/2017
   Tatacara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda: Penggantian Form DGT 1 dan DGT 2 Baru berlaku per 1 Agustus 2017.

2. PER 10/PJ/2017
   Procedures for Implementation of Agreement of Avoidance of Double Taxation: Replacement of Forms DGT 1 and DGT 2 New to be valid starting from 1 August 2017.

3. SE 02/PJ/2017
   Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan No. 22//PMK.03/2014 tentang Persyaratan Serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa:
   - Mengatur Penandatanganan SPT,
   - Mengatur Pelaporan SPT,
   - Mengatur kegiatan apa saja yang boleh menggunakan surat kuasa dan mana yang tidak boleh.

4. PER 30/PJ/2017
   Peraturan mengenai Perubahan tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya.

Sekarang ini pemeriksaan oleh Kantor Pajak terhadap Bank BNP tengah berlangsung untuk tahun buku 2016.

3. SE 02/PJ/2017
   Guideline for Implementing Ministry of Finance Regulation No. 22/PMK.03/2014 on Requirements and Exercise of Rights and Obligations of a Power of Attorney:
   - Governing the Signing of Tax Report;
   - Governing Tax Reporting;
   - Governing activities that may and may not use power of attorney.

4. PER 30/PJ/2017
   Regulation on the Amendment regarding the Form of the Annual Notification Letter for Income Tax of Individual Taxpayer and Institutional Taxpayer, along with the associated Filling Out Procedures.

Currently, Bank BNP is being audited by the Tax Office for FY 2016.

Kebijakan Strategi Anti-Fraud

Policy on Anti-Fraud Strategy

Mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia yang dituangkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/28/DPNP Perihal Penerapan Strategi *Anti-Fraud* bagi Bank Umum, maka dalam rangka memenuhi ketentuan tersebut dan dalam rangka mendukung dan untuk meningkatkan efektivitas penerapan strategi *Anti-Fraud* serta upaya pencegahan tindakan penyimpangan dalam aktivitas operasional perbankan yang dilakukan baik oleh pihak internal bank (*internal fraud*), atau oleh pihak eksternal bank, ataupun dilakukan secara bersama-sama oleh pihak internal dengan eksternal bank, Bank BNP telah membentuk fungsi atau unit pengelola yang bertugas menerapkan strategi *Anti-Fraud* dalam komite yang dibentuk Manejemen Bank BNP, yaitu Komite Strategi *Anti-Fraud* (selanjutnya disingkat KSAF) yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi NOKEP: 102-DIR/COMP/06/2017 tentang KSAF, guna melengkapi dan menggantikan Surat Keputusan sebelumnya yaitu NOKEP: 056-DIR/COMP/06/2015 tentang KSAF.

Struktur keanggotaan dari KSAF diketuai oleh Chief of Human Capital and Corporate Service dengan anggota tetap terdiri dari beberapa Kepala Divisi , dan anggota tidak tetap adalah Kepala Divisi/Kepala Departemen/Manager dari Unit Kerja terkait.

Referring to the provisions of Bank Indonesia as stipulated in Bank Indonesia Circular No. 13/28/DPNP on Implementation of Anti-Fraud Strategy for Commercial Banks, to fulfill these provisions and in order to support and improve the efficacy of the Anti-Fraud strategy implementation and to prevent any misconduct or violation in the operational activities in banking conducted both by the internal parties of the bank (internal fraud) or by external parties, or jointly performed by both the internal and external parties, Bank BNP has established a specific function to manage the implementation of the Anti-Fraud strategy, as a committee formed by Bank BNP's Management. The committee, called the Anti-Fraud Strategy Committee (KSAF) was established based on the Decree of the Board of Directors NOKEP: 102-DIR/COMP/06/2017 on Anti-Fraud Strategy Committee, to improve and replace the previous Decree NOKEP: 056-DIR/COMP/06/2015 on Anti-Fraud Strategy Committee.

The KSAF is chaired by the Chief of Human Capital and Corporate Service, with the permanent members being the relevant Division Heads and the non-permanent members being the Division/Department Heads or Managers from related Work Units.

Sebagai wujud komitmen Manajemen Bank BNP untuk mendukung efektivitas pelaksanaan penerapan strategi *Anti-Fraud*, maka dalam penerapannya selain menerapkan manajemen risiko juga diwujudkan dalam sistem pengendalian fraud (*fraud control system*) yang mengacu kepada 4 (empat) pilar yaitu (1) pencegahan, (2) deteksi, (3) investigasi, pelaporan, dan sanksi, (4) pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut; serta dilakukannya upaya peningkatan agar pencegahan *fraud* tersebut benar-benar menjadi fokus perhatian dan budaya di Bank BNP pada seluruh aspek organisasi, baik oleh Manajemen maupun Karyawan.

Dalam pelaksanaan fungsinya, KSAF menangani implementasi strategi *Anti-Fraud* dengan melakukan pengendalian dan pemantauan senantiasa berkoordinasi dengan fungsi-fungsi kontrol/unit-unit kerja kontrol seperti Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), Risk Management, Compliance, dan dari *First Line Defense* (Unit Kerja Operasional & Bisnis Bank) dalam rangka perumusan dan pelaksanaan strategi pencegahan, deteksi awal, merekomendasikan perbaikan, dan memantau tindaklanjut perbaikan.

Untuk mendukung pelaksanaan penerapan strategi *Anti-Fraud*, telah dilengkapi juga dengan satu pedoman kebijakan strategi *Anti-Fraud* dengan ruang lingkup meliputi seluruh aspek aktivitas operasional perbankan baik bisnis maupun fungsional dalam lingkungan Bank maupun sarana Bank yang diterapkan pada seluruh jenjang organisasi Bank BNP dan mengikat bagi:

1. Segenap Pegawai dan Manajemen Bank,
2. Hubungan antara sesama Insan Bank,
3. Hubungan antara Insan Bank dengan pihak ketiga antara lain nasabah, debitur, vendor, rekanan jasa profesi, dan pihak ketiga lainnya.

Upaya-upaya penguatan dan peningkatan kepedulian *Anti-Fraud* (*Anti-Fraud awareness*) adalah dengan mengintensifkan fungsi pengendalian dan pemantauan termasuk penerapan *four eyes principle*, identifikasi kerawanan, peningkatan kesadaran risiko *fraud* pada setiap aktivitas Bank, kepedulian terhadap lingkungan kerja, dan *know your employee* (KYE) dengan memanfaatkan sarana/media pengelolaan *whistleblowing* yang lebih komprehensif, melakukan *surprise audit* sebagai deteksi awal meminimalkan kejadian fraud, serta penegakan Kode Etik Perusahaan (*Code of Conduct).* Keseluruhan ini sejalan dengan kampanye (*campaign*) "*Anti-Fraud*" and "*Say No To Fraud*".

As manifestation of Bank BNP's management's commitment to supporting the efficacy of Anti-Fraud strategy implementation, aside from implementing risk management, the anti-fraud strategy also takes into account the fraud control system that refers to the four pillars of (1) prevention, (2) detection, (3) investigation, reporting, and sanctioning, (4) monitoring, evaluation, and follow up; and these measures are constantly improved so that fraud prevention becomes truly the focus of Bank BNP in its culture across the entire organization, from the Management to all the employees.

In performing its functions, the KSAF handles the implementation of the Anti-Fraud strategy by continuously controlling and monitoring and coordinating with control functions/work units, such as the Internal Audit Unit, Risk Management, Compliance, and units along the First Line of Defense (Operations and Busines Units of the Bank) in order to formulate and implement the strategy for prevention, early detection, recommendation of improvements, and monitoring of recommendation follow ups.

To support the Anti-Fraud strategy implementation, the Anti-Fraud strategy policy has been established, whose scope covers all the Bank's operational activities in Banking, both business and functional, within the Bank's environment as well as the Bank's means implemented across all of the organization of Bank BNP. The policy is binding to:

1. All employees and management of the Bank;
2. The relationships between the employees of the Bank;
3. The relationships between the employees of the Bank with third parties, such as customers, debtors, vendors, business partners, and other third parties.

Efforts to strengthen and improve Anti-Fraud awareness include increasing the intensity of control and monitoring function, including the implementation of the four eyes principle, indentification of vulnerabilities, improvement of fraud risk awareness across all activities of the Bank, concern regarding working environment, and know your employee (KYE) by making use of the whistleblowing system management media in a more comprehensive manner, conducting surprise audit early detection method to minimize fraud occurences, and enforcement of the Code of Conduct. These activities are in line with the "Anti Fraud" Campaign and the "Say No To Fraud" Campaign.

Pakta Integritas

Integrity Pact

Untuk menilai integritas anggota Dewan Komisaris dan Direksi, setiap satu tahun sekali dibuatkan surat pernyataan (pakta) yang ditandatangani oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Pakta Integritas dilakukan sebagai acuan terhadap penilaian integritas masing-masing Dewan Komisaris dan Direksi dengan komitmen dalam melaksanakan seluruh tugas, fungsi dan tanggung jawab, kewenangan dan peran sesuai dengan prinsip-prinsip GCG dan peraturan perundang-undangan.

Hal ini diwujudkan melalui:

1. Menjalankan tugas dan tanggung jawab secara profesional sesuai dengan prinsip-prinsip GCG dan tingkat kompetensi SDM yang dikerahkan dalam rangka membangun keberhasilan Bank;
2. Tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu yang telah diputus oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) dalam 20 tahun terakhir;
3. Tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain;
4. Tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk besan dengan sesama anggota Dewan Komisaris, atau Direksi;
5. Baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain;
6. Berkomitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat;
7. Menjalankan dengan baik Pedoman Tata Kelola Perusahaan dan *Code of Conduct* agar tercapai GCG.

To evaluate the integrity of members of the Board of Commissioners and the Board of Directors, every year an integrity pact has to be signed by each member of the Board of Commissioners and Board of Directors.

The Integrity Pact is adhered to as a reference to the integrity assessment of each member of the Board of Commissioners and the Board of Directors, given the commitment to execute all the duties, functions and responsibilities, authority and roles in accordance with the GCG principles and the prevailing regulations.

This is conducted through:

1. Conducting the duties and responsibilities in a professional manner in accordance with the principles of GCG and the level of competence of Human resources employed in order to bring the Bank to success;
2. Never have been convicted and found guilty of committing Certain Criminal Acts decided by court with a legal force (*inkracht van gewisjde*) within the past 20 years;
3. Not hold concurrent positions as a member of the Board of Commissioners, Board of Directors, or Executive Officer in any banking institutions, companies or other institutions;
4. Not have a family relationship to the second degree, including in-laws with fellow members of the Board of Commissioners and the Board of Directors;
5. Whether alone or together, not have more than 25% of the paid-up capital of any other companies;
6. Committed to a healthy development of the Bank's operations.
7. Implement GCG Guidelines and Code of Conduct to achieve GCG.

Transparansi Kondisi Keuangan Bank dan Non-Keuangan Bank

Disclosure of the Bank's Financial and Non-Financial Conditions

Salah satu pilar penting dalam penerapan GCG adalah penerapan aspek transparansi informasi kondisi keuangan dan non-keuangan bank kepada publik, melalui informasi secara kuantitatif dan kualitatif.

Keterbukaan informasi merupakan salah satu kewajiban perusahaan publik yang diimplementasikan melalui penyampaian informasi atau fakta material terkait usaha dan efeknya.

Bank BNP memiliki kebijakan internal yang mengatur mengenai transparansi informasi kondisi keuangan dan non-keuangan. Kebijakan yang diterbitkan 17 April 2017 ini mengatur antara lain:

1. Kebijakan aspek transparansi informasi kondisi keuangan:
   Bank BNP telah mengungkapkan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan yang dituangkan dalam:
   a. Laporan Tahunan
   Laporan Tahunan mengacu kepada POJK No. 29/POJK.04/2016 Tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik dan SE OJK No. 30/POJK.04/2016 Tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, serta POJK No. 32/POJK.03/2016 Tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, dengan cakupan:
   a) Informasi umum: yang meliputi antara lain kepengurusan, rincian kepemilikan saham, perkembangan usaha Bank dan Kelompok usaha Bank BNP, strategi dan kebijakan manajemen dalam pengembangan usaha Bank, laporan manajemen yang memuat informasi mengenai pengelolaan Bank oleh Pengurus dalam rangka GCG dengan menginformasikan beberapa cakupan yang telah ditentukan dalam ketentuan tersebut;
   b) Laporan Keuangan Tahunan: yang telah diaudit oleh KAP yang telah terdaftar di Bank Indonesia atau OJK yaitu KAP Satrio Bing Eny & Rekan, Afiliasi Deloitte Southeast Asia Ltd (DSEA) yang menyajikan Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Laba Rugi Komprehensif, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan termasuk informasi mengenai komitmen dan kontijensi dan dibuat untuk 1 (satu) tahun buku yang

One of the key pillars in the implementation of GCG is the implementation of the aspect of disclosure of the bank's financial and non-financial conditions to the public, via quantitative and qualitative information.

Information disclosure is one of the obligations of a public company which is implemented in the delivery of material fact or information related to its business and securities.

Bank BNP has an internal policy that governs the disclosure of the bank's financial and non-financial conditions, which was issued on 17 April 2017. This policy governs, among others,

1. Disclosure of information related to financial condition:
   Bank BNP has provided disclosure of its financial and non-financial conditions through the publication of:
   a. Annual Report
   The Annual Report refers to the POJK No. 29/POJK.04.2016 on the Annual Report of Issuers or Public Companies, and SEOJK No. 30/POJK.04/2016 on the Annual Report of Issuers or Public Companies, and POJK No. 32/POJK.03/2016 on the Transparency and Publication of Bank Reports, with the following scope:
   a) General information: covering, among others, the management, share ownership details, business growth and business group of the Bank, management strategy and policies in developing the Bank's business, management report containing information on the running of the Bank by the Management in order to implement GCG, by informing the various scopes determined in the regulations;
   b) Annual financial statements: audited by a Public Accounting Firm that is registered in Bank Indonesia or OJK, i.e. Satrio Bing Eny & Rekan, an affiliate of Deloitte Southeast Asia Ltd (DSEA), which provides the Statements of Financial Positions, Statements of Comprehensive Income, Statements of Changes in Equity, Statements of Cash Flows, and Notes to the Financial Sttements, including information on the commitments and contingencies, prepared to cover a period of 1

disajikan dengan perbandingan 1 (satu) tahun buku sebelumnya;

c) Opini Akuntan Publik atas Laporan Keuangan yaitu Laporan Keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk tanggal 31 Desember 2017, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

d) Jenis risiko dan potensi kerugian *(risk exposure)* yang dihadapi Bank BNP serta praktik manajemen risiko yang diterapkan dalam permodalan Bank;

e) Seluruh aspek transparansi dan informasi yang diwajibkan untuk Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan;

f) Aspek pengungkapan yang terkait dengan kelompok usaha;

g) Aspek pengungkapan sesuai Standar Akuntansi Keuangan;

h) Informasi lainnya.
Laporan Tahunan Bank BNP dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, dipublikasikan dalam website Bank BNP (www.bankbnp.com), dan disampaikan kepada pemegang saham, Bank Indonesia, lembaga lain yang berkepentingan terhadap usaha Bank BNP, serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan.

b. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan

Laporan Publikasi Triwulanan telah disesuaikan cakupannya dengan mengacu pada POJK No. 32/POJK.03/2016 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, yang memuat: Laporan Keuangan, Komitmen dan Kontijensi, Transaksi Spot, jumlah dan kualitas aset produktif, perhitungan KPMM, rasio kepatuhan Bank terhadap pengelolaan BMPK, rasio GWM, dan rasio PDN, serta informasi lain. Laporan ini disajikan dalam bentuk perbandingan dengan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan tahun sebelumnya, ditanda tangani oleh 2 (dua) orang anggota Direksi yang pengumumannya dilakukan dalam surat kabar *Media Indonesia* dan *Bisnis Indonesia*, dipublikasikan dalam website Bank BNP (www.bankbnp.com) serta telah mengirimkan *softcopy* laporan tersebut kepada OJK.

c. Laporan Keuangan Publikasi Bulanan

Laporan keuangan publikasi bulanan Bank BNP dilakukan paling lambat setiap tanggal 5 (lima) bulan

(one) fiscal year and presented with comparisons to the previous 1 (one) fiscal year;

c) The Public Accounting Firm's Opinion on the Financial Statements, i.e. that the Financial Statements have presented, in all material aspects, the financial position of PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk as at 31 December 2017, and the financial performance and cash flows for the year ended on said date, in line with the Financial Accounting Standards prevailing in Indonesia.

d) Types of risk and risk exposure of Bank BNP as well as the risk management practices implemented in relation to the Bank's capital structure;

e) All aspects of transparency and information required to be reported in the Quarterly Financial Statements;

f) Disclosure of aspects reltaed to the business group;

g) Disclosure of aspects related to the Financial Accounting Standards;

h) Other information.
The Annual Report of Bank BNP is published in Indonesian and English, and is available on the Bank BNP website (www.bankbnp.com), and is presented to the shareholders, Bank Indonesia, and other institutions that have interest in the business of Bank BNP, as well as other parties as per the prevailing regulations.

b. Quarterly Financial Statements

The Quarterly Financial Statements have had their scope conformed with the POJK No. 32/POJK.03/2016 on the Transparency and Publication of Bank Reports, to include: Financial Statements, Commitments and Contingencies, Spot Transactions, Amount and Quality of Productive Assets, CAR Calculation, ratio of the Bank's compliance with the CAR management, MRR ratio, and PDN ratio, along with other relevant information. This report is presented in comparison with the Quarterly Financial Statements from the previous year, and is signed by 2 (two) members of the Board of Directors, and announced in *Media Indonesia* and *Bisnis Indonesia* newspaper, published on Bank BNP's website (www.bankbnp.com) and submitted in electronic format to OJK.

c. Monthly Financial Statements

The Monthly Financial Statements of Bank BNP are reported at the latest on the fifth of the following

berikutnya, memuat: Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Komitmen dan kontijensi, perhitungan KPMM, kualitas aset produktif dan informasi lain berupa jumlah penyediaan dana, kredit kepada debitur UMKM, kredit yang memerlukan perhatian khusus dan informasi cadangan penyisihan kerugian. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan bulanan dalam format Laporan Bulanan Bank Umum (LBU) sesuai dengan peraturan dari Bank Indonesia dan berpedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Selanjutnya, laporan tersebut dijadikan sebagai dasar oleh Bank Indonesia untuk mempublikasikan laporan keuangan bulanan di website Bank Indonesia.

2. Kebijakan aspek transparansi informasi kondisi non-keuangan, meliputi:
   a. Transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah. merupakan salah satu upaya Bank untuk meningkatkan tata kelola perusahaan pada industri perbankan, serta memberikan kejelasan mengenai manfaat, biaya dan risiko yang melekat pada produk Bank serta melindungi hak-hak pribadi nasabah dalam berhubungan dengan Bank;
   b. Transparansi informasi transaksi afiliasi dan benturan kepentingan, dilakukan dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada Pemegang Saham, khususnya pemegang saham independen yang berkaitan dengan transaksi yang dilakukan oleh Bank sebagai perusahaan publik dengan afiliasinya atau transaksi yang mengandung benturan kepentingan, maka Bank wajib mematuhi peraturan OJK/Bapepam-LK, PBI, Anggaran Dasar Perseroan, kebijakan Perseroan dan peraturan lainnya yang terkait dengan penanganan transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan;
   c. Transparansi informasi tentang Rencana Perusahaan;
   d. Transparansi informasi tentang transaksi tertentu;
   e. Transparansi informasi tentang transaksi material;
   f. Transparansi informasi kepemilikan saham dan kelompok usaha;
   g. Transparansi informasi status hukum yang dihadapi Perseroan;
   h. Transaksi informasi tentang tanggung jawab sosial perusahaan;
   i. Transparansi informasi tentang kegiatan korporasi;
   j. Transparansi informasi tentang pembagian dividen;

month, and include: Statements of Financial Positions, Commitments and Contingencies, CAR Calculation, Quality of Productive Assets, and other information such as provision of funds, loans to MSME debtors, loans requiring specific attention, and information on provision for impairment. The preparation and submission of the monthly financial statements are in line with the format of the Commercial Banks' Monthly Report (LBU) in accordance with the regulations of Bank Indonesia and based on the Financial Accounting Standards. Subsequently, the report is used as a basis for Bank Indonesia to publish monthly financial statements on Bank Indonesia's website.

2. Disclosure of information related to non-financial condition:
   a. Information related to the Bank's products and use of customers' personal data. This is one of the efforts of the Bank's to improve corporate governance in the banking industry, and to provide clear explanation regarding the benefits, costs, and risks inherent to the Bank's products and to protect the rights of its customers to privacy in their interactions with the Bank;
   b. Information related to transactions with related parties and with conflict of interest, in order to provide clear legal assurance and protection to the Shareholders, in particular independent shareholders that are related to the transactions performed by the Bank as a public company with its affiliates or transactions with conflict of interest, and therefore the Bank must abide by the regulations of OJK/Bapepam-LK, PBI, the Company's Articles of Association, the Company's policies and other prevailing provisions related to the handling of transactions with related parties and with conflict of interest;
   c. Information related to the Company's Plans;
   d. Information related to certain transactions;
   e. Information related to material transactions;
   f. Information related to share ownerships and business groups;
   g. Information related to litigations faced by the Company;
   h. Information related to CSR;
   i. Information related to corporate actions;
   j. Information related to dividend distribution;

k. Transparansi informasi tentang PUT/*tender offer/ buyback*;
l. Transparansi informasi tentang akusisi;
m. Transparansi informasi tentang merger/ penggabungan/peleburan usaha;
n. Transparansi informasi tentang kepailitan;
o. Transparansi informasi tentang pelepasan hak dan perubahan *core business*;
p. Transparansi informasi lain.

3. Kebijakan kewajiban transparansi dalam rangka merespons permintaan regulator;
4. Kebijakan metode komunikasi/akses informasi;
5. Sekretaris Perusahaan:
   a. Sekretaris Perusahaan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam penerapan GCG, khususnya terkait dengan pengungkapan dan transparansi informasi untuk memastikan bahwa Bank mematuhi ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   b. Sekretaris Perusahaan dibentuk untuk memelihara dan mempertahankan citra dan melindungi kepentingan Bank melalui komunikasi yang baik dengan regulator dan pemangku kepentingan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas maka tidak ada kondisi keuangan dan non-keuangan Bank yang belum diungkap dalam laporan lainnya.

k. Information related to rights issues, tender offers, and share buybacks;
l. Information related to acquisitions;
m. Information related to mergers or business combinations;
n. Information related to bankruptcies;
o. Information related to relinquishment of rights and change of core business;
p. Other information.

3. Policy governing the obligation to disclose information in response to the request from regulators;
4. Policy governing the access of information and communication methods;
5. Corporate Secretary:
   a. The Corporate Secretary is an inseparable part of the implementation of GCG, in particular related to the disclosure of information to ensure that the Bank has fulfilled all the requirements and adhered to the prevailing regulations.
   b. The Corporate Secretary position was established to maintain the image and reputation of the Bank while also safeguarding the Bank's interest via excellent communications with the regulators and other stakeholders.

Having explained the above matters, there remain no financial and non-financial conditions of the Bank undisclosed in these or other reports.

Pernyataan Kesesuaian Penerapan GCG Bank dengan Roadmap GCG OJK

Statement of Conformity of the Bank's GCG Implementation with OJK GCG Roadmap

Dalam melaksanakan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai GCG serta yang dituangkan dalam bentuk *Roadmap* GCG, Bank BNP senantiasa menyesuaikan dan patuh dalam penyusunan, pelaksanaan, penilaian, dan evaluasi atas pelaksanaan prinsip-prinsip dari GCG dalam kegiatan operasionalnya sehari-hari.

Prinsip GCG dalam pedoman tata kelola adalah konsep dasar GCG, sesuai dengan praktik internasional yang patut diteladani. Rekomendasi penerapan aspek dan prinsip GCG dalam pedoman tata kelola adalah standar penerapan aspek dan prinsip GCG, yang diharapkan dapat diterapkan oleh

In implementing the provisions and regulations regarding GCG as well as the stipulations of the GCG Roadmap, Bank BNP continues to adapt and comply with the formulation, implementation, assessment and evaluation of the implementation of GCG principles in its daily operations.

GCG principles in the governance guideline provide the foundational concept for GCG in line with the international best practices. Recommendations on the implementation of aspects and principles of GCG in the governance guideline are a set of standards for the implementation of aspects and

Perusahaan Terbuka untuk mengimplementasikan prinsip tata kelola.

Bank BNP selaku perusahaan terbuka telah menerapkan prinsip dan rekomendasi tata kelola perusahaan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, serta Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

Pedoman tata kelola sebagaimana dimaksud mencakup 5 (lima) aspek, 8 (delapan) prinsip, dan 25 (dua puluh lima) rekomendasi penerapan aspek dan prinsip tata kelola perusahaan sebagaimana tercantum dalam lampiran SEOJK, antara lain sebagai berikut:

principles of GCG, expected to be implemented by public companies in their corporate governance.

As a public company, Bank BNP has implemented the principles and recommendations of corporate governance as stipulated in OJK Regulation (POJK) No. 21/POJK.04/2015 on Implementation of Corporate Governance Guideline for Public Companies, and OJK Circular (SEOJK) No. 32/SEOJK.04/2015 on GCG Guideline.

The corporate governance guideline as mentioned above covers five aspects, eight principles, and 25 recommendations for the implementation of aspects and principles of GCG as stated in the governance guideline prescribed by the SEOJK. It includes the following:

	Prinsip & Rekomendasi *Principles & Recommendations*	**Telah Dipatuhi/Dijelaskan** *Comply/Explain*
A.	**Hubungan Perusahaan Terbuka Dengan Pemegang Saham Dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham** **Relationship of the Public Company with Shareholders in Ensuring Shareholders' Rights**	
Prinsip/ *Principle* 1	Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Enhancing the Value of General Meeting of Shareholders (GMS).	
1.1	Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (voting) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham. The Public Company has a means or technical procedures for voting both in an open and closed manner, that uphold independence and interest of the shareholders.	Telah dipenuhi Complied with
1.2	Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan. All members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Public Company attend the Annual GMS.	Telah dipenuhi (absensi RUPS Tahunan) *Complied with (AGMS attendance sheet)*
1.3	Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun. Minutes of the GMS are made available on the Public Company's website for at least one year.	Telah dipenuhi *Complied with* (www.bankbnp.com)
Prinsip/ *Principle* 2	Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor Enhancing the Quality of Communications of the Public Company with Shareholders or Investors	
2.1	Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor. The Public Company has a communications policy to deal with shareholders or investors.	Pokok-pokok kebijakan komunikasi masih dalam tahap finalisasi. Points in the communications policy are being finalized.
2.2	Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web. The Public Company discloses its communications policy to deal with shareholders or investors, on its website.	Sedang dalam proses. In process.

	Prinsip & Rekomendasi *Principles & Recommendations*	**Telah Dipatuhi/Dijelaskan** *Comply/Explain*
B.	**Fungsi dan Peran Dewan Komisaris** **Board of Commissioners Functions and Roles**	
Prinsip/ *Principle* 3	Memperkuat keanggotaan dan komposisi Dewan Komisaris. Strengthening the Board of Commissioners Membership and Composition.	
3.1	Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka. Determination of the number of members of the Board of Commissioners takes into account the Public Company's conditions.	Telah dipenuhi Complied with
3.2	Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. Determination of the Board of Commissioners composition takes into account the aspect of diversity in expertise, knowledge, and experience required.	Telah dipenuhi Complied with
Prinsip/ *Principle* 4	Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Increasing the Quality of Board of Commissioners Execution of Duties and Responsibilities.	
4.1	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (*self-assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris. The Board of Commissioners has a self-assessment policy to evaluate the Board of Commissioners performance.	Telah dipenuhi Complied with
4.2	Kebijakan penilaian sendiri (*self-assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka. The self-assessment policy to evaluate the Board of Commissioners performance is disclosed in the Public Company's Annual Report.	Telah dipenuhi Complied with
4.3	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. The Board of Commissioners has a policy regarding resignation of members of the Board of Commissioners should they be involved in financial crimes.	BOC telah memiliki kebijakan terkait pengunduran diri, namun untuk yang mengatur khusus mengenai kejahatan keuangan masih dalam proses penyusunan. BOC has a policy on resignation, however an exclusive policy for resignation due to involvement in financial crime is currently being developed.
4.4	Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi. The Board of Commissioners or the committee executing the Nomination & Remuneration function has a succession policy in place for the nomination of members of the Board of Directors.	Telah dipenuhi dalam Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi. Complied with, through the Remuneration and Nomination Charter.
C.	**Fungsi dan Peran Direksi** **Board of Directors Functions and Roles**	
Prinsip/ *Principle* 5	Memperkuat keanggotaan dan komposisi Direksi. Strengthening the Board of Directors Membership and Composition.	

	Prinsip & Rekomendasi *Principles & Recommendations*	Telah Dipatuhi/Dijelaskan *Comply/Explain*
5.1	Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektifitas dalam pengambilan keputusan. Determination of the number of members of the Board of Directors takes into account the Public Company's conditions and effectiveness in decisionmaking.	Telah dipenuhi Complied with
5.2	Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. Determination of Board of Directors composition takes into account the aspect of diversity in expertise, knowledge, and experience required.	Telah dipenuhi Complied with
5.3	Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi. Members of the Board of Directors that are in charge of finance and accounting have expertise and/or knowledge in accounting.	Telah dipenuhi dan disesuaikan dalam *Board Manual* Complied with, Board Manual adjusted accordingly
Prinsip/ *Principle* 6	Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi. Increasing the Quality of Board of Directors Execution of Duties and Responsibilities.	
6.1	Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (*self-assessment*) untuk menilai kinerja Direksi. The Board of Directors has a self-assessment policy to evaluate the Board of Directors performance.	Telah dipenuhi Complied with
6.2	Kebijakan penilaian sendiri (*self-assessment*) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka. The self-assessment policy to evaluate the Board of Directors performance is disclosed in the Public Company's Annual Report.	Telah dipenuhi Complied with
6.3	Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. The Board of Directors has a policy regarding resignation of members of the Board of Directors should they be involved in financial crimes.	BOD telah memiliki kebijakan terkait pengunduran diri, namun untuk yang mengatur khusus mengenai kejahatan keuangan masih dalam proses penyusunan. BOD has a policy on resignation, however an exclusive policy for resignation due to involvement in financial crime is currently being developed.
D.	**Partisipasi Pemangku Kepentingan** **Stakeholders Participation**	
Prinsip/ *Principle* 7	Meningkatkan aspek Tata Kelola Perusahaan melalui partisipasi pemangku kepentingan. Enhancing the Aspect of Corporate Governance via Stakeholder Engagement.	
7.1	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya *insider trading*. The Public Company has a policy in place to prevent insider trading.	Masih dalam tahap penyusunan Currently being prepared
7.2	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan Anti-Fraud. The Public Company has an anti-corruption and anti-fraud policy.	Telah dipenuhi (kebijakan strategi Anti-Fraud) *Complied with (anti-fraud strategic policy)*

	Prinsip & Rekomendasi *Principles & Recommendations*	**Telah Dipatuhi/Dijelaskan** *Comply/Explain*
7.3	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor. The Public Company has a policy on the selection and enhancement of capacity of suppliers or vendors.	Telah dipenuhi Complied with
7.4	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur. The Public Company has a policy on the fulfillment of creditors' rights.	Masih dalam tahap penyusunan Currently being prepared
7.5	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem *whistleblowing*. The Public Company has a whistleblowing system policy.	Telah dipenuhi Complied with
7.6	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan. The Public Company has a policy to provide long term incentive to the Board of Directors and the employees.	Telah dipenuhi Complied with
E.	**Keterbukaan Informasi** **Information Disclosure**	
Prinsip/ *Principle* 8	Meningkatkan pelaksaaan keterbukaan informasi. Improving Information Disclosure.	
8.1	Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi. The Public Company utilizes information technology in a wide sense, beyond the use of website, as media for information disclosure.	Telah dipenuhi (FB, Twitter, YouTube) *Complied with (FB, Twitter, YouTube)*
8.2	Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali. The Public Company's Annual Report discloses the ultimate recipient of profits based on the Public Company's share ownership of at least 5% (five percent), aside from the disclosure of the ultimate recipient of profits based on the Public Company's share ownership through the majority shareholders and controlling shareholders.	Telah dipenuhi *Complied with*

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Corporate Social Responsibility

268 Filosofi & Dasar Kebijakan CSR
CSR Philosophy & Policy

268 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Pelestarian Lingkungan
Corporate Social Responsibility towards Environmental Conservation

269 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Pengembangan Sosial & Kemasyarakatan
Corporate Social Responsibility towards Social & Community Empowerment

270 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Praktik Ketenagakerjaan, Kesehatan & Keselamatan Kerja
Corporate Social Responsibility in Employment Practices and Occupational Health & Safety

270 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kepada Nasabah
Our Responsibility towards Customers

271 Edukasi Masyarakat di Bidang Perbankan
Banking Education for the Public

Filosofi & Dasar Kebijakan CSR

Bank BNP merumuskan kebijakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 1 ayat 3. Kebijakan ini menyatakan bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Bank untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Bank sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Pelestarian Lingkungan

Bank menempatkan komitmen terhadap lingkungan hidup maupun lingkungan sosial sebagai hal yang utama dan tidak terpisahkan dari kegiatan operasi usahanya. Lingkungan yang baik akan mempengaruhi secara positif segala aktivitas keseharian masyarakat. Bank BNP menyoroti hal ini dalam memperhatikan kualitas hidup masyarakat. Dengan kepedulian tinggi terhadap pelestarian lingkungan, Bank secara konsisten melakukan kegiatan untuk menunjang terwujudnya lingkungan yang baik melalui kegiatan-kegiatan berikut.

Bank BNP menggunakan lampu hemat energi (LED) di kantor Bank, baik kantor pusat, cabang, kantor cabang pembantu, kas, kantor fungsional operasional dan non-operasional.

Bank BNP telah menerapkan sistem *paperless* dalam beberapa proses di Bank, menggunakan kertas bekas untuk pembuatan draft dan konsep, dan menghemat penggunaan kertas melalui pemberian informasi ke seluruh jaringan kantor melalui intranet.

Bank BNP menerapkan sistem *car pooling* untuk memenuhi permintaan kendaraan operasional, dengan tujuan mengurangi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) sekaligus mengurangi kemacetan dan emisi atau asap yang dihasilkan dari penggunaan kendaraan. Bank juga melakukan penggantian kendaraan operasional dengan kapasitas mesin (cc) lebih kecil, serta melakukan pemeriksaan dan perawatan secara berkala, dengan salah satu keuntungannya adalah menurunkan emisi kendaraan.

CSR Philosophy & Underlying Policy

Bank BNP has formulated its Corporate Social Responsibility (CSR) policy based on the Law No. 40/2007 on Limited Liability Companies, article 1 paragraph 3. This CSR policy stipulates that Social and Environmental Responsibility should be part of the Bank's commitment in its participation in a sustainable economic development, in order to improve the quality of life and the environment in meaningful ways, not only for the Bank itself but also the surrounding communities and the general public.

Corporate Social Responsibility in Environmental Conservation

The Bank is committed to the preservation to the environment and society, and this commitment is inseparable from its business operations. A good environment will positively impact on all activities of the society. Bank BNP is acutely aware of this and is taking pains to improve the living conditions of the society. As it is concerned with environmental conservation issues, the Bank has consistently carried out activities aiming to support the creation and preservation of a livable environment, as explained below.

Bank BNP uses low-energy lightbulbs (LED) in its offices, including its head office, branch offices, sub-branch offices, cash offices, as well as operational and non-operational functional offices.

Bank BNP has also implemented the paperless system to perform various processes in the Bank. Used paper is used for drafting and concepting, and paper use in general is reduced through a campaign disseminated via intranet to its entire office network.

Bank BNP implements a car pooling system to fulfill the needs for operational vehicles, with an aim to reduce the use of fossil fuel in its operations, while also causing less traffic jams and emitting less pollutants from the use of its motorized vehicles. The Bank has replaced its operational vehicles with those with lower engine capacity (cc), as well as conducted regular checking and maintenance on its vehicles, and thus managed to reduce vehicle-related emissions.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Pengembangan Sosial & Kemasyarakatan

Kesejahteraan masyarakat sangat penting demi keberlangsungan kegiatan operasional Bank, karena secara langsung atau tidak langsung akan melibatkan masyarakat. Bank meyakini peningkatan kesejahteraan masyarakat pada akhirnya akan mendukung pengembangan bisnis Bank secara berkelanjutan. Bank berpartisipasi dalam meningkatkan kehidupan masyarakat melalui program pemberdayaan sosial kemasyarakatan yang meliputi program-program yang dijelaskan berikut.

Bekerja sama dengan Unit Donor Darah PMI Kabupaten Bandung, Bank BNP menyelenggarakan kegiatan Donor Darah rutin 3 bulanan bertempat di Kantor Pusat Bandung. Kegiatan ini rata-rata diikuti oleh lebih dari 75 orang karyawan yang memenuhi syarat sebagai pendonor. Total biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan ini di tahun 2017 adalah Rp5.264.782.

Bank BNP bekerja sama dengan The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ (BTMU) dan anggota konglomerasinya memberikan bantuan berupa renovasi bangunan ruang perpustakaan di Kecamatan Ujung Berung, Bandung. Di samping memberikan bantuan renovasi fisik dilakukan pula pemberian sumbangan buku bacaan untuk perpustakaan dan edukasi dini kepada anggota perpustakaan dan masyarakat sekitar. Total biaya untuk kegiatan ini adalah Rp3.079.900.

Corporate Social Responsibility in Social & Community Development

Social wellbeing is an important factor that plays a substantial role in ensuring the Bank's continued operations in the long run, as the Bank's business both directly and indirectly relies on the developments in the society. The Bank believes that improving social welfare will eventually strengthens the sustainability of its business. The Bank participates in the improvement of social welfare by conducting community empowerment programs, as detailed below.

In collaboration with the Bandung Regency's Indonesian Red Cross Blood Donation Unit, once every three months Bank BNP organized blood drive at its Head Office in Bandung. This activity on average garnered more than 75 participants from the Bank's own employees that qualified as donors. Total expenditure for this activity in 2017 was Rp5,264,782.

Bank BNP partnered with The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ (BTMU) and members of the conglomeration to provide assistance in the form of a library construction in Ujung Berung Subdistrict, Bandung. In addition to performing physical renovation, the Bank also donated books to the library, and provided early education to the library members and the surrounding communities. Total expenditure for this event was Rp3,079,000.

Bank BNP bekerja sama dengan The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ (BTMU) dan anggota konglomerasinya memberikan bantuan berupa renovasi bangunan ruang perpustakaan di Kecamatan Ujung Berung, Bandung pada bulan November 2017.

Bank BNP collaborated with The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ (BTMU) and the members of its conglomeration to renovate a library at Ujung Berung Subdistrict, Bandung, in November 2017.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Praktik Ketenagakerjaan, Kesehatan & Keselamatan Kerja

Bank BNP berkomitmen untuk memastikan seluruh karyawannya telah mendapatkan hak dan kesempatan yang sama terhadap akses fasilitas ketenagakerjaan serta kesehatan dan keselamatan kerja (K3). Selama tahun 2017, Bank BNP telah melaksanakan beberapa kegiatan terkait dengan akses K3 di lingkungan Perusahaan. Dalam bidang ketenagakerjaan, Bank BNP senantiasa menyediakan kesempatan yang setara bagi seluruh karyawannya untuk meniti karier sesuai kompetensi dan pilihan mereka. Kesempatan diberikan tanpa membedakan gender, latar belakang pendidikan, keluarga, agama, ataupun suku bangsa karyawan. Ini didukung dengan penyelenggaraan berbagai program pelatihan, dengan tujuan agar karyawan dapat menampilkan kinerja terbaik di pekerjaannya masing-masing.

Dalam bidang kesehatan, Bank BNP memberikan fasilitas paket berobat dan fasilitas kacamata atas tanggungan Bank bagi karyawan. Bank BNP menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan secara berkala, dan mengikutsertakan semua karyawan dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Bank juga mendukung kebiasaan hidup sehat para karyawannya dengan memberikan fasilitas olah raga antara lain futsal, zumba, yoga, bulu tangkis, dan lain-lain.

Dalam bidang keselamatan kerja, secara rutin Bank BNP melaksanakan simulasi evakuasi bencana di sejumlah gedung kantornya, dalam rangka memastikan kesiapan setiap unit kerja dalam menghadapi bencana alam ataupun kecelakaan kerja.

Bank BNP juga menjaga komitmennya untuk melindungi hak karyawan dalam hal menyampaikan pendapat dan berserikat, sesuai peraturan dan norma yang berlaku.

Tanggung Jawab Perusahaan kepada Nasabah

Perlindungan terhadap konsumen (nasabah/non-nasabah) merupakan kewajiban setiap Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK). Oleh karena itu, Bank BNP menerapkan prinsip perlindungan konsumen dalam setiap aktivitas dan kegiatan usaha Bank.

Bank BNP telah memiliki CP-05 versi 0 tanggal 30 Mei 2015 tentang Kebijakan Perlindungan Konsumen Kebijakan Perlindungan Konsumen K.U.SDM-15 tentang Kebijakan Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah sebagai panduan bagi setiap unit kerja di Bank dalam melaksanakan kegiatan perlindungan konsumen.

Corporate Social Responsibility in Employment Practices and Occupational Health & Safety

Bank BNP is committed to ensuring that all of its employees receive equal access to occupational health and safety measures as well as employment-related facilities. In 2017, Bank BNP conducted a number of activities related to occupational health and safety in its offices. In terms of employment practices, Bank BNP provides equal opportunity to all of its employees to pursue their career in accordance with their competence and choice. The opportunity is provided to them regardless of their gender, educational background, family background, religion, or their ethnicity. This was supported also by the execution of various training and development programs aimed at developing their skills, so that they can perform to the best of their abilities in their respective duties.

In terms of health care, Bank BNP provides medical attention facility and spectacles allowance to its employees. The Bank conducts regular medical check-ups and registered all of its employees in Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) program. The Bank also promotes healthy lifestyles to its employes by providing sports facilities, including for futsal, zumba, yoga, badminton, and others.

In terms of occupational safety, Bank BNP regularly conducts simulation of disaster evacuation in many of its offices, to ensure the preparedness of each one of its work units to respond properly to disasters as well as occupational accidents.

Furthermore, Bank BNP upholds its commitment to protecting employees' rights to express their opinions and to form unions, in accordance with the prevailing regulations and norms.

Our Responsibility towards Customers

Given that every party that is engaged in the financial services sector has the obligation to provide consumer protection to their customers and non-customers alike, Bank BNP adheres to the consumer protection principle in conducting every business activity.

Bank BNP has a Consumer Protection Policy, K.U.SDM-15 titled Policy for Handling and Resolving Customer Complaints, to serve as a guideline for every work unit within the Bank in their consumer protection-related activities.

Di tahun 2017, Bank BNP menyelenggarakan *Customer Gathering* berupa *Talkshow* bertemakan "Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan (Perppu No. 1 Tahun 2017)" bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak. Kegiatan ini dilakukan di Bandung dan Jakarta dalam rangka meningkatkan edukasi dan literasi finansial nasabah Bank BNP. Melalui *talkshow* tersebut Bank juga memberikan informasi secara langsung kepada nasabah mengenai latar belakang terbitnya Perpu No. 1/2017. Kegiatan ini sekaligus merupakan bagian dari kegiatan *BNP Business Club* untuk mendekatkan diri dengan mitra Bank BNP sehingga tercipta sinergi yang baik dan berdampak positif terhadap kebersamaan dalam kemajuan bersama antara Bank BNP dengan mitranya (dan nasabah).

Untuk meningkatkan pelayanan bagi para nasabah, Bank BNP telah menyediakan situs web untuk berinteraksi dengan nasabah, sekaligus memberikan ruang bagi mereka untuk menyampaikan kritik dan saran selain menerima informasi mengenai produk dan jasa perbankan Bank. Situs web ini senantiasa diperbarui dan dapat ditemukan di www.bankbnp.com.

Bank BNP aktif di media sosial, dengan akun resmi pada jejaring sosial Twitter di @Bank_BNP, Facebook di BankBNP, Instagram di bankbnp, dan untuk produk KTA Mirai+-nya, aktivitas sosial medianya dilakukan di @Mirai+ dan untuk YouTube di BNP MIRAIPlus. Di media sosial tersebut, Bank BNP menyampaikan informasi terkait kegiatan, produk dan jasanya, sekaligus menerima kritik dan saran terkait layanan Bank.

Nasabah yang ingin melakukan pengaduan melalui jalur formal dapat langsung mengirim e-mail ke pengaduan.nasabah@bankbnp.com.

Edukasi Masyarakat di Bidang Perbankan

Bank BNP telah menjalankan sejumlah kegiatan edukasi keuangan di tahun 2017, sebagai salah satu upaya untuk meningkatan pemahaman masyarakat terhadap perbankan. Bank BNP melakukan kegiatan edukasi keuangan kepada masyarakat terutama pelajar dan mahasiswa tentang manfaat menabung serta mengajak mereka untuk menumbuhkan budaya menabung sejak usia dini.

Pada bulan Maret 2017, bertempat di Institut Teknologi Harapan Bangsa Bandung (ITHB), Bank BNP melakukan Kegiatan Edukasi Perbankan tentang pengetahuan umum mengenai perbankan, *financial technology (fintech)*, dan tata kelola informasi teknologi (IT) kepada 70 mahasiswa/i program studi Manajemen semester 6, dengan memberikan

In 2017, Bank BNP held a Customer Gathering event in the form of a talkshow, themed "Access to Financial Information for Taxation Purposes (Perppu No. 1/2017)" in collaboration with the Directorate General of Taxes. This event was held in Bandung and Jakarta to provide financial education to and improve financial literacy of Bank BNP's customers. Through this talkshow the Bank also provided explanation to its customers regarding the context of the issuance of Perppu No. 1/2017. This event was also part of BNP Business Club's activities aiming to foster rapport with Bank BNP's partners, in order to create a beneficial synergy that may give a positive impact on the mutual growth of Bank BNP's as well as its partners' (including its customers').

To further improve the quality of service to its customers, Bank BNP has provided a corporate website to enable interaction with customers, and also to provide them with a means to deliver or submit their criticisms and advices, in addition to receiving information on the banking products and services offered by the Bank. This website is regularly updated and is available on www.bankbnp.com.

Bank BNP is also active on social media, having an official account on Twitter (@Bank_BNP), Facebook (BankBNP), Instagram (bankbnp), and for its KTA Mirai+, its social media accounts are @Mirai+ and BNP MIRAIPlus on YouTube. On these social media, Bank BNP delivers relevant information on its activities, products, and services, in addition to accepting criticisms and inputs related to the Bank's service.

Customers wishing to submit their grievances through formal means may directly e-mail Bank BNP via pengaduan.nasabah@bankbnp.com.

Banking Education for the Public

Bank BNP conducted a series of financial education activities in 2017 as a means to improve the public's understanding regarding banking. Bank BNP performed this financial education activity to the public, in particular to the students, to describe the benefits of saving and to encourage them to make saving a habit since a young age.

In March 2017, at Institut Teknologi Harapan Bangsa Bandung (ITHB), Bank BNP conducted the Banking Education activity, in which general knowledge on banking, financial technology (fintech), and information technology governance, were delivered to 70 sixth-semester students from the Management study program. The materials

pengetahuan dasar mengenai bank dan produk-produk perbankan, pengetahuan tentang penggunaan teknologi dalam aktivitas perbankan, serta risiko-risiko teknologi informasi yang harus dikelola secara memadai.

provided included general knowledge on banks and banking products, knowledge on the use of technology in banking activities, as well as information technology-related risks that must be adequately managed.

Pada bulan Maret 2017, bertempat di Institut Teknologi Harapan Bangsa Bandung (ITHB), Bank BNP melakukan Kegiatan Edukasi Perbankan tentang pengetahuan umum mengenai perbankan, *financial technology* (*fintech*), dan tata kelola informasi teknologi (IT) kepada mahasiswa/i.

In March 2017, at the Institut Harapan Bangsa Bandung (ITHB), Bank BNP conducted the Banking Education activity, providing general knowledge on banking, financial technology (fintech), and information technology (IT) governance to the students.

Dilanjutkan pada bulan September 2017, bertempat di Aula Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR) Bandung, Bank BNP melaksanakan kegiatan Edukasi Perbankan dalam rangka kegiatan edukasi, Literasi Keuangan berupa Kuliah Umum Pengenalan Program Pencegahan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Teroris di Kalangan Generasi Muda. Kegiatan tersebut dihadiri oleh sekitar 200 mahasiswa/i Fakultas Ekonomi UNPAR semester 3, 5, dan 7, yang didampingi oleh dosen, Ketua Jurusan, dan Prodi UNPAR.

Furthermore, in September 2017 at the Economics Faculty Hall of Parahyangan Catholic University (UNPAR), Bandung, Bank BNP also conducted another Banking Education activity, Financial Literacy general lecture on Introduction to Anti-Money Laundering and Financing of Terrorism among Young People. The event was attended by around 200 students from UNPAR's Economics Faculty in their third, fifth, and seventh semesters. They were accompanied by their lecturers as well as the Study Program Head and Dean.

Bertempat di Aula Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR) Bandung, Bank BNP melaksanakan kegiatan Edukasi Perbankan dalam rangka kegiatan edukasi, Literasi Keuangan berupa Kuliah Umum Pengenalan Program Pencegahan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Teroris di Kalangan Generasi Muda pada bulan September 2017.

At the Main Hall of the Faculty of Economics of Parahyangan Catholic University (UNPAR) Bandung, Bank BNP conducted Banking Education activity for financial literacy, in the form of a Public Lecture on the Introduction to Anti-Money Laundering and Prevention of Financing for Terrorism among Young People, in September 2017.

Tujuan dilakukannya edukasi perbankan mengenai Pengenalan Program Pencegahan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Teroris di Kalangan Generasi Muda adalah:

- Agar setiap WNI memahami dan berperan aktif dalam upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme;
- Agar generasi muda mengetahui dan memahami tipologi, metode/modus dan dampak tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Sebagai bentuk implementasi Peraturan Presiden (Perpres) No. 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), OJK kembali menyelenggarakan kegiatan "Bulan Inklusi Keuangan" pada Oktober 2017. Dalam rangka mendukung program tersebut, Bank BNP berpartisipasi melalui Kegiatan Inklusi Keuangan melalui Edukasi dan Kampanye Program Inklusi Keuangan bertemakan "Bugar Bersama Bank BNP" yang diselenggarakan pada 22 Oktober 2017 di kantor pusatnya. Edukasi dilaksanakan dengan memperkenalkan produk unggulan Bank BNP. Selain edukasi, Bank BNP mengajak masyarakat untuk ikut senam kebugaran zumba.

The banking education on Introduction to Anti-Money Laundering and Financing of Terrorism among Young People carried a two-fold purpose:

- So that every Indonesian citizen can understand and actively play a part in preventing money laundering and financing of terrorism;
- So that the young people become more aware of the typology, methods and modes as well as impacts of the crime of money laundering and financing of terrorism.

As an implementation of the Presidential Regulation No. 82/2016 on the Inclusive Financial National Strategy, in 2017 OJK held the "Financial Inclusion Month" festivities in October 2017. To provide support to the program, Bank BNP participated in the Financial Inclusion Activity by conducting the Financial Inclusion Program Campaign and Education themed "Get Fit with Bank BNP" on 22 October 2017 at its head office. To educate the participants, Bank BNP introduced its flagship products to them, and also invited everyone attending to get fit by participating in a zumba exercise held as part of the event.

Bank BNP melakukan kegiatan Edukasi dan Kampanye Program Inklusi Keuangan bertema "Bugar Bersama Bank BNP", untuk mendukung "Bulan Inklusi Keuangan" yang diinisiasi oleh OJK. Selain edukasi, Bank BNP mengajak masyarakat untuk ikut senam kebugaran zumba.

Bank BNP conducted the Financial Inclusion and Education Program and Campaign themed "Get Fit with Bank BNP" to support the "Financial Inclusion Month" movement initiated by the OJK. Bank BNP also invited everyone attending to get fit by participating in a zumba exercise.

Pada bulan November 2017, Bank BNP menerima kunjungan siswa/i dari TKK Trimulia Bandung. Para siswa/i diperkenalkan mengenai Bank, beserta fungsi dan kegiatan yang ada di Bank serta mengajarkan siswa/i cara menabung dan memberikan pemahaman mengenai manfaat menabung sejak dini.

In November 2017, Bank BNP welcomed the visit of kindergarten students from TKK Trimulia, Bandung. These students were introduced to the Bank and they were informed of the functions and activities of the Bank. They were also taught about the benefits of saving and encouraged to save from an early age.

Pada bulan November 2017, Bank BNP menerima kunjungan siswa/i dari TKK Trimulia Bandung. Para siswa/i diperkenalkan mengenai Bank, beserta fungsi dan kegiatan yang ada di Bank serta mengajarkan siswa/i cara menabung dan memberikan pemahaman mengenai manfaat menabung sejak dini.

In November 2017, Bank BNP hosted the students from Trimulia Kindergarten, Bandung. These students were introduced to the Bank, as well as the functions and activities in the Bank, and then taught about savings and the importance of saving from an early age.

Edukasi perbankan juga dilakukan pada bulan November 2017 bertempat di Kelurahan Cigending Ujung Berung Bandung kepada masyarakat terutama anak-anak, mengenai budaya dan manfaat menabung sejak dini.

Sepanjang tahun 2017 Bank BNP telah melakukan edukasi, literasi dan inklusi keuangan dengan total biaya Rp 51.566.500,-

In November 2017, banking education activity was also held in Cigending Village, Ujung Berung, Bandung, involving the communities, in particular children, whom were taught about the benefits of saving from a young age.

Total expense incurred for the Bank's banking education and financial literacy activities in 2017 was Rp51,566,500.

Laporan Keuangan

Financial Report

PT BANK NUSANTARA PARAHYANGAN Tbk

LAPORAN KEUANGAN/
FINANCIAL STATEMENTS

UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016/
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2017 AND 2016

DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN/
AND INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

	Halaman/ Page	
SURAT PERNYATAAN DIREKSI		**DIRECTORS' STATEMENT LETTER**
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN		**INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT**
LAPORAN KEUANGAN – Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016		**FINANCIAL STATEMENTS** – For the years ended December 31, 2017 and 2016
Laporan Posisi Keuangan	1	Statements of Financial Position
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	3	Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
Laporan Perubahan Ekuitas	4	Statements of Changes in Equity
Laporan Arus Kas	5	Statements of Cash Flows
Catatan atas Laporan Keuangan	6	Notes to Financial Statements

BANK BNP

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB
ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN – TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017 dan 2016
PT BANK NUSANTARA PARAHYANGAN Tbk

BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY
FOR FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31,2017 and 2016
PT BANK NUSANTARA PARAHYANGAN Tbk

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

We, the undersigned below :

1. Nama / *Name* — **Hideki Nakamura**
   Alamat Kantor / *Office Address* — **Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Bandung – 40132, Indonesia**
   Alamat Domisili Sesuai KTP / *Domicile as Stated in ID Card* — **De Bale Pakuan Unit B-8, Jl. Ciumbuleuit no. 197 Bandung - Indonesia**
   Nomor Telephon / *Telephone Number* — **(022) 82560100**
   Jabatan / *Position* — **Presiden Direktur / *President Director***

2. Nama / *Name* — **Eiichiro Sakai**
   Alamat Kantor / *Office Address* — **Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Bandung – 40132, Indonesia**
   Alamat Domisili Sesuai KTP / *Domicile as Stated in ID Card* — **Grand Royal Panghegar Apartment Tower A Royal Suite 9B-01 Jl. Merdeka No. 2 Bandung – Indonesia**
   Nomor Telephon / *Telephone Number* — **(022) 82560100**
   Jabatan / *Position* — **Direktur / *Director***

menyatakan bahwa :

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk.
2. Laporan keuangan PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk telah dimuat secara lengkap dan benar.
   b. Laporan keuangan PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk.

state that :

1. *We are responsible for the preparation and presentation of the financial statements.*
2. *The financial statements of PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*
3. a. *All information contained in the financial statements of PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk is complete and correct.*
   b. *The financial statements of PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk do not contain misleading material information or facts, and do not omit material information and facts.*
4. *We are responsible for the PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk internal control system.*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement letter is made truthfully.

Bandung, 07 Maret / March 2018

Atas nama dan mewakili Direksi / For and on behalf of The Board of Directors

Hideki Nakamura
Presiden Direktur / *President Director*

Eiichiro Sakai
Direktur / *Director*

PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk.
Head Office: Jalan. Ir. H. Juanda No. 95, Bandung - 40132, West Java, Indonesia
T : +62-22-82560100 F: +62-22-2514580 SWIFT: NUPAIDJ6

Deloitte.

Satrio Bing Eny & Rekan
Registered Public Accountants
License No. 89/KM.1/2017
The Plaza Office Tower 32nd Floor
Jl. M.H. Thamrin Kav 28-30
Jakarta 10350
Indonesia

Tel: +62 21 5081 8000
Fax: +62 21 2992 8200, 2992 8300
Email: iddttl@deloitte.com
www.deloitte.com/id

Laporan Auditor Independen

No. GA118 0140 BNP RW

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk ("Bank") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2017, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Independent Auditors' Report

No. GA118 0140 BNP RW

The Stockholders, Board of Commissioners and Directors

PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk

We have audited the accompanying financial statements of PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk ("the Bank"), which comprise the statements of financial position as of December 31, 2017, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity, and statement of cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's Responsibility for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

Satrio Bing Eny & Rekan

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee ("DTTL"), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as "Deloitte Global") does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/id/about to learn more about our global network of member firms.

Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk tanggal 31 Desember 2017, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal Lain

Laporan keuangan PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk tanggal 31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini tanpa modifikasian atas laporan keuangan tersebut pada tanggal 28 Februari 2017.

We believe the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk as of December 31, 2017, and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Other Matters

The financial statements of PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk as of December 31, 2016 and for the year then ended, were audited by another independent auditor who expressed an unmodified opinion on those financial statements on February 28, 2017.

SATRIO BING ENY & REKAN

Riniek Winarsih
Izin Akuntan Publik/*License Public Accountant* No. AP.0569

7 Maret 2018/*March 7, 2018*

PT BANK NUSANTARA PARAHYANGAN Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2017 DAN 2016
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK NUSANTARA PARAHYANGAN Tbk
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
DECEMBER 31, 2017 AND 2016
(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember/ *December 31,* 2017	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *December 31,* 2016	
	Rp		Rp	
ASET				**ASSETS**
KAS	88.984.153	5	88.120.683	CASH
GIRO PADA BANK INDONESIA	463.950.330	6	433.528.205	DEMAND DEPOSITS WITH BANK INDONESIA
GIRO PADA BANK LAIN		7		DEMAND DEPOSITS WITH OTHER BANKS
Pihak berelasi	6.849.926		748.736	Related parties
Pihak ketiga	104.698.182		360.606.458	Third parties
Jumlah	111.548.108		361.355.194	Total
PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN	391.923.355	8	417.881.847	PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA AND OTHER BANKS
EFEK-EFEK DIMILIKI HINGGA JATUH TEMPO	665.846.239	9	1.012.183.450	HELD-TO-MATURITY SECURITIES
KREDIT		10		LOANS
Pihak berelasi	72.232.249	37	41.294.197	Related parties
Pihak ketiga	5.772.019.502		5.272.334.624	Third parties
	5.844.251.751		5.313.628.821	
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	(156.580.752)		(107.700.767)	Less: allowance for impairment losses
Jumlah	5.687.670.999		5.205.928.054	Total
TAGIHAN AKSEPTASI	-	11	6.330.054	ACCEPTANCES RECEIVABLE
ASET PAJAK TANGGUHAN	9.470.582	34	-	DEFERRED TAX ASSETS
ASET TETAP - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 71.787.283 pada 31 Desember 2017 dan Rp 73.872.586 pada 31 Desember 2016	30.473.524	12	27.619.367	PREMISES AND EQUIPMENT - net of accumulated depreciation of Rp 71,787,283 at December 31, 2017 and Rp 73,872,586 at December 31, 2016
ASET TAK BERWUJUD - setelah dikurangi akumulasi amortisasi sebesar Rp 8.015.533 pada 31 Desember 2017 dan Rp 6.003.161 pada 31 Desember 2016	4.625.586	13	3.227.384	INTANGIBLE ASSETS - net of accumulated amortization of Rp 8,015,533 at December 31, 2017 and Rp 6,003,161 at December 31, 2016
ASET LAIN-LAIN BERSIH	126.538.751	14	149.608.175	OTHER ASSETS - NET
JUMLAH ASET	7.581.031.627		7.705.782.413	**TOTAL ASSETS**

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

	31 Desember/ *December 31,* 2017 Rp	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *December 31,* 2016 Rp	
LIABILITAS DAN EKUITAS				**LIABILITIES AND EQUITY**
LIABILITAS				**LIABILITIES**
LIABILITAS SEGERA	10.993.226	15	12.786.054	LIABILITIES PAYABLE IMMEDIATELY
SIMPANAN		16		DEPOSITS
Pihak berelasi	331.486.860	37	508.696.165	Related parties
Pihak ketiga	5.886.693.630		5.803.606.981	Third parties
Jumlah	6.218.180.490		6.312.303.146	Total
SIMPANAN DARI BANK LAIN	93.037.787	17	53.357.530	DEPOSITS FROM OTHER BANKS
LIABILITAS AKSEPTASI		11		ACCEPTANCES PAYABLE
Pihak berelasi	-	37	4.011.504	Related parties
Pihak ketiga	-		6.330.054	Third parties
Jumlah	-		10.341.558	Total
UTANG PAJAK	9.332.313	33	9.439.924	TAXES PAYABLE
PINJAMAN SUBORDINASI	80.509.545	18	79.945.815	SUBORDINATED LOANS
LIABILITAS LAIN-LAIN	31.129.900	19	30.098.596	OTHER LIABILITIES
JUMLAH LIABILITAS	6.443.183.261		6.508.272.623	**TOTAL LIABILITIES**
EKUITAS				**EQUITY**
MODAL SAHAM - nilai nominal Rp 500 per saham (nilai penuh) Modal dasar - 1.000.000.000 saham Modal ditempatkan dan disetor 676.833.882 saham	338.416.941	20	338.416.941	CAPITAL STOCK - Rp 500 par value per share (full amount) Authorized - 1,000,000,000 shares subscribed and paid-up - 676,833,882 shares
TAMBAHAN MODAL DISETOR	221.037.590	21	221.037.590	ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL
SALDO LABA				RETAINED EARNINGS
Ditentukan penggunaannya	72.580.036	22	71.770.036	Appropriated
Tidak ditentukan penggunaannya	505.813.799		566.285.223	Unappropriated
JUMLAH EKUITAS	1.137.848.366		1.197.509.790	**TOTAL EQUITY**
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	7.581.031.627		7.705.782.413	**TOTAL LIABILITIES AND EQUITY**

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

PT BANK NUSANTARA PARAHYANGAN Tbk
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK NUSANTARA PARAHYANGAN Tbk
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2017 AND 2016
(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)

	2017 Rp	Catatan/ *Notes*	2016 Rp	
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL				**OPERATING INCOME AND EXPENSES**
Pendapatan dan beban bunga				Interest income and expenses
Pendapatan bunga	824.899.742	23	905.311.266	Interest income
Beban bunga	(367.811.880)	24	(419.598.008)	Interest expense
Pendapatan bunga-bersih	457.087.862		485.713.258	Interest income-net
Pendapatan operasional lainnya				Other operating income
Pendapatan provisi dan komisi lainnya	3.050.619	25	3.473.286	Other fees and commissions
Pendapatan transaksi devisa-bersih	1.809.741	26	4.192.866	Gain of foreign exchanges-net
Pendapatan lainnya	38.932.680	26	33.480.338	Other income
Jumlah pendapatan operasional lainnya	43.793.040		41.146.490	Total other operating income
Beban operasional lainnya				Other operating expenses
Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan	(138.427.343)	27	(101.116.236)	Provision allowance for impairment losses on financial assets
Beban umum dan administrasi	(173.176.187)	28	(170.731.924)	General and administrative expenses
Beban gaji dan tunjangan	(229.573.983)	29	(216.943.749)	Salaries and allowance expenses
Beban lain-lain	(26.151.402)	30	(21.582.856)	Other expenses
Jumlah beban operasional lainnya	(567.328.915)		(510.374.765)	Total other operating expenses
Jumlah beban operasional lainnya-bersih	(523.535.875)		(469.228.275)	Total other operating expenses-net
LABA (RUGI) OPERASIONAL-BERSIH	(66.448.013)		16.484.983	**NET OPERATING INCOME (LOSS)**
PENDAPATAN DAN BEBAN NON-OPERASIONAL				**NON-OPERATING INCOME AND EXPENSES**
Pendapatan non-operasional	4.809.951	31	1.266.471	Non-operating income
Beban non-operasional	(7.493.944)	32	(5.678.665)	Non-operating expenses
LABA (RUGI) SEBELUM MANFAAT (BEBAN) PAJAK	(69.132.006)		12.072.789	**INCOME (LOSS) BEFORE TAX BENEFIT (EXPENSE)**
MANFAAT (BEBAN) PAJAK:		34		TAX BENEFIT (EXPENSE):
Kini	-		(3.964.164)	Current
Tangguhan	9.470.582		-	Deferred
Benefit (beban) pajak-bersih	9.470.582		(3.964.164)	Tax benefit (expense)-net
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN - BERSIH	(59.661.424)		8.108.625	**NET INCOME (LOSS) FOR THE YEAR**
LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR (JUMLAH PENUH)	(88,15)	36	11,98	**BASIC EARNINGS (LOSS) PER SHARE (FULL AMOUNT)**

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

PT BANK NUSANTARA PARAHYANGAN Tbk
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK NUSANTARA PARAHYANGAN Tbk
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2017 AND 2016
(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	Modal disetor/ *Paid-up capital*	Tambahan modal disetor/ *Additional paid in capital*	Saldo laba/ *Retained earnings*		Jumlah ekuitas/ *Total equity*	
				Ditentukan penggunaannya/ *Appropriated*	Tidak ditentukan penggunaannya/ *Unappropriated*		
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Saldo per 1 Januari 2016		338.416.941	221.037.590	65.084.036	570.954.103	1.195.492.670	Balance as of January 1, 2016
Laba komprehensif tahun berjalan		-	-	-	8.108.625	8.108.625	Comprehensive income for the year
Cadangan umum	27	-	-	6.686.000	(6.686.000)	-	Appropriation of general reserve
Dividen tunai	26	-	-	-	(6.091.505)	(6.091.505)	Cash dividends
Saldo per 31 Desember 2016		338.416.941	221.037.590	71.770.036	566.285.223	1.197.509.790	Balance as of December 31, 2016
Rugi komprehensif tahun berjalan		-	-	-	(59.661.424)	(59.661.424)	Comprehensive loss for the year
Cadangan umum	27	-	-	810.000	(810.000)	-	Appropriation of general reserve
Saldo per 31 Desember 2017		338.416.941	221.037.590	72.580.036	505.813.799	1.137.848.366	Balance as of December 31, 2017

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

PT BANK NUSANTARA PARAHYANGAN Tbk
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK NUSANTARA PARAHYANGAN Tbk
STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2017 AND 2016
(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)

	2017 Rp	2016 Rp	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			**CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES**
Penerimaan bunga, provisi dan komisi	825.426.258	903.887.970	Interest, fees, and commission received
Penerimaan pendapatan operasional lainnya	41.447.255	35.818.829	Other operating income received
Penerimaan pendapatan non-operasional lainnya	1.201.377	1.144.575	Other non-operating income received
Pembayaran bunga	(369.363.602)	(428.017.133)	Interest paid
Pembayaran beban operasional	(416.762.504)	(400.383.309)	Operating expenses paid
Pembayaran beban non-operasional	(7.113.944)	(5.678.665)	Non-operating expenses paid
Pembayaran pajak penghasilan badan	(4.613.815)	(6.177.467)	Payment of corporate income tax
Arus Kas Operasi Sebelum Perubahan Aktivitas Operasi	70.221.025	100.594.800	Operating Cash Flows Before Changes in Operating Activities
Penurunan (kenaikan) dalam aset operasi:			Decrease (increase) in operating assets:
Kredit yang diberikan	(620.311.392)	1.069.474.383	Loans
Aset lain-lain	22.306.200	(31.752.958)	Other assets
Kenaikan (penurunan) dalam liabilitas operasi:			Increase (decrease) in operating liabilities:
Liabilitas segera	(1.792.828)	6.603.004	Obligation due immediately
Simpanan dari nasabah	(94.122.657)	(871.527.303)	Deposits from customers
Simpanan dari bank lain	39.680.257	(16.257.586)	Deposits from other banks
Liabilitas akseptasi	(4.011.504)	4.011.504	Acceptance liabilities
Utang pajak	(107.610)	(2.763.818)	Taxes payable
Liabilitas lain-lain	2.583.026	(2.651.966)	Other liabilities
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	(585.555.483)	255.730.060	Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			**CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES**
Penjualan/(pembelian) efek-efek dimiliki hingga jatuh tempo-bruto	351.355.258	(443.468.275)	Sales/(purchase) of securities held to maturity-gross
Penerimaan dari penjualan aset tetap	5.019.754	247.519	Proceeds from sale of fixed assets
Pembelian aset tetap	(11.888.938)	(5.327.781)	Acquisition of fixed assets
Pembelian aset tak berwujud	(3.410.574)	(1.611.500)	Acquisition of intangible assets
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi	341.075.500	(450.160.037)	Net Cash Provided by (Used in) Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			**CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITY**
Pembayaran dividen tunai	-	(6.091.505)	Cash dividends paid
PENURUNAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	(244.479.983)	(200.521.482)	**NET DECREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS**
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	1.300.885.929	1.501.407.411	**CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR**
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	1.056.405.946	1.300.885.929	**CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR**
PENGUNGKAPAN TAMBAHAN			**SUPPLEMENTAL DISCLOSURE**
Kas dan Setara Kas terdiri dari:			Cash and cash equivalents consist of:
Kas	88.984.153	88.120.683	Cash
Giro pada Bank Indonesia	463.950.330	433.528.205	Demand deposits with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	111.548.108	361.355.194	Demand deposits with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	391.923.355	417.881.847	Placements with Bank Indonesia and other banks
Jumlah Kas dan Setara Kas	1.056.405.946	1.300.885.929	Total Cash and Cash Equivalents

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk (dahulu PT Bank Pasar Karya Parahyangan) selanjutnya disebut "Bank" didirikan berdasarkan akta notaris Komar Andasasmita, SH, No. 47 tanggal 18 Januari 1972. Akta pendirian tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. YA 5/11/19 tanggal 15 Mei 1974. Berdasarkan akta notaris Albertus Sutjipto Budihardjoputro, SH. No. 27 tanggal 10 Maret 1989, para pemegang saham memutuskan untuk mengubah status Bank dari Bank Pasar menjadi Bank Umum, dimana akta perubahan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-4155.HT.01.04. TH-1989 tanggal 2 Mei 1989. Bank memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank umum dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. 748/KMK.013/1989 tanggal 3 Juli 1989. Bank juga telah memperoleh izin untuk menjalankan aktivitas sebagai bank devisa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/54/KEP/DIR tanggal 5 Agustus 1994.

Anggaran Dasar Bank telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir Anggaran Dasar dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 5 tanggal 31 Mei 2013 yang dibuat dihadapan notaris Kirana Ivyminerva Wilamarta, S.H., LL.M notaris di Bandung sehubungan dengan perubahan modal dasar dan ditempatkan dan disetor. Akta tersebut telah dicatat dalam Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No. AHU-AH.01.10-22001 Tahun 2013 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Sesuai dengan pasal 2 anggaran Dasar Bank, ruang lingkup kegiatan Bank adalah menjalankan kegiatan umum perbankan.

Induk perusahaan Bank adalah Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), sedangkan pemegang saham pengendali Bank adalah ACOM CO.LTD., yang didirikan di Jepang. ACOM CO. LTD memiliki entitas anak dan perusahaan pihak berelasi yang tersebar di beberapa negara.

1. GENERAL

a. Establishment and General Information

PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk (formerly PT Bank Pasar Karya Parahyangan) ("The Bank") domiciled in Bandung, was established based on the Notarial Deed No. 47 dated January 18, 1972 of Notary Komar Andasasmita, SH. The notary deed was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia through his decision letter No. Y.A 5/11/19 dated May 15, 1974. Based on the Notary Deed No. 27 dated March 10, 1989 of Notary Albertus Sutjipto Budihardjoputro SH, the shareholders has decided to change the status of the Bank from savings and loan bank into commercial bank, the change of deed was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia through his decision letter No. C2-4155.HT.01.04. Year 1989 dated May 2, 1989. The Bank obtained its operating license in general banking from the Minister of Finance of the Republic of Indonesia through his decision letter No. 748/KMK.013/1989 dated July 3, 1989. The bank also obtained a license to engage in foreign exchange activities based on the Directors of Bank Indonesia's Decision Letter No. 27/54/KEP/ DIR dated August 5, 1994.

The Bank's Articles of Association have been amended several times. The latest amendment of the Bank's Articles of Association was by Notarial Deed No. 5 dated May 31, 2013 of Kirana Ivyminerva Wilamarta, S.H., LL.M, notary in Bandung in connection with the change of the Bank's authorized capital and issued and fully paid. The change was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decission Letter No. AHU-AH.01.10-22001 year 2013 concerning the approval of changes in the Articles of Association.

In accordance with Article 2 of the Bank's Articles of Association, the scope of its activities is to engage in banking business in general.

The Bank's Parent Company is Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), while the ultimate Parent Company of the Bank is ACOM CO. LTD., which is incorporated in Japan. ACOM CO. LTD has subsidiaries and affiliates in other countries.

Kantor pusat Bank beralamat di Jalan Ir. H. Juanda No. 95 Bandung. Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, jumlah seluruh kantor di Indonesia adalah sebagai berikut:

The Bank's head office is located at Jalan Ir. H. Juanda No. 95 Bandung. As at December 31, 2017 and 2016, the number of offices in Indonesia were as follows:

	2017	2016	
Kantor Pusat	1	1	Head Office
Kantor Cabang	13	15	Branch Offices
Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas	45	42	Sub Branch Offices and Cash Offices
Mobil Kas	3	3	Mobile Cash
Kantor Fungsional Non-operasional	1	1	Non Operation Functional Offices
Jumlah	63	62	Total

b. Penawaran Umum Saham dan Bank

Pada tanggal 14 Desember 2000, Bank memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal ("BAPEPAM") melalui surat No. S-3663/PM/2000 melakukan Penawaran Umum Perdana atas 50.000.000 Saham Biasa dengan harga penawaran sebesar Rp 525 setiap saham, dan 20.000.000 Waran Seri I disertai dengan Saham Biasa atas nama, Waran diberikan secara cuma-cuma dan periode pelaksanaan Waran Seri I mulai dari 10 Juli 2001 sampai dengan 9 Januari 2004 dengan harga penawaran sebesar Rp 600 per saham. Pada tanggal 10 Januari 2001 saham tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (dahulu Bursa Efek Jakarta) dengan Surat Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. S-0058/BEJ-EEM/01-2001 tanggal 8 Januari 2001.

Bank telah melakukan Penawaran Umum Terbatas I dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak 158.275.000 lembar saham dari 7 Juli sampai dengan 13 Juli 2006 dengan harga penawaran sebesar Rp 550 (nilai penuh) per saham berdasarkan surat pernyataan efektif dari BAPEPAM-LK No. S-714/BL/2006 tanggal 22 Juni 2006.

Bank telah melakukan Penawaran Umum Terbatas II dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak 99.963.158 lembar saham dari 14 Oktober 2010 sampai dengan 20 Oktober 2010 dengan harga penawaran sebesar Rp 1.000 (nilai penuh) per saham berdasarkan surat pernyataan efektif dari BAPEPAM-LK No. S-8992/BL/2010 tanggal 30 September 2010.

b. Public Offering of the Bank's Shares

On December 14, 2000, the Bank obtained the effective notification from the Chairman of the Capital Market Supervisory Board ("BAPEPAM") through Letter No. S-3663/PM/2000 the Bank undertook an Initial Public Offering of 50,000,000 common shares at the offering price of Rp 525 per share and 20,000,000 Warrants Series I which has embedded Common Shares. The Warrants were issued free in charge and the excreise period Warrant Series I starting from July 10, 2001 until January 9, 2004 at the offering price of Rp 600 per share. On January 10, 2001, the shares were registered at Indonesia Stock Exchange (formerly Jakarta Stock Exchange) based on the Board of Directors' of Jakarta Stock Exchange letter No. S-0058/BEJ-EEM/01-2001 dated January 8, 2001.

The Bank undertook the Pre-emptive Rights Issue I of 158,275,000 shares from July 7, 2006 up to July 13, 2006 at the offering price of Rp 550 (full amount) per share based on the Letter of Notification from the BAPEPAM-LK No. S-714/BL/2006 dated June 22, 2006.

The Bank undertook the Pre-emptive Rights Issue II of 99,963,158 shares from October 14, 2010 up to October 20, 2010 at the offering price of Rp 1.000 (full amount) per share base on the Letter of Notification from the BAPEPAM-LK No. S-8992/BL/2010 dated September 30, 2010.

Bank telah melakukan Penawaran Umum Terbatas III dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak 260.320.724 lembar saham dari 17 Mei 2013 sampai dengan 23 Mei 2013 dengan harga penawaran sebesar Rp 1.150 (nilai penuh) per saham berdasarkan surat pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. S-102/D.04/2013 tanggal 2 Mei 2013.

The Bank undertook the Pre-emptive Rights Issue III of 260,320,724 shares from May 17, 2013 up to May 23, 2013 at the offering price of Rp 1.150 (full amount) per share based on the Letter of Notification from the Financial Service Authority ("OJK") No. S-102/D.04/2013 dated May 2, 2013.

c. Dewan Komisaris, Direksi dan, Komite audit, dan Karyawan

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, anggota Dewan Komisaris dan Direksi dan Komite Audit adalah sebagai berikut:

c. Board of Commissioners, Directors, Audit Commitee and Employees

As of December 31, 2017 and 2016, the Bank's Board of Commissioners, Directors and Audit Committee are as follows:

	2017	2016	
Dewan Komisaris			**Board of Commissioners**
Presiden Komisaris	Michio Atsuda	Michio Atsuda	President Commisioner
Komisaris	Tatang Hermawan	Tatang Hermawan	Commissioner
Komisaris independen	Karel Tanok	Karel Tanok	Independent Commissioner
Komisaris independen	Bachtiar Alam	Bachtiar Alam	Independent Commissioner
Dewan Direksi			**Board of Directors**
Presiden Direktur	Hideki Nakamura	Takeru Agawa	President Director
Direktur	Eiichiro Sakai	Eiichiro Sakai	Director
Direktur	Markus Sugiono	Markus Sugiono	Director
Direktur	Kevin Cahyadi Tatang	Kevin Cahyadi Tatang	Director
Direktur Independen	Trie Karjati Wibowo	Trie Karjati Wibowo	Independent Director
Komite Audit			**Audit Committee**
Ketua	Bachtiar Alam	Bachtiar Alam	Chairman
Anggota	Inge Barlian	Inge Barlian	Member
Anggota*)	Damajanti Tanumihardja	Elizabeth Tiur Manurung	Member *)
Kepala Divisi Internal Audit	Raden Widawati	Raden Widawati	Internal Audit Division Head
Sektretaris Perusahaan	Mario Yahya	Mario Yahya	Corporate Secretary

* Pengangkatan Sdri. Damajanti Tanumihardja sebagai Anggota Komite Audit PT Bank Nusantara Parahyangan, Tbk. telah disetujui berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 003-KOM/KEP/08/2017 tanggal 4 September 2017 tentang pengesahan perubahan susunan keanggotaan komite audit.

* The appointment of Mrs. Damajanti Tanumihardja as member of the audit committee of PT Bank Nusantara Parahyangan, Tbk. has been approved based on the decision letter of the Board of Commissioners No. 003-KOM/KEP/08/2017 dated September 4, 2017 about the approval of changes in the composition of the audit committee members.

Pembentukan Komite Audit Bank telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 dan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) No. IX.I.5.

Establishment of the Bank's Audit Committee is in compliance with the requirements of Bank Indonesia regulation (PBI) No. 8/14/PBI/2006 dated October 5, 2006 and the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (Bapepam-LK) regulation No. IX.I.5.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 31 Desember 2017 berdasarkan akta Notaris Kirana Ivyminerva Wilamarta , S.H., LLM., No. 1 tanggal 5 Juli 2017.

The composition of the Board of Commissioners and Board of Directors as of December 31, 2017 by Notarial Deed of Kirana Ivyminerva Wilamarta, S.H., LLM., No. 1 dated July 5, 2017.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 31 Desember 2016 berdasarkan akta Notaris Yuliani Idawati,S.H., Sp.N., No. 15 tanggal 19 Pebruari 2016.

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, Bank memiliki karyawan tetap masing-masing sebanyak 1.137 dan 1.243 karyawan.

Jumlah gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi masing-masing sebesar Rp 2.160.860 dan Rp 11.683.574 pada tahun 2017 dan Rp 2.600.343 dan Rp 12.866.277 pada tahun 2016.

The composition of the Board of Commissioners and Board of Directors as of December 31,2016 was notarized by Deed of Yuliani Idawati ,S.H.,Sp.N., No.15 dated February 19, 2016.

At December 31, 2017 and 2016 , the Bank has 1,137 and 1,243 permanent employees respectively.

Total salaries and allowances paid to the Board Commissioners and Directors amounted to Rp 2,160,860 and Rp 11,683,574, respectively, in 2017 and Rp 2,600,343 and Rp 12,866,277, respectively, in 2016.

2. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU DAN REVISI (PSAK) DAN INTERPRETASI STÁNDAR AKUNTANSI KEUANGAN (ISAK)

a. Amandemen/penyesuaian dari interprestasi standar yang berlaku efektif pada tahun berjalan

Dalam tahun berjalan, Bank telah menerapkan, sejumlah amandemen dan interpretasi PSAK yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2017.

- PSAK 1 (amandemen): Penyajian Laporan Keuangan tentang Prakarsa Pengungkapan

  Bank menerapkan amandemen ini untuk pertama kalinya pada tahun berjalan. Amandemen tersebut mengklarifikasi bahwa suatu entitas tidak perlu menyediakan pengungkapan yang spesifik yang disyaratkan oleh suatu PSAK jika informasi yang dihasilkan dari pengungkapan tersebut tidak material, dan memberikan panduan atas dasar penggabungan dan pemisahan informasi untuk tujuan pengungkapan. Namun, amandemen tersebut menyatakan lagi bahwa entitas mempertimbangkan untuk memberikan pengungkapan tambahan jika pemenuhan atas persyaratan spesifik dari suatu PSAK tidak cukup membantu pengguna laporan keuangan dalam memahami dampak dari transaksi tertentu, kejadian dan kondisi lain terhadap posisi keuangan dan kinerja keuangan entitas.

2. ADOPTION OF NEW AND REVISED STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (“PSAK”) AND INTERPRETATIONS OF PSAK (“ISAK”)

a. Amandements/improvements and interpretations to standards effective in the current year

In the current year, the Bank has applied, a number of amendments, and an interpretation to PSAK that are relevant to its operations and effective for accounting period beginning on or after January 1, 2017.

- PSAK 1 (amendment): Presentation of Financial Statements about Disclosure Initiative

  The Bank has applied these amendments for the first time in the current year. The amendments clarify that an entity need not provide specific disclosure required by a PSAK if the information resulting from that disclosure is not material, and give guidance on the bases of aggregating and disaggregating information for the disclosure purposes. However, the amendments reiterate that an entity should consider providing additional disclosure when compliance with the specific requirements in PSAK is insufficient to enable users of financial statements to understand the impact of particular transactions, events and conditions on the entity’s financial position and financial performance.

Selanjutnya, amandemen tersebut mengklarifikasi bahwa bagian entitas dari penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi dan ventura bersama yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas harus disajikan secara terpisah dari penghasilan komprehensif lain dari Grup dan harus dipisahkan ke dalam bagian pos yang berdasarkan masing-masing PSAK: (i) tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi dan (ii) akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi ketika kondisi tertentu terpenuhi.

Mengenai struktur laporan keuangan, amandemen tersebut memberikan contoh pengurutan sistematik atau pengelompokan catatan.

Penerapan amandemen ini tidak berdampak pada kinerja atau posisi keuangan Bank

Penerapan amandemen dan interpretasi standar berikut tidak memiliki pengaruh signifikan atas pengungkapan atau jumlah yang dicatat di dalam laporan keuangan pada tahun berjalan dan tahun sebelumnya:

- PSAK 24 (penyesuaian), Imbalan Kerja
- PSAK 60 (penyesuaian), Instrumen Keuangan: Pengungkapan
- ISAK 32, Definisi dan Hierarki Standar Akuntansi Keuangan

b. Standar dan amendemen standard telah diterbitkan tapi belum diterapkan

Standar baru dan amandemen standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2018, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 2 (amandemen), Laporan Arus Kas tentang Prakarsa Pengungkapan
- PSAK 13 (amandemen), Properti Investasi tentang Pengalihan Properti Investasi
- PSAK 15 (penyesuaian), Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama
- PSAK 16 (amandemen), Aset Tetap – Agrikultur: Tanaman Produktif
- PSAK 46 (amandemen), Pajak Penghasilan tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum Direalisasi

In addition, the amendments clarify that an entity's share of the other comprehensive income of associates and joint ventures accounted for using the equity method should be presented separately from those arising from the Group, and should be separated into the share of items that, in accordance with other PSAKs: (i) will not be reclassified subsequently to profit or loss and (ii) will be reclassified subsequently to profit or loss when specific conditions are met.

As regards to the structure of the financial statements, the amendments provide examples of systematic ordering or grouping of the notes.

The application of these amendments has not resulted in any impact on the consolidated financial performance or financial position of the Bank

The application of the following amendments and intepretation to standards have not resulted to material impact to disclosures or on the amounts recognized in the current and prior year financial statements:

- PSAK 24 (improvement), Employee Benefits
- PSAK 60 (improvement), Financial Instruments: Disclosures
- ISAK 32, Definition and Hierarchy of Financial Accounting Standards

b. Standards and amendments to standards issued not yet adopted

New standards and amendments to standards effective for periods beginning on or after January 1, 2018, with early application permitted are:

- PSAK 2 (amendment), Statement of Cash Flows about Disclosure Initiative
- PSAK 13 (amendment), Transfers of Investment Property
- PSAK 15 (improvement), Investments in Associates and Joint Ventures
- PSAK 16 (Amendment): Property, Plant and Equipment – Agriculture: Bearer Plants
- PSAK 46 (amendment), Income Tax: Recognition on Deferred Tax Assets for Unrealized Losses

- PSAK 53 (amandemen), Pembayaran Berbasis Saham tentang Klasifikasi dan Pengukuran Transaksi Pembayaran Berbasis Saham
- PSAK 67 (penyesuaian), Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain
- PSAK 69, Agrikultur
- PSAK 111, Akuntansi Wa'd

Interpretasi standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2019, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- ISAK 33, Transaksi Valuta Asing dan Imbalan Dimuka

Standar dan amandemen standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 15 (amandemen), Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama
- PSAK 62 (amandemen), Kontrak Asuransi-Menerapkan PSAK 71: Instrumen Keuangan dengan PSAK 62: Kontrak Asuransi
- PSAK 71, Instrumen Keuangan
- PSAK 71 (amandemen), Instrumen Keuangan tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif
- PSAK 72, Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan
- PSAK 73, Sewa

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan, dampak dari standar dan interpretasi tersebut terhadap laporan keuangan tidak dapat diketahui atau diestimasi oleh manajemen.

- PSAK 53 (amendment), Classification and Measurement of Share-based Payment Transactions

- PSAK 67 (improvement), Disclosures of Interest in Other Entities
- PSAK 69, Agriculture
- PSAK 111, Wa'd Accounting

Interpretation to standard effective for periods beginning on or after January 1, 2019, with early application permitted are:

- ISAK 33, Foreign Currency Transactions and Advance Consideration

Standards and amendments to standards effective for periods beginning on or after January 1, 2020, with early application permitted are:

- PSAK 15 (amendment), Investments in Associates and Joint Ventures: Long Term Interest in Associate and Joint Ventures

- PSAK 62 (amendment), Insurance Contract: Applying PSAK 71: Financial Instruments with PSAK 62: Insurance Contracts
- PSAK 71, Financial Instruments
- PSAK 71 (amendment), Financial Instruments: Prepayment Features with Negative Compensation
- PSAK 72, Revenue from Contracts with Customers
- PSAK 73, Leases

As of the issuance date of the financial statements, the effects of adopting these standards, amendments and interpretation on the financial statements is not known nor reasonably estimable by management.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan Bank disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 yaitu Peraturan No. VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Statement of Compliance

The financial statements of the Bank have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards and the Decree of BAPEPAM-LK No. KEP 347/BL/2012 dated June 25, 2012 which was Regulation No. VIII.G.7 regarding Guideline for Financial Statement Preparation and Presentation of Issues or Public Company.

b. Dasar Penyusunan

Dasar penyusunan laporan keuangan adalah biaya historis, kecuali properti dan instrumen keuangan tertentu yang diukur pada jumlah revaluasian atau nilai wajar pada setiap akhir periode pelaporan, yang dijelaskan dalam kebijakan akuntansi di bawah ini. Mata uang penyajian yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp).

Biaya historis umumnya didasarkan pada nilai wajar dari imbalan yang diberikan dalam pertukaran barang dan jasa.

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam suatu transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung yang dimodifikasi dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Kas dan setara kas terdiri dari kas, giro pada Bank indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain dan Sertifikat Bank Indonesia yang jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijaminkan serta tidak dibatasi penggunaannya.

c. Transaksi dan Penjabaran Laporan Keuangan Dalam Mata Uang Asing

Pembukuan Bank diselenggarakan dalam mata uang Rupiah. Transaksi-transaksi selama tahun berjalan dalam mata uang asing dicatat dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Pada tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disesuaikan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs *spot* Reuters pada pukul 16.00 WIB untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Pos-pos non moneter yang diukur pada nilai wajar dalam valuta asing dijabarkan kembali pada kurs yang berlaku pada tanggal ketika nilai wajar ditentukan. Pos moneter diukur dalam biaya historis dalam valuta asing yang tidak dijabarkan kembali. Selisih kurs atas pos moneter diakui dalam laba rugi pada periode saat terjadinya.

b. Basis of Preparation

The financial statements have been prepared on the historical cost basis except for certain properties and financial instruments that are measured at revalued amounts or fair values at the end of each reporting period, as explained in the accounting policies below. The presentation currency used in the preparation of the financial statements is the Indonesian Rupiah.

Historical cost is generally based on the fair value of the consideration given in exchange for goods and services.

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

The statements of cash flows are prepared using the modified direct method with classification of cash flows into operating, investing and financing activities. Cash and cash equivalents consist of cash, demand deposits with Bank Indonesia, demand deposits with other banks, placements with Bank Indonesia and other banks and Certificates of Bank Indonesia (SBI) with maturities of three months or less from the date of placement and are not pledged or restricted.

c. Foreign Currency Transactions and Translation

The Bank's books of accounts are maintained in Indonesian Rupiah. Transactions during the year involving foreign currencies are recorded at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. At reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted into Indonesian Rupiah using Reuters' spot rates at 4:00 P.M. Western Indonesia Time to reflect the rates of exchange prevailing at that date. Non-monetary items carried at fair value that are denominated in foreign currencies are retranslated at the rates prevailing at the date when the fair value was determined. Non-monetary items that are measured in terms of historical cost in a foreign currency are not retranslated. Exchange differences on monetary items are recognized in profit or loss in the period in which they arise.

d. Transaksi Pihak-pihak Berelasi

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Bank (entitas pelapor):

a. Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:

   i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;

   ii. memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau

   iii. merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.

b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:

   i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lainnya).

   ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).

   iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.

   iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.

   v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.

   vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).

d. Transactions with Related Parties

A related party is a person or entity that is related to the Bank (the reporting entity):

a. A person or a close member of that person's family is related to the reporting entity if that person:

   i. has control or joint control over the reporting entity;

   ii. has significant influence over the reporting entity; or

   iii. is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.

b. An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions applies:

   i. The entity, and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).

   ii. One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member).

   iii. Both entities are joint ventures of the same third party.

   iv. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.

   v. The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity, or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity in itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity.

   vi. The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a).

vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

viii. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Transaksi signifikan yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik dilakukan dengan kondisi dan persyaratan yang sama dengan pihak ketiga maupun tidak, diungkapkan pada laporan keuangan.

e. Aset Keuangan

Seluruh aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada tanggal diperdagangkan dimana pembelian atau penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset keuangan dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh kebiasaan pasar yang berlaku, dan awalnya diukur sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi, kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yang awalnya diukur sebesar nilai wajar.

Aset keuangan Bank diklasifikasikan sebagai berikut:

- Dimiliki hingga jatuh tempo
- Pinjaman yang diberikan dan piutang

Dimiliki hingga jatuh tempo

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo hanya jika investasi tersebut memiliki pembayaran yang tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan serta Bank mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo. Pada saat pengakuan awal, investasi dimiliki hingga jatuh tempo diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan aset keuangan. Setelah pengakuan awal, investasi dimiliki hingga jatuh tempo diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi kerugian penurunan nilai yang ada.

vii. A person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or a parent of the entity).

viii. The entity, or any member of a group of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

Significant transactions with related parties, whether or not made at similar terms and conditions as those done with third parties, are disclosed in the financial statements.

e. Financial Assets

All financial assets are recognized and derecognized on trade date where the purchase or sale of a financial asset is under a contract whose terms require delivery of the financial asset within the timeframe established by the market concerned, and are initially measured at fair value plus transaction costs, except for those financial assets classified as at fair value through profit or loss, which are initially measured at fair value.

The Bank's financial assets are classified as follows:

- Held to Maturity
- Loans and Receivable

Held-to-maturity

Financial assets are classified as held-to-maturity investment only if these investments have fixed or determined payments and their maturity date has been determined and the Bank has the positive intention and ability to hold such financial assets to maturity. Held-to-maturity investments are initially measured at fair value plus transaction costs which are attributable directly to the acquisition of the financial assets. After initial recognition, held-to-maturity investments are measured at amortized cost, using effective interest method less any impairment losses.

Pinjaman yang diberikan dan piutang

Aset keuangan dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif diklasifikasi sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang, yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai. Bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif, kecuali piutang jangka pendek dimana pengakuan bunga tidak material.

Metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga dan beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan atau pembayaran kas masa depan (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur instrumen keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan pada saat pengakuan awal.

Pendapatan diakui berdasarkan suku bunga efektif untuk instrumen keuangan.

Penurunan nilai aset keuangan

Aset keuangan dinilai terhadap indikator penurunan nilai pada setiap tanggal pelaporan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti objektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Untuk investasi ekuitas AFS yang tercatat dan tidak tercatat di bursa, penurunan yang signifikan atau jangka panjang dalam nilai wajar dari instrumen ekuitas di bawah biaya perolehannya dianggap sebagai bukti obyektif terjadinya penurunan nilai.

Loans and receivables

Financial assets that have fixed or determinable payments that are not quoted in an active market are classified as loans and receivables. Loans and receivables are measured at amortized cost using the effective interest method less impairment. Interest is recognized by applying the effective interest method, except for short-term receivables when the recognition of interest would be immaterial.

Effective interest method

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial instrument and of allocating interest income and interest expense over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash receipts (including all fees and points paid or received that form an integral part of the effective interest rate, transaction costs and other premiums or discounts) through the expected life of the financial instrument, or where appropriate, a shorter period to the net carrying amount on initial recognition.

Income is recognized on an effective interest basis for financial instruments.

Impairment of financial assets

Financial assets are assessed for indicators of impairment at each reporting date. Financial assets are impaired when there is objective evidence that, as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the financial asset, the estimated future cash flows of the investment have been affected.

For listed and unlisted equity investments classified as AFS, a significant or prolonged decline in the fair value of the security below its cost is considered to be objective evidence of impairment.

Bukti obyektif penurunan nilai termasuk sebagai berikut:

- kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau
- pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; atau
- terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan.

Untuk kredit dan piutang, aset yang tidak akan dievaluasi secara individual akan dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif. Bukti obyektif dari penurunan nilai portofolio piutang dapat termasuk pengalaman Bank atas tertagihnya piutang dimasa lalu, peningkatan keterlambatan penerimaan pembayaran piutang dari rata-rata periode kredit, dan juga pengamatan atas perubahan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan gagal bayar atas piutang.

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

Untuk aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan, jumlah kerugian penurunan nilai diukur berdasarkan selisih antara jumlah tercatat aset keuangan dan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan pada tingkat imbal hasil yang berlaku di pasar untuk aset keuangan yang serupa. Kerugian penurunan nilai tersebut tidak dapat dibalik pada periode berikutnya.

Jumlah tercatat aset keuangan tersebut dikurangi dengan kerugian penurunan nilai secara langsung atas seluruh aset keuangan, kecuali piutang yang jumlah tercatatnya dikurangi melalui penggunaan akun cadangan piutang. Jika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapuskan melalui akun cadangan piutang. Pemulihan kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap akun cadangan. Perubahan jumlah tercatat akun cadangan piutang diakui dalam laba rugi.

The objective evidence of impairment could include:

- significant financial difficulty of the issuer or counterparty; or
- default or delinquency in interest or principal payments; or
- it becoming probable that the borrower will enter bankruptcy or financial re-organisation.

For loans and receivables, assets that are assessed not to be impaired individually are, in addition, assessed for impairment on a collective basis. Objective evidence of impairment for a portfolio of receivables could include the Bank's past experience of collecting payments, an increase in the number of delayed payments in the portfolio past the average credit period, as well as observable changes in national or local economic conditions that correlate with default on receivables.

For financial assets carried at amortised cost, the amount of the impairment is the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows, discounted at the financial asset's original effective interest rate.

For financial asset carried at cost, the amount of the impairment loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of the estimated future cash flows discounted at the current market rate of return for a similar financial asset. Such impairment loss will not be reversed in subsequent periods.

The carrying amount of the financial asset is reduced by the impairment loss directly for all financial assets with the exception of receivables, where the carrying amount is reduced through the use of an allowance account. When a receivable is considered uncollectible, it is written off against the allowance account. Subsequent recoveries of amounts previously written off are credited against the allowance account. Changes in the carrying amount of the allowance account are recognized in profit or loss.

Kerugian penurunan nilai dihitung secara individual untuk aset keuangan yang signifikan secara individual serta kolektif untuk aset yang secara individual tidak signifikan dan secara individual signifikan namun tidak terdapat bukti obyektif penurunan nilai. Di dalam menentukan penurunan nilai kolektif, aset keuangan dikelompokkan pada kelompok aset keuangan berdasarkan karakteristik risiko kredit yang serupa. Arus kas masa depan dari kelompok aset keuangan ini diestimasi berdasarkan arus kas kontraktual dan pengalaman kerugian historis untuk aset yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa. Pengalaman historis kerugian disesuaikan berdasarkan hasil pengamatan data pada masa kini, untuk merefleksikan efek dari kondisi masa kini yang tidak mempengaruhi periode dari pengalaman historis.

Impairment loss is calculated individually for financial assets that are individually significant and collectively for assets that are individually not significant, or individually significant but there is no objective evidence of impairment. In determining collective impairment, financial assets are grouped into groups of financial assets based on similar credit risk characteristics. Future cash flow from a group of financial assets is estimated based on contractual cash flows and historical loss experience for assets that have similar credit risk characteristics. Historical loss experience is adjusted based on data observations in the present, to reflect the effects of current conditions that do not affect the period of historical experience.

Dalam melakukan penilaian secara kolektif, Bank dan entitas anak harus menghitung:

- *Probability of default* (”PD”) – model ini menilai probabilitas konsumen gagal melakukan pembayaran kembali secara penuh dan tepat waktu.
- *Recoverable amount* – didasarkan pada identifikasi arus kas masa datang dan estimasi nilai kini dari arus kas tersebut (*discounted cash flow*).
- *Loss given default* (”LGD”) – Bank mengestimasi kerugian ekonomis yang mungkin akan diderita Bank apabila terjadi tunggakan fasilitas kredit/pembiayaan. LGD menggambarkan jumlah utang yang tidak dapat diperoleh kembali dan umumnya ditunjukkan dalam persentase dari *exposure at default* (EAD). Model perhitungan LGD mempertimbangkan jenis peminjam, fasilitas dan mitigasi risiko, misalnya ketersediaan agunan.
- *Loss identification period* (”LIP”) - periode waktu antara terjadinya peristiwa yang merugikan dalam kelompok aset keuangan sampai bukti obyektif dapat diidentifikasi atas fasilitas kredit/pembiayaan secara individual.
- *Exposure at default* (”EAD”) – Bank mengestimasi tingkat utilisasi yang diharapkan dari fasilitas kredit/pembiayaan pada saat terjadi tunggakan.

In conducting collective assessment, the Bank must calculate:

- Probability of default (“PD”) – these models assess the probability of customers failing to repay fully and on time.
- Recoverable amount – based on identification of future cash flows and estimation of the present value of those cash flows (discounted cash flow).
- Loss given default (“LGD”) – the Bank estimates economic losses that may be suffered by the Bank if there are arrears in credit facility/financing receivable. LGD describes the amount of debt that may not be recovered and is generally expressed as a percentage of the exposure at default (EAD). The LGD calculation model considers the type of borrower, facility and any risk mitigation such as availability of collateral.
- Loss identification period (”LIP”) – the period of time from the occurrence of a loss event in a group of financial assets until objective evidence can be identified on credit facility/financing receivable individually.
- Exposure at default (“EAD”) – The Bank estimates the expected utilization level of credit facilities/financing receivable in the event of arrears.

PD, LGD dan LIP diperoleh dari observasi data fasilitas kredit/piutang pembiayaan selama minimal tiga tahun.

Cadangan kerugian penurunan nilai yang dinilai secara kolektif dilakukan dengan mengkalikan nilai baki debet fasilitas kredit/piutang pembiayaan pada posisi laporan dengan *probability default* (PD), *loss identification period* (LIP) dan *loss given default* (LGD).

Kerugian penurunan nilai diakui pada laba rugi dan nilai tercatat dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai yang terbentuk. Pada saat penurunan nilai diakui dalam aset keuangan atau kelompok aset keuangan, pendapatan bunga diakui berdasarkan nilai tercatat setelah penurunan nilai menggunakan tarif bunga yang digunakan untuk mendiskontokan estimasi arus kas masa datang pada saat menghitung penurunan nilai.

Jika aset keuangan AFS dianggap menurun nilainya, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya telah diakui dalam ekuitas direklasifikasi laba rugi.

Pengecualian dari instrumen ekuitas AFS, jika, pada periode berikutnya, jumlah penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara obyektif dengan peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui, kerugian penurunan nilai yang diakui sebelumnya dibalik melalui laba rugi hingga nilai tercatat investasi pada tanggal pemulihan penurunan nilai, sepanjang nilainya tidak melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum pengakuan kerugian penurunan nilai dilakukan.

Dalam hal efek ekuitas AFS, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dalam laba rugi tidak boleh dibalik melalui laba rugi. Setiap kenaikan nilai wajar setelah penurunan nilai diakui secara langsung ke penghasilan komprehensif lain.

PD, LGD and LIP are derived from observation of credit facility/financing receivable data for at least three years.

Allowance for impairment losses collectively assessed is performed by multiplying the outstanding credit facility/financing receivable at report date by the probability of default (PD), loss identification period (LIP) and loss given default (LGD).

The impairment loss is recognized in profit or loss and the carrying amount of the financial asset or group of financial assets are presented net of allowance for impairment losses. When impairment losses are recognized in the financial asset or group of financial assets, interest income is recognized based on the carrying amount after impairment using the interest rate used for discounting the estimated future cash flow when calculating impairment.

When an AFS financial asset is considered to be impaired, cumulative gains or losses previously recognized in equity are reclassified to profit or loss.

With the exception of AFS equity instruments, if, in a subsequent period, the amount of the impairment loss decreases and the decrease can be related objectively to an event occurring after the impairment was recognized, the previously recognized impairment loss is reversed through profit or loss to the extent that the carrying amount of the investment at the date the impairment is reversed does not exceed what the amortised cost would have been had the impairment not been recognized.

In respect of AFS equity securities, impairment losses previously recognized in profit or loss are not reversed through profit or loss. Any increase in fair value subsequent to an impairment loss is recognized directly in other comprehensive income.

Penghentian pengakuan aset keuangan

Bank menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir, atau Bank mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Bank tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Bank mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Bank memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Bank masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

Penghentian pengakuan aset keuangan secara keseluruhan, selisih antara jumlah tercatat aset dan jumlah pembayaran dan piutang yang diterima dan keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas diakui dalam laba rugi.

Penghentian pengakuan aset keuangan terhadap satu bagian saja (misalnya ketika Bank masih memiliki hak untuk membeli kembali bagian aset yang ditransfer), Bank mengalokasikan jumlah tercatat sebelumnya dari aset keuangan tersebut pada bagian yang tetap diakui berdasarkan keterlibatan berkelanjutan, dan bagian yang tidak lagi diakui berdasarkan nilai wajar relatif dari kedua bagian tersebut pada tanggal transfer. Selisih antara jumlah tercatat yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui dan jumlah dari pembayaran yang diterima untuk bagian yang yang tidak lagi diakui dan setiap keuntungan atau kerugian kumulatif yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui tersebut yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain diakui pada laba rugi. Keuntungan dan kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain dialokasikan pada bagian yang tetap diakui dan bagian yang dihentikan pengakuannya, berdasarkan nilai wajar relatif kedua bagian tersebut.

Derecognition of financial assets

The Bank derecognizes a financial asset only when the contractual rights to the cash flows from the asset expire, or when it transfers the financial asset and substantially all the risks and rewards of ownership of the asset to another entity. If the Bank neither transfers nor retains substantially all the risks and rewards of ownership and continues to control the transferred asset, the Bank recognizes its retained interest in the asset and an associated liability for amounts it may have to pay. If the Bank retains substantially all the risks and rewards of ownership of a transferred financial asset, the Bank continues to recognize the financial asset and also recognizes a collateralised borrowing for the proceeds received.

On derecognition of financial asset in its entirety, the difference between the asset's carrying amount and the sum of the consideration received and receivable and the cumulative gain or loss that had been recognized in other comprehensive income and accumulated in equity is recognized in profit or loss.

On derecognition of financial asset other than its entirety (e.g., when the Bank retains an option to repurchase part of a transferred asset), the Bank allocates the previous carrying amount of the financial asset between the part it continues to recognize under continuing involvement, and the part it no longer recognizes on the basis of the relative fair values of those parts on the date of the transfer. The difference between the carrying amount allocated to the part that is no longer recognized and the sum of the consideration received for the part no longer recognized and any cumulative gain or loss allocated to it that had been recognized in other comprehensive income is recognized in profit or loss. A cumulative gain or loss that had been recognized in other comprehensive income is allocated between the part that continues to be recognized and the part that is no longer recognized on the basis of the relative fair values of those parts.

Aset dihapusbukukan dari cadangan kerugian penurunan nilai pada saat manajemen berpendapat bahwa aset tersebut harus dihapuskan karena secara operasional debitur sudah tidak mampu membayar dan/atau sulit untuk ditagih. Penerimaan kembali aset yang telah dihapuskan pada tahun berjalan dicatat sebagai penambahan cadangan kerugian penurunan nilai yang bersangkutan selama tahun berjalan. Penerimaan kembali aset yang telah dihapuskan pada tahun-tahun sebelumnya dicatat sebagai pendapatan operasional tahun berjalan.

Assets written off are charged to the allowance for impairment losses when management believes that they are definitely uncollectible. Recovery of assets previously written off in the current year is recorded as an addition to the allowance for impairment losses during the year of credit recovery. Recovery of assets previously written off in the previous years is recorded as operating income during the year.

f. Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Klasifikasi sebagai liabilitas atau ekuitas

Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh Bank diklasifikasi sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas.

Instrumen ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset Bank setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh Bank dicatat sebesar hasil penerimaan bersih setelah dikurangi biaya penerbitan langsung.

Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi.

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, diakui pada nilai wajarnya. Nilai wajar tersebut dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan penerbitan liabilitas keuangan tersebut. Pengukuran selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dimana beban bunga diakui berdasarkan tingkat pengembalian yang efektif, kecuali untuk liabilitas jangka pendek dimana pengakuan bunganya tidak material.

f. Financial Liabilities and Equity Instruments

Classification as debt or equity

Financial liabilities and equity instruments issued by the Bank are classified according to the substance of the contractual arrangements entered into and the definitions of a financial liability and an equity instrument.

Equity instruments

An equity instrument is any contract that evidences a residual interest in the assets of the Bank after deducting all of its liabilities. Equity instruments issued by the Bank are recorded at the proceeds received, net of direct issue costs.

Financial liabilities

Financial liabilities are classified as financial liabilities at amortized cost.

At initial recognition, financial liabilities measured at amortized cost are recognized at fair value. The fair value is reduced by transaction costs which are directly attributable to the issuance of such financial liabilities. Subsequently, these financial liabilities are measured at amortized cost using the effective interest method, where interest expense is recognized based on the rate of effective return, except for short-term liabilities when the recognition of interest would be immaterial.

Penghentian pengakuan liabilitas keuangan

Bank menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Bank telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa. Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan yang dihentikan pengakuannya dan imbalan yang dibayarkan dan utang diakui dalam laba rugi.

Derecognition of financial liabilities

The Bank derecognizes financial liabilities, when and only when, the Bank's obligations are discharged or cancelled or they expire. The difference between the carrying amount of the financial liability derecognized and the consideration paid and payable is recognized in profit or loss.

g. Reklasifikasi Instrumen Keuangan

g. Reclassifications of Financial Instruments

Reklasifikasi Aset Keuangan

Bank tidak diperkenankan untuk melakukan reklasifikasi aset keuangan ke kelompok aset keuangan FVTPL. Bank hanya dapat melakukan reklasifikasi aset keuangan ke kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang jika aset keuangan tersebut memenuhi definisi pinjaman yang diberikan dan piutang dan Bank memiliki intensi dan kemampuan memiliki aset keuangan untuk masa depan yang dapat diperkirakan atau hingga jatuh tempo dari kelompok aset keuangan FVTPL atau dari kelompok tersedia untuk dijual. Aset keuangan tersebut direklasifikasi pada nilai wajar pada tanggal reklasifikasi yang menjadi biaya perolehan diamortisasi yang baru. Setiap keuntungan dan kerugian yang sudah diakui dalam laba rugi tidak boleh dipulihkan. Setiap keuntungan dan kerugian yang sudah diakui dalam penghasilan komprehensif lain diamortisasi ke laba rugi selama sisa umur aset keuangan (jika aset keuangan memiliki jatuh tempo tetap) atau tetap diakui dalam penghasilan komprehensif lain sampai aset keuangan tersebut dilepas atau dijual (jika aset keuangan tidak memiliki jatuh tempo tetap).

Reclassification of Financial Assets

The Bank shall not reclassify any financial assets into the FVTPL after initial recognition. The Bank only reclassifies financial assets classified as FVTPL or available for sale into loans and receivables if the financial assets meet the definition of loans and receivables and the Bank has the intention and ability to hold the financial assets for the foreseeable future or until maturity.The financial assets are reclassified at fair value, on the date of reclassification which become its new amortized cost. Any gains or losses already recognized in profit or loss are not reversed. Any gains or losses that have been recognized in other comprehensive income are amortized through profit or loss over the remaining life of the financial assets (for financial assets that have fixed maturities) or continue to be recognized in other comprehensive income until the financial assets are sold or otherwise disposed (for financial assets that do not have fixed maturities).

Reklasifikasi Liabilitas Keuangan

Bank tidak diperkenankan untuk mereklasifikasi liabilitas keuangan dari atau ke kelompok liabilitas keuangan FVTPL.

Reclassification of Financial Liabilities

The Bank is not allowed to reclassify any financial liabilities from or to a group of FVTPL financial liabilities.

h. Saling Hapus Antara Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

h. Netting of Financial Assets and Financial Liabilities

Aset dan liabilitas keuangan Bank saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika dan hanya jika:

Bank only offsets financial assets and liabilities and presents the net amount in the statement of financial position where it:

- saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan

- currently has a legal enforceable right to set off the recognized amount; and

- berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

- intends either to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

i. Nilai Wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam suatu transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran, terlepas apakah harga tersebut dapat diobservasi secara langsung atau diestimasi menggunakan teknik penilaian lain. Dalam mengestimasi nilai wajar aset atau liabilitas, Grup memperhitungkan karakteristik aset atau liabilitas, jika pelaku pasar memperhitungkan karakteristik tersebut ketika menentukan harga aset atau liabilitas pada tanggal pengukuran.

Dalam rangka konsistensi dan perbandingan dalam pengukuran nilai wajar dan pengungkapan terkait, Bank melakukan pengukuran nilai wajar atas instrumen keuangan yang dimiliki dengan hirarki berikut:

- Tingkat 1 pengukuran nilai wajar adalah yang berasal dari harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik.
- Tingkat 2 pengukuran nilai wajar adalah yang berasal dari *input* selain harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya deviasi dari harga).
- Tingkat 3 pengukuran nilai wajar adalah yang berasal dari teknik penilaian yang mencakup *input* untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (*input* yang tidak dapat diobservasi).

i. Fair Value

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date, regardless of whether that price is directly observable or estimated using another valuation technique. In estimating the fair value of an asset or a liability, the Bank takes into account the characteristics of the asset or a liability if market participants would take those characteristics into account when pricing the asset or liability at the measurement date.

In order to increase consistency and comparability in fair value measurements and related disclosures, the Bank measures the fair value of the financial instruments held based on the following hierarchy that are categorized into three levels the inputs to valuation techniques:

- Level 1 fair value measurements are those derived from quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities.
- Level 2 fair value measurements are those derived from inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the assets or liability, either directly (i.e. as prices) or indirectly (i.e. derived from prices).
- Level 3 fair value measurements are those derived from valuation techniques that include inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (unobservable inputs).

j. Giro pada Bank Indonesia dan Bank Lain

Giro pada Bank Indonesia dan bank lain diklasifikasikan dalam kategori pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pengakuan, pengukuran awal, pengukuran setelah pengakuan awal, reklasifikasi, penentuan nilai wajar, penurunan nilai dan penghentian pengakuan giro pada Bank Indonesia dan bank lain mengacu pada Catatan 3e, 3g, 3h dan 3i terkait aset keuangan.

j. Demand Deposits with Bank Indonesia and Other Banks

Demand deposits with Bank Indonesia and other banks are classified as loans and receivables.

Recognition, initial measurement, subsequent measurement, reclassification, fair value measurement, impairment and derecognition of demand deposits with Bank Indonesia and other banks are discussed in to Notes 3e, 3g, 3h and 3i related to financial assets.

k. Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain diklasifikasikan dalam kategori pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pengakuan, pengukuran awal, pengukuran setelah pengakuan awal, reklasifikasi, penentuan nilai wajar, penurunan nilai dan penghentian pengakuan penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain mengacu pada Catatan 3e, 3g, 3h dan 3i terkait aset keuangan.

k. Placements with Bank Indonesia and Other Banks

Placements with Bank Indonesia and other banks are classified as loans and receivables.

Recognition, initial measurement, subsequent measurement, reclassification, fair value measurement, impairment and derecognition of placements with Bank Indonesia and other banks are discussed in Notes 3e, 3g, 3h and 3i related to financial assets.

l. Efek-efek

Efek-efek diklasifikasikan dalam kategori dimiliki hingga jatuh tempo.

Pengakuan, pengukuran awal, pengukuran setelah pengukuran awal, reklasifikasi, penentuan nilai wajar, penurunan nilai dan penghentian pengakuan efek-efek mengacu pada Catatan 3e, 3g, 3h dan 3i terkait aset keuangan.

l. Securities

Securities are classified as held-to-maturity.

Recognition, initial measurement, subsequent measurement, reclassification, fair value measurement, impairment and derecognition of securities are discussed in Notes 3e, 3g, 3h and 3i related to financial assets.

m. Kredit

Kredit diklasifikasikan dalam kategori pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pengakuan, pengukuran awal, pengukuran setelah pengakuan awal, reklasifikasi, penentuan nilai wajar, penurunan nilai dan penghentian pengakuan kredit mengacu pada Catatan 3e, 3g, 3h dan 3i terkait aset keuangan.

m. Loans

Loans are classified as loans and receivables.

Recognition, initial measurement, subsequent measurement, reclassification, fair value measurement, impairment and derecognition of loans are discussed in Notes 3e, 3g, 3h and 3i related to financial assets.

n. Restrukturisasi Kredit Bermasalah

Restrukturisasi kredit dilakukan terhadap debitur yang tidak dapat atau diperkirakan tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok atau bunga sesuai jadwal yang diperjanjikan.

Kerugian yang timbul dari restrukturisasi kredit yang berkaitan dengan modifikasi persyaratan kredit diakui bila nilai sekarang dari jumlah penerimaan kas yang akan datang yang telah ditentukan dalam persyaratan kredit yang baru, termasuk penerimaan yang diperuntukkan sebagai bunga maupun pokok, adalah lebih kecil dari nilai kredit yang diberikan yang tercatat sebelum restrukturisasi seperti yang dibahas pada Catatan 3m.

n. Troubled Debt Restructuring

Debt restructuring performed to the borrower that unable or predicted to unable to fulfill its principal payment installments responsibilities or interest according to contractual schedule.

Losses resulting from loan restructuring related to modification of credit terms are recognized if the present value of future cash receipts which have been determined in new loan terms, including receipts designated as interest or principal, is less than the amount of the outstanding loan before the restructuring as discussed in Note 3m.

o. Tagihan dan Liabilitas Akseptasi

Tagihan akseptasi diklasifikasikan dalam kategori pinjaman yang diberikan dan piutang. Liabilitas akseptasi dikategorikan sebagai liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi.

Pengakuan, pengukuran awal, pengukuran setelah pengakuan awal, reklasifikasi, penentuan nilai wajar, penurunan nilai dan penghentian pengakuan tagihan dan liabilitas akseptasi mengacu pada Catatan 3e, 3f, 3g, 3h dan 3i terkait aset keuangan dan liabilitas keuangan.

o. Acceptances Receivable and Payable

Acceptance receivables are classified as loans and receivables. Acceptance liabilities are classified as financial liabilities measured at amortized costs.

Recognition, initial measurement, subsequent measurement, reclassification, fair value measurement, impairment and derecognition of acceptances receivables and payables are discussed in Notes 3e, 3f, 3g, 3h and 3i related to financial assets and financial liabilities.

p. Penyertaan dalam Bentuk Saham

Penyertaan saham dengan pemilikan kurang dari 20% diklasifikasikan dalam kategori tersedia untuk dijual.

Pengakuan, pengukuran awal, pengukuran setelah pengukuran awal, reklasifikasi, penentuan nilai wajar, penurunan nilai dan penghentian pengakuan penyertaan dalam bentuk saham mengacu pada Catatan 3e, 3g, 3h dan 3i terkait aset keuangan.

p. Investment in Shares of Stock

Investment in shares of stock with ownership interest of less than 20% is classified as available-for-sale.

Recognition, initial measurement, subsequent measurement, reclassification, fair value measurement, impairment and derecognition of investments in shares of stock are discussed in Notes 3e, 3g, 3h and 3i related to financial assets.

q. Aset Tetap

Aset tetap, kecuali tanah dan bangunan, yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif dicatat berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

Aset tetap, kecuali tanah, dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Selanjutnya, pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi itu diakui ke dalam jumlah nilai tercatat ("*carrying amount*") aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada saat terjadinya.

q. Premises and Equipment

Premises and equipment, except for land and buildings, held for use in the production or supply of goods or services, or for administrative purposes, are stated at cost, less accumulated depreciation and any accumulated impairment losses.

Fixed assets, except land, are stated at cost less accumulated depreciation and impairment losses. If the recognition criteria are met, the acquisition cost will include the cost of replacing part of the fixed assets when that cost is incurred. Likewise, when a major inspection is performed, its cost is recognized in the carrying amount of the fixed assets as a replacement if the recognition criteria are satisfied. All other repairs and maintenance costs that do not meet the recognition criteria are recognized in the statements of comprehensive income as incurred.

Aset tetap, kecuali tanah, disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus untuk seluruh aset tetap selama umur manfaat aset tetap yang diestimasi sebagai berikut:

Depreciation of fixed assets, except for land, is computed using the straight-line method for fixed assets over the estimated useful lives of the assets, as follows:

	Tahun/ *Years*	
Bangunan dan Instalasi	20	Buildings and Installations
Perlengkapan dan peralatan kantor	4 – 8	Office furniture and equipment
Mesin	4 – 8	Machineries
Kendaraan bermotor	4	Motor vehicles

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan direviu setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif.

The estimated useful lives, residual values and depreciation methods are reviewed at each year end, with the effect of any changes in estimate accounted for on a prospective basis.

Tanah dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dan tidak disusutkan. Aset tetap yang tidak digunakan (aset terbengkalai) dinyatakan sebesar jumlah terendah dari jumlah tercatat atau nilai realisasi bersih.

Land is stated at cost and is not depreciate. Unused assets (abandoned assets) are stated at the lower of the total carrying amount or net realizable value.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya. Biaya-biaya lain yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti atau memperbaiki aset tetap dicatat sebagai biaya perolehan aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

The cost of maintenance and repairs is charged to operations as incurred. Other costs incurred subsequently to add to, replace part of, or service an item of premises and equipment, are recognized as asset if, and only if, it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the entity and the cost of the item can be measured reliably.

Aset tetap yang dihentikan pengakuannya atau yang dijual nilai tercatatnya dikeluarkan dari kelompok aset tetap. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap tersebut dibukukan dalam laba rugi.

When assets are retired or otherwise disposed of, their carrying values are removed from the accounts and any resulting gain or loss is reflected in profit or loss.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan tersebut termasuk biaya pinjaman yang terjadi selama masa pembangunan yang timbul dari utang yang digunakan untuk pembangunan aset tersebut. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan.

Construction in progress is stated at cost which includes borrowing costs during construction on debts incurred to finance the construction. Construction in progress is transferred to the respective property, plant and equipment account when completed and ready for use.

r. Aset Tak Berwujud

r. Intangible Assets

Aset tidak berwujud terdiri dari perangkat lunak yang dibeli Bank.

Intangible assets consist of computer software acquired by the Bank.

Perangkat lunak yang bukan merupakan bagian integral dari perangkat keras yang terkait dicatat sebagai aset tidak berwujud dan dinyatakan sebesar nilai tercatat, yaitu sebesar biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi amortisasi.

Computer software which is not an integral part of a related hardware is recorded as intangible asset and stated at carrying amount, which is cost less accumulated amortization.

Biaya perolehan perangkat lunak terdiri dari seluruh pengeluaran yang dapat dikaitkan langsung dalam persiapan perangkat lunak tersebut hingga siap digunakan sesuai dengan tujuannya.

Cost of software consists of all expenses directly attributable to the preparation of such software, until ready to be used for their intended purpose.

Pengeluaran setelah perolehan perangkat lunak dapat ditambahkan pada biaya perolehan perangkat lunak atau dikapitalisasi sebagai perangkat lunak hanya jika pengeluaran tersebut menambah manfaat ekonomis masa depan dari perangkat lunak bersangkutan. Pengeluaran yang tidak menambah manfaat ekonomis masa depan dari perangkat lunak diakui sebagai beban pada saat terjadinya.

Subsequent expenditure on software is capitalized only when it increases the future economic benefits of the software. Expenditure with no addition of future economic benefits from the software is directly recognized as expenses when incurred.

Perangkat lunak diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus selama taksiran masa manfaat ekonomis selama 4 (empat) tahun.

Computer software is amortized using straightline method based on its estimated useful life of 4 (four) years.

Amortisasi perangkat lunak diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, sejak tanggal perangkat lunak tersebut tersedia untuk dipakai sampai berakhirnya masa manfaat dari perangkat lunak tersebut.

Amortization is recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income from the date that it is available for use until the economic benefits of software is ended.

Masa manfaat ekonomis dan metode amortisasi direviu setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif.

The estimated useful lives and amortization methods are reviewed at each year end, with the effect of any changes in estimate accounted on a prospective basis.

s. Provisi

s. Provisions

Provisi diakui ketika Bank memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, kemungkinan besar Bank diharuskan menyelesaikan kewajiban dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisions are recognized when the Bank has a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, it is probable that the Bank will be required to settle the obligation, and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

Jumlah yang diakui sebagai provisi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan, dengan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian yang meliputi kewajibannya. Apabila suatu provisi diukur menggunakan arus kas yang diperkirakan untuk menyelesaikan kewajiban kini, maka nilai tercatatnya adalah nilai kini dari arus kas.

The amount recognized as a provision is the best estimate of the consideration required to settle the present obligation at the end of the reporting period, taking into account the risks and uncertainties surrounding the obligation. Where a provision is measured using the cash flows estimated to settle the present obligation, its carrying amount is the present value of those cash flows.

Ketika beberapa atau seluruh manfaat ekonomi untuk penyelesaian provisi yang diharapkan dapat dipulihkan dari pihak ketiga, piutang diakui sebagai aset apabila terdapat kepastian bahwa penggantian akan diterima dan jumlah piutang dapat diukur secara andal.

When some or all of the economic benefits required to settle a provision are expected to be recovered from a third party, a receivable is recognized as an asset if it is virtually certain that reimbursement will be received and the amount of the receivable can be measured reliably.

t. Penurunan Nilai Aset Non-keuangan kecuali Goodwill

Pada setiap akhir periode pelaporan, Bank menelaah nilai tercatat aset non-keuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, jumlah terpulihkan dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada). Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi jumlah terpulihkan atas suatu aset individual, Bank mengestimasi jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas atas aset.

Estimasi jumlah terpulihkan adalah nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dan nilai pakai. Dalam menilai nilai pakainya, estimasi arus kas masa depan didiskontokan ke nilai kini menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset yang mana estimasi arus kas masa depan belum disesuaikan.

Jika jumlah terpulihkan dari aset non-keuangan (unit penghasil kas) lebih kecil dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset (unit penghasil kas) diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan dan rugi penurunan nilai segera diakui dalam laba rugi. Kecuali relevan aset tersebut dicatat pada jumlah revaluasian, di mana kerugian penurunan nilai diperlakukan sebagai penurunan revaluasi.

Kebijakan akuntansi untuk penurunan nilai aset keuangan dijelaskan dalam Catatan 3e.

u. Agunan yang Diambil Alih

Tanah dan aset lainnya (jaminan kredit yang telah diambil alih oleh Bank) disajikan dalam akun agunan yang dibambil alih dalam kelompok “Aset Lain-lain”.

Agunan yang diambil alih diakui sebesar nilai realisasi bersih. Selisih lebih saldo kredit di atas nilai realisasi bersih dari agunan yang diambil alih, dibebankan ke dalam akun cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif. Sedangkan selisih lebih nilai realisasi bersih di atas saldo kredit dari agunan yang diambil alih diakui maksimum sebesar saldo kredit dan selisihnya dicatat dalam administrasi Bank.

t. Impairment of Non-financial Asset except Goodwill

At the end of each reporting period, the Bank reviews the carrying amount of non-financial assets to determine whether there is any indication that those assets have suffered an impairment loss. If any such indication exists, the recoverable amount of the asset is estimated in order to determine the extent of the impairment loss (if any). Where it is not possible to estimate the recoverable amount of an individual asset, the Bank estimates the recoverable amount of the cash generating unit to which the asset belongs.

Estimated recoverable amount is the higher of fair value less cost to sell and value in use. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset for which the estimates of future cash flows have not been adjusted.

If the recoverable amount of the non-financial asset (cash generating unit) is less than its carrying amount, the carrying amount of the asset (cash generating unit) is reduced to its recoverable amount and an impairment loss is recognized immediately against earnings. Unless the relevant asset is carried at revaluation amount, in which the impairment loss is treated as revaluation decrease.

Accounting policy for impairment of financial assets is discussed in Note 3e.

u. Foreclosed Properties

Land and other assets (collateral foreclosed by the Bank) are presented in the foreclosed properties account under “Other Assets” account.

Foreclosed properties are stated at net realizable value. The excess of loan receivables over the net realizable value of the foreclosed properties is charged against allowance for impairment losses. If the net realizable value is higher than the loan receivables, the foreclosed properties are recorded at the amount of the loan receivables and the difference is recorded in the Bank’s administrative accounts.

Selisih antara nilai agunan yang diambil alih dan hasil penjualannya diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penjualan agunan.

Biaya-biaya yang berkaitan dengan pemeliharaan agunan yang diambil alih dibebankan ke laba rugi pada saat terjadinya.

Manajemen mengevaluasi nilai agunan yang diambil alih secara berkala. Cadangan kerugian penurunan nilai agunan yang diambil alih dibentuk atas penurunan nilai agunan yang diambil alih.

Bila terjadi penurunan nilai yang bersifat permanen, maka nilai tercatatnya dikurangi untuk mengakui penurunan tersebut dan kerugiannya dibebankan pada laba rugi.

The difference between the carrying amount of foreclosed properties and the proceeds from the sale of such properties is recorded as gain or loss at the time of sale.

The maintenance cost of foreclosed properties is charged to operations as incurred.

Management evaluates the value of foreclosed properties periodically. Allowance for impairment losses on foreclosed properties is reserved on reduction of foreclosed properties value.

The carrying amount of the property is written down to recognize a permanent decline in the value of properties, which is charged to profit or loss.

v. Beban Dibayar Dimuka dan Aset Lain-lain

Terdiri dari beban dibayar di muka dan aset yang tidak material yang tidak dapat digolongkan dalam pos-pos sebelumnya. Aset lain-lain dinyatakan sebesar nilai tercatat, yaitu biaya perolehan setelah dikurangi dengan akumulasi amortisasi, penurunan nilai atau penyisihan kerugian.

v. Prepayments and Other Assets

Represent prepayment and immaterial assets that cannot be classified under the above accounts. Other assets are stated at carrying amount, which is cost less accumulated amortization, allowance for impairment losses or possible losses.

w. Liabilitas Segera

Liabilitas segera dicatat pada saat timbulnya liabilitas, baik dari nasabah maupun dari bank lain. Liabilitas segera dinyatakan sebesar jumlah liabilitas Bank dan diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi.

w. Liabilities Immediately Payable

Liabilities immediately payable are recorded when the payable arise from the customers or from other banks. Liabilities immediately payable are stated at the amount payable by the Bank and measured at their amortized cost.

x. Simpanan

Simpanan diklasifikasikan dalam kategori liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Pengakuan, pengukuran awal, pengukuran setelah pengakuan awal, reklasifikasi, penentuan nilai wajar dan penghentian pengakuan simpanan mengacu pada Catatan 3f, 3g, 3h dan 3i terkait liabilitas keuangan.

x. Deposits

Deposits are classified as financial liabilities measured at amortized costs.

Recognition, initial measurement, subsequent measurement, reclassification, fair value measurement and derecognition of deposits are discussed in Notes 3f, 3g, 3h and 3i related through financial liabilities.

y. Simpanan dari Bank Lain

Simpanan dari bank lain diklasifikasikan dalam kategori liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

y. Deposits from Other Banks

Deposits from other banks are classified as financial liabilities measured at amortized costs.

Simpanan dari bank lain terdiri dari liabilitas terhadap bank lain, baik lokal maupun luar negeri, dalam bentuk giro, *inter-bank call money* dengan periode jatuh tempo menurut perjanjian kurang dari atau 90 hari, tabungan dan deposito berjangka.

Deposits from other banks represent liabilities to domestic and overseas banks, in the form of demand deposits, inter-bank call money deposits with original maturities of 90 days or less, saving deposits and time deposits.

Pengakuan, pengukuran awal, pengukuran setelah pengakuan awal, reklasifikasi, penentuan nilai wajar dan penghentian pengakuan simpanan dari bank lain mengacu pada Catatan 3f, 3g, 3h dan 3i terkait liabilitas keuangan.

Recognition, initial measurement, subsequent measurement, reclassification, fair value and derecognition of deposits from other banks are discussed in Notes 3f, 3g, 3h and 3i related through financial liabilities.

z. Pinjaman subordinasi

z. Subordinated loans

Pinjaman subordinasi diakui sebesar nilai wajar pada awalnya dan selanjutnya diukur sebesar nilai biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal pinjaman subordinasi dan biaya transaksi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suku bunga efektif (Catatan 3f, 3g, 3h dan 3i).

Subordinated loans are initially recognized at fair value and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on subordinated loans and transaction costs that are an integral part of the effective interest rate (Notes 3f, 3g, 3h and 3i).

aa. Pengakuan Pendapatan dan Beban Bunga

aa. Recognition of Interest Revenues and Expenses

Pendapatan dan beban bunga diakui secara akrual menggunakan metode suku bunga efektif (Catatan 3e dan 3g).

Interest income and expenses are recognized on an accrual basis using the effective interest method (Notes 3e and 3g).

Pendapatan kredit yang mengalami penurunan nilai dihitung menggunakan suku bunga efektif atas dasar nilai kredit setelah memperhitungkan kerugian penurunan nilai.

Interest income from impaired loan are computed using the effective interest method based on the amount of loan net of impairment loss.

bb. Pengakuan Pendapatan dan Beban Provisi dan Komisi

bb. Recognition of Revenues and Expenses on Commissions and Fees

Pendapatan provisi dan komisi yang berkaitan langsung dengan kegiatan perkreditan atau jangka waktu tertentu yang jumlahnya signifikan ditangguhkan dan diamortisasi sesuai dengan jangka waktunya dengan menggunakan suku bunga efektif.

Commissions and fees income related to loan activities or specific terms and with significant amounts are treated as deferred transaction costs which are directly attributable to the financial instruments and amortized over the periods of the related financial instruments using the effective interest method.

Provisi dan komisi yang tidak berkaitan dengan kegiatan perkreditan atau pinjaman dan jangka waktu tertentu atau nilainya tidak material menurut Bank diakui sebagai pendapatan atau beban pada saat terjadinya transaksi.

Commissions and fees, which are not related to loan activities and terms of the loan or whose amount is not material according to the Bank are recognized as revenues or expenses at the time the transactions are made.

cc. Imbalan Pasca Kerja

Bank menyelenggarakan program pensiun iuran pasti untuk semua karyawan tetapnya. Bank juga membukukan imbalan pasca kerja imbalan pasti untuk karyawan sesuai dengan Undang Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003. Bank menghitung selisih antara imbalan yang diterima karyawan berdasarkan undang-undang yang berlaku dengan manfaat yang diterima dari program pensiun untuk pensiun normal.

Efektif 1 Januari 2015, Bank menerapkan PSAK 24 (Revisi 2013) "Imbalan Kerja". Akuntansi oleh entitas untuk program imbalan pasti menggunakan metode Projected Unit Credit dalam menentukan nilai kini dari kewajiban imbalan pasti dan biaya jasa kini. Bank menyelenggarakan program imbalan pasca kerja manfaat pasti untuk karyawan tetap dengan menggunakan kebijakan asuransi untuk mendanai imbalan pasca kerja tersebut sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan AIA Financial sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama No: 16 FPP60297.

Dana Pensiun Lembaga Keuangan AIA Financial digolongkan sebagai program multipemberi kerja. Berdasarkan PSAK 24 paragraf 8 bahwa, "Program multipemberi kerja adalah program iuran pasti atau program imbalan pasti (selain program jaminan sosial) yang: (a) menyatukan aset yang dikontribusikan dari beberapa entitas yang tidak sepengendali; dan (b) menggunakan aset tersebut untuk memberikan imbalan kepada para pekerja yang berasal lebih dari satu entitas, dengan dasar bahwa tingkat iuran dan imbalan ditentukan tanpa memperhatikan identitas entitas yang mempekerjakan pekerja tersebut."

Selanjutnya, PSAK 24 paragraf 33 menyatakan bahwa, "Jika entitas berpartisipasi dalam program imbalan pasti multipemberi kerja, kecuali paragraf 34 diterapkan, maka entitas: (a) melaporkan bagian proporsionalnya atas kewajiban imbalan pasti, aset program, dan biaya terkait dengan program tersebut dengan cara yang sama dengan program imbalan pasti lain; dan (b) mengungkapkan informasi yang diisyaratkan oleh paragraf 135-148 (kecuali paragraf 148 (d)). "

cc. Employee Benefits

The Bank established defined contribution pension plan covering all the local permanent employees. In addition, the Bank also provides post-employment benefits as required under Labor Law No. 13/2003 (the “Labor Law”). For normal pension scheme, the Bank calculates and recognizes the higher of the benefits under the Labor Law and those under such pension plan.

Effective on January 1, 2015, the Bank has adopted PSAK 24 (Revised 2013), “Employee Benefits”. Accounting by an entity for defined benefit plans using the projected unit credit method to determine the present value of the defined benefit obligation and current service cost. The Bank has implemented a defined post-employment benefit plan for its permanent employees, by using an insurance policy to fund post-employment benefits in accordance with Labor Law No. 13/2003 at Dana Pensiun Lembaga Keuangan AIA Financial in accordance with the Cooperation Agreement No: 16FPP60297.

Dana Pensiun Lembaga Keuangan AIA Financial is classified as multiemployer plans. Based on PSAK 24 paragraph 8 "Multi employer plans are defined contribution plans or defined benefits plans (other than state plans) that: (a) Pooled the assets contributed by various entities that are not under common control; and (b) use those assets to provide benefits to employees of more than one entity, on the basis that contribution and benefit levels are determined without regard to the identity of the entity that employs the employees."

Further, PSAK 24 paragraph 33 explains, ”If an entity participates in a multi-employer defined benefit plan, unless paragraph 34 apllies, it shall: (a) account for its proportional share of the defined benefit obligation, plan assets and cost associated with the plan in the same way as for many other defined benefit plan; and (b) disclose the information required by paragraph 135-148 (excluding paragraph 148 (d))”.

Berdasarkan PSAK 24 paragraf 34, ketika informasi memadai tidak tersedia dalam menerapkan akuntansi imbalan pasti untuk program imbalan pasti multipemberi kerja, maka entitas: (a) mencatat program sesuai dengan pengaturan di paragraf 51 dan 52 seolah-olah sebagai program iuran pasti; dan (b) mengungkapkan informasi yang disyaratkan oleh paragraph 148.

Based on PSAK 24 paragraph 34, when sufficient information is not available to use defined benefit accounting for a multi-employer defined benefit plan, an entity shall: (a) account for the plan in accordance with paragraph 51 and 52 as if it were defined contribution plan; and (b) disclose the information required by paragraph 148.

Informasi terkait bagian proporsional atas kewajiban imbalan pasti, aset program dan biaya terkait polis asuransi tidak tersedia. Bank mencatat polis asuransi tersebut seolah-olah sebagai program iuran pasti sebagaimana diwajibkan pada PSAK 24 paragraf 34.

Information about proportional share of the defined benefit obligation, plan assets and cost associated with insurance policy is not available. The Bank account for the insurance policy as if it were defined contribution plan as required by PSAK 24 paragraph 34.

dd. Pajak Penghasilan

dd. Income Tax

Pajak saat terutang berdasarkan laba kena pajak untuk suatu tahun. Laba kena pajak berbeda dari laba sebelum pajak seperti yang dilaporkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain karena pos pendapatan atau beban yang dikenakan pajak atau dikurangkan pada tahun berbeda dan pos-pos yang tidak pernah dikenakan pajak atau tidak dapat dikurangkan.

The tax currently payable is based on taxable profit for the year. Taxable profit differs from profit before tax as reported in the statement of profit or loss and other comprehensive income because of items of income or expense that are taxable or deductible in other years and items that are never taxable or deductible.

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Current tax expense is determined based on the taxable income for the year computed using prevailing tax rates.

Pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak yang digunakan dalam perhitungan laba kena pajak. Liabilitas pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer kena pajak. Aset pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar bahwa laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika perbedaan temporer timbul dari pengakuan awal (bukan kombinasi bisnis) dari aset dan liabilitas suatu transaksi yang tidak mempengaruhi laba kena pajak atau laba akuntansi. Selain itu, liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika perbedaan temporer timbul dari pengakuan awal *goodwill*.

Deferred tax is recognized on temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities in the financial statements and the corresponding tax bases used in the computation of taxable profit. Deferred tax liabilities are generally recognized for all taxable temporary differences. Deferred tax assets are generally recognized for all deductible temporary differences to the extent that is probable that taxable profits will be available against which those deductible temporary differences can be utilized. Such deferred tax assets and liabilities are not recognized if the temporary differences arises from the initial recognition (other than in a business combination) of assets and liabilities in a transaction that affects neither the taxable profit nor the accounting profit. In addition, deferred tax liabilities are not recognized if the temporary differences arises from the initial recognition of goodwill.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku dalam periode ketika liabilitas diselesaikan atau aset dipulihkan berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Bank memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan dan dikurangi jumlah tercatatnya jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut.

Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai beban atau penghasilan dalam laba rugi periode, kecuali sepanjang pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui, di luar laba rugi (baik dalam penghasilan komprehensif lain maupun secara langsung di ekuitas), dalam hal tersebut pajak juga diakui di luar laba rugi.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus ketika entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan ketika aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas entitas kena pajak yang sama atau entitas kena pajak yang berbeda yang memiliki intensi untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diharapkan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply in the period in which the liability is settled or the asset realized, based on the tax rates (and tax laws) that have been enacted, or substantively enacted, by the end of the reporting period.

The measurement of deferred tax assets and liabilities reflects the tax consequences that would follow from the manner in which the Bank expects, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of their assets and liabilities.

The carrying amount of deferred tax asset is reviewed at the end of each reporting period and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profits will be available to allow all or part of the asset to be recovered.

Current and deferred tax are recognized as an expense or income in profit or loss, except when they relate to items that are recognized outside of profit or loss (whether in other comprehensive income or directly in equity), in which case the tax is also recognized outside of profit or loss.

Deferred tax assets and liabilities are offset when there is legally enforceable right to set off current tax assets against current tax liabilities and when they relate to income taxes levied by the same taxation authority on either the same taxable entity or different taxable entities when there is an intention to settle its current tax assets and current tax liabilities on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax liabilities or assets are expected to be settled or recovered.

ee. Laba per Saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

ee. Earnings per Share

Basic earnings per share are computed by dividing the net income by the weighted average number of shares outstanding during the year.

Laba per saham dilusian dihitung dengan membagi laba bersih dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang telah disesuaikan dengan dampak dari semua efek berpotensi saham biasa yang dilutif.

Diluted earnings per share is computed by dividing net income by the weighted average number of shares outstanding as adjusted for the effects of all potentially dilutive ordinary shares.

ff. Informasi Segmen

Segmen operasi diidentifikasi berdasarkan laporan internal mengenai komponen dari Bank yang secara regular direview oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

a. yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);

b. yang hasil operasinya dikaji ulang secara regular oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan

c. dimana tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Informasi yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka alokasi sumber daya dan penilaian kinerja mereka terfokus pada kategori dari area geografis cabang.

ff. Segment Information

Operating segments are identified on the basis of internal reports about components of the Bank that are regularly reviewed by the chief operating decision maker in order to allocate resources to the segments and to assess their performances.

An operating segment is a component of an entity:

a. that engages in business activities from which it may earn revenue and incurred expenses (including revenues and expenses relating to the transactions with other components of the same entity);

b. whose operating results are reviewed regularly by the entity's chief operating decision maker to make decision about resources to be allocated to the segments and assess its performance; and

c. for which discrete financial information is available.

Information reported to the chief operating decision maker for the purpose of resource allocation and assessment of performance is more specifically focused on the category of geographical areas of branches.

4. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Bank, yang dijelaskan dalam Catatan 3, manajemen diwajibkan untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi tentang jumlah tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi dan asumsi yang terkait didasarkan pada pengalaman historis dan faktor-faktor lain yang dianggap relevan. Hasil aktualnya mungkin berbeda dari estimasi tersebut.

4. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND ESTIMATES

In the application of the Bank accounting policies, which are described in Note 3, the management is required to make judgements, estimates and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and associated assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant. Actual results may differ from these estimates.

Estimasi dan asumsi yang mendasari ditelaah secara berkelanjutan. Revisi estimasi akuntansi diakui dalam periode dimana estimasi tersebut direvisi jika revisi hanya mempengaruhi periode tersebut, atau pada periode revisi dan periode masa depan jika revisi mempengaruhi periode saat ini dan masa depan.

The estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognized in the period which the estimates is revised if the revision affects only that period, or in the period of the revision and future periods if the revision affects both current and future periods.

Pertimbangan Kritis dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi

Critical Judgement in Applying Accounting Policies

Di bawah ini adalah pertimbangan kritis, selain dari estimasi yang telah diatur, dimana direksi telah membuat suatu proses penerapan kebijakan akuntansi Bank dan memiliki pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

Below are the critical judgments, apart from those involving estimations, that the direcotrs has made in the process of applying the Bank's accounting policies and that have the most significant effect on the amounts recognized in the financial statements.

Aset Keuangan yang Dimiliki Hingga Jatuh Tempo

Held-to-maturity Financial Assets

Direktur telah menelaah aset keuangan Bank yang dimiliki hingga jatuh tempo karena persyaratan pemeliharaan modal dan likuiditas dan telah dikonfirmasi intensi positif Bank dan kemampuan untuk memiliki aset tersebut hingga jatuh tempo. Rincian dan jumlah tercatat aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo dijelaskan dalam Catatan 9.

The directors have reviewed the Bank's held-to-maturity financial assets in the light of its capital maintenance and liquidity requirements and have confirmed the Bank's positive intention and ability to hold those assets to maturity. The details and carrying amounts of the held-to-maturity financial assets are described in Note 9.

Sumber Estimasi Ketidakpastian

Key Sources of Estimation Uncertainty

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber estimasi ketidakpastian utama lainnya pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya dijelaskan dibawah ini:

The key assumptions concerning future and other key sources of estimation uncertainty at the end of the reporting period, that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial period are discussed below:

Rugi Penurunan Nilai Aset Keuangan

Impairment Loss on Financial Assets

Bank menilai penurunan nilai aset keuangan pada setiap tanggal pelaporan. Dalam menentukan apakah rugi penurunan nilai harus dicatat dalam laba rugi, manajemen membuat penilaian, apakah terdapat bukti obyektif bahwa kerugian telah terjadi. Suatu aset keuangan dinyatakan mengalami penurunan nilai bila ada bukti obyektif terjadinya peristiwa yang berdampak pada estimasi arus kas atas aset keuangan. Bukti tersebut meliputi data yang dapat diobservasi yang menunjukkan bahwa telah terjadi peristiwa yang merugikan dalam status pembayaran debitur atau kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan kelalaian membayar piutang.

The Bank assesses its financial assets at each reporting date. In determining whether the impairment loss should be recorded in profit or loss, management makes judgement as to whether there is an objective evidence that loss event has occured. Financial assets are considered to be impaired when there is objective evidence that, as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the financial asset, the estimated future cash flows of the financial assets have been affected. The evidence includes observable data which indicates that an adverse event has occurred in the payment status of borrowers or in the national or local economic conditions that correlate with the omission of payment of receivables.

Cadangan kerugian penurunan nilai akan dibentuk untuk mengakui kerugian penurunan nilai yang terjadi dalam portofolio aset keuangan. Manajemen menggunakan perkiraan berdasarkan pengalaman kerugian historis untuk aset dengan karakteristik risiko kredit dan bukti obyektif adanya penurunan nilai yang serupa dengan yang ada dalam portofolio pada saat penjadwalan arus kas masa depan.

Direktur juga membuat penilaian atas metodologi dan asumsi untuk memperkirakan jumlah dan waktu arus kas masa depan yang direviu secara berkala untuk mengurangi perbedaan antara estimasi kerugian dan kerugian aktualnya.

Bank melakukan penilaian terhadap penurunan nilai dalam dua cara, yaitu:

a. Individual, dilakukan untuk jumlah aset keuangan yang melebihi ambang batas (*threshold*) tertentu dan aset keuangan yang memiliki bukti obyektif penurunan nilai yang telah teridentifikasi secara terpisah pada tanggal laporan posisi keuangan. Kerugian penurunan nilai adalah selisih antara nilai tercatat dan nilai kini dari estimasi terbaik atas arus kas masa depan dan realisasi agunan pada tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Estimasi ini dilakukan dengan mempertimbangkan kapasitas utang dan fleksibilitas keuangan debitur, kualitas pendapatan debitur, jumlah dan sumber arus kas, industri di mana debitur beroperasi dan nilai realisasi agunan. Estimasi jumlah dan waktu pemulihan masa depan akan membutuhkan banyak pertimbangan. Jumlah penerimaan tergantung pada kinerja debitur pada masa mendatang dan nilai agunan, keduanya akan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi di masa depan, di samping itu agunan mungkin tidak mudah dijual. Nilai aktual arus kas masa depan dan tanggal penerimaan mungkin berbeda dari estimasi tersebut dan akibatnya kerugian aktual yang terjadi mungkin berbeda dengan yang diakui dalam laporan keuangan.

Provision for loss on impairment will be set up to recognize the impairment loss that occurs in a portfolio of financial assets. Management uses estimates based on historical loss experience for assets with credit risk characteristics and objective evidence of impairment similar to those in the portfolio when scheduling the future cash flows.

The Directors also makes judgement as to the methodology and assumptions for estimating the amount and timing of future cash flows which are reviewed regularly to reduce any difference between loss estimate and actual loss.

The Bank performs assessment of the impairment amounts in two ways, namely:

a. Individually, made to the amount of financial assets that exceed certain threshold and to certain financial assets that have objective evidence that impairment has been identified separately on the date of statement of financial position. Impairment loss is the difference between the carrying amount and the present value of the best estimated future cash flows and realization of collateral at the initial effective interest rates of financial assets. The estimates are made by considering the debt capacity and financial flexibility of the debtor, debtor's earnings quality, quantity and source of cash flows, industry in which the debtor operates and realizable value of collateral. Estimating the amount and timing of future recovery will require a lot of considerations. The amount of revenue depends on the performance of the debtor in the future and the value of collateral, both of which will be affected by future economic conditions, in addition to the fact that the collateral may not be easily sold. The actual value and date of receipt of future cash flows may differ from the estimates and as a result, actual loss which occurs may be different from the amount recognized in the financial statements.

b. Kolektif, dilakukan untuk jumlah aset keuangan yang tidak melebihi ambang batas (*threshold*) tertentu, tidak memiliki bukti obyektif penurunan nilai dan aset keuangan yang memiliki bukti obyektif penurunan nilai, namun belum diidentifikasi secara terpisah pada tanggal laporan posisi keuangan. Pembentukan kerugian penurunan nilai dilakukan secara kolektif dengan antara lain memperhitungkan jumlah dan lamanya tunggakan, agunan dan pengalaman kerugian masa lalu. Faktor paling penting dalam pembentukan cadangan adalah *probability of default* dan *loss given default*. Kualitas aset keuangan pada masa mendatang dipengaruhi oleh ketidakpastian yang dapat menyebabkan kerugian aktual aset keuangan dapat berbeda secara material dari cadangan kerugian penurunan nilai yang telah dibentuk. Ketidakpastian ini termasuk lingkungan ekonomi, suku bunga dan pengaruhnya terhadap pembelanjaan debitur, tingkat pengangguran dan perilaku pembayaran.

b. Collectively, made to the amount of financial assets that do not exceed certain threshold and do not have objective evidence of impairment when assessed individually, and to the financial assets that have objective evidence of impairment but has not been identified separately on the date of statement of financial position. Establishment of collective impairment loss is made by, among others, taking into account the number and duration of arrears, collateral and past loss experience. The most important factors in establishing reserves are the probability of default and the loss given default. The quality of financial assets in the future is affected by uncertainties that could cause actual loss on financial assets, which may differ materially from the impairment loss reserves that have been established. These uncertainties include the economic environment, interest rates and the effect on spending of the debtor, unemployment rate and payment behavior.

Manfaat Karyawan

Penentuan liabilitas imbalan kerja tergantung pada pemilihan asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam menghitung jumlah liabilitas tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji. Realisasi yang berbeda dari asumsi Bank diakui dalam penghasilan komprehensif lain yang diakui di tahun berjalan. Walaupun asumsi Bank dianggap tepat dan wajar, namun perubahan signifikan pada kenyataannya atau perubahan signifikan dalam asumsi yang digunakan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap liabilitas imbalan pasca kerja Bank.

Employee Benefits

Determination of liability for employee benefits depends on the selection of certain assumptions used by actuaries in calculating the amount of such liability. These assumptions include, among others, the discount rate and the rate of increase in salaries. Actual results that differ from the Bank's assumptions are recognized in other comprehensive income in the period in which they occur. Although the assumptions used by the Bank are assessed to be appropriate and fair, significant changes in actual events or significant changes in the assumptions used can significantly affect the Bank's post-employment benefits liability.

Taksiran Masa Manfaat Ekonomis Aset Tetap

Masa manfaat setiap aset tetap Bank ditentukan berdasarkan kegunaan yang diharapkan dari aset tersebut. Estimasi ini ditentukan berdasarkan evaluasi teknis internal dan pengalaman atas aset sejenis. Masa manfaat setiap aset direviu secara periodik dan disesuaikan apabila prakiraan berbeda dengan estimasi sebelumnya karena keausan, keusangan teknis dan komersial, hukum atau keterbatasan lainnya atas pemakaian aset. Namun terdapat kemungkinan bahwa hasil operasi dimasa mendatang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan atas jumlah serta periode pencatatan biaya yang diakibatkan karena perubahan faktor yang disebutkan di atas.

Estimated Useful Lives of Premises and Equipment

The useful life of each item of the Bank's premises and equipment, are estimated based on the period over which the asset is expected to be available for use. Such estimation is based on internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful life of each asset is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limits on the use of the asset. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the amounts and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above.

Perubahan masa manfaat aset tetap dapat mempengaruhi jumlah biaya penyusutan yang diakui dan penurunan nilai tercatat aset tersebut.

A change in the estimated useful life of any item of premises and equipment would affect the recorded depreciation expense and decrease in the carrying values of these assets.

Nilai tercatat aset tetap diungkapkan dalam Catatan 12.

The carrying amounts of premises and equipment are disclosed in Note 12.

5. KAS / 5. CASH

	31 Desember/ *December 31,* 2017 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2016 Rp	
Rupiah:			Rupiah:
Kas	72.230.642	61.138.671	Cash
Kas pada ATM	8.175.600	9.322.550	Cash in ATMs
Mata uang asing:			Foreign currencies:
Dolar Amerika Serikat	5.826.807	14.973.431	United States Dollar
Mata uang asing lainnya	2.751.104	2.686.031	Others foreign currencies
Jumlah	88.984.153	88.120.683	Total

Kas dalam mata uang asing lainnya adalah Dolar Singapura, Pound Sterling, Yen, Dolar Hongkong, Dolar Australia, Baht, Real Arab Saudi, Dolar Kanada, Renminbi China, Ringgit Malaysia, Dolar Taiwan , Won Korea dan Euro (lihat Catatan 38).

Cash in other foreign currencies are denominated in Singapore Dollars, Pound Sterling, Yen, Hongkong Dollars, Australian Dollars, Baht, Saudi Arabian Real, Canadian Dollars, China Renminbi, Malaysian Ringgit, Taiwanese Dollars, Won Korea and Euro (see Note 38).

Kas ATM, kas di brankas, dan kas dalam perjalanan diasuransikan terhadap risiko asuransi kebongkaran kepada PT Avrist General Insurance (pihak ketiga).

Cash in ATMs, Cash in Safe and Cash in Transit are insured for burglary risks with PT Avrist General Insurance (third party).

Manajemen Bank berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut telah memadai untuk menutupi kemungkinan kerugian dari risiko tersebut.

The management of the Bank believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses arising from such risks.

6. GIRO PADA BANK INDONESIA / 6. DEMAND DEPOSITS WITH BANK INDONESIA

	31 Desember/ *December 31,* 2017 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2016 Rp	
Rupiah	432.745.080	379.638.205	Rupiah
Dolar Amerika Serikat	31.205.250	53.890.000	U.S. Dollar
Jumlah	463.950.330	433.528.205	Total

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 15/15/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013 dan perubahannya PBI No. 17/21/PBI/2015 tanggal 26 November 2015, PBI No. 18/3/PBI/2016 tanggal 10 Maret 2016, PBI No. 18/14/PBI/2016 tanggal 18 Agustus 2016 dan PBI No. 19/6/PBI/2017 tanggal 18 April 2017 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, setiap bank di Indonesia diwajibkan mempunyai saldo giro minimum di Bank Indonesia untuk cadangan likuiditas. Giro Wajib Minimum (GWM) dalam Rupiah terdiri dari GWM Primer yang ditetapkan sebesar rata-rata 6,5% dan secara harian sebesar 5% dan GWM Sekunder ditetapkan sebesar 4% serta GWM *Loan to Funding Ratio* (LFR) sebesar perhitungan antara parameter disinsentif bawah atau parameter disinsentif atas dengan selisih antara LFR bank dan LFR target dengan memperhatikan selisih antara Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) bank dan KPMM Insentif. GWM dalam Dollar Amerika Serikat ditetapkan sebesar 8%.

In accordance with Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 15/15/PBI/2013 dated December 24, 2013 and its amendments PBI No. 17/21/PBI/2015 dated November 26, 2015, PBI No. 18/3/PBI/2016 dated March 10, 2016, PBI No. 18/14/PBI/2016 dated August 18, 2016 and PBI No. 19/6/PBI/2017 dated April 18, 2017 regarding Minimum Statutory Reserves (GWM) in Rupiah and Foreign Currencies for Commercial Banks, each bank in Indonesia is required to have a minimum demand deposit balance in Bank Indonesia as liquidity reserve. The GWM in Rupiah consists of Primary GWM which is set at average 6.5% and daily is set at 5% and the Secondary GWM which is set at 4% and GWM Loan to Funding Ratio (LFR GWM) which is determined based on parameters under disincentive and over disincentive for the difference between the bank's LFR and target LFR by taking into account the difference between the bank's Capital Adequacy Ratio (CAR) and CAR incentive. GWM in United States Dollar is set at 8%.

GWM Sekunder adalah cadangan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI), Surat Utang Negara (SUN) dan/atau *Excess Reserve*, sebesar persentase tertentu dari Dana Pihak Ketiga (DPK).

Secondary GWM is minimum reserve that should be maintained by Bank in the form of Bank Indonesia Certificates (SBI), Certificate Deposit of Bank Indonesia (SDBI), Government Debenture Debt (SUN) and/or Excess Reserve, in certain percentage of Third Party Funds (TPF).

GWM *Loan to Deposit Ratio* (LDR) adalah simpanan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo Rekening Giro pada Bank Indonesia sebesar persentase dari DPK yang dihitung berdasarkan selisih antara LDR yang dimiliki oleh Bank dengan LDR Target.

Loan to Deposit Ration (LDR) is the minimum reserve deposits that should be maintained by Bank in the form of demand deposits with Bank Indonesia amounting to a percentage of TPF is calculated based on the difference between LDR owned by the Bank and the LDR target.

GWM *Loan to Funding Ratio* (LFR) adalah simpanan minimum dalam Rupiah yang wajib dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo Rekening Giro pada Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK dan selisih antara LFR yang dimiliki oleh Bank dan LFR Target.

Loan to Funding Ratio (LFR) is the minimum reserve deposits that should be maintained by Bank in the form of demand deposits with Bank Indonesia amounting to a percentage of TPF and on the difference between LFR owned by the Bank and the LFR target.

GWM Utama adalah simpanan minimum yang wajib dibentuk oleh Bank dalam bentuk saldo Rekening Giro pada BI sebesar persentase tertentu dari DPK.

Primary GWM is minimum deposits that should be maintained by Bank in the form of demand deposits with BI in certain percentage of TPF.

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 , GWM Bank masing-masing sebesar 15,58% dan 21,84%, untuk mata uang Rupiah, serta sebesar 8,37% dan 8,10%, untuk mata uang asing. Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Bank memiliki LDR adalah masing-masing sebesar 93,99% dan 84,18%.

As of December 31, 2017 and 2016 , GWM of the Bank were 15.58% and 21.84%, for Rupiah currency, and 8.37% and 8.10%, for foreign currency, respectively. As of December 31, 2017 and 2016 Bank had LDR which are equal to 93.99% and 84.18%, respectively.

GWM Bank dalam Rupiah sebesar 15,58% dan 21,84%, terdiri dari GWM Utama sebesar 7,10% dan 6,68%, dengan menggunakan saldo rekening giro Rupiah pada BI dan GWM Sekunder sebesar 8,48% dan 15.16%, dengan menggunakan SBI dan Obligasi Pemerintah.

GWM of the Bank in Rupiah was 15.58% and 21.84%, which consists of Primary GWM of 7.10% and 6.68%, through Rupiah demand deposits with BI and Secondary GWM of 8,48% and 15.16%, through SBI and Government Bonds.

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, Bank telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum.

As of December 31, 2017 and 2016, the Bank has complied with the Bank Indonesia's regulation regarding the Minimum Statutory Reserve for Commercial Banks.

7. GIRO PADA BANK LAIN / 7. DEMAND DEPOSITS WITH OTHER BANKS

a. Berdasarkan mata uang / a. By currency

	31 Desember/ *December 31,* 2017 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2016 Rp	
Rupiah:			Rupiah:
PT Bank Central Asia Tbk	7.684.512	6.458.238	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.763.726	1.727.860	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	1.422.785	977.478	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
Standard Chartered Bank	138.627	230.712	Standard Chartered Bank
Jumlah Rupiah	11.009.650	9.394.288	Total Rupiah
Mata uang asing:			Foreign currencies:
Pihak berelasi			Related party
PT Bank Of Tokyo-Mitsubushi UFJ	6.849.926	748.736	PT Bank Of Tokyo-Mitsubushi UFJ
Pihak ketiga			Third parties
Standard Chartered Bank	46.781.996	187.076.156	Standard Chartered Bank
PT Bank Central Asia Tbk	28.716.114	69.800.503	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	10.206.214	83.684.591	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
United Overseas Bank (UOB)	3.611.026	5.327.614	United Overseas Bank (UOB)
Commonwealth Bank	2.996.292	3.989.306	Commonwealth Bank
PT Bank ICBC Indonesia	1.305.965	1.289.738	PT Bank ICBC Indonesia
Sumitomo Mitsui Bank	70.925	44.262	Sumitomo Mitsui Bank
Jumlah mata uang asing	93.688.532	351.212.170	Total foreign currencies
Jumlah	111.548.108	361.355.194	Total

b. Tingkat suku bunga rata-rata per tahun adalah sebagai berikut:

b. Average interest rate per annum are as follows:

	2017	2016	
Rupiah	0,93%	0,97%	Rupiah
Mata uang asing	0,08%	0,08%	Foreign currencies

c. Manajemen Bank berkeyakinan bahwa tidak ada cadangan kerugian penurunan nilai giro pada bank lain yang perlu dibentuk pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

c. The Bank's management believes that there was no allowance for impairment losses on demand deposits with other banks to be provided as of December 31, 2017 and 2016.

d. Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, tidak terdapat giro pada bank lain yang digunakan sebagai jaminan.

d. As of December 31, 2017 and 2016 , there were no demand deposits with other banks which are pledged as cash collateral.

8. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN

a. Berdasarkan jenis dan mata uang

	31 Desember/ *December 31,* 2017 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2016 Rp	
Rupiah:			Rupiah:
Deposit facility pada BI	266.974.049	417.207.298	Deposit facility with BI
Deposito berjangka			Time deposits
PT Bank ICBC Indonesia	70.000.000	-	PT Bank ICBC Indonesia
Jumlah Rupiah	336.974.049	417.207.298	Total Rupiah
Mata uang asing:			Foreign currencies:
Dolar Amerika			United States Dollars
Setoran jaminan pada BI	679.306	674.549	Security deposits with BI
Deposito berjangka			Time deposits
PT Bank ICBC Indonesia	54.270.000	-	PT Bank ICBC Indonesia
Jumlah mata uang asing	54.949.306	674.549	Total foreign currencies
Jumlah	391.923.355	417.881.847	Total

b. Berdasarkan kolektibilitas

Berdasarkan ketentuan BI yang berlaku, penempatan pada BI dan bank lain pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 diklasifikasikan lancar.

c. Berdasarkan transaksi dengan pihak berelasi dan pihak ketiga

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, tidak terdapat penempatan pada pihak berelasi.

d. Berdasarkan jatuh tempo

	31 Desember/ *December 31,* 2017 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2016 Rp	
Rupiah:			Rupiah:
Kurang dari 1 bulan	336.974.049	417.207.298	Less than 1 month
Mata uang asing:			Foreign currencies:
Kurang dari 1 bulan	54.270.000	-	Less than 1 month
6-12 bulan	679.306	674.549	6-12 months
Jumlah	391.923.355	417.881.847	Total

8. PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA AND OTHER BANKS

a. By type and currency

b. By collectability

Based on the prevailing BI regulation, placements with BI and other banks as of December 31, 2017 and 2016 were classified as current.

c. By transaction with related party and third party

As of December 31, 2017 and 2016, there were no placements with related party.

d. By maturity

e. Tingkat suku bunga rata-rata per tahun adalah sebagai berikut:

e. Average interest rate per annum are as follows:

2017	2016	
Rupiah 4,26%	5,12%	Rupiah
Mata uang asing 1,23%	0,00%	Foreign currencies

f. Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, tidak terdapat penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain yang digunakan sebagai jaminan.

f. As of December 31, 2017 and 2016 there were no placements with other banks which are pledged as collateral.

g. Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 terdapat penempatan pada bank lain yang dijadikan jaminan masing-masing sebesar Rp 679.306 dan Rp 674.549.

g. As of December 31, 2017 and 2016 there were placements with other banks pledged as cash collateral amounting to Rp 679,306 and Rp 674,549, respectively.

h. Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain akan diselesaikan dalam waktu tidak lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan posisi keuangan.

Manajemen Bank berkeyakinan bahwa tidak ada cadangan kerugian penurunan nilai penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain yang perlu dibentuk pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

h. Placements with Bank Indonesia and other banks will be settled within no more than 12 months after the date of the statements of financial position.

The Bank's management believes that there was no allowance for impairment losses in placements with Bank Indonesia and other banks to be provided as of December 31, 2017 and 2016.

9. EFEK-EFEK DIMILIKI HINGGA JATUH TEMPO

9. HELD-TO-MATURITY SECURITIES

a. Berdasarkan jenis mata uang

a. By type and currency

	31 Desember/*December 31,* 2017				
	Nilai nominal/ *Nominal value*	Bunga yang belum diamortisasi/ *Unamortized interest*	Premi (Diskonto)/ *Premium (Discounts)*	Nilai tercatat/ *Carrying amount*	
	Rp	Rp	Rp	Rp	
Dimiliki hingga jatuh tempo					Held to maturity
Rupiah:					Rupiah:
Sertifikat Bank Indonesia	200.000.000	(3.407.693)	-	196.592.307	Certificates of Bank Indonesia
Obligasi	254.354.000	-	3.338.440	257.692.440	Bonds
Sukuk ijarah	62.000.000	-	49.397	62.049.397	*Sukuk ijarah*
Jumlah Rupiah	516.354.000	(3.407.693)	3.387.837	516.334.144	Total Rupiah
Mata uang asing:					Foreign currency:
Dimiliki hingga jatuh tempo					Held to maturity
Obligasi	139.333.500	-	10.178.595	149.512.095	Bonds
Jumlah mata uang asing	139.333.500	-	10.178.595	149.512.095	Total foreign currency
Jumlah	655.687.500	(3.407.693)	13.566.432	665.846.239	Total

	31 Desember/*December 31,* 2016				
	Nilai nominal/ *Nominal value*	Bunga yang belum diamortisasi/ *Unamortized interest*	Premi (Diskonto)/ *Premium (Discounts)*	Nilai tercatat/ *Carrying amount*	
	Rp	Rp	Rp	Rp	
Dimiliki hingga jatuh tempo					Held to maturity
Rupiah:					Rupiah:
Sertifikat Bank Indonesia	465.000.000	(9.691.107)	-	455.308.893	Certificates of Bank Indonesia
Obligasi	334.354.000	-	3.136.668	337.490.668	Bonds
Sukuk ijarah	62.000.000	-	316.876	62.316.876	*Sukuk ijarah*
Pinjaman yang diberikan dan piutang					Loans and receivables
Wesel SKBDN	5.124.906	-	-	5.124.906	Domestic Letter of Credit (SKBDN)
Jumlah Rupiah	866.478.906	(9.691.107)	3.453.544	860.241.343	Total Rupiah
Mata uang asing:					Foreign currency:
Dimiliki hingga jatuh tempo					Held to maturity
Obligasi	139.333.500	-	11.378.255	150.711.755	Bonds
Pinjaman yang diberikan dan piutang					Loans and receivables
Wesel ekspor	1.230.352	-	-	1.230.352	Export bills
Jumlah mata uang asing	140.563.852	-	11.378.255	151.942.107	Total foreign currency
Jumlah	1.007.042.758	(9.691.107)	14.831.799	1.012.183.450	Total

b. Berdasarkan jatuh tempo / b. By maturity

	31 Desember/ *December 31,* 2017	31 Desember/ *December 31,* 2016	
	Rp	Rp	
Rupiah:			Rupiah:
Kurang dari 1 tahun	256.636.576	539.863.526	Less than 1 year
1 - 5 tahun	67.223.277	97.302.218	1 - 5 years
5 - 10 tahun	134.971.116	165.348.647	5 - 10 years
Lebih dari 10 tahun	57.503.175	57.726.952	More than 10 year
Jumlah Rupiah	516.334.144	860.241.343	Total Rupiah
Mata uang asing:			Foreign currencies:
Kurang dari 1 tahun	40.702.499	1.230.352	Less than 1 year
1 - 5 tahun	40.904.101	83.261.581	1 - 5 years
5 - 10 tahun	67.905.495	67.450.174	5 - 10 years
Jumlah mata uang asing	149.512.095	151.942.107	Total foreign currency
Jumlah	665.846.239	1.012.183.450	Total

c. Berdasarkan penerbit / c. By issuer

	31 Desember/ *December 31,* 2017	31 Desember/ *December 31,* 2016	
	Rp	Rp	
Pemerintah	665.846.239	1.005.828.192	Government bonds
Bukan pemerintah	-	6.355.258	Non government bonds
Jumlah	665.846.239	1.012.183.450	Total

d. Berdasarkan jatuh tempo dan suku bunga

d. By maturity and interest rate

	Jenis/*Type*	Tanggal Jatuh tempo/ *Maturity date*	Suku bunga/ Bagi hasil/ per tahun/ *Annual/ Interest rate/ Profit sharing*	
Pemerintah				Government
Dimiliki hingga jatuh tempo				Held to maturity
Bank Indonesia	Sertifikat Bank Indonesia/ *Certificates of Bank Indonesia*	< 1 tahun/ *< 1 year*	6.20% - 6.75%	Bank Indonesia
Obligasi Pemerintah FR028	Obligasi/*Bonds*	15 Juli 2017/ *July 15, 2017*	10,00%	Government Bonds FR028
Obligasi Pemerintah FR061	Obligasi/*Bonds*	15 Mei 2022/ *May 15, 2022*	7,00%	Government Bonds FR061
Obligasi Pemerintah FR068	Obligasi/*Bonds*	15 Maret 2034/ *March 15, 2034*	8,38%	Government Bonds FR068
Obligasi Pemerintah FR069	Obligasi/*Bonds*	15 April 2019/ *April 15, 2019*	7,88%	Government Bonds FR069
Obligasi Pemerintah FR070	Obligasi/*Bonds*	15 Maret 2024/ *March 15, 2024*	8,38%	Government Bonds FR070
Pemerintah				Government
Dimiliki hingga jatuh tempo				Held to maturity
Obligasi Pemerintah FR071	Obligasi/*Bonds*	15 Maret 2029/ *March 15, 2029*	9,00%	Government Bonds FR071
Obligasi Pemerintah PBS006	Obligasi/*Bonds*	15 September 2020/ *September 15, 2020*	8,25%	Government Bonds PBS 006
Obligasi Pemerintah Indon 0018	Obligasi/*Bonds*	17 Januari 2018 *January 17, 2018*	6,88%	Government Bonds Indon 0018
Obligasi Pemerintah Indon 0320	Obligasi/*Bonds*	13 Maret 2020 *March 13, 2020*	5,88%	Government Bonds Indon 0320
Obligasi Pemerintah Indon 0422	Obligasi/*Bonds*	25 April 2022 *April 25, 2022*	3,75%	Government Bonds Indon 0422
Obligasi Pemerintah Indon 1023	Obligasi/*Bonds*	17 Oktober 2023 *October 17, 2023*	5,38%	Government Bonds Indon 1023
Obligasi Pemerintah Indon 0125	Obligasi/*Bonds*	15 Januari 2025 *January 15, 2025*	4,13%	Government Bonds Indon 0125
Sukuk Ijarah Ritel Negara Indonesia SR-007	Obligasi/*Bonds*	11 Maret 2018/ *March 11, 2018*	8,25%	Sukuk Ijarah Indonesia Ritel Bond SR-007
Surat Pembendaharaan Negara 12170302	Obligasi/*Bonds*	2 Maret 2017/ *March 2, 2017*	6,25%-6,35%	Treasury Bills 12170302
Pinjaman yang diberikan dan piutang				Loans and receivables
Lain-lain	Wesel SKBDN dan wesel ekspor/ *Domestic letters of credit SKBDN and export bills*	< 1 tahun/ *< 1 year*	6,00%-10,50%	Others

e. Berdasarkan peringkat obligasi

e. By rating securities

	Peringkat/*Rating*		Nilai tercatat *Carrying amount*		
	31 Desember/ *December 31,* 2017	31 Desember/ *December 31,* 2016	31 Desember/ *December 31,* 2017	31 Desember/ *December 31,* 2016	
			Rp	Rp	
Rupiah					Rupiah
Dimiliki hingga jatuh tempo					Held to maturity
Sertifikat Bank Indonesia	Baa3/BBB-	Baa3/BBB-	196.592.307	455.308.893	Certificates of Bank Indonesia
Obligasi	Baa3/BBB-	Baa3/BBB-	257.692.440	337.490.668	Bonds
Sukuk ijarah	Baa3/BBB-	Baa3/BBB-	62.049.397	62.316.876	Sukuk ijarah
Pinjaman yang diberikan dan piutang					Loans and receivables
Wesel SKBDN	-	-	-	5.124.906	Domestic Letter of Credit (SKBDN)
Jumlah Rupiah			516.334.144	860.241.343	Total Rupiah
Mata uang asing:					Foreign Currency
Dimiliki hingga jatuh tempo					Held to maturity
Obligasi Pemerintah RI	Baa3/BBB-	Baa3/BBB-	149.512.095	150.711.755	RI Government bonds
Pinjaman yang diberikan dan piutang					Loans and receivables
Wesel ekspor	-	-	-	1.230.352	Export bills
Jumlah mata uang asing			149.512.095	151.942.107	Total foreign currency
Jumlah			665.846.239	1.012.183.450	Total

f. Tingkat suku bunga rata-rata per tahun

f. Annual average interest rate

2017		2016	
Rupiah	6,86%	7,35%	Rupiah
Mata uang asing	3,61%	3,73%	Foreign currencies

g. Berdasarkan kolektibilitas

Berdasarkan ketentuan BI yang berlaku, efek-efek pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 diklasifikasikan lancar.

g. By collectability

Based on the prevailing BI regulation, securities as of December 31, 2017 and 2016 were classified as current.

h. Manajemen Bank berkeyakinan bahwa tidak ada cadangan kerugian penurunan nilai efek-efek yang perlu dibentuk pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

h. The Bank's management believes that there was no allowance for impairment losses in securities to be provided as of December 31, 2017 and 2016 .

10. KREDIT YANG DIBERIKAN / 10. LOANS

a. Berdasarkan jenis dan mata uang / a. By type and currency

	31 Desember/ *December 31,* 2017 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2016 Rp	
Rupiah:			Rupiah:
Modal kerja	4.339.047.467	3.496.843.500	Working capital
Investasi	680.552.841	872.130.652	Investment
Konsumen	630.788.625	688.870.258	Consumer
Ekspor	51.549.714	56.978.778	Export
Karyawan	33.704.952	40.947.666	Employees
Jumlah Rupiah	5.735.643.599	5.155.770.854	Total Rupiah
Mata uang asing:			Foreign currency:
Modal kerja	8.140.500	48.582.108	Working capital
Ekspor	3.050.817	104.786.358	Export
Investasi	97.416.835	4.489.501	Investment
Jumlah mata uang asing	108.608.152	157.857.967	Total foreign currency
Jumlah	5.844.251.751	5.313.628.821	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(156.580.752)	(107.700.767)	Allowance for impaiment losses
Jumlah - bersih	5.687.670.999	5.205.928.054	Total - net

b. Berdasarkan kolektibilitas / b. By collectability

	31 Desember/December 31, 2017						
	Lancar/ *Current*	Dalam perhatian khusus/ *Special mention*	Kurang lancar *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	Jumlah/ *Total*	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Rupiah:							Rupiah:
Modal kerja	4.028.174.687	75.473.687	8.342.436	21.337.493	205.719.164	4.339.047.467	Working capital
Investasi	592.037.768	41.085.505	1.511.862	9.976.457	35.941.249	680.552.841	Investments
Konsumen	529.667.192	43.052.362	7.824.429	21.017.133	29.227.509	630.788.625	Consumers
Ekspor	33.480.861	5.875.236	-	-	12.193.617	51.549.714	Exports
Karyawan	33.588.547	-	-	-	116.405	33.704.952	Employees
	5.216.949.055	165.486.790	17.678.727	52.331.083	283.197.944	5.735.643.599	
Mata uang asing:							Foreign currency:
Modal kerja	8.140.500	-	-	-	-	8.140.500	Working capital
Ekspor	226.035	2.824.782	-	-	-	3.050.817	Exports
Investasi	66.543.030	-	-	-	30.873.805	97.416.835	Investments
	74.909.565	2.824.782	-	-	30.873.805	108.608.152	
Jumlah	5.291.858.620	168.311.572	17.678.727	52.331.083	314.071.749	5.844.251.751	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(22.940.463)	(12.648.822)	(4.432.321)	(16.273.919)	(100.285.227)	(156.580.752)	Allowance for impairment losses
Jumlah - bersih	5.268.918.157	155.662.750	13.246.406	36.057.164	213.786.522	5.687.670.999	Total - net

	31 Desember/December 31, 2016						
	Lancar/ *Current*	Dalam perhatian khusus/ *Special mention*	Kurang lancar *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	Jumlah/ *Total*	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Rupiah:							Rupiah:
Modal kerja	3.204.684.313	108.212.937	34.173.630	9.007.406	140.765.214	3.496.843.500	Working capital
Investasi	743.486.065	98.378.675	2.247.881	3.515.955	24.502.076	872.130.652	Investment
Konsumen	600.167.633	54.634.834	11.536.969	11.422.554	11.108.268	688.870.258	Consumer
Ekspor	53.545.458	-	350.000	-	3.083.320	56.978.778	Export
Karyawan	40.947.666	-	-	-	-	40.947.666	Employees
	4.642.831.135	261.226.446	48.308.480	23.945.915	179.458.878	5.155.770.854	
Mata uang asing:							Foreign currency:
Modal kerja	48.582.108	-	-	-	-	48.582.108	Working capital
Ekspor	74.128.732	-	-	-	30.657.626	104.786.358	Export
Investasi	898.131	3.591.370	-	-	-	4.489.501	Investment
	123.608.971	3.591.370	-	-	30.657.626	157.857.967	
Jumlah	4.766.440.106	264.817.816	48.308.480	23.945.915	210.116.504	5.313.628.821	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(24.567.118)	(16.857.397)	(3.699.353)	(2.363.566)	(60.213.333)	(107.700.767)	Allowance for impairment losses
Jumlah - bersih	4.741.872.988	247.960.419	44.609.127	21.582.349	149.903.171	5.205.928.054	Total - net

c. Berdasarkan sektor ekonomi

c. By economic sectors

	31 Desember/December 31, 2017						
	Lancar/ *Current*	Dalam perhatian khusus/ *Special mention*	Kurang lancar *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	Jumlah/ *Total*	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Rupiah:							Rupiah:
Industri	1.360.538.217	48.093.341	1.451.318	4.828.361	70.788.455	1.485.699.692	Industry
Perdagangan	1.702.439.987	44.496.507	7.123.452	8.027.773	122.157.038	1.884.244.757	Trading
Konstruksi	227.821.323	22.220.253	-	146.339	32.389.727	282.577.642	Constructions
Transportasi	37.880.961	153.373	-	1.249.167	4.588.500	43.872.001	Transportations
Listrik, gas, dan air	26.808.893	-	-	-	-	26.808.893	Electricity, gas and water
Pertanian	4.162.946	-	-	-	-	4.162.946	Agricultures
Pertambangan	418.860	-	-	-	-	418.860	Minings
Lain-lain	1.856.877.868	50.523.316	9.103.957	38.079.443	53.274.224	2.007.858.808	Others
Jumlah	5.216.949.055	165.486.790	17.678.727	52.331.083	283.197.944	5.735.643.599	Total
Mata uang asing:							Foreign currency:
Industri	74.909.565	-	-	-	30.873.805	105.783.370	Industry
Perdagangan	-	-	-	-	-	-	Trading
Lain-lain	-	2.824.782	-	-	-	2.824.782	Others
Jumlah	74.909.565	2.824.782	-	-	30.873.805	108.608.152	Total
	5.291.858.620	168.311.572	17.678.727	52.331.083	314.071.749	5.844.251.751	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(22.940.463)	(12.648.822)	(4.432.321)	(16.273.919)	(100.285.227)	(156.580.752)	Allowance for impairment losses
Jumlah - bersih	5.268.918.157	155.662.750	13.246.406	36.057.164	213.786.522	5.687.670.999	Total - net

	31 Desember/December 31, 2016						
	Lancar/ *Current*	Dalam perhatian khusus/ *Special mention*	Kurang lancar *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	Jumlah/ *Total*	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Rupiah:							Rupiah:
Industri	1.255.945.198	65.805.187	10.022.051	269.618	42.027.522	1.374.069.576	Industry
Pertanian	1.792.876	17.980	-	-	-	1.810.856	Agricultures
Perdagangan	1.810.166.470	46.089.975	25.656.596	7.833.370	75.639.700	1.965.386.111	Trading
Listrik, gas, dan air	26.171.049	-	-	-	-	26.171.049	Electricity, gas and water
Transportasi	44.459.959	1.625.033	-	1.420.029	5.189.333	52.694.354	Transportations
Konstruksi	300.725.536	32.885.870	600.748	12.500	29.109.029	363.333.683	Constructions
Pertambangan	2.673.833	-	-	-	-	2.673.833	Minings
Lain-lain	1.200.896.215	114.802.400	12.029.085	14.410.398	27.493.294	1.369.631.392	Others
Jumlah	4.642.831.136	261.226.445	48.308.480	23.945.915	179.458.878	5.155.770.854	Total
Mata uang asing:							Foreign currency:
Industri	114.187.516	-	-	-	30.657.626	144.845.142	Industry
Perdagangan	6.736.250	-	-	-	-	6.736.250	Trading
Lain-lain	2.685.205	3.591.370	-	-	-	6.276.575	Others
Jumlah	123.608.971	3.591.370	-	-	30.657.626	157.857.967	Total
	4.766.440.107	264.817.815	48.308.480	23.945.915	210.116.504	5.313.628.821	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(24.567.118)	(16.857.397)	(3.699.353)	(2.363.566)	(60.213.333)	(107.700.767)	Allowance for impairment losses
Jumlah - bersih	4.741.872.989	247.960.418	44.609.127	21.582.349	149.903.171	5.205.928.054	Total - net

d. Berdasarkan periode kredit dan sisa umur jatuh tempo

Golongan jangka waktu kredit yang diberikan berdasarkan periode kredit sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian kredit dan waktu yang tersisa sampai dengan saat jatuh tempo adalah sebagai berikut:

d. By loan period and maturity date

The classification of loans by loan period, which is stated in the loan agreements and the remaining period until maturity were as follows:

	31 Desember/December 31, 2017		31 Desember/December 31, 2016		
	Berdasarkan sisa umur jatuh tempo/ *By remaining period until maturity*	Berdasarkan periode perjanjian/ *By loan period*	Berdasarkan sisa umur jatuh tempo/ *By remaining period until maturity*	Berdasarkan periode perjanjian/ *By loan period*	
	Rp	Rp	Rp	Rp	
Rupiah:					Rupiah:
Kurang dari 1 tahun	3.362.894.477	313.884.241	3.202.563.609	463.512.374	Less than 1 year
1 - 2 tahun	343.207.917	3.086.427.777	330.232.529	2.781.911.118	1 - 2 years
2 - 5 tahun	1.490.861.159	878.639.710	1.020.793.278	290.327.346	2 - 5 years
Lebih dari 5 tahun	538.680.046	1.456.691.871	602.181.438	1.620.020.016	More than 5 years
Jumlah Rupiah	5.735.643.599	5.735.643.599	5.155.770.854	5.155.770.854	Total Rupiah
Mata uang asing:					Foreign currency:
Kurang dari 1 tahun	105.783.370	37.657.555	152.658.043	51.591.240	Less than 1 year
1 - 2 tahun	-	67.853.863	1.608.553	101.420.928	1 - 2 years
2 - 5 tahun	2.824.782	-	3.591.371	-	2 - 5 years
Lebih dari 5 tahun	-	3.096.734	-	4.845.799	More than 5 years
Jumlah mata uang asing	108.608.152	108.608.152	157.857.967	157.857.967	Total foreign currency
Jumlah	5.844.251.751	5.844.251.751	5.313.628.821	5.313.628.821	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(156.580.752)	(156.580.752)	(107.700.767)	(107.700.767)	Allowance for impairment losses
Jumlah-bersih	5.687.670.999	5.687.670.999	5.205.928.054	5.205.928.054	Total-net

e. Berdasarkan pihak berelasi

e. By related parties

	2017 Rp	2016 Rp	
Pihak berelasi:			Related parties:
PT Mitra Pinasthika Mustika Finance	35.276.104	2.755.342	PT Mitra Pinasthika Mustika Finance
PT Bintang Warna Mandiri	12.673.695	14.723.036	PT Bintang Warna Mandiri
PT Antelas	-	432.694	PT Antelas
Keluarga direksi & karyawan kunci	24.282.450	23.383.125	Director's family and key personnel
	72.232.249	41.294.197	
Pihak ketiga	5.772.019.502	5.272.334.624	Third parties
Jumlah	5.844.251.751	5.313.628.821	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(156.580.752)	(107.700.767)	Allowance for impaiment losses
Jumlah - bersih	5.687.670.999	5.205.928.054	Total - net

Kredit hanya diberikan kepada karyawan tetap Bank. Kredit diberikan untuk membiayai berbagai kebutuhan yang sifatnya primer seperti biaya pendidikan, kesehatan, pernikahan dan berbagai keperluan lainnya. Jangka waktu kredit maksimal selama 12 bulan.

Loans to Bank employees are provided to permanent employee only. The loan is granted to finance various primary needs such as expenses for education, health, nuptials and other various needs. The maximum period of loan is 12 months.

Kredit yang diberikan kepada pihak berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal seperti pada pihak ketiga. Kredit yang diberikan kepada pihak berelasi, seluruhnya berkualitas lancar pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

Related party loans are granted based on terms and condition similar to those of loans granted to third parties. All loans granted to related parties are classified as current as of December 31, 2017 and 2016 .

Kredit yang diberikan kepada pihak berelasi dibebani bunga 5% - 32% per tahun untuk tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dengan jangka waktu pelunasan maksimal selama 15 tahun.

Interest on loans granted to related parties is 5% - 32% per annum as of December 31, 2017 and 2016, respectively with maximum payment period of 15 years.

f. Tingkat suku bunga rata-rata per tahun

f. Average interest rate per annum

	2017	2016	
Pihak berelasi:			Related parties:
Pinjaman rekening koran	12,28%	13,55%	Demand deposits loans
Pinjaman berjangka	11,28%	12,80%	Time loans
Kredit kendaraan bermotor	14,70%	13,77%	Vehicle ownership loans
Kredit kepemilikan rumah	12,04%	12,77%	Housing loans
Kredit time loan flat	35,09%	21,43%	Time loans flat
Kredit mikro	16,05%	8,85%	Micro loans
Mata uang asing:			Foreign currency:
Kredit modal kerja	5,03%	4,56%	Working capital loans

g. Ikhtisar kredit bermasalah berdasarkan sektor ekonomi

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 rincian kredit bermasalah (kurang lancar, diragukan dan macet) menurut sektor ekonomi adalah sebagai berikut:

g. Summary of non-performing loans by economic sector

As of December 31, 2017 and 2016 the details of nonperforming loans (substandard, doubtful and loss) by economic sector are as follows:

	31 Desember/December 31, 2017		31 Desember/December 31, 2016 Berdasarkan sisa umur		
	Kredit bermasalah/ *Non-performing loans*	Minimum cadangan/ *Minimum allowance*	Kredit bermasalah/ *Non-performing loans*	Minimum cadangan/ *Minimum allowance*	
	Rp	Rp	Rp	Rp	
Rupiah:					Rupiah:
Perdagangan	137.308.263	26.627.964	109.129.665	18.774.179	Trading
Industri	77.068.134	25.993.775	52.319.191	9.036.885	Industry
Lain-lain	138.831.357	48.535.662	90.264.417	19.018.633	Others
Jumlah Rupiah	353.207.754	101.157.401	251.713.273	46.829.697	Total Rupiah
Mata uang asing:					Foreign currency:
Industri	30.873.805	19.834.066	30.657.626	19.446.556	Industry
Jumlah-bersih	384.081.559	120.991.467	282.370.899	66.276.253	Total-net

Kenaikan kredit bermasalah dari 31 Desember 2017 ke 31 Desember 2016 sebesar 36,02%.

The increase in Non-Performing Loans (NPL) from December 31, 2017 to December 31, 2016 was 36.02%.

Langkah-langkah Bank untuk mengatasi kredit bermasalah dilakukan dengan cara:

- Memberikan Surat Pemberitahuan keterlambatan kewajiban untuk membayar ke Bank.
- Memberikan Surat Peringatan I, II dan yang terakhir.
- Melakukan panggilan untuk menghadap ke Bank.
- Melakukan penagihan dengan mendatangi debitur bermasalah.
- Melakukan musyawarah untuk debitur yang akan menjual aset jaminan atau aset yang lain diluar jaminan.
- Bila debitur bermasalah yang masih mempunyai prospek usaha untuk disehatkan kembali akan diajukan restrukturisasi.
- Bila debitur tidak dapat bekerja sama maka akan dilakukan proses hukum.

Steps taken by the Bank to reduce non-performing loans are as follows:

- Giving Notice Letter of Delay in the obligation to pay to the Bank.
- Giving Warning Letter I, II, and final Warning Letter.
- Call debtors to come to the Bank.
- Perform billing by visiting NPL debtors.
- Conduct deliberation to debtor who would sell the asset collateral or other assets outside guarantee.
- If the NPL debtor still have business prospect to the restored, restructuring will be proposed.
- If the debtor doe not cooperate will be done made to the legal process.

h. Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 rasio Non Performing Loan (NPL) adalah sebagai berikut:

h. As of December 31, 2017 and 2016 Non Performing Loans (NPL) ratio are as follows:

	2017	2016	
NPL *Gross*	6,57%	5,31%	Gross
NPL *Netto*	4,50%	4,07%	Net NPL

i. Kredit yang direstrukturisasi

Rincian kredit yang direstrukturisasi berdasarkan jenis dan kolektibilitas pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

i. Restructured loans

Details of restructured loans by type and collectibility as of December 31, 2017 and 2016 as follows:

	31 Desember/December 31, 2017						
	Lancar/ *Current*	Dalam perhatian khusus/ *Special mentions*	Kurang lancar *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	Jumlah/ *Total*	
Rupiah:							*Rupiah:*
Modal kerja	60.017.886	40.951.187	5.002.779	8.290.377	32.801.606	147.063.835	*Working capital*
Investasi	68.958.192	28.971.499	-	7.244.770	14.230.957	119.405.418	*Investments*
Konsumen	1.307.678	158.333	295.504	76.528	1.221.700	3.059.743	*Consumers*
	130.283.756	70.081.019	5.298.283	15.611.674	48.254.264	269.528.996	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(360.402)	(5.249.615)	(465.610)	(6.099.683)	(23.830.516)	(36.005.826)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	**129.923.354**	**77.664.025**	**4.832.672**	**77.664.025**	**24.423.748**	**233.523.170**	***Total - net***

	31 Desember/December 31, 2016						
	Lancar/ *Current*	Dalam perhatian khusus/ *Special mentions*	Kurang lancar *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	Jumlah/ *Total*	
Rupiah:							*Rupiah:*
Modal kerja	48.262.396	3.229.978	165.278	932.602	1.295.791	53.886.045	*Working capital*
Investasi	29.229.275	59.630.835	625.022	222.222	2.988.110	92.695.465	*Investments*
Konsumen	571.631	1.293.379	-	-	-	1.865.009	*Consumers*
	78.063.303	64.154.192	790.300	1.154.824	4.283.901	148.446.519	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(399.277)	(417.892)	(136.832)	(119.395)	(501.061)	(1.574.457)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	**77.664.025**	**77.664.025**	**653.467**	**77.664.025**	**3.782.840**	**146.872.062**	***Total - net***

Pada tanggal 31 Desember 2017, penyisihan kerugian minimum yang dihitung berdasarkan ketentuan Bank Indonesia adalah Rp 156.581.000 (2016: Rp 121.326.000), sehingga pemenuhan cadangan adalah sebesar 88,14% (2016: 88,77%).

On December 31, 2017, the minimum allowance for losses is calculated based on the provisions of Bank Indonesia Rp 156,581,000 (2016: Rp 121,326,000), thus fulfilling a reserve of 88.14% (2016: 88.77%).

j. Kredit yang diberikan pada umumnya dijamin dengan agunan yang diikat dengan hak tanggungan atau surat kuasa untuk menjual, deposito berjangka atau jaminan lainnya.

j. Loans are generally secured by collateral which are legalized by powers of atterney to mortgage or sell, time deposits and by other guarantees.

k. Kredit properti merupakan seluruh kredit terkait properti yang diberikan kepada debitur termasuk di dalamnya kredit real estate. Saldo kredit properti pada 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp 654.398.622 dan Rp 771.804.629.

k. Property loans are all property related to loans granted to the debtors including real estate loans. Balances of property loans on December 31, 2017 and 2016 amounted to Rp 654,398,622 and Rp 771,804,629, respectively.

l. Pemberian kredit real estate terhadap total kredit yang diberikan Bank pada 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp 152.352.641 (2,61%) dan Rp 140.881.485 (2,65%).

l. Real estate loans to total loans on December 31, 2017 and 2016, amounted to Rp 152,352,641 (2.61%) and Rp 140,881,485 (2.65%), respectively.

m. Rasio kredit terhadap total simpanan pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar 93,99% dan 84,18%.

m. Loan to Deposit ratio as of December 31, 2017 and 2016, are equal to 93.99%, and 84.18%, respectively.

n. Rasio kredit Usaha Mikro Kecil (UMK) terhadap total kredit yang diberikan pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar 1,28% dan 1,90%.

n. The ratio of micro business loans to the total loans as of December 31, 2017 and 2016 was 1.28% and 1.90%, respectively.

o. Rasio kredit Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terhadap total kredit yang diberikan pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar 41,28% dan 47,46%.

o. The ratio of loans extended to Micro, Small, and Medium Enterprises (UMKM) to the total loans as of December 31, 2017 and 2016 was 41.28% and 47.46%, respectively.

p. Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan adalah sebagai berikut:

p. The movements in the allowance for impairment losses are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016	
	Rp	Rp	
Rupiah:			Rupiah:
Saldo awal	87.737.566	93.831.167	Beginning balance
Pembentukan dalam tahun berjalan	138.405.436	89.373.346	Provision during the year
Penghapusan selama tahun berjalan	(89.688.462)	(95.466.947)	Written-off during the year
Saldo akhir	136.454.540	87.737.566	Ending balance
Mata uang asing:			Foreign currency:
Saldo awal	19.963.201	7.352.946	Beginning balance
Pembentukan dalam tahun berjalan	21.907	11.742.890	Provision during the year
Selisih kurs	141.104	867.365	Exchange rate difference
Saldo akhir	20.126.212	19.963.201	Ending balance
Jumlah	156.580.752	107.700.767	Total

Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai kredit yang telah dibentuk telah memadai untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat tidak tertagihnya kredit yang diberikan.

The management believes that the amount of allowance for impairment losses is adequate to cover the potential losses arising from bad debts.

Berikut ini adalah saldo kredit bruto dan cadangan kerugian penurunan nilai yang dievaluasi secara individual dan kolektif pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016:

As of December 31, 2017 and 2016 , the gross loan balances and allowance for impairment losses that are assessed from individual and collective impairment, are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016	
	Rp	Rp	
Kredit yang dievaluasi secara individual	556.555.651	425.070.973	Loan assessed by individual impairment
Penurunan nilai individual	(90.252.204)	(44.049.684)	Individual impairment
Sub jumlah-bersih	466.303.447	381.021.289	Sub total-net
Kredit yang dievaluasi secara kolektif	5.287.696.100	4.888.557.849	Loan assessed by collective impairment
Penurunan nilai kolektif	(66.328.548)	(63.651.084)	Collective impairment
Sub jumlah-bersih	5.221.367.552	4.824.906.765	Sub total-net
Jumlah-bersih	5.687.670.999	5.205.928.054	Total-net

q. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

Kepatuhan Bank terhadap peraturan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), sebagaimana diatur dalam peraturan Bank Indonesia No. 8/13/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006. Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Bank telah mematuhi peraturan BMPK untuk pihak berelasi dan pihak ketiga.

q. Legal Lending Limit (LLL)

In compliance with the Bank Indonesia regulation on Legal Lending Limit (LLL), as stipulated in the Bank Indonesia regulation No. 8/13/PBI/2006 dated October 5, 2006. As of December 31, 2017 and 2016 , the Bank has complied with legal lending limit for related parties and third parties.

11. TAGIHAN DAN UTANG AKSEPTASI

11. ACCEPTANCE RECEIVABLES AND PAYABLES

a. Berdasarkan mata uang

a. By currency

	31 Desember/December 31, 2017		31 Desember/December 31, 2016		
	Tagihan akseptasi/ *Acceptance receivables*	Liabilitas akseptasi/ *Acceptance payables*	Tagihan akseptasi/ *Acceptance receivables*	Liabilitas akseptasi/ *Acceptance payables*	
	Rp	Rp	Rp	Rp	
Mata uang asing:					Foreign currency:
Bank					Bank
Pihak berelasi	-	-	-	4.011.504	Related parties
Pihak ketiga	-	-	-	6.330.054	Third parties
Debitur - pihak ketiga	-	-	6.330.054	-	Debtors third parties
Jumlah mata uang asing	-	-	6.330.054	10.341.558	Total foreign currency
Jumlah	-	-	6.330.054	10.341.558	Total

b. Berdasarkan jatuh tempo

b. By maturity date

	2017		2016		
	Tagihan akseptasi/ *Acceptance receivables*	Utang akseptasi/ *Acceptance payables*	Tagihan akseptasi/ *Acceptance receivables*	Utang akseptasi/ *Acceptance payables*	
	Rp	Rp	Rp	Rp	
Mata uang asing:					Foreign currency:
Kurang dari 1 bulan	-	-	6.330.054	1.859.744	Less than 1 month
1 - 3 bulan	-	-	-	8.481.814	1 - 3 months
Jumlah mata uang asing	-	-	6.330.054	10.341.558	Total foreign currency
Jumlah	-	-	6.330.054	10.341.558	Total

c. Berdasarkan kolektibilitas tagihan akseptasi

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, tagihan akseptasi diklasifikasikan lancar.

c. By collectibility of acceptance receivables

As of December 31, 2017 and 2016, acceptance receivables are classified as current.

d. Manajemen Bank berkeyakinan bahwa tidak ada cadangan kerugian penurunan nilai tagihan akseptasi yang perlu dibentuk pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

d. The Bank's management believes that there were no allowance for impairment losses on acceptance receivables to be provided as of December 31, 2017 and 2016.

12. ASET TETAP

12. PROPERTY AND EQUIPMENT

	31 Desember/December 31, 2017						
	Tanah/ *Land*	Gedung dan instalasi/ *Buildings and installations*	Inventaris kantor/ *Office equipment*	Kendaraan bermotor/ *Vehicles*	Aset dalam penyelesaian/ *Construction in progress*	Jumlah/ *Total*	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Harga perolehan:							At cost:
Kepemilikan langsung							Direct ownership
Saldo 1 Januari 2017	12.832.038	7.257.062	79.951.356	1.451.497	-	101.491.953	Balance January 1, 2017
Penambahan/Reklasifikasi	-	-	11.888.938	-	345.295	12.234.233	Addition/Reclassification
Pengurangan/Reklasifikasi	(1.650.000)	(103.683)	(9.321.901)	(44.500)	(345.295)	(11.465.379)	Deduction/Reclassification
Saldo 31 Desember 2017	11.182.038	7.153.379	82.518.393	1.406.997	-	102.260.807	Balance December 31, 2017
Akumulasi penyusutan:							Accumulated depreciation
Saldo 1 Januari 2017	-	6.133.746	66.491.152	1.247.688	-	73.872.586	Balance January 1, 2017
Penambahan/Reklasifikasi	-	209.735	6.934.032	99.835	-	7.243.602	Addition/reclassification
Pengurangan/Reklasifikasi	-	(103.683)	(9.180.722)	(44.500)	-	(9.328.905)	Deduction/Balance
Saldo 31 Desember 2017	-	6.239.798	64.244.462	1.303.023	-	71.787.283	Balance December 31, 2017
Nilai buku bersih	11.182.038	913.581	18.273.931	103.974	-	30.473.524	Net carrying value

	31 Desember/December 31, 2016						
	Tanah/ *Land*	Gedung dan instalasi/ *Buildings and installations*	Inventaris kantor/ *Office equipment*	Kendaraan bermotor/ *Vehicles*	Aset dalam penyelesaian/ *Construction in progress*	Jumlah/ *Total*	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Harga perolehan:							Cost:
Kepemilikan langsung							Direct ownership
Saldo 1 Januari 2016	12.832.038	7.257.062	75.756.305	1.736.022	-	97.581.427	Balance January 1, 2016
Penambahan/Reklasifikasi	-	-	5.212.672	-	115.110	5.327.782	Addition/Reclassification
Pengurangan/Reklasifikasi	-	-	(1.017.620)	(284.525)	(115.110)	(1.417.255)	Deduction/Reclassification
Saldo 31 Desember 2016	12.832.038	7.257.062	79.951.357	1.451.497	-	101.491.954	Balance December 31, 2016

	31 Desember/December 31, 2016						
	Tanah/ *Land*	Gedung dan instalasi/ *Buildings and installations*	Inventaris kantor/ *Office equipment*	Kendaraan bermotor/ *Vehicles*	Aset dalam penyelesaian/ *Construction in progress*	Jumlah/ *Total*	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Akumulasi penyusutan:							Accumulated depreciation
Saldo 1 Januari 2016	-	5.887.869	61.292.586	1.388.368	-	68.568.823	Balance January 1, 2016
Penambahan/Reklasifikasi	-	245.877	6.205.673	143.845	-	6.595.395	Addition/reclassification
Pengurangan/Reklasifikasi	-	-	(1.007.107)	(284.525)	-	(1.291.632)	Deduction/Balance
Saldo 31 Desember 2016	-	6.133.746	66.491.152	1.247.688	-	73.872.586	Balance December 31, 2016
Nilai buku bersih	12.832.038	1.123.316	13.460.205	203.809	-	27.619.368	Net carrying value

Penyusutan aset tetap yang dibebankan pada beban umum dan administrasi masing-masing sebesar Rp 7.243.602 dan Rp 6.595.395 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 (lihat Catatan 28).

Depreciation of fixed assets charged to general and administrative expenses amounted to Rp 7,243,602 and Rp 6,595,395 for the years ended December 31, 2017 and 2016 , respectively (see Note 28).

Rincian penjualan aset tetap adalah sebagai berikut:

The details of the sale of fixed assets are as follows:

	2017	2016	
	Rp	Rp	
Harga jual	5.019.754	132.409	Selling Price
Nilai buku	(1.687.497)	(10.513)	Net book value
Keuntungan penjualan aset tetap	3.332.257	121.896	Gain on sale of fixed assets

Hak atas tanah berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Usaha yang dapat diperbaharui. Sisa umur hak atas tanah tersebut berkisar antara 1 tahun sampai dengan 22 tahun dan dapat diperpanjang. Manajemen berpendapat tidak terdapat masalah dengan perpanjangan hak atas tanah, karena seluruh tanah didapatkan secara legal dan didukung oleh bukti kepemilikan yang sah.

Landrights are held under renewable “Sertifikat Hak Guna Bangunan” and “Hak Guna Usaha” titles. The remaining terms of the rights ranged from 1 to 22 years and can be extended. The management believes that there will be no difficulty in the extension of the landrights, because all land were obtained legally and supported by valid ownership evidences.

Aset tetap kecuali tanah diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan risiko kerugian lainnya kepada PT. Avrist General Insurance (bukan perusahaan berelasi) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 176.078.932.607 (nilai penuh) dan Rp 138.740.901.673 (nilai penuh). Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian yang akan terjadi.

Fixed asset, except land, are covered by insurance against losses by fire and other risks with PT. Avrist General Insurance (non-related party) for the years ended December 31, 2017 and 2016 with insurance coverage Rp 176,078,932,607 (full amount) and Rp 138,740,901,673 (full amount). The management of the Bank believes that the amount is adequate to cover possible losses from such risks.

Berdasarkan penilaian manajemen Bank, tidak ada kejadian-kejadian atau perubahan-perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset tetap pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

By the assessment of the management of the Bank, there are no events or changes in circumstances that indicate any impairment in the value of fixed assets as of December 31, 2017 and 2016.

Manajemen telah mengkaji ulang estimasi umur ekonomis, metode penyusutan dan nilai residu aset tetap pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

Management has reviewed the economic useful life, depreciation method and residual value of fixed assets as of December 31, 2017 and 2016.

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, jumlah tercatat bruto dari setiap aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan adalah sebesar Rp 53.733.396.941 (nilai penuh) dan Rp 54.855.437.678 (nilai penuh).

As of December 31, 2017 and 2016, the gross carrying amount of fixed assets which have been fully depreciated and still in use amounted to Rp 53,733,396,941 (full amount) and Rp 54,855,437,678 (full amount).

13. ASET TAK BERWUJUD / 13. INTANGIBLE ASSETS

	31 Desember/December 31, 2017			
	1 Januari/ *January 1,* 2017	Penambahan/ *Additions*	31 Desember/ *December 31,* 2017	
	Rp	Rp	Rp	
Harga perolehan:				Cost:
Perangkat lunak	9.230.545	3.410.574	12.641.119	Software
Akumulasi amortisasi:				Accumulated amortization:
Perangkat lunak	6.003.161	2.012.372	8.015.533	Software
Nilai buku bersih	3.227.384		4.625.586	Net book value

	31 Desember/December 31, 2016			
	1 Januari/ *January 1, 2016*	Penambahan/ *Additions*	31 Desember/ *December 31, 2016*	
	Rp	Rp	Rp	
Harga perolehan:				Cost:
Perangkat lunak	7.619.045	1.611.500	9.230.545	Software
Akumulasi amortisasi:				Accumulated amortization:
Perangkat lunak	3.961.221	2.041.940	6.003.161	Software
Nilai buku bersih	3.657.824		3.227.384	Net book value

Beban amortisasi untuk periode 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp 2.012.372 dan Rp 2.041.940 yang dibebankan dalam beban umum dan administrasi (Catatan 28).

Amortization charged to general and administrative expense for period December 31, 2017 and 2016 amounted to Rp 2,012,372 and Rp 2,041,940 (Note 28).

14. ASET LAIN-LAIN / 14. OTHER ASSETS

	2017	2016	
	Rp	Rp	
Biaya dibayar di muka	45.572.560	48.110.360	Prepaid expenses
Pendapatan bunga yang akan diterima	40.696.848	43.190.793	Accrued interest income
Pajak dibayar dimuka	26.338.638	21.965.958	Prepaid taxes
Tagihan terkait dengan transaksi ATM	5.935.542	5.893.700	Receivables related to ATM transactions
Setoran jaminan	3.481.492	3.916.177	Security deposits
Persediaan barang cetakan, persediaan hadiah, dan perlengkapan kantor	3.305.145	5.295.103	Printing materials, gift and office supplies inventories
Uang muka pihak ketiga	832.663	9.596.214	Advances from third parties
Agunan yang diambil alih - bersih	-	8.835.840	Foreclosed assets - net
Aset lainnya	375.863	2.804.030	Others assets
Jumlah	126.538.751	149.608.175	Total

Biaya dibayar di muka terutama terdiri dari sewa yang dibayar dimuka, asuransi dibayar dimuka, renovasi di bayar dimuka dan lainnya.

Prepaid expenses mainly comprise prepaid rents, prepaid insurance, prepaid renovations and others.

Setoran jaminan terutama terdiri dari setoran jaminan ATM provider, ALTO, sewa gedung dan lainnya.

Security deposits mainly comprise security deposits ATM provider, ALTO, building rental and others.

Setoran jaminan merupakan aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kategori pinjaman yang diberikan dan piutang.

Security deposits are financial assets which classified as loans and receivables.

Estimasi nilai wajar dari aset lain-lain yang merupakan aset tanpa suku bunga dan tanpa jangka waktu adalah jumlah yang harus diterima saat ada permintaan. Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, nilai wajar dari aset keuangan ini adalah sebesar nilai tercatatnya.

The estimated fair value of other assets which are non interest bearing assets and with indefinite term, is the amount that should be received on demand. As of December 31, 2017 and 2016, fair value of these financial assets is its carrying value.

Aset lainnya terdiri dari pos dalam penyelesaian dan lainnya.

Other assets consist of suspense account and others.

Perubahan penyisihan kerugian untuk agunan yang diambil alih adalah sebagai berikut:

The changes in the allowance for possible losses on foreclosed assets are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016	
	Rp	Rp	
Rupiah:			Rupiah:
Saldo awal	-	181.940	Beginning balance
Pembentukan dalam tahun berjalan	-	-	Provision during the year
Penghapusan selama tahun berjalan	-	(181.940)	Written-off during the year
Saldo akhir	-	-	Ending balance

Bank telah melakukan upaya penyelesaian atas agunan yang diambil alih sebagaimana diatur oleh peraturan Bank Indonesia.

The Bank has taken actions for the resolution of foreclosed assets as required by Bank Indonesia under its regulation.

Manajemen berpendapat bahwa saldo agunan yang diambil alih merupakan nilai bersih yang dapat direalisasi.

The management believes that the foreclosed assets balance represent net realisable value.

Manajemen Bank berkeyakinan bahwa tidak ada cadangan kerugian penurunan nilai yang perlu dibentuk pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

The Bank's management believes that there were no allowance for impairment losses to be provided on other assets as of December 31, 2017 and 2016.

15. LIABILITAS SEGERA / 15. LIABILITIES PAYABLE IMMEDIATELY

	31 Desember/ December 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016	
	Rp	Rp	
Rupiah:			Rupiah:
Titipan nasabah	8.563.502	9.631.670	Customer's advances
Kiriman uang	575.168	827.625	Inward remittances
Bunga deposito yang sudah jatuh tempo	1.842.805	2.301.451	Interest on matured deposits
Jumlah Rupiah	10.981.475	12.760.746	Total Rupiah
Mata uang asing:			Foreign currency:
Bunga deposito yang sudah jatuh tempo	11.751	25.308	Interest on matured deposits
Jumlah mata uang asing	11.751	25.308	Total foreign currency
Jumlah	10.993.226	12.786.054	Total

16. SIMPANAN DARI NASABAH

a. Berdasarkan jenis dan mata uang

	31 Desember/ December 31, 2017 Rp	31 Desember/ December 31, 2016 Rp	
Pihak berelasi:			Related Parties:
Rupiah:			Rupiah:
Giro	80.467.803	144.793.859	Demand deposits
Tabungan	21.637.338	33.124.114	Savings deposits
Deposito berjangka	173.949.602	190.657.564	Time deposits
Jumlah Rupiah	276.054.743	368.575.537	Total Rupiah
Mata uang asing:			Foreign currencies:
Giro	30.049.383	50.201.327	Demand deposits
Tabungan	5.124.454	5.253.101	Savings deposits
Deposito berjangka	20.258.280	84.666.200	Time deposits
Jumlah mata uang asing	55.432.117	140.120.628	Total foreign currencies
Jumlah pihak berelasi	331.486.860	508.696.165	Total related parties
Pihak ketiga:			Third Parties:
Rupiah:			Rupiah:
Giro	208.658.984	269.420.298	Demand deposits
Tabungan	971.829.904	809.943.557	Savings deposits
Deposito berjangka	4.402.796.422	4.231.712.108	Time deposits
Jumlah Rupiah	5.583.285.310	5.311.075.963	Total Rupiah
Mata uang asing:			Foreign currencies:
Giro	48.128.441	89.477.853	Demand deposits
Tabungan	74.527.244	83.515.248	Savings deposits
Deposito berjangka	180.752.635	319.537.917	Time deposits
Jumlah mata uang asing	303.408.320	492.531.018	Total foreign currencies
Jumlah pihak ketiga	5.886.693.630	5.803.606.981	Total third parties
Jumlah simpanan nasabah	6.218.180.490	6.312.303.146	Total deposit from customers

Informasi mengenai transaksi dengan pihak berelasi diungkapkan pada catatan 37.

b. Giro

i) Berdasarkan mata uang, pihak berelasi dan pihak ketiga

	31 Desember/ December 31, 2017 Rp	31 Desember/ December 31, 2016 Rp	
Rupiah:			Rupiah:
Pihak berelasi	80.467.803	144.793.859	Related parties
Pihak ketiga	208.658.984	269.420.298	Third parties
Jumlah Rupiah	289.126.787	414.214.157	Total Rupiah

16. DEPOSITS FROM CUSTOMER

a. By type and currency

Information on related parties transactions are disclosed in note 37.

b. Demand deposits

i) By currency, related parties and third parties

	31 Desember/ December 31, 2017 Rp	31 Desember/ December 31, 2016 Rp	
Mata uang asing:			Foreign currency:
Pihak berelasi	30.049.383	50.201.327	Related parties
Pihak ketiga	48.128.441	89.477.853	Third parties
Jumlah mata uang asing	78.177.824	139.679.180	Total foreign currency
Jumlah	367.304.611	553.893.337	Total

ii) Tingkat suku bunga rata-rata per tahun adalah sebagai berikut:

ii) Average interest rate per annum are as follows:

	2017	2016	
Rupiah	0,84%	0,93%	Rupiah
Mata uang asing	0,08%	0,08%	Foreign currencies

Giro dijadikan jaminan atas bank garansi, kredit yang diberikan dan fasilitas pembayaran transaksi perdagangan lainnya per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp 10.220.877 dan Rp 10.102.104.

Demand deposits pledged as collaterals on bank guarantee, loans and other payments trade transactions facility as of December 31, 2017 and 2016, amounted to Rp 10,220,877 and Rp 10,102,104, respectively.

c. Tabungan

c. Savings deposits

i) Berdasarkan mata uang, pihak ketiga dan pihak berelasi

i) By currency, third parties and related parties

	31 Desember/ December 31, 2017 Rp	31 Desember/ December 31, 2016 Rp	
Rupiah:			Rupiah:
Pihak berelasi			Related parties
Tabungan Parahyangan	15.819.047	25.149.456	Parahyangan savings
Tabungan *Payroll*	3.149.592	3.128.504	Payroll savings
Tabungan Sakura	1.790.295	4.344.641	Sakura savings
Tabungan Berjangka	742.651	401.280	Periodic savings
Tabungan Ginza	101.319	59.728	Ginza savings
Tabungan TabunganKu	34.434	34.759	TabunganKu savings
Tabungan Pendidikan	-	5.746	Education savings
Sub jumlah	21.637.338	33.124.114	Sub total

	31 Desember/ December 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016	
	Rp	Rp	
Pihak ketiga			Third parties
Tabungan Sakura	474.032.267	377.812.639	Sakura savings
Tabungan Parahyangan	341.447.554	290.515.148	Parahyangan savings
Tabungan Berjangka	61.672.933	35.596.404	Periodic savings
Tabungan *Payroll*	34.462.813	31.245.164	Payroll savings
Tabungan Ginza	32.039.971	45.348.658	Ginza savings
Tabungan TabunganKu	28.174.366	6.799.412	TabunganKu savings
Tabungan Pendidikan	-	22.626.132	Pendidikan savings
Sub jumlah	971.829.904	809.943.557	Sub total
Jumlah Rupiah	993.467.242	843.067.671	Total Rupiah
Mata uang asing:			Foreign currency:
Pihak berelasi			Related parties
Tabungan dolar	5.124.454	5.253.101	Dollar savings
Pihak ketiga			Third parties
Tabungan dolar	74.527.244	83.515.248	Dollar savings
Jumlah mata uang asing	79.651.698	88.768.349	Total foreign currency
Jumlah	1.073.118.940	931.836.020	Total

*) Terhitung tanggal 1 Agustus 2017, produk Tabungan Pendidikan ditutup dan saldo nasabah yang ada dikonversi ke Tabungan TabunganKu.

*) As of August 1, 2017, saving product BNP are Pendidikan had been terminated and the balance of exsisting customers converted to be TabunganKu savings.

ii) Tingkat suku bunga rata-rata per tahun adalah sebagai berikut:

ii) Average interest rate per annum are as follows:

	2017	2016	
Rupiah	3,67%	3,13%	Rupiah
Mata uang asing	0,23%	0,43%	Foreign currencies

Tabungan yang dijadikan jaminan atas kredit yang diberikan per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp 4.675.000 dan Rp 5.820.000.

Saving deposits pledged as collaterals on loans as of December 31, 2017 and 2016, amounted to Rp 4,675,000 and Rp 5,820,000, respectively.

d. Deposito berjangka

d. Time deposits

i) Berdasarkan mata uang, pihak berelasi dan pihak ketiga

i) By currency, related parties and third parties

	31 Desember/ December 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016	
	Rp	Rp	
Rupiah:			Rupiah:
Pihak berelasi	173.949.602	190.657.564	Related parties
Pihak ketiga	4.402.796.422	4.231.712.108	Third parties
Jumlah Rupiah	4.576.746.024	4.422.369.672	Total Rupiah

	31 Desember/ December 31, 2017 Rp	31 Desember/ December 31, 2016 Rp	
Mata uang asing:			Foreign currency:
Pihak berelasi	20.258.280	84.666.200	Related parties
Pihak ketiga	180.752.635	319.537.917	Third parties
Jumlah mata uang asing	201.010.915	404.204.117	Total foreign currency
Jumlah	4.777.756.939	4.826.573.789	Total

ii) Berdasarkan periode deposito berjangka

ii) By term of time deposits

	31 Desember/ December 31, 2017 Rp	31 Desember/ December 31, 2016 Rp	
Rupiah:			Rupiah:
1 bulan	3.487.357.742	3.333.090.031	1 month
3 bulan	898.409.197	988.144.307	3 months
6 bulan	122.608.966	60.999.657	6 months
12 bulan	68.370.119	40.135.677	12 months
Jumlah Rupiah	4.576.746.024	4.422.369.672	Total Rupiah
Mata uang asing:			Foreign currency:
1 bulan	171.297.567	352.157.124	1 month
3 bulan	22.369.604	42.012.623	3 months
6 bulan	6.313.401	9.020.060	6 months
12 bulan	1.030.343	1.014.310	12 months
Jumlah mata uang asing	201.010.915	404.204.117	Total foreign currency
Jumlah	4.777.756.939	4.826.573.789	Total

iii) Berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo

iii) By remaining period until maturity date

	31 Desember/ December 31, 2017 Rp	31 Desember/ December 31, 2016 Rp	
Rupiah:			Rupiah:
1 bulan	3.830.035.058	3.751.214.480	1 month
3 bulan	671.948.401	621.949.701	3 months
6 bulan	20.941.114	34.121.664	6 months
12 bulan	53.821.451	15.083.827	12 months
Jumlah Rupiah	4.576.746.024	4.422.369.672	Total Rupiah

	31 Desember/ December 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016	
	Rp	Rp	
Mata uang asing:			Foreign currency:
1 bulan	178.408.775	368.694.893	1 month
3 bulan	17.803.532	30.767.924	3 months
6 bulan	4.595.105	4.539.222	6 months
12 bulan	203.503	202.078	12 months
Jumlah mata uang asing	201.010.915	404.204.117	Total foreign currency
Jumlah	4.777.756.939	4.826.573.789	Total

iv) Tingkat suku bunga rata-rata per tahun adalah sebagai berikut:

iv) Average interest rates per annum are as follows:

	2017	2016	
Rupiah	6,87%	7,60%	Rupiah
Mata uang asing	0,63%	0,89%	Foreign currencies

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 deposito berjangka yang diblokir dan sebagai jaminan atas bank garansi, kredit yang diberikan dan fasilitas pembayaran transaksi perdagangan adalah masing masing sebesar Rp 348.452.719 dan Rp 533.658.874.

As of December 31, 2017 and 2016, time deposits which were blocked and pledged as bank guarantee, loans and payment trade transaction facility amounted to Rp 348,452,719 and Rp 533,658,874, respectively.

17. SIMPANAN DARI BANK LAIN

a. Berdasarkan jenis, mata uang dan pihak ketiga

17. DEPOSITS FROM OTHER BANKS

a. By types, currency and third parties

	31 Desember/ December 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016	
	Rp	Rp	
Pihak ketiga:			Third parties
Rupiah:			Rupiah:
Giro	27.345.093	29.772.556	Demand deposits
Tabungan	59.254.143	11.140.598	Savings deposits
Deposito berjangka	6.438.551	12.444.376	Time deposits
Jumlah	93.037.787	53.357.530	Total

b. Tingkat suku bunga rata-rata per tahun adalah sebagai berikut:

b. Average interest rates per annum are as follows:

	2017	2016	
Rupiah			Rupiah
Giro	3,11%	3,06%	Demand deposits
Tabungan	5,73%	5,28%	Savings deposits
Deposito berjangka	5,90%	7,04%	Time deposits

c. Berdasarkan periode simpanan dari bank lain

c. By term of deposits from other banks

	31 Desember/ December 31, 2017 Rp	31 Desember/ December 31, 2016 Rp	
Rupiah:			Rupiah:
< 1 bulan	5.438.551	11.044.376	< 1 month
1 - 12 bulan	1.000.000	1.400.000	1 - 12 months
Jumlah	6.438.551	12.444.376	Total

18. PINJAMAN SUBORDINASI

Rincian pinjaman subordinasi pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 , sebagai berikut:

18. SUBORDINATED LOANS

The details of subordinated loan as of December 31, 2017 and 2016 is as follow:

	31 Desember/ December 31, 2017 Rp	31 Desember/ December 31, 2016 Rp	
ACOM CO., LTD.	80.509.545	79.945.815	ACOM CO., LTD.

ACOM CO., Ltd.

Pada tanggal 30 September 2011, Bank melakukan perjanjian pinjaman subordinasi dengan Acom Co. LTD, pihak berelasi, senilai USD 3.934.000 dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 5,253% per tahun. Pada tanggal 1 November 2011 seluruh pinjaman telah dicairkan. Dana yang diperoleh dari pinjaman subordinasi seluruhnya akan digunakan untuk penempatan aset produktif dalam bentuk penyaluran kredit serta memperkuat struktur modal. Jangka waktu pinjaman akan berakhir dalam 7 tahun sejak tanggal penarikan. Pinjaman subordinasi ini tidak boleh dibatalkan atau dibayar lunas sebelum tanggal jatuh tempo tanpa mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia. Jangka waktu pinjaman yaitu 7 tahun terhitung sejak tanggal penarikan pinjaman.

ACOM CO., Ltd.

On September 30, 2011, the Bank entered into a subordinated loans agreement amounting to USD 3,934,000 with Acom, Co, Ltd, a related party, with a fixed interest rate of 5.253% per annum. On November 1, 2011 the Bank had fully withdraw the subordinated loan. The fund gained from the subordinated loan shall be used entirely to invest in earning assets in the form of loans and to enhance the capital structure. Lending will expired in 7 years from the withdrawal date of the loan. The subordinated loan should not be cancelled or paid in full before the due date without prior approval from Bank Indonesia.

ACOM (USA) INC.

Pada tanggal 30 September 2011, Bank melakukan perjanjian pinjaman subordinasi dengan Acom (USA) INC., pihak berelasi, senilai USD 2.000.000 dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 3,76% per tahun. Pada tanggal 1 November 2011 seluruh pinjaman telah dicairkan.

Dana yang diperoleh dari pinjaman subordinasi seluruhnya akan digunakan untuk penempatan aset produktif dalam bentuk penyaluran kredit serta memperkuat struktur modal. Jangka waktu pinjaman akan berakhir pada tanggal ulang tahun ketujuh sejak tanggal penarikan. Pinjaman subordinasi ini tidak boleh dibatalkan atau dibayar lunas sebelum tanggal jatuh tempo tanpa mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia.

ACOM (USA) INC.

On September 30, 2011, the Bank entered into a subordinated loans agreement amounting to USD 2,000,000 with Acom (USA) INC, a related party, with a fixed interest rate of 3.76% per annum. On November 1, 2011 the Bank fully withdraw the subordinated loan.

Fund gained from the subordinated loan shall be used entirely to invest in earning assets in the form of loans and to enhance the capital structure. Lending will expired in 7 years from the withdrawal date of the loan. The subordinated loan should not be cancelled or paid in full before the due date without prior approval from Bank Indonesia.

Berdasarkan perjanjian tanggal 30 November 2015 pinjaman subordinasi dari ACOM (USA) INC. sebesar USD 2.000.000 dialihkan ke ACOM CO., Ltd dengan suku bunga 3,76%.

Untuk keperluan perhitungan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), pinjaman subordinasi di atas diperhitungkan sebagai modal pelengkap setelah Bank menerima surat persetujuan dari Bank Indonesia No. 13/228/APBU/Bd tanggal 12 Desember 2011.

Perjanjian pinjaman subordinasi ini memuat beberapa pembatasan terhadap Bank dalam hal-hal sebagai berikut:
1. Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor; atau
2. Merubah bidang usaha utama Bank.

Tidak terdapat pelanggaran atas pembatasan perjanjian pinjaman subordinasi pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

Based on the agreement dated as November, 30 2015 subordinated loans from ACOM (USA) INC. USD 2,000,000 transferred to ACOM CO., Ltd with 3.76% interest rate.

For the purpose of calculating the Capital Adequacy Ratio (CAR), the subordinated loans are included as supplementary capital after the Bank receives approval letter from Bank Indonesia No.13/228/APBU/Bd dated December 12, 2011.

The agreement of subordinated loans provide several negative covenants to the Bank when conducting the following:
1. Decrease in the authorized capital, subscribed capital and paid-up capital; or
2. Changes in the main line of business of the Bank.

There was no violation to the covenant of subordinated loans agreement as of December 31, 2017 and 2016.

19. LIABILITAS LAIN-LAIN / 19. OTHER LIABILITIES

	31 Desember/ December 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016	
	Rp	Rp	
Rupiah:			Rupiah:
Bunga yang masih harus dibayar	13.074.025	14.576.492	Accrued interest
Liabilitas terkait dengan transaksi ATM	12.770.142	8.792.518	Payables related to ATM transactions
Biaya yang masih harus dibayar	2.028.960	3.584.035	Accrued Expenses
Setoran jaminan	1.565.528	1.568.800	Security deposits
Pendapatan yang ditangguhkan	75.240	12.740	Deferred income
Lainnya	987.565	886.315	Others
Jumlah Rupiah	30.501.460	29.420.900	Total Rupiah
Mata uang asing:			Foreign currencies:
Bunga yang masih harus dibayar	628.440	677.696	Accrued interest
Jumlah	31.129.900	30.098.596	Total

Bunga yang masih harus dibayar

Merupakan bunga yang masih harus dibayar atas simpanan dan simpanan dari bank lain, banker acceptance dan pinjaman subordinasi.

Setoran jaminan

Merupakan setoran jaminan safe deposit dan jaminan kerjasama dengan PT BPR Eka Bumi Artha atas penggunaan jaringan “ATM-Bersama ALTO” (catatan 45 poin 4).

Accrued interest

Represents accrued interest on deposits and deposits from other banks, banker acceptance and subordinated loans.

Security deposits

Represents security deposits of safe deposit rentals and deposits of cooperation with PT BPR Eka Bumi Artha on the use of network “ATM-Bersama ALTO” (note 45 point 4).

Setoran jaminan diklasifikasikan dalam kategori liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan, diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

Security deposits is classified as other financial liabilities measured at cost, amortized using the effective interest rate method.

Bank harus melakukan pengungkapan atas nilai wajar dari liabilitas keuangannya. Estimasi nilai wajar dari liabilitas lain-lain yang merupakan liabilitas tanpa suku bunga dan tanpa jangka waktu adalah jumlah yang harus dikembalikan saat ada permintaan. Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, nilai wajar dari liabilitas ini adalah sebesar nilai tercatatnya.

The Bank should disclose the fair value of financial liabilities. The estimated fair value of other liabilities which are non interest bearing liabilities and with indefinite term, is the amount that should be payable on demand. As of December 31, 2017 and 2016, fair value of these financial liabilities is its carrying value.

20. MODAL SAHAM / 20. SHARE CAPITAL

Susunan pemilikan saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 seperti yang terdaftar pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, Biro Administrasi Efek, adalah sebagai berikut:

The shareholder composition as at December 31, 2017 and 2016 as registered in PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, are as follows:

Pemegang saham	31 Desember/*December 31,* 2017 dan/*and* 2016			
	Jumlah saham/ *Total shares*	Jumlah modal/ *Total paid up capital*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership (%)*	
		Rp		
ACOM CO., LTD.	447.707.012	223.853.506	66,15	ACOM CO., LTD.
PT Hermaw an Sentral Investama	72.564.211	36.282.106	10,72	PT Hermaw an Sentral Investama
The Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ, LTD.	63.310.000	31.655.000	9,35	The Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ, LTD.
Masyarakat (kepemilikan di baw ah 5%)	93.252.659	46.626.329	13,78	Public (Ow nership below 5%)
Jumlah	676.833.882	338.416.941	100,00	Total

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 seluruh saham Bank (maksimum 99% sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1999) telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI).

As of December 31, 2017 and 2016 , all of The Bank's shares (maximum of 99% by Government Regulation No. 29 in 1999) were listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX).

21. TAMBAHAN MODAL DISETOR – BERSIH / 21. ADDITIONAL PAID IN CAPITAL – NET

	31 Desember/ *December 31,* 2017	31 Desember/ *December 31,* 2016	
	Rp	Rp	
Agio saham	229.595.050	229.595.050	Additional paid-in-capital
Biaya emisi efek ekuitas	(8.557.460)	(8.557.460)	Stock issuance costs
Jumlah-bersih	221.037.590	221.037.590	Total-net

Agio Saham

Agio saham berasal dari penawaran perdana yang dilakukan pada tahun 2001, pelaksanaan warrant pada tahun 2004, dan penawaran umum terbatas I pada tahun 2006, penawaran umum terbatas II pada tahun 2010, dan penawaran umum terbatas III pada tahun 2013 masing-masing sebesar Rp 1.250.000, Rp 1.241.250, Rp 7.913.750, Rp 49.981.579, dan Rp 169.208.471.

Additional paid-in-capital

Additional paid-in-capital arose from initial public offering on 2001, warrant on 2004, and preemptive rights issuance I on 2006, preemptive rights issuance II on 2010, and preemptive rights issuance on 2013 amounting to Rp 1,250,000, Rp 1,241,250, Rp 7,913,750, Rp 49,981,579, and Rp 169,208,471, respectively.

Biaya Emisi Efek Ekuitas

Biaya emisi efek ekuitas berasal dari penawaran perdana yang dilakukan pada tahun 2001 dan penawaran umum terbatas I pada tahun 2006 dan penawaran umum terbatas II pada tahun 2010, dan penawaran umum terbatas III pada tahun 2013, masing-masing sebesar Rp 1.308.050, Rp 1.087.912, Rp 1.496.153, Rp 4.665.345.

Stock Issuance Costs

Stock issuance costs arose from initial public offering on 2001, and preemmtive rights issuance I on 2006 and preemmtive rights issuance II on 2010, and preemmtive rights issuance III on 2013 amounted to Rp 1,308,050, Rp 1,087,912, Rp 1,496,153 and Rp 4,665,345, respectively.

22. CADANGAN UMUM DAN DIVIDEN TUNAI

Berdasarkan Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham pada tanggal 2 Juni 2017, Bank mengalokasikan laba bersih tahun 2016 untuk tujuan pembentukan cadangan umum sebesar Rp 810.000.

Berdasarkan Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham pada tanggal 27 Juni 2016, Bank mengalokasikan laba bersih tahun 2015 untuk tujuan pembentukan cadangan umum dan membagikan dividen tunai masing-masing Rp 6.686.000 dan Rp 6.091.505.

22. GENERAL RESERVE AND CASH DIVIDENDS

Based on the Annual General Meeting of the Shareholders on June 2 2017, the Bank allocated net profit for the year 2016 for general reserve amounting to Rp 810,000.

Based on the Annual General Meeting of the Shareholders on June 27 2016, the Bank allocated net profit for the year 2015 for general reserve and dividend payments amounting to Rp 6,686,000 and Rp 6,091,505, respectively.

23. PENDAPATAN BUNGA

Pendapatan bunga berasal dari:

23. INTEREST INCOME

Interest income was derived from:

	2017 Rp	2016 Rp	
Kredit yang diberikan	738.850.457	817.767.038	Loans
Penempatan pada Bank Indonesia	47.217.323	43.470.928	Placements with Bank Indonesia
Efek-efek	32.535.099	35.006.529	Securities
Penempatan pada bank lain	5.514.462	8.077.390	Placements with others banks
Lainnya	782.401	989.381	Others
Jumlah	824.899.742	905.311.266	Total

Pendapatan bunga dari pihak berelasi pada tahun 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp 9.161.746 dan Rp 7.196.350.

Interest income from related parties in 2017 and 2016 amounted to Rp 9,161,746 and Rp 7,196,350, respectively.

24. BEBAN BUNGA / 24. INTEREST EXPENSES

Beban bunga meliputi bunga atas: / Interest expense represents interest incurred on:

	2017 Rp	2016 Rp	
Deposito	312.615.511	368.330.694	Time deposits
Tabungan	35.465.532	28.419.235	Saving deposits
Premi program penjaminan simpanan (Catatan 44)	11.906.049	13.874.189	Premium deposit insurance program (Note 44)
Giro	3.930.692	5.048.553	Demand deposits
Pinjaman subordinasi	3.853.479	3.852.864	Subordinated loans
Call money	40.097	72.050	Call money
Lainnya	520	423	Others fees
Jumlah	367.811.880	419.598.008	Total

Beban bunga dari pihak berelasi pada tahun 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp 18.378.844 dan Rp 27.530.284.

Interest expense from related party in 2017 and 2016 amounted Rp 18,378,844 and Rp 27,530,284, respectively.

25. PENDAPATAN PROVISI DAN KOMISI LAINNYA / 25. OTHER FEES AND COMMISSIONS EARNED

	2017 Rp	2016 Rp	
Komisi notaris	888.991	699.838	Notary commissions
Provisi kiriman uang	772.406	788.357	Transfer fees
Komisi asuransi	573.310	906.760	Insurance commissions
Provisi bank garansi	449.542	540.498	Bank guarantees commissions/ fees
Provisi/komisi ekspor	167.714	250.157	Export commissions/ fees
Provisi/komisi impor	117.206	251.354	Import commissions/ fees
Provisi/komisi exchange	74.555	30.244	Exchange commissions/ fees
Provisi inkaso	5.719	5.987	Collecting fees
Provisi lainnya	1.176	91	Other fees
Jumlah	3.050.619	3.473.286	Total

26. PENDAPATAN JASA PERBANKAN / 26. BANK SERVICES INCOME

	2017 Rp	2016 Rp	
a. Pendapatan transaksi devisa			a. Gain from foreign exchange
Kepada penduduk	1.202.995	3.130.038	Residents
Pendapatan selisih kurs	1.075.168	1.552.030	Foreign exchange rates
Kepada bukan penduduk	247.406	254.255	Non residents
	2.525.569	4.936.323	
Kerugian transaksi mata uang asing	(715.828)	(743.457)	Losses from foreign exchange
Sub jumlah	1.809.741	4.192.866	Sub total

	2017 Rp	2016 Rp	
b. Pendapatan lainnya			b. Other income
Denda - denda	18.690.345	19.162.672	Penalties
Pendapatan kredit yang telah dihapuskan	13.086.428	6.841.763	Recoveries of loans previously written-off
Beban administrasi	4.849.581	4.370.765	Administration fees
Hasil pengantaran uang	636.179	785.762	Cash delivery fees
Penyimpanan *safe deposit box*	485.244	496.007	Safe deposit boxes
Pendapatan *call fee*	264.116	341.414	Call fee income
Proses kliring	209.890	486.283	Clearing process
Penjualan buku cek/ bilyet giro	192.657	283.691	Cheque books
Pembuatan kartu ATM	50.159	68.046	Processing of ATM card
Pendapatan transaksi ATM	-	227.041	ATM's transactions income
Lainnya	468.081	416.894	Others
Sub jumlah	38.932.680	33.480.338	Sub total
Jumlah	40.742.421	37.673.204	Total

27. PEMBENTUKAN CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI ASET KEUANGAN

27. PROVISION ALLOWANCE FOR IMPAIRMENT LOSSES ON FINANCIAL ASSETS

	2017 Rp	2016 Rp	
Kredit yang diberikan	138.427.343	101.116.236	Loans

28. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

28. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

	2017 Rp	2016 Rp	
Barang dan jasa	80.237.383	94.570.309	Goods and services
Beban sewa	27.201.332	27.156.966	Rent expenses
Beban pajak	20.135.947	1.273.262	Taxes expenses
Beban asuransi	11.012.491	10.424.488	Insurance expenses
Pemeliharaan dan perbaikan aset tetap	9.599.468	8.857.370	Repairs and maintenances of fixed assets
Penyusutan (Catatan 12)	7.243.602	6.595.395	Depreciation (Note 12)
Beban promosi	6.043.097	10.706.827	Promotions expenses
Beban telepon/ telex	5.485.929	4.948.228	Telephone/ telex expenses
Biaya transaksi ATM	2.559.286	689.562	ATM transactions fee
Amortisasi aset tak berwujud (Catatan 13)	2.012.372	2.041.940	Intangible asset amortization (Note 13)
Iuran ATM	1.449.873	3.229.692	ATM contribution
Lainnya	195.407	237.885	Other
Jumlah	173.176.187	170.731.924	Total

Pada tanggal 29 Desember 2017, Bank telah menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan, PPh 21, dan PPh 23 untuk tahun 2014 dengan jumlah masing-masing senilai Rp 3.322.725.800, Rp 63.849.969, dan Rp 62.156.405. Bank telah membayar seluruh kekurangan pajak tersebut pada tanggal 30 Desember 2017.

On December 29, 2017, the Bank has received Tax Assessment Letter of Underpayment of Income Tax, Income Tax Article 21, and Article 23 for the year 2014 amounting to Rp 3,322,725,800, Rp 63,849,969 and Rp 62,156,405, respectively. The Bank has paid all the taxes due on December 30, 2017.

Pada tanggal 21 Desember 2017, Bank telah menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan, PPh 21, PPh 23, dan Pajak Pertambahan Nilai untuk tahun 2013 dengan jumlah masing-masing senilai Rp 12.742.236.490, Rp 68.410.108, Rp 54.521.869, dan Rp 254.961.564. Bank telah membayar seluruh kekurangan pajak tersebut pada tanggal 30 Desember 2017.

On December 21, 2017, the Bank has received Tax Assessment Letter of Underpayment of Income Tax, Income Tax Article 21, Article 23 and Value Aded Tax for the year 2014 amounting to Rp 12,742,236,490, IDR 68,410,108, Rp 54,521,869 and Rp 254,961,564, respectively. The Bank has paid all the taxes due on December 30, 2017.

Pada tanggal 17 April 2017, Bank telah menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan untuk tahun 2015 senilai Rp 4.165.403.054. Bank telah membayar seluruh kekurangan pajak tersebut pada tanggal 15 Mei 2017.

On April 17, 2017, the Bank has received Tax Assessment Letter of Underpayment of Income Tax for the year 2015 amounting to Rp 4,165,403,054. The Bank has paid all the taxes due on May 15, 2017.

29. BEBAN GAJI DAN TUNJANGAN / 29. SALARIES AND ALLOWANCE EXPENSES

	2017 Rp	2016 Rp	
Gaji	134.654.771	130.109.689	Salaries
Beban imbalan pasca-kerja	21.612.000	18.888.000	Post-employment benefits expenses
Tunjangan pajak karyawan	15.939.440	15.624.556	Employee tax
Gratifikasi/ bonus	12.990.067	15.290.528	Annual bonus
Pendidikan dan latihan	10.479.155	7.352.214	Education and training
Tunjangan hari raya	10.333.750	10.237.848	Religious holiday bonus
Tunjangan asuransi	8.233.170	8.322.608	Insurance benefits
Tunjangan seragam karyawan	1.869.091	1.881.255	Uniform benefits
Honorarium komisaris	1.440.000	1.440.000	Commisioner fee
Tunjangan kesehatan	618.881	844.361	Medical benefits
Biaya perekrutan	384.280	511.479	Recruitments expense
Honorarium komite audit	298.750	300.000	Audit committee fee
Tunjangan lainnya	10.720.628	6.141.211	Other benefits
Jumlah	229.573.983	216.943.749	Total

30. BEBAN LAIN-LAIN / 30. OTHER OPERATING EXPENSES

	2017 Rp	2016 Rp	
Penyelesaian kredit bermasalah	16.263.344	11.655.473	Completion non performing loans
Iuran-iuran	4.071.406	4.313.908	County levies
Peresmian/ pembukaan cabang	1.117.111	598.518	Branches opening
Keamanan	863.373	1.064.376	Security
Parkir	804.284	783.917	Parking
Administrasi	610.121	553.895	Administration
Proses kliring	474.323	517.672	Clearing
Lainnya	1.947.440	2.095.098	Others
Jumlah	26.151.402	21.582.857	Total

31. PENDAPATAN NON-OPERASIONAL / 31. NON-OPERATING INCOME

	2017 Rp	2016 Rp	
Keuntungan penjualan aset tetap	3.332.257	121.896	Gain from sale of fixed assets
Pendapatan non-operasional lainnya	1.477.694	1.144.575	Miscellaneous non-operating income
Jumlah	4.809.951	1.266.471	Total

32. BEBAN NON-OPERASIONAL / 32. NON-OPERATING EXPENSES

	2017 Rp	2016 Rp	
Denda	6.413.268	-	Penalties
Olah raga	412.454	288.391	Sports
Kerugian penjualan AYDA	380.000	5.225.660	Loss from sale of foreclosed assets
Sumbangan dan biaya pergaulan	284.633	158.534	Donation and entertainment
Kekurangan kas	3.589	2.550	Cash shortage
Lainnya	-	3.530	Others
Jumlah	7.493.944	5.678.665	Total

33. UTANG PAJAK / 33. TAXES PAYABLE

Perhitungan utang pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Taxes payable as of December 31, 2017 and 2016 are as follows:

	2017 Rp	2016 Rp	
Pajak penghasilan			Income tax
Pasal 23	5.756.174	5.923.207	Article 23
Pasal 21	3.516.620	3.469.805	Article 21
Pasal 26	32.933	32.654	Article 26
Pajak Pertambahan Nilai	25.507	13.454	Value Added Tax
Lainnya	1.079	804	Others
Jumlah	9.332.313	9.439.924	Total

34. PAJAK PENGHASILAN

Manfaat (beban) pajak Bank terdiri dari:

	2017 Rp	2016 Rp	
Pajak kini	-	3.964.164	Current tax
Pajak tangguhan	(9.470.582)	-	Deferred tax
Jumlah	(9.470.582)	3.964.164	Total

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak yang disajikan dalam laporan laba-rugi dan pendapatan komprehensif lainnya dengan taksiran laba fiskal adalah sebagai berikut:

	2017 Rp	2016 Rp	
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	(69.132.006)	12.072.789	Net income (loss) before tax
Beda waktu:			Timing differences:
Cadangan kerugian penurunan nilai	(14.037.255)	-	Allowance for impaiment losses
Beda tetap:			Permanent differences:
Pajak	25.143.916	502.301	Taxes
Sewa	1.075.615	2.186.620	Rent
Makan lembur	873.633	-	Meal
Keamanan	863.373	-	Security
Olah raga	412.455	288.390	Sports
Pemeliharaan	369.309	-	Maintenance
Beban sumbangan dan pergaulan	284.633	158.534	Donation and entertainment
Bahan bakar	174.294	277.317	Fuel
Rapat	169.126	206.759	Meeting
Pemeriksaan kesehatan	151.938	135.963	Medical chek-up expenses
Telepon direksi	35.641	27.982	Director's phone
Penjualan tanah dan bangunan	(3.420.487)	-	Sale of land and buildings
Jumlah	26.133.446	3.783.866	Total
Laba (rugi) fiskal	(57.035.815)	15.856.655	Taxable income (fiscal loss)
Taksiran pajak penghasilan badan			Estimate corporate income tax
25% x 15.856.655	-	3.964.164	25% x 15,856,655
Jumlah	-	3.964.164	Total

Perhitungan Pajak Penghasilan Badan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 akan menjadi dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") Pajak Penghasilan Badan.

Perhitungan Pajak Penghasilan Badan tahun 2016 sesuai dengan yang telah dilaporkan Bank dalam Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") kepada kantor layanan pajak.

34. INCOME TAX

Tax benefit (expense) of the Bank consists of the following:

The reconciliation between income before tax as shown in statements of profit or losses and other comprehensive income and estimated fiscal profit is as follows:

The calculation of Corporate Income Tax for the year ended December 31, 2017 will be the basis in filling Annual Corporate Income Tax Return ("SPT").

The calculation of Corporate Income Tax in 2016 conform with be the amounts that will be and had been reported by the Bank to the tax office in its Annual Tax Return ("SPT").

Pajak tangguhan

Rincian aset (liabilitas) pajak tangguhan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Deferred tax

The details of the deferred tax assets (liabilities) as of December 31, 2017 and 2016were as follows:

	1 Januari / *January 1,* 2016	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi / *Credited (charged) to to income for the year*	Dikreditkan (dibebankan) ke penghasilan komprehensif lain/ *Credited to other income*	31 Desember/ *December 31,* 2016	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi / *Credited (charged) to to income for the year*	Penyesuaian/ *Adjustment*	Dikreditkan (dibebankan) ke penghasilan komprehensif lain/ *Credited to other income*	31 Desember/ *December 31,* 2017	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Aset pajak tangguhan									Deferred tax assets
Pendapatan dari Rugi fiskal	-	-	-	-	14.258.954	-	-	14.258.954	Income from Fiscal loss
Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan	-	-	-	-	(3.509.314)	(1.279.058)	-	(4.788.372)	Allowance for impairment losses on financial asse
Aset pajak tangguhan - bersih	-	-	-	-	10.749.640	(1.279.058)	-	9.470.582	Deferred tax assets - net

Manajemen berkeyakinan bahwa aset pajak tangguhan dapat dipulihkan dan dikompensasikan dengan laba fiskal pada masa mendatang.

The management believes that deferred tax assets can be utilised and compensated against future taxable income.

Rekonsiliasi antara jumlah beban pajak dan jumlah yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

A reconciliation between the total tax expense and the amount computed by applying the effective tax rates to income before tax are as follows:

	2017	2016	
	Rp	Rp	
Laba sebelum pajak	(69.132.006)	12.072.789	Income before tax
Pajak pada tarif yang berlaku	(17.283.001)	3.018.197	Tax expense at effective tax rate
Pengaruh pajak atas beban yang tidak diperkenankan			Tax effect of permanent differences
Beban yang tidak diperkenankan	6.533.361	945.967	Non-deductible expense
Penyesuaian	1.279.058	-	Adjustment
Jumlah	(9.470.582)	3.964.164	Total tax (benefit) expense

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, Bank menghitung, menetapkan, dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terhutang. Direktur Jenderal Pajak ("DJP") dapat menetapkan atau mengubah kewajiban pajak dalam batas waktu lima tahun sejak saat terhutangnya pajak.

Under the Taxation Laws of Indonesia, the Bank submits tax returns on the basis of self assessment. The Director General of Tax ("DJP") may assess or amend taxes within five years of the time the tax becomes due.

35. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA

Bank menghitung dan membukukan imbalan pasca kerja imbalan pasti untuk karyawan yang berhak sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No.13/2003. Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan pasca kerja tersebut pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebanyak 1.137 dan 1.243.

35. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATIONS

The Bank calculates and records estimated post-employment benefits for its qualifying employees in accordance with Labor Law No. 13/2003. The number of employees entitled to these benefits as of December 31, 2017 and 2016 is 1,137 and 1,243, respectively.

Program pensiun imbalan pasti memberikan eksposur Bank terhadap risiko aktuarial seperti risiko tingkat bunga, risiko harapan hidup dan risiko gaji.

The defined benefit pension plan typically expose the Bank to actuarial risks such as interest rate risk, longevity risk and salary risk.

Risiko Investasi

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung menggunakan tingkat diskonto yang ditetapkan dengan mengacu pada imbal hasil obligasi korporasi berkualitas tinggi.

Investment risk

The present value of the defined benefit plan liability is calculated using a discount rate determined by reference to high quality corporate bond yields.

Risiko Tingkat Bunga

Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program.

Interest risk

A decrease in the bond interest rate will increase the plan liability.

Risiko Gaji

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program itu.

Salary risk

The present value of the defined benefit plan liability is calculated by reference to the future salaries of plan participants. As such, an increase in the salary of the plan participants will increase the plan's liability.

Beban imbalan pasca kerja yang diakui di laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah:

Amounts recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income in respect of these post- employment benefits are as follows:

	2017 Rp	2016 Rp	
Biaya jasa:			Service cost:
Biaya jasa kini	9.154.856	4.226.418	Current service cost
Biaya bunga pada kewajiban	6.528.780	2.791.651	Interest expense on DBO
Pendapatan bunga atas aset program	(3.311.536)	(1.606.065)	Interest income on plan asset
Perubahan akibat dampak atas batas aset	285.705	26.108	Changes in effect of the asset ceiling
Komponen dari biaya imbalan pasti yang diakui dalam laba rugi	12.657.805	5.438.112	Components of defined benefit costs recognised in profit or loss
Kewajiban/ (aset) diakui dalam laporan keuangan:			The amounts included in the statements of financial position arising from the Bank's obligation in respect of defined benefit plan is as follows:
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	(74.475.497)	(84.446.718)	Present value of defined benefit obligatic
Nilai wajar aset program	74.787.310	84.472.826	Fair value of plant assets
Kerugian aktuaria yang belum diakui	(311.813)	(26.108)	Effect of assets ceiling
Liabilitas bersih	-	-	Net liabilities

Mutasi nilai kini kewajiban manfaat pasti adalah sebagai berikut:

Movements in the present value of the defined benefit obligation are as follows

	2017	2016	
	Rp	Rp	
Kewajiban nilai kini imbalan pasti - awal	84.446.718	81.611.461	Opening defined benefits obligation
Biaya jasa kini	9.154.856	4.226.418	Current service cost
Biaya bunga	6.528.780	2.791.651	Interest cost
Kerugian (keuntungan) aktuarial	9.917.108	(2.620.624)	Actuarial (gains) loss
Pembayaran manfaat (melalui aset program dan langsung)	(35.571.965)	(1.562.188)	Benefits paid (from plan assets and employes)
Kewajiban nilai kini imbalan pasti - akhir	74.475.497	84.446.718	Closing defined benefits obligation

Liabilitas imbalan pasca kerja Perusahaan sehubungan dengan program pensiun yang termasuk dalam laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

The amounts included in the statement of financial position arising from the Company's obligation in respect of the defined benefits plan is as follows:

	2017	2016	
Nilai kini kewajiban	74.475.497	84.446.718	Present value of funded obligations
Nilai wajar aset program	(74.787.310)	(84.472.826)	Fair value of plan assets
Status pendanaan	(311.813)	(26.108)	Funded status
Kerugian aktuaria belum diakui	311.813	26.108	Effect of assets ceiling
Liabilitas bersih	-	-	Net liability

Perhitungan liabilitas imbalan pascakerja pada tanggal 31 Desember 2017 dilakukan oleh Mukti Mandiri Creating Solutions sebagai aktuaris independen berdasarkan laporannya mpada tanggal 12 Januari 2017 . Liabilitas imbalan pasti atas imbalan pascakerja (*post-employment benefit*) tersebut dihitung dengan menggunakan metode "*Projected Unit Credit*" dan asumsi-asumsi signifikan sebagai berikut:

The calculation of obligation for post-employment benefits as of December 31, 2017 was performed by Mukti Mandiri Creating Solutions as the independent actuary based on its reports dated January 12, 2017 , respectively. Obligation for post-employment benefits are calculated using the "Projected Unit Credit" method with the following assumptions:

	2017	2016	
Tingkat diskonto	7,25%	8,25%	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	7%	7%	Salary increment rate
Tingkat kematian	100% TMI-2013	100% TMI-2013	Mortality rate
Tingkat cacat	10% TMI-2013	10% TMI-2013	Disability rate
Umur pensiun normal	55	55	Normal retirement age

Bank menyelenggarakan program pensiun iuran pasti untuk karyawan tetap yang memenuhi syarat, yang sejak tanggal 1 Juli 2016 dikelola dan diadministrasikan oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan AIA Financial.

The Bank has a defined contribution retirement program covering its qualified permanent employees, which since July 1, 2016 is administered by Dana Pensiun Lembaga Keuangan AIA Financial.

Asumsi aktuarial yang signifikan untuk penentuan kewajiban imbalan pasti adalah tingkat diskonto, kenaikan gaji yang diharapkan dan mortalitas. Sensitivitas analisis di bawah ini ditentukan berdasarkan masing-masing perubahan asumsi yang mungkin terjadi pada akhir periode pelaporan, dengan semua asumsi lain konstan.

Significant actuarial assumptions for the determination of the defined obligation are discount rate, expected salary increase and mortality. The sensitivity analyses below have been determined based on reasonably possible changes of the respective assumptions occurring at the end of the reporting period, while holding all other assumptions constant.

- Jika tingkat diskonto lebih tinggi (lebih rendah) 1%, kewajiban imbalan pasti akan berkurang sebesar Rp 5.508.190 (meningkat sebesar Rp 6.307.174) pada tanggal 31 Desember 2017 dan berkurang sebesar Rp 5.883.953 (meningkat sebesar Rp 6.732.070) pada tanggal 31 Desember 2016.
- Jika pertumbuhan gaji yang diharapkan naik (turun) sebesar 1%, kewajiban imbalan pasti akan naik sebesar Rp 6.395.576 (turun sebesar Rp 5.669.648) pada tanggal 31 Desember 2017 dan naik sebesar Rp 6.870.472 (turun sebesar Rp 6.093.055) pada tanggal 31 Desember 2016.

Analisis sensitivitas yang disajikan di atas mungkin tidak mewakili perubahan yang sebenarnya dalam kewajiban imbalan pasti mengingat bahwa perubahan asumsi terjadinya tidak terisolasi satu sama lain karena beberapa asumsi tersebut mungkin berkorelasi.

Selanjutnya, dalam menyajikan analisis sensitivitas di atas, nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan menggunakan metode *projected unit credit* pada akhir periode pelaporan, yang sama dengan yang diterapkan dalam menghitung liabilitas manfaat pasti yang diakui dalam laporan posisi keuangan.

Tidak ada perubahan dalam metode dan asumsi yang digunakan dalam penyusunan analisis sensitivitas dari tahun sebelumnya.

- If the discount rate is 1% higher (lower), the defined benefit obligation would decrease by Rp 5,508,190 (increase by Rp 6,307,174) as of December 31, 2017 and decrease by Rp 5,883,953 (increase by Rp 6,732,070) as of December 31, 2016.
- If the expected salary growth increases (decreases) by 1%, the defined benefit obligation would increase by Rp 6,395,517 (decrease by Rp 5,669,648) as of December 31, 2017 and increase by Rp 6,870,472 (decrease by Rp 6,093,055) as of December 31, 2016.

The sensitivity analysis presented above may not be representative of the actual change in the defined benefit obligation as it is unlikely that the change in assumptions would occur in isolation of one another as some of the assumptions may be correlated.

Furthermore, in presenting the above sensitivity analysis, the present value of the defined benefit obligation has been calculated using the projected unit credit method at the end of the reporting period, which is the same as that applied in calculating the defined benefits obligation recognized in the statement of financial position.

There was no change in the methods and assumptions used in preparing the sensitivity analysis from prior years.

36. LABA PER SAHAM DASAR / 36. BASIC EARNING PER SHARE

Berikut ini adalah data yang digunakan untuk perhitungan laba per saham dasar yang diatribusikan kepada pemilik Bank:

The computation of basic and diluted earnings per share attributable to the owners of the Bank is based on the following data:

	2017 Rp	2016 Rp	
Rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar dalam tahun berjalan untuk perhitungan laba per saham dasar (nilai penuh)	676.833.882	676.833.882	Weighted average number of ordinary shares outstanding during the year for the calculation of basic earning per share(full amount)
Rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar dalam tahun berjalan untuk perhitungan laba per saham dilusian (nilai penuh)	-	-	Weighted average number of ordinary shares outstanding during the year for the calculation of dilutive earning per share (full amount)
Laba (rugi) bersih	(59.661.424)	8.108.625	Net income (loss)
Laba (rugi) per saham dasar (nilai penuh)	(88,15)	11,98	Basic earning (loss) per share (full amount)

37. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Sifat yang berelasi

Rincian sifat hubungan dan jenis transaksi yang signifikan dengan pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

37. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

Nature of relationship

The details of the relationship and type of signicant transactions with related parties as of December 31, 2017 and 2016 were as follows:

No.	Pihak berelasi/ *Related parties*	Sifat dari hubungan/ *Nature of relationship*	Sifat dari transaksi/ *Nature of transactions*
1	ACOM CO., LTD.	Pemegang saham mayoritas dan pengendali/ *Majority and controller shareholder*	Pinjaman subordinasi/ Subordinated loans
2	The Bank of Tokyo-Mitubishi UFJ Ltd.	Pemegang saham pengendali/ *Controller shareholder*	Giro pada bank lain, Usance dan Sight L/C dan utang akseptasi/ *demand deposits with other banks, Usance, and Sight L/C and Acceptance payable*
3	PT Hermawan Sentral Investama	Pemegang saham/*Shareholder*	Simpanan dari nasabah dan sewa gedung/ *Deposit from customers and rent building*
4	PT Hermawan Ladang Arta	Pemegang saham/*Shareholder*	Simpanan dari nasabah dan sewa gedung/ *Deposit from customers and rent building*
5	Dewan Komisaris, Direktur, dan Pejabat eksekutif/ Board of Commissioners, Director, and key executives	Managemen kunci/*Key management personel, Directors, and key executives*	Simpanan dari nasabah dan kredit yang diberikan/ *Deposit from customers and loans*
6	PT Leuwi Jaya Utama Textile	Dimiliki oleh pemegang saham yang sama/ *Owned by the same shareholder*	Simpanan dari nasabah/*Deposit from customers*
7	PT Oriental Indah Bali Hotel	Dimiliki oleh komisaris/*Owned by commissioner*	Simpanan dari nasabah/*Deposit from customers*
8	CV Kencana Hegar	Dimiliki oleh pemegang saham yang sama/ *Owned by the same shareholder*	Simpanan dari nasabah/*Deposit from customers*
9	PT Central Georgette Nusantara (CGN)	Dimiliki oleh pemegang saham yang sama/ *Owned by the same shareholder*	Simpanan dari nasabah, tagihan akseptasi, Usance dan Sight LC/*Deposit from customers, acceptance receivables, Usance and Sight LC*
10	PT Fuji Palapa Textile	Dimiliki oleh pemegang saham yang sama/ *Owned by the same shareholder*	Simpanan dari nasabah/*Deposit from customers*
11	PT CGN Printing Miles	Dimiliki oleh pemegang saham yang sama/ *Owned by the same shareholder*	Simpanan dari nasabah, kredit yang diberikan, dan Sight LC/*Deposit from customers, loans, and Sight LC*
12	PT CGN Unit Spinning	Dimiliki oleh pemegang saham yang sama/ *Owned by the same shareholder*	Simpanan dari nasabah/*Deposit from customers*
13	PT Central Texindo	Dimiliki oleh komisaris/ *Owned by commissioner*	Kredit yang di berikan dan simpanan dari nasabah/ *Loans and deposit from customers*
14	PT Antelas	Dimiliki oleh keluarga komisaris/ *Owned by commissioner's family*	Kredit yang di berikan dan simpanan dari nasabah/ *Loans and deposit from customers*
15	PT Bintang Warna Mandiri	Dimiliki oleh keluarga komisaris/ *Owned by commissioner's family*	Kredit yang diberikan/*Loans*

No.	Pihak berelasi/ *Related parties*	Sifat dari hubungan/ *Nature of relationship*	Sifat dari transaksi/ *Nature of transactions*
16	PT Gajah Angkasa Perkasa	Dimiliki oleh keluarga komisaris/ *Owned by commissioner's family*	Simpanan dari nasabah/ *Deposit from customers*
17	PT Laju Karya Mandiri	Dimiliki oleh keluarga komisaris/ *Owned by commissioner's family*	Simpanan dari nasabah/*Deposit from customers*
18	PT Mitra Pinasthika Mustika Finance	Dimiliki oleh keluarga komisaris/ *Owned by commissioner's family*	Kredit yang di berikan dan simpanan dari nasabah/ *Loans and deposit from customers*
19	Yayasan Oetie Hermawan	Dimiliki oleh keluarga komisaris/ *Owned by commissioner's family*	Simpanan dari nasabah/*Deposit from customers*
20	PT Kafe Bene Indonesia	Dimiliki oleh komisaris/ *Owned by commissioner*	Simpanan dari nasabah/*Deposit from customers*
21	PT Hermawan Hotel Group	Dimiliki oleh komisaris/ *Owned by commissioner*	Simpanan dari nasabah/*Deposit from customers*
22	PT Hermawan Megah Sentral	Dimiliki oleh pemegang saham yang sama/ *Owned by the same shareholder*	Kredit yang di berikan dan simpanan dari nasabah/ *Loans and deposit from customers*
23	PT Kedaung New World Hotel	Dimiliki oleh komisaris/ *Owned by commissioner*	Simpanan dari nasabah/*Deposit from customers*
24	CV Multi Kimia Agung	Dimiliki oleh keluarga komisaris/ *Owned by commissioner's family*	Simpanan dari nasabah/*Deposit from customers*
25	PT Panyaungan Indah Lestari	Dimiliki oleh komisaris dan keluarga/ *Owned by commissioner and family*	Simpanan dari nasabah/*Deposit from customers*
26	PT Vivien Indonesia	Dimiliki oleh keluarga komisaris/ *Owned by commissioner's family*	Simpanan dari nasabah/*Deposit from customers*
27	PT Novafashion Garment MFG	Dimiliki oleh keluarga komisaris/ *Owned by commissioner's family*	Simpanan dari nasabah/*Deposit from customers*
28	PT Yoogane Indonesia	Dimiliki oleh keluarga komisaris/ *Owned by commissioner's family*	Simpanan dari nasabah/*Deposit from customers*
29	PT Sawangan Hill	Dimiliki oleh keluarga komisaris/ *Owned by commissioner's family*	Simpanan dari nasabah/*Deposit from customers*
30	PT Bali Nusaintan	Dimiliki oleh komisaris/ *Owned by commissioner*	Simpanan dari nasabah/*Deposit from customers*
31	PT Setia Hospitality Management	Dimiliki oleh komisaris/ *Owned by commissioner*	Simpanan dari nasabah/*Deposit from customers*
32	PT Hermawan Adi Perkasa	Dimiliki oleh keluarga komisaris/ *Owned by commissioner's family*	Simpanan dari nasabah/*Deposit from customers*
33	PT Yuskitama Lestari	Dimiliki oleh keluarga komisaris/ *Owned by commissioner's family*	Simpanan dari nasabah/*Deposit from customers*

No.	Pihak berelasi/ *Related parties*	Sifat dari hubungan/ *Nature of relationship*	Sifat dari transaksi/ *Nature of transactions*
34	PT Cirebon Hotel & Convention	Dimiliki oleh keluarga komisaris/ *Owned by commissioner's family*	Simpanan dari nasabah/*Deposit from customers*
35	PT Capital Resources Indonesia	Dimiliki oleh keluarga komisaris/ *Owned by commissioner's family*	Simpanan dari nasabah/*Deposit from customers*
36	PT Megaland Development	Dimiliki oleh keluarga komisaris/ *Owned by commissioner's family*	Simpanan dari nasabah/*Deposit from customers*
37	PT Bali Indah Realty	Dimiliki oleh keluarga komisaris/ *Owned by commissioner's family*	Simpanan dari nasabah/*Deposit from customers*
38	PT Binadana Nusa Arta	Dimiliki oleh keluarga komisaris/ *Owned by commissioner's family*	Simpanan dari nasabah/*Deposit from customers*
39	PT Gucimas Sukses Makmur	Dimiliki oleh keluarga komisaris/ *Owned by commissioner's family*	Simpanan dari nasabah/*Deposit from customers*
40	PT Hermaw an Megah Dana	Dimiliki oleh komisaris/ *Owned by commissioner's*	Simpanan dari nasabah/*Deposit from customers*
41	CV Jara	Dimiliki oleh komisaris/ *Owned by commissioner's*	Simpanan dari nasabah/*Deposit from customers*
42	PT Prime Laundry Perkasa	Dimiliki oleh keluarga komisaris/ *Owned by commissioner's family*	Simpanan dari nasabah/*Deposit from customers*

Personil manajemen kunci mencakup anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta pejabat eksekutif yaitu pejabat yang bertanggungjawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/ atau aktivitas operasional Bank.

Key management personnel consists of members of the Board of Commisioners and Board of Directors, and key executives who have direct responsibility to the Board of Directors or have significant influence over policies and/or operational activities of the Bank.

Kompensasi yang dibebankan bagi personil manajemen kunci untuk tahun berakhir 31 Desember 2017 dan 2016, terdiri dari:

Key management personnel compensation for the years ended December 31, 2017 and 2016, consisted of:

	2017 Rp	2016 Rp	
Imbalan kerja jangka pendek:			Short-term employee benefits:
Pejabat eksekutif	21.319.772	16.255.809	Key executive
Direksi	11.683.574	12.866.277	Directors
Komisaris	2.160.860	2.600.343	Board of commissioner
Pesangon pemutusan kerja:			Termination benefits:
Pejabat eksekutif	9.012.764	1.100.678	Key executive
Jumlah	44.176.970	32.823.107	Total

Transaksi dengan pihak berelasi

Dalam kegiatan normal usahanya, Bank juga mengadakan transaksi-transaksi tertentu dengan pihak-pihak yang berelasi dengan kondisi yang sama kepada pihak ketiga, kecuali pinjaman yang diberikan kepada para karyawan.

Transactions with related parties

In the normal course of business, the Bank enter into certain transaction with related parties, at terms similar with those made with third parties, except for loans to employees.

Rincian saldo yang signifikan dengan pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

The details of significant balances with related parties as of December 31, 2017 and 2016 were as follows:

	2017 Rp	2016 Rp	
Giro pada bank lain			Demand deposits with other banks
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd	6.849.926	748.736	Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd
Persentase giro pada bank lain dari jumlah aset	0,09%	0,01%	Percentage of demand deposits with other banks from total assets
Kredit			Loans
PT Mitra Pinasthika Mustika Finance	35.276.104	2.755.342	PT Mitra Pinasthika Mustika Finance
PT Bintang Warna Mandiri	12.673.695	14.723.036	PT Bintang Warna Mandiri
PT Antelas	-	432.694	PT Antelas
Keluarga direksi dan karyawan kunci	24.282.450	23.383.125	Director's family and key personnel
Jumlah	72.232.249	41.294.197	Total
Pendapatan bunga yang masih harus diterima dari kredit	368.710	225.929	Accrued interest income arising from loans
Persentase kredit dari jumlah aset	0,95%	0,54%	Percentage of loans to total assets
Persentase akru bunga kredit dari jumlah aset	0,00%	0,00%	Percentage of accrued interest from loans to total assets
Simpanan			Deposits from customers
Giro	110.517.186	194.995.186	Demand deposits
Tabungan	26.761.792	38.377.215	Saving deposits
Deposito berjangka	194.207.882	275.323.764	Time deposits
Jumlah	331.486.860	508.696.165	Total
Pendapatan bunga yang masih harus diterima dari simpanan	491.937	654.235	Accrued interest income arising from deposits
Persentase simpanan dari jumlah liabilitas	5,14%	7,82%	Percentage of deposits to total liabilities
Persentase akru bunga simpanan dari jumlah liabilitas	0,01%	0,01%	Percentage of accrued interest arising from deposits to total liabilities
Outstanding Usance and L/C	8.581.275	26.877.100	Outstanding Usance and L/C
Persentase L/C yang masih berjalan	76,68%	57,98%	Percentage of L/C to total outstanding L/C
Setoran jaminan	11.400	8.400	Security deposits
Persentase setoran jaminan dari jumlah liabilitas	0,01%	0,01%	Percentage of security deposits to total liabilities
Pinjaman subordinasi	80.509.545	79.945.815	Subordinated Loans

	2017	2016	
	Rp	Rp	
Pendapatan bunga yang masih harus diterima dari pinjaman subordinasi	583.166	579.083	Accrued interest income arising from subordinated loans
Persentase pinjaman subordinasi dari jumlah liabilitas	1,25%	1,23%	Percentage of subordinated loans to total liabilities
Persentase akru bunga pinjaman subordinasi dari jumlah liabilitas	0,01%	0,01%	Percentage of accrued interest arising fro subordinated loans to total liabilities
Utang akseptasi Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, LTD	-	4.011.504	Acceptance payable Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, LTD
Persentase utang akseptasi dari jumlah liabilitas	-	0,06%	Percentage of acceptance receivable from total liabilities

38. ASET DAN LIABILITAS DALAM MATA UANG ASING

38. ASSETS AND LIABILITIES IN FOREIGN CURRENCIES

		2017		2016		
		Mata uang asing/ *Foreign currencies*	Ekuivalen dalam Rp/ *Equivalent in Rp*	Mata uang asing/ *Foreign currencies*	Ekuivalen dalam Rp/ *Equivalent in Rp*	
ASET						**ASSETS**
Kas	USD	429.468	5.826.807	1.111.407	14.973.431	Cash
	EUR	47.075	764.320	158.985	2.253.733	
	SAR	10.614	38.400	6.000	21.552	
	AUD	84.550	895.739	6.205	60.332	
	JPY	263.000	31.697	230.000	26.466	
	SGD	63.203	641.799	14.955	139.260	
	HKD	174.370	302.741	1.160	2.015	
	GBP	85	1.558	5.170	85.589	
	MYR	229	768	4.353	13.073	
	TWD	27.000	12.344	19.000	7.920	
	RMB	29.630	61.738	39.113	75.841	
	CAD	-	-	25	250	
Giro pada Bank Indonesia	USD	2.300.000	31.205.250	4.000.000	53.890.000	Demand deposits with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	USD	6.287.796	85.309.677	25.321.785	341.147.744	Demand deposits with other banks
	SGD	329.993	3.350.938	545.572	5.080.327	
	AUD	282.824	2.996.292	410.292	3.989.307	
	JPY	57.424.923	6.920.852	6.891.439	792.998	
	EUR	54.569	885.989	35.859	508.334	
	RMB	71.436	148.847	72.724	141.013	
	GBP	36.330	665.775	3.256	53.898	
	HKD	149.803	260.088	142.336	247.287	
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	USD	4.050.069	54.949.306	50.069	674.549	Placements with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek	USD	11.019.871	149.512.095	11.277.945	151.942.107	Securities
Kredit yang diberikan	USD	6.521.610	88.481.939	10.235.277	137.894.766	Loans
Tagihan akseptasi	USD	-	-	469.850	6.330.054	Acceptances receivable
Aset lain-lain	USD	216.016	2.930.795	225.963	3.044.284	Other assets
Jumlah aset			436.195.753		723.396.130	Total assets

		2017		2016		
		Mata uang asing/ *Foreign currencies*	Ekuivalen dalam Rp/ *Equivalent in Rp*	Mata uang asing/ *Foreign currencies*	Ekuivalen dalam Rp/ *Equivalent in Rp*	
LIABILITAS						**LIABILITIES**
Liabilitas segera	USD	866	11.751	1.878	25.308	Obligations due immediately
Giro	USD	4.782.097	64.881.094	9.664.203	130.200.972	Demand deposits
	JPY	60.866.418	7.335.621	3.005.809	345.878	
	SGD	387.200	3.931.849	593.887	5.530.230	
	AUD	113.084	1.186.320	116.424	1.132.006	
	EUR	51.917	842.940	173.741	2.462.909	
	HKD	-	-	4.135	7.184	
Tabungan	USD	5.870.772	79.651.698	6.588.855	88.768.349	Saving deposits
Deposito berjangka	USD	14.568.113	197.652.867	29.773.404	401.122.180	Time deposits
	AUD	316.971	3.358.048	316.971	3.081.939	
Pinjaman subordinasi	USD	5.934.000	80.509.545	5.934.000	79.945.815	Subordinated loans
Utang akseptasi	USD	-	-	767.605	10.341.558	Acceptance payables
Utang pajak	USD	1.771	24.023	3.856	51.945	Taxes payable
Liabilitas lain-lain	USD	46.320	628.440	50.302	677.696	Other liabilities
Rekening administratif	USD	1.144.819	15.532.332	2.497.956	33.653.719	Administrative account
	JPY	56.000.000	6.749.120	169.300.000	19.481.351	
Jumlah liabilitas			462.295.648		776.829.039	Total liabilities
Liabilitas - Bersih			(26.099.895)		(53.432.909)	Net Liabilities

Berikut ini adalah kurs mata uang asing utama yang digunakan untuk penjabaran ke dalam Rupiah pada tanggal pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 (nilai penuh).

Below are the major foreign currencies exchange rates used for translation into Rupiah as of December 31, 2017 and 2016 (full amounts).

	2017	2016	
	Rp	Rp	
Dollar Amerika	13.567,50	13.472,50	United States Dollar
Dollar Singapore	10.154,56	9.311,93	Singapore Dollar
Yen Jepang	120,52	115,07	Japanese Yen
Poundsterling	18.325,62	16.555,01	Great Britain Poundsterling
Dollar Hongkong	1.736,20	1.737,34	Hongkong Dollar
Australian Dollar	10.594,19	9.723,10	Australian Dollar
Thailand Baht	416,31	376,12	Thai Baht
Canadian Dollar	10.821,97	9.986,28	Canadian Dollar
Swiss Franch	13.901,13	13.208,98	Swiss Franc
Brunei Dollar	10.100,13	9.313,86	Brunei Dollar
Saudi Arabian Real	3.617,90	3.591,90	Saudi Arabian Real
Korea Won	12,73	11,20	Korean Won
Renminbi China	2.083,64	1.939,02	China Renminbi
Malaysian Ringgit	3.352,07	3.003,23	Malaysian Ringgit
Taiwan Dollar	457,19	416,86	Taiwanese Dollar
Euro	16.236,23	14.175,76	Euro

39. KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Berdasarkan ketentuan BI yang berlaku, rincian liabilitas komitmen dan kontinjensi untuk pembelian dan penjualan valuta asing tunai yang belum diselesaikan, fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan, L/C yang irrevocable dan masih berjalan, garansi yang diterbitkan dan titipan kliring berdasarkan kolektibilitas adalah sebagai berikut:

39. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

Based on the prevailing BI regulation, the details of commitments and contingencies payables for unsettled purchase and sales of spot foregin currency, unused loan facilities, outstanding irrevocable letters of credit, guarantees issued and funds for clearing based on collectibility and currency are as follows:

	31 Desember/December 31, 2017						
	Lancar/ *Pass*	Dalam perhatian khusus/ *Special mentions*	Kurang lancar *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	Jumlah/ *Total*	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Liabilitas Komitmen							**Commitment Liabilities**
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan	(1.566.469.263)	(127.874)	(50)	(114.066)	(134.169)	(1.566.845.422)	Unused loan facilities
L/C yang irrevocable dan masih berjalan							Outstanding irrevocable letters of credit
Pihak ketiga	(2.609.369)	-	-	-	-	(2.609.369)	Third parties
Pihak berelasi	(8.581.275)	-	-	-	-	(8.581.275)	Related parties
Jumlah liabilitas komitmen	(1.577.659.907)	(127.874)	-	(114.066)	(134.169)	(1.578.036.066)	Total commitment liabilities
Kontinjensi							**Contingencies**
Tagihan Kontinjensi							**Contingent Receivables**
Pendapatan bunga dalam penyelesaian	-	-	142.175.593	-	-	142.175.593	Past due interest receivable
Liabilitas Kontinjensi							Contingent Liabilities
Garansi yang diterbitkan dalam bentuk:							Guarantees issued in the form of:
Rupiah							Rupiah
Garansi penawaran	(13.643.663)	-	-	-	-	(13.643.663)	Bid bonds
Garansi pelaksanaan	(42.868.982)	-	-	-	-	(42.868.982)	Performance bonds
Jumlah liabilitas kontinjensi	(56.512.645)	-	-	-	-	(56.512.645)	Total contingent liabilities
Jumlah liabilitas kontinjensi-bersih	(56.512.645)	-	142.175.593	-	-	85.662.948	Total contingent liabilities-net
Lain-lain							**Others**
Titipan kliring	(23.117.882)	-	-	-	-	(23.117.882)	Funds for clearing
Jumlah liabilitas komitmen dan kontinjensi	(1.657.290.434)	(127.874)	142.175.593	(114.066)	(134.169)	(1.515.491.000)	Total contingent and commitment liabilities

	31 Desember/December 31, 2016						
	Lancar/ *Pass*	Dalam perhatian khusus/ *Special mentions*	Kurang lancar *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	Jumlah/ *Total*	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Liabilitas Komitmen							**Commitment Liabilities**
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan	(1.577.427.095)	(1.509.947)	-	(35.060)	(14.679)	(1.578.986.781)	Unused loan facilities
L/C yang irrevocable dan masih berjalan							Outstanding irrevocable letters of credit
Pihak ketiga	(19.481.351)	-	-	-	-	(19.481.351)	Third parties
Pihak berelasi	(26.877.100)	-	-	-	-	(26.877.100)	Related parties
Jumlah liabilitas komitmen	(1.623.785.546)	(1.509.947)	-	(35.060)	(14.679)	(1.625.345.232)	Total commitment liabilities
Kontinjensi							**Contingencies**
Tagihan Kontinjensi							**Contingent Receivables**
Pendapatan bunga dalam penyelesaian	-	-	72.751.876	-	-	72.751.876	Past due interest receivable
Liabilitas Kontinjensi							Contingent Liabilities
Garansi yang diterbitkan dalam bentuk:							Guarantees issued in the form of:
Rupiah							Rupiah
Garansi penawaran	(9.282.764)	-	-	-	-	(9.282.764)	Bid bonds
Garansi pelaksanaan	(41.976.536)	-	-	-	-	(41.976.536)	Performance bonds
Jumlah liabilitas kontinjensi	(51.259.300)	-	-	-	-	(51.259.300)	Total contingent liabilities
Jumlah liabilitas kontinjensi-bersih	(51.259.300)	-	72.751.876	-	-	21.492.576	Total contingent liabilities-net
Lain-lain							**Others**
Titipan kliring	(51.635.213)	-	-	-	-	(51.635.213)	Funds for clearing
Jumlah liabilitas komitmen dan kontinjensi	(1.726.680.059)	(1.509.947)	72.751.876	(35.060)	(14.679)	(1.655.487.869)	Total contingent and commitment liabilities

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 tidak terdapat komitmen dan kontinjensi yang mengalami penurunan nilai.

As of December 31, 2017 and 2016 , there was no impairment on commitment and contingencies.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak diperlukan adanya cadangan kerugian penurunan nilai.

Management believes that no allowance for impairment losses is necessary.

Dalam bisnis normal perbankan, Bank memiliki komitmen dan kontinjensi yang tidak disajikan dalam laporan posisi keuangan.

As part of normal banking business, Bank has commitments and contingencies that are not presented in the statement of financial position.

Ikhtisar komitmen dan kontinjensi Bank yang dinyatakan dalam nilai kontrak setara dengan mata uang Rupiah adalah sebagai berikut:

The following is a summary of Bank commitments and contingencies at the equivalent Rupiah contractual amounts are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016	
	Rp	Rp	
Tagihan Komitmen			Commitment Receivables
Pembelian valuta asing tunai yang belum diselesaikan	-	-	Unsettled purchase of spot foreign currency
Jumlah tagihan komitmen	-	-	Total commitment receivables
Liabilitas Komitmen			Commitment Liabilities
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan	(1.566.845.422)	(1.578.986.781)	Unused loan facilities
L/C yang irrevocable dan masih berjalan			Outstanding irrevocable letters of credit
Pihak ketiga	(2.609.369)	(19.481.351)	Third parties
Pihak berelasi	(8.581.275)	(26.877.100)	Related parties
Jumlah liabilitas komitmen	(1.578.036.066)	(1.625.345.232)	Total commitment liabilities
Jumlah liabilitas komitmen-bersih	(1.578.036.066)	(1.625.345.232)	Total commitment liabilities-net
Kontinjensi			Contingencies
Tagihan Kontinjensi			Contingent Receivables
Pendapatan bunga dalam penyelesaian	142.175.593	72.751.876	Past due interest receivable
Liabilitas Kontinjensi			Contingent Liabilities
Garansi yang diterbitkan dalam bentuk:			Guarantees issued in the form of:
- Garansi penawaran Rupiah	(13.643.663)	(9.282.764)	- Bid bonds Rupiah
- Garansi pelaksanaan Rupiah	(42.868.982)	(41.976.536)	- Performance bonds Rupiah
Jumlah liabilitas kontinjensi	(56.512.645)	(51.259.300)	Total contingent liabilities
Jumlah liabilitas kontinjensi-bersih	85.662.948	21.492.576	Total contingent liabilities-net
Lain-lain			Others
Titipan kliring	(23.117.883)	(51.635.213)	Funds for clearing
Jumlah liabilitas komitmen dan kontinjensi	(1.515.491.001)	(1.655.487.869)	Total contingent and commitment liabilities

Liabilitas kemitmen dan kontinjensi kepada pihak berelasi diungkapkan pada Catatan 37.

Commitments and contingent liabilities to related parties are disclosed in Note 37.

40. ASET KEUANGAN DAN LIABILITAS KEUANGAN / 40. FINANCIAL ASSETS AND FINANCIAL LIABILITIES

2017

	Pinjaman yang diberikan dan piutang/ *Loans and receivables*	Dimiliki hingga jatuh tempo/ *Held to maturity*	Tersedia untuk dijual/ Available *for sale*	Nilai wajar melalui laporan laba rugi/ *Fair value through profit or loss*	Liabilitas keuangan diamortisasi/ *Financial liabilities at amortized cost*	Total nilai tercatat/ *Total carrying amount*	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Aset							Assets
Kas	88.984.153	-	-	-	-	88.984.153	Cash
Giro pada Bank Indonesia	463.950.330	-	-	-	-	463.950.330	Demand deposits with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	111.548.108	-	-	-	-	111.548.108	Demand deposits with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	391.923.355	-	-	-	-	391.923.355	Placements with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek	-	665.846.239	-	-	-	665.846.239	Securities
Kredit yang diberikan	5.687.670.999	-	-	-	-	5.687.670.999	Loans
Aset lain-lain	44.178.341	-	-	-	-	44.178.341	Others assets
Jumlah	6.788.255.286	665.846.239	-	-	-	7.454.101.525	Total
Liabilitas							Liabilities
Liabilitas segera	-	-	-	-	10.993.226	10.993.226	Obligations due immediately
Simpanan nasabah	-	-	-	-	6.218.180.490	6.218.180.490	Deposits from customers
Simpanan dari bank lain	-	-	-	-	93.037.786	93.037.786	Deposits from other banks
Pinjaman subordinasi	-	-	-	-	80.509.545	80.509.545	Subordinated loans
Liabilitas lain-lain	-	-	-	-	15.267.993	15.267.993	Others liabilities
Jumlah	-	-	-	-	6.417.989.040	6.417.989.040	Total

2016

	Pinjaman yang diberikan dan piutang/ *Loans and receivables*	Dimiliki hingga jatuh tempo/ *Held to maturity*	Tersedia untuk dijual/ Available *for sale*	Nilai wajar melalui laporan laba rugi/ *Fair value through profit or loss*	Liabilitas keuangan diamortisasi/ *Financial liabilities at amortized cost*	Total nilai tercatat/ *Total carrying amount*	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Aset							Assets
Kas	88.120.683	-	-	-	-	88.120.683	Cash
Giro pada Bank Indonesia	433.528.205	-	-	-	-	433.528.205	Demand deposits with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	361.355.194	-	-	-	-	361.355.194	Demand deposits with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	417.881.847	-	-	-	-	417.881.847	Placements with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek	6.355.258	1.005.828.192	-	-	-	1.012.183.450	Securities
Kredit yang diberikan	5.205.928.054	-	-	-	-	5.205.928.054	Loans
Tagihan akseptasi	6.330.054	-	-	-	-	6.330.054	Acceptance receivables
Aset lain-lain	47.106.970	-	-	-	-	47.106.970	Others assets
Jumlah	6.566.606.265	1.005.828.192	-	-	-	7.572.434.457	Total
Liabilitas							Liabilities
Liabilitas segera	-	-	-	-	12.786.054	12.786.054	Obligations due immediately
Simpanan nasabah	-	-	-	-	6.312.303.146	6.312.303.146	Deposits from customers
Simpanan dari bank lain	-	-	-	-	53.357.530	53.357.530	Deposits from other banks
Pinjaman subordinasi	-	-	-	-	79.945.815	79.945.815	Subordinated loans
Utang akseptasi	-	-	-	-	10.341.558	10.341.558	Acceptance payables
Liabilitas lain-lain	-	-	-	-	16.822.988	16.822.988	Others liabilities
Jumlah	-	-	-	-	6.485.557.091	6.485.557.091	Total

41. PELAPORAN SEGMEN

Berikut ini adalah jumlah penjualan Bank dari pelanggan luar berdasarkan pasar geografis tanpa memperhatikan tempat diproduksinya barang:

41. SEGMENT REPORTING

The following table shows the distribution of the Bank's sales from external customers by geographical market, regardless of where the goods were produced:

	2017				
	Bandung	DKI Jakarta/ *DKI Jakarta*	Lainnya/ *Others*	Jumlah/ *Total*	
	Rp	Rp	Rp	Rp	
PENDAPATAN SEGMEN					**SEGMENT REVENUES**
Pendapatan Bunga					**Interest Revenues**
Kredit	490.199.725	71.136.225	177.514.507	738.850.457	Loans
Penempatan pada Bank Indonesia	47.217.323	-	-	47.217.323	Placements with Bank Indonesia
Efek-efek	32.535.099	-	-	32.535.099	Securities
Penempatan pada bank lain	5.514.462	-	-	5.514.462	Deposits with other banks
	575.466.609	71.136.225	177.514.507	824.117.341	
BEBAN SEGMEN					**SEGMENT EXPENSES**
Beban bunga	240.601.710	69.848.146	57.362.024	367.811.880	Interest expenses
Pendapatan operasional lainnya	26.959.979	3.495.304	13.337.757	43.793.040	Other operating revenues
HASIL					**INCOME**
Hasil segmen	(90.638.331)	19.873.548	4.316.770	(66.448.013)	Loss from operations
Rugi sebelum beban pajak	(93.605.538)	19.952.500	4.521.032	(69.132.006)	Loss before tax
Rugi bersih tahun berjalan	(84.134.956)	19.952.500	4.521.032	(59.661.424)	Net income for the year
INFORMASI LAINNYA					**OTHER INFORMATION**
ASET					**ASSETS**
Giro pada bank lain	111.548.108	-	-	111.548.108	Demand deposits with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	391.923.355	-	-	391.923.355	Placements with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek - dimiliki hingga jatuh tempo - bersih	665.846.239	-	-	665.846.239	Securities held - to maturity - net
Kredit - bersih	3.232.501.195	735.439.324	1.719.730.479	5.687.670.998	Loans - net
Tagihan akseptasi - bersih				-	Acceptances receivable - net
Penyertaan dalam bentuk saham - bersih				-	Investment in shares of stock - net
Aset lainnya	97.965.031	6.198.879	22.374.840	126.538.750	Other assets
Jumlah Aset	**4.499.783.928**	**741.638.203**	**1.742.105.319**	**6.983.527.450**	Total Assets
LIABILITAS					**LIABILITIES**
Simpanan	4.053.909.957	1.164.064.266	1.000.206.266	6.218.180.489	Deposits
Simpanan dari bank lain	33.690.136	2.669	59.344.981	93.037.786	Deposits from other banks
Liabilitas lainnya	25.938.058	2.852.229	2.339.613	31.129.900	Other liabilities
Jumlah Liabilitas	**4.113.538.151**	**1.166.919.164**	**1.061.890.860**	**6.342.348.175**	Total Liabilities
Beban penyusutan dan amortisasi	8.004.838	261.909	989.227	9.255.974	Depreciation and amortization
Beban cadangan kerugian penurunan nilai	106.582.378	4.263.698	27.581.268	138.427.344	Provision for impairment losses

	2016				
	Bandung	DKI Jakarta/ *DKI Jakarta*	Lainnya/ *Others*	Jumlah/ *Total*	
	Rp	Rp	Rp	Rp	
PENDAPATAN SEGMEN					**SEGMENT REVENUES**
Pendapatan Bunga					**Interest Revenues**
Kredit	501.469.259	86.312.253	229.985.526	817.767.038	Loans
Penempatan pada Bank Indonesia	43.470.928	-	-	43.470.928	Placements with Bank Indonesia
Efek-efek	35.006.529	-	-	35.006.529	Securities
Penempatan pada bank lain	8.075.559	-	-	8.075.559	Deposits with other banks
	588.022.274	86.312.253	229.985.526	904.320.054	
BEBAN SEGMEN					**SEGMENT EXPENSES**
Beban bunga	269.887.541	75.285.794	74.424.673	419.598.008	Interest expenses
Pendapatan operasional lainnya	24.215.331	3.297.557	13.633.602	41.146.490	Other operating revenues
HASIL					**INCOME**
Hasil segmen	(53.349.974)	55.735.309	14.099.647	16.484.983	Income from operations
Laba sebelum beban pajak	(53.542.259)	52.239.549	13.375.500	12.072.789	Income before tax
Laba bersih tahun berjalan	(57.506.423)	52.239.549	13.375.500	8.108.625	Net income for the year
INFORMASI LAINNYA					**OTHER INFORMATION**
ASET					**ASSETS**
Giro pada bank lain	361.355.194	-	-	361.355.194	Demand deposits with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	417.881.847	-	-	417.881.847	Placements with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek - dimiliki hingga jatuh tempo - bersih	1.012.183.450	-	-	1.012.183.450	Securities held - to maturity - net
Kredit - bersih	3.161.745.794	488.488.722	1.555.693.538	5.205.928.054	Loans - net
Tagihan akseptasi - bersih	-	-	6.330.054	6.330.054	Acceptances receivable - net
Penyertaan dalam bentuk saham - bersih				-	Investment in shares of stock - net
Aset lainnya	111.859.811	7.821.903	29.926.460	149.608.175	Other assets
Jumlah Aset	**5.065.026.096**	**496.310.626**	**1.591.950.052**	**7.153.286.774**	Total Assets
LIABILITAS					**LIABILITIES**
Simpanan	4.189.405.379	1.024.414.607	1.098.483.160	6.312.303.146	Deposits
Simpanan dari bank lain	15.266.002	3.076	38.088.452	53.357.530	Deposits from other banks
Liabilitas lainnya	24.060.078	3.171.241	2.867.277	30.098.596	Other liabilities
Jumlah Liabilitas	**4.228.731.458**	**1.027.588.924**	**1.139.438.890**	**6.395.759.271**	Total Liabilities
Beban penyusutan dan amortisasi	6.970.600	371.569	1.295.166	8.637.335	Depreciation and amortization
Beban cadangan kerugian penurunan nilai	53.956.701	3.614.126	43.545.409	101.116.236	Provision for impairment losses

42. MANAJEMEN RISIKO PERMODALAN

Tujuan manajemen permodalan Bank adalah untuk mempertahankan posisi modal yang kuat untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan mempertahankan investor, deposan, pelanggan dan kepercayaan pasar. Dalam pengelolaan permodalan, Bank mempertimbangkan faktorfaktor seperti: pengembalian modal yang optimal pada pemegang saham, menjaga keseimbangan antara keuntungan yang lebih tinggi dengan gearing ratio serta keamanan yang diberikan oleh posisi modal yang sehat.

42. CAPITAL RISK MANAGEMENT

The Bank's capital management objectives is to maintain a strong capital position to support business growth and to sustain investor, depositor, customer, and market confidence. In managing its capital, the Bank considers factors such as: providing an optimal capital rate of return to shareholders and maintaining a balance between high return gearing ratio and safety provided by a sound capital position.

Tabel di bawah ini menunjukkan modal dan rasio kecukupan modal (CAR) untuk pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

The following table set forth the CAR as of Desember 31, 2017 and 2016 , respectively.

	2017	2016	
	Rp	Rp	
Modal Inti (Tier I)			Core Capital (Tier I)
Modal disetor	338.417	338.417	Share capital
Tambahan modal disetor bersih			Paid in capital - net
Agio	221.038	221.038	Agio
Cadangan umum	72.580	71.770	General reserves
Laba bersih tahun sebelumnya	565.475	558.177	Net income from previous year
Laba bersih tahun berjalan	(59.661)	8.109	Net income for the year
Selisih kurang antara penyisihan penghapusan aset dan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan dan aset non-keuangan	(21.076)	(13.625)	Differences between allowance for losses and impairment losses of financial assets and non-financial assets
Aset tidak berwujud lainnya	(14.097)	(3.227)	Intangible assets
Jumlah	1.102.676	1.180.659	Total
Modal pelengkap (Tier II)			Suplementary Capital (Tier II)
Cadangan umum atas aset produktif	54.825	50.484	General reserves on earning assets
Pinjaman subordinasi	13.418	29.314	Subordinated loans
Jumlah	68.243	79.798	Total
Jumlah Modal (Tier I dan Tier II)	1.170.919	1.260.457	Total capital (Tier I and Tier II)
Jumlah ATMR	6.690.796	6.127.141	Total Risk Weighted Assets
CAR setelah risiko kredit, operasional, dan pasar	17,50%	20,57%	CAR after credit, operational and market risk
Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang diwajibkan	8,00%	8,00%	Required Capital Adequacy Ratio

**) dalam jutaan Rupiah

**) expressed in million of Rupiah

Capital Adequacy Ratio Bank pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 , masing-masing adalah sebesar 17,50% dan 20,57% .

The CAR of the Bank is 17.50% and 20.57% as of December 31, 2017 and 2016, respectively.

Rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio* [CAR]) adalah rasio modal terhadap Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Baerdasarkan peraturan Bank Indonesia, jumlah modal untuk risiko kredit terdiri dari dari Modal Inti ("Tier I") dan Modal Pelengkap ("Tier II") dikurangi penyertaan pada anak perusahaan.

The Capital Adequacy Ratio(CAR) is the ratio of the Bank's capital over its Risk-Weighted Aseets (RWA). By Bank Indonesia regulations, the total capital for the credit risk consist of core ("Tier I") capital and supplementary capital ("Tier II"), less investments in subsidiary.

Manajemen menggunakan peraturan rasio permodalan untuk memantau kecukupan modal, sesuai dengan standard industri. Pendekatan Bank Indonesia untuk pengukuran modal tersebut terutama didasarkan pada pemantauan kebutuhan modal yang diwajibkan (diukur sebagai 8 persen dari aset tertimbang menurut risiko) terhadap modal yang tersedia.

Management uses regulatory capital ratios in order to monitor its capital base, and these capital ratios remain the industry standards for measuring capital adequacy. BI's approach tosuch measurement is primarily based on monitoring the relationship of the capital resources requirement (measured as 8 percent of risk-weighted assets) to available capital resources.

43. MANAJEMEN RISIKO

Bank telah mengimplementasikan prosedur manajemen risiko sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia tentang "Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum" No. 5/8/PBI/2003 yang diubah dalam PBI No. 11/25/PBI/2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia No.13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 perihal "Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum". Menurut surat edaran tersebut, penerapan manajemen risiko harus dilakukan pada risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis dan risiko kepatuhan.

Bisnis Bank mencakup aktivitas pengambilan risiko dengan sasaran tertentu dengan pengelolaan yang profesional. Fungsi utama dari manajemen risiko Bank adalah untuk mengidentifikasi seluruh risiko kunci, mengukur risiko-risiko ini, mengelola posisi risiko dan menentukan alokasi modal. Bank secara rutin menelaah kebijakan dan sistem manajemen risiko untuk menyesuaikan dengan perubahan di pasar, produk dan praktek pasar terbaik.

Organisasi Manajemen Risiko

Dewan Komisaris membentuk Komite Pemantau Risiko sesuai Surat Keputusan Dewan Komisaris No.Kep 004/DK/III/2009 tanggal 13 Maret 2009, antara lain dalam bentuk pengawasan aktif penerapan manajemen risiko.

Komite Pemantau Risiko dibentuk dengan tujuan untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan kebijakan dan strategi manajemen risiko yang disusun oleh manajemen. Sedangkan dalam rangka pengawasan aktif dari Direksi, Direksi membentuk Komite Manajemen Risiko sesuai Surat Keputusan Direksi No.Kep-035-DIR/10/2009 tanggal 28 Oktober 2009. Komite Manajemen Risiko beranggotakan Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank yang memiliki tugas untuk membantu Direksi dalam menjalankan tugas menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko, menetapkan limit risiko dan mengevaluasi penerapan manajemen risiko. Komite Manajemen Risiko melakukan rapat rutin secara periodik dimana hasil dari rapat tersebut dilaporkan kepada Dewan Komisaris untuk evaluasi lebih lanjut mengenai penerapan manajemen risiko pada Bank.

Satuan Kerja Manajemen Risiko yang independen terhadap satuan kerja operasional dan satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian intern. Struktur organisasi Satuan Kerja Manajemen Risiko disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta risiko yang melekat pada Bank. Satuan Kerja Manajemen Risiko bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko.

43. RISKS MANAGEMENT

The Bank has implemented risk management policy in accordance with Bank Indonesia's Regulation No. 5/8/PBI/2003 concerning "Application of Risk Management for Commercial Bank" that changed in PBI No. 11/25/PBI/2009 and Bank Indonesia Circular Letter No. 13/23/DPNP dated October 25, 2011 concerning "Risk Management for Commercial Bank". As stipulated in the decree, processes for application of risk management shall be implemented for credit risk, market risk, operational risk, liquidity risk, legal risk, reputation risk, strategic risk and compliance risk.

The Bank's business involves taking on risks in a targeted manner and managing them professionally. The core functions of the Bank's risk management are to identify all key risks for the Bank, measure these risks, manage the risk positions and determine capital allocations. The Bank regularly reviews its risk management policies and systems to reflect changes in markets, products and best market practices.

Organization of Risk Management

The Board of Commissioners was established Monitoring Risk Committee as per decree No.Kep-004/DK/III/2009 dated March 13, 2009, among other in the form of implementation active control of risk management.

Monitoring Risk Committee was established to assist the Board of Commissioners in implementing their duty relating to policy and risk management strategy prepared by the management. While for the active control, the Board of Directors established a Risk Management Committee as per decree of the Board of Directors No.Kep-035-DIR/10/2009 dated October 28, 2009. Risk Management Committee members consist of Directors and Executive Officers of the Bank who have the responsibility to assist the Board of Directors in implementing their duty to prepare policy and risk management strategy, determine risk limit and evaluate risk management implementation. Risk Management Committee routinely carries out meeting periodically, the result of such meeting is reported to the Board of Commissioners for further evaluation of the application of risk management in the Bank.

Risk Management Unit that is independent from operational unit and internal control unit. The organization structure of risk management is adjusted depending on the bank size, complexity and bank inherent risk. Risk Management Unit is directly responsible to Compliance and Risk Management Director.

Untuk meningkatkan pengawasan aktif dari Dewan Komisaris dan Direksi, Bank telah menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas bagi Dewan Komisaris dan Direksi yang terkait dengan penerapan manajemen risiko sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

To strengthen active supervision of the Board of Commissioners and Board of Directors, the Bank has clearly specified the authority and responsibility of the Board of Commissioners and Board of Directors in relation to the application of risk management, in accordance with the prevailing law and regulation.

Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit

Dalam rangka pelaksanaan penerapan manajemen risiko serta untuk memberikan arahan tertulis dalam menjalankan operasional bank, Bank membuat kebijakan dan prosedur serta menentukan limit dan penetapan toleransi risiko yang merupakan batasan potensi kerugian yang mampu diserap oleh kemampuan permodalan Bank dan sarana pemantauan terhadap perkembangan eksposur risiko Bank.

Policy, Procedure, and Determination of Limit

In order to implement risk management and written guidance in implementing the Bank operation, the Bank makes policy and procedure and determines limit of risk tolerance which relates to the limit of potential loss which can be absorbed by the equity of the Bank and observation facilities on the development of the Bank's risk exposure.

Profil Risiko

Profil risiko triwulanan atau laporan bulanan manajemen risiko dilaporkan dan dibahas dalam rapat dewan direksi dan setiap triwulan dipresentasikan di hadapan Komite Pemantau Risiko dan dilaporkan kepada Bank Indonesia.

Penilaian jenis risiko merupakan kombinasi dari risiko-risiko yang melekat pada setiap aktivitas fungsional (*inherent risk*) dan sistem pengendalian risiko.

Risk Profile

Quarterly risk profile or monthly risk management report reported and studied in the Board of Directors meeting and quarterly presented to the Risk Monitoring Committee and reported to Bank Indonesia.

Valuation of risk profile is a combination of inherent risks and risk control system.

Risiko Likuiditas

Penilaian profil risiko dilakukan oleh Bank terhadap 8 (delapan) risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko stratejik dan risiko kepatuhan yang terdapat pada aktivitas fungsional bank yang memiliki potensi kerugian bagi bank.

Risiko likuiditas adalah potensi timbulnya kerugian akibat dari ketidakmampuan Bank dalam membayar penarikan oleh nasabah, mendanai pertumbuhan aset dan memenuhi liabilitas sesuai kontrak melalui akses tak terbatas untuk pendanaan pada tingkat suku bunga pasar yang layak pada umumnya. Risiko likuiditas juga timbul dari situasi dimana Bank tidak dapat mencairkan atau menjual aset karena pasar tidak bisa memperdagangkan aset tersebut.

Pada tanggal 31 Desember 2017, profil risiko likuiditas yang melekat adalah "*low to moderate*" dengan trend stabil dibanding profil posisi 31 Desember 2016, serta sistem pengendalian risiko adalah "*Satisfactory*" sehingga secara komposit profil risiko likuiditas adalah "*low to moderate* ".

Liquidity risk

The Bank's valuation of risk profile consists of 8 types of risks : credit risk, market risk, liquidity risk, operational risk, law risk, reputation risk, strategic risk and compliance risk of the functional activities of the Bank which potential losses had been around by the Bank.

Bank's inability to accommodate withdrawals, fund asset growth and otherwise meet contractual obligations through generally unconstrained access to funding at reasonable market rates. Liquidity risk also arises from situations in which the Bank cannot unload its financial assets because nobody in the market wants to trade that asset.

On December 31, 2017, the inherent liquidity risk profile assessed "low to moderate" with stable trend compare to the position profile December 31, 2016, along with risk control assessed "satisfactory", so as composite liquidy risk-profile is assessed "low to moderate".

Dalam rangka pengelolaan risiko likuiditas PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk telah menerapkan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Menetapkan kebijakan dan pedoman manajemen risiko likuiditas.
2. Meningkatkan fungsi ALCO secara aktif dalam pengelolaan risiko likuiditas.
3. Menambah line money market dengan beberapa counter party baik bank pemerintah, bank swasta ataupun bank asing.
4. Menetapkan posisi secondary reserves yang dibutuhkan untuk mengantisipasi risiko likuiditas.
5. Mematuhi ketentuan giro wajib minimum.
6. Melakukan analisa atas kebiasaan nasabah deposito yang merupakan konsentrasi terbesar produk Dana Pihak Ketiga (DPK) di Bank.

To manage liquidity risk, PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk has implemented the following :

1. Specifies policies and guidelines for liquidity risk management.
2. To improve the ALCO function actively in liquidity risk management.
3. Adds line money market with a few counterparty either state owned bank, private bank or foreign bank.
4. Specifies position of secondary reserves required to anticipate liquidity risk.
5. Comply with provision of minimum statutory reserve.
6. Analyzes time deposits customers' behavior which is the largest third party fund in the Bank.

Menurut kelompok jatuh temponya berdasarkan periode yang tersisa terhitung sejak tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 sampai dengan tanggal jatuh tempo:

The following table shows assets and liabilities of the Bank into relevant maturity groupings as of December 31, 2017 and 2016 based on the remaining period to the contractual maturity date:

	2017						
	Saldo/ *Balance*	s/d 1 bulan/ *up to 1 month*	> 1 s/d 3 bulan/ bulan/ *> 1 to 3 months*	> 3 s/d 6 bulan/ bulan/ *> 3 to 6 months*	> 6 s/d 12 bulan/ bulan/ *> 6 to 12 months*	> 12 bulan/ *> 12 months*	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Rupiah							**Rupiah:**
Aset:							Assets:
Kas	80.406.242	80.406.242	-	-	-	-	Cash
Giro pada Bank Indonesia	432.745.080	432.745.080	-	-	-	-	Demand deposits with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	11.009.649	11.009.649	-	-	-	-	Demand deposits with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	336.974.049	336.974.049	-	-	-	-	Placements with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek	516.334.145	-	159.065.767	48.968.166	48.602.643	259.697.569	Securities
Kredit yang diberikan							Loans
- Yang belum jatuh tempo	5.566.079.817	164.782.061	353.657.214	1.084.629.367	1.590.279.752	2.372.731.422	- Not due
- Yang sudah jatuh tempo	169.563.782	-	-	163.652.178	5.911.604	-	- Past due
Lain-lain	120.305.811	42.826.424	30.038.599	3.608.515	4.305.002	39.527.271	Other assets
Jumlah aset Rupiah (A)	7.233.418.576	1.068.743.507	542.761.580	1.300.858.227	1.649.099.001	2.671.956.262	Total assets Rupiah (A)
Liabilitas:							Liabilities:
Liabilitas segera	10.981.475	2.594.039	8.387.436	-	-	-	Immediately payable
Simpanan nasabah	5.859.340.053	4.970.547.533	715.652.064	33.414.458	93.692.231	46.033.767	Deposits from customers
Simpanan dari bank lain	93.037.786	92.037.786	-	-	1.000.000	-	Deposits by other banks
Lain-lain	39.809.750	37.755.262	25.147	-	1.029.013	1.000.328	Other liabilities
Jumlah liabilitas Rupiah (B)	6.003.169.065	5.102.934.621	724.064.647	33.414.458	95.721.244	47.034.095	Total liabilities in Rupiah (B)
Selisih (A-B)	1.230.249.511	(4.034.191.114)	(181.303.068)	1.267.443.769	1.553.377.757	2.624.922.167	Gap (A-B)
Akumulasi selisih (A-B)	-	(4.034.191.114)	(4.215.494.182)	(2.948.050.413)	(1.394.672.656)	1.230.249.510	Accumulated gap (A-B)

	2017						
	Saldo/ *Balance*	s/d 1 bulan/ *up to 1 month*	> 1 s/d 3 bulan/ bulan/ *> 1 to 3 months*	> 3 s/d 6 bulan/ bulan/ *> 3 to 6 months*	> 6 s/d 12 bulan/ bulan/ *> 6 to 12 months*	> 12 bulan/ *> 12 months*	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Mata uang asing:							**Foreign currencies:**
Kas	8.577.911	8.577.911	-	-	-	-	Cash
Giro pada Bank Indonesia	31.205.250	31.205.250	-	-	-	-	Demand deposits with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	100.538.458	100.538.458	-	-	-	-	Demand deposits with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	54.949.306	54.270.000	-	-	679.306	-	Placements with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek	149.512.095	40.702.499	-	-	-	108.809.596	Securities
Kredit yang diberikan							Loans
- Yang belum jatuh tempo	77.734.347	15.344.842	-	14.064.885	45.499.837	2.824.782	- Not due
- Yang sudah jatuh tempo	30.873.805	-	-	30.873.805	-	-	- Past due
Lain-lain	2.930.795	1.417.359	241.341	1.272.094	-	-	Other assets
Jumlah aset mata uang asing (A)	456.321.966	252.056.320	241.341	46.210.784	46.179.143	111.634.378	Total assets foreign currencies (A)
Liabilitas:							Liabilities:
Liabilitas segera	11.751	11.751	-	-	-	-	Immediately payable
Simpanan nasabah	358.840.436	336.238.296	17.803.532	4.595.105	203.503	-	Deposits from customers
Pinjaman subordinasi	-	-	-	-	80.509.545	-	Subordinated loans
Lain-lain	652.464	652.464	-	-		-	Other liabilities
Jumlah liabilitas mata uang asing (B)	359.504.651	336.902.511	17.803.532	4.595.105	80.713.048	-	Total liabilities foreign currencies (B)
Selisih (A-B)	96.817.315	(84.846.191)	(17.562.191)	41.615.678	(34.533.905)	111.634.378	Gap (A-B)
Akumulasi selisih (A-B)	-	(84.846.191)	(102.408.382)	(60.792.704)	(95.326.609)	16.307.770	Accumulated gap (A-B)

	2016						
	Saldo/ *Balance*	s/d 1 bulan/ *up to 1 month*	> 1 s/d 3 bulan/ bulan/ *> 1 to 3 months*	> 3 s/d 6 bulan/ bulan/ *> 3 to 6 months*	> 6 s/d 12 bulan/ bulan/ *> 6 to 12 months*	> 12 bulan/ *> 12 months*	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Rupiah							**Rupiah:**
Aset:							Assets:
Kas	70.461.222	70.461.222	-	-	-	-	Cash
Giro pada Bank Indonesia	379.638.205	379.638.205	-	-	-	-	Demand deposits with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	9.394.288	9.394.288	-	-	-	-	Demand deposits with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	417.207.298	417.207.298	-	-	-	-	Placements with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek	860.241.342	25.464.480	175.156.062	173.793.985	165.448.997	320.377.817	Securities
Kredit yang diberikan							Loans
- Yang belum jatuh tempo	5.028.017.932	197.429.000	440.194.530	1.026.789.183	1.410.439.475	1.953.165.744	- Undue
- Yang sudah jatuh tempo	127.752.922	-	-	123.948.269	3.804.653	-	- Due
Lain-lain	132.432.948	41.082.752	31.751.621	12.872.081	8.784.300	37.942.194	Others
Jumlah aset Rupiah (A)	7.025.146.157	1.140.677.245	647.102.213	1.337.403.518	1.588.477.425	2.311.485.755	Total assets Rupiah (A)
Liabilitas:							Liabilities:
Liabilitas segera	12.760.747	3.826.014	8.934.733	-	-	-	Immediately payable
Simpanan nasabah	5.679.651.500	4.959.565.667	626.810.332	37.705.490	20.664.984	34.905.027	Deposits from customers
Simpanan dari bank lain	53.357.530	51.957.530	400.000	-	1.000.000	-	Deposits from other banks
Utang akseptasi	-	-	-	-	-	-	Acceptance payable
Lain-lain	38.808.879	36.880.799	41.064	-	887.017	1.000.000	Others
Jumlah liabilitas Rupiah (B)	5.784.578.656	5.052.230.010	636.186.129	37.705.490	22.552.001	35.905.027	Total liabilities in Rupiah (B)
Selisih (A-B)	1.240.567.501	(3.911.552.765)	10.916.084	1.299.698.028	1.565.925.424	2.275.580.728	Gap (A-B)
Akumulasi selisih (A-B)							Accumulated gap (A-B)

	2016						
	Saldo/ *Balance*	s/d 1 bulan/ *up to 1 month*	> 1 s/d 3 bulan/ bulan/ *> 1 to 3 months*	> 3 s/d 6 bulan/ bulan/ *> 3 to 6 months*	> 6 s/d 12 bulan/ bulan/ *> 6 to 12 months*	> 12 bulan/ *> 12 months*	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Mata uang asing:							**Foreign currencies:**
Kas	17.659.462	17.659.462	-	-	-	-	Cash
Giro pada Bank Indonesia	53.890.000	53.890.000	-	-	-	-	Demand deposits with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	351.960.906	351.960.906	-	-	-	-	Demand deposits with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	674.549	-	-	-	674.549	-	Placements with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek	151.942.107	1.230.352	-	-	-	150.711.755	Securities
Kredit yang diberikan							Loans
- Yang belum jatuh tempo	127.200.343	13.378.435	5.457.537	31.127.864	72.036.582	5.199.923	- Undue
- Yang sudah jatuh tempo	30.657.626	-	-	30.657.626	-	-	- Due
Tagihan akseptasi	6.330.054	-	6.330.054	-	-		Acceptances receivables
Lain-lain	3.044.284	2.319.249	235.254	489.781	-	-	Others
Jumlah aset mata uang asing (A)	743.359.331	440.438.404	12.022.845	62.275.271	72.711.131	155.911.678	Total assets foreign currencies (A)
Liabilitas:							Liabilities:
Liabilitas segera	25.308	25.308	-	-	-	-	immediately
Simpanan nasabah	632.651.646	584.069.158	43.841.188	4.539.221	202.078	-	Deposits from customers
Utang akseptasi	10.341.558	1.859.744	8.481.815	-	-	-	Acceptance payable
Lain-lain	80.675.456	729.641	-	-	-	79.945.815	Others
Jumlah liabilitas mata uang asing (B)	723.693.968	586.683.851	52.323.003	4.539.221	202.078	79.945.815	Total liabilities foreign currencies (B)
Selisih (A-B)	19.665.363	(146.245.447)	(40.300.158)	57.736.050	72.509.053	75.965.863	Gap (A-B)
Akumulasi selisih (A-B)	-	(146.245.447)	(186.545.605)	(128.809.555)	(56.300.502)	19.665.361	Accumulated gap (A-B)

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko yang terjadi disebabkan oleh kegagalan pihak lawan (*counterparty*) dalam memenuhi kewajibannya terhadap Bank. Risiko kredit dapat timbul dari aktivitas fungsional Bank yaitu perkreditan (penyediaan dana) serta treasury dan investasi.

Profil risiko yang melekat pada tanggal 31 Desember 2017 adalah "moderate" dengan trend cenderung stabil dibandingkan profil posisi 31 Desember 2016, serta sistem pengendalian risiko "*fair*", sehingga secara komposit profil risiko kredit adalah "*moderate*".

Pengaruh dampak ekonomi makro masih dapat dikendalikan dengan baik pada profil risiko kredit posisi tanggal 31 Desember 2017 dikarenakan meningkatnya fungsi monitoring kredit terhadap komposisi portofolio aset, tingkat konsentrasi risiko kredit dan kualitas kredit melalui early warning signal secara harian, mingguan dan bulanan. Selain itu Bank secara aktif melakukan identifikasi dan pengukuran terhadap faktor eksternal yang menyebabkan peningkatan risiko kredit.

Credit Risk

Credit risk is a risk caused by failure of counter party in fulfilling its obligation to the Bank. Credit risk can arise from various functional activities of the Bank such as credit (finance of fund), treasury and investment.

On December 31, 2017 risk profile was assessed as "moderate" with stable trend compared to December 31 ,2016 the position profile, along with risk control assessed "fair", so as composite credit risk profile is assessed as "moderate".

Effect of the macroeconomic impact can still be controlled by either the credit risk profile position on December 31, 2017 due to increased credit monitoring function of the composition of the portfolio of assets, the level of concentration of credit risk and credit quality through early warning signal on a daily, weekly and monthly. In addition, the Bank actively identify and measure the external factors that can cause an increase in credit risk.

Dalam rangka pengelolaan risiko kredit pada aktivitas perkreditan, PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk melakukan beberapa langkah yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan kriteria pemberian kredit yang tertuang dalam Kebijakan Perkreditan Bank.
2. Menetapkan Kebijakan Pemantauan Risiko Kredit sebagai early warning sistem dan penanganan terhadap debitur bermasalah.
3. Melakukan reviu terhadap kecukupan struktur organisasi kredit dengan tujuan meningkatkan sistem pengendalian internal, yang disesuaikan dengan kompleksitas bisnis bank.
4. Menetapkan limit eksposur kepada nasabah dan pihak berelasi yang tertuang dalam Kebijakan BMPK.
5. Menetapkan dual control dalam rangka four eyes principles pada setiap pengajuan kredit.
6. Menetapkan limit dan kewenangan untuk setiap pemutus kredit (Komite Kredit).
7. Menentukan besaran agunan kredit dalam rangka mitigasi risiko kredit.
8. Menggunakan asuransi bagi debitur untuk meng-cover kredit pada saat debitur meninggal.
9. Menetapkan target penyelesaian kredit bermasalah untuk meningkatkan *asset recovery*.

Selain itu untuk pengelolaan risiko kredit pada aktivitas *treasury*, PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk melakukan beberapa langkah yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan kriteria pembelian surat berharga yang tertuang dalam Kebijakan Surat Berharga.
2. Menetapkan *limit* eksposur kepada counter party yang tertuang dalam Kebijakan BMPK.
3. Menetapkan *limit* dan kewenangan untuk setiap pemutus pembelian surat berharga.

Tingkat *Non-Performing Loan* (NPL) pada 31 Desember 2017 adalah sebesar 6.57% (gross) dan 4.50% (nett) sedangkan pada 31 Desember 2016 adalah sebesar 5.31% (*gross*) dan 4.07% (*nett*), rasio NPL nett berada di bawah angka 5% yang merupakan nilai maksimum NPL yang disyaratkan oleh Bank Indonesia.

Risiko Pasar

Risiko pasar adalah potensi timbulnya kerugian bagi Bank karena adanya perubahan yang tidak menguntungkan dalam tingkat bunga dan nilai tukar valas di pasar uang dimana Bank beroperasi. Risiko pasar adalah melekat pada hampir seluruh kegiatan dan aktivitas Bank baik di *banking book* maupun di *trading book*.

Profil risiko yang melekat (inheren) pada tanggal 31 Desember 2017 adalah "low to moderate " dengan trend stabil dibandingkan profil posisi 31 Desember 2016, serta sistem pengendalian risiko "*satisfactory*", sehingga secara komposit profil risiko kredit adalah "*low to moderate*".

To manage credit risk, PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk has implemented the following policies :

1. Specifies vesting criteria of loan written in the Bank's Loan Policy.
2. Establish Credit Risk Monitoring Policy as early warning system and the handling of non-performing loans debtor.
3. Review the adequacy of the organizational structure to improve the internal control system, accordance to the complexity of the Bank's business.
4. Specifies exposure limit to customer and related parties written in Legal Lending Limit Policy.
5. Specifies dual of control for the agenda of four eyes principles in each loan application.
6. Specifies limit and authority for every loan granted (Loan Committee).
7. Determines the amount of collateral to mitigate credit risk.
8. Secures insurance for debtor to cover the loan in the event of debtor's death.
9. Specifies target of non-performing loans settlement to increase asset recovery.

In additon to operational credit risk in treasury activities, PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk has implemented the following:

1. Specifies purchase criteria of commercial paper written in Commercial Paper Policy.
2. Specifies exposure limit to counter party written in Legal Lending Limit Policy.
3. Specifies limit and authority for every commercial paper purchases.

Level of gross Non-Performing Loan (NPL) as of December 31, 2017 and 2016 is equal to 6,57% (gross) 4,50% (nett) and 5.31% (gross) 4.07% (nett), respectively which is below the 5% maximum NPL allowed by Bank Indonesia.

Market Risk

Market risk is the potential for losses to the Bank resulting from adverse changes in market factors such as interest and foreign exchange rates in the financial markets in which the Bank operates. Market risk is inherent in most of the Bank's operating positions and/or activities, in the banking book and in the trading book.

On December 31 ,2017 Inherent risk profile (inherent) assessed "low to moderate" with stable trend compare to the profile at December 31 ,2016, along with risk control assessed "satisfactory", so as composite market risk profile is assessed "low to moderate".

Dalam rangka pengelolaan risiko pasar, PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk melakukan beberapa langkah yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan *limit* eksposur surat berharga yang termasuk kategori trading book.
2. Menetapkan Posisi Devisa Neto maksimum yang dapat dikelola oleh Bank.
3. Menetapkan *intra day limit* untuk transaksi mata uang asing.
4. Menetapkan *limit cut loss* untuk menghindari kerugian yang lebih besar atas surat berharga yang dimiliki ataupun transaksi mata uang asing.
5. Melakukan *monitoring* dan *stres test* terhadap pergerakan suku bunga pasar dan nilai tukar untuk mengukur potensi kerugian risiko pasar.

Sesuai ketentuan Bank Indonesia, Bank diwajibkan memelihara Posisi Devisa Neto (PDN) setinggi-tingginya 20% atas modal Tier I dan Tier II. Posisi Devisa Neto secara keseluruhan adalah penjumlahan dari nilai absolute atas selisih aset, liabilitas dan ekuitas di laporan posisi keuangan untuk setiap mata uang asing ditambah dengan selisih tagihan dan liabilitas dalam bentuk komitmen dan kontinjensi.

Posisi Devisi Neto Laporan Posisi Keuangan dan Rekening Administratif masing-masing jenis valuta asing adalah sebagai berikut:

To manage market risk, PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk implemented the following policies:

1. Specifies commercial paper exposure limit which includes category trading book.
2. Specifies maximum Net Open Position which can be managed by Bank.
3. Specifies intra-day limit for arbitrage transaction.
4. Specifies limit cut loss to avoid significant loss from commercial paper and/or arbitrage transaction.
5. Performs monitoring and stress test on market interest rate movement and exchange rate to measure the market risk of potential losses.

In accordance with Bank Indonesia regulation, the Bank is required to maintain Net Open Position for a maximum of 20% of capital Tier I and Tier II. The aggregate Net Open Position is the total amount of the absolute value of the net difference between assets, liabilities, and equity denominated in each foreign currency plus the net difference of receivables and payables of commitments and contingencies.

Net foreign exchange position on Statements of Financial Position and administrative acccount by currency, as follows:

	2017				
	Aset dan tagihan komitmen dan kontijensi/ *Assets and receivables of commitments and contingencies*	Liabilitas dan liabilitas komitmen dan kontinjensi/ *Liabilities and liabilities of commitments and liabilities contingencies*	Posisi devisa neto per valuta/ *Net foreign exchange position by currency*	Posisi devisa neto/ *Net foreign currency Position*	
	Rp	Rp	Rp	Rp	
Dolar Amerika	428.502.971	423.359.420	5.143.551	5.143.551	United States Dollar
Dolar Singapura	3.992.737	3.931.849	60.888	60.888	Singapore Dollar
Yen	7.718.693	7.335.621	383.072	383.072	Yen
Pound Sterling	667.333	-	667.333	667.333	Pound Sterling
Dolar Hongkong	562.829	-	562.829	562.829	Hongkong Dollar
Dolar Australia	5.196.705	4.544.368	652.337	652.337	Australian Dollar
Real Saudi Arabi	38.400	-	38.400	38.400	Saudi Arabian Real
Ren Min Bie China	210.585	-	210.585	210.585	China Ren Min Bie
Dolar Taiwan	12.344	-	12.344	12.344	Taiwanese Dollar
Euro	1.650.310	842.939	807.371	807.371	Euro
Ringgit Malaysia	768	-	768	768	Malaysian Ringgit
Jumlah	448.553.674	440.014.196	8.539.477	8.539.477	Total

	2016				
	Aset dan tagihan komitmen dan kontijensi/ *Assets and receivables of commitments and contingencies*	Liabilitas dan liabilitas komitmen dan kontinjensi/ *Liabilities and liabilities of commitments and liabilities contingencies*	Posisi devisa neto per valuta/ *Net foreign exchange position by currency*	Posisi devisa neto/ *Net foreign currency Position*	
	Rp	Rp	Rp	Rp	
Dolar Amerika	712.370.103	711.133.216	1.236.887	1.236.887	United States Dollar
Dolar Singapura	5.840.873	5.530.230	310.643	310.643	Singapore Dollar
Yen	819.464	345.878	473.586	473.586	Yen
Pound Sterling	139.487	-	139.487	139.487	Pound Sterling
Dolar Hongkong	249.302	7.184	242.118	242.118	Hongkong Dollar
Dolar Australia	4.378.248	4.213.943	164.305	164.305	Australian Dollar
Real Saudi Arabi	21.551	-	21.551	21.551	Saudi Arabian Real
Ren Min Bie China	216.854	-	216.854	216.854	China Ren Min Bie
Dolar Taiwan	7.920	-	7.920	7.920	Taiwanese Dollar
Euro	2.762.067	2.462.909	299.157	299.157	Euro
Ringgit Malaysia	13.073	-	13.073	13.073	Malaysian Ringgit
Dolar Kanada	250	-	250	250	Canadian Dollar
Jumlah	726.819.192	723.693.360	3.125.831	3.125.831	Total

Batas nilai (absolut) Posisi Devisa Neto yang diperkenankan pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp 234.183.800 dan Rp 252.091.400. Persentase nilai absolut Posisi Devisi Neto terhadap modal sendiri masing masing sebesar 0,73% dan 0,25% pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

The absolute allowed limit amount of Net Open Position as of December 31, 2017 and 2016 is Rp 234,183,800 and Rp 252,091,400. The percentage ratio of absolute amount of Net Open Position to equities is 0.73% and 0.25% as of December 31, 2017 and 2016 , respectively.

Sesuai PBI No. 5/12/PBI/2003 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar (*Market Risk*), Bank wajib melaporkan posisi yang diperhitungkan dalam Risiko Pasar secara bulanan dengan format yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia secara *on-line* dan mengacu kepada ketentuan tentang Laporan Berkala Bank Umum.

Based on PBI No. 5/12/PBI/2003 "Commercial Banks Obligation to Provide Minimum Capital Adequacy with the calculation of the Market Risk", the Bank is obliged to report its position on a monthly basis, taking into consideration the market risk, using the format which has been specified by Bank Indonesia on-line and in reference to the regulation on Periodic Report of Commercial Banks.

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar (*Market Risk*), masing-masing sebesar 17,50% dan 20,57%.

As of December 31, 2017 and 2016 the Bank's Capital Adequacy Ratio with consideration for market risk are 17.50% and 20.57%.

Risiko Operasional

Risiko operasional adalah potensi timbulnya kerugian sebagai akibat dari kejadian-kejadian yang melibatkan manusia, proses, sistem dan kejadian-kejadian di luar Bank.

Operational Risk

Operational risk is the potential for loss resulting from events involving people, processes, systems and external events.

Dalam pengelolaan risiko operasional, masing-masing unit usaha bertanggung jawab untuk risiko yang terjadi pada kegiatan operasional sehari-hari dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur, pengendalian dan pengawasan rutin. Selain itu, pengelolaan risiko operasional juga meliputi hal-hal yang terkait dengan pengembangan produk, sistem, sumber daya manusia dan prinsip "*know your customer*" sebagai aspek pencegahan terhadap kemungkinan adanya hal-hal yang tidak diinginkan.

In the operational risk management, each business unit is responsible for the risk relating to daily operational activity by referring to policy and procedure, control and routine supervisory. In addition, operational risk management also covers matters related to product development, system, human resources and principle of "know your customer" as preventive aspect to the possibility of unexpected matters.

Pada tanggal 31 Desember 2017 profil risiko operasional yang melekat adalah "*moderate*" dengan trend stabil dibandingkan profil posisi 31 Desember 2016, serta sistem pengendalian risiko "*fair*" sehingga secara komposit profil risiko pasar adalah "*moderate*".

On December 31 ,2017 inherent operation risk profile assessed "moderate" with stable trend compared to the profile at December 31 ,2016, along with risk control assessed "fair", so as composite operational risk profile is assessed "moderate".

Beberapa kebijakan dan prosedur yang telah dievaluasi dan ditetapkan adalah sebagai berikut:

Policies and procedures which have been evaluated and specified are as follows:

1. Prosedur Sistem Pengendalian Internal
2. Prosedur Pelaporan Insiden Operasional
3. Kebijakan Risiko Reputasi
4. Kebijakan Risiko Hukum
5. Kebijakan dan Prosedur Pengajuan Produk atau Aktivitas Baru
6. Kebijakan dan Prosedur Rencana Kelanjutan Usaha (*Business Continuity Plan*)
7. Prosedur *Outsourcing*
8. Kebijakan dan Prosedur Pengamanan Informasi

1. Policies for Internal Control System
2. Operational Incident Reporting Procedures
3. Policies for Reputation Risk
4. Policies for Legal Risk
5. Policies and Procedures for Submission Product and New Activities
6. Policies and Procedures for Business Continuity Plan
7. Procedures for Outsourcing
8. Policies and Procedures for Information Security (Information Security Standard Procedures)

Risiko Hukum

Legal Risk

Risiko hukum merupakan risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, yang antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan pengikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

Legal risks can be caused by weaknesses in legal aspects such as lawsuits, an absence of clear and supportive laws, or weaknesses in contracts, claims or collateral agreements.

Pengelolaan risiko hukum dilakukan untuk memastikan agar seluruh aktivitas dan hubungan kegiatan usaha Bank dengan pihak ketiga didasarkan pada aturan dan persyaratan yang dapat melindungi kepentingan Bank dari segi hukum.

Legal risks are managed by ensuring that all activities and business relationships between the Bank and third parties are based on rules and conditions that are capable of protecting the Bank's interests from a legal perspective.

Risiko Reputasi

Reputation Risk

Risiko reputasi timbul dari adanya pemberitaan negatif terkait dengan kegiatan usaha Bank atau persepsi negatif mengenai Bank. Mengingat risiko reputasi ini bukan merupakan risiko yang dikelola secara terpisah dari risiko-risiko lainnya, khususnya bagi Bank dengan kompleksitas usaha yang tinggi, maka pengelolaan setiap aktivitas fungsional Bank sedapat mungkin terintegrasi ke dalam suatu sistem dan proses pengelolaan risiko yang akurat dan komprehensif.

Reputation risks arise from negative publicity concerning the operations of the Bank or negative perceptions of the Bank given that reputation risk management is an integral part of risk management, especially in a bank with highly complex operations, the management of each functional aspect of the bank is integrated into a single accurate and comprehensive risk management system and process as much as possible.

Risiko Strategis

Risiko strategis mengacu pada risiko yang disebabkan oleh adanya keputusan dan/atau penerapan strategi Bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan strategis yang tidak tepat, atau kegagalan Bank dalam merespon perubahan-perubahan eksternal.

Bank mengelola risiko strategis melalui proses pertimbangan dan pengambilan keputusan secara kolektif dan komprehensif di lingkungan komite-komite pengawasan dan eksekutif, yang turut mempengaruhi dan berdampak pada langkah-langkah bisnis yang akan diambil dalam kerangka kebijakan dan arah yang telah ditetapkan.

Strategic Risk

Strategic risk refers to the risk of a bad outcome attributed due to a decision and/or implementation of a Bank's strategy, a bad or misjudged strategic decision or the Bank's failure to respond to external changes. that the Bank will embark on.

Bank manages strategic risks through a comprehensive and collective consideration and decision-making processes encompassing areas of the supervisory and executive committees that influence and impact business decisions on policies and directions.

Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan merupakan risiko yang timbul ketika Bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Risiko kepatuhan, jika tidak dikelola dengan baik, berpotensi pada pengenaan denda, hukuman, atau rusaknya reputasi.

Bank melakukan identifikasi dan pengelolaan risiko kepatuhan sejak awal dengan memberikan bantuan kepada unit bisnis dan unit operasional dalam hal proses perumusan struktur transaksi dan pengembangan produk baru dan secara aktif melakukan penilaian terhadap kebijakan Pedoman dan Prosedur Internal yang dimiliki oleh Bank untuk memastikan bahwa seluruh peraturan eksternal telah diakomodir sedemikian rupa dan selanjutnya untuk dipatuhi dalam pelaksanaannya.

Compliance Risk

Compliance risk is the risk when the Bank does not comply or implement current laws and regulations and other policies. If compliance risk is not managed well, it will potentially lead to penalty charges, punishments, or damage to reputation.

The Bank implements early detection and management of compliance risks by providing assistance to business and operational units in the process of formulating transaction structures and new product developments and also evaluated the Bank's Guidelines and Procedures to ensure that all external regulations have been accommodated and implemented correctly.

Pengukuran nilai wajar

Nilai wajar instrumen keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi

Kecuali sebagaimana tercantum dalam tabel berikut, direksi menganggap bahwa nilai tercatat aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui dalam laporan keuangan mendekati nilai wajarnya

Fair Value Measurement

Fair value of financial instruments carried at amortized cost

Except as detailed in the following table, the directors consider that the carrying amounts of financial assets and financial liabilities recognized in the financial statements approximate their fair values.

	31 Desember/December 31, 2017		
	Nilai tercatat/ *Carrying amount*	Nilai w ajar/ *Fair value*	
	Rp'000	Rp'000	
ASET			ASSETS
Efek-efek	665.846.239	696.656.480	Securities
Jumlah	665.846.239	696.656.480	Total

	31 Desember/December 31, 2016		
	Nilai tercatat/ *Carrying amount*	Nilai w ajar/ *Fair value*	
	Rp'000	Rp'000	
ASET			ASSETS
Efek-efek	1.012.183.450	1.018.646.430	Securities
Jumlah	1.012.183.450	1.018.646.430	Total

44. JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM

Sejak tahun 1998, Pemerintah menjamin kewajiban bank umum meliputi giro, tabungan, deposito berjangka dan deposit on call, obligasi, surat berharga, pinjaman antar bank, pinjaman yang diterima, letters of credit, akseptasi, swap mata uang dan liabilitas kontinjensi lainnya seperti bank garansi, standby letters of credit, performance bonds dan liabilitas sejenis lain yang dikecualikan dalam keputusan ini seperti pinjaman subordinasi dan liabilitas kepada direktur, komisaris dan pihak berelasi dengan bank.

Peraturan LPS No.1 tanggal 9 Maret 2006, simpanan yang dijamin meliputi giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan simpanan dari bank lain.

Pada tanggal 13 Oktober 2008, Presiden Republik Indonesia menetapkan Peraturan Pemerintah No.66 tahun 2008 tentang besaran nilai simpanan yang dijamin LPS. Berdasarkan peraturan tersebut, nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank yang semula berdasarkan Undang-Undang No. 24 tahun 2004 ditetapkan maksimum Rp 100.000.000 (nilai penuh) diubah menjadi maksimum Rp 2.000.000.000 (nilai penuh).

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, Bank adalah peserta dari program penjaminan tersebut.

Beban premi penjaminan yang dibayar sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp 11.906.049 dan Rp 13.874.189 (lihat Catatan 24).

44. GOVERNMENT QUARANTEE ON PUBLIC BANK PAYMENT OBLIGATION

Since 1998, the Government guarantees the obligations of private banks including demand deposits, saving deposits, time deposits, deposits on call, bonds, securities, interbank borrowings, fund borrowings, letters of credit, acceptances, currency swap and other contingent liabilities such as bank guarantees, standby letters of credit, performance bonds and other kinds of liabilities other than those excluded in this regulation such as subordinated loans, liabilities to directors, commissioners and related parties of the Bank.

Based on LPS Regulation No. 1 dated March 9, 2006, guarantees on deposits covers demand deposits, time deposits, certificate of deposits, saving deposits and deposits, from other banks.

On October 13, 2008, the President of the Republic of Indonesia approved Government Regulation No. 66 year 2008 regarding the amount of guarantee on deposits guaranteed by LPS. Based on the such regulation, the guaranteed customer's deposit amount in a bank which previously according to Law No. 24 year 2004 amounted to maximum Rp 100,000,000 (full amount), was amended to maximum of Rp 2,000,000 000 (full amount).

As of December 31, 2017 and 2016, the Bank was a participant of that guarantee program.

Guarantee premium expense paid as of December 31, 2017 and 2016 are Rp 11,906,049 and Rp 13,874,189, respectively (see Note 24).

45. PERJANJIAN PENTING

1. Bank telah mengadakan sejumlah perjanjian dengan PT Artajasa Pembayaran Elektronis, sebagai berikut:

    a. Berdasarkan No.: B.058-DIR/2002, No. 131/LA/PKS/000/2002, No. 087/PKS.BNP-LA/AJ/000/2002 tanggal 1 Juli 2002, Bank telah melakukan perjanjian untuk menyediakan perangkat lunak atau aplikasi computer yang dapat digunakan Bank sebagai sarana pengiriman laporan perbankan ke Bank Indonesia, yaitu Otomasi Sistem Penyampaian Laporan Bulanan Bank Umum (LBU), Otomasi Sistem Penyampaian Laporan Berkala Bank Umum (LBBU) dan Otomasi Sistem Informasi Debitur (SID).

45. SIGNIFICANT AGREEMENTS

1. The Bank entered into agreements with PT Artajasa Pembayaran Elektronis, as follows:

    a. Based on agreement No. B.058-DIR/2002, No. 131/LA/PKS/000/2002, No.: 087/PKS.BNP-LA/AJ/000/2002 as of July 1, 2002, The Bank entered into a cooperation agreement to provide software or computer application that can be used by the bank to send the banking report to Bank Indonesia, which is “Otomasi Sistem Penyampaian Laporan Bulanan Bank Umum” (LBU), “Otomasi Sistem Penyampaian Laporan Berkala Bank Umum” (LBBU) and “Otomasi Sistem Informasi Debitur” (SID).

Biaya-biaya yang timbul diantaranya biaya awal yang dibayarkan sekali untuk setiap kantor Bank yang berlangganan sebesar Rp 50.000 untuk LBU dan Rp 75.000 untuk SID, biaya tetap bulanan untuk setiap kantor Bank yang berlangganan masing-masing sebesar Rp 100.000 untuk LBU dan SID, serta biaya transaksi yang dikenakan secara rutin setiap bulan untuk setiap satuan data yang dikirim setiap kantor Bank yang berlangganan ke Bank Indonesia masing-masing sebesar Rp 40 untuk LBU, LBBU dan SID. Perjanjian ini berlaku dari sejak perjanjian ditandatangani dan akan berakhir atas permintaan Bank dengan menyerahkan surat permintaan berhenti berlangganan dengan tembusan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum pemberhentian berlangganan, atau salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya dalam perjanjian ini.

The cost incurred includes the initial cost paid for each bank office subscribed for Rp 50,000 per LBU and Rp 75,000 paid SID, fixed monthly fees for any bank office subscribed of Rp 100,000 for LBU and SID, also the transaction fees charged every month for each unit of data transmitted to every bank offices subscribed to Bank Indonesia of Rp 40 for LBU, LBBU and SID. This agreement applies from the day of the agreement was signed and terminated by the request of the Bank by submitting a letter of request to unsubscribe.

b. Berdasarkan Perjanjian No. 005/PKS.BNP/AJ/000/2004 tanggal 25 Mei 2004, Bank telah mengadakan perjanjian kerjasama dalam bidang penyediaan, pengelolaan dan pengembangan Layanan Kartu Debit ATM bagi Nasabah Bank yang menggunakan Kartu Debit ATM untuk transaksi pembayaran belanja. Biaya yang harus dikeluarkan Bank tergantung dari jumlah transaksi nasabah. Apabila jumlah transaksi yang dilakukan oleh nasabah kurang dari 10.000 dalam 1 bulan, maka untuk setiap transaksi pada bulan berikutnya Bank dikenakan biaya sebesar Rp 2.000 per transaksi. Apabila jumlah transaksi yang dilakukan nasabah mencapai 10.001 sampai dengan 25.000 dalam 1 bulan, maka untuk setiap transaksi pada bulan berikutnya Bank dikenakan biaya sebesar Rp 1.250 per transaksi. Dan apabila jumlah transaksi yang dilakukan oleh nasabah lebih dari 25.000 dalam 1 bulan, maka untuk setiap transaksi pada bulan berikutnya Bank akan dikenakan biaya sebesar Rp 500 per transaksi. Perjanjian ini berlaku dari sejak perjanjian ditandatangani.

b. Based on agreement No. 005/PKS.BNP/AJ/000/2004 dated as of May 25, 2004, the Bank has entered into cooperation agreement in providing, managing and developing the ATM Debit Card service for Bank's customer to pay purchase transactions. The cost that have to be paid by the Bank depends on the total of customer transactions. If the customers transactions is less than 10,000 in 1 month, on the following month, the Bank will be charged Rp 2,000 per transaction. If total of customer transactions 10,001 until 25,000 in 1 month, for the following month the Bank will be charged Rp 1,250 per transaction and if the total of customer transaction is more than 25,000 in a month, the Bank will be charged Rp 500 per transaction. This agreement is valid from the date that the agreement was signed.

c. Berdasarkan Perjanjian No. 068/PKS.BNP/AJ/000/2008 tanggal 17 Desember 2008, , Bank telah mengadakan perjanjian kerjasama tentang pemanfaatan ATM Bersama untuk principle member . Jangka waktu perjanjian (masa berlangganan) selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani nya perjanjian dan dapat diperpanjang otomatis untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan apabila selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu, Bank tidak melakukan pemberitahuan secara tertulis.

c. Based on agreement No. 068/PKS.BNP/AJ/000/2008 as of December 17, 2008, the Bank entered into a cooperation agreement for the use of "ATM Bersama" as a principal member. Term of agreement (subscription) for 3 (three) years from the date of this signed agreement and can be extended automatically for a period of twelve (12) months if the Bank does not undertake written notification not later than 3 (three) months before the expiry of the period.

2. Pada tanggal 13 Juni 2003, Bank telah mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT Daya Network Lestari tentang pemakaian ATM-Bersama ALTO. Biaya awal keanggotaan sebesar US$ 300.000 dan biaya tahunan tiga tahun pertama sebesar US$ 48.000 + PPN/tahun dan memasuki tahun ke empat sebesar US$ 60.000 + PPN/ tahun. Perjanjian ini mulai berlaku sejak DNL menerima pembayaran biaya awal keanggotaan secara penuh dan diperpanjang secara otomatis kecuali terdapat pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak untuk mengakhiri. Berdasarkan perjanjian No. 053/DIR/PKS/2008 tanggal 16 Mei 2008 terdapat addendum ke 1 untuk mengadakan perubahan dan penambahan pada poin 1 dan 2 lampiran II perjanjian induk, diantaranya mengubah biaya awal keanggotaan menjadi sebesar
Rp 2.500.000.000 dan biaya iuran tahunan menjadi biaya iuran per bulan menurut volume transaksi setahun.

2. On June 13, 2003, the Bank entered into a cooperation agreement with PT Daya Network Lestari of use of “ATM Bersama- ALTO”. Joining fee amounted to US$ 300,000 and annual fee for the first 3 years amounted US$ 48,000+VAT/year and US$ 60,000+VAT/ year thereafter. The agreement is valid from the date DNL received the full amount of joining fee and it will be automatically renewed except there is a notification from one of parties to end the agreement. Based on agreement No. 053/DIR/PKS/2008 as of May 16, 2008 there is a change to the agreement and additional point 1 & 2 to the main agreement, such as change of joining fee to become Rp 2,500,000,000 and changes in annual fee to monthly fee based on volume of transaction per year.

3. Bank telah mengadakan sejumlah perjanjian dengan PT Rintis Sejahtera, sebagai berikut:

a. Berdasarkan Perjanjian No. PKS/RS-BNP/001/I/2004 tanggal 15 Januari 2004 dan Addendum Pertama No. 091/DCL/PKS/2015 tanggal 8 Desember 2015, Bank mengadakan perjanjian kerjasama mengenai jasa berlangganan jaringan ATM-BCA untuk jangka waktu 24 bulan terhitung sejak ditandatangani perjanjian. Uang jaminan sebesar USD 235.000 dan biaya keanggotaan USD 45.000 per tahun, dan apabila tidak terdapat pemberitahuan pengakhiran maka masa berlangganan akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 24 bulan dan berikutnya.

3. The Bank entered into agreements with PT Rintis Sejahtera, as follows :

a. Based on agreement No. PKS/RS-BNP/001/I/2004 as of January 15, 2004 and first addendum No. 091/DCL/PKS/2015 dated December 8, 2015, the Bank entered into a cooperation agreement regarding the subscription of payment of ATM-BCA services for the period 24 months from the agreement was signed. Security deposits amounting to USD 235,000 and membership fee amounting to USD 45,000 every year and if there is no notification of winding up of the subscription period, it will be automatically extended for the period of 24 months and thereafter.

b. Berdasarkan Perjanjian No. PKS/RS-BNP/002/05/2009 tanggal 22 Mei 2009 dan Addendum Pertama No. 092/DCL/PKS/2015 tanggal 8 Desember 2015, Bank mengadakan perjanjian kerjasama mengenai PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk sebagai *Acquirer Bank* untuk jangka waktu 24 bulan terhitung sejak ditandatangani perjanjian, dan apabila tidak terdapat pemberitahuan pengakhiran maka masa berlangganan akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 24 bulan dan berikutnya.

b. Based on agreement No. PKS/RS-BNP/002/05/2009 as of May 22, 2009 and first addendum No. 092/DCL/PKS/2015 dated December 8, 2015, the Bank entered into a cooperation agreement regarding PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk as Acquirer Bank for the period 24 months from the agreement was signed. If there is no notification of winding up of the subscription period, it will be automatically extended for the period 24 months and thereafter.

4. Pada tanggal 16 Mei 2005, Bank telah mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT BPR Eka Bumi Artha tentang jasa berlangganan Jaringan ATM-Bersama ALTO melalui kerjasama Co–Branding. Uang jaminan sebesar Rp 1.000.000.000 (nilai penuh) dan biaya iuran sebesar USD 20.000 per tahun. Selanjutnya terdapat Addendum Pertama Perjanjian Kerjasama Co-Branding Jaringan ATM-Bersama Alto antara PT BPR Eka Bumi Artha dan Bank, No. B.0533-DIR/PKS/2008, bahwa adanya perubahan lampiran 1 angka 2 mengenai iuran tahunan. Perjanjian ini berlaku sejak Bank telah menerima pembayaran jaminan dan iuran tahunan Co-Branding tahun pertama secara penuh dan diperpanjang secara otomatis kecuali terdapat pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak untuk mengakhiri.

4. On May 16, 2005, the Bank entered into a cooperation agreement with PT BPR Eka Bumi Artha on the subscription of payment of ATM-Bersama ALTO through Co-Branding agreement. Security deposits amounting to Rp 1,000,000,000 (full amount) and annual cost is amounting to USD 20,000 per year. there is a First Addendum to the Cooperation Agreement Co-Branding Co-Alto ATM Network between PT BPR Eka Bumi Artha and Bank , No. B.0533-DIR / MCC / 2008, that the change in Appendix 1 point 2 of the annual fees. This agreement is valid from the Bank receipt first year annual membership fee and collateral Co-Branding agreement fee, and it will be automatically renewal except there is a notification from one of party to end the agreement.

5. Pada tanggal 2 Januari 2006,berdasarkan Surat Kontrak No. MA001/BNP-WNI/I-06 Bank melakukan perjanjian kerjasama dengan PT Wincor Nixdrof Indonesia dalam rangka penyediaan layanan perawatan mesin ATM Procash 2000/Xe ATM BNP beserta suku cadangnya. Perjanjian ini berlaku selama 2 tahun sampai dengan tanggal 31 Desember 2008. Pada tanggal 1 Juni 2016, perjanjian ini telah ditandatangani Addendum ketiga dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016 hingga 31 Desember 2016 dan dapat diperpanjang hingga 2 (dua) tahun berikutnya. Apabila kedua belah pihak tidak memberitahukan secara tertulis pemberhentian kontrak ini selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini, maka secara otomatis akan diperpanjang untuk 2 (dua) tahun berikutnya.

5. As of January 2, 2006, by virtue of the contract No. MA001/BNP-WNI/I-06 the Bank entered into cooperation agreement with PT Wincor Nixdrof Indonesia for maintanence services of ATM Procash 2000/xe ATM BNP including spareparts. This agreement is valid until December 31, 2008. As of June 1, 2016, this agreement has been signed as of January 1, 2016 until December 31, 2016 and can be extended to 2 (two) years. If the parties do not announce the termination of this contract no later than 2 (two) months before this agreement expires, it is automatically extended for the next 2 (two) years.

6. Pada tanggal 17 Maret 2009, Bank telah mengadakan perjanjian kerjasama dengan Visa Worldwide Pte. Limited mengenai penggunaan network visa untuk pembayaran barang dan jasa. Perjanjian ini berlaku sejak 01 April 2009 sampai dengan 01 April 2014 dan diperpanjang secara otomatis kecuali terdapat pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak untuk mengakhiri.

7. Berdasarkan Perjanjian No. 101/XI/SOFT/2006 tanggal 22 Nopember 2006, Bank telah mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT Teradata Megah Corporation mengenai dukungan purna jual program komputer aplikasi perbankan dan aplikasi interkoneksi antar institusi. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2009. Nilai kontrak sebesar USD 76.340 pada tahun 2007 dan meningkat 10% setiap tahunnya. Pada tanggal 10 Mei 2010 perjanjian ini telah dilakukan perpanjangan dan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2011, dengan nilai kontrak USD 101.608,54 di luar PPN pada tahun pertama, dan USD 111.769,40 di luar PPN pada tahun kedua. Dan pada tanggal 2 Januari 2012 telah dilakukan perpanjangan dan berlaku sejak tanggal 2 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2014, dengan nilai kontrak sebesar USD 122.947 di luar PPN pada tahun pertama, USD 135.241 pada tahun kedua, dan USD 148.765 pada tahun ketiga. Berdasarkan No. 103A//DCL/PKS/2014 tanggal 23 Desember 2014 terdapat addendum pertama untuk mengadakan perubahan pada poin 1 dan 2 dan penambahan pada poin 3 dimana perjanjian ini berlaku sejak 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2017 dengan nilai kontrak sebesar USD 163.641 di luar PPN pada tahun pertama, USD 180.000 pada tahun kedua, dan USD 198.000 pada tahun ketiga.

8. Berdasarkan Perjanjian No. B.071-IT/KP/2010 tanggal 9 Juli 2010, Addendum Pertama No. B-003-IT/KP/2011 & No. 101/ADD/I/2011 tanggal 26 Januari 2011, Bank telah mengadakan perjanjian Kontrak Penyediaan Layanan dan Fasilitas Pusat Pemulihan Sistem Informasi Aplikasi Komputer atau *Disaster Recovery Center* dengan PT Teradata Megah. Biaya awal untuk persiapan dan setup sebesar Rp 50.000.000+PPN dan biaya kontrak setiap bulan selama jangka waktu kontrak sebesar Rp 12.000.000+PPN. Perjanjian ini berlaku sejak ditandatanganinya Berita Acara Penggunaan DRC dan diperpanjang secara otomatis selama 12 (dua belas) bulan.

6. On March 17, 2009, the Bank entered into a cooperation agreement with Visa Worldwide Pte. Limited regarding managing payment products and services for clients participating in the Visa Group`s payment network ("Visa Network"). This agreement is valid from April 1, 2009 up to April 1, 2014, it will be automatically renewed except if there is a notification from one of party to end the agreement.

7. Based on agreement No. 101/XI/SOFT/2006 as of November 22, 2006, the Bank entered into a cooperation agreement with PT Teradata Megah Corporation regarding after sales services of banking computer application and interinstitution interconnection application. This agreement is valid up to December 31, 2009. The contract amounted to USD 76,340, in year 2007 and increasing 10% every year. As of May 10, 2010, extension was made and valid from January 1, 2010 until December 31, 2011, with contract amount USD 101,608.54 excluding VAT at first year, and USD 111,769.40 excluding VAT thereafter. At January 2,2012 the agreement has been extended and will be valid from January 2, 2012 until December 31, 2014 with the contract amount of USD 122,947 excluding VAT on the first year, USD 135,241 for the second year and USD 148,765 for the third year. Based on agreement No. 103A/DCL/PKS/2014 as of December 23, 2014 there is first addendum to change point 1 dan 2 and adding point 3 where this agreement will be valid from January 1, 2015 until December 31, 2017 with the contract amounting to USD 163,641 excluding VAT on the first year, USD 180,000 for the second year and USD 198,000 for the third year.

8. Based on agreement No. B.071-IT/KP/2010 as of July 9 2010, first addendum No. B-003-IT/KP/2011 & No. 101/ADD/I/2011 as of January 26, 2011, The Bank entered into a cooperation agreement services and facilities of Disaster Recovery Center with PT Teradata Megah. The initial fee for preparation and setup amounted to Rp 50,000,000+VAT and monthly fee during the period of agreement amounted to Rp 12,000,000+VAT. This agreement is valid since the Minutes of Final Meetings of DRC and automatically extended for the period 12 months.

9. Berdasarkan perjanjian No. 005/PI/BNP/X/II, tanggal 5 Oktober 2011 dan adendum pertama No.065/DCL/PKS/2015 tanggal 2 September 2015, Bank telah melakukan kerjasama dengan PT Prismalink International untuk jasa implementasi sistem Internet Banking Individual bagi Bank serta mempersiapkan dan menyerahkan setiap hasil kerja dari jasa implementasi Internet Banking Individual yang disepakati para pihak. Biaya yang harus dikeluarkan Bank diantaranya *Initial Fee* sebesar Rp 450.000.000, *monthly fee* sebesar Rp 75.000.000 dan *Man Days Rate* sebesar Rp 2.000.000 per hari. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 5 Oktober 2011 dan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu satu tahun pada saat jatuh temponya.

9. Based on agreement No. 005/PI/BNP/X/II as of October 5, 2011 and First addendum No. 065/DCL/PKS/2015 as of September 2, 2015, the Bank has entered into cooperation agreements with PT Prismalink International about implementation Individual Internet Banking system for Bank and submit all work of implementation Individual Internet Banking services as agreed between the parties. The Bank provide Rp 450,000,000 for Initial Fee, Rp 75,000,000 for monthly fee and Rp 2,000,000 each day for Man Days Rate. This agreement valid for 5 years from October 5, 2011 and automatically renewal for 1 years period at the end of the period.

10. Berdasarkan Perjanjian No. 025/DCL/PKS/2015 tanggal 11 Pebruari 2015, Bank telah mengadakan perjanjian Kerjasama dengan PT Teradata Megah tentang *Outsourcing Disaster Recovery Center* mengenai penggunaan jasa *Disaster Recovery Center* untuk memenuhi persyaratan Bank Indonesia untuk melakukan pengoperasian seluruh jaringan komputer termasuk jaringan komputer pusat yang didalamnya terdapat sistem operasi yang terintegrasi. Perjanjian ini berlaku selama 4 tahun terhitung sejak tanggal 11 Pebruari 2015.

10. Based on agreement No. 025/DCL/PKS/2015 as of Februari 11 2015, the Bank has entered into cooperation agreements with PT Terdata Megah about Outsourcing Disaster Recovery Center about the use of Disaster Recovery Center Service to fulfil the requirement of Bank Indonesia to perform the entire operation of computer networks include the central network in which there's an integrated operating system. This agreement valid for 4 years from Februari 11, 2015.

11. Berdasarkan perjanjian No. 013/HO2808/2012 tanggal 28 Agustus 2012, Bank telah mengadakan perjanjian dengan PT Phintraco Technology tentang pemeliharaan *hardware* dan *software* Avaya. Biaya pemberian jasa ini sebesar USD 6.500 (belum termasuk PPN) untuk masa pemeliharaan 1 (satu) tahun. Pada tanggal 5 September 2016, Bank telah memperpanjang masa kerjasama hingga jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 4 September 2016 sampai dengan 3 September 2017. Biaya pemberian jasa ini sebesar Rp 342.454.000 (belum termasuk PPN) untuk masa pemeliharaan 1 (satu) tahun.

11. Based on agreement No. 013/HO2808/2012 as of August 28, 2012, 18. Bank has entered into cooperation agreement with PT Phintraco Technology about maintenance Avaya hardware and software. The cost of providing this service is USD 6,500 (not include VAT) for 1 (one) year maintenance period. This agreement is valid for 1 year from August 1, 2012 until July 31, 2013. As of September 5, 2016, the Bank has extended the agreement period for 1 (one) year valid from September 4, 2016 until September 3, 2017. The cost of providing this service is Rp 342,454,000 (not include VAT) for 1 (one) year maintenance period.

12. Berdasarkan perjanjian tanggal 29 November 2016, Bank telah mengadakan perjanjian dengan PT Western Union Indonesia (WUI) untuk layanan pengiriman uang. Biaya pokok dan pengiriman akan dikenakan untuk setiap transaksi. Masing-masing pihak berhak untuk mengakhiri perjanjian ini, tetapi hanya sejak berakhirnya jangka waktu awal atau berakhirnya setiap jangka waktu pembaharuan, dengan memberikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada pihak lainnya selambat-lambatnya Sembilan puluh (90) hari kalender sebelumnya.

12. Based on the agreement dated November 29, 2016, the Bank has entered into an agreement with PT Western Union Indonesia (WUI) for remittance services. Transfer fee will be charged for each transaction. Each party is entitled to terminate this agreement, but only from the expiration of the initial term or the expiry of each renewal term, by giving prior notice to the other party no later than Ninety (90) of the previous calendar day.

46. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN DAN PERSETUJUAN LAPORAN KEUANGAN

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan dari halaman 1 sampai dengan 103 merupakan tanggung jawab manajemen, dan telah disetujui oleh Direksi untuk diterbitkan pada tanggal 7 Maret 2018.

46. MANAGEMENT RESPONSIBILITY AND APPROVAL OF FINANCIAL STATEMENTS

The preparation and fair presentation of the financial statements on pages 1 to 103 were the responsibilities of the management, and were approved by the Directors and authorized for issue on authorized for issue on March 7, 2018.

****

Halaman ini sengaja dikosongkan

This page is intentionally left blank

Lampiran Laporan Tertentu

Attachment of Other Reports

Table 2.1.a

(dalam jutaan rupiah/ in millions Rp)

No.	Kategori Portofolio / Portfolio Category	Posisi Tanggal Laporan / Report Date Position in			
		Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah / Net Claims per Region			
		Jawa Barat / West Java	Jakarta	Lainnya / Others	Total
1	Tagihan Kepada Pemerintah / Receivables from Government	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik / Receivables from Public Sector Entities	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional / Receivables from Multilateral Development Banks and International Institutions	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank / Receivables from Banks	0.00	-	-	0.00
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal / Residential Property Collateralized Loans	192,223.28	8,323.38	20,303.68	220,850.34
6	Kredit Beragun Properti Komersial / Commercial Property Collateralized Loans	247,733.89	17,489.84	32,425.20	297,648.93
7	Kredit Pegawai/Pensiunan / Employee/Retirement Loans	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel / Receivables from Microbusiness, Small Business, and Retail Portfolio	377,811.80	4,462.36	20,476.23	402,750.39
9	Tagihan kepada Korporasi / Receivables from Corporations	3,342,840.35	671,930.13	492,237.48	4,507,007.95
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo / Due Receivables	169,742.45	17,617.56	75,514.85	262,874.86
11	Aset Lainnya / Other Assets	-	-	-	-
12	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada) / Exposure in Sharia Business Unit (if any)	-	-	-	-
	Total	**4,330,351.78**	**719,823.27**	**640,957.43**	**5,691,132.48**

(dalam jutaan rupiah)

No.	Kategori Portofolio / Portfolio Category	Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya (31/12/2014) / Previous Year Report Date Position (31/12/2014)			
		Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah / Net Claims per Region			
		Jawa Barat / West Java	Jakarta	Lainnya / Others	Total
1	Pemerintah / Government	-	-	-	-
2	Lembaga Pembangunan Multilateral / xxx	-	-	-	-
3	Bank / Bank	0.04	-	-	71,43
4	Entitas Sektor Publik / Public Sector Entities	-	-	-	-
5	Korporasi / Corporations	2,979,987.40	397,527.61	521,198.09	4.949.840,04
6	Ritel / Retail	407,898.62	9,513.07	33,725.92	318.566,50
7	Kredit Beragun Rumah Tinggal / Residential Property Collateralized Loans	212,060.31	19,676.94	25,495.57	256.550,35
8	Kredit Pegawai / Pensiunan / Employee/Retirement Loans	-	-	-	-
9	Kredit Beragun Properti Komersial / Commercial Property Collateralized Loans	291,650.25	32,156.95	68,974.23	631.980,56
10	Lainnya / Other	128,673.82	12,316.86	65,072.36	219.509,79
	Total	**4,020,270.44**	**471,191.44**	**714,466.17**	**6.376.518,67**

Table 2.2.a

(dalam jutaan rupiah)

No.	Kategori Portofolio / Portfolio Category	Posisi Tanggal Laporan / Report Date Position in — Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak / Net Claims by Remaining Contract Time					
		<= 1 tahun / 1 year	> 1 th sd 3 th / 1 - 3 years	> 3 th sd 5 th / 3 - 5 years	> 5 th / 5 years	Non Kontraktual / non-contractual	Total
1	Tagihan Kepada Pemerintah / Claims against Government	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik / Claims against Public Sector Entities	-	-	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional / Claims against Multilateral Development Banks and International Institutions	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank / Claims against Banks	0.00	-	-	-	-	0.00
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal / Collateralized Housing Loans	-	908.59	28,781.61	191,160.13	-	220,850.34
6	Kredit Beragun Properti Komersial / Collateralized Commercial Property Loans	177,384.00	5,783.45	31,574.42	82,907.06	-	297,648.93
7	Kredit Pegawai/Pensiunan / Loans to Employees/ Pensioners	-	-	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel / Claims agaist MSMEs and Retail Portfolio	183,579.97	161,814.13	37,128.14	20,228.15	-	402,750.39
9	Tagihan kepada Korporasi / Claims against Corporations	2,782,800.90	327,908.77	861,815.61	534,482.67	-	4,507,007.95
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo / Mature Claims	146,879.53	10,387.04	44,839.14	60,769.15	-	262,874.86
11	Aset Lainnya / Other Assets	-	-	-	-	-	-
12	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada) / Exposure in Sharia Business Unit (if available)	-	-	-	-	-	-
	Total	**3,290,644.40**	**506,801.99**	**1,004,138.93**	**889,547.16**	**-**	**5,691,132.48**

(dalam jutaan rupiah)

No.	Kategori Portofolio / Portfolio Category	Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya / Previous Year Report Date Position — Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak / Net Claims by Remaining Contract Time					
		<= 1 tahun / 1 year	> 1 th sd 3 th / 1 - 3 years	> 3 th sd 5 th / 3 - 5 years	> 5 th / 5 years	Non Kontraktual / non-contractual	Total
1	Pemerintah / Government	-	-	-	-	-	-
2	Lembaga Pembangunan Multilateral / xxx	-	-	-	-	-	-
3	Bank / Bank	0.04	-	-	-	-	0.04
4	Entitas Sektor Publik / Public Sector Entities	-	-	-	-	-	-
5	Korporasi / Corporations	2,753,568.03	111,171.84	463,891.05	570,082.17	-	3,898,713.10
6	Ritel / Retail	194,736.20	149,134.53	64,066.91	43,199.98	-	451,137.62
7	Kredit Beragun Rumah Tinggal / Residential Property Collateralized Loans	-	2,860.93	22,739.87	231,632.01	-	257,232.82
8	Kredit Pegawai / Pensiunan / Employee/ Retirement Loans	-	-	-	-	-	-
9	Kredit Beragun Properti Komersial / Commercial Property Collateralized Loans	153,334.17	9,893.45	66,072.00	163,481.81	-	392,781.44
10	Lainnya / Other	127,327.97	12,316.88	38,775.22	27,642.97	-	206,063.04
	Total	**3,228,966.41**	**285,377.65**	**655,545.06**	**1,036,038.95**	**-**	**5,205,928.05**

Table 2.3.a

No.	Sektor Ekonomi Economy Sector	Tagihan Kepada Pemerintah Receivables from Government	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik Receivables from Public Sector Entities	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Receivables from Multilateral Development Banks and International Institutions	Tagihan Kepada Bank Receivables from Banks	Kredit Beragun Rumah Tinggal Residential Property Collateralized Loans	
	Posisi Tanggal Laporan / **As at date of reporting**				15	37	38
1	Pertanian, perburuan dan Kehutanan / Agriculture, hunting and forestry				-	-	-
2	Perikanan / Fishery				-	-	-
3	Pertambangan dan Penggalian / Mining and excavation				-	-	-
4	Industri pengolahan / Processing Industry				-	-	-
5	Listrik, Gas dan Air / Power, Gas and Water				-	-	-
6	Konstruksi / Construction				-	-	-
7	Perdagangan besar dan eceran / Wholesale and retail trading				-	-	-
8	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum / Provision of accomodation and foods & beverages				-	-	-
9	Transportasi, pergudangan dan komunikasi / Transportation, warehousing and communications				-	-	-
10	Perantara keuangan / FInancial agency				0.00	-	-
11	Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan / Real estate, leasing and corporate services				-	-	-
12	Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib / Government administration, land business and mandatory social service				-	-	-
13	Jasa pendidikan / Educational services				-	-	-
14	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial / Health and social services				-	-	-
15	Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya / Societal, sociocultural, entertainment and other individual services				-	-	-
16	Jasa perorangan yang melayani rumah tangga / Individual household-related services				-	-	-
17	Badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya / International and other extrainternational agencies				-	-	-
18	Kegiatan yang belum jelas batasannya / Non-defined activities				-	-	-
19	Bukan Lapangan Usaha / Non-business				-	203,350.00	17,500.34
20	Lainnya / Others				-	-	-
	Total	-	-	-	**0.00**	**203,350.00**	**17,500.34**

(dalam jutaan rupiah/ in millions Rp)

Kredit Beragun Properti Komersial Commercial Property Collateralized Loans	**Kredit Pegawai/ Pensiunan** Employee/ Retirement Loans	**Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel** Receivables from Microbusiness, Small Business, and Retail Portfolio	**Tagihan kepada Korporasi** Receivables from Corporations	**Tagihan yang Telah Jatuh Tempo** Due Receivables		**Aset Lainnya** Other Assets	**Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)** Exposure in Sharia Business Unit (if any)
42		36	35	60	62		
-	-	2.16	14,627.03	-	162.80	-	-
-	-	103.77	3,760.81	-	-	-	-
-	-	-	11,272.55	-	-	-	-
-	-	5,471.22	1,470,257.27	-	59,540.23	-	-
-	-	-	26,704.34	-	-	-	-
159,067.20	-	23.34	89,319.26	-	20,539.33	-	-
-	-	15,138.11	1,722,474.71	-	111,389.98	-	-
-	-	1,435.64	190,403.83	-	2,932.43	-	-
-	-	1,247.90	59,888.94	-	6,464.20	-	-
-	-	108.10	731,215.46	-	-	-	-
138,581.73	-	2,051.78	70,698.33	-	9,396.68	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	7,168.06	-	-	-	-
-	-	589.39	67,219.12	-	20.25	-	-
-	-	3,259.63	36,304.87	-	15,818.93	-	-
-	-	-	473.74	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	373,319.37	5,219.65	20,911.49	15,698.53	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
297,648.93	**-**	**402,750.39**	**4,507,007.95**	**20,911.49**	**241,963.37**	**-**	**-**

Table 2.3.a

No.	Sektor Ekonomi / Economic Sector	Tagihan Kepada Pemerintah / Receivables from Government	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik / Receivables from Public Sector Entities	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional / Receivables from Multilateral Development Banks and International Institutions	Tagihan Kepada Bank / Receivables from Banks	Kredit Beragun Rumah Tinggal / Residential Property Collateralized Loans	
	Posisi Tanggal Laporan / As at date of reporting				15	37	38
1	Pertanian, perburuan dan Kehutanan / Agriculture, hunting and forestry	-	-	-	-	-	-
2	Perikanan / Fishery	-	-	-	-	-	-
3	Pertambangan dan Penggalian / Mining and excavation	-	-	-	-	-	-
4	Industri pengolahan / Processing Industry	-	-	-	-	-	-
5	Listrik, Gas dan Air / Power, Gas and Water	-	-	-	-	-	-
6	Konstruksi / Construction	-	-	-	-	-	-
7	Perdagangan besar dan eceran / Wholesale and retail trading	-	-	-	-	-	-
8	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum / Provision of accomodation and foods & beverages	-	-	-	-	-	-
9	Transportasi, pergudangan dan komunikasi / Transportation, warehousing and communications	-	-	-	-	-	-
10	Perantara keuangan / FInancial agency	-	-	-	0.04	-	-
11	Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan / Real estate, leasing and corporate services	-	-	-	-	-	-
12	Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib / Government administration, land business and mandatory social service	-	-	-	-	-	-
13	Jasa pendidikan / Educational services	-	-	-	-	-	-
14	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial / Health and social services	-	-	-	-	-	-
15	Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya / Societal, sociocultural, entertainment and other individual services	-	-	-	-	-	-
16	Jasa perorangan yang melayani rumah tangga / Individual household-related services	-	-	-	-	-	-
17	Badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya / International and other extrainternational agencies	-	-	-	-	-	-
18	Kegiatan yang belum jelas batasannya / Non-defined activities	-	-	-	-	-	-
19	Bukan Lapangan Usaha / Non-business	-	-	-	-	227,113.97	30,110.65
20	Lainnya / Others	-	-	-	-	8.20	-
	Total	-	-	-	0.04	227,122.17	30,110.65

(dalam jutaan rupiah/ in millions Rp)

Kredit Beragun Properti Komersial Commercial Property Collateralized Loans	**Kredit Pegawai/ Pensiunan** Employee/ Retirement Loans	**Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan** Portofolio Ritel Receivables from Microbusiness, Small Business, and Retail Portfolio	**Tagihan kepada Korporasi** Receivables from Corporations	**Tagihan yang Telah Jatuh Tempo** Due Receivables	**Aset Lainnya** Other Assets	**Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada) Exposure in Sharia Business Unit (if any)**
42		36	35	60	62	
-	-	57.67	21,275.35	-	155.17	
-	-	44.61	12,153.75	-	-	
-	-	-	3,856.25	-	-	
-	-	12,328.44	1,413,895.05	-	54,387.44	
-	-	-	26,062.58	-	-	
264,284.94	-	41.67	75,726.82	-	14,444.33	
-	-	27,095.92	1,822,732.28	-	89,862.53	
-	-	4,256.57	180,017.09	-	4,111.35	
-	-	1,812.02	79,849.80	-	7,026.59	
-	-	531.72	6,472.68	-	-	
128,496.50	-	4,034.82	99,088.99	-	9,110.18	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	10,283.97	-	-	
-	-	1,113.76	60,061.00	-	18.76	
-	-	4,549.79	53,733.42	-	993.43	
-	-	-	445.03	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	395,270.62	33,059.04	8,387.82	17,565.45	
-	-	-	-	-	-	
392,781.44	-	451,137.62	3,898,713.10	8,387.82	197,675.22	

Table 2.4.a

No.	Keterangan Description	Posisi Tanggal Laporan As at date of reporting			
		Wilayah Region			
		Jawa Barat West Java	Jakarta	Lainnya Others	Total
1	Tagihan / Receivables	4,434,616.63	727,872.34	681,762.78	5,844,251.75
2	Tagihan yang mengalami penurunan nilai (*impaired*) / Impaired Receivables	284,864.92	44,194.09	127,286.20	456,345.21
	a. Belum jatuh tempo / Not Due	175,280.13	35,694.10	76,376.49	287,350.73
	b. Telah jatuh tempo / Due	109,584.79	8,499.99	50,909.71	168,994.49
3	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Individual / Individual Impairment Losses Allowance (ILA)	47,120.28	3,823.48	35,739.03	86,682.79
4	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Kolektif / Collective Impairment Losses Allowance (ILA)	57,144.57	4,225.59	5,066.33	66,436.48
5	Tagihan yang dihapus buku / Receivables Written Off	-	-	-	-

Table 2.5.a

No.	Sektor Ekonomi Economic Sector
	Posisi Tanggal Laporan / As at date of reporting
1	Pertanian, perburuan dan Kehutanan / Agriculture, hunting and forestry
2	Perikanan / Fishery
3	Pertambangan dan Penggalian / Mining and excavation
4	Industri pengolahan / Processing industry
5	Listrik, Gas dan Air / Power, gas and water
6	Konstruksi / Construction
7	Perdagangan besar dan eceran / Wholesale and retail trading
8	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum / Provision of accomodation and foods & beverages
9	Transportasi, pergudangan dan komunikasi / Transportation, warehousing and communications
10	Perantara keuangan / FInancial agency
11	Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan / Real estate, leasing and corporate services
12	Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib / Government administration, land business and mandatory social service
13	Jasa pendidikan / Educational services
14	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial / Health and social services
15	Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya / Societal, sociocultural, entertainment and other individual services
16	Jasa perorangan yang melayani rumah tangga / Individual household-related services
17	Badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya / International and other extrainternational agencies
18	Kegiatan yang belum jelas batasannya / Non-defined activities
19	Bukan Lapangan Usaha / Non-business
20	Lainnya / Others
	Total

Table 2.4.a

No.	Keterangan Description	Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya As at date of previous year reporting			
		Wilayah Region			
		Jawa Barat West Java	Jakarta	Lainnya Others	Total
1	Tagihan / Receivables	4,105,463.56	475,074.33	733,090.94	5,313,628.82
2	Tagihan yang mengalami penurunan nilai (impaired) / Impaired Receivables	211,704.29	39,457.56	96,827.21	347,989.05
	a. Belum jatuh tempo / Not Due	133,651.48	31,457.56	40,516.41	205,625.45
	b. Telah jatuh tempo / Due	78,052.81	8,000.00	56,310.80	142,363.61
3	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Individual / Individual Impairment Losses Allowance (ILA)	32,691.33	1,013.37	10,344.98	44,049.68
4	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Kolektif / Collective Impairment Losses Allowance (ILA)	52,501.79	2,869.51	8,279.79	63,651.08
5	Tagihan yang dihapus buku / Receivables Written Off	-	-	-	-

(dalam jutaan rupiah / in millions Rp)

Tagihan Receivables	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai (impaired) Impaired Receivables		Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Individual Individual Impairment Losses Allowance (ILA)	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Kolektif Collective Impairment Losses Allowance (ILA)	Tagihan yang dihapus buku Receivables Written Off
	Belum Jatuh Tempo Not Due	Telah jatuh tempo Due			
14,947.09	-	-	-	155.11	-
3,880.37	-	-	-	15.80	-
11,316.68	-	-	-	44.14	-
1,591,483.06	92,545.88	72,510.53	46,998.24	9,216.10	-
26,808.89	-	-	-	104.55	-
282,577.64	17,024.10	23,880.76	11,594.56	2,033.95	-
1,884,244.76	104,678.47	67,636.67	16,772.51	18,469.44	-
196,624.61	21,515.22	-	204.13	1,648.57	-
76,590.61	9,591.39	4,500.00	8,235.38	754.20	-
734,177.35	-	-	-	2,853.79	-
224,880.89	12,133.34	390.99	913.65	3,238.72	-
-	-	-	-	-	-
7,196.13	-	-	-	28.06	-
68,106.41	-	-	-	277.65	-
56,448.09	11,238.50	-	590.69	473.97	-
475.60	-	-	-	1.85	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
664,493.58	18,623.84	75.54	1,373.63	27,120.57	-
-	-	-	-	-	-
5,844,251.75	287,350.73	168,994.49	86,682.79	66,436.48	-

Table 2.5.a

No.	Sektor Ekonomi Economic Sector
	Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya / As at date of previous year reporting
1	Pertanian, perburuan dan Kehutanan / Agriculture, hunting and forestry
2	Perikanan / Fishery
3	Pertambangan dan Penggalian / Mining and excavation
4	Industri pengolahan / Processing industry
5	Listrik, Gas dan Air / Power, gas and water
6	Konstruksi / Construction
7	Perdagangan besar dan eceran / Wholesale and retail trading
8	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum / Provision of accomodation and foods & beverages
9	Transportasi, pergudangan dan komunikasi / Transportation, warehousing and communications
10	Perantara keuangan / FInancial agency
11	Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan / Real estate, leasing and corporate services
12	Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib / Government administration, land business and mandatory social service
13	Jasa pendidikan / Educational services
14	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial / Health and social services
15	Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya / Societal, sociocultural, entertainment and other individual services
16	Jasa perorangan yang melayani rumah tangga / Individual household-related services
17	Badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya / International and other extrainternational agencies
18	Kegiatan yang belum jelas batasannya / Non-defined activities
19	Bukan Lapangan Usaha / Non-business
20	Lainnya / Others
	Total

(dalam jutaan rupiah / in millions Rp)

Tagihan Receivables	**Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai (impaired)** Impaired Receivables		**Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Individual** Individual Impairment Losses Allowance (ILA)	**Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Kolektif** Collective Impairment Losses Allowance (ILA)	**Tagihan yang dihapus buku** Receivables Written Off
	Belum Jatuh Tempo Not Due	**Telah jatuh tempo** Due			
21,700.71	-	-	-	212.51	-
12,254.85	-	-	-	56.49	-
3,877.16	-	-	-	20.90	-
1,518,914.72	61,168.93	62,894.72	26,537.40	11,766.39	-
26,171.05	-	-	-	108.46	-
363,333.68	38,923.25	15,998.29	5,822.97	3,012.96	-
1,972,122.36	53,129.32	56,970.69	9,917.60	22,514.03	-
190,295.51	34,654.97	1,500.00	393.25	1,517.25	-
90,131.60	1,867.83	4,999.91	409.57	1,033.61	-
7,030.40	-	-	-	25.96	-
244,913.72	9,554.81	-	548.01	3,635.21	-
-	-	-	-	-	-
10,331.42	-	-	-	47.46	-
61,530.02	-	-	-	336.51	-
60,756.85	338.54	-	38.86	1,441.36	-
446.86	-	-	-	1.83	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
729,809.65	5,987.80	-	382.03	17,920.08	-
8.27	-	-	-	0.07	-
5,313,628.82	205,625.45	142,363.61	44,049.68	63,651.08	-

Table 3.1.a

		Posisi Tanggal Laporan / As at date of reporting					
		Tagihan Bersih / Net Receivables					
	Kategori Portofolio Portfolio Category	Lembaga Pemeringkat Rating Agency	Peringkat Jangka panjang Long Term Rating				
		Standard and Poor's	AAA	AA+ s.d AA- AA+ to AA-	A+ s.d A- A+ to A-	BBB+ s.d BBB- BBB+ to BBB-	BB+ s.d BB- BB+ to BB-
		Fitch Rating	AAA	AA+ s.d AA- AA+ to AA-	A+ s.d A- A+ to A-	BBB+ s.d BBB- BBB+ to BBB-	BB+ s.d BB- BB+ to BB-
		Moody's	Aaa	Aa1 s.d Aa3 Aa1 to Aa3	A1 s.d A3 A1 to A3	Baa1 s.d Baa3 Baa1 to Baa3	Ba1 s.d Ba3 Ba1 to Ba3
		PT. Fitch Ratings Indonesia	AAA (idn)	AA+(idn) s.d AA-(idn) AA+(idn) to AA-(idn)	A+(idn) s.d. A-(idn) A+(idn) to. A-(idn)	BBB+(idn) s.d BBB-(idn) BBB+(idn) to BBB-(idn)	BB+(idn) s.d BB-(idn) BB+(idn) to BB-(idn)
		PT ICRA Indonesia	[Idr]AAA	[Idr]AA+ s.d [Idr]AA- [Idr]AA+ to [Idr]AA-	[Idr]A+ s.d [Idr]A- [Idr]A+ to [Idr]A-	[Idr]BBB+ s.d [Idr] BBB- [Idr]BBB+ to [Idr]BBB-	[Idr]BB+ s.d [Idr]BB- [Idr]BB+ to [Idr]BB-
		PT Pemeringkat Efek Indonesia	idAAA	idAA+ s.d idAA- idAA+ to idAA-	idA+ s.d id A- idA+ to id A-	id BBB+ s.d id BBB- id BBB+ to id BBB-	id BB+ s.d id BB- id BB+ to id BB-
1	Tagihan Kepada Pemerintah / Receivables from Government		-	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik / Receivables from Public Sector Entities		-	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional / Receivables from Multilateral Development Banks and International Institutions		-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank / Receivables from Banks		-	-	-	-	-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal / Residential Property Collateralized Loans						
6	Kredit Beragun Properti Komersial / Commercial Property Collateralized Loans						
7	Kredit Pegawai/Pensiunan / Employee/Retirement Loans						
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel / Receivables from Microbusiness, Small Business, and Retail Portfolio						
9	Tagihan kepada Korporasi / Receivables from Corporations		-	-	-	-	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo / Due Receivables						
11	Aset Lainnya / Other Assets						
12	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada) / Exposure in Sharia Business Unit (if any)						
	TOTAL		-	-	-	-	-

(dalam jutaan rupiah/ in millions Rp)

Posisi Tanggal Laporan / As at date of reporting							
Tagihan Bersih / Net Receivables							
Peringkat Jangka Pendek Short Term Rating							
B+ s.d B- B+ to B-	**Kurang dari B-** **Lower than B-**	**A-1**	**A-2**	**A-3**	**Kurang dari A-3** Lower than A-3	**Tanpa Peringkat** Not Rated	**Total**
B+ s.d B- B+ to B-	**Kurang dari B-** Lower than B-	**F1+ s.d F1** F1+ to F1	**F2**	**F3**	**Kurang dari F3** Lower than F3		
B1 s.d B3 B1 to B3	**Kurang dari B3** Lower than B3	**P-1**	**P-2**	**P-3**	**Kurang dari P-3** Lower than P-3		
B+(idn) s.d B-(idn) B+(idn) to B-(idn)	**Kurang dari B-(idn)** Lower than B-(idn)	**F1+(idn) s.d F1(idn)** F1+(idn) to F1(idn)	**F2(idn)**	**F3(idn)**	**Kurang dari F3(idn)** Lower than F3(idn)		
[Idr]B+ s.d [Idr]B- [Idr]B+ to [Idr]B-	**Kurang dari [Idr]B-** Lower than [Idr]B-	**[Idr]A1+ s.d [Idr]A1** [Idr]A1+ to [Idr] A1	**[Idr]A2+ s.d [Idr]A2** [Idr]A2+ to [Idr] A2	**[Idr]A3+ s.d [Idr] A3** [Idr]A3+ to [Idr] A3	**Kurang dari [Idr]A3** Lower than [Idr]A3		
id B+ s.d id B- id B+ to id B-	**Kurang dari idB-** Lower than idB-	**idA1**	**idA2**	**idA3 s.d id A4** idA3 to id A4	**Kurang dari idA4** Lower than idA4		
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	0.00	0.00
-	-	-	-	-	-	4,507,007.95	4,507,007.95
-	-	-	-	-	-	4,507,007.96	4,507,007.96

Table 3.1.a

Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya / As at date of previous year reporting

		Lembaga Pemeringkat Rating Agency	**Peringkat Jangka panjang** Long Term Rating				
		Standard and Poor's	**AAA**	**AA+ s.d AA-** AA+ to AA-	**A+ s.d A-** A+ to A-	**BBB+ s.d BBB-** BBB+ to BBB-	**BB+ s.d BB-** BB+ to BB-
		Fitch Rating	**AAA**	**AA+ s.d AA-** AA+ to AA-	**A+ s.d A-** A+ to A-	**BBB+ s.d BBB-** BBB+ to BBB-	**BB+ s.d BB-** BB+ to BB-
		Moody's	**Aaa**	**Aa1 s.d Aa3** Aa1 to Aa3	**A1 s.d A3** A1 to A3	**Baa1 s.d Baa3** Baa1 to Baa3	**Ba1 s.d Ba3** Ba1 to Ba3
	Kategori Portofolio Portfolio Category	**PT. Fitch Ratings Indonesia**	**AAA (idn)**	**AA+(idn) s.d AA-(idn)** AA+(idn) to AA-(idn)	**A+(idn) s.d. A-(idn)** A+(idn) to. A-(idn)	**BBB+(idn) s.d BBB-(idn)** BBB+(idn) to BBB-(idn)	**BB+(idn) s.d BB-(idn)** BB+(idn) to BB-(idn)
		PT ICRA Indonesia	**[Idr]AAA**	**[Idr]AA+ s.d [Idr]AA- [Idr]AA+ to [Idr]AA-**	**[Idr]A+ s.d [Idr]A-** [Idr]A+ to [Idr]A-	**[Idr]BBB+ s.d [Idr] BBB-** [Idr]BBB+ to [Idr]BBB-	**[Idr]BB+ s.d [Idr]BB-** [Idr]BB+ to [Idr]BB-
		PT Pemeringkat Efek Indonesia	**idAAA**	**idAA+ s.d idAA-** idAA+ to idAA-	**idA+ s.d id A-** idA+ to id A-	**id BBB+ s.d id BBB-** id BBB+ to id BBB-	**id BB+ s.d id BB-** id BB+ to id BB-
1	Tagihan Kepada Pemerintah / Receivables from Government		-	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik / Receivables from Public Sector Entities		-	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional / Receivables from Multilateral Development Banks and International Institutions		-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank / Receivables from Banks		-	-	-	-	-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal / Residential Property Collateralized Loans						
6	Kredit Beragun Properti Komersial / Commercial Property Collateralized Loans						
7	Kredit Pegawai/Pensiunan / Employee/Retirement Loans						
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel / Receivables from Microbusiness, Small Business, and Retail Portfolio						
9	Tagihan kepada Korporasi / Receivables from Corporations		-	-	-	-	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo / Due Receivables						
11	Aset Lainnya / Other Assets						
12	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada) / Exposure in Sharia Business Unit (if any)						
	TOTAL		-	-	-	-	-

Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya / As at date of previous year reporting							
Tagihan Bersih / Net Receivables							
Peringkat Jangka Pendek Short Term Rating							
B+ s.d B- B+ to B-	**Kurang dari B-** **Lower than B-**	**A-1**	**A-2**	**A-3**	**Kurang dari A-3** Lower than A-3	**Tanpa Peringkat** Not Rated	**Total**
B+ s.d B- B+ to B-	**Kurang dari B-** Lower than B-	**F1+ s.d F1** F1+ to F1	**F2**	**F3**	**Kurang dari F3** Lower than F3		
B1 s.d B3 B1 to B3	**Kurang dari B3** Lower than B3	**P-1**	**P-2**	**P-3**	**Kurang dari P-3** Lower than P-3		
B+(idn) s.d B-(idn) B+(idn) to B-(idn)	**Kurang dari B-(idn)** Lower than B-(idn)	**F1+(idn) s.d F1(idn)** F1+(idn) to F1(idn)	**F2(idn)**	**F3(idn)**	**Kurang dari F3(idn)** Lower than F3(idn)		
[Idr]B+ s.d [Idr]B- [Idr]B+ to [Idr]B-	**Kurang dari [Idr]B-** Lower than [Idr]B-	**[Idr]A1+ s.d [Idr]A1** [Idr]A1+ to [Idr] A1	**[Idr]A2+ s.d [Idr]A2** [Idr]A2+ to [Idr] A2	**[Idr]A3+ s.d [Idr] A3** [Idr]A3+ to [Idr] A3	**Kurang dari [Idr]A3** Lower than [Idr]A3		
id B+ s.d id B- id B+ to id B-	**Kurang dari idB-** Lower than idB-	**idA1**	**idA2**	**idA3 s.d id A4** idA3 to id A4	**Kurang dari idA4** Lower than idA4		
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	0.04	0.04
-	-	-	-	-	-	3,898,713.10	3,898,713.10
-	-	-	-	-	-	3,898,713.14	3,898,713.14

Table 4.1.a

No.	Kategori Portofolio / Portfolio Category	Posisi Tanggal Laporan / As at date of reporting										ATMR / RWA	Beban Modal / Capital Expenses
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit / Net Receivables Accounting Credit Risk Mitigation Impact											
		0%	20%	35%	40%	45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya / Others		
	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
A	Eksposur Neraca / Balance Sheet Exposure												
1	Tagihan Kepada Pemerintah / Receivables from Government	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik / Receivables from Public Sector Entities	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan / Multilateral dan Lembaga Internasional Receivables from Multilateral Development Banks and International Institutions	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Tagihan Kepada Bank / Receivables from Banks	-	47,336.00	-	-	-	-	-	-	-	-	47,336.00	
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal / Residential Property Collateralized Loans	-	-	71,617.00	7,053.00	-	-	-	-	-	-	78,670.00	
6	Kredit Beragun Properti Komersial / Commercial Property Collateralized Loans	-	-	-	-	-	-	-	300,104.00	-	-	300,104.00	
7	Kredit Pegawai/ Pensiunan / Employee/ Retirement Loans	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel / Receivables from Microbusiness, Small Business, and Retail Portfolio	-	-	-	-	-	-	314,011.00	-	-	-	314,011.00	
9	Tagihan kepada Korporasi / Receivables from Corporations	-	-	-	-	-	-	-	4,451,808.00	-	-	4,451,808.00	
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo / Due Receivables	-	-	-	-	-	-	-	20,912.00	362,946.00	-	383,858.00	
11	Aset Lainnya / Other Assets	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada) / Exposure in Sharia Business Unit (if any)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Total Eksposur Neraca / Total Balance Sheet Exposure	-	47,336.00	71,617.00	7,053.00	-	-	314,011.00	4,772,824.00	362,946.00	-	5,575,787.00	

(dalam jutaan rupiah/ in millions Rp)

Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya / As at date of previous year reporting												
Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit Net Receivables Accounting Credit Risk Mitigation Impact											ATMR RWA	Beban Modal Capital Expenses
0%	20%	35%	40%	45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya Others		
-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23	-24	-25	-26
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	72,406.00	-	-	-	-	-	-	-	-	72,406.00	
-	-	80,158.00	12,105.00	-	-	-	-	-	-	92,263.00	
-	-	-	-	-	-	-	396,708.00	-	-	396,708.00	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	351,956.00	-	-	-	351,956.00	
-	-	-	-	-	-	-	3,810,043.00	-	-	3,810,043.00	
-	-	-	-	-	-	-	8,388.00	296,513.00	-	304,901.00	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	72,406.00	80,158.00	12,105.00	-	-	351,956.00	4,215,139.00	296,513.00	-	5,028,277.00	

Table 4.1.a

No.	Kategori Portofolio / Portfolio Category	Posisi Tanggal Laporan / As at date of reporting										ATMR / RWA	Beban Modal / Capital Expenses
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit / Net Receivables Accounting Credit Risk Mitigation Impact											
		0%	20%	35%	40%	45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya / Others		
	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
B	Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pd Transaksi Rekening Administratif / Commitment Liability Exposure/Contingencies on Administrative Account Transactions												
1	Tagihan Kepada Pemerintah / Receivables from Government	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik / Receivables from Public Sector Entities	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional / Receivables from Multilateral Development Banks and International Institutions	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
4	Tagihan Kepada Bank / Receivables from Banks	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal / Residential Property Collateralized Loans	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
6	Kredit Beragun Properti Komersial / Commercial Property Collateralized Loans	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
7	Kredit Pegawai/ Pensiunan / Employee/ Retirement Loans	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel / Receivables from Microbusiness, Small Business, and Retail Portfolio	-	522.00	-	-	-	3,823.00	2,237.00	-	-	-	6,582.00	
9	Tagihan kepada Korporasi / Receivables from Corporations	-	1,716.00	-	-	-	24,434.00	-	18,054.00	-	-	44,204.00	
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo / Due Receivables	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
11	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada) / Exposure in Sharia Business Unit (if any)	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
	Total Eksposur TRA / Total Administrative Account Transactions Exposure	-	2,238.00	-	-	-	28,257.00	2,237.00	18,054.00	-	-	50,786.00	

(dalam jutaan rupiah/ in millions Rp)

Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya / As at date of previous year reporting												
Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit Net Receivables Accounting Credit Risk Mitigation Impact											ATMR RWA	Beban Modal Capital Expenses
0%	20%	35%	40%	45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya Others			
-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23	-24		-25	-26
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
-	3,896	-	-	-	4,398.00	2,302.00	-	-	-		10,596.00	
-	5,375.00	-	-	-	21,232.00	-	16,692.00	-	-		43,299.00	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
-	9,271.00	-	-	-	25,630.00	2,302.00	16,692.00	-	-		53,895.00	

Table 4.1.a

No.	Kategori Portofolio Portfolio Category	Posisi Tanggal Laporan / As at date of reporting Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit Net Receivables Accounting Credit Risk Mitigation Impact										ATMR RWA	Beban Modal Capital Expenses
		0%	20%	35%	40%	45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya Others		
	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
C	Eksposur akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk) / Counterparty Credit Risk Exposure												
1	Tagihan Kepada Pemerintah / Receivables from Government	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik / Receivables from Public Sector Entities	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional / Receivables from Multilateral Development Banks and International Institutions	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Tagihan Kepada Bank / Receivables from Banks	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel / Receivables from Microbusiness, Small Business, and Retail Portfolio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Tagihan kepada Korporasi / Receivables from Corporations	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada) / Exposure in Sharia Business Unit (if any)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Total Eksposur Counterparty Credit Risk / Total Counterparty Credit Risk Exposure	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

(dalam jutaan rupiah/ in millions Rp)

Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya / As at date of previous year reporting												
Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit Net Receivables Accounting Credit Risk Mitigation Impact											ATMR RWA	Beban Modal Capital Expenses
0%	20%	35%	40%	45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya Others		
-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23	-24	-25	-26
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Table 4.2.a

No.	Kategori Portofolio Portfolio Category	Posisi Tanggal Laporan As at date of reporting					
		Tagihan Bersih Net Receivables	Bagian Yang Dijamin Dengan Portion Secured by				Bagian Yang Tidak Dijamin Part not Guaranteed
			Agunan Collateral	Garansi Guarantee	Asuransi Kredit Loan Insurance	Lainnya Others	
	-2	-3	-4	-5	-6	-7	(8) = (3)-[(4)+(5)+(6)+(7)]
A	**Eksposur Neraca / Balance Sheet Exposure**						
1	Tagihan Kepada Pemerintah / Receivables from Government	1,405,541.00	-	-	-		1,405,541.00
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik / Receivables from Public Sector Entities	-	-	-	-		-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan / Receivables from Multilateral Development Banks and International Institutions	-	-	-	-		-
4	Tagihan Kepada Bank / Residential Property Collateralized Loans	236,681.00	-	-	-		236,681.00
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal / Commercial Property Collateralized Loans	222,252.00	-	-	-		222,252.00
6	Kredit Beragun Properti Komersial / Collateralized Commercial Property Loans	300,104.00	-	-	-		300,104.00
7	Kredit Pegawai/Pensiunan / Employee/Retirement Loans	-	-	-	-		-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel / Receivables from Microbusiness, Small Business, and Retail Portfolio	420,237.95	1,557.00	-	-		418,680.95
9	Tagihan kepada Korporasi / Receivables from Corporations	4,540,345.00	88,537.00	-	-		4,451,808.00
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo / Due Receivables	262,876.00	-	-	-		262,876.00
11	Aset Lainnya/ Other Assets	-	-	-	-		-
12	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada) / Exposure in Sharia Business Unit (if any)	-	-	-	-	-	-
	Total Eksposur Neraca / Total Balance Sheet Exposure	**7,388,036.95**	**90,094.00**	**-**	**-**	**-**	**7,297,942.95**
B	**Eksposur Rekening Adminsitratif (LC & BG) / Administrative Account Exposure**						
1	Tagihan Kepada Pemerintah / Receivables from Government	-	-	-			-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik / Receivables from Public Sector Entities	-	-	-			-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional / Receivables from Multilateral Development Banks and International Institutions	-	-	-			-
4	Tagihan Kepada Bank / Receivables from Banks	-	-	-			-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal / Residential Property Collateralized Loans	-	-	-			-
6	Kredit Beragun Properti Komersial / Commercial Property Collateralized Loans	-	-	-			-
7	Kredit Pegawai/Pensiunan / Employee/Retirement Loans	-	-	-			-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel / Receivables from Microbusiness, Small Business, and Retail Portfolio	4,345.00	1,362.00	-			2,983.00
9	Tagihan kepada Korporasi / Claims against Corporations	26,150.00	8,096.00	-			18,054.00
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo / Receivables from Corporations	-	-	-			-
11	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada) / Exposure in Sharia Business Unit (if any)	-	-	-		-	-
	Total Eksposur Rekening Administratif / Total Administrative Account Exposure	**30,495.00**	**9,458.00**	**-**	**-**	**-**	**21,037.00**
C	**Eksposur Counterparty Credit Risk**						
1	Tagihan Kepada Pemerintah / Receivables from Government	-	-	-	-		-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik / Receivables from Public Sector Entities	-	-	-	-		-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional / Receivables from Multilateral Development Banks and International Institutions	-	-	-	-		-
4	Tagihan Kepada Bank / Receivables from Banks	-	-	-	-		-
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel / Receivables from Microbusiness, Small Business, and Retail Portfolio	-	-	-	-		-
6	Tagihan kepada Korporasi / Claims against Corporations	-	-	-	-		-
7	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada) / Exposure in Sharia Business Unit (if any)	-	-	-	-	-	-
	Total Eksposure Counterparty Credit Risk	-	-	-	-	-	-
Total (A+B+C)		**7,418,531.95**	**9,552.00**	**-**	**-**	**-**	**7,318,979.95**

Table 4.2.a

No.	Kategori Portofolio Portfolio Category	Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya As at date of previous year reporting					
		Tagihan Bersih Net Receivables	Bagian Yang Dijamin Dengan Portion Secured by				Bagian Yang Tidak Dijamin Part not Guaranteed
			Agunan Collateral	Garansi Guarantee	Asuransi Kredit Loan Insurance	Lainnya Others	
	-2	-3	-4	-5	-6	-7	(8) = (3)-[(4)+(5)+(6)+(7)]
A	**Eksposur Neraca / Balance Sheet Exposure**						
1	Tagihan Kepada Pemerintah / Receivables from Government	1,866,697.00	-	-	-		1,866,697.00
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik / Receivables from Public Sector Entities	-	-	-	-		-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional / Receivables from Multilateral Development Banks and International Institutions	-	-	-	-		-
4	Tagihan Kepada Bank / Residential Property Collateralized Loans	362,030.00	-	-	-		362,030.00
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal / Commercial Property Collateralized Loans	259,285.00	-	-	-		259,285.00
6	Kredit Beragun Properti Komersial / Collateralized Commercial Property Loans	396,708.00	-	-	-		396,708.00
7	Kredit Pegawai/Pensiunan / Employee/Retirement Loans	-	-	-	-		-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel / Receivables from Microbusiness, Small Business, and Retail Portfolio	470,091.17	816.00	-	-		469,275.17
9	Tagihan kepada Korporasi / Receivables from Corporations	3,944,090.00	134,047.00	-	-		3,810,043.00
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo / Due Receivables	206,063.00	-	-	-		206,063.00
11	Aset Lainnya/ Other Assets	-	-	-	-		-
12	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada) / Exposure in Sharia Business Unit (if any)	-	-	-	-	-	-
	Total Eksposur Neraca / Total Balance Sheet Exposure	**7,504,964.17**	**134,863.00**	**-**	**-**	**-**	**7,370,101.17**
B	**Eksposur Rekening Adminsitratif (LC & BG) / Administrative Account Exposure**						
1	Tagihan Kepada Pemerintah / Receivables from Government	-	-	-	-		-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik / Receivables from Public Sector Entities	-	-	-	-		-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional / Receivables from Multilateral Development Banks and International Institutions	-	-	-	-		-
4	Tagihan Kepada Bank / Receivables from Banks	-	-	-	-		-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal / Residential Property Collateralized Loans	-	-	-	-		-
6	Kredit Beragun Properti Komersial / Commercial Property Collateralized Loans	-	-	-	-		-
7	Kredit Pegawai/Pensiunan / Employee/Retirement Loans	-	-	-	-		-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel / Receivables from Microbusiness, Small Business, and Retail Portfolio	8,294.00	5,225.00	-	-		3,069.00
9	Tagihan kepada Korporasi / Claims against Corporations	26,607.00	9,915.00	-	-		16,692.00
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo / Receivables from Corporations	-	-	-	-		-
11	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada) / Exposure in Sharia Business Unit (if any)	-	-	-	-	-	-
	Total Eksposur Rekening Administratif / Total Administrative Account Exposure	**34,901.00**	**15,140.00**	**-**	**-**	**-**	**19,761.00**
C	**Eksposur Counterparty Credit Risk**						
1	Tagihan Kepada Pemerintah / Receivables from Government	-	-	-	-		-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik / Receivables from Public Sector Entities	-	-	-	-		-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional / Receivables from Multilateral Development Banks and International Institutions	-	-	-	-		-
4	Tagihan Kepada Bank / Receivables from Banks	-	-	-	-		-
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel / Receivables from Microbusiness, Small Business, and Retail Portfolio	-	-	-	-		-
6	Tagihan kepada Korporasi / Claims against Corporations	-	-	-	-		-
7	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada) / Exposure in Sharia Business Unit (if any)	-	-	-	-	-	-
	Total Eksposure Counterparty Credit Risk	-	-	-	-	-	-
Total (A+B+C)		**7,539,865.17**	**150,003.00**	**-**	**-**	**-**	**7,389,862.17**

Table 6.1.7

TOTAL ATMR RISIKO KREDIT / CREDIT RISK WEIGHTED ASSETS	
TOTAL FAKTOR PENGURANG MODAL / TOTAL CAPITAL IMPAIRMENTS	

No.	Pendekatan yang Digunakan Approach Used	Posisi Tanggal Laporan As at date of reporting		
		Pendapatan Bruto (Rata-rata 3 tahun terakhir) Gross Revenue (Last 3 Years' Average)	Beban Modal Capital Expenses	ATMR RWA
-1	-2	-3	-4	-5
1	Pendekatan Indikator Dasar / Basic Indicator Approach	77,631	1,164,460	145,558
	Total			

(dalam jutaan rupiah / in millions Rp)

	Posisi Tanggal Laporan As at date of reporting	Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya As at date of previous year reporting
	5,717,023.00	5,189,899.00
	-	-

(dalam jutaan rupiah / in millions Rp)

	Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya As at date of previous year reporting		
	Pendapatan Bruto (Rata-rata 3 tahun terakhir) Gross Revenue (Last 3 Years' Average)	**Beban Modal** Capital Expenses	**ATMR** RWA
	-6	-7	-8
	120,914	1,813,710	226,714

Table 9.1.a

No.	Pos-pos
	-2
I	**NERACA / BALANCE SHEET**
A	Aset / Assets
1	Kas / Cash
2	Penempatan pada Bank Indonesia / Placements with Bank Indonesia
3	Penempatan pada bank lain / Placements with Other Banks
4	Surat Berharga / Securities
5	Kredit yang diberikan / Loans disbursed
6	Tagihan lainnya / Other Receivables
7	Lain- lain / Others
	Total Aset / Total Assets
B.	Kewajiban / Liabilities
1	Dana Pihak Ketiga / Third-Party Funds
2	Kewajiban pada Bank Indonesia / Liabilities to Bank Indonesia
3	Kewajiban pada bank lain / Liabilities to other banks
4	Surat Berharga yang Diterbitkan / Securities Issued
5	Pinjaman yang Diterima / Loans received
6	Kewajiban lainnya / Other Liabilities
7	Lain-lain / Others
	Total Kewajiban / Total Liabilities
	Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca / Difference between Assets and Liabilities in the Balance Sheet
II	**REKENING ADMINISTRATIF / ADMINISTRATIVE ACCOUNT**
A.	Tagihan Rekening Administratif / Administrative Account Claims
1	Komitmen / Commitments
2	Kontijensi / Contingencies
	Total Tagihan Rekening Administratif / Total Administrative Account Claims
B.	Kewajiban Rekening Administratif / Administrative Account Liabilities
1	Komitmen / Commitments
2	Kontijensi / Contingencies
	Total Kewajiban Rekening Administratif / Total Administrative Account Liabilities
	Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening Administratif / Difference Between Administrative Account Claims and Liabilities
	Selisih [(IA-IB)+(IIA-IIB)] / Difference (IA-IB)+(IIA-IIB)
	Selisih Kumulatif / Cumulative Difference

(dalam jutaan rupiah / in millions Rp)

Saldo	Posisi Tanggal Laporan / As at date of reporting				
	Jatuh Tempo / Maturity				
	< 1 bulan 1 month	> 1 bln s.d. 3 bln 1 - 3 months	> 3 bln s.d. 6 bln 3 - 6 months	> 6 bln s.d.12 bln 6 - 12 months	> 12 bulan 12 months
-3	-4	-5	-6	-7	-8
80,406	80,406	0	0	0	0
896,311	699,719	99,021	48,968	48,603	0
81,010	81,010	0	0	0	0
319,742	0	60,044	0	0	259,698
5,735,644	164,783	353,657	1,248,281	1,596,192	2,372,731
0	0	0	0	0	0
120,306	42,826	30,039	3,609	4,305	39,527
7,233,419	**1,068,744**	**542,761**	**1,300,858**	**1,649,100**	**2,671,956**
5,859,340	4,970,547	715,652	33,414	93,693	46,034
0	0	0	0	0	0
93,038	92,038	0	0	1,000	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
50,792	40,350	8,413	0	1,029	1,000
6,003,170	**5,102,935**	**724,065**	**33,414**	**95,722**	**47,034**
1,230,249	**-4,034,191**	**-181,304**	**1,267,444**	**1,553,378**	**2,624,922**
0	0	0	0	0	0
123,610	0	0	123,610	0	0
123,610	**0**	**0**	**123,610**	**0**	**0**
1,555,755	65,358	204,842	415,504	826,713	43,338
79,632	36,308	17,263	16,916	9,145	0
1,635,387	**101,666**	**222,105**	**432,420**	**835,858**	**43,338**
-1,511,777	**-101,666**	**-222,105**	**-308,810**	**-835,858**	**-43,338**

Table 9.1.a

No.	Pos-pos
	-2
I	**NERACA / BALANCE SHEET**
A	Aset / Assets
1	Kas / Cash
2	Penempatan pada Bank Indonesia / Placements with Bank Indonesia
3	Penempatan pada bank lain / Placements with Other Banks
4	Surat Berharga / Securities
5	Kredit yang diberikan / Loans disbursed
6	Tagihan lainnya / Other Receivables
7	Lain- lain / Others
	Total Aset / Total Assets
B.	Kewajiban / Liabilities
1	Dana Pihak Ketiga / Third-Party Funds
2	Kewajiban pada Bank Indonesia / Liabilities to Bank Indonesia
3	Kewajiban pada bank lain / Liabilities to other banks
4	Surat Berharga yang Diterbitkan / Securities Issued
5	Pinjaman yang Diterima / Loans received
6	Kewajiban lainnya / Other Liabilities
7	Lain-lain / Others
	Total Kewajiban / Total Liabilities
	Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca / Difference between Assets and Liabilities in the Balance Sheet
II	**REKENING ADMINISTRATIF / ADMINISTRATIVE ACCOUNT**
A.	Tagihan Rekening Administratif / Administrative Account Claims
1	Komitmen / Commitments
2	Kontijensi / Contingencies
	Total Tagihan Rekening Administratif / Total Administrative Account Claims
B.	Kewajiban Rekening Administratif / Administrative Account Liabilities
1	Komitmen / Commitments
2	Kontijensi / Contingencies
	Total Kewajiban Rekening Administratif / Total Administrative Account Liabilities
	Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening Administratif / Difference Between Administrative Account Claims and Liabilities
	Selisih [(IA-IB)+(IIA-IIB)] / Difference (IA-IB)+(IIA-IIB)
	Selisih Kumulatif / Cumulative Difference

(dalam jutaan rupiah / in millions Rp)

Saldo	Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya / As at date of previous year reporting				
	Jatuh Tempo / Maturity				
	< 1 bulan 1 month	> 1 bln s.d. 3 bln 1 - 3 months	> 3 bln s.d. 6 bln 3 - 6 months	> 6 bln s.d.12 bln 6 - 12 months	> 12 bulan 12 months
-9	-10	-11	-12	-13	-14
70,461	70,461	0	0	0	0
1,252,154	821,825	123,998	170,952	135,379	0
9,394	9,394	0	0	0	0
404,933	485	51,158	2,842	30,070	320,378
5,155,771	197,429	440,195	1,150,737	1,414,244	1,953,166
0	0	0	0	0	0
136,398					
7,029,111	**1,144,642**	**647,103**	**1,337,403**	**1,588,477**	**2,311,486**
5,679,652	4,959,565	626,811	37,706	20,665	34,905
0	0	0	0	0	0
53,358	51,958	400	0	1,000	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
51,570	40,707	8,976	0	887	1,000
5,784,580	**5,052,230**	**636,187**	**37,706**	**22,552**	**35,905**
1,244,531	**-3,907,588**	**10,916**	**1,299,697**	**1,565,925**	**2,275,581**
0	0	0	0	0	0
58,668	0	0	58,668	0	0
58,668	**0**	**0**	**58,668**	**0**	**0**
1,572,210	154,555	270,409	413,829	681,165	52,252
102,894	69,653	5,363	9,280	7,635	10,963
1,675,104	**224,208**	**275,772**	**423,109**	**688,800**	**63,215**
-1,616,436	**-224,208**	**-275,772**	**-364,441**	**-688,800**	**-63,215**

Table 9.2.a

No.	Pos-pos	Posisi Tanggal Laporan / As at date of reporting					
		Saldo	Jatuh Tempo / Maturity				
			< 1 bulan 1 month	> 1 bln s.d. 3 bln 1 - 3 months	> 3 bln s.d. 6 bln 3 - 6 months	> 6 bln s.d.12 bln 6 - 12 months	> 12 bulan 12 months
	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
I	**NERACA / BALANCE SHEET**						
	A Aset / Assets						
	1 Kas / Cash	632	632	0	0	0	0
	2 Penempatan pada Bank Indonesia / Placements with Bank Indonesia	2,300	2,300	0	0	0	0
	3 Penempatan pada bank lain / Placements with Other Banks	11,460	11,410	0	0	50	0
	4 Surat Berharga / Securities	11,020	3,000	0	0	0	8,020
	5 Kredit yang diberikan / Loans disbursed	8,005	1,131	0	3,313	3,353	208
	6 Tagihan lainnya / Other Receivables	0	0	0	0	0	0
	7 Lain- lain / Others	216	105	18	93	0	0
	Total Aset / Total Assets	**33,633**	**18,578**	**18**	**3,406**	**3,403**	**8,228**
	B. Kewajiban / Liabilities						
	1 Dana Pihak Ketiga / Third-Party Funds	26,449	24,782	1,312	340	15	0
	2 Kewajiban pada Bank Indonesia / Liabilities to Bank Indonesia	0	0	0	0	0	0
	3 Kewajiban pada bank lain / Liabilities to other banks	0	0	0	0	0	0
	4 Surat Berharga yang Diterbitkan / Securities Issued	0	0	0	0	0	0
	5 Pinjaman yang Diterima / Loans received	5,934	0	0	0	5,934	0
	6 Kewajiban lainnya / Other Liabilities	0	0	0	0	0	0
	7 Lain-lain / Others	49	49	0	0	0	0
	Total Kewajiban / Total Liabilities	**32,432**	**24,831**	**1,312**	**340**	**5,949**	**0**
	Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca / Difference between Assets and Liabilities in the Balance Sheet	**1,201**	**-6,253**	**-1,294**	**3,066**	**-2,546**	**8,228**
II	**REKENING ADMINISTRATIF / ADMINISTRATIVE ACCOUNT**						
	A. Tagihan Rekening Administratif / Administrative Account Claims						
	1 Komitmen / Commitments	0	0	0	0	0	0
	2 Kontijensi / Contingencies	0	0	0	0	0	0
	Total Tagihan Rekening Administratif / Total Administrative Account Claims	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	B. Kewajiban Rekening Administratif / Administrative Account Liabilities						
	1 Komitmen / Commitments	1,642	405	200	669	368	0
	2 Kontijensi / Contingencies	0	0	0	0	0	0
	Total Kewajiban Rekening Administratif / Total Administrative Account Liabilities	**1,642**	**405**	**200**	**669**	**368**	**0**
	Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening Administratif / Difference Between Administrative Account Claims and Liabilities	**-1,642**	**-405**	**-200**	**-669**	**-368**	**0**
	Selisih [(IA-IB)+(IIA-IIB)] / Difference (IA-IB)+(IIA-IIB)						
	Selisih Kumulatif / Cumulative Difference						

(dalam jutaan rupiah / in millions Rp)

	Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya / As at date of previous year reporting					
		Jatuh Tempo / Maturity				
	Saldo	< 1 bulan 1 month	> 1 bln s.d. 3 bln 1 - 3 months	> 3 bln s.d. 6 bln 3 - 6 months	> 6 bln s.d.12 bln 6 - 12 months	> 12 bulan 12 months
	-9	-10	-11	-12	-13	-14
	1,311	1,311	0	0	0	0
	4,000	4,000	0	0	0	0
	26,174	26,124	0	0	50	0
	11,278	91	0	0	0	11,187
	11,717	993	405	4,586	5,347	386
	470	0	470	0	0	0
	226	173	17	36	0	0
	55,176	**32,692**	**892**	**4,622**	**5,397**	**11,573**
	46,959	44,324	2,284	336	15	0
	0	0	0	0	0	0
	768	138	630	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	5,934	0	0	0	0	5,934
	0	0	0	0	0	0
	56	56	0	0	0	0
	53,717	**44,518**	**2,914**	**336**	**15**	**5,934**
	1,459	**-11,826**	**-2,022**	**4,286**	**5,382**	**5,639**
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	0	0	0	0	0	0
	3,944	310	1,241	1,953	440	0
	3,944	**310**	**1,241**	**1,953**	**440**	**0**
	-3,944	**-310**	**-1,241**	**-1,953**	**-440**	**0**

	NILAI LCR (%) VALUE OF LCR (%)			
	Triwulan I Quarter I	Triwulan II Quarter II	Triwulan III Quarter III	Triwulan IV Quarter IV
	(1)	(2)	(3)	(4)
Bank secara individu **Banks individually**	**154.82%**	**142.71%**	**151.05%**	**114.64%**

(dalam jutaan rupiah / in millions Rp)

No.	Keterangan Description	Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2017 As at date of reporting		Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya As at date of previous year reporting	
		CKPN Individual Individual ILA	CKPN Kolektif Collective ILA	CKPN Individual Individual ILA	CKPN Kolektif Collective ILA
	-2	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Saldo awal CKPN Impairment Losses Allowance - Starting Balance	44,049,683,882	63,651,083,653	33,134,703,748	68,049,409,020
2	Pembentukan (pemulihan) CKPN pada periode berjalan (Net) Establishment (Recovery) of ILA in current period (Net)				
	2.a Pembentukan CKPN pada periode berjalan Establishment of ILA in current period	45,862,694,509	92,564,648,680	28,145,212,896	72,971,023,063
	2.b Pemulihan CKPN pada periode berjalan Recovery of ILA in current period	-	-		
3	CKPN yang digunakan untuk melakukan hapus buku atas tagihan pada peride berjalan ILA used for writing off receivables in current period	198,427,676	(89,886,889,893)	(17,230,232,763)	(78,236,713,980)
4	Pembentukan (pemulihan) lainnya pada periode berjalan Other Establishment (Recovery) in current period	141,397,726	(294,002)		867,365,549
Saldo akhir CKPN **Impairment Losses Allowance - Ending Balance**		**90,252,203,794**	**66,328,548,437**	**44,049,683,882**	**63,651,083,653**

2017
LAPORAN TAHUNAN
ANNUAL REPORT

BANK BNP
A member of MUFG, a global financial group

PT BANK NUSANTARA PARAHYANGAN TBK.

Head Office:
Jl. Ir. H. Juanda No. 95
Bandung 40132, Jawa Barat - Indonesia
Telp : (022) 82560100
Fax : (022) 2514580
SWIFT : NUPAIDJ6

www.bankbnp.com